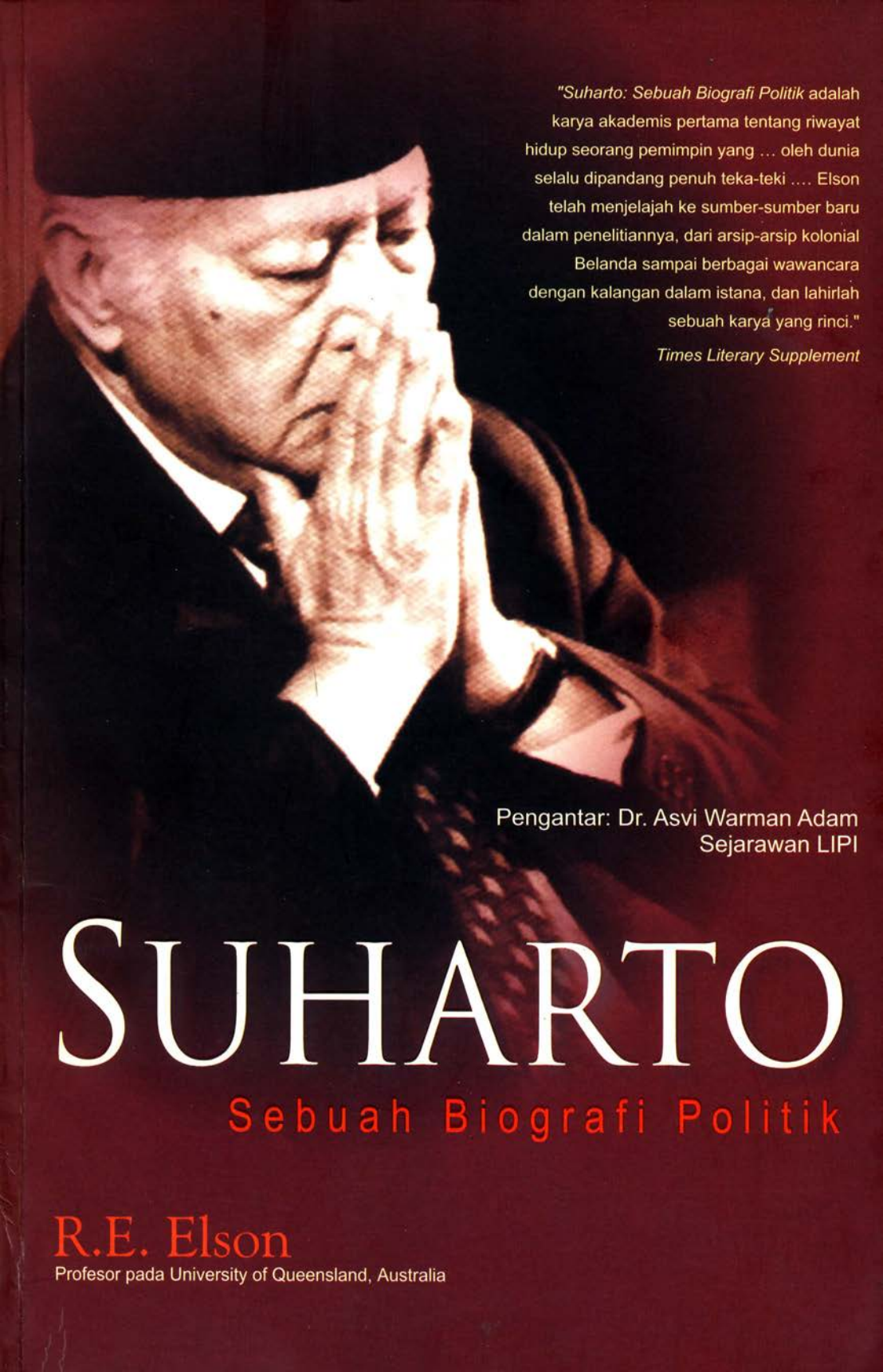

"*Suharto: Sebuah Biografi Politik* adalah karya akademis pertama tentang riwayat hidup seorang pemimpin yang ... oleh dunia selalu dipandang penuh teka-teki .... Elson telah menjelajah ke sumber-sumber baru dalam penelitiannya, dari arsip-arsip kolonial Belanda sampai berbagai wawancara dengan kalangan dalam istana, dan lahirlah sebuah karya yang rinci."

Times Literary Supplement

Pengantar: Dr. Asvi Warman Adam
Sejarawan LIPI

SUHARTO

Sebuah Biografi Politik

R.E. Elson
Profesor pada University of Queensland, Australia

"Buku ini berdiri sejajar dengan sangat sedikit biografi politik yang pernah terbit yang dipersembahkan kepada negarawan dan politisi Indonesia modern. Dalam khazanah bacaan tentang sejarah dan politik Indonesia tidak banyak ditemukan buku-buku semacam itu."

Kompas

"... memberikan sumbangan 'luar biasa' bagi ilmu sejarah dan ilmu politik .... Elson mencoba mengambil pendekatan narrative history yang memusatkan diri pada eksposisi mendetail, penuh nuansa terhadap dialektika, suasana dan lingkungan kompleks dan berubah-ubah dalam kehidupan dan karier Soeharto."

Daniel Dhakidae

"Karya Elson ini berkualitas tinggi. Tidak ada pakar tentang Indonesia atau orang awam yang berminat yang dapat mengabaikan buku ini."

John Monfries
Australian Book Review

"... mendalam, jelas, dan cerdas."

David Reeve
University of New South Wales

"... sebuah buku yang berguna dan tepat waktu ...."

The Journal of Energy Literature

SUHARTO

Untuk Thee Kian Wie
- Seorang Indonesia Sejati

SUHARTO

SEBUAH BIOGRAFI POLITIK

ROBERT EDWARD ELSON

MINDA
Jakarta

© R.E. Elson, 2001

Diterjemahkan dari *Suharto: a Political Biography*, karangan R.E. Elson terbitan Cambridge University Press, Cambridge, 2001

Dilarang mereproduksi atau memperbanyak seluruh maupun sebagian dari buku ini dalam bentuk atau cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit

Penerjemah: Satrio Wahono dan IG Harimoerti Bagoesoka
Penyunting: Eka Santi Sasono dan Robert Edward Elson
Pewajah Isi: ayahNavis

PUSTAKA MiNDA UTAMA
Jln. Condet Raya No. 37
Jakarta 13530

Cetakan I: Agustus 2005 M
Cetakan II: Desember 2005 M

SULITNYA MENILAI SOEHARTO

Oleh **Asvi Warman Adam**[1]

SANGAT SULIT menentukan bagaimana peran Soeharto dalam sejarah (Indonesia) sekarang ini. Setelah ia berhenti jadi presiden tahun 1998, arus sejarah cenderung menanggalkan atribut kebesaran yang telah dilekatkan dan disandangnya selama puluhan tahun. Kehebatannya yang telah difilemkan (*Janur Kuning* dan *Serangan Fajar*) dipertanyakan orang. Ternyata dia bukan konseptor serangan oemoem 1 Maret 1949 yang dibangga-banggakannya itu. Supersemar, yang menjadi *entry point* baginya untuk masuk ke dalam Istana, masih dicari naskah aslinya dan diperdebatkan bagaimana cara mendapatkannya. Ia pun dikaitkan dengan G30S, dengan mengarahkannya sebagai orang yang paling diuntungkan dalam proses kudeta merangkak (1 Oktober 1965 sampai 11 Maret 1966 sebagai satu kesatuan gerakan untuk merebut kekuasaan dari tangan Soekarno).

Dalam arus balik sejarah seperti itu jelas sukar untuk menulis secara jernih mengenai Soeharto. Pandangan Juwono Sudarsono yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan Soeharto

[1]Sejarawan pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

selama berkuasa tidak semuanya buruk, ada juga yang baik bahkan Soeharto juga pernah berjasa, ditanggapi dengan sinis. Bukankah Juwono sendiri pernah jadi menteri pada era Orde Baru?

Tentu timbul pertanyaan apakah pada setiap perubahan pemerintahan terjadi hal serupa? Dengan kata lain, apakah penggantian rezim senantiasa diikuti dengan perubahan historiografi? Tidak selalu demikian. Walaupun dalam kasus peralihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto bentuknya sangat kentara. Pergeseran itu tidak terjadi dalam sekejab mata, tetapi bertahun-tahun. (Para pembantu) Jenderal S mencurahkan segenap daya dan cara untuk sampai ke sana.

Maka Soekarno pun dibunuh dua kali, seperti kata sejarawan Perancis, Jacques Leclerc. Perlakukan keras terhadap beliau menyebabkan kesehatannya semakin memburuk dan akhirnya ia wafat pada 21 Juni 1970. Beberapa hari sebelumnya, tepatnya 1 Juni 1970, peringatan hari lahir Pancasila ditiadakan oleh pemerintah. Tanggal 23 September 1970 Kopkamtib melarang beredarnya ajaran-ajaran Bung Karno dan melarang memperingati hari kematiannya (instruksi 010/KOPKAM/9/1970). Sebelumnya sejarawan militer Nugroho Notosusanto telah mengotak-atik fakta bahwa Soekarno bukan penggali Pancasila dengan dalih bahwa M. Yamin telah mengulasnya lebih dahulu.

Dulu Soekarno memang ditekan habis-habisan kelompok Soeharto, sehingga segala sesuatu yang berbau Soekarno disingkirkan. Ajarannya dilarang. Ia sakit secara fisik dan disakiti secara psikologis. Keadaannya berbeda sekali dengan sekarang. Soeharto memiliki fasilitas kesehatan yang sempurna, dengan puluhan dokter serta fasilitas hukum yang juga komplit dengan belasan pengacara yang keluar-masuk televisi.

TANPA WAWANCARA

Dalam kondisi seperti itulah terbit buku Robert Edward Elson, *Soeharto, Political Biography*, Cambridge UP, Oktober 2001.

Elson yang kini menjadi profesor di Griffith University, Brisbane, sebelumnya telah menulis disertasi *Javanese peasant and the colonial sugar history: impact and change in an east Java residency, 1830–1940* (Oxford UP, 1984). Tahun 1997 ia menerbitkan buku, *The end of the peasantry in Southeast Asia: a social and economic history of peasant livehood, 1800–1900* (Maxmillan). Entah kenapa ia tertarik kepada orang kuat Orde Baru itu, barangkali karena Soeharto adalah anak petani dan bergaya petani ketika berkuasa.

Menurut Elson, Indonesia kelihatannya ingin melupakan Soeharto dan karya-karyanya serta menganggap Orde Baru sebagai suatu penyimpangan dalam perkembangan sejarah negeri ini. Sikap seperti ini dapat dipahami tetapi dianggap Elson "dangkal". Padahal, "Soeharto merupakan tokoh yang amat penting selama abad ke-20 di Asia", tulis Elson. "Secara bertahap, serba hati-hati dan terencana, ia telah membangun Indonesia yang sama sekali baru."[2] Pada bab terakhir dikatakan bahwa Indonesia baru yang diciptakan melalui tahap-tahap pembangunan berencana telah melahirkan kekuatan baru yang menginginkan "reformasi total".

Bab pertama sampai bab lima buku ini berupa kronologi pengalaman Soeharto dari masa kecil, menjadi tentara semasa revolusi, komandan militer di Jawa Tengah, tugas penting tahun 1960–1965, percobaan kudeta. Bab 6 sampai dengan 11 membahas usaha meraih kekuasaan (1965–1968), legitimasi dan konsolidasi (1968–1973), berbagai masalah Orde Baru (1973–1980), ekonomi, politik dan pembangunan (1980–1988), puncak kejayaan (1988–1993), kemerosotan (1993–1998).

Pengalaman Soeharto selama revolusi digambarkan dalam sebuah bab panjang (32 halaman). Arsip Belanda dan koran-koran yang terbit semasa revolusi digunakan sebagai sumber.

---

[2]Meskipun demikian, tentu tidak berarti sejarah tentang Soeharto identik dengan sejarah Indonesia atau sebaliknya sejarah Indonesia adalah sejarah Soeharto. Ini berbeda dengan kasus Singapura, "The Lee Kuan Yew Story as Singapore's History", tulis Hong Lysa (*Journal of Southeast Asian Studies*, 33/3, October 2002).

Namun relatif tidak ada yang baru dalam bab mengenai masa revolusi ini. Operasi gerilya itu sengaja diuraikan agak rinci dengan alasan untuk mengetahui apa yang menyebabkan Soeharto percaya diri (karena pernah berhasil memimpin pasukannya). Tetapi di lain pihak, keterangan yang panjang lebar itu juga menggambarkan betapa berjasanya Soeharto dalam perang melawan Belanda selama revolusi. Niat penulis adalah memahami tindakan sang pelaku sejarah, namun kesan yang timbul bagi pembaca adalah penonjolan kepahlawanan Soeharto.

Di sisi lain memang dapat dimaklumi bagian ini cukup panjang, karena justru bagian ini yang menggunakan arsip primer (Belanda). Jadi, dari sudut metode sejarah, arsip primer ini lebih utama nilainya daripada arsip sekunder yang banyak digunakan pada bab yang lain. Keterbatasan dokumentasi secara umum dan ketidakberhasilan mewawancarai Soeharto secara langsung menyebabkan mungkin Elson sengaja agak berpanjang lebar pada bagian ini.

Mengenai peristiwa 3 Juli 1946 (Soeharto membocorkan ke Istana rencana "kudeta" Mayor Jenderal Sudarsono dan kawan-kawan) disimpulkan bahwa itu merupakan kualitas Soeharto yang menjadi karakternya di kemudian hari, yaitu *"caution, coolness, calculated decisiveness when the time was right"*. Namun, dari sisi lain, bukankah kejadian itu dapat dianggap sebagai pengkhianatan terhadap atasannya sendiri (Mayor Jenderal Sudarsono) atau bahwa segala sesuatu dapat dihalalkan untuk mencapai tujuan?

Sedangkan kontroversi mengenai konseptor serangan 1 Maret 1949, Sultan atau Soeharto, hanya dibahas 1 alinea, tetapi rincian tentang serangan itu sendiri diuraikan dalam 15 alinea dengan mengutip antara lain "sejarah resmi Kodam Diponegoro". Elson juga doyan menyitir buku versi penguasa seperti yang disusun oleh Abdul Gafur, Anton Tabah, Roeder, Nazaruddin Sjamsudin. Sementara itu, mengenai aspek kejiwaan Soeharto, laporan penelitian yang bagus dari dosen psikologi UI, Bagus Takwin, Niniek

L. Karim, Hamdi Muluk, *Soeharto; ramuan kecerdasan dan masa kecil yang liat*, (2001) tidak disinggung sama sekali.

Sejarah itu memang untuk memahami, bukan menilai. Maka penulisnya bisa berujar buku ini ditujukan untuk memahami Soeharto, tetapi jangan salahkan bila orang melihatnya sebagai rangkaian upaya untuk memulihkan nama baik Soeharto. Apalagi buku ini (edisi asli) diluncurkan di CSIS yang merupakan *think tank* awal Orde Baru. Bahkan beberapa bulan sebelumnya telah diadakan seminar serupa di tempat yang sama dengan penulis yang sama.

Selain dari persoalan kontroversial di atas juga terdapat beberapa kekeliruan dalam edisi Inggris buku ini. Misalnya dalam kepustakaan dicantumkan buku Adian Husaini, *Soeharto 1998* yang terbit tahun 1996. Buku Elson ini ditujukan kepada sejarawan ekonomi *Thee Kian Wie—a true Indonesian.* Bolehlah kalau buku tentang industri gula atau transformasi di pedesaan, tetapi biografi politik, apa hubungannya? Lebih tepat buku ini ditujukan bukan kepada Pak *Thee* tetapi Bu *Tien.* Ada pula beberapa kesalahan ketik (dalam buku aslinya, halaman 129) yang biasa dilakukan orang asing yang meneliti Indonesia seperti penulisan *Sabtu Pandito Ratu.*

PENILAIAN YANG JUGA KONTROVERSIAL

Yang menarik pula, tinjauan mengenai buku Elson ini baik di dalam maupun di luar Indonesia beragam bahkan saling bertentangan. Ada dua pendapat berbeda dikemukakan oleh intelektual Indonesia. Daniel Dhakidae menyambut positif buku ini yang dinilainya "memberikan sumbangan luar biasa" bagi ilmu sejarah dan ilmu politik. Biografi ini berawal dari kisah masa kecil Soeharto yang menderita. Soeharto berusia 40 hari ketika diserahkan oleh ibunya kepada bibinya. Umur 5 bulan, ibunya bercerai dengan ayahnya. Dua tahun kemudian, ibunya menjadi istri Atmoprawiro dan melahirkan Probosutedjo. Soeharto pernah

diasuh oleh bibinya—adik bapaknya, yang bersuamikan Prawirohardjo—yang melahirkan Sudwikatmono. Dalam tempo 10 tahun semasa kecilnya, Soeharto sebanyak 6 kali berpindah pengasuh.

Menurut Dhakidae, Elson menyimpulkan bahwa Soeharto adalah seorang yang luar biasa sederhana dan kompleksnya. Ia sangat sederhana, dalam arti bahasa yang dikuasainya hanya Jawa dan Indonesia. Inteligensinya adalah inteligensi yang bersifat kaku, instrumentalis dan strategis. Daya ingatnya tajam dan dilengkapi dengan penguasaan detail yang mengagumkan. Elson menolak pandangan yang hanya menjelaskan tokoh dari sudut kebudayaan Jawa.

Mochtar Pabottingi[3] tidak sependapat dengan Elson yang mengatakan bahwa orang Indonesia melupakan Soeharto. Justru banyak orang tidak melupakan Soeharto seperti terbukti dalam berbagai upaya untuk menggagalkan reformasi.

Belakangan ini wacana untuk mengenang "jasa" Soeharto telah dioperasionalkan. Sopir taxi dan kuli bangunan sering berkomentar, "Dulu waktu Pak Harto, tidak ada bom-bom. Lebih aman. Banyak proyek." Para penyiar televisi yang imut-imut seolah merasa berdosa bila menyebut nama Soeharto tanpa sebutan "Pak". Kalau dulu Soekarno terbunuh dua kali, maka Soeharto seakan tak pernah mati-mati. Namanya tetap "hidup" di Jakarta, di Poso, Ambon, Aceh, Papua, di mana wacana stabilitas bercampur dengan permainan intelijen, target promosi dan dana operasi serta kekerasan.

Menurut Mochtar Pabottingi, Jenderal Soeharto masih bisa berguna bagi negeri ini bila ia dapat mengoordinasikan putra dan kroni-kroninya membantu pemulihan ekonomi nasional. Tetapi kenyataan ia malah hanya mau menyelamatkan diri dan keluarganya saja. Yang paling repot sebetulnya sampai tahun 2000 ia sedikit pun tidak merasa bersalah atas kerusakan negeri ini.

---

[3]Mochtar Pabottingi dalam seminar di CSIS Jakarta, 21 Januari 2002

Puji-pujian datang dari Australia dan Selandia Baru. John Monfries[4] mengatakan bahwa karya Elson berkualitas tinggi dan "No specialist on Indonesia or interested amateur can afford to miss this book". Monfries juga mencatat di dalam buku ini bahwa Suharto menjalankan dua jenis ekonomi secara simultan yaitu pertama, ekonomi pasar yang modern yang diarahkan oleh teknorat dan kedua, ekonomi non-budgeter dengan sponsor jalan-belakang, pencari rente dst. Anehnya sistem ini dapat berjalan cukup lama dengan hasil yang spektakuler. Kelemahan Suharto adalah tidak bisa membedakan antara keuntungan pribadi dengan kepentingan umum. Penulis resensi ini berkesimpulan bahwa aspek positif dari pemerintahan Soeharto akan lebih banyak dicatat dalam penulisan sejarah yang akan datang daripada hari ini.

David Reeve dari University of New South Wales juga beranggapan bahwa karya yang direkomendasikan untuk dibaca ini adalah "mendalam, jelas dan cerdas". Meskipun penulis biografi ini sendiri sempat berujar bahwa kesimpulannya masih "sementara" atau "ini upaya penelitian awal". Elson tidak secara eksplisit menggunakan rumusan teoretis atau model, tetapi lebih cenderung menulis "sejarah naratif yang terperinci dan mengandung nuansa tentang dialektika gagasan, peristiwa dan lingkungan dalam kehidupan dan karier Soeharto". Elson juga memiliki argumen dan pendapat tersendiri tentang asal-usul Soeharto yang gelap. Bagaimana penilaian terhadap Soeharto? Apakah ia sukses? Keberuntungan adalah salah satu faktor kunci. Tetapi Soeharto juga memiliki kemampuan personal yang mengagumkan serta penguasaan keterampilan politik dan strategi yang menghasilkan "pertumbuhan ekonomi yang luar biasa". Terlepas dari semuanya itu, David Reeve berkesimpulan bahwa Soeharto adalah pribadi yang sulit untuk dipahami.

Robert Elson dalam wawancara dengan Peter Mares dari radio Australia ABC, 6 Maret 2002, mengatakan bahwa dari segi

[4]John Monfries, "Summing up Suharto", *Australian Book Review*, March 2002

horison intelektual tampaknya Soeharto dalam berbagai hal bisa dikategorikan sebagai seorang yang hanya memiliki "satu dimensi". Ia bukan orang yang berupaya menemukan arah dan jalan baru dalam pengetahuannya, melainkan menengok kembali ke dalam dirinya atau berdasar pengalaman yang dialaminya sendiri. Bagaimana Elson menilai kepemimpinan dan kesuksesan Soeharto? Hal ini dapat dijelaskan dengan mengetahui pengalaman Soeharto sedari kecil yang bukan apa-apa, hanya seorang biasa yang untuk survival tergantung kepada ketrampilan bernegosiasi, membawakan diri dan memimpin anak buahnya. Kedua, Soeharto juga memiliki keberuntungan luar biasa pada saat-saat krusial dalam perjalanan hidupnya. Ia berada di Yogya semasa revolusi dan memainkan peran menentukan tahun 1965. Ketika ia baru memerintah terjadi *boom* minyak.

Menurut Elson, Soeharto bukan seorang yang kreatif, namun ia sangat piawai dalam memanfaatkan kesempatan dan mengarahkannya menjadi keuntungan. Namun Soeharto juga seorang yang tak kenal ampun. Orang yang disingkirkannya tidak akan kembali lagi ke panggung politik.

Di Selandia Baru, terdapat tinjauan buku yang sangat panjang (10 halaman) mengenai biografi Soeharto yang ditulis oleh Nicholas Tarling[5] yang berjudul "Bapak Pembangunan?" Tarling, meskipun mengakui betapa sulitnya menulis tentang Soeharto saat ini, telah menyampaikan pujian terhadap karya Elson ini yang dianggapnya "lebih manusiawi" dan *"remarkably objective"*. Talenta penulis, menurut Tarling, adalah kekuatannya dalam mengakhiri setiap bab (maksudnya terdapat kesimpulan pada masing-masing bab).

Elson yang tidak puas dengan otobiografi Soeharto seperti yang dituturkan kepada Ramadhan KH tahun 1989 mencoba

[5]Nicholas Tarling, "Suharto: Father of Development", *New Zealand Journal of Asian Studies* 4, 2, December 2002

melacak asal-usul sang mantan presiden. Sebuah upaya—yang berbeda dengan pada masa jayanya Orde Baru—telah dimungkinkan sekarang.

Anthony L. Smith dari Asia-Pacific Center for Security Studies, Honolulu, mengatakan bahwa sebetulnya Soeharto tidak menonjol semasa bersekolah. Ia juga mengulangi aspek asal-usul Soeharto yang gelap itu serta tentang putra-putrinya (*"Soeharto's horrible children"*). Menurut Smith buku ini adalah biografi yang dikerjakan serius bukanlah puja-puji seperti yang ditulis oleh O.G. Roeder. Di dalam bahasa Indonesia juga terdapat buku-buku sejenis seperti yang dikarang oleh Serveas Mario Patty.[6]

Soeharto bukanlah dalang dari G30S/1965, sungguhpun ia bertanggung jawab atas pembunuhan massal yang terjadi setelah itu.[7] Menurut Smith, biografi yang bagus dan mendalam ini hanya memiliki dua kekurangan. Pertama, mengeja nama mantan presiden itu sebagai Suharto, seharusnya Soeharto. Kedua, fokusnya seakan-akan hanya politik yang terjadi di Jakarta, kurang membahas konflik di Aceh dan Papua misalnya.

Kritik yang paling tajam dilontarkan oleh Peter Carey[8] dari Inggris yang sulit menerima kesimpulan Elson "tidak usah diragukan lagi bahwa warisan Soeharto adalah pertumbuhan ekonomi yang luar biasa yang dihasilkan pemerintahannya". Demikian pula dengan pernyataan "begitu besar yang telah dicapainya sehingga

---

[6]Buku yang diiklankan di internet dan dapat dibeli melalui amazon.com itu berjudul 1) *Pak Harto pemimpin Bangsa yang besar pasca Bung Karno*, 2) *Melihat dengan mata hati: jasa-jasa Pak Harto bagi bangsa dan negara*, 3) *Kepemimpinan Soeharto sebagai benchmaring: 19 manajemen Presiden Soeharto*.

[7]Sebetulnya bukan hanya itu yang perlu dituntut kepada rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto, tetapi juga rangkaian pelanggaran HAM sepanjang lebih dari 30 tahun sejak Oktober 1965 (pembantaian setengah juta warga sebangsa), penahanan politik di pulau Buru (1969–1979), pembunuhan di Irian Jaya, Timor Timur, Aceh, Lampung, dan Jakarta (Tanjung Priok, kasus 27 Juli 1996, Trisakti, Semanggi, dst).

[8]Peter Carey, "Indonesia in Transition", *Asian Affaires*, vol 33, no 3, oct 2002

kerusakan karena krisis keuangan 1997–1998 hanya sedikit berpengaruh kepada keseluruhan rekornya". Peter Carey berpandangan bahwa kalau diadakan survei ekonomi Indonesia terhadap lautan utang negara dan swasta, bangkrutnya sistem perbankan nasional dan korupsi yang sudah melembaga, maka penilaian di atas adalah sebaliknya.

Meskipun demikian, ada juga kesimpulan Elson yang akurat seperti "ketika ia meninggalkan gelanggang, *chaos* membuat negeri ini terlihat sulit untuk diurus, semangat Orde Baru tetap langgeng. ... untuk mencapai tujuannya, negara melakukan kekerasan terhadap warga secara periodik dan sistematis". Itulah warisan Soeharto yang sesungguhnya.[]

Isi Buku

UCAPAN TERIMA KASIH - 1

PENGANTAR - 4

Historiografi dalam Menelaah Suharto - 8

LINTAS WAKTU - 11

PETA INDONESIA - 22

PETA PULAU JAWA - 23

1.

PERMULAAN DAN MASA MUDA - 25

Masalah Asal-Usul - 28

Wuryantoro - 32

Dari Sekolah ke Dunia Kerja - 37

Perang - 38

Kesimpulan - 43

2.

PRAJURIT SEMASA REVOLUSI - 45

Mengorganisasikan Perjuangan - 45

Peristiwa 3 Juli - 52

Menjaga Lini - 57
Agresi Militer I - 60
Pernikahan - 62
Renville, Rasionalisasi, dan Gejolak - 63
Peristiwa Madiun - 66
Agresi Militer Belanda II - 70
Perang Gerilya - 72
Serangan Umum 1 Maret 1969 - 78
Persiapan kemenangan - 87
Bulan-bulan terakhir - 94

3.

KOMANDO JAWA TENGAH 1950–1959 - 98

Ke Makasar - 99
Kembali ke Jawa Tengah - 105
Pemberontakan Batalion 426 - 107
Kancah Politik yang Lebih Luas - 112
Ke Solo - 114
Angkatan Darat dan Politik - 116
Komando Divisional - 121
Bisnis Pembangunan di Jawa Tengah—127
Krisis Daerah—137
Angkatan Darat, Sukarno, dan Politik—141
Suharto dan Politik—143
"Pemindahan" —145
Kesimpulan—151

4.

POSISI UTAMA 1959–1965 - 154

Caduad - 159
Kampanye Irian Barat - 162
KOSTRAD: Basis Kekuatan - 173
Politik Kiri - 176
Konfrontasi Terhadap Malaysia - 178
Angkatan Darat, PKI, dan Suharto—188
Menuju 1 Oktober—193

5.

USAHA KUDETA—197

Mengambil Tanggung Jawab—199
Sukarno Menolak, Suharto Berkuasa—205
Politik yang Tegang—211
Jenderal-jenderal yang Terbunuh —213
Suharto dan Kudeta—216
Jalan Ke Depan—231

6.

LANGKAH MENUJU KEKUASAAN, 1965–1968 - 231

Sukarno dan Suharto - 234
Membidik PKI - 237
Memimpin Angkatan Bersenjata - 244
Awal 1966: Titik Balik - 246
Supersemar - 258
Setelah Supersemar - 264
Suharto dalam Kekuasaan Eksekutif - 267
Sidang MPRS - 271
Tim Suharto - 276
Mengakhiri Konfrontasi, Bergabung lagi dengan Dunia - 279
Seminar Angkatan Bersenjata, Bandung, 1966 - 281
Teknokrat, Reformasi Ekonomi, dan Bisnis ABRI - 283
Menuju Posisi Kepresidenan - 289
Memetakan Orde Baru - 301
Partai-Partai dan Pemilu - 308
Presiden Penuh - 311
Kesimpulan - 313

7.

LEGITIMASI DAN KONSOLIDASI 1968–1973 - 316

Kabinet Pembangunan Pertama - 317
Rehabilitasi Ekonomi - 322
Ideologi - 330
Antikomunisme - 333
Mengamankan dan Menguasai Negara - 335

Irian Barat: 'Menentukan Nasib-Sendiri' - *337*
Meningkatnya Kepelikan - *339*
Akhir Sukarno yang Mengenaskan - *341*
Kebijakan Luar Negeri - *342*
Mereorganisasi Angkatan Bersenjata - *345*
Mereorganisasi Partai-Partai - *346*
Golkar dan Strategi Pemilihan Umum - *352*
Struktur Politik Korporat - *361*
Suharto dan Bisnis - *362*
Skandal, Korupsi, dan Kritik - *368*
Jalan Menuju Pemilu Kembali - *381*
Kesimpulan - *383*

8.

MENEGOSIASIKAN PERMASALAHAN ORDE BARU
1973–1983 - 386
Jalan Menuju Malari - *387*
Timor Timur - *402*
Skandal Pertamina - *408*
Mengembangkan Pembangunan - *414*
Skandal Sawito - *416*
Pemilihan Umum, Mahasiswa, dan Keresahan Sosial - *423*
Terpilih Kembali Menjadi Presiden - *432*
Penyempurnaan Korporatisme Otoriter - *439*
Fosko dan Petisi 50 - *441*
Pemilu dan Pemilu-Kembali - *446*
Kesimpulan - *448*

9.

KEJAYAAN—451
Mengamankan Orde Baru: Integritas Korporat - *454*
Aliansi-Aliansi Baru - *468*
Krisis Minyak dan Paradigma Ekonomi Baru - *472*
Anak-Anak Suharto dan Kegiatan Niaga Mereka - *476*
Bagi-Bagi Rejeki yang Semakin Mengental, Korupsi yang Semakin Membengkak - *480*
Yayasan-Yayasan yang Berekspansi - *483*
Di Puncak Kekuasaan - *485*

Pemilihan Umum 1987 - 491
Pemilihan 1998, Sudharmono, dan Tentara - 493
Habibie dan Teknologi - 507
Kesimpulan - 509

10.

KEMEROSOTAN, KEJATUHAN, DAN PERHITUNGAN - 511
Makna Keterbukaan - 512
Terjerumus - 521
Hilangnya Sentuhan Ampuh Suharto - 526
50 Tahun Indonesia Merdeka - 531
Kepentingan Keluarga - 533
Kematian Ibu Tien - 539
Menjadi Pemimpin Internasional - 542
Berkembangnya Kerusuhan - 548
Menuju Krisis - 553
Kerusuhan dan Kejatuhan - 559
Apa yang Membuat Suharto Jatuh ? - 566
Hanya Menunggu - 568
MEmburu Suharto - 570
Kesimpulan - 572

11.

SUHARTO DAN PENINGGALANNYA - 574

DAFTAR SINGKATAN - 598

CATATAN KAKI - 606

BIBLIOGRAFI - 672

INDEKS - 708

Ucapan Terima Kasih

Menelaah tokoh sebesar dan serumit Suharto membuat saya harus berhutang budi pada sejumlah besar orang dan institusi. Australian Research Council memberikan saya sumber daya yang diperlukan untuk berkelana dan membebaskan saya untuk bisa merenung dan menulis dengan tenang. Sejumlah badan kearsipan dan perpustakaan memberikan akses ke koleksi mereka yang kaya dan membantu saya menelusuri semua itu: Central Archievendepot dari Ministerie van Defensie, Rijswijk (terutama S. Martijn), Sectie Militaire Geschiedenis, Koninklijk Landmacht, Den Haag (terutama R.J.H. van Laak), Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Amsterdam (terutama Elly Touwen), Algeemen Rijksarchief, The Hague (terutama Francien van Aanrooij dan Sierk Plantinga), Library of the Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Leiden, Griffith University Library, National Library of Australia (terutama Ralph Sanderson), Menzies Library di Australian National University (terutama George Miller), Monash University Library (terutama Helen Soemardjo), Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jakarta (terutama Paul

Permadi), dan Perpustakaan Centre for Strategic and International Studies, Jakarta. Saya berterima kasih kepada mereka semua atas bantuan yang sungguh-sungguh dan penuh keahlian.

Sejumlah besar orang telah menolong saya selama di Indonesia, Australia, Belanda, Jerman, dan di A.S., dan saya sangat berhutang budi kepada mereka atas kebijaksanaan, keahlian, dan kemurahan hati mereka. Saya menyebutkan mereka, tanpa urutan tertentu, untuk mencatat rasa terima kasih saya kepada mereka: Rosemary Robson, Kresno Adji Djayandaru, Ali Alatas, Anthony Reid, Anton Tabah, Arief Budiman, Ben Anderson, Bill Case, Julia Howell, Andrew MacIntyre, J.D. Legge, Clara Joewono, Daniel Dhakidae, David Jenkins, Deliar Noer, Dewi Fortuna Anwar, Gerry van Klinken, Goenawan Mohamad, Greg Earl, Greg Poulgrain, Hadi Soesastro, alm.Hardi, Harold Crouch, Harry Tjan Silalahi, Hasnan Habib, Herb Feith, Christiane Sie, John Butcher, Kate McGregor, A. Kemal Idris, Ken Ward, Ewan Ward, Kevin Evans, L.B. Murdani, Liem Soei Liong, Linda Reeves, M. Ryaas Rasyid, J.A.C. Mackie, Marzuki Darusman, Merle Ricklefs, Kees van Dijk, Muchtar Pakpahan, Nazaruddin Sjamsuddin, Simone Dennis, Patrick Walters, Philipa McGuinness, Rosemary Robson, Sharon Tickle, Emil Salim, Don Greenlees, Frans Seda, Andi Mallarangeng, Margaret Pearce, Wimar Witoelar, Ramadhan K.H., Rod dan Mita Brazier, Salim Said, Philip Flood, Alan Atwell, Sarwono Kusumaatmadja, Selo Soemardjan, Sri Mulyani Indrawati, Steve Irvine, Subroto, Sumarsono, Aristides Katoppo, Sumiskum, Thee Kian Wie dan Tjoe, Ulf Sundhaussen, Wiryono Sastrohandoyo, Yoga Sugomo, Ikrar Nusa Bhakti, C.P.F. Luhulina, alm. A.M.W. Pranarka, Shigeru Sato, Onghokham, Colin England, Henk Schulte-Nordholt, Akiko Yamada, Honor Lawler, dan juga sejumlah pejabat aktif yang namanya tidak ingin disebutkan.

Segala kesalahan tentu menjadi tanggung jawab saya.

Secara pribadi, saya ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada istri tercinta dan anak-anak saya, Elizabeth,

Charles, Kathryn, Brigid, Jane, Gretchen, dan Jerome, yang sanggup bertahan bersama saya, dan tanpa saya, ketika saya sedang menekuni Suharto.

RE Elson
The University of Queensland
Februari 2005

Pengantar

TATKALA SUHARTO jatuh dari kekuasaan dalam situasi penuh kekerasan pada Mei 1998, Indonesia menghadapi masa depan yang suram dan kacau. Karena begitu lama dia berkuasa dan otoritasnya amat menghunjam pada masa kejayaannya, sulit membayangkan Indonesia dalam format lain selain Orde Baru. Selain itu, saat dia *lengser*, Indonesia tampak bertekuk lutut, lumpuh bukan hanya akibat badai krisis keuangan Asia tahun 1997–1998, melainkan jelas-jelas lebih diakibatkan oleh warisan kelembagaan dan politik Suharto sendiri. Suhartolah, demikian kritik-kritik yang muncul, yang telah menciptakan sistem otoritarianisme negara terlembaga yang begitu tertutup dan menakutkan, mencekoki rakyatnya dengan konsep ideologis Pancasila yang melumpuhkan, dan mengorbankan negaranya demi kepentingan kroni, penjilat, dan anak-anaknya yang busuk. Seruan untuk *reformasi total* yang mengiringi dan menyusul kejatuhannya menjadi bukti betapa mutlaknya dia mendominasi skenario politik, dan betapa panjang dan berlikunya jalan buntu yang kesitulah dia menggiring rakyatnya.

Apa pun segi baiknya di balik pandangan seperti itu seputar warisan Suharto, dan apa pun tudingan moral yang orang lemparkan mengenai cara dan perilakunya, semua itu hanyalah pema-

haman yang bias dan, dalam beberapa hal, dangkal atas signifikansi kekuasaan Suharto yang panjang. Suharto, tak diragukan lagi, adalah salah satu tokoh paling penting di Asia abad ke-20, meski warisan kelembagaannya melemah seiring berlalunya waktu. Menurut seorang pengamat, dalam wilayah kekuasaan domestiknya, "Suharto telah jauh membentuk masyarakat Indonesia dibandingkan tokoh mana pun dalam sejarah negeri itu."[1] Secara tak terduga dan diam-diam, Suharto muncul ke puncak kekuasaan dalam kondisi yang penuh sengketa dan kacau. Perlahan, penuh kewaspadaan dan keteguhan, Suharto membangun satu Indonesia yang sepenuhnya baru, yaitu Indonesia yang memiliki kesadaran akan identitas dan tujuan kokoh dengan perekonomian yang tumbuh pada tingkat (meski ada sedikit gejolak) stabil yang mengejutkan dunia, dan yang membawa rakyatnya menuju tingkat kemakmuran baru. Dengan kesadaran penuh akan tujuannya itu, Suharto menunjukkan tekad baja dan kehendak kuat dalam melaksanakan tugas yang hampir musykil untuk mengubah negaranya yang miskin, terpuruk, terpecah-pecah secara kultural dan politik, menjadi—pada masa jayanya—kisah sukses luar biasa dan teladan memukau bagi negara berkembang lainnya.

Memang prestasi luar biasa dari Suharto adalah ketika dia berhasil menjadikan negara yang begitu menderita dan terpuruk seperti Indonesia terbangun untuk melayani tujuannya. Tampak mengagumkan karena ia dapat melakukannya dalam waktu yang lama. Buku ini berusaha menceritakan kisah bagaimana Suharto melakukan itu semua dan—karena dia menangani sendiri begitu banyak cara bagi terlaksananya bentuk pemerintahan Indonesia modern—juga menggambarkan karakteristik praktik politik Indonesia modern.

Mungkin awalnya sulit diyakini bahwa era Suharto akan bertahan lama ketika ia muncul dari antah-berantah pada usia 44 tahun di masa brutal penuh kekacauan yang dipicu oleh peristiwa 1 Oktober 1965. Meskipun ia menduduki posisi perwira tinggi (pangkatnya adalah mayor jenderal, dan ia menjabat sebagai wakil

dari panglima angkatan darat yang kala itu dijabat oleh Achmad Yani), Suharto dianggap pria yang tenang, introspektif, dan tidak terlalu menonjol. Berlatar belakang Jawa rendahan dan pendidikan terbatas, Suharto memiliki reputasi sebagai perwira lapangan dan pemimpin pasukan yang tangguh dan sukses. Kendati demikian, Suharto tidak begitu memiliki karisma dan bakat politik atau sosial. Dia tampak seperti tipe orang yang bisa ditunggangi kalangan visioner untuk mewujudkan mimpi mereka: Suharto itu keras, bisa diandalkan, tidak banyak mengeluh. Suharto adalah seseorang yang jika diserahi instruksi dan amanat secara benar, dengan tuntas melaksanakan tugas yang diberikan. Singkat kata, Suharto tampaknya bukan tipe pemimpin.

Tetapi terbukti bahwa Suharto menjadi pemimpin. Dia mampu membangun kepercayaan, menunjukkan keahlian terpendam dalam membius dan membujuk, bahkan menunjukkan ketegasan serta keahlian strategis dan taktis pimpinan tertinggi. Keahlian-keahlian ini mengantarkan Suharto ke puncak kekuasaan dan bertahan di sana selama lebih dari tiga dasawarsa. Sebelum usia lanjut, saat ketakutan dan arogansi menjatuhkan dia dari tampuk kekuasaan, tidak terbayangkan Indonesia tanpa kehadiran presidennya yang gemuk-bulat dan selalu tersenyum itu. Terlebih lagi, masa depan negara itu begitu identik dengan keahlian Suharto. Suharto menjadi salah satu pemimpin politik termasyhur dan tersukses di dunia. Dia bisa tenang dan percaya diri berhadapan dengan para pemimpin dunia maupun dengan rakyatnya sendiri.

Pada puncak kekuasaannya, Suharto tetap penuh misteri. Bagi tokoh sepenting dia yang seharusnya kehidupan profesionalnya bulat-bulat terbuka bagi wilayah publik, kemampuannya mengambil jarak dan menolak segala akses kepadanya sangat mengagumkan. Suharto tokoh publik yang paling penuh kebisuan. Tidak ada seorang pun, termasuk kolega kerja terdekatnya, yang tahu pasti apa yang mengendalikan Suharto; tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi reaksi Suharto terhadap situasi tertentu,

apa yang sedang dia pikirkan, atau langkah taktis apa yang sedang dia kalkulasikan di balik mata membaja itu. Kepribadiannya tetap sulit dipahami karena tertutup oleh pesona dan senyum lebar yang telah menjadi ciri khasnya. Suharto terbukti sama misteriusnya bagi wartawan dan bagi para akademisi yang berusaha memahaminya. Ada satu pengamat luar negeri yang mengatakan "presidennya sendiri ... adalah bidang analisis di Indonesia yang paling sulit dan terbatas untuk diakses,"[2] sementara seorang ahli, pada awal 1990-an, menyatakan bahwa "bahkan setelah 25 tahun menguasai rezim Orde Barunya, Presiden Suharto hanya tampil sekilas dalam literatur ilmu sosial di Indonesia."[3]

Berbagai penulis telah menerapkan pendekatan berbeda untuk menembus tembok misteri yang membentengi Suharto. Ada yang memandang bahwa Suharto terdorong ambisi politik dan kebrutalan; demikianlah dalam satu penuturan, "Politik Indonesia sejak 1965 paling cocok dipahami sebagai hasil ambisi totaliter."[4] Dorongan deras Suharto akan kekuasaan di atas segalanya itulah yang menjadi dasar analisis semacam ini. Peneliti lain lebih memilih kebudayaan dan tradisi sebagai kunci analisis terhadap Suharto yang sangat Jawa. Dalam tulisan-tulisan seperti itu, secara umum dikatakan bahwa kebudayaan Jawa adalah "sumber bagi bukan hanya gaya presiden saat ini beserta pemerintahannya, melainkan juga bagi ... konsepsi yang mendasari logika negara Indonesia."[5] Meski berguna, terkadang analisis-analisis kebudayaan ini cenderung menganggap kebudayaan Jawa sebagai "penjelasan menyeluruh bagi perilaku yang kompleks dan misterius".[6] Penulis lain lagi menganggap Suharto sebagai seorang pencipta dan pusat alamiah sejenis patrimonialisme birokratis, sehingga "kekuasaan yang berarti diperoleh melalui kompetisi antarpribadi dalam lingkaran elit yang berada dalam jarak dekat dengan presiden".[7]

Semua pendekatan ini punya kelebihan, tetapi tidak satu pun yang tampaknya bisa membedah kerumitan dan kemisteriusan Suharto. Asumsi dasar buku ini adalah bahwa Suharto bisa dipahami, dan alat analisis terbaik untuk itu adalah sejarah naratif—

yaitu pemaparan mendetail dan bernuansa mengenai dialektika kompleks dan dinamis antara ide, situasi, dan lingkungan dalam kehidupan dan karier Suharto. Jadi, pembaca tidak akan mendapati rumusan atau model teoretis yang mendasari penelitian ini secara eksplisit; yang ada adalah refleksi mengenai bagaimana dan kenapa Suharto memetakan, merundingkan, dan menata perubahan situasi dalam kehidupannya dan bagaimana situasi itu memengaruhinya[8].

HISTORIOGRAFI DALAM MENELAAH SUHARTO

Mengingat posisi sentral Suharto bagi Indonesia dan politiknya—"tidak ada studi mengenai politik Indonesia kontemporer yang boleh melewatkan Presiden Suharto sebagai seseorang yang telah mendominasi kehidupan nasional Indonesia selama 30 tahun"[9]—agak mengejutkan memang dia tidak memiliki biografi yang sistematis. Namun, melacak dan menelaah Suharto bukanlah pekerjaan mudah. Cakupan dan nada dari berbagai sumber mencerminkan kemisteriusan pribadinya, terlepas dari kepopuleran yang kemudian dinikmatinya. Dia sama sekali tidak muncul hingga pertengahan 1940-an, dan kala itu pun hanya sebagai tokoh tak penting dalam drama besar perjuangan revolusioner. Dia hanya sesekali disebut dalam surat kabar, dan namanya secara teratur tercantum dalam laporan intelijen militer Belanda yang tersusun rapi mengenai "perintah peperangan"[10] Angkatan Bersenjata Indonesia. Sosoknya yang kabur dan misterius dalam catatan surat kabar Indonesia 1950-an hampir tidak memberikan informasi sama sekali tentang dirinya. Kemunculannya sebagai tokoh publik—meskipun masih dalam skala terbatas kala itu—hanya dimulai ketika ia memegang peranan utama militer dalam kampanye Irian Barat. Hanya dengan campur tangan sigapnya pada dini hari 1 Oktober 1965-lah Suharto menjadi sosok penting, meski sekali lagi hanya tampak sekilas dalam laporan-laporan saat itu. Setelah itu tentu saja dia terkenal; tidak ada satu hari berlalu tanpa namanya disebut; ia menyalami kepala negara, menyampaikan pidato, atau bercengkerama dengan kolega.

Misteri tetap melingkupi Suharto ketika Orde Barunya mulai menjadi otoriter dan ketika kita lebih banyak mengetahui kegiatannya sehari-hari serta membaca laporan-laporan panjang tentang ucapannya. Ini sebuah misteri yang makin gencar dengan mesin propaganda Orde Baru, yang nyaris dengan sempurna melindungi Suharto dari kritik dan yang, terutama sejak kekuasaan sejatinya dari awal 1980-an, mulai mengangkat dia menjadi tokoh tunggal, jauh, dan heroik. Upaya semacam itu mencapai puncak dalam otobiografinya tahun 1989, *Pikiran, ucapan, dan tindakan saya*[11], di mana dia tampak sibuk dengan dunianya sendiri, di mana ia adalah mata air kebijaksanaan dan sumber arahan sejati Indonesia. Kumpulan enam jilid "catatan hariannya", dari 1965–1993, menyuratkan tugas hagiografis serupa. Namun, upaya Suharto mengagungkan diri tidaklah berjalan dengan sendirinya sebagaimana yang diharapkannya; dalam menampilkan diri yang utuh dan terkontrol, ia tidak memberi kita kesempatan untuk menilik kekuatan sejatinya: kecekatan pikirannya, kehati-hatiannya, kapasitasnya yang luar biasa untuk belajar dari masa lalu pribadinya dan dari orang sezamannya.

Kita tidak mungkin melepaskan diri dari narasi suram laporan Orde Baru guna mendapatkan gambaran sejati Suharto. Sayangnya, tidak ada arsip yang bisa diakses yang mungkin dapat membeberkan pemikirannya serta mekanika dasar politik dan kebijakannya. Ketiadaan ini bisa digantikan dengan, setidaknya sebagian, wawancara (baik wawancara langsung maupun terlapor) dengan orang-orang sezamannya, meski ada juga kesulitannya. Interaksi masa lampau terdistorsi melalui lensa kepentingan masa kini dan kecenderungan alamiah merekaulang masa lalu untuk memperbesar pengaruh objek wawancara (atau, mungkin saja, untuk menghilangkan peran sang obyek). Kesulitannya menjadi lebih besar karena masa di mana penelitian buku ini dilakukan terbagi oleh peristiwa dramatis tahun 1998. Meski diperkirakan bahwa wawancara yang dilakukan pada masa Orde Baru mungkin mengungkap lebih sedikit ketimbang wawancara yang dilakukan

dalam kondisi kebebasan pasca-Suharto, pada kenyataannya, usaha membenarkan diri dan mengambil jarak dari masa lalu bermasalah yang dilakukan oleh banyak pemain elite pada masa pasca-Suharto telah membuat informasi yang didapatkan sama problematisnya. Masalah ini, ungkap seorang akademisi terpercaya, harus ditambah lagi dengan fakta bahwa "politik Indonesia dan perdebatan publik selalu mengandung unsur kebohongan, kurangnya bukti faktual, distorsi disengaja, rekayasa, muka-dua, dan tuduhan tanpa dasar."[12] Untungnya, ada cukup banyak analisis asing bermutu tinggi mengenai Indonesia modern dan kontemporer, baik jenis analisis jurnalistik maupun akademis (sebagian besar karya orang Australia), yang bisa dijadikan bahan rujukan yang baik terhadap hasil wawancara.

Pada akhirnya, sejarawan mesti memandang tumpukan masalah ini dengan kritis dan sensitif, dan melakukan yang terbaik untuk menarik kesimpulan yang seimbang, terukur, dan masuk akal dari hal itu. Saya berusaha mencapai tujuan ini, namun harus dengan rendah hati mengakui keterbatasan pengumpulan data saya (memburu segala sesuatu yang telah ditulis dan dibicarakan tentang Suharto pastilah memerlukan reinkarnasi beberapa kali) dan bahkan keterbatasan kesimpulan saya yang tergesa-gesa. Saya hanya bisa berharap upaya awal untuk menjelajahi signifikansi kehidupan luar biasa Suharto bagi sejarah Indonesia ini, bisa mendorong upaya lain untuk melengkapi dan menilai kepribadian unik ini. Terlepas dari seberapa banyak orang Indonesia ingin melupakan Suharto, tetap saja warisannya yang penting dan berdampak luas tidak akan terlupakan. Orang Indonesia harus berusaha memahami dan berdamai dengan warisan masa lalu sebelum mereka bisa melangkah ke depan.

Sebagai penutup segi teknis: ejaan nama orang Indonesia adalah masalah sulit. Demi kesederhanaan dan konsistensi, saya mencantumkannya di teks (tetapi tidak dalam ucapan terima kasih) sesuai dengan ejaan yang disempurnakan (jadi, Suharto, bukan Soeharto; Selo Sumarjan, bukan Selo Soemardjan).[]

Lintas waktu

1921	
8 Juni	Suharto lahir di Kemusuk (Jawa Tengah) sebagai anak Kertosudiro dan Sukirah
1923	
23 Agustus	Kelahiran Siti Hartinah, calon istri Suharto
1940	
1 Juni	Suharto diterima di sekolah militer KNIL, Gombong; ditugaskan di Batalion XIII di Rampal, dekat Malang; bertugas di Gresik
2 Desember	Suharto diterima di Sekolah Kader Militer, Gombong
1942	
Maret	Invasi Jepang ke Jawa
1 November	Suharto bergabung dengan kepolisian yang diprakarsai Jepang, Yogyakarta
1943	
Oktober	Suharto bergabung dengan Peta; mengikuti kursus komandan peleton, Yogyakarta

1944	
Sekitar April	Suharto mengikuti kursus komandan kompi, Bogor
1945	
17 Agustus	Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
29 September	Datangnya pasukan sekutu ke Jawa
Oktober	Suharto bergabung dengan BKR; terlibat pertikaian dengan pasukan Sekutu
1946	
Januari?	Suharto ditunjuk sebagai letkol dan komandan Resimen III
2–3 Juli	Keterlibatan Suharto dalam peristiwa 3 Juli
12 November	Perjanjian Linggarjati
November	Suharto menjadi komandan Resimen 22, Divisi III (Yogya)
1947	
21 Juli	Agresi Militer I Belanda
26 Desember	Suharto menikahi Siti Hartinah
1948	
17 Januari	Perjanjian Renville
18 September	Pemberontakan Madiun
19 Desember	Agresi Militer II Belanda
1949	
23 Januari	Lahirnya putri pertama Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut)
1 Maret	Serangan umum Yogyakarta
7 Mei	Perjanjian Rum–Van Royen
27 Desember	Penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat
1950	
Januari?	Suharto dipastikan sebagai letkol TNI

26 April	Suharto menjadi komandan Brigade Garuda Mataram, Makassar
17 Agustus	Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia
September	Suharto sebagai komandan Brigade Pangeran Mangkubumi, Yogya
1951	
1 Mei	Lahirnya Sigit Haryoyudanto
15 November	Suharto sebagai komandan Brigade Pragola, Salatiga
8 Desember	Pemberontakan Batalion 426
1952	
Oktober	Peristiwa 17 Oktober
1953	
1 Maret	Suharto sebagai komandan Resimen Infantri 15, Solo
23 Juli	Lahirnya Bambang Trihatmojo
1955	
Februari	Konferensi rekonsiliasi Angkatan Bersenjata di Yogya
April	Konferensi Asia Afrika di Bandung
September	Pemilihan Umum Pertama
1956	
1 Maret	Suharto sebagai kepala staf Divisi Diponegoro, Semarang
September	Suharto memegang komando Divisi Diponegoro
Desember	Kudeta militer regional di Sumatra
1957	
1 Januari	Suharto dipromosikan menjadi kolonel
2 Maret	Proklamasi Permesta di Sulawesi

Maret	Dewan pimpinan angkatan bersenjata mengambil alih di Indonesia Timur
14 Maret	Deklarasi SOB
Mei	Dibentuknya Dewan nasional oleh dekrit darurat
29 November	Referendum Irian Barat di PBB gagal; pengambilalihan usaha Belanda

1958

15 Februari	Proklamasi PRRI
17 Februari	Pemberontakan Permesta

1959

14 April	Lahirnya Siti Hediyati Haryadi (Titiek)
5 Juli	Badan Konstituante dibubarkan; Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali.
9 Juli	Suharto membentuk kabinet beranggotakan 43 orang dan menunjuk dirinya sendiri sebagai perdana menteri
Oktober	Suharto dipindahkan dari komando Diponegoro dan ditempatkan di SSKAD

1960

1 Januari	Suharto dipromosikan menjadi brigadir jenderal
5 Maret	Sukarno membekukan parlemen terpilih
25 Juni	Pembentukan DPR baru tertunjuk
September	Sukarno membentuk MPRS; Suharto menjadi komandan Korps Cadangan Angkatan Darat I
Desember	Suharto sebagai deputi I (operasi) kepala staf angkatan bersenjata

1961

1 Maret	Suharto ditunjuk sebagai komandan Caduad
Juni	Perjalanan luar negeri pertama Suharto
1 Oktober	Suharto sebagai komandan Komando Pertahanan Udara Angkatan Darat

1962

9 Januari	Suharto menjadi komandan Mandala dan dipromosikan menjadi mayor jenderal
23 Januari	Suharto menjadi deputi komandan Wilayah Indonesia Timur
15 Juli	Lahirnya Hutomo Mandala Putra (Tommy)
15 Agustus	Perjanjian penyerahan Irian Barat ke Indonesia
Akhir 1962	Dimulainya Konfrontasi dengan Malaysia

1963

1 Maret	Suharto sebagai komandan Kostrad
Mei	MPRS melantik Sukarno sebagai Presiden Seumur Hidup

1964

23 Agustus	Kelahiran Siti Hutami Endang Adiningsih (Mamiek)

1965

1 Januari	Jabatan deputi komandan pertama Suharto, Kolaga; Indonesia menarik diri dari PBB
1 Oktober	'Upaya kudeta' Gerakan 30 September
10 Oktober	Pembentukan Kopkamtib
14 Oktober	Suharto ditunjuk sebagai komandan angkatan bersenjata, dipromosikan menjadi letnan jenderal
25 Oktober	Pembentukan Kesatuan Aksi Mahasiswa (KAMI)
Oktober	Dimulainya aksi pembantaian

1966

10 Januari	Demonstrasi KAMI dimulai
11 Maret	Supersemar
12 Maret	Terlarangnya PKI
18 Maret	Penangkapan dan pemecatan lima belas menteri kabinet

27 Maret	Kabinet baru yang dikepalai oleh tim beranggotakan enam orang
25 Juli	Kabinet Ampera; Suharto ditunjuk sebagai ketua presidium
28 Juli	Suharto dipromosikan menjadi jenderal
11 Agustus	Normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia
28 September	Indonesia masuk kembali ke PBB
3 Oktober	Kebijakan stabilisasi ekonomi
1967	
10 Januari	Hukum Investasi Asing
22 Pebruari	Sukarno mengalihkan kekuasaan ke Suharto
12 Maret	Suharto ditunjuk sebagai pejabat presiden oleh MPRS
Agustus	Indonesia sebagai anggota pemrakarsa ASEAN
Oktober	Pembekuan hubungan dengan Cina
1968	
27 Maret	Suharto dilantik sebagai presiden
6 Juni	Pembentukan Kabinet Pembangunan I
1969	
1 April	Dimulainya Rencana Pembangunan Lima Tahun I
Juli-Agustus	Referendum di Irian Barat
16 September	Irian Barat menjadi provinsi di Indonesia
22 November	Undang-undang Pemilu disahkan oleh DPR-GR
1970	
Januari	Demonstrasi mahasiswa menentang korupsi
31 Januari	Pembentukan Komisi IV tentang korupsi
21 Juni	Sukarno wafat
6 September	Suharto menghadiri konferensi Gerakan Non-Blok di Lusaka
1971	
5 Juli	Pemilu pertama masa Orde Baru yang dimenangkan Golkar (62,8%)

1973	Munculnya *boom* minyak
8 Januari	Partai-partai Islam melebur menjadi PPP
10 Januari	Partai-partai non-Islam melebur menjadi PDI
23 Maret	Suharto dipilih oleh MPR sebagai presiden untuk kedua kalinya (Sultan Yogyakarta sebagai wakil presiden)
27 Maret	Kabinet Pembangunan II dibentuk
5 Agustus	Kerusuhan anti-Cina di Bandung
1974	
15 Januari	Kerusuhan Malari pada saat kunjungan Perdana Menteri Jepang, Tanaka
1975	
10 Agustus	Pemberontakan UDT di Dili
6 Oktober	Dimulainya perang tertutup Indonesia di Timor Timur
28 November	Fretilin mendeklarasikan kemerdekaan Timor Timur
7 Desember	Invasi resmi Indonesia ke Timor Timur
1976	
3 Maret	Ibnu Sutowo diberhentikan sebagai direktur Pertamina
17 Juli	Timor Timur berintegrasi dengan Indonesia sebagai provinsi ke-27
September	Rencana Sawito terbongkar
1977	
2 Mei	Pemilu kedua Orde Baru: Golkar (62,1%), PPP (29,3%), PDI (8,6%)
1978	
20 Januari	Dibredelnya suratkabar ternama; pasukan dikirim memasuki kampus

22 Maret	Suharto terpilih sebagai presiden untuk ketiga kalinya (Adam Malik sebagai wakil presiden). MPR mengesahkan P-4.
15 November	Devaluasi rupiah
1980	
14 Maret	Wafatnya Hatta
13 Mei	Petisi 50
1982	
18 Maret	Kerusuhan Pemilu, Lapangan Banteng (pawai kampanye Golkar)
4 Mei	Pemilu ketiga Orde Baru: Golkar (64,2%), PPP (28%), PDI (7,9%)
1983	
Maret	Dimulainya penembakan misterius (Petrus)
10 Maret	MPR menjuluki Suharto 'Bapak Pembangunan'
11 Maret	Suharto terpilih sebagai presiden untuk keempat kalinya (Umar Wirahadikusumah sebagai wakil presiden)
16 Maret	Kabinet Pembangunan IV dibentuk
30 Maret	Devaluasi rupiah sebanyak 27,6%
1984	
12 September	Kerusuhan dan penembakan di Tanjung Priok (Jakarta)
1985	
Mei	Semua organisasi masyarakat dituntut untuk mengadopsi Pancasila sebagai dasar tunggal
14 November	Suharto menghadiri rapat FAO di Roma
1986	
12 September	Devaluasi rupiah
9 November	Suharto menobatkan Sukarno dan Hatta sebagai pahlawan proklamasi kemerdekaan

1987

23 April	Pemilu keempat Orde Baru: Golkar (73,2%), PPP (16%), PDI (10,9%)

1988

11 Maret	Suharto terpilih sebagai presiden untuk kelima kalinya
Maret	Kabinet Pembangunan V dibentuk
5 September	Kopkamtib digantikan dengan Bakorstanas
27 Oktober	Deregulasi perbankan
Desember	Timor Timur dinyatakan terbuka

1989

23 Pebruari	Suharto bertemu Menteri Luar Negeri Cina, Qian Qichen
September	Suharto mengunjungi Uni Soviet

1990

8 Agustus	Normalisasi hubungan dengan Cina
16 Agustus	Pidato Suharto tentang demokrasi dan keterbukaan
5 Desember	ICMI dibentuk

1991

April	Pembentukan Forum Demokrasi
Juni	Suharto pergi haji ke Mekah
September	Indonesia dipilih sebagai Ketua Gerakan Non-Blok
12 November	Pembantaian di pemakaman Santa Cruz di Dili, Timor Timur

1992

9 Juni	Pemilu kelima Orde Baru: Golkar (68,1%), PPP (17%), PDI (14,9%)

1993

11 Maret	Suharto terpilih sebagai presiden untuk keenam kalinya (Try Sutrisno sebagai wakil presiden)

Maret	Kabinet Pembangunan VI dibentuk
Mei	Xanana Gusmao dihukum seumur hidup (kelak diringankan menjadi 20 tahun)
Desember	Megawati akhirnya disahkan sebagai ketua PDI
1994	
April	Kerusuhan di Medan
22 Juni	Dibredelnya *Tempo, DeTik,* dan *Editor*
November	Indonesia menjadi tuan rumah konferensi APEC
1995	
18 Desember	Indonesia menandatangani pakta pertahanan dengan Australia
1996	
28 April	Wafatnya istri Suharto, Ibu Tien
20–22 Juni	Megawati digulingkan dari kursi pimpinan PDI (Suryadi dipilih sebagai ketua)
27 Juli	Kerusuhan anti-PDI (Megawati) di Jakarta
Oktober	Hadiah Nobel Perdamaian bagi Uskup Carlos Belo dan Jose Ramos Horta
26 Desember	Kerusuhan anti-Cina di Tasikmalaya
1997	
30 Januari	Kerusuhan anti-Cina di Rengasdengklok
Januari–Februari	Pembantaian Suku Dayak terhadap Suku Madura di Kalimantan Barat
23 Mei	Kerusuhan pemilu di Banjarmasin; kebakaran di pusat perbelanjaan menewaskan lebih dari 100 orang
29 Mei	Pemilu keenam Orde Baru: Golkar (74%), PPP (23%), PDI (3%)
Juli	Awal krisis matauang dan kejatuhan ekonomi yang parah
Juli–November	Kebakaran hutan di Sumatra dan Kalimantan
Oktober	IMF memberikan paket bantuan

Desember	Suharto terserang stroke ringan
1998	
15 Januari	Paket bantuan kedua IMF
11 Maret	Suharto sebagai presiden untuk ketujuh kali (B.J. Habibie sebagai wakil presiden)
Maret	Kabinet Pembangunan VII dibentuk
12 Mei	Empat mahasiswa tertembak mati di Universitas Trisakti
13–15 Mei	Kerusuhan brutal di Jakarta
18 Mei	Tuntutan pengunduran diri Suharto; mahasiswa menduduki DPR/MPR
21 Mei	Suharto mengundurkan diri; Habibie disumpah sebagai presiden
November	MPR menyerukan penyelidikan atas kekayaan Suharto
1999	
7 Juni	Pemilihan untuk DPR dan DPRD
20 Oktober	Abdurrahman Wahid terpilih sebagai presiden (Megawati sebagai wakil presiden)
2000	
April	Suharto dikenakan tahanan kota
29 Mei	Suharto dikenakan tahanan rumah
Agustus	Suharto dikenakan tuntutan korupsi
28 September	Tuntutan dibatalkan karena alasan kesehatan

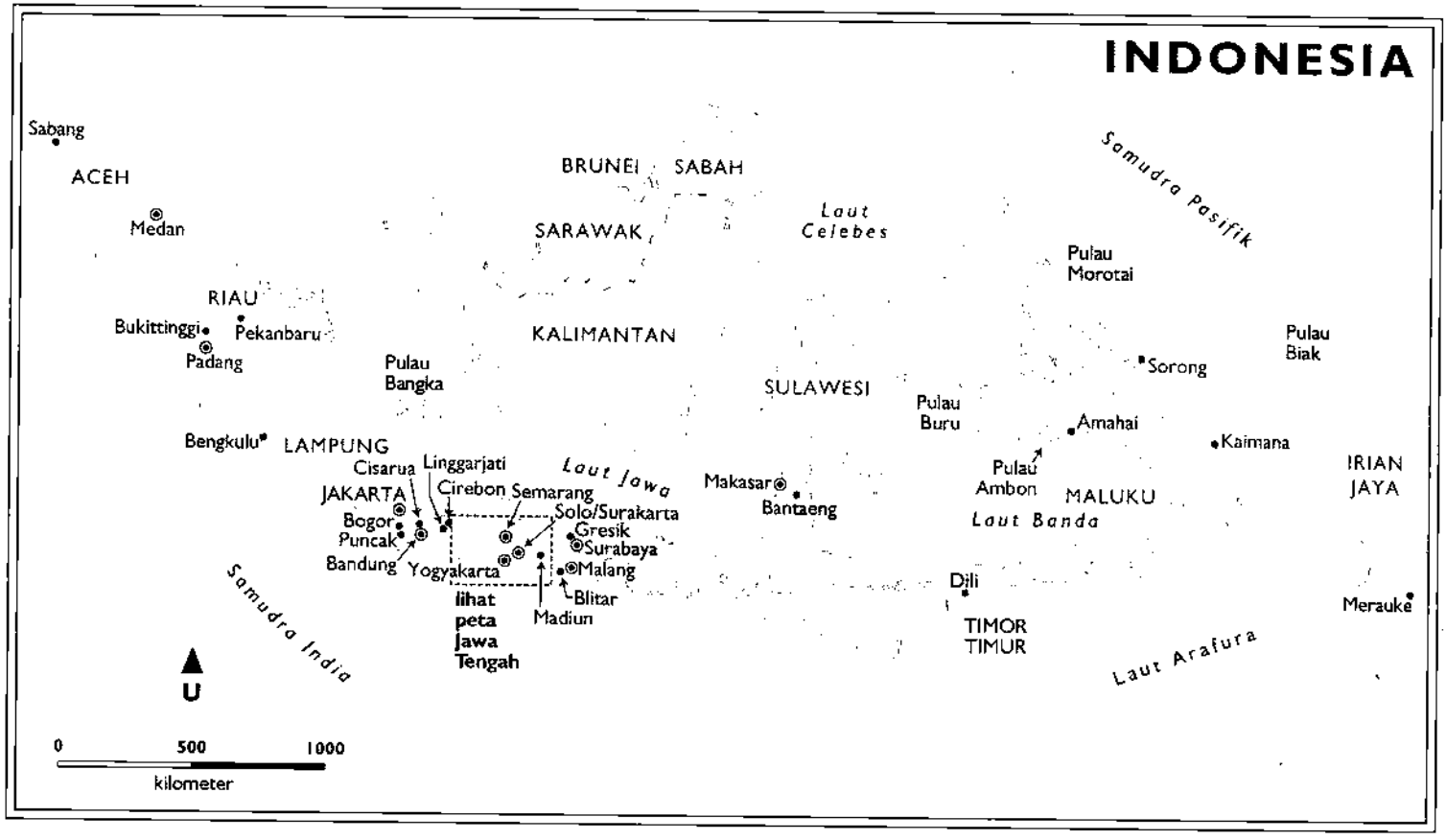
INDONESIA
Sabang
ACEH
Medan
BRUNEI
SABAH
SARAWAK
Laut Celebes
Samudra Pasifik
Pulau Morotai
RIAU
Bukittinggi
Pekanbaru
Padang
KALIMANTAN
Pulau Bangka
Pulau Biak
Sorong
SULAWESI
Pulau Buru
Amahai
Kaimana
Bengkulu
LAMPUNG
Cisarua
Linggarjati
Laut Jawa
Makasar
Pulau Ambon
IRIAN JAYA
JAKARTA
Cirebon
Semarang
Bantaeng
MALUKU
Bogor
Solo/Surakarta
Laut Banda
Puncak
Gresik
Surabaya
Bandung
Yogyakarta
Malang
Dili
Merauke
Samudra India
lihat peta Jawa Tengah
Blitar
Madiun
TIMOR TIMUR
Laut Arafura
U
0
500
1000
kilometer

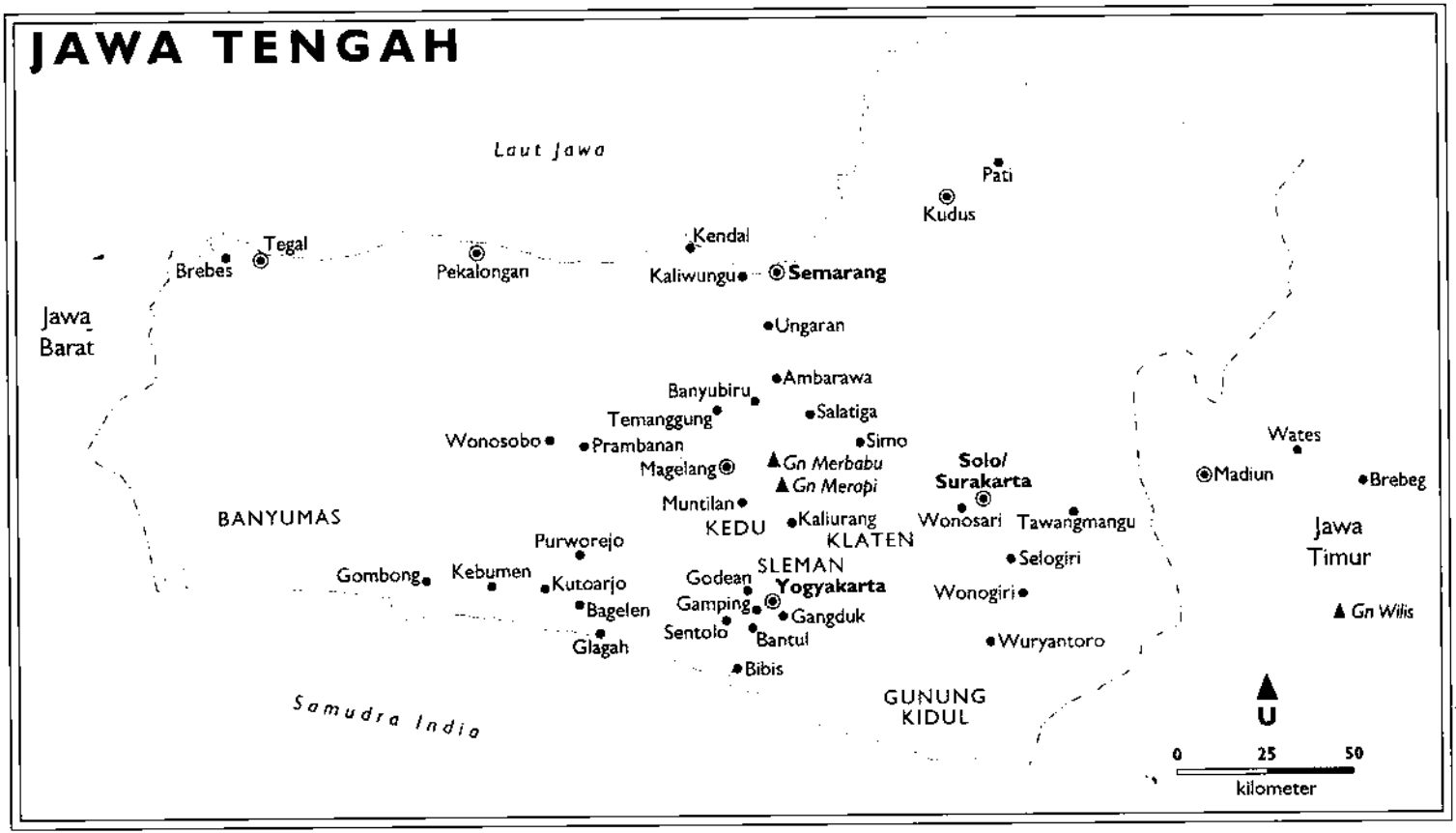
JAWA TENGAH
Laut Jawa
Pati
Kudus
Kendal
Tegal
Brebes
Pekalongan
Kaliwungu
Semarang
Jawa Barat
Ungaran
Ambarawa
Banyubiru
Salatiga
Temanggung
Wonosobo
Prambanan
Simo
Magelang
Gn Merbabu
Gn Merapi
Solo/ Surakarta
Wates
Madiun
Brebeg
Muntilan
BANYUMAS
KEDU
Kaliurang
KLATEN
Wonosari
Tawangmangu
Jawa Timur
Purworejo
SLEMAN
Selogiri
Gombong
Kebumen
Kutoarjo
Godean
Yogyakarta
Wonogiri
Gamping
Gangduk
Gn Wilis
Bagelen
Sentolo
Bantul
Glagah
Wuryantoro
Bibis
GUNUNG KIDUL
Samudra India
U
0
25
50
kilometer

1 Permulaan dan Masa Muda

Masa panjang Suharto sebagai Presiden Republik Indonesia berakhir pada 21 Mei 1998 dalam kontroversi dan kebingungan. Kontroversi dan kebingungan yang nyaris sama dramatisnya mengitari asal-usulnya.

CATATAN RESMI dan semi-resmi menyepakati bahwa Suharto lahir pada 8 Juni 1921, di dusun Kemusuk, wilayah desa Godean, sekitar lima belas kilometer barat Yogyakarta.[1] Dia "adalah seorang anak desa belaka yang lahir dari keluarga petani miskin."[2] Ibunya Sukirah, sebelumnya gadis, berasal dari bagian utara dusun (Kemusuk Lor). Ayahnya yang sudah memiliki dua anak dari perkawinan sebelumnya, bernama Kertosudiro (pada pernikahannya yang kedua, ia mengubah namanya dari Kertorejo, nama yang dia gunakan pada pernikahan sebelumnya; seperti orang Jawa umumnya, Kertosudiro mengubah namanya beberapa kali sepanjang hidupnya untuk menandai perubahan penting dalam hidupnya). Kertosudiro, penduduk bagian selatan dusun, yaitu Kemusuk Kidul, sehari-hari bekerja sebagai pejabat irigasi yang bertanggung jawab membagi air irigasi ke berbagai sawah desa dan memelihara saluran irigasi yang vital bagi pertanian desa. Sebagai imbalan atas tugas ini, Kertosudiro diberikan sepetak kecil lahan kira-kira satu hektar yang disebut *lungguh,* untuk menghidupi keluarganya. (Masa itu, luas tanah sedemikian cukup besar). Dia tidak memiliki tanah lain atau binatang ternak. Dia dan keluarganya hidup di rumah

kecil berdinding bambu dengan atap dari pelepah kelapa, tanpa air ledeng atau listrik. Ayah dan ibu Suharto tidak pernah meninggalkan dusun Kemusuk.

Menurut penerbit otobiografinya, masa kecil Suharto "tidak cemerlang".[3] Lebih gamblang lagi, McDonald mengatakan, "Kehidupan awal Suharto sangat suram," bahkan jika dilihat dengan standar Jawa di mana perceraian menjadi hal umum dan anak-anak dituntut untuk mandiri lebih cepat. Suharto sendiri mengakui bahwa masa kecilnya suram, "saya mengalami banyak penderitaan yang mungkin tidak dialami oleh orang-orang lain."[4] Salah satu penderitaan itu adalah retaknya perkawinan orang tuanya; mereka bercerai hanya lima minggu setelah kelahirannya; Suharto adalah satu-satunya keturunan mereka. Ayahnya menikah lagi dan mendapatkan empat orang anak. Dua tahun setelah perceraiannya, Sukirah juga menikah lagi dengan seorang penduduk Kemusuk bernama Pranomo, akrab dipanggil Nomo, yang kemudian memakai nama Atmoprawiro pada pernikahannya dengan Sukirah. Mereka memiliki tujuh orang anak; yang keempat adalah Probosutejo yang kelak memainkan peran penting dan kontroversial dalam bisnis Orde Baru.

Baik Kertosudiro maupun Sukirah tampaknya tidak berperan langsung dan terus menerus dalam pendidikan Suharto; sang ayah tampaknya menghilang dari kehidupannya—setidaknya selama beberapa waktu—setelah perceraian, sementara sang ibu tampaknya mengalami kesulitan-kesulitan emosional, mungkin karena kelelahan mental, setelah kelahirannya. Sebelum Suharto berumur empat puluh hari, dan sesudah terjadi pertikaian rumah tangga, Sukirah menyepi. Agaknya sebagai bagian dari praktik petapa *ngebleng*, Sukirah menyepi di bagian dalam satu rumah di pedesaan.[5] Setelah menyepi dan tidak bisa ditemukan selama seminggu serta membuat panik keluarga, Sukirah akhirnya ditemukan dalam kondisi yang sangat lemah. Dalam keadaan seperti itu, Sukirah tidak mampu merawat anaknya dan kecil kemungkinan dia akan mampu membesarkannya. Karena itu, Suharto kemudian diberikan kepada kakak

perempuan Kertosudiro (*bude* Suharto), istri Kromodiryo, yang bertindak sebagai bidan saat membantu kelahiran Suharto. Putrinya, Amat Idris, sangat menyayangi Suharto. *Pakde*-nya, Kromodiryo, menjaga Suharto ketika istrinya sibuk—ia tampaknya sangat menyukai Suharto—dan membawa si bocah ke sawah dengannya ketika bertani. Suatu saat, kenang Suharto, kaki Kromodiryo terluka karena sabit yang dia gunakan untuk memotong rumput terlepas dari gagangnya.

Suharto kembali ke rumah ibunya pada usia empat tahun, setelah ibunya menikah lagi. Pada usia yang begitu muda, Suharto mulai sekolah di desa Pulihan yang jaraknya dekat dengan rumah kakeknya dari pihak ibu, tempat sang ibu dan ayah tirinya tinggal. Tetapi ketika sang ibu pindah ke bagian selatan (mungkin untuk membentuk rumah tangga sendiri), Suharto pindah sekolah ke desa Pedes, masuk kelas dari pagi hingga pukul 11, dan melakukan kerja tani seperti menggembala ternak milik kakeknya, Atmosudiro, di siang hari. Dia mengenang satu saat ketika dia membiarkan seekor sapi yang digembalakannya menyeberangi pematang sawah kemudian terperosok ke parit, dan ia menangis karena tidak mampu mengeluarkan sapi itu.

Tahun 1929, saat berusia delapan tahun, Suharto harus pindah ke rumah bibinya dari pihak ayah untuk meneruskan sekolahnya. Bibinya ini menikah dengan Mas Ngabei Prawiroharjo, seorang pegawai pertanian senior di Wuryantoro, satu pemukiman kecil sekitar dua belas kilometer selatan Wonogiri. Perpindahan Suharto agaknya merupakan manuver ayahnya yang tampak tidak senang dengan kondisi Suharto; Sukirah tampaknya begitu sibuk dengan serangkaian kehamilan dari perkawinan barunya sehingga Suharto hanya mendapat sedikit perhatian baik secara fisik maupun materi. Yakin ibu Suharto tidak akan menyetujui langkah itu, Kertosudiro, tanpa sepengetahuan Sukirah, membawa Suharto dengan kereta api, bis, dan mobil sewaan ke Wuryantoro melalui Yogyakarta (tempat mereka berhenti untuk memberikan Suharto baju baru) dan Wonogiri. Anak ini diterima dengan hangat oleh

keluarga barunya, dan kelak, Suharto berucap penuh rasa terima kasih atas pengangkatannya "sebagai putra sendiri"—dan memang sebagai putra tertua—oleh Bapak Prawiroharjo. Keluarga Prawiroharjo sendiri sudah memiliki banyak anak yang salah satunya, Sudwikatmono, kelak menjadi seorang tokoh bisnis yang menonjol di Orde Baru. Di sana, Suharto "diperlakukan sama dengan anak-anak lain"; dia meneruskan pendidikan sekolah dasarnya di Wuryantoro. Tetapi setelah kira-kira setahun, ia dibawa kembali ke Kemusuk oleh ayah tirinya, Atmoprawiro, untuk tinggal bersama ibunya dan bersekolah di Tiwir—sekolah ketiga yang dia masuki di daerah Kemusuk. Hal ini tampaknya sudah direncanakan dan ibunya berjanji bahwa Suharto akan kembali ke Wuryantoro. Dia tinggal di Kemusuk selama kurang dari setahun. Tarik ulur antara orangtua terus berlanjut dan, kali ini, "dengan sepengetahuan Bapak dan Ibu saya," Prawiroharjo membawa Suharto kembali ke Wuryantoro.[6]

MASALAH ASAL-USUL

Kesan tentang bocah petani sederhana yang berjuang sendirian sejak kecil dalam dunia yang kejam dan tanpa belas kasih kelak menjadi dorongan dalam persepsi Suharto tentang dirinya sendiri. Terlebih lagi, kesan ini membentuk satu pandangan dunia moral tertentu, dengan kepentingan-kepentingan terkaitnya, dan akan berakibat luas bagi orang-orang sebangsanya, sebagaimana nanti akan kita lihat. Kisah masa kecilnya ini, seperti diceritakan Suharto ketika sedang berada di puncak kekuasaan, memiliki tujuan politik sebagai sejenis acuan moral utama bagi rakyatnya. Kisah ini menyiratkan kekuatan batin dalam menghadapi akibat buruk takdir; pentingnya mengembangkan pengendalian-diri yang disiplin; dan bahwa kegigihanlah yang akan menang menghadapi situasi yang tidak kompromis. Suharto kelak menyatakan, "Kalau saya mengenang penderitaan sewaktu kecil, sewaktu muda, saya akan bisa sedih dibuatnya. Tetapi kalau di ambil manfaatnya, justru

karena penderitaan saya sejak kecil itulah maka saya menjadi orang. Maka saya menjadi seseorang yang berpikir, yang mempunyai perasaan karena pernah menderita."[7]

Karena alasan inilah, di luar banyak alasan lain, pada 1974 Suharto murka membaca satu liputan dalam majalah sensasional Jakarta, *POP*.[8] Liputan ini menurunkan gosip lama tentang asal-usul Suharto.[9] Diberitakan bahwa Suharto adalah anak dari Padmodipuro, seorang keturunan bangsawan dari Hamengkubuwono II, Sultan Yogyakarta (1792–1810, 1811–12, 1826–28), yang membuang Suharto yang berumur enam tahun beserta ibunya kepada seorang penduduk desa Kertorejo karena Padmodipuro harus menikahi putri seorang kepala distrik berpengaruh. Mengadakan konferensi pers di kantor Bina Graha alih-alih di rumahnya, Suharto memberi pernyataan kepada ratusan lebih wartawan dalam dan luar negeri yang hadir, mencoba membantah gosip yang merebak. Suharto memberi pers keterangan tentang banyak kerabat dan kenalan lanjut usia yang bisa menyatakan bahwa dia berkata benar, "saya inilah anak yang lahir di desa Kemusuk dan memang anaknya petani dari desa Kemusuk." Dalam pandangan Suharto, tuduhan yang dimuat dalam artikel *POP* itu bisa menimbulkan perdebatan dan perbedaan serius dalam masyarakat karena tuduhan itu memberikan "kesempatan yang baik untuk subversi", mengganggu stabilitas nasional, akan mempermalukan bangsa, dan menciptakan ketidakpercayaan kepada pemimpinnya.[10]

Terlepas dari reaksi Suharto tahun 1974, sejumlah aspek kisah kelahiran dan masa kecilnya tetap tidak jelas. Ada beberapa celah dan keganjilan membingungkan dalam versi resmi dan semi-resmi ini.[11] Misalnya saja, Roeder menyebut ibu Kertosudiro sebagai bidan kelahiran Suharto; Suharto sendiri menyebut istri paman dari pihak ayahnya sebagai sang bidan. Versi resmi dari 1973 menyatakan bahwa Sukirah mengucilkan diri selama empat puluh hari setelah perceraiannya, bukan seminggu seperti disebutkan sumber-sumber lain. Lagi, dalam versinya tahun 1974, Suharto menyatakan bahwa ayahnya berpisah dari istri pertamanya dan

menikahi Sukirah; tetapi dalam otobiografinya, Suharto mengatakan bahwa istri pertama ayahnya telah meninggal. Roeder mencatat perpisahan orang tua Suharto pada dua tahun setelah kelahiran Suharto; versi Suharto sendiri mempertegas bahwa perceraian itu terjadi tak lama setelah kelahirannya. Roeder menyiratkan bahwa Suharto dibesarkan di rumah nenek dari pihak ayahnya setelah orangtuanya bercerai: tetapi, Probosutejo mengklaim bahwa Suharto tinggal dengan nenek dari pihak ibu. Roeder memperkirakan kepindahan Suharto untuk tinggal dengan bibinya beserta keluarga pada usia sembilan tahun, sementara genealogi Suryohadi (hal. 8) menunjukkan Suharto berusia delapan tahun. Roeder juga dengan misteriusnya menyebut nama ibu Suharto sebagai Fatimah, bukan Sukirah, satu kesalahan yang muncul karena menurut Suharto, "nama Fatimah adalah nama adik terkecil ibu saya." Roeder menyebut Tiwir sebagai tempat Suharto mulai sekolah; Suharto sendiri kelak menyatakan bahwa ia mulai sekolah di kampung Pulihan. Dalam versi Roeder dan versi otobiografi terbaru Suharto, ayah Suharto membawanya ke keluarga Prawiroharjo di Solo (tempat Suharto kabarnya mengenyam kebahagiaan sejati), dan baru belakanganlah keluarga ini pindah ke Wuryantoro; dalam versi Suharto tahun 1974, perjalanan itu dilakukan langsung ke rumah Prawiroharjo di Wuryantoro. Roeder sama sekali tidak menyebutkan tentang dibawanya kembali Suharto dari Wuryantoro untuk tinggal di Kemusuk.

Ada hal-hal lain yang membutuhkan penjelasan. Misalnya, bagaimana mungkin seseorang yang begitu miskin seperti Kertosudiro bisa mengirim anaknya ke sekolah pada usia yang begitu muda, padahal zaman itu hanya sedikit anak Indonesia yang bisa mengenyam pendidikan formal? Bagaimana mungkin ayah Suharto begitu misterius, yaitu muncul pada saat kelahirannya dan kemudian menghilang (selain saat-saat di mana mereka berdua "bertemu sesekali"), kemudian muncul lagi untuk memenuhi kebutuhan pangan Suharto dengan menyumbangkan seekor kambing, mungkin dengan kedok seorang pemberi sumbangan yang baik. Padahal,

kambing yang diberikan kepada Suharto kecil itu adalah hadiah yang mahal bagi seorang petani miskin yang tidak memiliki lahan.

Tapi setidaknya bisa dipahami bahwa cerita sebenarnya begitu berbeda dari versi resminya. Tampaknya sangat tidak mungkin Suharto begitu dekat berhubungan dengan orang-orang berdarah biru di kraton Yogya. Ini terlepas dari Notosudiro, kakek buyut Suharto dari pihak ibu, memiliki istri seorang wanita yang, berjarak lima generasi, merupakan keturunan dari putra Hamengku Buwono V dari selir pertamanya. Tetapi gambaran kabur ini, ibu yang jelas pencemas, seorang ayah yang menghilang hampir seketika setelah kelahirannya tetapi selalu mengikuti perkembangan anaknya, jelas bersesuaian dengan kesimpulan bahwa Suharto adalah anak tidak sah. Jika kesimpulan ini benar, mungkin saja ayah kandung Suharto adalah orang berada dan jelas bukan seorang pegawai irigasi yang begitu miskinnya sehingga "secara pribadi tidak memiliki sawah sejengkal pun."[12] Ayah kandung Suharto mungkin memiliki jabatan tinggi. Dia mungkin seseorang di luar desa yang sudah merencanakan Kertosudiro untuk memainkan peran ayah—meskipun secara terbatas—dan untuk menjamin perkembangan Suharto. Memang, mantan tetangga dan sahabat dekat Suharto, Mashuri, kelak mengemukakan pandangan bahwa ayah kandung Suharto adalah pedagang keliling keturunan Cina.[13]

Mana pun yang benar—dan dalam pandangan saya, konsep anak haram mungkin merupakan konsep paling menarik—Suharto bukanlah sekadar anak seorang penduduk desa. Meskipun ikut serta dalam kehidupan desa sehari-hari, itu hanya kerja sampingan dari kesibukan utamanya sebagai pelajar; dan kenangan romantisnya terhadap kehidupan pedesaan—memakan belut, menggembalakan ternak—lebih terkesan datang dari seseorang yang mencoba menjadi apa yang bukan dirinya. Pendidikan semacam yang dinikmati Suharto selama bertahun-tahun begitu istimewa dibanding petani Jawa pada umumnya yang menganggap tenaga begitu

bernilai sehingga tidak perlu dibuang dalam kegiatan-kegiatan tak jelas seperti sekolah.

Lalu, apa yang bisa kita simpulkan tentang masa kecil Suharto? Tampaknya logis untuk menyimpulkan bahwa dia adalah anak tidak sah seorang penduduk desa terpandang, mungkin warga desa yang punya hubungan di luar desa, atau seorang kaya yang sering datang dan berinteraksi dengan warga desa. Memang, Suharto pada usia muda dititipkan ke kerabatnya dan dibawa ke luar desa. Kesempatan pendidikan yang dikecapnya begitu istimewa jika dibandingkan standar kehidupan desa pada masa itu. Dari sekitar usia delapan tahun—terlepas dari laporan-laporan belakangan bahwa dia menghabiskan masa mudanya dalam lingkungan desa[14]—segala hubungan dekatnya dengan kehidupan desa segera usai ketika dia ikut dengan keluarga seorang pejabat rendahan Jawa untuk tinggal di kota. Di sini, Suharto memandang kehidupan desa dari perspektif pemerintahan ketika dia menemani Prawiroharjo dalam perjalanan inspeksi.

WURYANTORO

Ketika akhirnya menetap di Wuryantoro, Suharto tampaknya merasakan kemapanan. Dia meneruskan pendidikan sekolah dasarnya (agaknya mengendarai sepeda ke sekolah), mulai melaksanakan ibadah formalnya—meskipun khitanannya ditunda hingga dia berusia empat belas tahun, tampaknya karena kurang biaya—mengikuti barisan pemuda Hizbul Wathon, dan terlihat mengadopsi pola moral ayah angkatnya, Prawiroharjo. Berdasarkan versi yang lebih kemudian, Suharto adalah siswa yang gigih namun tidak pintar; tidak ada gambaran bahwa dia memiliki pandangan tentang dunia yang kompleks selain dari yang dipelajarinya. Malah, semesta batinnya yang terdalam cenderung dekat pada aforisme, sesuatu yang akan mewarnai hidupnya kelak. Sederhananya, dia mengembangkan pandangan bahwa pengetahuan yang bermanfaat

bisa saja terhimpun dalam kumpulan kalimat-kalimat bijak yang abadi dan yang akan berbuah manis jika diikuti. Jadi,

> Pada masa itulah saya mengenal ajaran tiga "aja": "*aja kagetan, aja gumunan, aja dumeh* (jangan kagetan, jangan heran, jangan mentang-mentang).", yang kelak jadi pegangan hidup saya, yang jadi penegak diri saya dalam menghadapi soal-soal yang bisa menguncangkan diri saya. Saya ingat terus akan ajaran leluhur: "*hormat kalawan Gusti, Guru, Ratu lan wong atuwo karo*", hormat kepada Tuhan Yang Maha Esa, guru, pemerintah, dan kedua orang tua." Sampai jadi Presiden saya merasa tidak berubah dalam hal ini. Saya junjung tinggi ajaran itu dan saya percaya akan kebenarannya.[15]

Tuntutan pendidikan Suharto berakibat pada perubahan tempat tinggal. Pada tahun 1931, untuk masuk sekolah tinggi pertama (*schakelschool*) di Wonogiri, dia pindah bersama dengan putra kedua Prawiroharjo, Sulardi, ke Selogiri yang terletak beberapa kilometer di luar Wonogiri. Di sana dia tinggal dengan kerabat lain: kakak tertua Sulardi, Sudiarto, yang telah bermukim di sana. Di Sekolah Hollandsch-Inlandsche (Sekolah Pribumi–Belanda) di Wonogiri, Sulardi pada 1933 mendapat teman sekelas seorang putri kepala distrik baru Wonogiri, R.M. Sumoharyomo. Siti Hartinah, dua tahun lebih muda dari Suharto, menjadi teman bergaul Sulardi. Siti Hartinah kelak menjadi istri Suharto. Menurut Abdul Gafur, penulis biografi Siti Hartinah, keluarga Sumoharyomo membangun hubungan dekat dan kuat dengan keluarga Prawiroharjo ketika pindah ke Wuryantoro sekitar tahun 1937. Suharto mungkin mengenal bakal istrinya pada tahun itu, meski dia baru saja tinggal dengan keluarga Prawiroharjo pada akhir 1930-an.

Setelah melewatkan beberapa waktu di Selogiri, Suharto yang berusia tiga belas tahun kala itu terpaksa harus kembali pindah, dan kali ini ia dibawa ayahnya ke Wonogiri karena adanya perpecahan keluarga di Selogiri. Di Wonogiri, Suharto tinggal

dengan keluarga tanpa anak dari kerabat ayahnya, Harjowiyono, seorang pensiunan pekerja rel kereta api. Dalam situasi ini, Suharto dituntut melakukan banyak pekerjaan di rumah, "seperti kacung,"[16] mulai dari mengepel hingga memasak, belanja, dan menimba air. Kelak Suharto mengenang keadaan ini sebagai masa ketika ia menjadi "seorang pekerja, seseorang yang bisa menjadi mandiri jika diperlukan" dan "belajar banyak hal dengan cepat."[17] Ada indikasi Suharto diperlakukan buruk di rumahnya di Wonogiri, tidak mendapat bayaran, dan hanya diberikan makanan sisa keluarga.

Melalui Pak Harjo, Suharto menjadi akrab dengan guru agama dan mistik Jawa setempat, Kiai Daryatmo, yang juga bekerja sebagai pegawai irigasi. Baik bersama Pak Harjo maupun sendiri kelak, Suharto sering mengunjungi rumah Daryatmo, duduk-duduk di sana, menyerap diskusi dan ajaran yang dia dengar ketika Daryatmo berdiskusi dengan, atau memberikan nasihat kepada, orang-orang yang datang berkonsultasi kepadanya mengenai masalah kesehatan, agama, atau filosofis. Hubungannya dengan Daryatmo istimewa dan jelas; Suharto yang tampaknya sudah condong pada praktik-praktik peribadatan menyerap banyak dasar spiritual darinya. Daryatmo hadir dalam kehidupan Suharto lama sesudah itu; Suharto sering meminta nasihatnya di awal 1950-an ketika dia menjadi komandan resimen di Salatiga, dan juga berkonsultasi secara rutin sesudah masa ini.

Kesulitan dalam mendapat cukup uang untuk pakaian sekolah wajib di Wonogiri adalah alasan, menurut Suharto, untuk pindah lagi. Kali ini Suharto kembali ke Kemusuk di mana dia bersepeda setiap hari ke sekolah menengahnya di sebuah sekolah Muhammadiyah—"pendidikan rendah yang diperluas", sebagaimana disebut Belanda—di kota Yogyakarta, di mana peraturan semacam itu tidak berlaku dan di mana dia bisa menyelesaikan pendidikan menengahnya.[18] Suharto tidak banyak berbicara mengenai pengalamannya di Yogyakarta yang, menurut seorang tokoh nasionalis terkemuka, "terkenal sebagai pusat pergerakan kemerdekaan nasio-

nal" pada akhir 1920-an.[19] Suharto mencatat, di Yogyakarta-lah dia pertama kali mendengar protes pribumi terhadap pemerintah kolonial, dan tentang organisasi rapat untuk membahas berbagai isu. Reaksinya adalah seperti sebagian besar teman-temannya pada masa itu yang tidak begitu tertarik pada gerakan baru yang aneh dan secara potensial berbahaya, "semua ini belum memberi kesan yang kuat kepada saya."[20]

Ketika dia akhirnya menyelesaikan sekolahnya pada 1939, Suharto sudah berusia sekitar tujuh belas tahun. Dalam konteks zaman itu dan jika dibanding teman-temannya, ini adalah tingkat pendidikan yang sangat luar biasa meski secara formal dia tidak mengenyam pendidikan standar tinggi. Selain itu, mencurigakan ketika dia mengatakan bahwa ayahnya dan yang lainnya tidak mampu lagi membiayai pendidikannya, dan bahwa dia akhirnya harus memasuki dunia kerja.[21] Terlepas dari kesulitan yang disebabkan oleh masa kecilnya yang suram, Suharto tampaknya tidak membenci orang-orang yang menelantarkannya dan menunjukkan rasa hormat tulus terhadap mereka; nasib telah menentukan jalan hidupnya sedemikian dan dia sendiri harus menghadapi konsekuensinya:

> Pandangan hidup saya berdasarkan kepada percaya kepada Tuhan, percaya kepada kekuasaan-Nya. Dengan begitu, maka dengan sendirinya saya percaya, bahwa apa pun yang dikehendaki Tuhan, pasti bisa terjadi. Sebab itu, saya percaya kepada takdir manusia yang telah digariskan oleh Tuhan. Segala sesuatu yang memang sudah dihendaki oleh Tuhan terhadap manusia, dan terhadap segala isi alam semesta ini, akan terjadi. Maka, janganlah menyesal, jangan susah; kita tinggal pasrah saja. Tidaklah perlu kita kaget. Sesuatu yang seolah-olah merupakan keistimewaan pada seseorang, tidaklah perlu menyebabkan kita heran. Tidaklah perlu kita terbelalak dibuatnya sampai mengucapkan wah hebat sekali." Kembalikan hal itu kepada Tuhan dan kita "*aja gumunan*" (jangan heran). Kalau kita mempunyai kedudukan, kekayaan, mempunyai sesuatu yang lebih, jangan lupa, bahwa sewaktu-wakyu hal itu

> bisa berubah, kalau Tuhan menghendakinya. Sebab itu "*aja dumeh*" (jangan mentang-mentang) kedudukan tinggi, terus bertindak sewenang-wenang, "aja dumeh" mempunyai kekayaan yang berlimpah-limpah, lalu lupa daratan.[22]

Otobiografi Suharto yang sangat menonjolkan diri sendiri itu hanya sedikit menunjukkan sisi manusiawi masa mudanya. Selain kepahitan pengalaman ketika hidup dengan Pak Harjo di Wonogiri, kita tidak mendapatkan nuansa pengalaman hidupnya sehari-hari: hubungan sosialnya, kegiatannya sehari-hari, kondisi material kehidupannya di berbagai tempat, dan kenangannya akan masa pubertas. Dia menyebutkan bahwa dia bermain sepak bola dengan teman-temannya di Wuryantoro, tetapi hanya menyebut dua nama: Kamin dan Warikin.[23] Warikin kelak mengenang bahwa Suharto bermain sebagai pemain belakang, tetapi sering mencetak gol; "larinya cepat, ototnya keras seperti *penjalin* (rotan), badannya ulet. Dia berani menyerobot bola, mainnya keras."[24]

Kita tidak tahu apa-apa tentang minat sosial lain dan hobi senggangnya, meski kelak dia mengenang ayah asuhnya di Wuryantoro membawa dia berjalan-jalan dalam inspeksi pertanian dan mengecek harga ke pasar mingguan.[25] Kita juga tidak banyak tahu tentang perkembangan kemampuan dan minat intelektualnya—apa yang dia pelajari di sekolah, dan apa yang dia pikirkan tentang pelajaran itu, atau perasaan dia tentang tempat dan sejarah hidupnya. Kita bisa dengan aman menganggap Suharto tidak suka membaca; tidak ada "ratusan buku anak-anak dan novel Belanda" seperti biasa dibaca pemimpin nasionalis terkemuka, Sjahrir, di masa kecilnya.[26] Tidak ada pula kalimat yang menyerupai klaim Sukarno, presiden pertama Indonesia, bahwa "waktuku habis untuk membaca. Ketika anak-anak lain bermain, aku belajar. Aku mengejar pengetahuan jauh di luar pelajaran biasa."[27] Kehidupan sosial dan pendidikan Suharto adalah monobahasa; tidak ada indikasi dia belajar bahasa Belanda atau bahasa lain atau mengetahui sedikit tentang bahasa asing. Memang, dia tidak pernah berinteraksi

dengan orang Eropa meskipun dia menunjukkan minat pada tradisi Eropa; sama halnya, tidak ada kesadaran akan fakta bahwa tanah airnya terjajah.

Penderitaan materiil dan emosional Suharto di masa kecil dan masa muda membentuk pemikiran yang introspektif dan mandiri, atau apa yang disebut McIntyre 'autarki emosional'; "saya selalu ingat pengalaman dan kesusahan saya pada masa kecil," Suharto kelak berujar, "dan sebab itu saya menekankan pentingnya "*tepa-salira*" (hendaknya meraba pada diri sendiri) "[28] Sifat metodenya dalam menelaah dan memecahkan masalah, teka-teki, dan kebingungan jati dirinya adalah dengan melihat ke dalam, bukan ke luar.

DARI SEKOLAH KE DUNIA KERJA

Suharto merasa sulit mendapat kerja di Kemusuk (meskipun dia tidak memberi tahu pekerjaan macam apa yang dia cari), dan memutuskan untuk mengadu peruntungan di Wuryantoro (mungkin kembali tinggal dengan keluarga bibinya), di mana "Saya mengenal banyak orang yang saya harap bisa membukakan pintu untuk saya." Akhirnya, Suharto berhasil mendapat pekerjaan sebagai asisten pegawai di bank desa setempat (*Volksbank*) di Wuryantoro, menemani pegawai bank ketika berkeliling naik sepeda dengan berpakaian Jawa lengkap untuk mengambil aplikasi pinjaman. Meskipun Suharto mengaku tidak menyukai pekerjaan ini dan menganggapnya tidak menarik, dia berhasil menguasai pembukuan dengan belajar pada waktu malam, dan dia juga membaca koran dan majalah yang ada di kantor. Tetapi, suatu musibah yang merusak pakaian seragamnya—yang, anehnya, menurut Suharto tidak mampu diganti oleh bibinya—membuat Suharto kehilangan pekerjaan.[29]

Setelah kehilangan pekerjaan di bank desa, Suharto awalnya berpikiran untuk mendaftar ke angkatan laut Belanda. Namun, menurut penuturannya, dia cepat berubah pikiran ketika mendapati

(mungkin terkenang pengalamannya di Wonogiri) dia akan menempati posisi juru masak. Dia sia-sia mencari kerja di Solo, dan kembali lagi ke Wuryantoro tempat dia bekerja sebagai buruh bangunan. Akhirnya, dan mungkin dengan sedikit rasa putus asa, Suharto berusaha masuk program tiga tahun di KNIL (Angkatan Bersenjata Hindia Belanda).[30] Kesempatan ini mungkin datang karena, dengan ancaman semakin dekatnya perang, Belanda melakukan rekrutmen besar-besaran bagi pasukan kolonial mereka yang berjumlah sekitar 35.000 orang pada 1938. Suharto bukanlah yang pertama, ataupun yang terakhir, yang menjadikan KNIL sebagai pelabuhan terakhir ketika prospek pekerjaan lain terlihat suram. Dia mulai berdinas pada 1 Juni 1940.

Latihan militer dasar Suharto dilakukan di sekolah KNIL di Gombong, sebelah barat Yogyakarta, di mana "kami berlatih dari pagi sampai malam"; dan di mana, kelak Suharto mengaku, dia mulai belajar bahasa Belanda.[31] Setelah lulus kursus pelatihan—"saya lulus sebagai yang terbaik"—terlepas dari kebenarannya, ini bukan kali terakhir Suharto mengklaim seperti itu—Suharto ditugaskan ke Batalion XIII di Rampal, dekat Malang, pada akhir 1940 atau awal 1941.[32] Tugas singkat jaga malam di Gresik membuat dia terkena malaria; setelah kembali ke Malang, dia kembali terkena malaria sehingga harus dirawat di rumah sakit selama dua minggu. Sesudah itu, dia kembali ke Gombong di mana dia diterima di sekolah kader untuk dilatih sebagai seorang sersan.

PERANG

Ketika dia telah menyelesaikan latihan dan dipromosikan sebagai sersan, pecahnya perang membuat Suharto lekat dengan pasukan Cadangan di markas angkatan bersenjata di Bandung. Seminggu setelah Suharto berdinas di Cisarua, Belanda menyerah pada invasi Jepang. Ketimbang berisiko tertangkap dan diinterogasi, Suharto menanggalkan seragamnya dan kembali ke Wuryantoro, di mana

dia kembali terkena malaria. Tak mampu mendapat pekerjaan di Wuryantoro, dia pindah ke Yogyakarta, belajar mengetik, dan kembali terkena malaria; "sungguh, saya dituntut untuk bersabar, penguasaan diri yang kelak pun harus saya lakukan."[33]

Ketika telah pulih, pada 1 November 1942—saat urusan kepolisian secara formal dialihkan dari *Kempeitai* (polisi militer Jepang) ke angkatan kepolisian pendudukan yang baru disusun—Suharto merasa ada kesempatan untuk masuk ke jajaran kepolisian. Mungkin pamannya, Prawiroharjo, menggunakan koneksinya agar Suharto bisa masuk ke sana ketika di Wuryantoro. Ketika sudah terdaftar, dia ditugaskan mengikuti kursus pelatihan tiga bulan di Yogyakarta, di mana dia "lulus sebagai nomor satu" karena pengalaman dia sebelumnya di KNIL. Dia ditugaskan sebagai asisten bagi kepala polisi Yogyakarta, tampaknya dengan pangkat *keibuho* (asisten inspektur). Belum jelas apa yang dilakukan Suharto dalam angkatan kepolisian pendudukan, meskipun dia menyebutkan "karena saya lulus sebagai nomor satu itu, maka saya dijadikan tukang hilir mudik dan kemudian disuruh belajar bahasa Jepang."[34] Karena kepolisian menekankan pada pemeliharaan keamanan dalam negeri ("Urusan Kriminal menjadi soal secundair; jang menjadi primair ialah perkara-perkara, jang mempunyai back-ground politik"),[35] mungkin di sana dia mengecap pengalaman pertamanya dalam bidang intelijen. Mungkin juga, dia hanya berperan sebagai petugas administrasi.

Atas saran kepala polisi Jepangnya, Suharto berusaha bergabung dengan Peta (Pembela Tanah Air), angkatan pertahanan yang dibentuk pada Oktober 1943 yang terdiri atas orang-orang Indonesia yang dilatih Jepang. Niat defensif Peta sebagai garis pertahanan melawan ancaman serangan dan invasi Sekutu tercermin dalam strukturnya yang terbatas dan lokal: Peta pada hakikatnya adalah kumpulan batalion-batalion setempat (*daidan*), tidak memiliki struktur organisasional yang lebih tinggi ataupun kontak horizontal dengan batalion lokal lain. Mungkin, keinginan Suharto bergabung dengan Peta lebih bermotif oportunis ketimbang ideo-

logis; kesadaran politisnya pada saat itu masih minim dan pilihannya didorong oleh kesempatan untuk melanjutkan karier militernya yang sempat terhambat.

Setelah diterima di Peta—dia, klaimnya, adalah satu dari dua yang terpilih dari lima ratus orang pendaftar—Suharto dikirim untuk mengikuti kursus komandan peleton (*shodancho*), yang baginya "sangat berat".[36] Menilik latar belakangnya, dan fakta bahwa kebanyakan calon perwira Peta memiliki latar belakang priyayi atau setidaknya produk eselon atas masyarakat desa, proses terpilihnya ia mungkin menunjukkan adanya patronase; menunjukkan pangkatnya dalam angkatan kepolisian pendudukan; juga memberi bukti lebih jauh akan tingkat pendidikannya—secara umum, kandidat *shodancho* dituntut setidaknya berpendidikan sekolah menengah pertama. Selain itu, karena "kriteria untuk memilih kandidat *shodancho* biasanya adalah kualitas kepemimpinan, semangat dan kebugaran fisik yang terbukti,"[37] Suharto pastilah telah menunjukkan sifat-sifat yang diperlukan Jepang untuk perwira Peta. Mungkin Suharto memulai latihan *shodancho*-nya—sekitar sembilan minggu—pada pertengahan Oktober, sebelum batalion pertama Peta (sebagian besar dari mereka dibentuk di Jawa bagian selatan) dibentuk pada Desember 1943.

Kondisi latihan Peta sangat suram dan berdisiplin tinggi, dan Suharto, yang saat itu "kecil dan kurus", merasa kesulitan di sana.[38] Latihan itu menekankan penggemblengan kebugaran fisik dan kekuatan spiritual serta ketangguhan. Latihan ini adalah "'terjemahan' *bushido* Jepang ke dalam budaya Indonesia. Instruktur Jepang dengan tulus memberi rakyat Indonesia semua nilai ksatria yang pernah diterima para instruktur itu sendiri di sekolah militer."[39]

Untuk pertama kali, terlihat bahwa gagasan dari seorang nasionalis mulai membekas pada diri Suharto muda; memang, dia menggambarkan usaha Jepang dalam indoktrinasi sebagai menciptakan "semangat di antara kami, sebagai putra-putra Indonesia yang ingin membela tanah air."[40] Kapten Jepang yang

bertanggung jawab atas kompi Peta Suharto mengenang Suharto sebagai "seorang pemuda yang sangat patriotik".[41] Perkembangan kesadaran dan nilai dirinya ini bukan sekadar refleksi dari usaha ideologis Jepang yang murni dan kontraproduktif—bahkan saat itu, propaganda Jepang tampaknya telah menimbulkan sinisme dalam dirinya—tetapi, lebih penting lagi, dari sikap rasis mereka terhadap orang Jawa, dan perlakuan buruk yang dia alami dan saksikan secara langsung di bawah penjajahan Jepang ("tumbuh keinginan saya untuk melawan mereka yang menyakiti hati kami itu").[42] Mungkin sama pentingnya—karena, Suharto bukanlah tipe orang yang mendesakkan pemikiran-pemikiran baru dan belum teruji ke lingkungan yang sulit menerima pemikiran-pemikiran itu—adalah fakta bahwa pemikiran-pemikiran seperti itu menjadi umum di pergaulan Suharto. Nugroho menyatakan bahwa "akar [patriotisme] bisa ditemukan dalam ksatria *daidan*."[43] Ini adalah sebuah lingkungan yang sangat disukai Suharto, dan pembahasan mengenai masalah-masalah semacam itu menjadi umum di kalangan prajurit Peta. Karena itu, menurut Kahin, "pada 1944, rata-rata anggota Peta sangat nasionalis, anti-Jepang, anti-Belanda," sementara Anderson menambahkan bahwa "bukan hanya pengalaman berada di Peta, melainkan juga pelatihan ideologis tertentu yang diberikan institusi itu yang membentuk dan mempertajam kesadaran politik nasionalis para anggotanya."[44] Penting pula dicatat bahwa Peta tetap terbebas dari otoritas atau kendali sipil, sesuatu yang kelak tercermin dalam keengganan mantan perwira Peta pada masa revolusi untuk tunduk pada arahan sipil dan juga dalam perkembangan model *positioning* sosio-politik Angkatan Bersenjata dalam masyarakat Indonesia.

Adalah masalah kebijakan bahwa anggota Peta harus mengabdi di daerah mereka masing-masing untuk meningkatkan antusiasme mereka dalam mempertahankan diri dari serangan Sekutu. Jadi, setelah kursus pelatihannya selesai, Suharto—tampaknya berbaju putih perwira Peta, jaket hijau, celana panjang hijau dan topi hijau, lengkap dengan pedang Jepang yang lebih kecil—tiba-

tiba dipindahkan ke sebuah batalion di Wates, dekat Yogyakarta, tempat tugasnya meliputi garis pertahanan pantai di Glagah, selatan Yogya; tidak lama setelah itu, dia diterima di kursus komandan kompi (*chudancho*) di Bogor, pelatihan tiga bulan yang mungkin mulai diikutinya pada April 1944 dan selesai pada Agustus. Setelah selesai, dia dikirim ke markas Peta di Solo, tempat dia sibuk memimpin pelatihan. Kemudian, dia pergi ke Jakarta untuk tugas serupa sebelum kembali ke markas Peta yang ketika itu telah dipindahkan ke Madiun. Selanjutnya, dia ditugaskan ke arah selatan menuju Brebeg ke garis pertahanan tak berpenghuni di lereng Gunung Wilis. Di sana, dia melatih *bundancho*[45] Peta untuk menggantikan mereka yang dieksekusi Jepang setelah gagalnya pemberontakan unit Peta di Blitar pada Februari 1945. Fakta bahwa Suharto dipilih untuk membantu membangun kembali batalion Blitar dalam konteks keprihatinan serius Jepang akan keamanan nasional membuktikan bahwa dia sangat dipercaya oleh pihak Jepang atas kecakapannya dan, mungkin, karena dia tidak memiliki simpati mendalam terhadap korban di pihak Indonesia atas gagalnya pemberontakan itu.

Bulan-bulan terakhir pendudukan Jepang betul-betul sangat berat bagi penduduk Jawa; inflasi membubung tinggi, tingkat pengangguran parah, defisit produksi makanan setempat (sebagian karena kebijakan pengiriman paksa dari Jepang dan bobroknya pemerintahan yang memayungi kebijakan itu), penyakit mewabah, besarnya jumlah tenaga kerja paksa yang menderita, tergerogotinya pasokan makanan dan bahan pokok karena korupsi pejabat, dan kemiskinan di mana-mana. Ada "nuansa krisis moral, nuansa tatanan tradisional yang terguncang, dan nuansa pelanggaran nilai-nilai moral."[46] Praktik (bukan kebijakan) otonomi ketat di tingkat kabupaten dalam hal pasokan makanan menyuburkan budaya korupsi dan pasar gelap. Mungkin adalah pengalaman pertama Suharto dalam mendapatkan sumber pasokan sendiri buat pasukannya sekaligus upaya pertamanya di pasar.

Di Brebeglah Suharto pertama kali mendengar berita tentang menyerahnya Jepang, juga tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta oleh para pemimpin nasionalis, Sukarno dan Mohammad Hatta. Proklamasi, yang dilakukan secara tergesa-gesa pada dini hari 17 Agustus oleh—setelah dibujuk-bujuk—Sukarno–Hatta dan merebut kesempatan bersejarah yang diberikan dengan menyerahnya Jepang, kelak menjadi tonggak periode perubahan penting dan terkadang kacau dalam kehidupan rakyat Indonesia. Suharto, sebagaimana akan kita lihat, sangat terpengaruh; kelak dia mengenang reaksinya kala itu, "Wah, ini artinya panggilan."[47] Keterlibatannya secara dekat dengan organisasi yang disponsori Jepang memberi beberapa petunjuk tentang pemikiran sosial politiknya. Menurut Kahin, ketika membahas anak muda Indonesia berusia antara 15 dan 25 tahun, "propaganda Jepang, yang kerap dan terus-menerus, telah meninggalkan bekasnya. Propaganda ini mempertajam dan mengobarkan sentimen nasionalis mereka. Hanya sedikit yang mengembangkan orientasi pro-Jepang, namun banyak yang mengembangkan nasionalisme militan yang ekstrem dengan bias anti-Barat yang emosional dan kuat yang terkadang berujung pada kebencian mendalam."[48] Anderson berbicara, namun secara agak berlebihan, tentang aspek-aspek romantis teatrikal gaya politik penjajahan Jepang;[49] mungkin politik itu memiliki dampak emosional terhadap Suharto; semakin teguh dalam dirinya hasrat untuk berjuang keras demi satu ideal nasionalis yang telah diakrabinya di tahun-tahun sebelum perang.

KESIMPULAN

Pada akhir pendudukan Jepang di Jawa, Suharto yang berusia 24 tahun hanyalah seorang anggota yang agak menjanjikan dari satu pasukan sukarelawan yang acak-acakan. Dengan sedikit pengecualian, dia menghabiskan seluruh hidupnya dalam kungkungan beku pedesaan dan kota kecil di Jawa tengah bagian selatan. Dia mengenyam pendidikan yang lama namun tidak menyenangkan,

dan lebih banyak belajar dari pergaulannya dengan Daryatmo ketimbang dari guru formalnya. Tetapi, dia menikmati aktivitasnya dan cukup mampu menarik perhatian atasannya, kehidupan resimen di barak dan medan perang memberi arahan hidup baginya serta rasa aman dan tujuan yang tidak dimilikinya sebelum itu. Suharto juga telah dipengaruhi sedemikian rupa oleh ide-ide Jepang tentang pengabdian terhadap negara, di mana mungkin hanya orang yang terdoktrinlah yang bisa memahaminya. Suharto berada pada posisi bagus untuk dapat mengambil manfaat nyata dari kekuatan lebih besar yang kelak membentuk takdir yang menanti negara dan bangsanya.[]

2 Prajurit Semasa Revolusi

SELAMA MASA panjang jabatan kepresidenannya, Suharto menjadikan perang Republik Indonesia terhadap agresi Belanda dari 1945 hingga 1949 sebagai simbolisme penting bangsa. Namun, secara keseluruhan, peran pribadinya dalam revolusi tidaklah begitu penting, terlepas dari apa yang diupayakan para sejarawan Orde Baru, dan juga Suharto, untuk memolesnya.[1] Tetapi, seperti kebanyakan orang segenerasinya, visinya mengenai bagaimana Indonesia seharusnya terbentuk secara fundamental oleh perjuangan yang kompleks dan multisegi di masa revolusi, baik militer maupun politik, internal maupun eksternal. Perjuangan yang kompleks dan multisegi itu, seperti dikatakan Feith, merupakan "pengalaman pokok bagi orang-orang yang terlibat secara aktif di dalamnya,"[2] dan bagi Suharto, pengalaman ini kelak terbukti di tahap-tahap paling subur dalam hidupnya.

MENGORGANISASIKAN PERJUANGAN

Tidak lama setelah takluknya Jepang pada 15 Agustus 1945, kekuatan Jepang di Jawa memulai proses mengatur urusan-urusan

militer untuk menyongsong datangnya pasukan Sekutu. Suharto, seperti prajurit Peta lainnya, dikeluarkan dari Peta; persenjataan dan perlengkapannya diambil oleh Jepang. Mungkin karena bingung dan tak pasti akan arah rangkaian kejadian yang demikian cepat ini, Suharto kembali ke Yogyakarta untuk tinggal dengan seorang kerabat. Namun, dia terperangkap dalam gejolak euforia pascaproklamasi—dan ini bukan terakhir kalinya Suharto memanfaatkan kejadian-kejadian di mana dia tidak ikut andil namun kemudian memetik keuntungan darinya. Ia terlibat antara lain dengan sekelompok mahasiswa sekaligus aktivis, pejuang, dan intelektual yang dipimpin Dayno dan bermarkas di sekitar daerah Pathuk, Yogya. Salah satu anggota kelompok ini adalah satu tokoh yang kemudian terkenal yaitu Syam Kamaruzzaman, yang kelak berperan penting dalam "upaya kudeta" 1965.[3] Pada saat yang nyaris sama, Suharto membantu mengumpulkan mantan teman-temannya di Peta untuk membentuk satu unit tempur semacam kompi di bawah kepemimpinan Umar Slamet, mantan *chudancho* di Bantul, dengan Suharto menjabat sebagai deputinya. Kelompok ini mungkin bagian dari kekuatan yang lebih luas, "organisasi pemuda yang militant dan bersifat militer" dan dengan komposisi keanggotaan meliputi anak-anak sekolah: Barisan Penjagaan Umum yang didirikan Slamet, Siswondo Parman, dan Sudharto tak lama setelah proklamasi.[4]

Organisasi ini segera bergabung ke BKR (Badan Keamanan Rakyat) cabang Yogyakarta yang didirikan oleh pemerintah sebagai angkatan quasi polisi pada 22 Agustus. Pada 5 Oktober 1945, pemerintah akhirnya memberanikan diri membentuk kekuatan militer terstrukturnya sendiri untuk menggantikan unit-unit BKR yang bingung akan peran dan fungsi mereka, serta tidak terkontrol dari atas; mengambil langkah lanjutan membentuk angkatan bersenjata Indonesia: TKR (Tentara Keamanan Rakyat).[5] Terlepas dari formalitas semacam itu, kekuatan bersenjata pribumi tetap bersifat lokal, teritorial, tak terkoordinir, miskin persenjataan, dan tidak begitu terkendali dari pusat. Banyak dari kelompok ini berbentuk

laskar rakyat yang berkembang secara spontan, yaitu kelompok-kelompok paramiliter tambahan yang bersifat liar dan lokal, yang tidak berada di bawah kontrol yang lebih sistematis dan lebih luas, dan yang di Yogya dibentuk "sebagian besar atas inisiatif Sultan Yogyakarta."[6] Yang lainnya adalah sayap paramiliter yang baru dibentuk, milik organisasi politik seperti Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia) atau Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia).

Upaya dari Kepala Staf Umum, Urip Sumoharjo, untuk menciptakan satu hierarki yang tertib dan efisien tidak sejalan dengan kekuatan bawah yang membentuk lembaga-lembaga sesuai dengan keinginan mereka. Upaya Urip ini lebih bertujuan menyusun bentuk seperti yang dibayangkannya dan memberi otoritas kepada pihak-pihak yang muncul karena dukungan umum. Bukan kebetulan bahwa bentuk formal Angkatan Darat telah berubah begitu banyak dan menyeluruh pada bulan-bulan pertama masa perjuangan. Kekuatan bersenjata Indonesia saat itu digambarkan sebagai "kumpulan massa yang terdiri atas berbagai kelompok bersenjata yang tumbuh dari bawah di atas dasar loyalitas pribadi dan pengalaman bertempur."[7]

Tugas mendesak yang diemban angkatan bersenjata seperti itu adalah untuk mengambil persenjataan dan peralatan dari pihak Jepang. Suharto mengaku telah memimpin sejumlah serangan dengan tujuan seperti ini di sekitar Yogyakarta, dan cukup menuai sukses.[8] Serangan ini termasuk peperangan pada 7 Oktober dengan garnisun Jepang di Kotabaru, di pinggiran timur laut Yogyakarta, yang berakhir dengan menyerahnya Jepang pada kekuatan Republik. Kisah Suharto tentang pengalamannya sebagai pemimpin militer di masa awal perjuangan, seperti kisah-kisahnya kelak, terkesan agak membanggakan diri. Ia menggambarkan dirinya sebagai seorang ahli strategi yang bijak, juga sebagai pejuang yang gagah berani.

Tidak jelas apa yang mendorongnya saat itu. Pengalamannya saat bertugas di angkatan bersenjata kolonial Belanda pada 1940

telah menegaskan minatnya pada hierarki, disiplin, ketertiban, dan persaudaraan yang kental dan tepercaya dalam kehidupan militer. Suharto tahu ia akan cocok dengan kehidupan militer yang memungkinkannya mencurahkan bakat pribadinya. Di masa lalu, ia sudah setia mengabdi kepada militer Belanda dan Jepang meskipun keduanya mengabaikan Indonesia. Motifnya mendaftarkan diri untuk mengabdi pemerintah terkini mungkin lebih bersifat demi kepentingan diri sendiri. Tetapi, sebagaimana telah kita lihat—penanaman ideologi secara gencar di pelatihan Peta dan pengalamannya pada masa perang di Jawa, jelas penting di sini—Suharto, seperti juga banyak teman sejawatnya, terilhami kedekatan emosional dan keluguan terhadap konsep baru Indonesia serta romantisme perjuangan untuk mencapainya. Dalam kasus Suharto, emosi dan hitung-hitungan keuntungan pribadi berjalin-berkelindan dengan rapi.

Secara bertahap, bukan berarti terlepas dari perlawanan serius unsur-unsur bersenjata yang menjunjung tinggi kebebasan mereka, Angkatan Darat mulai mengembangkan sistem organisasi dan praktiknya. Dalam kasus Yogyakarta, perkembangan ini mewujud dalam minggu-minggu pertama Oktober saat pembentukan Divisi IX (Istimewa) yang terdiri atas dua resimen. Divisi ini berada di bawah komando mantan kepala polisi wilayah Yogya dan pialang kekuasaan lokal, yaitu Kolonel Sudarsono tempat Suharto dan unsur-unsur lokal lainnya bergabung membentuk Batalion X. Dalam beberapa minggu setelah proklamasi, jelasnya pada Oktober, tugas Suharto dalam membantu pembentukan dan penataan angkatan bersenjata lokal membuat ia dipromosikan menjadi mayor dan ditugaskan memimpin Batalion X Resimen I yang bertempat di Kotabaru. Kemampuan rekrutmen Suharto dan kemampuannya memimpin gerombolan semacam itu—salah satu rekrutannya adalah seorang siswa sekolah, Y.B. Mangunwijaya, yang kelak menjadi pendeta Katolik dan aktivis ternama di Jawa Tengah—adalah tanda kapasitas kepemimpinannya. Mangunwijaya kelak menggambarkan Suharto pada saat itu dengan kata-kata ini:

> Lho, Pak Harto 'kan mayor. Masih perjaka, anggun, tampan, angker, *performance*-nya enak .... Sebagai pemimpin, beliau itu memang anggun, tenang, tidak pernah 'ngobrol, tidak pernah bersenda-gurau seolah-lah. Meskipun sedang 'ngomong santai dengan para perwiranya, tetap berwibawa. Saya memang terkesan. Cara berpakaiannya juga rapi.[9]

Di Yogyakarta, seperti di belahan lain Jawa pada masa itu, ada akumulasi pergerakan—biasanya diilhami kelompok-kelompok pemuda, bersifat membangkang dan merasa paling benar—untuk mengendalikan simbol-simbol pemerintahan sipil melawan upaya bingung Jepang (yang ingin menegakkan hukum dan ketertiban dan menanti pemulangan mereka kembali) mempertahankan status quo. Pada akhir September 1945, Yogyakarta secara efektif berada di bawah kendali Indonesia. Terlepas dari kasus-kasus pertempuran sengit antara kekuatan Indonesia dan Jepang, otoritas Jepang mau menuruti keinginan Indonesia dan sering kali menyerahkan persenjataan dan perlengkapan kepada Indonesia.

Tentara Sekutu yang tiba di Jawa mengeluarkan kebijakan dengan cakupan terbatas: kebijakan untuk membebaskan tawanan yang ditahan Jepang, untuk melucuti dan memulangkan tentara Jepang, serta untuk menegakkan hukum dan ketertiban sebelum menyerahkan kembali otoritas kepada Belanda. Bagaimanapun, dalam situasi sangat terbatas yang mereka hadapi, tentara Sekutu membatasi diri mereka dengan hanya menduduki kota-kota pelabuhan Jakarta, Semarang, dan Surabaya, dan kemudian maju ke daerah pinggiran di mana sebagian besar kamp penahanan berada. Ketika pasukan Sekutu yang terbatas dan tak terkoordinasi baik itu tiba kali pertama pada 20 Oktober di kota Semarang, Jawa Tengah, mereka juga membawa unsur-unsur Netherland Indies Civil Administration (NICA) yang merupakan tantangan langsung bagi kedaulatan Indonesia sekaligus perwujudan kebijakan Sekutu untuk mengembalikan *status quo ante bellum*. Tim awal Sekutu di Jawa Tengah telah menemukan "bukti kekuatan dan tujuan gerakan nasionalis ... di mana-mana. Tidak ada satu rumah atau

gedung umum yang tidak mengibarkan bendera Indonesia."[10] Upaya Sekutu maju ke daerah pinggiran untuk membebaskan tawanan perang Belanda di kamp-kamp sekitar Ambarawa dan Magelang (di mana 24.000 tawanan perang dan tawanan Belanda diperkirakan berada) mendapat perlawanan bersenjata dari kaum militan Indonesia, termasuk banyak kelompok pejuang liar yang sudah sangat menderita minggu sebelumnya dalam peperangan keras namun gagal melawan pasukan Jepang untuk mengambil alih kendali kota Semarang. Pasukan Sekutu bergerak ke arah selatan secepat mungkin; unit-unit Gurkha merebut Magelang pada 26 Oktober. Tetapi, kegelisahan Indonesia akan niat Sekutu dan gosip mengenai perilaku zalim seorang perwira Belanda mengakibatkan pertikaian antara pasukan Sekutu dan kelompok lokal Indonesia; yang disebut terakhir didukung oleh rekan mereka dari selatan. Gencatan senjata yang diprakarsai Presiden Sukarno yang baru terpilih dan menteri-kabinet Amir Syarifudin hanya bertahan hingga pekan kedua November ketika berita peperangan besar di Surabaya menyebabkan ketegangan yang sekali lagi bisa berujung pada pertempuran. Pada 21 November, pasukan Sekutu terpaksa mundur dari Magelang, dan dari Ambarawa pada pertengahan Desember. Batalion X Suharto, bagian dari sebuah resimen yang dipimpin Letkol Sarbini, terlibat dalam pertikaian di Magelang yang memaksa Sekutu kembali ke Ambarawa. Di Ambarawa, sekali lagi Suharto terlibat pertempuran untuk mengusir mundur lebih jauh pasukan Sekutu. Perlawanan Indonesia dalam "masa perang total ini"[11] berhasil memaksa pasukan Sekutu mundur ke kantung Semarang; "seluruh Jawa Tengah diserahkan sepenuhnya ke tangan Republik."[12]

Suharto mengenang bahwa tindakannya dalam pertempuran membuat ia diperhatikan panglima TKR yang baru dilantik, Sudirman, mantan *daidancho* (komandan batalion) Peta. Ketika Sudirman mereorganisasi Angkatan Bersenjata pada akhir 1945, Suharto ditunjuk sebagai komandan Resimen III yang terdiri atas empat batalion dan terletak di daerah Yogyakarta (mungkin di

Wiyoro, sebuah perkampungan sekitar lima kilometer sebelah tenggara kota). Kemudian, mungkin pada awal 1946, ia dipromosikan menjadi letnan kolonel. Terlepas dari sikap umumnya yang apolitis, tampaknya Suharto mendapat inspirasi dari usaha Sudirman membentuk sebuah angkatan bersenjata Indonesia dengan warna populis; angkatan bersenjata yang menekankan keterpisahan lembaga ini dari ulah para politisi sipil, dan yang menjunjung tinggi nilai perjuangan untuk tujuan kemerdekaan nasional.

Pada Maret 1946, kekerasan di bulan-bulan akhir 1945 telah mereda, lini oposisi antara Belanda dan pasukan republik telah terselesaikan, dan pemerintah republik berusaha mencapai solusi diplomatis, bukan militer, terhadap konflik. Pada saat itu, menurut intelijen Belanda, Suharto memimpin Resimen III, Divisi IX (Istimewa), dengan tiga batalion (X, di bawah Mayor Sujono; XX, di bawah Mayor Sarjono; dan XXV di bawah Mayor Basyuni). Resimennya berjumlah sekitar 2.250 orang. Akibat reorganisasi angkatan lebih lanjut yang diumumkan pada akhir Mei 1946, sepuluh divisi Jawa dikurangi menjadi tujuh, dan penggabungan mantan Divisi V (Pekalongan-Kedu) dan IX menghasilkan Divisi III di bawah pimpinan Mayjen Sudarsono dan mengemban tanggung jawab atas Pekalongan, Kedu, dan Yogyakarta; pasukan Suharto dimasukkan ke dalam divisi baru ini. Pada saat yang nyaris sama, pasukan Belanda di Semarang mengambil alih otoritas dari pasukan Sekutu pada 17 Mei 1946. Hal ini mengawali berkembangnya ketegangan dan pertempuran di lini depan dengan usaha setiap pihak mengintai kesempatan dan kelemahan lawan. Brigade T (Tiger) Belanda berusaha maju ke selatan dari Semarang, sebuah peristiwa lain perlawanan bersenjata republik di sekitar Kendal di mana Suharto terlibat dan yang berhasil menghentikan laju Belanda. Suharto dan unit-unit terpilih di bawah komandonya bergerak maju-mundur dari basis mereka untuk menduduki lini depan.

Pada tahun 1946 di saat-saat seperti inilah, Suharto mengetahui ibunya sakit, dan ia mengaku membesuknya sebelum pergi

ke lini depan untuk membendung serangan Belanda.[13] Ketika ibunya meninggal tak lama kemudian akibat tumor perut, Suharto sedang bertugas di lini depan sehingga tidak sempat melihat ataupun berziarah. "Tapi beliau sudah bisa menyaksikan anaknya menjadi seorang Perwira, dan juga menjadi Komandan Batalyon di Yogyakarta."[14] Anehnya, ia mengemukakan dalam otobiografinya bahwa dia "cepat pergi ke desa Kemusuk ke makam Ibu saya,"[15] meskipun sang ibu dikuburkan di kompleks pemakaman keluarga Notosudiro dan Atmosudiro di Gunung Pale.

Sudah ada tanda-tanda reputasi militer Suharto akan menanjak. Pada Desember 1945, kurangnya koordinasi antara berbagai unit tempur selama pertempuran ke selatan Semarang telah menyebabkan terjadinya serangkaian pertemuan di kalangan komandan dan berujung pada pembentukan Markas Pemimpin Perang (MPP). Pada awal Juli 1946, ketika Letkol Sunarto Kusumodirjo mengambil komando MPP, ia memasukkan Suharto sebagai salah satu perwira yang diminta memberi panduan kerja ("jernih dan praktis") untuk digunakan MPP.

PERISTIWA 3 JULI

Oposisi bersenjata Republik terhadap usaha Belanda menancapkan kekuasaan kolonialnya, menutupi perpecahan serius dengan elite politik sipil. Karena sebelumnya dekat dengan Jepang, Sukarno sendiri terpaksa menyerahkan kekuasaan efektif kepada seorang perdana menteri, Sutan Syahrir, ketika Republik yang baru berdiri ini mengadopsi bentuk pemerintahan baru. Di dalam bentuk pemerintahan baru ini, perdana menteri bertanggung jawab kepada badan semi parlemen terpilih: KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat). Tetapi, kekuatan lain yang lebih revolusioner tidak senang dengan sisi konservatif pemerintah republik. Mereka juga tidak menyukai pemerintah yang lebih suka melanjutkan perundingan dengan Belanda yang berusaha kembali, ketimbang mengambil kebijakan perjuangan tak kenal lelah merebut kemerdekaan. Ke-

kuatan semacam itu, yang memiliki pendukung baik di kalangan militer maupun sipil, terpadu dalam diri Tan Malaka, seorang tokoh revolusioner kawakan dari masa kolonial yang kembali ke Hindia Belanda pada 1942. Pada bulan-bulan awal 1946, kelompok di kalangan kekuatan revolusioner itu bersekongkol mencoba memaksa Sukarno mengambil kebijakan yang lebih terbuka: merebut kemerdekaan utuh sesegera mungkin dan, jika perlu, dengan kekerasan.

Suharto tiba-tiba, mungkin secara kebetulan, terkait langsung dalam pertikaian internal bersinambung antara kekuatan-kekuatan radikal ini dan pemerintahan yang terlalu waspada dan ragu-ragu, yang dipimpin Syahrir dan Amir Syarifuddin, yang bertekad mengambil kebijakan mencapai kesepakatan diplomatis dengan Belanda. Dalam perang dunia dan pemikiran ini, Sudirman dan tokoh militer senior lain lebih tertarik pada kubu pertama. Perjuangan yang luar biasa kompleks ini mencapai klimaks dengan diculiknya Perdana Menteri Syahrir di kota Solo, Jawa Tengah, pada malam 27 Juni 1946. Penculikan ini adalah sebuah strategi yang dilaksanakan "atas restu Jenderal Sudirman"[16]—sebagaimana kelak dikemukakan salah satu pendukungnya (Adam Malik, yang kelak menjadi menteri luar negeri Orde Baru). Reaksi keras pemerintah atas penangkapan Syahrir, nyaris membuat ia langsung dibebaskan. Pemerintah kemudian bergerak untuk menangkap dalang penculikan ini, yang salah satunya Sudarsono, yang tampaknya mengagumi pemikiran Tan Malaka dan tokoh militer utama dalam konspirasi anti-Syahrir. Memang, atas perintah Sudarsonolah, mitranya, A.K. Yusuf, komandan Batalion 63 penjaga kota Yogya, menculik Syahrir.

Peristiwa berikutnya, jauh lebih kompleks ketimbang apa pun yang pernah ada. Pesan yang berisi perintah penangkapan Sudarsono dan Yusuf disampaikan kepada Suharto di Wiyoro. Menurut penulis otobiografinya, Suharto menerima dua perintah terpisah: yang disampaikan secara lisan oleh seorang pemimpin pemuda Yogya bernama Sunjoyo, dan yang berupa perintah tertulis

dari Sukarno sendiri. Menurut penuturan ini, Suharto—yang dihadapkan pada tugas berat untuk menangkap komandan terkenal divisinya itu karena tampaknya ia mendukung atau setidaknya bersikap netral dalam peristiwa ini—kemudian menolak dan mengembalikan perintah tertulis ini kepada Sukarno seraya meminta perintah itu dikeluarkan melalui Sudirman. Bagaimana hubungan Suharto dengan Sudarsono tidaklah jelas; mungkin saja ia bersimpati terhadap ide umum gerakan antipemerintah, dan dia jelas merasakan kesetiaan yang kuat kepada komandannya, "pahlawan Yogyakarta pada saat pemuda berperang melawan Jepang."[17]

Namun kesaksian Suharto pada pengadilan Sudarsono tahun 1948, agak berbeda dengan penuturan dalam otobiografinya. Dalam kesaksian itu ia menyatakan, karena sudah mengetahui perintah penangkapan Sudarsono, ia mengadakan rapat para pemimpin batalion yang "secara mutlak" sepakat untuk melaksanakan sendiri penangkapan Sudarsono "dengan kehati-hatian dan kewaspadaan penuh".[18] Suharto mengadakan pengintaian dan patroli untuk "mencegah pertumpahan darah," dan menyarankan sebuah strategi kepada kepala staf divisinya, Umar Joi: strategi yang dapat mempertahankan kesatuan Divisi dan menjamin suksesnya penangkapan Sudarsono dan Yusuf tanpa melukai martabat keduanya. Yusuf dibawa ke Wiyoro oleh Sarjono, salah seorang komandan batalion Suharto. Suharto menjelaskan kepada Yusuf bahwa ia terpaksa menahannya, dan bahwa lebih baik bagi Yusuf untuk tetap di Wiyoro. Melalui Umar Joi, Suharto juga "menyarankan" Sudarsono "beristirahat" di Wiyoro. Ketika Sudarsono tiba, Suharto menjelaskan bahwa ia berniat melindunginya.

Dari kedua kisah ini, yang kedua tampaknya lebih mungkin. Agaknya nyaris tidak mungkin seorang perwira yunior—terutama yang patuh pada tugas—seperti Suharto akan dengan ayal menolak mematuhi perintah presiden. Jauh lebih mungkin ia melakukan tindakan "penangkapan" Sudarsono, mungkin bekerja sama dengan Umar Joi, sambil menunggu mendapat pemahaman lebih jauh akan posisi Sudirman dalam konflik ini dan apa hasilnya. Peng-

alamannya akan kekacauan di pasukan Sudarsono di Wiyoro pada malam 2–3 Juli membuatnya tidak percaya rencana Sudarsono akan sukses. Ketika ia menyadari bahwa Sudirman telah mengambil jarak dari Sudarsono, dan bahwa dukungan bagi kelompok Sudarsono tidaklah kuat di kalangan kelompok bersenjata di Yogya, Suharto segera mengambil posisi mendukung status quo.

Demikianlah keadaannya. Ketika pada 2 Juli Sudarsono meminta perlindungan Letkol Sukandar yang saat itu komandan Resimen IV yang bermarkas di kota, satu batalion dari resimen Suharto menjadi salah satu dari dua unit batalion yang diminta menjaga markas divisi. Berdasarkan usul entah Suharto atau Umar Joi, Sudarsono yang masih merasa tidak aman, mengikuti Umar ke markas resimen Suharto di Wiyoro dengan keyakinan dia akan aman di sana. Sudarsono kemudian pergi ke Solo untuk memenuhi panggilan Sudirman yang gusar dengan tindakan pemerintah menangkapi para anggota komplotan lainnya pada 1 Juli. Terlepas benar atau salah, dari pertemuannya dengan Sudirman, Sudarsono memahami bahwa Sudirman menginginkan dia memastikan pembebasan para anggota komplotan itu dari penjara Wirogunan di Yogyakarta, dan mendesak presiden melakukan perombakan kabinet.

Seperti dikemukakan Suharto, tampaknya ada komunikasi antara Sudirman dan Suharto yang semakin bingung akan rangkaian kejadian yang terbeber di depannya pada malam 2–3 Juli.[19] Sudirman sendiri mungkin telah waspada bahwa Sudarsono dan kaum radikal lainnya telah melangkah melampaui manuver awal mereka ke tingkat yang lebih tinggi dan sulit dibendung. Sudirman juga ingin mengambil jarak supaya tidak dituduh terlalu dekat dengan tindakan mereka. Pandangan Suharto—yang sebelumnya bimbang dan ragu—tentang makna tindakan Sudarsono mulai mengkristal, sesuatu yang hampir pasti disebabkan berita dari Sudirman bahwa dia sendiri tidak ikut andil dalam rencana itu, dan bahwa tindakan itu telah melampaui batas kewajaran.

Ketika kembali ke Yogya sekitar pukul 3 pagi tanggal 3 Juli, Sudarsono memerintahkan pembebasan empat belas tawanan

yang baru saja ditangkap, mengangkut mereka dengan truk, dan mengirim mereka ke markas Wiyoro—tempat Suharto didapati sedang tidur ketika itu—di bawah pengawasan Yusuf. Menjelang malam di markas Suharto itu, ketika Sudarsono sedang sibuk bercakap-cakap dengan Sudirman—tentang aksinya dalam membebaskan tawanan Wirogunan dan melakukan perjalanan ke Yogya untuk menggalang dukungan militer dan melumpuhkan oposisi militer potensial—sekutu sipil Sudarsono bergegas merancang empat proklamasi atas nama Sukarno: pembubaran kabinet Syahrir, penyerahan kekuasaan hankam dari Sukarno kepada Sudirman dan "Dewan Kepemimpinan Politik", dan pembentukan kabinet baru.[20]

Di tengah-tengah kegiatan ini, klaim Suharto kelak, kecurigaannya dipicu oleh perilaku Sudarsono, terutama perintahnya kepada Yusuf untuk menelpon Tawangmangu (tempat Tan Malaka dipenjara) dan untuk menjemput (yaitu menculik) Hatta dan Amir, dan ia menjadi yakin bahwa "mereka itu akan menjalankan tindakan-tindakan yang tidak baik."[21] Ia sendiri pergi ke Yogya untuk memperingatkan Batalion X agar mencegah Yusuf melakukan misi penculikannya. Ternyata, ia terlambat, namun Amir kemudian berhasil lolos dari upaya penculikan dan Yusuf kemudian ditangkap oleh batalion.

Sekitar pukul 7 pagi pada 3 Juli, komplotan penyusun rencana memasuki Yogyakarta dan terus maju ke istana presiden. Sudarsono, tampaknya mengklaim bertindak di bawah otoritas Sudirman, meminta Sukarno menandatangani instrumen yang telah disiapkan. Dalam otobiografinya, Suharto bersikeras bahwa ia memperingatkan Sukarno akan apa yang terjadi; tetapi kenyataan bahwa ia tidak membuat klaim ini dalam kesaksian 1948-nya saat sidang pengadilan komplotan penyusun rencana, membuat orang mengira ia tidak melakukan hal itu. Hasilnya, Sukarno, yang mungkin terus diberi tahu mengenai berbagai peristiwa oleh Sudirman, juga pihak-pihak lain di Yogya yang curiga dan takut akan kegiatan Sudarsono dan Yusuf, merespons dengan menangkap

Sudarsono yang malang, yang dukungan militer baginya gagal terwujud di istana. Suharto sendiri menutup kota Yogyakarta dari kekuatan luar.

Skandal penangkapan Sudarsono membuat kacau Divisi III, terutama masalah calon komandan divisi. Sukarno menempatkan Suharto untuk memimpin Divisi tersebut sementara waktu, mungkin sebagai akibat kesetiaan yang ditunjukkannya kepada pemerintah pada peristiwa-peristiwa awal Juli, dan banyak komandan resimen lain mengajukan diri untuk posisi itu. Karena Suharto menolak untuk menerima komando divisional terus-menerus dan setelah banyak pertikaian dan kebingungan terjadi, posisi itu akhirnya diberikan kepada seorang asing: Kolonel Susalit dari Cirebon. Hal ini terjadi di bawah tekanan para perwira yunior dan bertentangan dengan keinginan Sudirman dan Urip (yang gagal menunjuk perwira senior lain, Mayjen Sudiro). Suharto mungkin sangat lega berhasil lolos dari gangguan kolateral akibat "perlindungannya" terhadap Sudarsono di Wiyoro—pernyataan pers yang mengungkapkan penyesalan mendalam Divisi III atas kebodohan tindakan Sudarsono dan yang ditandatangani Umar Joi sebagai wakil panglima Divisi III, diterbitkan dalam *Kedaulatan Rakyat* pada 8 Juli 1946—dan tidak melihat dirinya akan menjadi perwira senior dalam suasana sekacau itu. Tak pelak lagi, ia mendapat pelajaran berharga dari akhir peristiwa ini: perlunya berhati-hati ketika taruhan tinggi dan garis batas pertikaian tidak jelas, kebutuhan untuk berkomitmen hanya ketika sudah jelas pihak mana yang menang, perlunya tetap tenang di bawah tekanan, perlunya mempertahankan bantuan pihak-pihak antagonis hingga saat-saat terakhir. Demikian halnya, sudah mulai tampak sifat-sifat khas Suharto: berhati-hati, dingin, dan mampu mengambil tindakan penuh perhitungan pada saat yang tepat.

MENJAGA LINI

Mungkin akibat pergolakan internal yang diciptakan peristiwa 3

Juli, pada awal Agustus 1946, Divisi III memiliki bentuk organisasi baru dengan enam resimen terbagi menjadi dua brigade: Brigade VII yang terdiri atas resimen 17 dan 18, dan Brigade VIII yang terdiri atas resimen, 19, 20, 22, dan 23. Tetapi, nama Suharto tidak muncul di posisi komandan regional mana pun dalam laporan intelijen Belanda saat itu. Sebenarnya, namanya tidak muncul sama sekali dalam laporan seperti itu di Perintah Perang Republik hingga 15 November 1946, ketika dia disebut sebagai komandan Resimen 22 Divisi III ('Diponegoro') yang ditempatkan di Yogyakarta; komando resimen itu sebelumnya dilaporkan dipegang oleh Letkol Sukandar. Mungkin saja sebelum pertengahan 1946, intelijen Belanda tidak cukup ekstensif atau efektif untuk memberikan detail jenis ini—laporannya sangat kabur kala itu—tetapi, dari awal Juli hingga Oktober, Sukandar mungkin bertindak atas nama Suharto setelah 3 Juli, dan ini membebaskan Suharto dari tugas komandan sementara Divisi itu, dan dari bekerja sama dan merundingkan dampak peristiwa dengan perwira senior lain.

Pada akhir 1946, Divisi III bertanggung jawab mempertahankan front barat dan barat daya dari serangan Belanda. Resimen 22 Suharto adalah salah satu yang bertanggung jawab atas front barat. Pada awalnya, front pertahanan yang berkekuatan dua batalion terdiri atas kumpulan kompi dari tiga resimen; tetapi karena masalah kepemimpinan, diputuskan kemudian untuk mengirim batalion ketimbang kompi. Kepemimpinan front digilir di kalangan komandan resimen dan bermarkas di Kaliwungu. Front di sekitar Semarang tetap menjadi lokasi bentrokan, meskipun tidak sekeras kasus di pertengahan tahun. Kendati demikian, stabilitas dan rutinisasi telah tercipta di medan itu, ketika Republik dan Belanda mengadopsi sikap yang lebih mengarah pada konsiliasi yang berbuah keberhasilan negosiasi pada November di kota Linggarjati di bukit Jawa Barat—di mana Belanda mengakui otoritas *de facto* Republik di Jawa dan Sumatra dan kedua pihak sepakat bekerja sama untuk membentuk Republik Indonesia Serikat.

Terlepas dari keberhasilan perundingan dan fakta bahwa, menyusul perintah gencatan senjata dari Sudirman pada Februari 1947, "keadaan front [Semarang] agak sepi,"[22] front ini tetap harus dijaga pasukan secara bergiliran dari basis daerah pinggiran mereka. Pasukan Suharto sangat terlibat. Pada awal 1947, Belanda merekam catatan bahwa Resimen 22, Brigade IX, bermarkas di Yogyakarta di bawah komando Suharto, masih terdiri atas tiga batalion: satu batalion (Batalion III) mungkin di Yogyakarta, satu batalion lain (Batalion IV) dengan dua dari seluruh kompinya berada di front Semarang (600 orang ini baru saja ditugaskan), dan batalion ketiga (Batalion VI) lokasinya tidak pasti. Pada pertengahan 1947, Resimen 22 Suharto yang bermarkas di Wiyoro, tumbuh menjadi empat batalion: I, di bawah Mayor Sujono (Yogyakarta); II, di bawah Mayor Sumiyarsono, di Kaliurang; III, di bawah Sarjono, di Tanjungtirto; dan IV, di bawah Basyuni, di Wonosari.

Kondisi di daerah republik sangatlah sulit. Menurut satu laporan intelijen, kondisi inilah yang menjadi sebab surutnya dukungan bagi perjuangan republik: "rakyat menderita kelaparan, kurang sandang dan alas kaki, sementara penyakit telah menyebar. Di beberapa kampung, orang dengan rela melepas konsep 'Merdeka' kepada Belanda untuk ditukar pangan yang lebih baik."[23] Kondisi material yang sama, dalam kadar tertentu juga memengaruhi pasukan di bawah pengawasan Suharto, meski tidak ada bukti langsung yang menunjukkan bagaimana Suharto bisa menjamin pasokan makanan, pakaian, dan persenjataan bagi pasukannya. Mungkin satu petunjuk bisa didapat dari laporan intelijen mendatang Belanda dari September 1949, yang menulis bahwa "opium dalam jumlah besar secara rutin diselundupkan keluar Yogya menuju daerah-daerah yang diduduki. Dari orang-orang Republik sendiri, tidak ada kontrol sama sekali; Sebaliknya, Komandan CPM Yogya, Mayor Dirgo, dan Letkol Suharto, Komandan Brigade X, ikut bekerja sama dalam penyelundupan ini."[24] Memang jelas perwira Diponegoro harus bertindak ala pengusaha

demi menjamin kebutuhan pasukan mereka, yang sebagian besar—persenjataan, amunisi, pakaian, makanan, pasokan obat-obatan—diangkut oleh orang semacam Liem Siu Liong, seorang pedagang Cina-Indonesia yang bermukim di Kudus. Liem yang lahir di Fukien, berusia 20 tahun ketika tiba di Jawa dan terjun dalam bisnis keluarga. Kemudian, ia mendirikan bisnis perdagangan cengkehnya sendiri dan meluaskan jangkauan kegiatannya yang, dibantu oleh koneksi politik yang penting—terutama mertua Sukarno, Hasan Din—mulai menjangkau perdagangan antara markasnya di pantai utara dan para komandan Diponegoro di daerah pinggiran Jawa Tengah.

AGRESI MILITER I

Ketidaksepakatan Republik akan penafsiran Belanda atas isi perjanjian Linggarjati membuat Belanda frustrasi. Keputusasaan Belanda ini berujung pada—langsung dan tak terhindar lagi—agresi militer Belanda yang bertujuan menghancurkan Republik sebagai badan politik dan militer. Agresi Belanda, yang dilakukan pada 21 Juli 1947, berhasil merusak, menghantam semua titik lini republik. Suharto berperan dalam menahan serangan ini; ia menggantikan Mayor Sarjono sebagai pemimpin batalion Merah, menghadapi pertempuran di Ambarawa setelah front republik didesak mundur dengan cepat oleh armada Belanda yang menduduki Ambarawa, Salatiga, dan Banyubiru. Pemerintah Republik merespons ancaman terhadap Yogyakarta dengan menjadikannya daerah militer khusus dan menunjuk Jenderal Urip Sumoharjo sebagai gubernur militer; nama Letkol Suharto dan Sultan Yogyakarta tercantum di antara sepuluh orang staf yang akan membantunya.

Meski agresi militer Belanda berhasil mendesak mundur pasukan republik di mana-mana dan mendapat kontrol kuat atas teritorial di Jawa, agresi ini gagal menghancurkan kemampuan Republik untuk melawan dan bertahan. Agresi ini terhambat oleh

intervensi PBB yang mendesak pemerintah Belanda untuk melakukan gencatan senjata yang dimulai pada tengah malam 4 Agustus. Kekuatan Diponegoro yang sebagian terhantam dan kacau mulai membangun sebuah lini depan baru yang berpusat di Kedu. Suharto, yang bergiliran tugas dengan komandan resimen lain sebagai komandan front sektor Kedu Utara, bertugas di sana pada September–Oktober 1947, Januari-Februari 1948, dan Juli 1948. Laporan Belanda pada Oktober 1947 mencatat jerih-payah komandan front republik "untuk mengobarkan kembali semangat juang yang runtuh di pasukan mereka".[25]

Usaha diplomatis yang diperantarai PBB menghasilkan perundingan kembali antara Belanda dan Republik. Perundingan ini secara tersendat-sendat berujung pada penandatanganan perjanjian Renville—dinamakan demikian karena perjanjian ini ditandatangani di atas kapal perang Amerika 'Renville' yang bersandar di pelabuhan Jakarta—pada Januari 1948. Perjanjian Renville, melebihi perjanjian-perjanjian sebelumnya, dihantui ketidakpercayaan dan perbedaan mendasar dalam interpretasi antara pihak terlibat, dan memalukan bagi Republik. Perjanjian ini muncul akibat tekanan kuat Amerika Serikat atas Republik. Penandatanganannya menyebabkan jatuhnya pemerintahan Republik di bawah Perdana Menteri Amir Syarifuddin, dan digantikan sebuah kabinet presidensil yang dipimpin Perdana Menteri Mohammad Hatta. Di bawah Hatta, rasionalisasi angkatan bersenjata Republik, yang pada prinsipnya sudah disahkan oleh parlemen Indonesia demi alasan ketertiban dan keuangan pada Desember 1947, terus berjalan meski kacau-balau dan banyak halangan. Rasionalisasi semakin memicu rasa tidak senang di kalangan seksi-seksi Angkatan Darat dan di angkatan-angkatan lainnya, yang sama-sama membenci usaha mengurangi ukuran dan memprofesionalkan Angkatan Darat, serta membenci pupusnya semangat perjuangan. Perdebatan lama tentang arah perjuangan semakin memanas; ironisnya, perdebatan ini dipandu oleh Amir Syarifuddin yang baru saja terjungkal, yang juga merupakan arsitek perjanjian Renville.

PERNIKAHAN

Menuju akhir 1947, seiring dengan berkembangnya masalah-masalah yang lebih besar, Suharto, yang tinggal di Yogya dengan saudara tirinya, Probosutejo, mulai memikirkan pernikahan karena saran ibu angkatnya, Ibu Prawiroharjo. Menurut penuturan Suharto sendiri, pernikahannya dengan Siti Hartinah yang sederhana dan agak gemuk, teman sekolah sepupunya di Wonogiri empat belas tahun sebelumnya, terjadi karena jasa baik Ibu Prawiroharjo.[26] Menurut Roeder, Ibu Prawiro mengenal seorang wanita yang "akrab dengan keluarga itu".[27] Tetapi, menurut Gafur, perantara wanita ini ("penjual daging") tampaknya berperan hanya untuk menjajaki—untuk mengetahui niatan dan status Siti Hartinah, dan untuk mengatur pertemuan antara Ibu Prawiroharjo dengan ibunya—dan ibu angkat Suhartolah yang menggunakan hubungan dekatnya dengan ibu Siti Hartinah untuk mengajukan lamaran pernikahan.[28] Ada banyak misteri seputar bagaimana pernikahan seperti ini bisa terjadi, yaitu antara wanita dengan status sosial tinggi—seperti dikemukakan Suharto, keluarga Siti Hartinah "cukup terpandang dan disegani di kota ini [Solo]," dan dia kerabat jauh kekeratonan Mangkunegaran Solo[29]—dengan seorang perwira militer yang, meskipun cukup tampan, tetapi silsilahnya tidak jelas atau rendahan. Pernikahan ini adalah pertemuan antara aristokrasi minor yang turun dan mobilitas sosial ke atas yang diberikan militer pada masa revolusi. Keduanya menikah pada 26 Desember 1947 dengan upacara tradisional di Solo (di mana Suharto naik sedan De Soto tua). Walau mereka tidak saling cinta ketika menikah, saling pengertian keduanya berkembang cepat setelah itu. Suharto kelak mengemukakan fakta bahwa "saya telah mengembangkan prinsip yang akan memandu biduk kami di lautan luas."[30] Apakah prinsip-prinsip itu dan darimana munculnya tidaklah jelas, meski tampaknya kecil kemungkinan Siti Hartinah yang berpikiran kuat ikut andil dalam pengembangan prinsip-prinsip itu. Tiga hari setelah pernikahan mereka, Suharto membawa

istrinya ke Yogyakarta, ke rumahnya di Jl. Merbabu 2. Probosutejo kembali ke rumah orangtuanya di Kemusuk.

RENVILLE, RASIONALISASI, DAN GEJOLAK

Masa pernikahan Suharto adalah masa ketenangan militer, masa ketika Republik dan Belanda menggencarkan perundingan yang segera menghasilkan perjanjian Renville. Pada Februari 1948, komandan Divisi III ini memerintahkan suatu parade di Magelang yang terdiri atas resimen baru juga komponen resimen 21 dan 22, "untuk menunjukkan bersatunya tujuan Angkatan Darat dan rakyat sekaligus sebagai unjuk kekuatan publik."[31] Untuk memberikan kesan lebih kuat, setiap resimen diminta mengirim satu kompi bersenjata penuh ke parade itu; Letkol Pranoto Reksosamudro,—kelak menjadi musuh Suharto—komandan resimen 21, bertindak sebagai komandan parade. Kira-kira di saat yang sama, selama beberapa waktu Suharto menjabat sebagai komandan Front Utara Kedu yang bermarkas di Temanggung. Tidak ada rincian mengenai apa yang dilakukan pasukannya dalam lini itu. Tetapi tampaknya, seperti pasukan lain, mereka terlibat dalam "infiltrasi, penembakan, peledakan ranjau, dan tindakan sabotase."[32] Pada saat yang sama, pasukan Divisi Siliwangi Jawa Barat datang ke Jawa Tengah, bergerak dari basis mereka sebagai akibat dari ketentuan perjanjian Renville (yang menyerukan penarikan kekuatan republik ke wilayah republik). Kedatangan ini menjadi sebab kurangnya logistik serta tajamnya permusuhan antardivisi.

Rasionalisasi dan reorganisasi Angkatan Darat terus berlanjut dengan gegabah dan di hadapan oposisi Sudirman. Terlepas dari kebutuhan, demi tujuan politik, hal ini dilakukan untuk mengendalikan "kekuatan liar dan unit angkatan bersenjata yang memiliki loyalitas mendua terhadap komando pusat."[33] Rasionalisasi dan reorganisasi, di bawah pengaruh perwira Siliwangi asal Sumatra didikan Belanda, Abdul Haris Nasution, berusaha mengembangkan dua elemen keprajuritan: pasukan mobil yang mampu bergerak

cepat di mana pun di nusantara, dan pasukan teritorial yang ditempatkan di lokasi tertentu. Pada April 1948, reorganisasi Divisi III dikabarkan "dalam kecepatan penuh."[34] Divisi baru, Divisi I, terdiri atas pasukan dari bekas Divisi II dan III, dibentuk sesuai dengan Keputusan Presiden 14/1948 pada awal Mei—namun dengan rencana pengurangan ukuran total dari 16.000 menjadi 7.000 orang. Divisi ini terdiri atas empat brigade dan tiga batalion, dengan Suharto sebagai komandan Brigade III. Divisi baru ini adalah bagian dari Staf Pertahanan Jawa Tengah baru. Pada akhir Juli, Staf Pertahanan, di bawah komando Bambang Supeno, memiliki kewenangan terhadap delapan brigade, termasuk brigade Suharto. Efektifitas rasionalisasi ini masih diragukan. Intelijen Belanda melaporkan bahwa reorganisasi itu menyisakan "banyak hal yang harus dilakukan ... seseorang tidak melihat adanya penurunan jumlah pasukan demikian halnya dengan perbaikan kualitas pasukan."[35] Suharto sendiri berhasil lolos dari penurunan pangkat, meski penurunan pangkat adalah resep umum reorganisasi.

Brigade Suharto, seperti brigade lain dalam Divisi baru, terdiri atas empat batalion yang masing-masing juga memerlukan perombakan. Tugas brigadenya digambarkan sebagai "pertahanan Karesidenan Bagelen".[36] Bulan berikutnya, laporan serupa menyebut Suharto sebagai komandan Brigade III, Divisi III, yang bermarkas di Yogyakarta, dan sebagai "front selatan eks-Kedu". Kepala stafnya adalah Mayor Reksosiswo yang mengomandani empat batalion: Batalion I, di bawah Mayor Sarjono, bermarkas di Kebumen; Batalion II, di bawah Mayor Sudarmo, di Purworejo; Batalion III, di bawah Mayor Sruhardoyo, juga di Purworejo; dan Batalion IV, di Yogyakarta, di bawah Sujono.

Pada pertengahan tahun, di Yogyakarta, diselenggarakan pertemuan seluruh komandan brigade dan teritorial—secara resmi dikumpulkan Sudirman—untuk merencanakan taktik militer berkenaan dengan usaha Belanda untuk kembali menggempur militer Republik. Gagasan "pertahanan total" muncul saat itu atas desakan

Nasution. Serangan gerilya skala penuh akan dilaksanakan jika Republik berhasil diduduki. Strategi yang digunakan adalah membagi daerah republik menjadi zona-zona pertahanan bernama *Wehrkreise* (didefinisikan sebagai "wilayah mandiri pertahanan militer, politik, ekonomi ... di bawah satu komando"), menawarkan pertahanan simbolis semata terhadap kota-kota, menerapkan politik bumi hangus, menyusup ke wilayah 'Federal' (yaitu Belanda), dan yang terpenting adalah meninggalkan basis gerilya yang sudah disiapkan di wilayah berhutan dan bergunung. Memang, penataan basis seperti itu sudah dimulai pada 1948. Sebagaimana dikemukakan intelijen Belanda, "Republik berniat menjadikan oposisi bersenjata jangka panjang sebagai taktik terbaik, terutama dengan tujuan memberi waktu dan kesempatan bagi negara asing bertujuan baik untuk ikut campur tangan."[38]

Namun, reorganisasi atau persiapan angkatan bersenjata yang bagaimanapun juga tidak akan mampu menutupi kekacauan situasi Republik kala itu. Kekerasan politik merajalela; Yogyakarta sendiri sering kali menjadi "medan perpecahan partai dan organisasi perjuangan ... memberikan kesempatan terjadinya peperangan serius. Lebih mendesak lagi adalah kondisi material yang menurun drastis. Blokade Belanda, sebagaimana gelombang besar pengungsi menyusul agresi militer pertama Belanda (diperkirakan antara satu hingga enam juta orang),[40] telah mengubah wilayah-wilayah di bawah kendali republik menjadi daerah kurang pangan. Penduduk Yogya sendiri pada pertengahan 1948 diperkirakan meningkat tiga kali lipat dari 300.000 menjadi 900.000 orang. Selain kekurangan gizi di daerah perkotaan dan pedesaan, terjadi pula kekurangan pasokan penting, terutama pasokan kesehatan, dan peningkatan inflasi. Ada "banyak pengangguran," terutama karena jumlah besar pengungsi di kota, diperkirakan mencapai puluhan ribu menjelang akhir 1947. Orang-orang di daerah pinggiran sekitar Yogya "sebagian besar menggunakan pakaian yang terbuat dari daun kelapa dan goni."[41] Sekitar September 1948, Belanda melaporkan bahwa bahan dan benang diangkut dengan pesawat ke Yogyakarta dari

Jambi (Sumatra). Antara pertengahan November dan pertengahan Desember 1948, harga beras di pasaran di Yogya naik hampir dua kali lipat.

PERISTIWA MADIUN

Dalam konteks ketegangan internal yang semakin memanas, muncul pertikaian di Solo (di mana, menurut Nasution, "suasana '*Wild West*'" telah terbayang selama beberapa waktu).[42] Pihak yang bertikai adalah angkatan bersenjata yang terusik oleh rencana rasionalisasi dan yang bersimpati pada lini radikal yang kini dipimpin oleh Amir Syarifuddin (dan dari Agustus semakin berjaya dengan kembalinya pemimpin komunis, Muso, kehadirannya menambah semangat Partai Komunis Indonesia [PKI]), dengan pasukan-pasukan yang setia kepada pemerintah republik, terutama pasukan-pasukan dari Divisi Siliwangi yang kini berlokasi di Jawa Tengah. Suharto sendiri tidak ikut andil dalam pertikaian semacam ini dan tampaknya tidak menaruh simpati terhadap gangguan perpecahan politik hingga ke kancah revolusi ini; "saya, sebagai perwira muda saat itu sadar tidak akan melibatkan diri ke dalam politik. Saya membaca berbagai peristiwa politik itu, dan dengan diam-diam saya menganalisisnya."[43]

Terlepas dari keinginannya, dan dalam cara yang sama dengan keterlibatan awalnya dalam peristiwa 3 Juli, Suharto merasa dirinya tertarik ke dalam pusaran masalah. Setelah kembali ke Yogyakarta dari perjalanan ke Jawa Timur, ia singgah di Solo, mungkin untuk menyaksikan sendiri meningkatnya suasana revolusioner di kota itu. Di sana ia sempat ditahan sebentar oleh pasukan Siliwangi, tampaknya disalahpahami sebagai Mayor Suharto, kala itu seorang komandan batalion di Divisi Senopati yang bermarkas di Solo, sebuah unit yang dipenuhi oleh para pendukung PKI yang antipemerintah. Tak lama berselang setelah kekuatan Siliwangi mengendalikan Solo pada pertengahan September, angkatan bersenjata dari Pesindo yang berafiliasi dengan PKI mengendalikan kota

Madiun, Jawa Timur. Sumarsono, pemimpin Pesindo, diangkat sebagai gubernur militer daerah Madiun. Muso dan Amir, mendengar berita "kudeta" Madiun ini, merasa wajib bergegas ke kota tersebut untuk mendukung teman seperjuangan mereka. Pada gilirannya, Sukarno segera mengutuk pemberontakan Madiun dan ketika Muso merespons keras pernyataan Sukarno, diputuskan untuk menyelesaikan masalah itu harus dengan kekerasan.

Kembali ke Yogyakarta, Nasution pertama kali mendengar peristiwa yang terjadi tanggal 18 September itu dari Menteri Pendidikan Ali Sastroamijoyo yang datang ke rumah Nasution membawa berita itu. Sore itu, Nasution mengadakan pertemuan dengan berbagai komandan di Yogyakarta, termasuk Suharto, untuk melakukan persiapan operasi militer apapun yang mungkin diperlukan untuk memadamkan pemberontakan Madiun. Pada pukul 7 keesokan paginya, Nasution, ditemani Suharto (atas permintaan Sudirman), melapor kepada Sudirman yang—setelah merancang panduan operasional umum—terpaksa, karena penyakitnya, menyerahkan kendali operasional kepada Nasution dalam kapasitas Nasution sebagai kepala staf. Sudirmanlah yang paling berusaha menghindari benturan antara kekuatan kiri di Madiun dan pasukan Siliwangi; netralitas Suharto memberi Sudirman kesempatan untuk mencapai tujuan itu.

Pada 22 September, Kol. Jokosuyono, ditunjuk oleh pejabat Residen yang baru terpilih, Supardi, sebagai gubernur militer Madiun, mengeluarkan sebuah undangan yang ditujukan kepada semua komandan TNI Jawa Timur agar hadir ke sebuah pertemuan di Madiun yang dijadwalkan pada 24 September. Pemerintah merespons dengan mengumumkan bahwa semua yang menerima undangan ini akan dianggap memberontak terhadap Republik Indonesia. Suharto diperintahkan Sudirman, yang berusaha keras mencapai kompromi antara kekuatan-kekuatan yang bertikai, untuk pergi ke Solo demi memperingatkan komandan Divisi Senopati, Letkol Suadi, untuk tidak tergoda mendukung pemberontakan. Setelah akhirnya bertemu Suadi di Wonogiri, Suharto menerima

undangannya untuk pergi ke Madiun memeriksa sendiri situasi di sana. Tiba pada 22 September, ia berkeliling kota dengan Sumarsono, bertemu Muso, dan, atas perintah Sudirman, berusaha memperantarai gencatan senjata untuk mencegah pertumpahan darah.

Hasil perundingan ini menjadi kontroversi. Menurut otobiografinya, Suharto, meski sudah bersusah-payah, gagal meyakinkan Muso mengenai manfaat mengakhiri pemberontakan. Setelah kembali ke Yogyakarta dengan rute memutar guna menghindari cegatan komunis atau pasukan Siliwangi, Suharto melaporkan kepada Sudirman hasil diskusi tak produktifnya dengan Muso.[44] Menurut penuturan Salim Said dalam wawancaranya dengan Suharto, Suharto sebenarnya membujuk Muso untuk menghentikan permusuhan dengan memberikan "kondisi-kondisi tertentu" yang dapat disepakati bersama. Namun, Suharto gagal kembali ke Yogya membawa pesan ini sebelum kekuatan yang setia kepada pemerintah menyerang Madiun.[46] Penuturan ketiga, yaitu penuturan Sumarsono, mengklaim bahwa dalam kunjungannya, terutama setelah tur panjang keliling kota ditemani Sumarsono, Suharto mendapati situasi Madiun sangat berbeda dan lebih damai ketimbang apa yang harus diyakininya selama ini; sebenarnya di Madiun sama sekali tidak terjadi pemberontakan; dan kekuatan Muso sangat menginginkan perundingan damai dengan pemerintah di Yogya.[46] Ketika Suharto kembali ke Yogya dengan kabar ini, pesannya diabaikan karena keinginan pemerintah konservatif untuk menghancurkan apa yang dianggapnya sebagai pemberontak komunis berbahaya.

Kebenarannya mungkin terletak antara kisah kedua dan ketiga. Sudirman terus berusaha mencegah perpecahan serius di antara komponen Angkatan Bersenjata; pemberontak Madiun, sadar bahwa mereka akan berhadapan dengan pasukan Siliwangi, berusaha keras mencapai resolusi damai di mana bisa ditinjau kembali keprihatinan mereka akan aspek kunci kebijakan pemerintah—terutama kecenderungan pemerintah untuk lebih mengikuti jalur diplomasi ketimbang berjuang melawan Belanda, dan rencana

rasionalisasi angkatan bersenjata. Jelas bahwa pemerintah sudah sejak awal berniat menggunakan revolusi sebagai dalih untuk menghancurkan perlawanan serius yang dilancarkan para pemberontak. Salim Said mencatat bahwa "ketika mengetahui misi Suharto, Hatta dikabarkan sangat marah terhadap Sudirman."[47] Dalam peristiwa itu, upaya Sudirman menghindari konflik telah gagal. Kekuatan pemerintah dalam bentuk batalion Siliwangi memasuki Madiun pada 30 September. Madiun kemudian berhasil direbut dan "pemberontakan" PKI dengan ganas dilumatkan.

Peristiwa di Madiun tak pelak lagi meluas ke Solo dan Yogyakarta. Di kota Yogyakarta sendiri, sekitar 200 pemimpin komunis/sayap kiri ditangkap pada 19 September, atau sehari setelah pemberontakan di Madiun pecah. Kantor pusat Pesindo diserang dan para pemimpin utama serikat buruh PKI (SOBSI) ditahan. Laporan intelijen Belanda dari awal Oktober mengabarkan bahwa "sebelah tenggara Yogya, revolusi 'merah' [komunis] segera meluas dengan Wonosari (26 km sebelah tenggara Yogya) sebagai titik pusat. Kelompok-kelompok bersenjata menduduki perkampungan dan mengusir pejabat sipil Republik ... Di sekitar Magelang, pasukan Republik masih melancarkan operasi pembersihan terhadap pemberontak."[48] Seperti pada 1946, ketika lini pertempuran telah ditentukan dan perimbangan kekuatan telah jelas, Suharto sang ahli yang cermat mengamankan berubah menjadi Suharto sang prajurit professional. Apa pun pandangannya terhadap pemberontakan Madiun, Suharto langsung patuh pada kebijakan dan perintah pemerintah republik. Pasukan dari brigadenya menduduki Wonosari. Anak buahnya juga terlibat aktif dalam operasi pembersihan bagian timur Yogyakarta, sekitar Wonogiri, bertujuan mengalahkan pasukan simpatisan PKI. Pasukan Batalion II pimpinan Mayor Sudarmo di Purworejo langsung dikirim ke Yogyakarta dan Magelang untuk memerangi pasukan 'merah'. Bersama dengan Batalion III, mereka membantu usaha pelucutan senjata pasukan 'komunis' pimpinan Mayor Sunarto, mantan komandan batalion di Kutoarjo.[49]

AGRESI MILITER BELANDA II

Kericuhan dalam Republik mempertebal ketakutan bahwa Belanda akan mengambil keuntungan dari kekacauan politik dan militer ini serta melancarkan serangan mematikan. Kemudian, menjelang akhir tahun, terasa ada peningkatan kebutuhan untuk lebih menekan Belanda. Intelijen Belanda melaporkan tentang rencana pada Desember 1948 untuk menyusupkan pasukan republik ke dalam wilayah 'Federal', termasuk Batalion III pimpinan Sruhardoyo dari Brigade III Suharto. Pada akhir 1948, Divisi Diponegoro telah menyelesaikan reorganisasinya, dan karakter pasukan sudah terbentuk. Suharto sendiri bertanggung jawab atas pertahanan daerah Yogyakarta. Untuk tugas ini, ia menggunakan dua dari empat batalionnya, dengan sekelompok kecil dan beragam pasukan dari pos lain, termasuk taruna dari Akademi Militer, unsur-unsur Brigade XVI, prajurit magang dari Brigade XVII, serta unit angkatan darat dan angkatan laut, polisi militer, dan sejumlah sisa bekas laskar Brigade Martono yang telah didemobilisasi. Dua batalion lainnya, di bawah Sudarmo dan Sruhardoyo, diberi tugas mempertahankan Bagelen.

Rasa takut akan serangan Belanda terbukti sudah. Pada dini hari 19 Desember 1948, Belanda, tidak sabar atas kurangnya solusi layak terhadap apa yang mereka sebut "masalah Indonesia",[50] melancarkan agresi militer II yang bertujuan menghancurkan kekuatan militer Republik dan memastikan keruntuhan politiknya. Belanda menyerang daerah republik melalui udara dan darat. Penerjun payung segera menduduki bandara Maguwo, enam kilometer timur Yogyakarta, dan memungkinkan pesawat yang membawa pasukan baru untuk mendarat dan kemudian mengangkut pasukan lama ke Yogyakarta. Dengan bantuan dari pasukan yang maju dari utara, kota ini sepenuhnya berada di bawah kendali mereka pada senja itu dengan kerugian minimal. Sekitar pukul 2 siang, Letkol Abdul Latief Hendraningrat, komandan garnisun kota Yogya, telah berhasil mendesak Sudirman hengkang dari kota

ketika kekuatan Belanda mulai memasuki kota itu. Para pemimpin sipil Republik, termasuk Sukarno dan Hatta, ditangkap tanpa banyak perlawanan dan kucing-kucingan. Sultan Yogyakarta dengan alasan sakit menolak menemui Mayjen J.K. Meijer, komandan Belanda untuk Jawa Tengah.

Republik sama sekali tidak berniat mempertahankan Yogyakarta jika Belanda menyerang. "Prioritasnya adalah menyelamatkan dan mengevakuasi tenaga kerja dan pemimpin," demikian menurut kebijakan yang disahkan kabinet lebih dari enam minggu sebelumnya.[51] Kendati demikian, terlepas dari ketakutan lama atas serangan Belanda, serangan ini betul-betul membuat terkejut Republik. Sukarno kelak mencatat "seluruh Angkatan Darat berada di luar kota untuk manuver."[52] Kekuatan Republik segera mundur dan, dengan paniknya penduduk, perlawanan terhadap pasukan Belanda yang mendekat menjadi terabaikan. Belanda sendiri mengabarkan hanya satu orang mati dan tiga orang luka-luka di pihak mereka. Suharto, dengan sejumlah kecil pasukan tersisa—hanya dua seksi dari brigadenya serta sejumlah polisi dan resimen mahasiswa—berusaha, dengan membangun pagar pertahanan di timur kota di front sepanjang empat kilometer, untuk menghambat lajunya pasukan Belanda dari Maguwo hingga tengah hari, ketika kota akhirnya ditinggalkan untuk musuh. Mundurnya kekuatan Suharto dari kota tampaknya tanpa persiapan. Perlawanan lemah haruslah, setidaknya sebagian, dinisbahkan kepada Suharto. Sebuah laporan Belanda yang ditulis beberapa hari kemudian mencatat bahwa serangan ini adalah "kejutan sempurna" untuk Republik dan bahwa "sangat pasti, kota ini tidak akan diduduki begitu mudah dan hanya sedikit merugi jika saja ada setidaknya pemusatan *angkatan bersenjata terorganisasi* di dalam dan sekitar kota."[53] Sebenarnya, Nasution kelak mengkritik Suharto karena "lamban menjalankan perintah dan tidak tegas."[54] Menurut penuturan Suharto, jelas sebuah usaha menghadapi segala keadaan dengan sebaik-baiknya, pasukan TNI telah "mengundurkan diri ke luar kota" sebelum serangan dan diposkan di Purworejo hingga ke

barat, sementara ia sendiri melewatkan malam 18 Desember di rumah dengan istrinya yang sedang hamil tua.[55] Kelak, ia mengakui bahwa "saya tahu betapa kecewanya rakyat Yogya waktu itu pada Brigade-10., Seolah-olah ibu kota perjuangan dapat direbut Belanda begitu saja."[56]

PERANG GERILYA

Meninggalkan Siti Hartinah di Yogya, Suharto mundur ke Gangduk tempat dia melewatkan malam 19 Desember dan sesudah itu pindah ke Gunungpiring lalu Bibis, tempat ia mendirikan markas baru di rumah kepala desa bernama Harjowiyadi. Perkampungan sekitar Yogyakarta menjadi "dasar pemerintahan gerilya".[57] Pasukan Republik, sangat tergantung kepada penduduk desa dalam hal pasokan makanan dan dukungan, dibagi dalam empat kelompok yang masing-masing beranggotakan tiga atau lima orang dalam satu rumah desa, dengan tuan rumah bertanggung jawab atas kebutuhan mereka. Para pejuang berusaha sebaik mungkin masuk ke dalam kehidupan pedesaan, membantu proyek-proyek dan menawarkan bantuan-bantuan lain. Di Bibis, kepala desa mendirikan dapur umum, sebagian didanai Suharto sendiri, untuk memberi makan pasukan Suharto. Para penduduk desa menyumbang sayuran, daging, dan minyak untuk operasi itu. Pemerintah republik tidak memiliki uang atau kemampuan logistik untuk memasok pasukan-pasukan ini, sehingga "pada praktiknya, setiap daerah harus mencari sumber dayanya sendiri."[58] Dengan Republik kini berada di bawah pemerintahan militer, sejumlah panglima membuat sendiri ketentuan pajak lokal dan menerapkannya kepada penduduk desa demi mengamankan sumber daya yang mereka perlukan sebagai pasokan. Sementara tidak ada bukti Suharto membuat kebijakan semacam ini atas nama prajuritnya, ia pastilah membuat beberapa rencana untuk memeroleh kebutuhan pasukannya; Nasution sendiri mencatat sudah menjadi "kebiasaan setiap unit pasukan untuk menukar barang hasil upaya sendiri, dan

terdiri atas berbagai jenis bahan dan komoditi. Dengan cara ini pasukan-pasukan itu sanggup mandiri."[59]

Tinggal dengan aman di pedesaan, pasukan republik mampu membaur dengan lingkungan. Dokumen yang berjudul "Pertahanan Desa", yang didapat dari markas pertahanan republik di Bantul, memberi petunjuk penting akan sistem intelijen dan jaringan peringatan dini yang ditugaskan di desa-desa untuk membantu pasukan republik.[60] Perlawanan gerilya adalah perintah hariannya. Menurut T.B. Simatupang, "jika saja Belanda hanya menghadapi TNI, tanpa organisasi teritorial yang memungkinkannya bergerak ke manapun seperti 'ikan dalam air', mungkin Belanda telah berhasil membasmi angkatan bersenjata kita."[61]

Jauh di perbukitan sekeliling Yogyakarta, Suharto mendengar kabar anak pertamanya, seorang putri, lahir pada 23 Januari 1949. Sebelum itu, pada 7 Januari, ayah tirinya, Atmoprawiro, kala itu berusia 45 tahun, tewas tertembak pasukan Belanda yang sedang melakukan pembersihan, "mungkin" menurut Suharto, "memburu saya karena saat agresi militer, sayalah panglima perang daerah Yogyakarta." Ia melanjutkan:

> Pada waktu itu memang saya baru saja lewat sebelah barat desa Kemusuk untuk menengok, kemudian diadakan pembersihan dan Ayah saya tiri itulah tertembak dengan banyak penduduk di desa Kemusuk, karena memang Belanda mengetahui bahwa Komandan Pertempuran Yogya itu anak Kemusuk.[62]

Pada 30 Januari, Suharto muncul mendadak di Kemusuk dan meminta Probosutejo membawa surat untuk istrinya di Yogyakarta yang berisikan nama bayi baru pasangan ini, yaitu Siti Hardiyanti Hastuti atau dipanggil Tutut.

Pada akhir Desember 1948, "guna menyatukan unit-unit Republik yang terserak dan tercerai berai kembali menjadi kesatuan organisasional," Gubernur Militer Kol. Bambang Sugeng membagi wilayah Divisi III menjadi tiga zona pertahanan (*wehrkreise* disebutkan terlebih dulu). Wehkreise III adalah daerah Yogya, "tempat

dua batalion [I dan IV] dari Brigade X beroperasi di bawah komando langsung Letkol Sarbini. Wehrkreise I terdiri atas Banyumas, Pekalongan, dan Wonosobo.

Menyesuaikan diri dengan situasi baru perlawanan gerilya bukanlah hal mudah bagi pasukan republik. Terguncang oleh kebrutalan serangan Belanda, tercerai berai, dan dengan moral yang turun drastis, pasukan republik harus menyesuaikan diri dengan pengaturan baru, taktik baru, dan cara berpikir baru. Selain itu, masalah lama, kehadiran terus-menerus sejumlah besar pasukan liar, dan juga para pemimpin dengan ide mereka masing-masing mengenai strategi, serta tidak adanya perhatian terhadap disiplin komando, membuat keadaan sulit bagi para panglima resmi. Misalnya, Suharto, seperti panglima TNI lainnya di Jawa Tengah, mendapat kesulitan mengatur pemimpin berdarah Bugis-Makassar yang bertekad baja dan tak kenal kompromi, Kahar Muzakkar, deputi panglima Brigade XVI. Kendati demikian, tampaknya jelas bahwa Suharto sangat menyukai tantangan yang dihadapinya dan menyikapinya dengan antusiasme tinggi. Pengalamannya tidak berperan banyak dalam mengubah pendapatnya yang menganggap kepemimpinan sipil tidak cocok untuk Republik yang masih muda, terutama dalam masa krisis.

Wehrkreise III Suharto bermarkas di bukit Menoreh di Bantul, sebelah selatan Yogyakarta. Wehrkreise ini kemudian dibagi lagi menjadi enam sub-Wehrkreise (SWK): satu bertanggung jawab untuk wilayah sekitar kota, dua untuk wilayah sekitar Bantul, dua untuk wilayah Sleman, dan SWK keenam bertanggung jawab atas daerah Wonosari dan Maguwo. Sebagian besar pasukannya tetap dalam wilayah-wilayah ini, terkadang mendekati daerah pinggiran kota dan terkadang bahkan memasukinya. Suharto memindahkan markasnya dari satu tempat ke tempat lain. Ketika Simatupang mengunjunginya, markas itu didirikan di Gamping, dekat perbatasan barat kota.

Seperti telah saya kemukakan, mudahnya penaklukan Belanda terhadap Yogyakarta pada Desember 1948 membuat Suharto

merasa bersalah, perasaan yang coba ditenangkannya dengan melancarkan serangkaian serangan balasan terhadap kota yang diduduki sebagai sarana untuk menunjukkan kepada para penduduk Yogya, dan pada Belanda, bahwa masih ada perlawanan Indonesia yang kuat dan lihai terhadap kekuatan Belanda.[64] Menurut penuturannya sendiri, dan terlepas dari pangkatnya yang lebih tinggi ketimbang para pemimpin TNI lain, ia adalah inspirasi sekaligus konsolidator dan organisator bagi pasukan Indonesia di perbukitan di luar wilayah kota. Serangan-serangan ini seharusnya dilancarkan pada malam 29 Desember, 9 Januari, pertengahan Januari, dan lagi di bulan Februari, meski ada laporan-laporan berbeda mengenai hal ini. Belanda menilai serangan malam 29–30 Desember dan 9–10 Januari itu sebagai "jelas-jelas sudah direncanakan sebelumnya," yang berarti "semangat musuh masih sangat bagus." Pada Februari, Belanda menyatakan bahwa "di sekitar Yogya masih ada banyak gerombolan aktif. Semangat mereka bagus, mungkin karena fakta bahwa mereka memiliki kepemimpinan yang lebih aktif ketimbang di tempat-tempat lain."[65]

Ada juga serangan-serangan terhadap pusat-pusat perkotaan lain yang diduduki, dan jelas bukan kerja pasukan Suharto. Pada malam 15 Januari, satu kelompok beranggotakan sekitar tiga puluh orang berusaha untuk meledakkan dan membakar gedung pencatatan pajak di Magelang. Pada dini hari 20 Januari, sekitar empat ratus pasukan republik menyerang Temanggung dan berhasil menembus masuk kota sebelum akhirnya terpukul mundur dengan kerugian besar. Antara 1 Januari dan 30 Juni 1949, tercatat rata-rata empat belas serangan per minggu terhadap pos militer di wilayah-wilayah yang dikendalikan oleh Brigade 'T' Belanda (Yogyakarta, Magelang, Temanggung), sementara pertikaian antara patroli Belanda dan pejuang Indonesia berkisar lebih dari 22 kali per minggu pada periode yang sama.

Kegiatan militer lain bersifat lebih rutin dan bertingkat rendah: menanam ranjau (yang sering terbukti sangat efektif

menurut laporan Belanda tentang kendaraan yang rusak karena ranjau), membarikade jalan dan menghancurkan jembatan, menyerang dalam skala kecil patroli dan konvoi Belanda (terkadang oleh para penduduk desa yang dipersenjatai bambu runcing. Terkadang juga oleh gerombolan pasukan republik berjumlah seratus orang yang bersenjata otomatis), membidik dari jarak jauh, dan menyerang pos Belanda. Kegiatan semacam ini, menurut sebuah laporan Belanda, berhasil meningkatkan semangat "dengan setiap hari mengingatkan penduduk kota bahwa lawan tetap aktif." Kegiatan semacam ini "tentunya sangat didukung oleh sebuah sistem observasi dan informasi yang bekerja baik, yang sulit untuk dikejutkan." Kegiatan ini juga sangat tergantung pada dukungan penduduk lokal, "barikade yang sangat cepat dan berulang-ulang dan penghancuran jalur-jalur besar [jalan] hanya bisa dilakukan jika rakyat secara aktif bekerja sama, atau di bawah tekanan langsung gerombolan dan sisa-sisa TNI yang masih berkeliaran. "Serangan-serangan yang dilakukan rakyat, sebagian besar dipersenjatai bambu runcing dan tongkat, terhadap patroli kami sudah mengungkapkan segalanya."[66] Akhirnya, ada satu jenis lain kegiatan militer. Pada Februari, Sultan Yogyakarta menugaskan Suharto untuk meredakan kekerasan dan penjarahan dalam kota. Cara Suharto dalam mencapai tujuan ini tidaklah dijelaskan.

Nyaris tidak ada keraguan bahwa tekanan terus-menerus terhadap pasukan Belanda mulai berdampak, terlepas dari pernyataan Meijer pada akhir Februari bahwa "kegiatan gerilya makin lama makin berkurang."[67] Pasukan Brigade 'T', antara 19 Desember dan 12 Januari, merugi sebanyak 28 orang tewas, dan 54 terluka dengan 11 terluka parah; pada awal Februari, jumlah ini meningkat menjadi 44 orang tewas dan 129 orang terluka. Situasi ini, seiring dengan rasa sakit dan lelah yang timbul karena beroperasi dalam kondisi tropis Jawa Tengah, kurangnya cadangan memadai, keharusan bersiaga, dan meningkatnya rasa tidak aman, menurunkan semangat dan kondisi fisik pasukan Belanda. Selain itu, kerugian material mereka juga besar; karena kerusakan akibat

ranjau dan kebutuhan akan perbaikan lainnya, kurang dari separuh senjata perang brigade yang bisa beroperasi. Hasilnya adalah "kita nyaris sulit memulai pemulihan keamanan, hukum, dan ketertiban secara cepat dan efektif."[68] Selain itu, bencana diplomatik 28 Januari, ketika Dewan Keamanan PBB mengesahkan resolusi yang menuntut Belanda mengembalikan kepemimpinan republik ke Yogyakarta sebagai langkah pertama dalam proses pembentukan pemerintah federal *ad interim* Indonesia, semakin menurunkan semangat Belanda. Namun, kerugian republik juga parah ketika pasukan Belanda melakukan kontak sporadis dengan republik.

Klaim sombong khas Suharto seperti ini, yang mengatakan ia adalah otak di balik kegiatan gerilya, patut kita cermati. Misalnya, ada "kealpaan total" dalam ingatan akan hubungannya dengan Nasution, yang mendirikan sebuah markas komando dekat Prambanan, yang mengarahkan operasi militer keseluruhan, dan yang mengadakan kontak dengan Suharto. Namun, perlu disadari bahwa "pada praktiknya, markas Nasution tidak mampu mengoordinir kegiatan bahkan di Jawa, dan inisiatif tindakan semakin lebih bergantung kepada komandan unit."[69] Nasution sendiri menyadari bahwa "pada praktiknya, sejumlah brigade, dengan inisiatif sendiri, telah mengorganisasi unit-unit penyerangan siang-malam sebagai operasi bersinambung."[70] Suharto juga mengabaikan peran Bambang Sugeng dalam mengkoordinasi kegiatan militer gerilya. Selain itu, banyak kegiatan tersebut di atas dilaksanakan oleh pasukan di luar kendali langsung Suharto, dan mungkin atas inisiatif sendiri. Menurut Kahin, yang berada di Yogya pada saat itu (diantar di bawah penjagaan Belanda ke lantai atas Grand Hotel), serangan ke Yogyakarta pada malam 9 Januari dilakukan oleh "sebuah batalion berat dari Brigade Polisi Mobil Republik yang didukung oleh sebuah kompi KRIS dari angkatan bersenjata Republik," yang mencapai tengah-tengah kota, Grand Hotel, dan bertempur di sana selama dua tahun sebelum akhirnya mundur.[71] KRIS (Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi) adalah sebuah unit yang terdiri atas orang-orang Manado yang berada di Jawa pada

masa pecahnya perang (Abdul Kahar Muzakkar menjabat sebagai sekretaris).

Kendati demikian, kemampuan Suharto memimpin tidak boleh diremehkan. Menurut salah satu sumber Belanda, "kegiatan militer musuh terhadap Yogya, menurut informasi yang ada, terutama diarahkan dari Bantul, tempat markas gerilya X (Tentara Pelajar) berada." Bantul tentu saja adalah markas Suharto kala itu. Pada Februari dikabarkan "gerombolan musuh lebih kerap terlihat sepanjang jalan dari Kebumen ke Purworejo ... Di antara unit-unit ini adalah mantan Batalion II dan III dari Brigade X ... Serangan di jalan diperkirakan akan terjadi di masa akan datang, demikian juga berbagai bentuk blokade." Laporan yang sama mengemukakan bahwa kekuatan republik di lingkungan Yogyakarta itu "keras kepala dan berulang kali menunjukkan mereka memiliki semangat baja." Memang, penduduk selatan dan tenggara Yogyakarta dianggap Belanda sebagai "berada sepenuhnya di bawah pengaruh musuh."[72]

SERANGAN UMUM 1 MARET 1969

Tampaknya kecewa karena serangan-serangan ini tidak mencapai tujuan umumnya, yaitu menunjukkan kekuatan dan semangat perlawanan publik, Suharto kelak mengklaim mencetuskan ide melakukan serangan besar siang hari bolong ke Yogyakarta, "untuk tujuan politis agar supaya dunia mengetahui bahwa TNI masih mampu mengadakan perlawanan."[73] Signifikansi kota ini sudah terkenal; Belanda sendiri mengakui bahwa Yogya masih dianggap sebagai simbol oleh setiap kaum Republik, dan pengaruh dari apa yang terjadi di kota ini akan meluas ke seluruh Jawa dan bahkan daerah yang lebih luas lagi."[74]

Versi bahwa serangan ini murni inisiatif Suharto adalah versi yang diakui kuat selama bertahun-tahun. Namun, versi awal Roeder, tidak seperti otobiografi Suharto setelahnya, menyinggung pertemuan-pertemuan rahasia Suharto dengan sultan di keraton

Yogyakarta, di mana dalam salah satu pertemuan itu "diambil satu keputusan berani untuk melancarkan serangan umum kepada Yogyakarta."[75] Sedangkan Nasution menyatakan bahwa "Panglima Divisi [III] [Bambang Sugeng]lah telah memerintahkan serangan umum." Versi Simatupang menyatakan bahwa ide serangan itu muncul dari diskusinya dengan Bambang.[76] Salim Said menulis, dalam sebuah wawancara pada 1984, bahwa sultan mengklaim sebagai penggagas ide.[77] Berdasarkan semua itu, tampaknya sangat tidak mungkin ide serangan dengan dimensi dan signifikansi strategis ini bisa berasal dari Suharto, seorang perwira yunior dengan pengalaman sempit yang mungkin membuat ia tidak mengetahui aspek diplomatis perjuangan,[78] dan bahkan dunia politik internasional yang kompleks. Kemungkinan besar, ide ini digagas oleh sultan yang mampu memahami secara lebih baik sifat dari politik dan kegiatan militer yang saling berkaitan. Begitulah kelak klaim dari sultan.[79]

Belanda sangat mencurigai sikap Sultan terhadap mereka, hingga nyaris menyerupai paranoia. Mereka dengan kuat mencurigai bahwa sultan akan berusaha meninggalkan keraton dan bergabung dengan pasukan republik di perbukitan, dan mereka mengumpulkan laporan intelijen bahwa sultan berencana meloloskan diri pada 1 Maret. Kekhawatiran Belanda atas niat serta merta sultan, mungkin karena rasa segan Belanda terhadap sultan, membuat Belanda makin berpikir bahwa sultan melakukan konspirasi: Belanda menjadi sangat percaya ide tentang sultan berniat menjadikan Yogya sebagai daerah independen atau otonom, dan tentang sultan mengintai kesempatan untuk menjadi pemimpin Republik. Laporan Belanda 6 Mei menyatakan bahwa "Sultan berusaha mendapat otonomi penuh bagi daerahnya, dan ia dibantu Kol. Jatikusumo dan Kol. Suharto."[80] Sebenarnya, sultan tidak pernah menunjukkan gelagat akan melakukan itu, dan segala tindak-tanduknya betul-betul diabdikan bagi kepentingan republik.

Menurut Nasution, Suharto menghabiskan banyak waktu menyiapkan serangan, "terutama melakukan penyelidikan di dalam

kota dan mengurus perbekalan bagi pasukan-pasukan." Ia juga harus memperhitungkan kemungkinan balasan dari Belanda. Ia menghadapi kesulitan tak lazim: pasukannya tidak memiliki pengalaman bertempur dalam kelompok besar; "Mereka hanya paham bertempur dalam konteks peleton, atau paling-paling kompi."[81] Setelah memulai persiapan untuk Serangan Umum dengan serangkaian serangan kecil terhadap pos-pos militer Belanda di luar kota agar Belanda merasa tidak aman, Suharto kemudian merancang serangan berskala besar, dengan kekuatan sekitar 2.000 pasukan, untuk pagi hari 1 Maret 1949. Taktiknya meliputi penyusupan bertahap kelompok kecil pasukan ke dalam kota hingga dua minggu sebelum serangan. Suharto memanggil batalion Sarjono dari posnya sekitar Purworejo dan menyerahkan tanggung jawab atas sektor selatan Yogyakarta. Ia mengawasi sektor barat dari sebuah pangkalan dekat Godean, menunjuk Mayor KRIS, H.N. Ventje Sumual, sebagai komandan sektor itu. Di utara, ia menyatukan berbagai kelompok pasukan, dari berbagai badan tempur yang tercerai-berai, di bawah komando Mayor Kusno, sementara menyerahkan sektor timur kepada batalion Sujono. Marsudi dan Amir Murtono diserahi tanggung jawab atas sektor kota dengan tugas "mengorganisasi masyarakat kota supaya membantu dan melancarkan gerakan pasukan dari luar masuk."[82] Sedang Belanda sendiri, terlepas dari kepercayaan diri yang tinggi akan superioritas mereka, pada akhir Februari menyadari bahwa kegiatan militer republik semakin meningkat, "mungkin sebagai konsekuensi dari resolusi terbaru Dewan Keamanan."[83]

Serangan itu, tampaknya dipicu oleh serangan salah dari pasukan republik pagi sebelumnya, dilakukan pada 1 Maret pukul 6 pagi, ditandai sirene yang mengakhiri jam malam. Suharto memimpin serangan dari barat, bersama pasukan bergerak dari semua penjuru untuk menyokong kegiatan pasukan-pasukan yang sudah menyusup masuk ("dengan lihai dan gagah berani")[84] ke dalam kota di bawah naungan kegelapan. Suharto, dengan pistol Owen favoritnya, memimpin pasukannya—ia kelak mengklaim

bahwa mereka pikir dirinya kebal peluru[85]—masuk hingga pusat kota di perbatasan Jalan Malioboro. Sejarah resmi Divisi Diponegoro menggambarkan serangan itu:

> Kota Yogya diserang dari empat penjuru. Pasukan dari SWK 102 masuk dari arah Selatan dipimpin oleh Mayor Sarjono. Pasukan SWK 103 masuk dari Barat dipimpin oleh Let. Kol. Suhut [Suhud]. Pasukan SWK 104 dari Utara dipimpin oleh Mayor Sukasno ... Pasukan SWK 105 dichususkan menduduki Tanjungtirto minimal mengisolir pasukan Belanda ini agar tidak dapat menggabungkan diri dengan pasukan lainnya.[86]

Pasukan penyerang ini bercirikan janur kuning yang dikenakan di bahu. Karena kesulitan taktis yang dihadapi pasukan Suharto, serangan ini sebenarnya sekedar kombinasi sejumlah besar serangan berskala kecil yang terkoordinasi baik. Penduduk kota mendukung pasukan, misalnya dengan menaruh makanan dan minuman di depan rumah mereka serta memberi perlindungan ketika pasukan-pasukan bergerak menjalankan tugas mereka. Belanda, klaim Suharto, "terkejut" dan, lanjutnya, pasukan republik mampu merebut seluruh kota dan mempertahankannya hingga pukul 12 siang ketika bala bantuan yang dipesan oleh panglima Brigade 'T', Kolonel van Langen, akhirnya tiba dari Semarang dalam bentuk unit 'Gajah Merah' yang dipimpin oleh Panglima van Zanten.[87] Pada saat ini, atau mungkin lebih larut sekitar pukul 2 siang, Suharto memberi tanda kepada pasukannya untuk mundur karena tujuannya sudah tercapai.

Sumber-sumber lain hampir sama memuji prestasi serangan itu. Siaran radio Republik sangat antusias mewartakan kesuksesan ini. RRI (Radio Republik Indonesia) Sumatra Utara mengumumkan bahwa Yogyakarta telah direbut dari Belanda dan bahwa pasukan sedang menembak dari pohon-pohon di dalam kota. "Bendera merah-putih berkibar lagi, dan pasukan kami melakukan operasi pembersihan melawan sisa-sisa pasukan Belanda di sekitar Yogyakarta." Komentar yang lebih rendah hati dari Radio Rimba

Raya milik Republik di Sumatera sekitar dua hari kemudian mencatat bahwa "serangan terhadap Yogyakarta dan pendudukan kota itu [adalah] prestasi militer yang luar biasa, namun ini tidak bisa dipertahankan."[88] Menurut Roeder, serangan ini menunjukkan "kemajuan bagus", dengan pasukan mencapai pusat kota dan menduduki sebuah pabrik amunisi (tempat mereka mendapatkan "lima ton amunisi dan persenjataan ringan"), dan sebuah tank kecil, semuanya dengan korban "ringan".[89] Sejarah resmi Divisi Diponegoro menuturkan bahwa pasukan KNIL yang menjaga pabrik amunisi telah menyerahkan sejumlah besar amunisi dan persenjataan pada pasukan penyerang republik, "hatsil gerakan bawah tanah kita yang dapat mengadakan kontak dengan pasukan KNIL yang ada disitu."[90] Sejarah Seskoad mengenai serangan itu menyatakan bahwa "dalam waktu singkat hampir setiap sudut kota dikuasai TNI. Jalan Malioboro hingga Tugu dipenuhi pasukan gerilya."[91] Salim Said menyatakan bahwa "tentara Republik hampir merebut Yogyakarta." Penyusun biografi Siti Hartinah mengatakan bahwa "warna bendera kebangsaan merah-putih berkibar dari semua penjuru kota sementara orang-orang berteriak 'merdeka, merdeka!"[92] Pengarang sejarah TNI menulis bahwa "bisa dikatakan kami dapat dengan mudah mengambil alih hampir seluruh kota dan juga mencapai tujuan-tujuan penting." Seorang penyusun hagiografis dengan agak emosional mengklaim bahwa peristiwa itu "mengguncang dunia" dan bahwa selama peristiwa itu Suharto "melumpuhkan militer Belanda setelah ia menduduki Yogyakarta selama enam jam."[93] Sumber-sumber yang bersimpati terhadap kaum republik cenderung menerima pandangan resmi republik. Jadi, Kahin, jelas dipengaruhi data republik, menulis bahwa "tentara republik hampir merebut Yogyakarta," sementara Reid menyatakan bahwa Suharto "menduduki sebagian besar kota selama enam jam sebelum bala bantuan untuk Belanda datang."[94]

Penuturan Belanda mengenai derajat dan kesuksesan serangan ini tentu saja agak bersifat membela diri:

> Pada dini hari musuh memulai satu serangan terkoordinasi atas Yogya dengan serangan utama datang dari barat-barat daya, dibantu oleh pasukan-pasukan yang menyusup di bawah naungan kegelapan, termasuk konsentrasi besar musuh di lingkungan keraton [*de buiten-Kraton*]. [Pasukan-pasukan] ini ditangkap dan digeledah pasukan kami. Di bagian barat Yogya, kelompok musuh melancarkan perlawanan kuat. Perlawanan segera ditumpas dan situasi bisa dikendalikan.[95]

Belanda, dengan kekuatan sangat lemah berupa batalion tunggal dan beberapa unit bersenjata, dikejutkan oleh serangan yang, diawali oleh api di pos garis pertahanan sekitar kota pada pukul 4 pagi, datang dari selatan dan barat. Terlebih lagi, serangan itu dipusatkan pada pos-pos komando dan kamp pasukan Belanda, seperti pos besar di dekat stasiun kereta api Tugu. Tampaknya, Belanda kelak mengakui, serangan itu "telah dirancang secara cerdas," dengan "koordinasi baik" yang "memberikan petunjuk kuat adanya kepemimpinan pusat."[96] Pasukan Belanda pada awalnya mengalami kesulitan mendeteksi pasukan republik karena kamuflase mereka dan cahaya temaram pagi. Di satu bagian kota, pasukan Belanda terhalang oleh jalan-jalan yang dibarikade dengan perabot dan kayu, untuk kemudian diberondong peluru dari rumah-rumah ketika berusaha melakukan operasi pembersihan di ruang sempit ini. Akibatnya, mereka harus menunda operasi dan meminta bala bantuan. Pasukan dengan bala bantuan ini kemudian melanjutkan operasi hingga pukul 2.30 siang. Dikabarkan 118 orang anggota pasukan republik terbunuh, sedangkan di pihak Belanda hanya lima orang luka-luka. Sejumlah laporan Belanda menyatakan bahwa pasukan republik berada di dalam lingkungan keraton, bahwa sejumlah pasukan republik menembak dari pucuk pohon dalam keraton, dan bahwa ketika pasukan Belanda mengejar pasukan republik dari daerah sebelah utara keraton, pasukan-pasukan ini telah menghilang ke dalam keraton. Akibatnya, pasukan Belanda memasuki keraton. Pada pukul 1.30 siang, "semua perlawanan terorganisasi di kota sepenuhnya dipatahkan," dan kota

Yogya kembali damai dengan hanya beberapa insiden kecil penembakan gelap.[97] Bala bantuan tiba di Yogyakarta pada 4.30 siang.

Kerugian pasukan Suharto sangatlah besar, kabarnya berkisar antara 192 hingga 375 orang. Di sisi lain, senjata yang direbut tidak begitu besar: tiga karabin, empat senapan laras panjang [*gewerен*], lima pistol, dan sejumlah amunisi. Kerugian Belanda sangat kecil (enam orang tewas dan hanya beberapa terluka) jika ditimbang dari skala operasi dan panasnya pertempuran.

Versi Belanda tentang peristiwa ini didukung kuat oleh laporan pengamat militer PBB.[98] Mereka mengabarkan pecahnya baku tembak pada pukul 6 pagi, terkonsentrasi di bagian barat kota di sekitar stasiun kereta api. Respons Belanda sangat cepat. Pada pukul 7 pagi, menurut laporan PBB, mobil lapis baja dan kendaraan bersenjata mesin melintasi jalan, dengan infantri Belanda di belakang dan berpatroli di sisi jalan sempit di luar jalan utama. Baku tembak mulai berkurang pada pukul 11 pagi, dan kegiatan patroli terus berlangsung diiringi tank ringan. Pada pukul 2 malam, baku tembak mereda. Laporan militer Belanda maupun laporan pengamat PBB sama-sama tidak mencatat adanya ancaman signifikan terhadap kendali Belanda atas kota itu—dan juga sama-sama tidak mendukung klaim sukses republik yang pasti dianggap terlalu dibesar-besarkan.

Aktivitas bersenjata tentara republik berlangsung pada 2 Maret, di mana tujuh prajurit Indonesia tewas. Pada hari yang sama, terlepas dari klaim Suharto yang menyatakan sebaliknya ("Mereka tidak mempunyai kekuatan yang cukup untuk pembersihan di kota. Rakyat kita di kota selamat dari pembalasan Belanda"),[99] Belanda memulai serangkaian operasi sapu bersih di dalam kota, di mana dalam salah satu operasi tersebut 47 orang Indonesia terbunuh dan 25 orang tertawan, dan sejumlah kecil persenjataan direbut. Sapu bersih lain pada hari berikutnya berakibat tewasnya tujuh orang anggota pasukan republik dan penangkapan tujuh orang anggota pasukan lagi. Pada malam 2 Maret, sekitar tengah malam, Belanda mendapati sekelompok besar orang

Indonesia di bagian tenggara kota dan menyerang mereka. Operasi pembersihan oleh patroli Belanda di ujung timur kota mengakibatkan sembilan belas orang Indonesia tewas dan tujuh orang tertangkap. Pada 5 Maret, 25 orang anggota pasukan Indonesia terbunuh dalam operasi sapu bersih di kampung-kampung di tenggara kota. Dua hari kemudian, penyapuan di daerah kampung sebelah selatan stasiun kereta api Tugu berakibat ditahannya 37 orang "tersangka".

Tanpa merasa heran, Suharto menyatakan bahwa kabar tentang serangan ini telah tersiar ke penjuru dunia melalui pemancar radio RI di Playen, Wonosari.[100] Suharto juga menyatakan bahwa Belanda mencari pemancar radio ini, serta menarik pasukan yang mungkin akan melakukan serangan balasan di sekitar kawasan Yogya.[101] Pasukan Belanda memang benar-benar melakukan serangan berskala besar di Gading/Wonosari pada 10 Maret, melibatkan 300 orang pasukan gerak cepat dan tiga kelompok pelacak jejak, dengan dukungan dari udara. Saat hal itu terjadi, para pejuang RI hanya melakukan sangat sedikit perlawanan; pada 21 Maret, sebuah patroli menemukan 1,5 ton 'radiomaterial'. Namun masih sangat banyak upaya pembersihan yang dilakukan Belanda, seperti satu yang dilakukan di Muntilan pada 13 Maret dan di Sentolo pada 18 Maret. Operasi semacam ini dituduh telah menyebabkan jatuhnya korban sipil.

Kemudian, Suharto melakukan serangkaian serangan lebih kecil di kawasan barat Yogyakarta sekitar awal April dalam rangka "lebih membingungkan Belanda".[102] Menurut Nasution, setelah serangan 1 Maret, "perang gerilya berkecamuk dalam Kota Yogya. Siang hari sering terjadi pertempuran, sehingga beribu-ribu orang Cina meninggalkan kota. Bahkan politisi dan pegawai tinggi RI sendiri banyak pula meninggalkan ibukota untuk mencari tempat yang lebih aman di Surabaya, Semarang, Jakarta dan Bandung."[103] Meskipun demikian, beberapa orang Belanda memiliki pendapat lain. Pada awal April, situasi di kawasan 'Brigade T' dalam kondisi "secara umum menguntungkan", sebuah ungkapan yang ditujukan

pada "fakta bahwa, contohnya, dalam kondisi Yogya, kelompok musuh telah secara efektif terpencar di mana-mana, namun juga pada kondisi bahwa penyitaan sejumlah besar amunisi dan senjata menyebabkan kesulitan besar bagi kelompok perjuangan itu."[104] Namun para pengamat militer PBB pada akhir pekan ketiga bulan Maret berpendapat bahwa "aktivitas gerilya meningkat seperti bisa dilihat dengan semakin intensifnya operasi militer yang dilakukan pasukan Belanda sepanjang periode ini."[105] Serangan gerilya yang cermat terhadap Yogyakarta (yang "tidak berjalan lama") dilaporkan pada malam 14 Maret.[106] Intelijen Belanda sendiri melaporkan adanya isu tentang rencana pejuang republik melancarkan aksi berikutnya di Yogya pada 15 April, dipimpin oleh Kolonel Jatikusumo, dibantu oleh Suharto dan yang lainnya.[107] Tak lama kemudian, oleh Belanda, sultan dianggap merencanakan serangan berikutnya terhadap Yogyakarta yang dijadwalkan pada 24 April.

Versi kisah Suharto dan tokoh pejuang lainnya menyatakan bahwa serangan 1 Maret merupakan demonstrasi nyata kesinambungan eksistensi dan vitalitas TNI; "kita dapat menunjukkan bahwa TNI tetap utuh sebagai tentara dan dapat ke luar masuk kota setiap waktu yang kita kehendaki." "Efek-efek politis dan psikologis" untuk kekuatan ini berakibat penting pada pembahasan internasional terhadap "masalah Indonesia" saat itu. [108] "Maksud kita .... semata-mata hendak menunjukkan kepada dunia bahwa TNI dan Rakyat Indonesia sebenarnya masih mampu untuk menghadapi fihak kolonial Belanda setiap saat."[109] Dalam pandangan Suharto, serangan itu "ternyata memang berpengaruh,"[110] menyebabkan Dewan Keamanan menekan Belanda agar menghentikan operasi dan kembali memulai perundingan dengan RI. Sultan sendiri kemudian mengungkapkan bahwa "serangan umum ke Yogyakarta membuka mata Dewan Keamanan atas fakta bahwa TNI masih tetap eksis. Itulah yang terpenting, saya rasa." [111]

Hal ini bisa dikatakan adalah interpretasi berlebihan: menafikan peran penting Amerika Serikat yang menggunakan tekanan keras politik dan finansial untuk mengakhiri upaya Belanda mem-

pertahankan kolonialisme mereka. Meskipun demikian, di dalam negeri, serangan itu berdampak penting dan substantif. Sebagai contoh, Kahin menuturkan bahwa laporan tentang serangan ini telah berdampak pada sikap para pemimpin negara boneka buatan Belanda, begitu juga pada sikap para pemimpin sipil RI yang ditahan di pulau Bangka; hal itu memperkokoh tali persatuan banyak pemimpin "negara boneka"[112]—dan menyebabkan mereka mengubah sikap awal mereka untuk bekerjasama mendukung rencana Beel untuk federasi Indonesia dominasi-Belanda. Tak disangsikan lagi hal itu memberi kontribusi nyata bagi semangat pejuang-pejuang republik sendiri.

Ironisnya, emosi Suharto yang berlebihan atas dampak tindakannya telah menutupi keahlian sejatinya sendiri dalam mengorganisasi serangan ini. Ia menerima surat dan laporan dari para komandan di kawasan lain yang mengakui adanya dorongan semangat pada pasukan mereka sebagai hasil dari aksi yang dilakukannya. Serangan itu, seperti yang diamati oleh PBB dalam laporannya, adalah hasil dari rencana panjang yang penuh perhitungan, dan koordinasi yang hanya bisa dilakukan oleh "orang yang memiliki kekuasaan relatif, mengetahui seluk beluk kota, memiliki karisma, dan memiliki cukup kewenangan untuk menekankan keinginannya kepada para komandan dari beragam unit."[113] Sudirman, dalam suratnya kepada Nasution, bahkan bersuara lebih lantang, Suharto, ujarnya, adalah "bunga pertempuran".[114]

PERSIAPAN KEMENANGAN

Jelas bahwa Belanda pada Maret—dengan pupusnya harapan untuk menghancurkan atau melumpuhkan Republik, gagalnya taktik agresif mereka dalam mendapatkan dukungan dari negara federal yang telah diciptakannya sebagai tandingan Republik, dan dengan ditarik mundurnya dukungan Amerika—telah kehilangan semangat melakukan proyek yang kini tampak mustahil. Perundingan lebih lanjut antara Belanda dan Republik menghasilkan perjanjian Rum–

Van Royen pada 7 Mei 1949, yang menyatakan gencatan senjata, pembebasan pemimpin republik, termasuk Sukarno–Hatta, penarikan mundur pasukan Belanda dari Yogyakarta, dan penyelenggaraan Konferensi Meja Bundar di Den Haag untuk mengurus masalah penyerahan kedaulatan kepada Indonesia federal yang secara efektif akan dikuasai Republik.

Tekanan militer yang terus-menerus terhadap pasukan Belanda berperan penting dalam terbentuk dan terciptanya kesepakatan-kesepakatan ini. Pada April 1949, tiga batalion Brigade X Suharto beroperasi di daerah-daerah yang terpetakan dengan baik. Batalion I, di bawah pimpinan Mayor Sarjono, beroperasi ke bagian barat kota Yogyakarta, dan bermarkas di sekitar Panggeng. Batalion II dan III, yang masing-masing dipimpin oleh Mayor Sudarmo dan Mayor Sruhardoyo, beroperasi masing-masing di sekitar Kebumen dan Purworejo. Laporan yang lebih belakangan menyinggung batalion keempat, dipimpin oleh Mayor Sujono. Semua pasukan ini tampaknya beroperasi dengan amat mandiri, dan mereka terus menggempur pasukan penjajah di daerah-daerah hingga ke selatan dan barat daya Yogyakarta. Nasution mencatat rasa frustrasi yang dialami Belanda dalam usahanya menduduki daerah itu: "Jalan yang di pagi harinya telah mereka [Belanda] bersih dari rintangan, malam sesudahnyas telah penuh lagi dengan segala macam penghalang yang dibuat oleh kaum gerilya bersama rakyat yang sering memberikan bantuan." Suharto sendiri pada April dikabarkan membangun markas brigadenya di Karangmontong, tempat ia tampaknya tinggal hingga awal Juni. Pada 16 April, tampaknya Suharto mengadakan rapat dengan para komandan batalionnya dan dengan perwira lain yang mengepalai pasukan ke selatan dan barat Yogyakarta di Soregedong; rapat itu menghasilkan sebuah instruksi untuk menggencarkan penyusupan ke Yogyakarta. Sebuah laporan Belanda pada Mei mencatat tentang meningkatnya penembakan, sabotase, balas dendam, dan "teror". Sebuah laporan intelijen dari awal Juni mencatat sebuah pertemuan di Jiwosari antara Jatikusumo, Nasution, Suharto, dan semua komandan Wehrkeise

di sekitar Yogya. Pada pertemuan ini, secara mutlak disepakati untuk menggencarkan perjuangan; "tidak seorangpun yang yakin akan manfaat cease fire order. Dan kita sangsi akan hasil diplomasi. Yang sangat terkesan dalam konferensi itu ialah kepercayaan kita kepada kemustajaban perjuangan gerilya."[115] Pada awal Juni, dengan semakin dekatnya penyerahan kota, insiden skala kecil tampak meningkat: "pada masa ini di kota Yogya hampir setiap malam ada penembakan, sebentar ataupun lama, terhadap pos Belanda."[116]

Tetap menekan Belanda adalah satu hal, namun Republik semakin sulit memastikan tertibnya pemulihan kekuasaan Republik di Yogya; situasi militer dan politik internalnya bahkan lebih kacau ketimbang biasanya, terlepas keberhasilannya menangkal upaya militer Belanda. Kondisi darurat perang gerilya telah melemahkan jaringan otoritas politik dan militer yang sudah lemah, sementara ketidakpastian tentang nasib politik Republik menjadi lahan subur bagi sejumlah kepentingan politik yang saling bersaing dan bagi ketegangan serta gosip aneh yang berkembang seputar itu. Menurut Nasution, berbagai gosip liar tentang masa depan tersebar; salah satunya adalah Suharto berniat membentuk sebuah tentara 'federal,' [pro-Belanda].[117] Sekali lagi, menurut laporan seorang republikan, ada usaha yang dilakukan kelompok kiri di Yogyakarta untuk menentang kesepakatan 7 Mei. Sukarni yang kiri dikabarkan berusaha mendekati tokoh-tokoh militer berpengaruh, termasuk Suharto, agar mau mendukung langkah-langkah ini, tetapi "upaya mereka diketahui jajaran pemimpin TNI, dan gagallah rencana itu."[118]

Pada saat tegang dan tidak pasti ini, hubungan terdekat Suharto adalah dengan komandannya, Sudirman dan, terutama, dengan Sultan, seorang tokoh yang pengaruhnya di Jawa Tengah tak terbantah kala itu. Tampaknya Suharto terus menjaga kontak dengan Sudirman dan, memang, ia bertindak sebagai perantara komunikasi antara Sudirman dan Sultan. Sebuah laporan intelijen Belanda menyatakan bahwa, sekitar 6 Mei, Suharto telah mengun-

jungi Sudirman di daerah Sentolo, tempat Suharto melaporkan keadaan payah pasukan Republik di sekitar Yogya.[119] Pada 13 Juni, diadakan sebuah pertemuan antara Sudirman, Suhud (komandan SWK 103), Suharto, dan Selo Ali (komandan subteritori militer), yang membahas bentuk masa depan angkatan bersenjata republik, dan terutama posisi Sudirman di dalamnya. Salah satu isu yang diangkat adalah perbedaan lama antara Sudirman dan Nasution.

Satu yang menjadi ukuran semakin menonjolnya Suharto adalah penyebutannya secara rutin dalam laporan Belanda pada 1949 sebagai seorang tokoh militer senior. Lebih penting lagi, ia tampak makin mendapat kepercayaan dari Sultan, mungkin disebabkan pertumbuhan stabil otoritas dan reputasinya di Yogya sejak awal perang gerilya. Kepercayaan semacam itu terwujud dalam dua cara. Suharto tampaknya diberi tanggung jawab oleh sultan untuk menghancurkan atau membendung kekuatan-kekuatan yang mengancam ketertiban republik setelah kembalinya Belanda ke Yogyakarta. Sebuah laporan dari awal Maret, yang mencatat bahwa di Yogya ada "gerombolan kuat" pasukan yang berafiliasi dengan komunis, menyebutkan usaha-usaha Kol. Latief [Hendraningrat], mantan komandan Yogya, dan Letkol Suharto, mantan komandan Brigade X—yang secara finansial didukung sultan—membentuk pasukan guna mendukung Sultan dan sebagai penangkal gerombolan PKI yang bersatu menentang sultan."[120] Pada 11 Mei, sebagai respons terhadap bisikan bahwa mungkin ada tanda-tanda kegiatan komunis dalam proses pengembalian Yogyakarta ke Republik, sultan memperhatikan, di mana pada saat yang sama dia memberi Suharto perintah untuk segera melucuti "semua elemen liar" di luar tempat-tempat yang diduduki pasukan Belanda dalam Yogyakarta, dan merasa yakin bahwa dia bisa, dengan bantuan pasukan Suharto dan yang lainnya, untuk menjaga ketertiban dan keamanan.

Tampaknya Suharto menerima tugas ini dengan senang hati. Sebuah laporan Belanda pada awal Juni mencatat bahwa "perintah

yang diberikan oleh Sultan pada atau sekitar 11 Mei untuk melucuti sebanyak mungkin pasukan PKI memang telah mengakibatkan dipenjaranya dan dilucutinya pasukan PKI dan gerombolan-gerombolan lain. Selain PKI, ikut dilucuti adalah KRIS, dan pasukan dari BPRI-Yogya yang sangat terpengaruh komunis."[121] Pasukan KRIS, di pimpin Mayor Sumual, menentang perjanjian Indonesia-Belanda dan diperintahkan Suharto untuk meninggalkan Karesidenan. Sumual mengabaikan perintah ini dan, menurut laporan tersebut, Suharto bermaksud menyerang pasukannya. Pada Juli, laporan Belanda lainnya mengemukakan bahwa Suharto telah menekan, hingga ke lini Belanda, kelompok-kelompok komunis di daerah timur Yogya. Suharto tampaknya terus menekan kekuatan komunis. Pada September, dikabarkan bahwa Batalion IV brigadenya, di bawah Mayor Sujono, telah dikirim ke daerah Solo untuk memerangi PKI.

Suharto juga—meski tak terlepas dari kontroversi—dipercaya mengemban tugas meneguhkan dan mempertahankan otoritas dan ketertiban di Yogyakarta pada saat dan sesudah serah terima dari Belanda. Tampaknya pada akhir Maret atau awal April telah diputuskan bahwa, pada saat pengembalian Yogya, Suharto dan pasukannya akan memainkan peran penting dalam mengamankan kota, dengan Markas Pertahanan Kota di bawah kepemimpinan gabungan walikota Sudarisman dan Suharto. Rencana mengenai penempatan pasukan dan otoritas pun dibahas. Laporan Belanda lain bertanggal 13 Mei menyatakan bahwa "Letkol Suharto [kala itu dianggap sedang berada di tenggara Yogya sekitar Terong] telah ditunjuk sebagai Panglima pasukan Republik yang memiliki tanggung jawab atas keamanan Yogya ketika serah terima kewenangan dilaksanakan."[122]

Sebenarnya, keadaannya tidaklah semulus seperti dituturkan laporan. Suharto dengan tegas menolak proposal bahwa Belanda secara formal menyerahkan kewenangan atas Yogya kepada polisi, dan dia menyampaikan keberatan ini kepada sultan.[123] Dalam pandangannya, Belanda tidak pernah mengendalikan Yogya. Jadi,

Belanda harus pergi tanpa segala macam upacara. Ia juga berkeberatan atas diserahkannya keamanan kota yang sudah direbut kembali itu kepada polisi. Bagi dia, TNI-lah, yang terus-menerus mengobrak-abrik pertahanan Belanda, yang pantas dan berhak mengendalikan kota ketika Belanda telah pergi dan kemudian, setelah beberapa lama, barulah TNI yang menyerahkan kekuasaan kepada polisi. Tampaknya ada perbedaan antara Suharto dan Jen Mohammed, komandan Brigade Mobil Polisi, mengenai siapa yang harus melaksanakan tugas menjaga perdamaian dan keamanan setelah mundurnya Belanda. Jen dan sultan berpandangan tugas itu adalah tugas polisi. Tetapi, Suharto berpikir bahwa dia, "sebagai Komandan Perang daerah Yogya", beserta pasukannyalah yang harus mengemban tanggung jawab ini.[124] Dalam kedua perdebatan ini, Suharto memiliki argumen lebih baik. Belanda memulai penarikan mundur terencana dari kota tanpa insiden atau keributan pada 29 Juni 1949. Atas perintah Suharto, polisi berderap masuk kota dengan megah, sementara pasukan TNI ("kebanyakan dari mereka tidak memakai uniform yang tertentu dan tidak memakai sepatu") hanya muncul begitu saja di kota.[125] Suharto sendiri menggunakan kesempatan untuk mengunjungi istri dan bayinya di keraton. Pada 6 Juli, para pemimpin politik Republik kembali ke Yogyakarta. Pada 17 Juli, Suharto yang mewakili sultan, dihadiri pula oleh Pakualam, secara resmi menyerahkan wewenang kota kepada komandan polisi, Jen.

Namun, tampaknya, kontroversi sebenarnya, setidaknya sebagian, bersifat lebih tidak kentara ketimbang versi Suharto. [126] Menurut laporan kontemporer, ada "perbedaan serius" antara Kol. Jatikusumo, keturunan keraton Solo yang mantan kepala staf Angkatan Darat dan komandan Akademi Militer Yogya, dan Suharto mengenai siapa yang mengomandani pasukan republik di Yogyakarta setelah Yogya kembali ke Republik. Tampaknya sultan, setelah menunjuk Suharto sebagai komandan pasukan TNI dalam pendudukan kembali Yogya dan penjagaan wewenang di kota, malah memutuskan menggunakan pasukan lain, terutama unsur

brigade mobil dan polisi di bawah komando Jatikusumo untuk tujuan tersebut. Ini keputusan yang tidak disukai Suharto. Suharto menanggapi dengan cara meningkatkan aktivitas militernya di sekitar kota, tampaknya sebagai usaha menunjukkan bobot kekuatannya kepada sultan. Memang, pertikaian ini begitu serius sehingga ada kekhawatiran terjadi benturan antara pasukan dua komandan ini. Bahkan sempat disinggung bahwa kontroversi antara Jatikusumo dan Suharto telah mengakibatkan gagalnya usaha Suharto melucuti pasukan Jatikusumo.

Keluhan Suharto terhadap sultan tampaknya menorehkan kesan. Ketika di awal Juni muncul rencana pengambilalihan kota oleh 600 orang dari Brigade Mobil dari barat dan selatan, 750 orang polisi dan pasukan non-TNI dari utara, serta pasukan Brigade X sebagai cadangan, laporan Belanda 1 Juli menyebutkan pertemuan terbaru para komandan di Jiwosari untuk memantapkan penempatan pasukan bagi pengambilalihan dan mencatat bahwa "tampaknya ada perubahan dalam komposisi pasukan penduduk-an." Pasukan itu kini meliputi Batalion I pimpinan Sarjono dari Brigade X Suharto, dan tidak ada yang berasal dari Jatikusumo atau Jen; "Jadi, tampaknya Letkol Suharto telah memenangkan pertarungan dengan Sultan dan berhasil membuat pesaingnya tetap berada di luar kota."[127] Ketika Belanda hengkang, Suharto terus terang menyatakan, "Saya yang membuat peraturan."[128] Dari 2.000 anggota pasukan republik yang ditugaskan di kota itu setelah penyerahan, 600 orang merupakan anggota pasukan TNI yang "terpilih dan berdisiplin tinggi di bawah komando Suharto," demikian dikatakan sultan.[129]

Kejadian-kejadian ini meneguhkan pengamatan Sukarno pada 1946 tentang sifat keras kepala Suharto. Tetapi, ini sifat keras kepala yang berbeda dari sifat keras kepala, lahir dari kehati-hatian dan ketidakpastian lugu, yang ditampilkan Suharto di Wiyoro pada Juli 1946. Ini adalah sifat keras kepala yang datang dari keyakinan akan yang benar dan baik. Dalam benaknya, TNI-lah yang harus melaksanakan perjuangan fisik setelah takluknya

politisi sipil pada 19 Desember; Angkatan Daratlah yang harus diberi penghargaan atas suksesnya Republik kembali ke ibu kota perjuangan. Pandangan merendahkan politisi sipil ini menjadi pandangan umum yang dianut kalangan pemimpin militer. Reid mengatakan bahwa "rasa hormat militer terhadap pemerintah sipil sangat melemah pada masa ini, hasilnya terlihat nyata sejak saat itu."[130]

Suharto kemudian telah berubah secara drastis dari komandan resimen tahun 1946 muda yang tidak canggih dan tidak berpengalaman. Pangkat dan posisinya yang relatif lebih tinggi, reputasi yang telah dibangunnya sebagai seorang panglima militer yang kompeten, berpengalaman, berani, dan tangguh,[131] keakrabannya dengan mesin politik para perwira militer tingkat tinggi serta politisi, dan hubungannya yang "sempit namun kerap"[132] dengan teman-teman sejawatnya yang terbentuk umumnya oleh pengalaman revolusioner, dan khususnya pada masa gerilya, semuanya menumbuhkan keteguhan mendalam dan keyakinan akan kemampuan dirinya, menumbuhkan rasa dan pemahaman yang tajam akan apa yang menurutnya benar, dan menumbuhkan sinisme akan motif orang-orang di luar lingkaran dekatnya, terutama politisi sipil lemah dan suka bertengkar. Kecenderungan-kecenderungan ini akan semakin tegas di tahun-tahun berikutnya.

BULAN-BULAN TERAKHIR

Suharto dikabarkan berada di daerah Tojono sekitar awal Juli 1949, tempat ia mendirikan markasnya dengan staf berjumlah sekitar enam puluh orang. Unit-unit lain brigadenya, digambarkan memiliki markas "yang sangat aktif", beroperasi di daerah barat daya Yogyakarta (Batalion I di bawah komando Mayor Sarjono), di daerah Kebumen (Batalion II berjumlah sekitar 300 orang, separuhnya bersenjata, di bawah pimpinan Mayor Sudarmo), di SWK 103 (Batalion III di bawah komando Mayor Sruhardoyo), dan sekitar Wonosari (Batalion IV dipimpin oleh Mayor Sujono).

Terlepas dari hasil negosiasi antara Belanda dan Republik, operasi militer tetap diteruskan. Batalion III, di bawah Mayor Sruhardoyo, dikabarkan merupakan faktor berbahaya bagi militer Belanda.

Tugas terakhir Suharto dalam perjuangan adalah mengawal panglima TNI, Sudirman, kembali ke Yogyakarta. Sebagaimana dituturkan Suharto, Sudirman belum merespons permohonan sultan dan Kol. Gatot Subroto agar kembali setelah mundurnya pasukan Belanda karena Sudirman tidak suka dengan hasil perundingan Rum–Van Royen dan sangat curiga terhadap niat Belanda. Suharto sendiri akhirnya ditugaskan untuk mengantar Sudirman kembali ke kota. Menurut Suharto, ia bertugas membujuk Sudirman—yang tampaknya tidak mau kembali ke kota, sementara perjuangan masih berlangsung di tempat lain, karena khawatir akan tipu daya Belanda dan tidak percaya pada politisi sipil—kembali untuk memimpin pasukannya dari ibukota Republik. Suharto bertemu Sudirman pada 8 Juli di desa Krejo, Kecamatan Ponjong. Setelah beberapa jam diskusi, Suharto berhasil membujuk Sudirman kembali. Pada 9 Juli, Sudirman, yang menderita sakit parah akibat tuberkulosis dan hanya bisa bergerak jika ditandu, meninggalkan posnya di pegunungan dekat Wonosari. Suharto sudah pergi lebih dulu untuk menyiapkan arak-arakan penyambutan di Yogya. Sudirman ditandu hingga sungai Opak, di mana pada 10 Juli ia ditemui Simatupang dan Suharjo Harjowardoyo yang datang dengan sebuah mobil dan sebuah Land Rover untuk mengantar Sudirman menempuh sisa perjalanan. Suharto sendiri memimpin arak-arakan penyambutan yang diberikan Brigade X atas kembalinya Panglima Besar.[133]

Mungkin saja Suharto membesar-besarkan bobotnya dalam peristiwa ini. Menurut versinya, ialah yang menjadi orang kepercayaan Sudirman. Ia jugalah yang konon menerima pujian dari panglima besar atas tindakannya dalam Serangan Umum 1 Maret dan setelahnya, atas sarannya yang bijak kepada Sudirman tentang bagaimana harus berperilaku dan kemana harus pergi setiba di Yogya. Namun, ada emosi tertentu dalam versi Suharto yang

mengungkap rasa hormatnya yang dalam terhadap panglimanya. Dalam hal nilai dan pandangan, mungkin tidak ada tokoh militer lain selain Sudirman yang bisa begitu dekat dengan Suharto. Ketika Sudirman wafat pada awal 1950, Suhartolah yang memimpin upacara pemakamannya dari Magelang ke Yogyakarta dan ia jugalah yang memimpin iring-iringan perwira yang mengantar jenazah Sudirman ke pemakaman.[134]

Di bulan-bulan akhir 1949, dengan gencatan senjata pada akhirnya, ketika politisi sipil bersiap diri untuk perundingan akhir di Den Haag yang akan berujung pada penyerahan kedaulatan ke tangan satu Indonesia serikat, Suharto dengan aman ditempatkan di Yogyakarta. Ia bertanggung jawab atas Karesidenan Yogyakarta juga kabupaten Kebumen dan Purworejo. Pada Oktober, Divisi II dan III bersatu membentuk Divisi III yang lebih besar dengan tujuh komando brigade (termasuk Brigade X Suharto di Yogya), dengan Gatot Subroto sebagai panglima dan gubernur militer. Empat batalion Suharto, masing-masing berjumlah sekitar 800 orang dan masing-masing dibagi menjadi empat kompi, bermarkas di Tempel (Batalion I), Gombong (Batalion II), Pengempong (Batalion III), dan Bulokerto (Batalion IV). Pasukan ini ditempatkan berdasarkan konsep teritorial; disebar dalam batalion dan, di bawah batalion, ada kompi-kompi yang menentukan wilayah kontrol dan operasi. Kekokohan dan keselarasan pola organisasional ini menjadi satu ukuran seberapa jauh Angkatan Bersenjata telah melangkah dari awal yang kacau-balau di pertengahan 1945.

Suharto sendiri telah berkembang pesat. Pengalaman berjuangnya telah memberi dia pelajaran rumit dan padat yang telah menggemblengnya menjadi tokoh yang kelak memainkan peran penting dalam sejarah bangsa. Dalam jangka waktu sedikit lebih dari 4 tahun, tekanan mobilisasi sosial revolusi telah melontarkan pria biasa—berasal dari kubangan latihan militer berdebu di daerah pinggiran Madiun—ke panggung utama kekuatan Indonesia di Yogya,—tempat dia pindah, meski tidak dengan mudah dan langsung menonjol—ke lingkaran presiden, sultan, perdana men-

teri, dan jenderal. Pengalamannya juga mulai membentuk kesadaran politis, meski masih tersembunyi, yang menekankan kesatuan dalam mencapai keberhasilan politik.[135] Pengalaman ini pula yang melahirkan kecurigaan tertentu orang-orang yang memaksakan, melalui kekerasan atau ancaman, keyakinan fundamental mereka mengenai makna Indonesia; pengalaman ini juga makin membuat Suharto tidak percaya pada orang-orang Indonesia yang memiliki kecenderungan laten memecah belah. Selain itu, pengalamannya telah memberi dia pelajaran akan pentingnya hierarki dan pentingnya memahami posisi dalam hierarki tersebut. Secara khusus, pengalamannya itu kian memperdalam pemahamannya bahwa rakyat membutuhkan (dan menghormati) kepemimpinan, dan kian menumbuhkan rasa tanggung jawabnya terhadap rakyat. Pengalamannya itu juga membuat ia semakin tidak menyukai sifat-sifat dan kurangnya rasa hormat politisi sipil terhadap prestasi Angkatan Darat.[136] Lagi pula, Suharto belum begitu terpengaruh oleh segala arus pemikiran politik khusus dan, berdasarkan peran perantara yang dituntut darinya, ia secara umum dianggap sebagai seseorang yang mampu melampaui dan merundingkan perbedaan pemikiran dalam berbagai kalangan. Ia muncul dari revolusi dengan reputasi besar karena kepemimpinannya yang efisien di lapangan, ditambah kehandalan politik dan kesiagaannya yang teguh. Sifat-sifat ini akan, jika tidak langsung, membantu langkah majunya di masa-masa mendatang.[]

3 Komando Jawa Tengah 1950–1959

ANGKATAN DARAT yang lahir dari perjuangan kemerdekaan, dalam kadar tertentu, merupakan institusi paling berkuasa di negara baru ini. Karena keberhasilannya dalam perang antikolonial di tengah takluknya sipil dan kejanggalan yang melimpah, Angkatan Darat mendapat prestise tinggi. Namun, ambisi politik Angkatan Darat masih belum tumbuh. Dengan wafatnya tokoh karismatis Panglima Besar Sudirman pada Januari 1950 (dan hilang pula bersama wafatnya, konsep bahwa Angkatan Darat mungkin bisa berperan lebih menentukan dalam pembangunan negara), Angkatan Darat berada di bawah kendali perwira-perwira muda didikan Barat dan tidak memiliki pengalaman politik seperti Nasution dan Simatupang, yang lebih menghargai kemampuan teknis ketimbang keahlian dan keterlibatan dalam politik, dan yang menyetujui konsep tunduknya kekuatan angkatan bersenjata pada kendali sipil. Angkatan Darat belum mengembangkan alternatif bagi demokrasi gaya Barat yang diadopsi oleh negara baru Indonesia; kemudian, Angkatan Darat menghadapi masalah yang lebih mendesak untuk mengembangkan kesatuan internalnya, merombak ukuran, bentuk, dan struktur komandonya, serta beradaptasi dengan situasi damai.

Suharto, dikukuhkan menjadi letnan kolonel setelah penyerahan kedaulatan, tidak berpikir untuk meninggalkan Angkatan Darat setelah selesainya pertikaian dengan Belanda. Karier militer Suharto, sebagaimana telah kita lihat, telah memberinya peningkatan posisi sosial, pengaruh, dan kedekatan pada kekuasaan yang tak pernah diimpikan sebelumnya. Seperti banyak teman seperjuangannya, pendidikan formalnya yang tidak terlalu tinggi membuatnya tidak cocok menempati posisi sipil dengan status dan prestise yang sama, dan Suharto tidak menunjukkan kecenderungan untuk berkecimpung penuh dalam dunia bisnis swasta di mana dia tidak memiliki pendidikan, serta mungkin juga tidak berpengalaman untuk itu. Sifatnya yang hati-hati dan cenderung menjaga keamanan tidak membuatnya mengabaikan warisan pengabdiannya yang nyaris satu dasawarsa pada militer dan pengalamannya akan hal-hal tak jelas. Oleh karena itu, Suharto mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan rutin prajurit profesional dalam demokrasi masa-damai, mungkin dengan sedikit perhatian pada politisi sipil yang mulai berebut kekuasaan di Jakarta. Para politikus sipil itu adalah produk didikan Barat, berasal dari keluarga kaya atau aristokrat, sering kali berkebudayaan kosmopolitan, dan alam mereka terpisah jauh dari satu-satunya dunia kecil Jawa Tengah yang dikenal Suharto. Visinya saat itu terbatas dan berorientasi ke dalam.

KE MAKASAR

Suharto tidak lama mengalami rutinitas masa damai di posnya di Yogya. Penyerahan kedaulatan formal oleh Belanda pada Desember 1949 bukan diberikan kepada Republik Indonesia, melainkan kepada satu Republik Indonesia Serikat (RIS) yang terdiri atas enam belas negara bagian di mana Republik adalah komponen dominan, secara moral maupun dalam hal populasi, prestise, dan pengaruh. Dalam hitungan minggu setelah penyerahan kedaulatan, negara-negara bagian lain dari RIS mulai meleburkan diri ke

Republik; pada awal April 1950, RIS direduksi menjadi tinggal empat komponen: Republik, negara Indonesia Timur, Sumatra Timur, dan Kalimantan Barat. Dari tiga terakhir, Indonesia Timur adalah negara bagian tertua dan terbesar yang, karena kedekatan historisnya dengan pemerintah Belanda, menjadi negara yang paling bersikukuh mempertahankan kedaulatan. Indonesia Timur juga sangat dipenuhi pasukan KNIL, dengan sedikit prajurit republik di sana.

Perjanjian Den Haag pada Desember 1949 yang mendasari penyerahan kedaulatan telah memerintahkan 65.000 orang anggota pasukan KNIL di Indonesia untuk diserap ke dalam angkatan bersenjata RIS, kalau tidak ke dalam angkatan bersenjata Belanda (KL) yang jumlahnya jauh lebih kecil, atau dibubarkan saja. Indonesia Timur, dengan keyakinan kuat bahwa Republik berusaha keras menyerapnya, menolak keputusan RIS menempatkan pasukan RIS di Sulawesi Selatan sebagai tandingan bagi kekuatan KNIL. Pada awal April 1950, mantan pasukan KNIL di bawah pemimpin asal Bugis, Kapten Andi Azis, atas perintah Menteri Kehakiman Indonesia Timur Dr. Soumokil, mengadakan kudeta di Makasar. Ia menangkap komandan militer TNI yang baru dilantik, Letkol Mokaginta, tak lama sebelum kedatangan 900 orang anggota pasukan RIS (dari Divisi Brawijaya Jawa Timur) dan memaksa pasukan-pasukan itu hengkang. Meski menolak mendukung tindakannya, Indonesia Timur, yang menurut Azis dibelanya, tidak memiliki kekuatan untuk mencegahnya. Akibatnya, pemerintah Indonesia Timur jatuh, kemudian diganti pemerintah prorepublik. Ketiadaan hukum merajalela, akibat dari pertikaian di Sulawesi Selatan antara kekuatan gerilya pro-republik di daerah pinggiran, yang berusaha melakukan pembalasan terhadap mantan kelompok penguasa pro-Belanda, dan pasukan KNIL yang belum dibubarkan.[1]

Untuk menghadapi krisis itu, Sukarno pada 13 April secara formal menyebut Andi Azis sebagai pemberontak dan meminta pasukan RIS memulihkan ketertiban. Azis akhirnya dibujuk kem-

bali ke Jakarta untuk bernegosiasi. Ketika tiba pada 16 April, ia malah ditangkap. Ekspedisi berkekuatan satu divisi pasukan RIS, terdiri atas tiga brigade Jawa dan satu batalion dipimpin orang Manado Kristen, Letkol A.E. Kawilarang, telah diperintahkan untuk memulihkan kembali otoritas RIS. Termasuk di dalam kekuatan yang dipersiapkan tergesa-gesa itu adalah dua batalion perang dari Brigade III dan Divisi Diponegoro Suharto. Kekuatan itu kemudian diberi nama Brigade Garuda Mataram. Dimasukkannya brigade Suharto mungkin satu tanda bahwa upaya-upayanya dalam perjuangan kemerdekaan yang baru usai sudah dicatat oleh para atasannya, terutama oleh Menteri Pertahanan yang baru, Sultan Hamengkubuwono IX. Kekuatan Suharto, yang total berjumlah 1.851 orang, pindah dari Yogya pada 14 April, berlayar dari Semarang pada 21 April dan mendarat dengan aman di pelabuhan Makasar pada 26 April, saat Makasar sudah jatuh ke unsur-unsur lain angkatan yang dirancang untuk operasi militer.

Brigade Suharto ditempatkan di kota Makasar dan Suharto diserahi tugas memimpin sektor Makasar yang meliputi kota Makasar itu sendiri beserta daerah di sebelah utara dan selatannya. Suharto mengerahkan sebagian besar pasukannya untuk menyegel barak KNIL di kota itu. Melihat kondisi yang ada, tugas ini relatif tenang, namun tidak sepenuhnya bebas dari insiden. Dapat diduga bahwa ketegangan antara RIS dan pasukan KNIL/KL mewujud dalam insiden penembakan yang cukup besar pada pertengahan Mei; dua hari pertempuran membuat sepuluh orang anggota APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat) tewas dan dua puluh orang terluka. Kekerasan segera surut ketika Suharto, berdasarkan perintah dari atas, telah memerintahkan gencatan senjata dan, bersama pemimpin KL/KNIL, membuat garis demarkasi tegas yang membatasi pergerakan kekuatan masing-masing pihak yang bersangkutan.

Ada pula kesulitan-kesulitan dalam mengoordinasi dan mengontrol kekuatan-kekuatan gerilya lokal prorepublik yang sering bertikai sendiri dan tak disiplin. Kekuatan-kekuatan ini berjumlah

sekitar 4.000 orang di Sulawesi Selatan, dan Harimau Indonesia adalah salah satu contohnya. Sebagai satu aturan umum, kebijakan rasionalisasi angkatan bersenjata pemerintah membuat banyak prajurit biasa berpendidikan rendah sulit masuk ke dalam Angkatan Darat. Namun, APRIS mengeluarkan kebijakan bahwa kekuatan-kekuatan semacam itu harus dimasukkan secara formal ke dalam APRIS.[2] Pada 20 Mei, Suharto mengeluarkan satu perintah untuk mengumpulkan pasukan-pasukan gerilya dalam sektornya. Dari 3.428 orang yang terkumpul, 1.044 orang berhasil lulus tes sikap, kecerdasan, dan fisik, dan kemudian menjadi satu batalion APRIS yang ditempatkan di Bantaeng. Suharto secara resmi meresmikan batalion yang dinamakan Depot II itu pada 25 Juni 1950.

Beberapa kelompok gerilya menolak diperlakukan semacam ini, termasuk satu batalion KGSS (Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan) dan pasukan 'Mobil Brigade Ratulangi (MBR)' di bawah Arief Rate. Ketimbang menyatu dengan APRIS, kelompok-kelompok ini lebih memilih tetap menjadi unit-unit tempur tunggal, dan inilah yang ditolak Suharto. Setelah menolak upaya pihak lain untuk mengendalikan mereka, kelompok-kelompok ini menghadapi serangan dari pasukan Suharto. Kelompok-kelompok gerilya ini mundur ke hutan dan muncul kembali setelah pecahnya pertikaian antara APRIS dan KL/KNIL pada awal Agustus (lihat di bawah), tampaknya untuk mendukung pasukan APRIS. Namun, muncul konflik ketika satu kompi di bawah pimpinan kapten Brigade Mataram, Abdul Latief, mengeksekusi Arief Rate dan satu pemimpin MBR lainnya. Goncangan yang kemudian muncul "diselesaikan hanya setelah pertempuran keras" dan berujung pada penghancuran batalion Arief, "yang bertentangan dengan kehendak dan perintah Letnan Kolonel Suharto." Insiden ini "memicu perasaan sakit hati di kalangan penduduk setempat terhadap 'orang Jawa'. Salah satu prinsip dasar Suharto untuk tidak bertindak tergesa-gesa telah dilanggar."[3]

Masalah Suharto seputar dimasukkannya kelompok gerilya ke dalam TNI kembali membawa dia berhubungan dengan Kahar

Muzakkar yang telah diizinkan untuk kembali ke Makasar pada Juni untuk membantu negosiasi dengan kelompok gerilya berkenaan dengan masuknya kelompok gerilya ke dalam Angkatan Darat reguler. Kahar juga berambisi untuk menjadi komandan militer Sulawesi Selatan. Sebagaimana kita lihat, Suharto memiliki pengalaman pribadi dengan Kahar pada masa perjuangan revolusioner dan jelas ia tidak menyukai semangat kemerdekaan Kahar; tidak meyukai persepsi Kahar yang menganggap diri sendiri sangat penting; dan tidak menyukai kemampuan handal Kahar dalam membuat gejolak di mana pun dia berada. Oleh karena itu, menurut Roeder, Suharto "sangat menentang keputusan Markas Besar" [untuk mengembalikan Kahar ke Makasar]. "Kahar tidak pernah menepati janjinya. Dia akan lebih banyak menciptakan gejolak di daerah itu," Suharto "mengingatkan".[4] Kahar sebenarnya ingin terus ikut dalam gerilya. Kasus ini mencerminkan keyakinan umum bahwa TNI tidak terlalu menyukai penduduk setempat, dan kemudian akan mengakibatkan pemberontakan besar melawan pemerintah.

Ketika di Makasar inilah Suharto mengenal keluarga Habibie, yang satu dari sepuluh anggotanya adalah Bacharuddin Yusuf Habibie yang berusia empat belas tahun (kelak pada 1998 menggantikan Suharto sebagai presiden). Keluarga ini "tinggal di seberang jalan, di depan Brigade Mataram," dan Suharto tampaknya menjalin kedekatan dengan keluarga itu dan sering mengunjungi rumah mereka. Suharto menuturkan betapa senangnya dia mendengarkan cerita-cerita Jawa dari Ny. Habibie, seorang asli Yogyakarta. Dia menuturkan pula kehadirannya saat Pak Habibie meninggal karena serangan jantung ("Saya berkesempatan menutupkan matanya sambil memohonkan ampun pada Tuhan Yang Maha Esa"), dan juga tentang bantuan brigade untuk pemakaman, dan tentang dirinya yang berperan sebagai wali menggantikan Pak Habibie ketika seorang kaptennya menikahi salah seorang putri Habibie.[5]

Pada Juli, istri Suharto (dan anaknya) menjenguknya selama seminggu, dan Suharto menemani sang istri dalam penerbangan kembali ke Jakarta karena dia telah diperintahkan melapor ke markas besar angkatan bersenjata. Baru satu jam menginjak kembali tanah Makasar pada siang hari 5 Agustus, markas besar brigadenya tiba-tiba diserang hebat oleh pasukan KNIL dan KL dengan menggunakan persenjataan dan mortir api. Insiden ini terjadi akibat ketegangan yang meningkat tiba-tiba antara pasukan KNIL/KL dan APRIS; ketegangan yang tampaknya muncul sebagai akibat ditembak matinya seorang prajurit republik—yang baru tiba beberapa hari sebelumnya dan secara tak sengaja melanggar garis demarkasi—oleh pasukan KNIL/KL. Suharto berhasil meredam serbuan itu, memanggil pasukan dari luar kota untuk kemudian balas menyerang dengan bantuan artileri laut dan darat serta dukungan dari udara. Serangan lain dari KNIL/KL dilancarkan pada pagi hari 7 Agustus; serangan ini berkembang menjadi perang yang berlangsung hingga malam dan berakhir dengan terpukul mundurnya kelompok pemberontak akibat serangan balik TNI yang terkoordinasi dengan baik.[6] Hari berikutnya, pertikaian yang terjadi nyaris serupa, yaitu ada serbuan dan serangan balik, dan akhirnya pasukan KNIL/KL tiba-tiba menyerah. Dahsyatnya peperangan tampak dari laporan bahwa lebih dari 1000 orang penduduk sipil terbunuh dan lebih dari 300 rumah hancur.[7]

Di tengah situasi ini, Suharto enggan memberlakukan gencatan senjata meskipun Kawilarang, komandannya, telah menyampaikan keinginan untuk itu kepada Suharto melalui seorang staf. Memang, Suharto mengabaikan perintah gencatan senjata karena ia takut itu hanya tipuan musuh. Barulah ketika Kawilarang secara pribadi menemui Suharto untuk meyakinkan bahwa musuh memang ingin menyerah, gencatan senjata dilaksanakan. Pertemuan selanjutnya antara Kawilarang dan komandan pasukan KNIL di City Hotel di Makasar (tidak dihadiri Suharto, mungkin satu indikasi ketidaksenangannya pada tindakan Kawilarang yang mau berunding) menghasilkan kesepakatan yang membuat, setelah

negosiasi lebih lanjut, pasukan KNIL/KL dilucuti senjatanya dan disita perlengkapannya untuk kemudian diizinkan meninggalkan Makasar pada akhir Agustus.[8] Misi utama mereka tercapai—tetapi, reputasi mereka dan reputasi TNI secara umum di kalangan rakyat Sulawesi Selatan telah ternoda karena tragedi Arief Rate—dan pasukan Suharto kembali ke Yogya pada 17 September 1950 setelah kehilangan tujuh belas orang prajurit dalam misi itu. Pada saat yang sama, negara Indonesia Timur masuk ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1950.[9]

KEMBALI KE JAWA TENGAH

Suharto kembali ke angkatan bersenjata di tengah proses rasionalisasi dan restrukturisasi intensif yang tidak hanya bertujuan merampingkan angkatan bersenjata, namun juga memberi struktur komando yang lebih koheren. Pada Juli 1950, sebagai upaya pertama mengejewantahkan konsep kekuatan teritorial Nasution, Indonesia dibagi menjadi tujuh teritori tentara (TT) yang mirip dengan atau bahkan lebih besar dari Wehrkreise semasa perang gerilya anti-Belanda. Reorganisasi itu sendiri adalah semacam kompromi. Di satu sisi, reorganisasi itu ingin merasionalkan dan meregulerkan struktur komando sehingga tidak akan ada lagi loyalitas terpecah dan komando ganda yang membingungkan dalam daerah-daerah tertentu, terutama dengan mengintegrasikan unsur non-TNI ke dalam struktur dan mencegah tumpang-tindih komando lokal. Pada saat yang sama, regularisasi tidak bisa dilaksanakan lebih jauh, karena konsep struktur teritorial yang menuntut kerja sama penduduk lokal dengan unit-unit angkatan bersenjata semasa perang, mensyaratkan bahwa "sebisa mungkin, semua unit harus berkomposisikan prajurit-prajurit dari daerah yang harus mereka lindungi."[10] Kebijakan pragmatis ini juga mengakui adanya formasi pasukan dengan ciri kedaerahan yang kuat yang terbentuk pada

masa perjuangan melawan Belanda, sehingga masalah penyatuan Angkatan Darat secara nasional terabaikan untuk sementara.

Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, pada September 1950, Gatot Subroto, panglima Divisi Diponegoro (kini dikenal sebagai TT IV, Teritori Tentara IV, dan bertempat di Semarang), merasionalisasi jumlah brigade Jawa Tengah dari delapan menjadi lima. Suharto ditunjuk menjadi komandan salah satu brigade itu, Brigade O, dengan tujuh batalion, yang baru saja dinamai ulang menjadi Brigade Pangeran Mangkubumi. Brigade ini bertanggung jawab atas daerah Kebumen, Purworejo, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Sleman, Gunung Kidul, Bantul, Wates, dan Wonosari. Kemudian tampaknya beberapa pasukan Suharto juga ditugaskan membantu brigade Achmad Yani dalam memerangi gerombolan-gerombolan bersenjata di pegunungan Jawa Tengah kompleks Merapi-Merbabu.

Sulit diketahui bagaimana Suharto, menyusul kepulangannya dari Makasar, menangani masalah sulit dan rentan demobilisasi pasukan. Ini jelas isu sensitif, mengingat kedekatan hubungan pribadi antara komandan dan pasukan yang terjadi dalam situasi kacau masa revolusi, dan Suharto merasa "sulit secara psikologis" untuk memaksa sahabat-sahabatnya meninggalkan Angkatan Darat.[11] Mungkin Suharto, seperti komandan lain, enggan melepaskan anak buahnya ke arah masa depan tak pasti di luar Angkatan Bersenjata. Namun, bagi anak buah yang tidak mampu dipertahankannya, Suharto memberi mekanisme untuk memuluskan transisi ke arah kehidupan sipil. Menurut Gafur, Suharto membuat "usaha membantu membangun beberapa bisnis bagi bekas anggota unitnya yang tidak bisa diserap lagi dalam barisan militer."[12] Bisnisnya adalah "usaha transportasi yang dibangun dengan kendaraan-kendaraan Angkatan Darat di Yogyakarta untuk menyediakan pekerjaan bagi para veterannya," yang karena itu ia mendapat peringatan dari komandan divisinya, Gatot Subroto.[13] Suharto, terluka oleh kritik itu, "begitu kecewa sehingga dia nyaris memutuskan untuk mengundurkan diri dan mencoba profesi baru. Jika

perlu, dia sudah siap menjadi supir taksi." Menurut Gafur, Suharto tidak jadi melakukan ini karena bujukan istrinya, "Saya memberitahu dia bahwa saya tidak menikahi seorang supir taksi, saya menikahi seorang prajurit. Saya lebih jauh mendesaknya untuk menghadapi semua cobaan dengan kepala dingin, meskipun hati terluka."[14] Sentimennya mungkin dipengaruhi fakta bahwa keluarga mereka, saat itu tinggal di rumah baru di Jl. Pungung, Kotabaru, semakin membesar. Pada 1 Mei 1951, Siti Hartinah melahirkan anak kedua dan putra pertama mereka—Sigit Haryoyudanto—yang proses pembuahannya tampaknya terjadi kala kunjungan singkat Siti Hartinah ke Makasar pada 1950.

Pada 1 November 1951, Brigade Q dan R (Pragola I dan II) yang bertanggung jawab atas daerah Semarang dan Pati disatukan; beberapa minggu kemudian, Suharto dipindahkan dari posisi lamanya di Yogyakarta untuk mengomandoi Brigade Pragola yang membesar di Salatiga, dan bertukar komando dengan Letkol Sarbini. Sembilan batalion baru brigade ini terdiri atas kru yang agak beragam dengan berbagai latar belakang; indikasi adanya masalah lebih luas dalam integrasi angkatan bersenjata ke dalam bangsa baru. Batalion itu meliputi "tiga batalyon TNI asli, tiga batalyon bekas KNIL, dan tiga batalyon bekas lasykar Hisbullah, dan Batalyon Maladi Jusuf bekas Pesindo (beraliran kiri)." Ditambah masalah umum yang dia alami bersama teman sejawatnya berkenaan dengan moral pasukan dalam situasi anggaran militer yang ketat, tugas utama Suharto, selain melakukan demobilisasi dan rasionalisasi kekuatan pasukan, adalah "menyusun 9 batalyon menjadi 4 batalyon."[15]

PEMBERONTAKAN BATALION 426

Rekayasa institusional ini adalah tugas yang menuntut kecermatan khusus, terutama karena rasionalisasi macam ini pada akhirnya berarti pengurangan jajaran dan fungsi perwira. Ironisnya, tugas ini menjadi mudah bagi Suharto karena revolusi salah satu bata-

lionnya (426) yaitu mantan unit Hizbullah yang ditempatkan di Kudus, yang memproklamasikan aliansinya dengan gerakan Darul Islam pada akhir 1951. "Rupanya Tuhan memberi jalan, karena ternyata salah satu batalyon ialah Batalyon 426 yang dipimpin oleh Mayor Munawar dan wakilnya Kapten Sofyan memberontak. Dalam menghadapi dan menyelesaikan pemberontakan Batalyon 426 ini saya dapat melakukan seleksi secara alamiah."[16]

Darul Islam telah mengembangkan kekuatan besar di basisnya di bagian selatan dan utara Jawa Barat, menyusul penarikan Divisi Siliwangi ke Jawa Tengah sesuai dengan butir-butir perjanjian Renville awal 1948. Tujuan utama gerakan ini adalah pendirian negara Islam; memang, pada Agustus 1949, pemimpinnya, S.M. Kartosuwiryo, secara formal memproklamasikan Negara Islam Indonesia. Elemen-elemen Divisi Siliwangi yang kembali pada akhir 1948 tiba-tiba mendapati diri ditantang oleh kekuatan Darul Islam, terutama unit-unit Hizbullah dan Sabilillah yang menolak tunduk pada syarat-syarat perjanjian Renville yang menuntut mereka meninggalkan Jawa Barat, daerah yang sebelumnya mereka anggap sebagai daerah kekuasaan. Ketika pasukan Siliwangi yang lebih besar datang, menyusul pendudukan Yogyakarta pada Desember 1949, peperangan semakin diramaikan oleh TII (Tentara Islam Indonesia) pimpinan Kartosuwiryo. Pada akhir 1948, unit-unit Hizbullah di bawah Amir Fatah telah pindah dari Jawa Barat ke kabupaten utara-tengah Brebes dan Tegal, dan negara Islam Jawa Tengah telah diproklamasikan pada April 1949; salah satu batalion Suharto, di bawah pimpinan Sarjono, adalah satu dari dua batalion yang diperintahkan, pada akhir 1949, menyapu TII.

Staf Diponegoro sudah mulai mencurigai adanya pengaruh Darul Islam dalam dua batalion Pragola Suharto, yaitu batalion 423 dan 426. Anggota-anggota Batalion (Bn) 426, terutama pasukan Hizbullah yang berasal dari daerah Klaten, telah membangun reputasi sendiri karena semangat mereka dalam membantu melucuti pasukan yang terkait dengan pemberontakan Madiun 1948. Antusiasme mereka untuk balas dendam secara kasar ter-

hadap "kaum komunis" telah memicu kebencian komandan TNI, terutama Slamet Riyadi di Solo, dan sesekali menimbulkan pertikaian dengan pasukan republik biasa. Selain itu, pasukan-pasukan tersebut tidak senang dengan dimasukkannya mereka ke dalam Brigade Pragola-nya Suharto di angkatan bersenjata reguler. Suharto sendiri telah menuturkan kecurigaannya tentang potensi kerusuhan di Bn 426.[17] Kecurigaan semakin tinggi ketika tiga perwira dari Bn 423—umumnya terdiri atas mantan pasukan Hizbullah—yang ditangkap dan diinterogasi setelah menemukan dokumen mencurigakan di tubuh seorang perwira Darul Islam yang tewas di selatan Brebes, akhirnya mengungkap rencana Kapten Sofyan dari Bn 426 untuk melakukan pemberontakan Darul Islam. Atas tindakannya menolak satu perintah untuk menghadap panglima Diponegoro, Sofyan berusaha ditangkap tapi berhasil lolos dari Suharto pada dini hari 8 Desember sekaligus berhasil mengakali rencana Suharto menangkapnya lewat batalion Pragola lain. Kemudian, Sofyan kabur dari tempat persembunyiannya, sebuah pabrik rokok yang tak terpakai sekitar satu kilometer di luar Kudus, seraya membawa tiga kompi pasukannya yang terdiri atas tiga ratus orang; dua kompi batalion lain, yang berada di Magelang di bawah pimpinan Kapten Alip, juga bergabung dengan upaya pemberontakan.

Bersama sejumlah kecil pembelot dari Bn 427 yang berada di Semarang, unit-unit ini memulai kampanye teror di daerah pedesaan. Suharto, di Salatiga, memerintahkan pasukannya untuk mengejar dan mencegat para pemberontak ketika mereka bergerak ke arah selatan menuju daerah markas mereka di Klaten. Kembali Suharto merasakan campur tangan politisi sipil; menurut liputan satu surat kabar lokal Semarang, Perdana Menteri Masyumi, Sukiman, berupaya meminta salah satu perwira batalion Suharto untuk bersikap lunak terhadap pemberontak muslim.[18] Campur tangan ini tampaknya diabaikan, terlepas dari himbauan berikutnya dari Menteri Pertahanan, Sewaka, bahwa Angkatan Darat harus bertindak dengan "keadilan, kemanusiaan dan jangan menyinggung perasaan keagamaan."[19]

Sekitar awal Januari 1952, Suharto menggantikan Letkol Bachrun sebagai komandan sebuah gugus tugas ("Operasi Merdeka Timur V") yang dibentuk untuk mengejar dan melumatkan batalion pemberontak.[20] Tugas menghancurkan batalion, di mana TNI mengerahkan kekuatan udara, artileri, dan tank, terbukti panjang dan sulit. Pada awal Januari, komandan Diponegoro secara substansial meningkatkan kekuatan sipil komandan operasi, namun pemberontakan terus saja terjadi. Dalam satu pertempuran di Tanggalan, Sofyan, berjubah putih dan turban, terluka parah. Dalam bentrokan lain pada 25 Januari di Simo, sebelah timur Salatiga, di mana Angkatan Bersenjata mengerahkan dukungan udara, para pemberontak mengalami kerugian besar. Sementara, para pemberontak Magelang pimpinan Alip, tersebar di lereng bawah selatan Gunung Merapi, juga dikejar-kejar. Alip tewas pada 30 Januari. Operasi-operasi intensif ini, di mana "semua jalan utama sekitar Yogyakarta dan Surakarta ditutup", dianggap sebagai tindakan kasar dan ceroboh kekuatan republik terhadap para tawanan, penduduk setempat, dan mesjid.[21] Menurut Van Dijk, "salah satu daerah di Klaten yang paling menderita adalah kawedanan Jatinom. Di sini, 425 rumah hancur, dan 46 orang penduduk sipil tewas, dan 37 orang luka-luka."[22] Para pemberontak yang tersisa terserak di barat dan utara; mereka terkait dengan kekuatan Darul Islam di Jawa Barat dan Jawa Tengah barat laut atau bergabung dengan kalangan pembegal, penjahat, revolusioner, fanatik, buronan, dan perampok yang beroperasi di daerah pegunungan kompleks Merapi-Merbabu.

Mandulnya upaya Suharto menghancurkan kelompok pemberontak Bn 426 mengundang kritik media. *Siasat* dengan sinis menulis, "orang sebenarnya agak heran apa sebabnya soal yang pertama-tama dipandang remeh itu, sampai sekarang ini belum bisa diatasi."[23] Nasution juga bersikap kritis, kesulitan-kesulitan yang ada memberinya amunisi untuk mendesak politisi sipil agar bersikap lebih profesional terhadap jajaran angkatan bersenjata.[24] Suharto tidak membuat komentar penting mengenai kinerja pasu-

kannya selama operasi; dia hanya mengatakan, sebagaimana dia ungkapkan sebelumnya, bahwa "dengan selesainya penumpasan pemberontakan Batalion 426 itu, konsolidasi Brigade Pragola dapat dilaksanakan dengan mudah tanpa menimbulkan gejolak, dan empat batalyon yang tangguh dapat disusun."[25]

Kegagalan Suharto menghancurkan Bn 426 sangat berkebalikan dengan strategi yang kemudian digunakan rekan sesama komandan brigadenya, Achmad Yani, ketika mengejar kekuatan Darul Islam (termasuk sisa-sisa Bn 426) di Jawa Barat barat laut, atau disebut daerah GBN.[26] Di sana, pada Oktober 1951, Yani mengambil alih upaya awal yang dipimpin Sarbini dan Bachrun, dan pada Juni 1952, ia secara pribadi membentuk satu gerombolan pasukan elite, dikenal sebagai Banteng Raiders, untuk memburu Darul Islam di daerah GBN, terutama sekitar Brebes. Ketika Banteng Raiders berkembang dari berkekuatan dua kompi menjadi seukuran batalion, Ali Murtopo, sebelumnya adalah anggota staf brigade Yani dan seorang veteran perjuangan gerilya pada masa revolusi, menjadi komandan kompi di Bn 431. Raiders, yang kerap secara langsung dipimpin oleh Yani yang berwibawa, mampu membersihkan daerah kegiatan Darul Islam pada 1957.

Ketika perhatian Suharto tersita dalam usaha pengejarannya terhadap Bn 426, Nasution mengumumkan perubahan lebih jauh terhadap TT IV pada awal 1952. Daerah Jawa Tengah dibagi lagi menjadi empat subteritori, dan Brigade Pragola Suharto, yaitu delapan batalion yang terdiri atas 6.159 orang anggota pasukan, direka ulang menjadi Resimen Infantri 14 yang bermarkas di Salatiga dan bertanggung jawab atas daerah Semarang dan Pati. Batalionnya adalah 420, 421, 423, 424, dan 428. Pada 1953, reorganisasi lebih jauh menghasilkan Batalion 440 (dari bekas 421 dan 427), 441 (dari 420), 442 (dari 424), 443 (dari 428) dan 448 (dari 408). Batalion 423, ternoda karena keterlibatannya dengan Darul Islam, dihilangkan, dan 426, sebagaimana telah kita saksikan, telah memberontak.

Pada 1952, ayah Suharto meninggal karena malaria, dan Suharto kembali ke Kemusuk dengan istrinya (yang setelah ini akan disebut sebagai "Ibu Tien") untuk upacara pemakaman di kompleks pemakaman yang terletak di belakang rumahnya di Kemusuk Kidul.[27] Tampaknya sangat aneh Suharto tidak diberi tahu mengenai kondisi parah ayahnya; reaksi Suharto terhadap kematian ayahnya juga sepintas lalu, dingin, dan tanpa emosi. Namun, sikap seperti itu masuk akal mengingat betapa remeh peran Kertosudiro dalam kehidupan sang putra, meski menurut Suharto, "[dia] selalu menengok cucunya untuk mengirim segala kebutuhannya."[28] Sikapnya yang dingin mungkin menandakan Suharto mulai menyadari bahwa Kertosudiro bukanlah ayah aslinya. Ini tetap menjadi misteri karena tidak adanya bukti lebih jauh. Namun yang jelas, Suharto tidak memiliki kedekatan emosional dengan ayah kandungnya dan sudah terbiasa untuk hidup tanpanya.

KANCAH POLITIK YANG LEBIH LUAS

Suharto pada saat ini tampaknya hanya menunjukkan sedikit minat terhadap drama lebih besar politik Indonesia. Terlebih lagi, ia melihat silih-bergantinya pemerintahan sipil yang beroperasi berdasarkan model demokrasi Barat yang tidak mendapat legitimasi kuat dalam lingkaran elite, selalu tersandung berbagai masalah tanpa bisa mencari solusi yang baik. Kekecewaan, bahwa kemerdekaan belum menghasilkan kemajuan, kemakmuran dan persatuan yang diharapkan, mulai muncul. Pada saat yang sama, unsur-unsur utama dalam Angkatan Darat, yang semakin tidak senang dengan pemerintah sipil yang tidak menghormati mereka, menyalurkan ketidakpuasan mereka terhadap sistem politik dalam peristiwa yang dinamai 17 Oktober 1952.

Peristiwa tersebut muncul akibat ketegangan antara dua kubu. Kubu pertama adalah kepemimpinan militer "profesional", yang bermarkas di Jakarta dan Bandung, yang menginginkan angkatan bersenjata yang terlatih secara teknis, lebih efisien, dan

lebih kecil. Kubu kedua adalah kelompok anggota TNI yang mengandalkan pelatihan Peta atau pengalaman masa revolusi fisik sebagai bukti keahlian mereka, kelompok yang takut disingkirkan oleh rasionalisasi TNI. Kelompok terakhir ini, yang tidak terlalu menyukai sistem parlementer, mendapat dukungan dari oposisi parlementer yang berusaha menghentikan program rasionalisasi. Kelompok prajurit profesional, terpukul dengan campur tangan sipil terhadap urusan militer ini, berusaha menekan Sukarno agar membubarkan parlemen dengan mengorganisasi demonstrasi skala besar, termasuk berkumpulnya militer di luar istana Presiden pada 17 Oktober. Penolakan Sukarno untuk mengakomodasi keinginan "perwira profesional" mengakibatkan dicopotnya Nasution sebagai kepala staf angkatan bersenjata, dan membuyarkan segala prospek untuk membangun satu angkatan bersenjata yang tunduk pada kendali sipil.[29]

Suharto tidak terlibat dan tampaknya tidak mau ambil pusing dengan peristiwa 17 Oktober.

> Saya sama sekali tidak mengerti peristiwa apa itu sebenarnya, sementara saya sibuk dengan menghadapi pemberontakan ... Peristiwanya, saya pikir, telah terjadi sesuatu yang terlalu "over acting". Dengan meriam yang dihadapkan ke Istana, saya kira, itu tidak taktis. Katanya, mereka yang pergi ke Istana itu bermaksud ingin menyampaikan sesuatu kepada Presiden, Panglima Tertinggi. Tetapi dengan cara begitu, dengan menhadapkan senjata yang begitu besar ke Istana, adalah tindakan yang berlebihan. Sebetulnya dengan bersiap saja, siap menghadapi kemungkinan yang terjadi, sudah cukup.[30]

Komentar itu tampaknya kritik buat Nasution yang terlibat dalam peristiwa itu serta kritik terhadap para perwira yang berusaha menekan parlemen. Menurut McVey, peristiwa itu sebenarnya adalah hasil ketegangan dalam Divisi Diponegoro, mengingat "para komandan resimen Diponegoro menekan panglimanya, Letkol Bachrun, untuk menyatakan posisinya terhadap peristiwa 17 Oktober." Bachrun tampaknya bersimpati pada kaum prajurit

"profesional" dan mendapati dirinya harus menyatakan dukungannya—tanpa keyakinan penuh—pada pemerintah.[31] Peran Suharto dalam peristiwa ini, jika pun ada, tidaklah diketahui, namun tampaknya ia memiliki simpati besar terhadap kekuatan anti-rasionalisasi.

Akhir peristiwa ini membuat Angkatan Darat terpecah dan komando tingginya terlemahkan. Dalam kondisi seperti ini, dukungan lokal menjadi sangat penting dalam pertahanan posisi para komandan, dan ruang lokal untuk manuver dan pembuatan kebijakan menjadi sangat kuat. Didepaknya kelompok Nasution membuat markas besar TNI lemah dan tanpa arah, persis ketika lembaga politik sipil juga menunjukkan kelemahan kelembagaan serupa. Pola kekacauan dalam otoritas pusat ini semakin parah dengan menurunnya anggaran pemerintah untuk Angkatan Darat setelah 1952, dan ini menghapus prospek komando tinggi untuk menerapkan patronase demi mendapat dukungan, dan mendorong komandan lokal untuk lebih giat menjajaki sumber pendanaan mandiri guna mendukung pasukan dan memperkuat komando.

Peran Suharto terhadap perkembangan ini sulit dikatakan. Melihat kedekatannya dengan pasukannya, dan pemahamannya terhadap pentingnya memperhatikan kebutuhan pasukan, dia tidak merasa perlu mengubah pola perilakunya. Kemudian, tidak ada indikasi bahwa segala perubahan yang ada telah berdampak pada kesadarannya, apalagi sampai memicu dia melakukan peran lebih aktif dalam peristiwa-peristiwa tersebut. Dia tidak menunjukkan keinginan untuk mensosialisasikan profilnya atau ide-idenya pada publik yang lebih luas, dan tampaknya, ia sudah cukup puas menahan pengerahan energi bagi perannya sebagai komandan resimen.

KE SOLO

Pada akhir tugasnya yang biasa-biasa selama hampir delapan belas bulan, pada 1 Maret 1953, Suharto ditempatkan di Solo sebagai

komandan Resimen Infantri 15 (terdiri atas elemen-elemen bekas Divisi Panembahan Senopati). Resimennya, empat batalion yang tetap kuat setelah adanya reorganisasi lain, terdiri atas 3.704 orang anggota pasukan. Unsur-unsur dari dua batalionnya terlibat dalam operasi melawan TII di daerah GBN. Sedangkan unit-unit dari dua batalion lainnya terlibat dalam Operasi Tritunggal melawan gerombolan penjahat politik berpaham komunis di kompleks Merapi–Merbabu.

Pengalaman Suharto di Solo tampaknya tidak terlalu menggembirakan, kecuali dalam beberapa bulan ketika dia tiba pada 23 Juli 1953, yaitu saat lahirnya anak ketiga, Bambang Trihatmojo. Sebagaimana telah kita lihat, daerah ini telah menjadi lokasi konfrontasi dan ketegangan ideologis yang keras, serta lokasi berkecambahnya politik kiri yang kuat, terutama jika dibanding suasana Yogya yang tenang tempat Suharto menghabiskan nyaris seluruh karier militernya. Ia bahkan cemas ketika menemukan satu batalionnya, Batalion Digdo di Kleco, menerima pendidikan ideologis dari pemimpin komunis veteran, Alimin; di antara anggota batalion itu adalah Untung dan Suradi, "yang kemudian pada tahun 1965 memimpin G.30.S/PKI."[32] Untung adalah komandan kompi di Bn 444 di Solo, sedangkan Suharto adalah komandannya. Mungkin dalam merespons situasi ini, Suharto tampak mencurahkan perhatian khusus pada pasukan di bawah komandonya untuk meningkatkan profesionalisme mereka. Sebagai seseorang yang berdisiplin tinggi dalam latihan dan praktik, Suharto sangat membanggakan keahliannya melatih pasukan. Tetapi, menurut Roeder, ia "hanya berhasil sebagian dalam meredakan pertikaian ideologis di antara para prajurit."[33]

Selain berusaha meningkatkan kemampuan tempur resimen melalui latihan dan reorganisasi, Suharto juga berupaya memecahkan masalah penting dalam mendanai pasukannya dan berusaha mendirikan koperasi untuk membantu mereka sebagaimana yang ia lakukan pada unitnya di Yogya. Meski ia kelak mengklaim bahwa "pengalaman mendirikan koperasi dalam Resimen 15 di

Solo sungguh menguntungkan bagi pengembangan semangat prajurit dan kedamaian dalam keluarga mereka", Roeder mencatat bahwa, "kelak, Suharto mengeluhkan mandeknya gerakan koperasi Angkatan Darat yang dia rintis."[34] Pendapat Roeder mungkin adalah indikasi adanya oposisi, bahwa ide Suharto mengenai pembangunan sebagai alat memerangi radikalisme telah ditentang di Solo oleh kekuatan bersinambung pemikiran kiri di Angkatan Darat (kelak muncul dalam bentuk dukungan Jawa Tengah terhadap Gerakan 30 September). Ibu Tien ikut berkecimpung dalam bisnis dalam cara yang menunjukkan ia sudah biasa melakukan itu; ia membantu keuangan keluarga dengan membuat dan menjual batik Solo, serta menjual baju-baju pabrikan diskon kepada istri-istri prajurit.

Selama bertugas di Solo, Suharto mulai, mungkin untuk pertama kalinya, belajar berbagai bidang studi secara sistematis, tampaknya sebagai kompensasi pendidikannya yang kurang dan karena menyadari bahwa studi itu penting untuk mendukung kariernya. Ia mengikuti kursus militer yang setara dengan sekolah menengah, mempertajam keahlian sosialnya dengan mengikuti Klub Brigade, dan bahkan mengikuti kursus penerbangan di Aero Club. Jam terbang solonya sudah mencapai empat puluh jam dalam pesawat Piper hingga dokternya, dikabarkan khawatir akan kesehatan jantungnya, kemudian mengakhiri karier terbang Suharto. Selain itu, Suharto juga bertindak sebagai wakil presiden klub sepakbola.

ANGKATAN DARAT DAN POLITIK

Pada 1955, luka perpecahan parah dalam Angkatan Darat, tecermin dalam peristiwa 17 Oktober, mulai pulih. Pada satu pertemuan di Yogyakarta bulan Februari 1955 yang dihadiri 270 orang perwira tinggi, timbul satu rekonsiliasi seremonial antara faksi-faksi Angkatan Darat di depan makam Jenderal Sudirman. Satu-satunya hal yang disepakati bersama oleh faksi-faksi dalam Ang-

katan Darat adalah bahwa pemerintahan dalam sistem parlementer itu tak stabil dan selalu mau campur tangan dalam bidang-bidang yang menjadi wewenang Angkatan Darat. Angkatan Darat kemudian menolak menerima penunjukan perwira yunior Kolonel Bambang Utoyo sebagai kepala staf; akibatnya, pemerintah kehilangan kepercayaan dari parlemen dan dipaksa mengundurkan diri.

Sebagai akibat perkembangan ini, "banyak perwira jelas menjadi sangat menganut pandangan bahwa sistem parlementer harus ditinggalkan dan diganti oleh satu sistem yang mengizinkan Angkatan Darat memainkan peran lebih aktif."[35] Dua kecenderungan yang saling terkait mulai berkembang dalam tubuh Angkatan Darat: pertama, kecenderungan, sangat terkait dengan unsur-unsur Siliwangi, melibatkan upaya untuk menjatuhkan pemerintah secara langsung melalui kudeta; satunya lagi, "yang tampaknya baru pertama kali dalam periode kita,"[36] adalah kecenderungan meningkatnya praktik umum di kalangan para komandan lokal di luar Jawa dalam mengejar kepentingan lokal mereka yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat, terutama berkenaan dengan praktik penyelundupan untuk mendatangkan dana bagi kepentingan lokal.

Suharto tidak terlibat terlalu jauh dalam pemberdayaan angkatan bersenjata ini. Saya tidak menemukan bukti langsung bahwa ia ikut ambil bagian dalam rapat soliditas para perwira angkatan bersenjata di Yogyakarta pada 1955—meski, mengingat ada 81 orang letnan kolonel yang hadir, ketidakhadiran Suharto cukup mengejutkan—dan pemikirannya mengenai penunjukan kembali Nasution sebagai kepala staf angkatan bersenjata pada November 1955 hanya bisa dikira-kira. Jika Suharto hadir, ia tidak terpilih, sebagaimana temannya Sarbini (komandan Resimen 13) dan sejumlah perwira lain berpangkat sama atau lebih rendah, untuk ambil bagian dalam rapat-rapat tertutup yang lebih kecil, dimulai pada 21 Februari, untuk para perwira paling senior dan yang bertujuan membahas "persoalan-persoalan yang berhubungan dengan soal Angkatan Darat."[37] Lebih umum lagi, Suharto tidak

terlalu memerhatikan peristiwa-peristiwa penting nasional dan internasional; "Konferensi Asia–Afrika terlaksana di bulan April 1955 di Bandung. Dan di bulan September terlaksana pemilihan umum yang pertama. Itu merupakan kesibukan tersendiri, tetapi masih tidak lepas dari penanganan pribadi."[38]

Penuturan tersebut tampaknya menggambarkan sikap Suharto terhadap politik dan perkembangan kebijakan nasional di tahap kariernya ini. Dia, dan memandang dirinya demikian, seorang prajurit profesional, seorang perwira lapangan yang bertugas mengembangkan dan melatih pasukan. Meskipun ia memiliki pandangan sendiri tentang berbagai perkembangan di kancah nasional, ia banyak menyimpan pandangan itu untuk dirinya sendiri dan tidak mau repot-repot menggeluti isu-isu ini. Pada saat ini, ia tetap seseorang yang bervisi sempit dan sangat konservatif. Ia sangat mencintai, namun mungkin tanpa pendalaman, dogma-dogma seperti sapta marga dan Pancasila—lima dasar yang dilontarkan Sukarno pada Juni 1945, yaitu kepercayaan kepada Tuhan Yang Mahaesa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia juga mungkin sangat tidak senang dengan ancaman kekacauan sosial yang ditimbulkan ide-ide kiri. Namun, ia tidak memiliki motivasi untuk bergelut dalam hal yang bukan bidangnya. Dengan beberapa pengecualian kecil, seluruh kehidupan masa dewasanya dihabiskan sebagai prajurit di Jawa Tengah. Suharto adalah seorang yang praktis yang, terlepas dari kepercayaannya, bersikukuh untuk hanya memecahkan masalah-masalah yang berada dalam batas kemampuan dan wilayahnya. Ia tidaklah naïf secara politis—pengalamannya semasa revolusi telah memberi beberapa pelajaran penting mengenai politik—namun pada tahap ini ia tidak berambisi politik. Menurut Roeder, "Soeharto [pada 1957] tidak memiliki kedekatan hubungan dengan para pemimpin tingkat tinggi negara; dia asing dengan politik partai dan tidak ingin berperan dalam kehidupan sosial."[39]

Sementara itu, di bawah kepemimpinan Nasution, Angkatan Darat menggencarkan perjuangan untuk identifikasi diri dan untuk merumuskan peran sesungguhnya, dengan awal pengertian baru akan tujuan strategis di komando tinggi angkatan bersenjata. Kebijakan Nasution memiliki tiga tujuan: pertama adalah memperkuat kontrol komando tinggi Angkatan Darat melalui kebijakan "*tour of duty* (penempatan tugas)" dalam menempatkan perwira senior, dirancang untuk memutus afiliasi lokal yang nyaman dán dengan kuat terlindungi, dan untuk meningkatkan profesionalisme. Wartawan Inggris, James Mossman, mengamati bahwa "Angkatan Darat Indonesia bukanlah satu kekuatan terpadu, melainkan koalisi komandan-komandan lokal yang sebagian besar patuh kepada Kepala Staf mereka [Nasution], tetapi bisa seketika mengganti loyalitas mereka jika situasi politik memungkinkan atau jika Nasution terlalu mencampuri secara terbuka periuk nasi mereka."[40] Nasution berupaya memulai ini dengan menetapkan rencana program besar-besaran transfer komando, sebuah proses yang selesai pada Februari 1956. Pada sebuah pertemuan di awal Agustus 1956, Nasution dan para perwira senior menjadwalkan serangkaian transfer komando, bertujuan meneguhkan otoritas markas besar angkatan bersenjata dan membangun rasa kesatuan tujuan yang lebih luas di antara para komandan teritorial.

Tujuan kedua Nasution adalah mengembangkan bentuk permanen dan terpusat latihan angkatan bersenjata untuk menanamkan nilai-nilai yang diharapkan di kalangan pasukan dan perwira sebagai ganti, atau pelengkap, penanaman nilai dan instruksi lokal yang diberikan panglima hingga 1956, dan untuk "pada akhirnya ... mengarahkan para perwira ambisius agar mencapai keahlian dan memberi dukungan pada pusat alih-alih mengembangkan basis kekuatan lokal."[41] Tujuan ketiga, yang agak lebih terbukti di masa ini, adalah berusaha membentuk Angkatan Darat sebagai institusi yang menonjol dan berwibawa, yang akan tercermin dalam hal-hal seperti meningkatnya pendanaan pemerintah dan independensi lebih besar dalam hal-hal yang merupakan

wewenangnya: "setiap perwira angkatan bersenjata merasa alokasi dana untuk pertahanan betul-betul tidak memadai; terjadi kontras antara kecilnya alokasi ini dengan sikap foya-foya yang ditunjukkan kabinet dalam memberikan dana pada sejumlah proyek lain."[42]

Pada akhir 1956, mulai tercium hawa mendekatnya krisis, bahkan kekacauan. Kelompok Siliwangi, yang dipimpin Kolonel Zulkifli Lubis, gagal dalam menjalankan rencana kudeta, dalam situasi yang amat menggelikan. Rangkaian pembangkangan regional yang disponsori angkatan bersenjata muncul di paro kedua 1956. Sukarno, dengan lihai menggunakan retorika nasionalis/revolusioner, menemukan sekutu dalam diri Angkatan Darat demi memegang kendali atas proses politik dan atas meningkatnya ketegangan serta kekacauan. Jawabannya—perkembangan bertahap konsep Demokrasi Terpimpin—begitu selaras dengan kebencian angkatan bersenjata terhadap demokrasi parlementer Barat dan kesiapan mereka mendukung mode kekuasaan nasionalis dan otoriter yang lebih otentik, mode kekuasaan yang memberi militer kesempatan untuk berperan lebih besar dalam bidang politik.

Sukarno dan Angkatan Darat bekerja sama melancarkan "pukulan mematikan" terhadap demokrasi parlementer dengan satu-satunya oposisi dari partai-partai politik—tanda rapuhnya politik kepartaian dan fakta bahwa, dalam keadaan terpojok, partai tidak lagi menjadi sendi-sendi politik. Dengan mundurnya kabinet Ali Sastroamijoyo II pada 14 Maret 1957 dan pengumuman Keadaan Darurat Perang, setelah sempat ditunda Nasution dan deputinya Gatot Subroto, baik Sukarno dan Angkatan Darat memiliki sarana untuk masuk secara legal ke dalam sistem politik demi menyelamatkan negara, membatasi hal yang sebelumnya merupakan hingar-bingar kegiatan politik, dan memancang fondasi baru bagi rejim politik baru.[43] Di bawah pengawasan ketat Sukarno, kabinet baru nonkepartaian dibentuk di bawah kepemimpinan teknokrat terkemuka Juanda Kartawijaya.

Suharto, yang lama menjadi pengamat tetapi tidak menaruh minat pada drama politik ibu kota, mendapat posisi berpengaruh dengan ditunjuknya dia untuk memimpin Divisi Diponegoro. Posisi ini kelak juga membuat dia berubah drastis selain berfungsi sebagai sarana Suharto masuk ke dalam alam kebijakan dan politik nasional.

Pada awal 1956, karier panjang Suharto dengan Diponegoro telah berakhir, meski sementara, dengan dipanggilnya ia ke Jakarta untuk menjalani tugas administrasi pertamanya. Di sana, dia bekerja dengan kepala staf angkatan bersenjata untuk merancang Staf Umum. Tetapi, dalam tiga bulan, ia ditugaskan kembali ke Divisi Diponegoro, kali ini sebagai kepala staf divisional di Semarang. Pada awal September, ia menggantikan Bachrun sebagai pejabat panglima Divisi; satu upacara serah terima jabatan yang "tidak ... dapat dilupakan"[44] diadakan pada 3 September di Magelang dengan dihadiri Nasution, pejabat Menteri Pertahanan Ali Sastroamijoyo, dan sejumlah perwira serta pejabat sipil senior. Menerima tugas barunya ini, Suharto mengatakan bahwa "perjuangan bangsa kita belum selesai"; ia berpidato tentang perlunya "kewajiban disempurnakan dan persatuan diperkuat dengan jiwa kerja-sama." Pada sebuah resepsi di Semarang dua hari kemudian, ia menjelaskan bahwa tugasnya sebagai pejabat panglima tidak mengalihkannya "dari tugas pembangunan. Dan tugas pembangunan tidak akan bisa berjalan dng lancar tanpa bantuan dari mayarakat." Dia mengulangi sentimen-sentimen ini, termasuk penegasan "perlunya melanjutkan revolusi yang belum selesai ini," dalam Perintah Harian yang dikeluarkan untuk memperingati Hari Angkatan Bersenjata pada 5 Oktober 1956. Perintah Hariannya pada hari Pahlawan (10 November) malah lebih khusus dan suram: "sifat provinsialisme, tamak dan korupsi merajalela disegenap sektor. .... kita telah kehilangan keseimbangan. Kehilangan tujuan hidup yang telah kita gariskan sewaktu kita memproklamirkan kemer-

Onderdeel	Commandant	Locatie	Hoofdkwartier	Dat.	Evt.	Sterkte en bewapening
III Brigade	Lt.Kol.S.[illegible]	Zuid-[illegible]	DJ CJA (WA902*)	22/10	A2	C.S. Maj. [illegible]
I Bataljon	Maj.[illegible]	[illegible]	[illegible] (WA1236)	13/8		
II Bataljon	Maj.[illegible]	?	[illegible] (WA5132)	13/8		C.S. Kapt. IKSAN S[illegible]. A2. Dit Bat. heeft deelgenomen aan de ontwapening van de communistische troepen clv Maj. S[illegible] (ex Cie CLXXI Bat te K[illegible]).
III Bataljon	Maj.SH[illegible]	[illegible] - staf	[illegible] (WA5132)	13/9		Dit Bat. heeft deelgenomen aan de ontwapening van de communistische troepen clv Maj. S[illegible] (ex Cie CLXXI Bat te K[illegible]). Sow. 90%. Sterkte ca. 5[illegible] man. wnd.Cdt. Kapt. S[illegible]
IV Bataljon	Maj.[illegible]	Molen Trip.III	DJ CJA.(WA9 2.)	13/8		Het Molen Trip. III (front Trip. III) bevat het gebied langs de S.S.-lijn tussen [illegible] Zuidkust en het [illegible]
Depot Bataljon	Kapt.[illegible]	?	MAKASSAR(WA7457)	21/9	A2	
IV Brigade	Lt.Kol.[illegible]	N.W.-[illegible]	DJ CJA (WA[illegible])	6/9	A2	Enige Trip.is opgeheft.Kol.[illegible] is met staf is voortvluchtig.
I Bataljon (ex Lasjkar-troepen)	Maj. S[illegible]	?	[illegible] (WA4583)	27/9	A2	Op 7/1'49 is Maj. S[illegible] met zijn staf naar Mal[illegible] vertrokt. 11/1'. A2.
II DIVISIE	Lt.Kol.GAT[illegible] S[illegible] G. (Goeburnor Militer 2)	DAERAH MILITER ISTIMEWA II (DJOKJAKARTA, SOLO, MALIOEN en GOMBONGAN)	SOLO (WA7467)	2/11	A2	C.T. Maj. S[illegible]. A2. De Mil.Gouverneur II heeft in alle opzichten de leiding als cdt en als Hfd. van het militair gezag in de resserten PATI en MALIOEN. Ook waren de door de Mil.Gouverneur aangestelde Cdtn het tactisch Co bij alle acties over alle eenheden, inclusief de eenheden van I Div. in hun resp. resserten. A2.

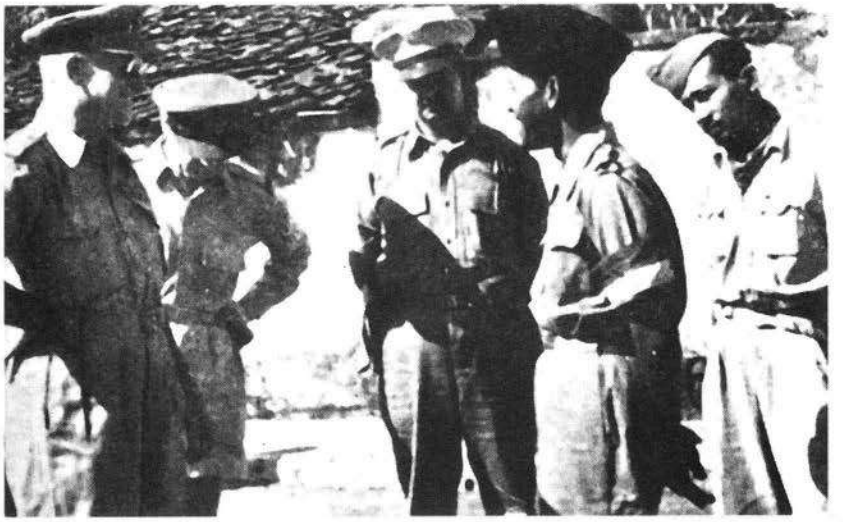

Suharto mengamati Sultan yang tengah membicarakan berbagai masalah dengan para pengamat militer komisi PBB untuk Indonesia, sehubungan dengan kembalinya Republik ke Yogya, Juli 1949. (Ipphos).

Pertemuan Suharto dengan Sudirman sebelum kembali kemudian ke Yogya, Juli 1949. (Ipphos)

Suharto bersama komandannya, Kol. Alex Kawilarang di Makasar, sekitar Agustus 1950. (Ipphos)

Suharto tengah berdiskusi dengan Letkol. Bachrun pada saat kampanye menentang pemberontakan Bn 426 di Jawa Tengah, sekitar Januari 1952. (Ipphos)

dekaan" Setelah memegang komando Divisi, Suharto mengatur sebuah pertemuan para komandan resimen dan tokoh-tokoh senior lainnya pada November yang bertujuan membahas "soal-soal routine" dalam Divisi dan juga "mencari titik-titik persamaan pendapat guna mengkonkretisirke utuhan Div. Diponegoro yang diharapkan dapat memancarkan keutuhan seluruh Angkatan Darat."[45]

Suharto dinaikkan pangkatnya menjadi pejabat kolonel dan diberi posisi panglima, dengan pangkat kolonel, pada awal 1957. Tidak seperti kebanyakan temannya seprofesi, seperti Yani, Suharto tidak pernah terpilih mengikuti pelatihan lebih lanjut di Amerika Serikat. Alasannya tidak jelas, namun mungkin karena kecerdasannya yang kurang, ketidakmampuannya berbahasa Inggris, dan adanya anggapan di Jakarta bahwa kariernya tidak akan meningkat pesat. Jadi, Suharto adalah semacam pengecualian, "antara 1956 dan 1959 lebih dari 200 perwira tinggi dilatih di A.S., sementara perwira rendahan dilatih oleh orang banyak."[46]

Penunjukan Suharto itu sendiri untuk menduduki posisi penting sebagai komandan Diponegoro menggambarkan kuatnya kepentingan lokal dan rapuhnya otoritas angkatan bersenjata pusat. Mungkin atas rekomendasi Bachrun, komando tinggi angkatan bersenjata berencana mengganti Suharto, sebagai panglima, dengan teman dekat Zulkifli Lubis, Bambang Supeno dari Jawa Timur. Setelah mendengar bahwa rekomendasi ini tinggal menunggu pengesahan Sukarno, Yoga Sugama, asisten I (intelijen) didikan Inggris dan Jepang dalam staf Bachrun, yang tidak menginginkan Divisi Diponegoro tertarik dalam pusaran politik dan perpecahan angkatan bersenjata terutama di tengah menguatnya komunis dalam jajaran angkatan bersenjata di Jawa Tengah, segera bertindak untuk mencegah. Yoga menghubungi semua perwira senior Diponegoro serta menggalang opini di kalangan perwira yunior, termasuk Kapten Ali Murtopo yang kala itu masih mengepalai unit Banteng Raiders. Pertemuan semalam suntuk di Kopeng, dekat Salatiga, antara komandan regional Divisi dan dihadiri pula oleh staf markas Semarang seperti Munadi (asisten V), sepakat menen-

tang penunjukan Bambang dan mendukung usulan Yoga menunjuk Suharto ("perwira yang berpembawaan tenang dan berpenampilan sederhana. Penampilannya itu membuatnya sangat disegani oleh bawahannya").[47]

Nyaris semua, kecuali perwira paling senior, dalam rapat menandatangani pernyataan itu; Yoga serta Mayor Suryosumpeno diserahi tugas menyampaikan pesan kepada pimpinan angkatan bersenjata di Jakarta. Sebelum melaksanakan tugas, kedua perwira ini bertemu Suharto—yang pasti mengetahui gerakan yang menguntungkannya ini namun tampaknya tidak ikut dalam rapat perwira senior, mungkin untuk menghindari tuduhan bahwa ia merekayasa gerakan menentang Bambang—untuk menjelaskan sikap para perwira dalam mengusulkannya sebagai panglima. Di Jakarta, Yoga dan Suryosumpeno bertemu dengan Lubis, mantan komandan Yoga. Yoga mengemukakan bahwa penunjukan Bambang akan mengakibatkan pembangkangan serius di Jawa Tengah, dengan ancaman bahwa pusat akan kehilangan kendali di sana. Pandangannya disetujui; Suharto ditunjuk sebagai panglima, dan pangkatnya dinaikkan menjadi kolonel. Penunjukannya melanggengkan kebiasaan bahwa kendali Diponegoro harus jatuh ke orang "Yogya", dan bukan orang Solo, Semarang, atau daerah yang lebih jauh lagi.

BISNIS PEMBANGUNAN DI JAWA TENGAH

Suharto kini adalah komandan dari Divisi yang terbentuk di daerah kelahirannya sendiri, tempat yang akrab dengannya dan yang bahasanya, Jawa, bukan Indonesia atau Belanda, adalah bahasa pergaulan di antara perwira dan sesamanya. Ia selalu memerhatikan kesejahteraan prajurit bawahannya, juga seluruh penduduk, dan merasa berhutang budi—muncul dari pengalaman revolusionernya—kepada mereka. Lebih khusus lagi, dia telah menyadari kenyataan sederhana bahwa ketenangan politik yang dianggapnya model kehidupan yang layak bisa dengan mudah dicapai di tengah

ancaman yang ditampilkan PKI—dan kekuatan pengganggu lain—jika masyarakat diberdayakan untuk membangun kondisi-kondisi kehidupan materi, sementara pada saat yang sama, kekuatan dan kesatuan bangsa dikokohkan.

Oleh karena itu, Suharto memulai upaya sistematis penggalangan dana bagi kesejahteraan pasukannya, kesejahteraan seluruh penduduk Jawa Tengah yang sebagian daerahnya amat miskin serta kekurangan gizi. Semarang, lokasi markasnya, sudah lama terkenal sebagai pusat perdagangan Jawa; selain pelabuhan dan perannya sebagai titik pusat distribusi dan penerimaan di Jawa Tengah, Semarang adalah rumah bagi para pedagang Cina-Indonesia; lokasi yang saat itu cocok dengan kecenderungan berdagang Suharto. Divisi perencanaan ekonomi dan keuangan Divisi Diponegoro, lebih terkenal dengan sebutan Finek, tidak hanya bertugas "menjaga pembukuan, melainkan juga menghasilkan uang."[48]

Visi Suharto tentang perannya—usaha pembangunan ekonomi di Jawa Tengah sebagai sarana promosi kesejahteraan umum yang menjadi dasar pandangan politik idealnya (yaitu statis, hierarkis, organis, dan aman)—adalah, sebagaimana akan kita lihat, perwujudan awal kepedulian yang besar di dalam Angkatan Darat. Menyadari hubungan antara kemiskinan dan ketertarikan umum terhadap solusi yang ditawarkan kaum komunis untuk mengatasinya, Suharto, dalam kapasitasnya sebagai komandan regional, berusaha mengatasi masalah-masalah sosial besar ini lewat teknik bimbingan teritorial. Programnya menarik banyak perwira muda masuk dalam jajaran stafnya untuk membantu menggodok konsep. Yoga dengan kuat mendukung; ia juga membantu Suharto sebagai asisten (intelijen) sekaligus kepala staf Penguasa Perang Daerah Harian di bawah darurat perang. Yoga kemudian merekrut Ali Murtopo, yang berpandangan serupa, untuk bertindak sebagai asisten V (teritorial) dalam staf Suharto. Rekrutan lain adalah seorang perwira keuangan yang dikenal baik dan sangat berpengalaman, Sujono Humardani.

Dalam upaya menggapai tujuan ini, armada Suharto amat terdukung oleh kekuatan darurat yang tersedia bagi komandan angkatan bersenjata regional dengan adanya maklumat SOB (Keadaan Darurat Perang). Ini menimbulkan efek langsung munculnya kesempatan bagi perwira TNI untuk campur tangan terhadap masalah sipil, dan untuk mendapat kekuatan baru dalam bidang politik, pemerintahan, dan ekonomi. Menurut satu sumber, kekuasaan yang ada pada komandan teritorial di bawah SOB begitu "besar"; memang, "melalui struktur dan otoritas angkatan bersenjata di bawah darurat perang, berkembanglah sejenis tata pemerintahan *de facto*."[49] Tak lama menjelang pengumuman SOB, Suharto (sebagai komandan TT IV) menghadiri rapat komandan senior di markas angkatan bersenjata di Jakarta pada 15–20 Maret yang diselenggarakan untuk membahas masalah-masalah nasional, termasuk "usaha pengembalian kewibawaan negara, pelaksanaan SOB, keutuhan dalam AD, masalah "Dwi Tunggal" [kemitraan pemerintahan antara Sukarno dan Hatta yang pecah pada 1956], pembasmian korupsi dan penyelundupan-penyelundupan,"[50] dan juga membahas SOB yang baru dimaklumatkan.

Angkatan Darat tidak berusaha mengambil alih kendali sepenuhnya dari penguasa wilayah sipil—memang, sering kali ada kedekatan kultural, kepentingan konservatif yang sama, kebencian yang sama terhadap partai politik, antara angkatan bersenjata dan korps elite pamong praja (pejabat wilayah sipil)—namun para perwira akan segera turun tangan jika dirasa perlu, dan mereka sigap dalam memegang kendali wilayah-wilayah utama perekonomian daerah, terutama, sebagaimana akan kita lihat dalam konteks Suharto, dalam urusan ekonomi. Pendeknya, "pemerintahan darurat perang boleh melakukan intervensi di mana pun dan kapan pun juga." Menurut sebuah sumber, hasilnya "adalah meningkatnya kegagalan dalam tata negara. Ini karena hubungan antara pemerintahan darurat baru dan pemerintahan sipil tidak jelas, dan nyaris tidak ada koordinasi efektif antara keduanya."[51]

Tak lama menjelang kembalinya ia ke Semarang, Suharto mengeluarkan Perintah Harian.[52] Mengemukakan sejarah Republik yang suram sejak proklamasi ("kekacauan, penyelundupan, korupsi, aksi subversif, konkurensi yang tidak seimbang, dan pertentangan-pertentangan merupakan faktor penghambat bagi usuaha pembangunan negara"), ia menghimbau pasukannya, aparat negara lokal, dan rakyat pada umumnya untuk membawa negara dan bangsa ke arah "nasional konstruktif". Meskipun peraturan SOB merupakan warisan kolonial, tujuannya dalam kasus ini adalah untuk melindungi rakyat.

> SOB bukan kekuasaan, akan tetapi ketegasan. Oleh karena itu terimalah SOB itu sebagai alat yang tegas untuk menyelesaikan perjoangan kita yang belum selesai ini. Dengan SOB kita harus tegas mempertegak kewibawaan Negara Republik Indonesia yang kita proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan SOB kita harus tegas berusaha memenuhi keinginan rakyat untuk hidup dalam masyarakat yang adil dan makmur. Dengan SOB kita harus tegas menerobos birokrasi yang berbelit-belit, untuk mewujudkan cara bekerja yang dinamis.

Akhirnya, dia mendesak para anggota Divisi Diponegoro untuk menjadikan situasi ini sebagai kesempatan mengabdi pada negara dan bangsa dan menepiskan pemikiran bahwa Angkatan Bersenjata telah memegang kekuasaan. Konsep bahwa bangsa sedang mengalami krisis serius kesetiaan terhadap nilai-nilai perjuangan, melemahnya kesatuan bangsa akibat tindakan-tindakan bagi kepentingan golongan, masih menjadi tema utama pidatonya, demikian pula kebutuhan untuk bekerja sama demi kepentingan pembangunan dan kemakmuran.[53]

Suharto juga melakukan pertemuan dengan golongan sipil, termasuk gubernur Jawa Tengah, kepala daerah istimewa Yogyakarta (Sultan Hamengkubuwono IX), polisi, dan aparat pengadilan. Selama pertemuan, yang berlangsung lebih dari tiga jam, dia "menjelaskan arti dan maksud berlangsungnya" SOB.[54] Kekuasaan-

kekuasaan baru tampaknya menyepakati apa yang ia anggap sebagai wilayah kompetensinya, dan inilah yang melatarbelakangi laporan pada April 1957 bahwa sebagai hadiah lebaran, dia akan membebaskan narapidana yang ditahan berdasarkan SOB.[55] Di bawah perjanjian baru, Suharto mendapat jabatan Penguasa Perang Daerah (Peperda). Pertemuan lain antara komandan teritorial di Jakarta, bersama dengan gubernur sipil, terjadi pada tanggal 26–28 April. Pertemuan ini bertujuan menangani secara lebih cepat sejumlah isu yang dimunculkan pada pertemuan Maret dengan membuat seksi-seksi khusus yang akan mengatasi masalah-masalah nasional tertentu; satu seksi, menangani pertahanan, di bawah pimpinan Kolonel Ibnu Sutowo, meminta adanya langkah kuat dan efektif untuk memberantas penyelundupan dan korupsi. Dari 17 hingga 20 Juni, Suharto menghadiri pertemuan lebih kecil, yang merupakan lanjutan dari konferensi April, untuk membahas masalah-masalah perencanaan dan keuangan negara dengan panglima daerah lain dan pejabat-pejabat dari departemen keuangan dan perdagangan; hasil pembahasan mereka dimaksudkan sebagai masukan bagi pembahasan Konstituante mengenai masalah keuangan. Jelas sudah kemiripan antara situasi di bawah SOB dengan situasi pada masa perjuangan pasca-Desember 1948. Pada kedua situasi itu, kekuasaan militer sangat besar dan otoritas eksekutif tersedia tanpa harus tunduk pada proses sipil yang melelahkan. Suharto berada di tempatnya pada dua kejadian ini.

Minat besar Suharto terhadap pembangunan materi daerahnya tampak jelas.[56] Unsur utama strateginya adalah pendirian Yayasan Pembangunan Territorium Empat (YPTE) pada Juli 1957, berfungsi sebagai sarana untuk "pelbagai usaha di bidang ekonomi dan keuangan untuk memberikan menolong para petani, orang di desa-desa itu",[57] dan yang "bergerak di berbagai bidang kegiatan ekonomi dan usaha lainnya yang maksudkan untuk membantu masyarakat."[58]Yayasan lain yang lebih kecil, Yayasan Territorium Empat (YTE), sudah beroperasi pada Juni 1957, bertujuan menggalang dana terutama untuk membantu membayar dan mem-

perbaiki kondisi pasukan Suharto, dan untuk membantu personel militer pensiunan dari Divisi. Pada akhir tahun itu, dengan kembalinya Sujono ke Semarang setelah bertugas di Bandung menjadi deputi kepala Finek, yayasan-yayasan itu mulai berkembang pesat dan menginvestasikan dana dalam berbagai kegiatan.

Basis kegiatan yayasan adalah kemampuan untuk mengutip pungutan dari barang dan jasa—misalnya, kepemilikan radio atau penggunaan listrik—dan meminta bantuan amal dari perusahaan-perusahaan mapan yang berharap bisa mendapat keuntungan dari kedekatan dengan kekuasaan utama dalam urusan-urusan daerah. Berkaitan dengan YPTE, dana akan diberikan kepada para petani dalam bentuk pinjaman yang akan dibayar dalam jangka panjang dari penghasilan yang didapat dari usaha mereka.[59] Ketika YPTE dimulai, di bawah kendali operasional Lt. Sunarso, seorang anggota staf Finek, yayasan ini sudah berhasil mengumpulkan Rp 419.352, terutama berasal dari kutipan kopra dan sebagian sebagai hadiah dari Perkumpulan Pabrik Rokok Kudus. Pada akhir tahun, yayasan ini memiliki cadangan dana lebih dari Rp 16 juta, anggaran belanja lebih dari Rp 18 juta, dan Suharto memperkirakan yayasan ini bisa meningkatkan modal kerjanya hingga Rp 25 juta.[60] Pada awal 1959, modalnya meningkat menjadi Rp 35.381.935 (kala itu setara dengan US$786.265).

Di bawah pengawasan saksama Suharto dan Sujono, yayasan ini memulai proses investasi ke perusahaan swasta yang berkaitan dengan distribusi barang primer, seraya bekerja sama dengan tokoh-tokoh bisnis ternama. Pada Desember 1957, Sujono dan dua perwira lain mewakili YPTE memberi sejumlah kecil modal untuk mendirikan NV Garam. Beberapa hari kemudian, ketiga perwira ini bergabung dengan lima perwira pensiunan yunior untuk mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pemasaran, transportasi, dan industri di Salatiga; meski memberi modal dengan porsi besar, YTE hanya berhak mendapat sepuluh persen dari keuntungan perusahaan. Perusahaan ventura serupa didirikan di Solo pada Januari 1958. Pada bulan Mei di tahun yang sama,

Sujono dan kepala Finek, Letkol Sutomo, membeli separuh saham PT Dwi Bakti; usahawan Jakarta, Sukaca, dan usahawan Cina-Indonesia setempat serta anak asuh Gatot Subroto, Muhammad 'Bob' Hasan, membeli saham yang tersisa. Delapan bulan kemudian, Sujono dan Sutomo mengalihkan kepemilikan mereka kepada Hadisubeno Sosrowerdoyo, walikota Semarang yang tangguh dan aristokratis serta berhaluan PNI dan sangat antikomunis. Pada Juni 1958, investasi modal oleh Finek, Hasan, dan satu usahawan lagi menciptakan lini perkapalan antarpulau, PT Pangeran Lines.

Pada Agustus, YPTE, diwakili seorang pejabat sipil pensiunan, menyumbang separuh modal yang diperlukan untuk membangun NV Pusat Pembelian Hasil Bumi, sebuah perusahaan yang bertujuan membeli dan menjual produk pertanian; separuh modal sisanya dikumpulkan dari para pedagang pribumi di Jawa Tengah. Hadisubeno sendiri juga aktif membeli saham di PT Dwi Dasa Karya atas nama Suharto dan Republik Indonesia. Dalam perusahaan seperti ini, Sujono bersama teman-teman sipil dan militernya diberi posisi yang membuat mereka berhak atas persentase laba. Juga pada Agustus 1958, jasa perikanan pemerintah menerima sebuah kapal keruk yang pembuatannya didanai YPTE. Pada awal 1959, YPTE meminjamkan dana Rp 1 juta untuk membangun industri skala kecil di daerah itu. Pada Agustus 1959, tampaknya sebagai bagian dari rencana lebih luas untuk menjadikan BUMN sarana pendapatan pemerintah, YPTE menginvestasikan Rp15 juta untuk membeli pabrik gula Pakis yang kala itu diserahkan pada pemerintah provinsi. Sepengetahuan saya, Suharto sendiri tidak terlibat langsung dalam masalah-masalah itu dan tidak ada bukti yang menghubungkan dia langsung dengan pembagian laba dalam usaha-usaha itu.

Pembahasan otobiografis Suharto tentang kegiatan-kegiatan ini amat tidak jelas; ia menyebut sejumlah "usaha komersil" yang didirikan demi kepentingan YPTE yang dibantu oleh Letkol Munadi, Mayor Sujono Humardani, dan 'Bob' Hasan. Hasil usaha ini: "kami berhasil memberikan alat pertanian, bibit, dan pupuk

kepada para petani, [dan] membagikan bahan pangan, sandang untuk keluarga prajurit yang juga merupakan kegiatan yayasan itu." Dia juga bersikukuh mendirikan koperasi di kalangan prajuritnya, seperti yang ia lakukan di Solo. Untuk mengatasi "kelaparan rakyat pada waktu itu", ia merancang rencana untuk mengambil gula dari pabrik-pabrik gula Jawa Tengah dan, melalui YPTE dan terutama Hasan, menukarnya dengan beras dari Thailand via Singapura—dan ini melanggar langsung peraturan pemerintah tentang larangan barter.[61] Suharto juga mampu mengatur penunjukan para perwira angkatan bersenjata dalam dewan BUMN lokal seperti perusahaan minyak Permigan.

Bertentangan dengan legenda umum, tidak ada bukti Suharto menjalin hubungan dekat dengan usahawan Cina-Indonesia Liem Siu Liong. Menurut Liem, ia pertama bertemu Suharto pada 1950-an di Semarang ketika "beliau belum jadi panglima Diponegoro". Mengingat Suharto tidak pindah ke Semarang hingga 1956, kemungkinan besar pada saat itulah mereka pertama kali berkenalan resmi. Liem juga mengatakan bahwa, "walaupun saya aktif memasok Kodamnya [Komando daerah militer], saya tidak ingat benar apa pangkatnya waktu itu—mungkin kolonel."[62] Mengingat pengalaman lama Liem dengan pasokan dan pemasaran komoditas untuk Divisi Diponegoro, tampaknya besar kemungkinan ia dikenal baik oleh Sujono, jika kala itu ia belum berkenalan dengan Suharto. Mungkin saja hubungan itu terjadi lewat Sujono yang "mengenal Liem sebagai pengusaha yang dapat dipercaya dan jujur untuk diajak bekerja sama di bidang usaha."[63] Sifat bisnis itu tetap tidak jelas; pendapat kabur McDonald menyatakan bahwa Liem "bertemu Suharto dan perwira lain dalam Divisi Diponegoro, bekerja sama dalam membangun industri ringan dan memasarkan hasil produksi mereka."[64] Saya tidak menemukan bukti kegiatan semacam itu terkait langsung dengan Suharto. Manapun yang benar, perhatian Liem pada saat itu ada di tempat lain. Pada 1954, Liem mendirikan Bank Windu Kencana yang ternyata tidak begitu sukses dan "ternyata tidak efisien", dan

pada Oktober 1956, ia mendirikan NV Bank Asia yang nantinya berkembang menjadi bank raksasa, Bank Central Asia.[65] Apa pun peran Liem dalam berdagang dengan Suharto, peran itu tampaknya hanya dalam waktu terbatas karena pada 1957 Liem pergi dari Kudus ke Jakarta, di mana ia terjun ke bisnis tekstil dan *finishing* tekstil.

Hubungan bisnis seperti itu menunjukkan keahlian Suharto dan stafnya dalam menjalin hubungan menguntungkan dengan berbagai sektor dunia birokratis dan bisnis Jawa Tengah. Ini adalah dunia, sebagaimana dikatakan Sujono kelak, di mana "hubungan pribadi sangat lancar. Ini negara kecil. Hubungannya condong seperti hubungan keluarga."[66] Ini adalah dunia kuno tatanan dan hierarki, *unggah-ungguh*, gangguan dan kerusuhan yang nyaris seluruhnya terpendam, dan dalam kasus Suharto, "rasa hormat terhadap superioritas sosial elite sipil".[67] Ini adalah dunia di mana Suharto dan Hadisubeno memiliki banyak kesamaan dalam menentang kebrutalan dan agresi merusak kekuatan komunis.

Keahlian dan pengaruh Suharto memungkinkan staf divisional terkait untuk mengatur penyelenggaraan bisnis dan mendorong pembangunan. Sujono, misalnya, mengorganisasi perdagangan barter ilegal antara Jawa Tengah dan Singapura, menukar gula daerah itu dengan beras yang lebih dibutuhkan. Laba dari usaha semacam itu, kelak Sujono mengklaim, digunakan bagi kepentingan petani biasa melalui penyediaan pupuk dan perluasan tanaman tertentu seperti katun.[68] Yoga Sugama menunjuk fasilitas pompa perbekalan Angkatan Darat untuk menanam padi, perlengkapan untuk memasok listrik, dan menghubungkan rencana pembangunan dengan pentingnya pemeliharaan keamanan daerah. Suharto sendiri, seperti kelak dilakukannya saat menjadi presiden, mengorganisasi kegiatan inspeksi—"menyeberangi anak sungai yang sedang banjir, melalui pematang dan tanah-tanah yang berlumpur sampai hampir setengah lutut"—untuk melihat sendiri kemajuan yang dicapai penduduk desa sebagai hasil dari dana yang dikucurkannya.[69] Dalam satu kesempatan, Finek bahkan membuat toko

berjalan yang berkeliling di berbagai daerah bebas gerilyawan untuk menjajakan gula, tekstil, dan garam dengan harga murah, dan bahkan memberi hadiah kepada orang-orang sebagai rasa terima kasih atas bantuan mereka.

Sulit mengetahui sejauh mana Suharto mendapat keuntungan dari rencana semacam ini. Tetapi, bawahannya jelas diuntungkan, seperti juga banyak rakyat sipil diuntungkan oleh peran patronasenya dalam menciptakan kesempatan baru. Selain memberi sumber dana untuk pembangunan desa, ia juga memerhatikan dimensi sosial dan politik pembangunan. Ali Murtopo sibuk membangun rukun-rukun tetangga dan kampung untuk mendorong solidaritas komunal dalam bentuk usaha komunitas membangun diri sendiri. Suharto juga memberi "perhatian khusus ... pada kesejahteraan sosial anak buahnya", bekerja bukan hanya untuk mengembangkan mimpi lamanya akan gerakan koperasi angkatan bersenjata ("saya tekankan kepada staf dan lingkungan saya [di Semarang], bahwa perlu dibangun kegiatan koperasi di seluruh kesatuan TT-IV/Diponegoro ... Saya, sebagai Panglima Divisi Diponegoro, memesankan hal itu"),[70] namun juga membantu istrinya membentuk Perhimpunan Istri Angkatan Darat "dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial dan memberi bantuan sosial."[71]

Bobot kegiatan-kegiatan semacam itu, yang mengaitkan kepemimpinan militer dengan arus perdagangan dan birokrasi di Jawa Tengah, terbukti pada Juli 1957 saat pemilu daerah Jawa Tengah. Di semua wilayah, PKI mencapai kemajuan besar, sebagian karena rasa muak terhadap partai yang berkuasa. PKI mengecap sukses terutama di Semarang, meski Hadisubeno berhasil mempertahankan posisinya sebagai walikota. Keprihatinan Suharto atas meluasnya pengaruh komunis—dan dampak yang bisa ditimbulkannya dalam mengguncang pola kehidupan umum—terlihat dalam upaya kerasnya memperingatkan Sukarno akan bahaya PKI.

Dalam otobiografinya, Suharto menuturkan sebuah percakapan dengan Sukarno dalam kunjungan Sukarno ke Semarang

untuk menghadiri perayaan ulang tahun ke-10 Divisi Diponegoro. Suharto memberanikan diri mempertanyakan hal meningkatnya kekuatan dan ancaman PKI. Pertanyaannya dijawab sinis oleh Sukarno, "Kamu Suharto, kamu seorang tentara. Masalah politik, itu urusan saya, serahkan kepada saya." Mungkin pada kesempatan yang sama pula, Sukarno memberi petuah kepada Suharto tentang "ingin [Sukarno] menjadikan PKI menjadi PKI Pancasila. Saya [Suharto] sempat menanyakan, apakah mungkin. Bung Karño bertekad membuktikan. Karena itulah lahir konsepsi Nasakom [Nasionalisme, Agama, Komunisme]."[72] Respons Suharto adalah "bagi saya ... karena tidak percaya PKI bisa di-Pancasila-kan, saya berusaha untuk memisahkan PKI dari rakyat dengan melaksanakan pembangunan, pembangunan daerah." Respons selintas Sukarno, menurut Suharto, adalah "Ya, sudah benar itu, kau lakukan terus."[73]

KRISIS DAERAH

Naiknya Suharto ke komando divisional bersamaan dengan pecahnya pemberontakan regional di provinsi-provinsi di luar daerah; banyak dari pemberontakan itu didukung bahkan ada yang dipimpin oleh komandan angkatan bersenjata setempat; hasilnya, "pada awal 1957 praktis seluruh Sumatra, kecuali Medan, melakukan revolusi terbuka melawan Kabinet Ali."[74] Pada awal 1958, kerusuhan di Sumatra mencapai klimaks dengan terbentuknya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang dimaksudkan sebagai pemerintah tandingan dan bermarkas di Bukittinggi; situasi ini memperburuk masalah yang telah ditimbulkan oleh proklamasi gerakan 'perjuangan semesta' (Permesta) di Sulawesi dan Indonesia Timur oleh Letkol Sumual (perwira yang sama yang bertempur dengan Suharto di Jawa Tengah menyusul pendudukan Yogyakarta pada akhir 1948) pada 2 Maret 1957.

Suharto, seperti kita lihat, adalah pendukung kuat persatuan bangsa. Naiknya ia sebagai panglima sebagian karena keinginan

lokal untuk mengatasi kerusuhan sosial. Suharto sendiri telah menolak mengakomodasi ketidakpuasan lokal yang bisa mengancam persatuan di wilayah komandonya sendiri. Memang, saat ia menjabat sebagai kepala staf Divisi, Suharto menugaskan Yoga Sugama ke Jakarta untuk mengemban misi membujuk Lubis agar menarik dukungannya terhadap kekuatan-kekuatan daerah di Sumatra, terlepas dari kepedulian bersama mereka tentang pemerintah Jakarta yang kekiri-kirian dan, mungkin juga, toleransi bersama mereka terhadap penyelundupan sebagai sarana menciptakan penghasilan demi tujuan pembangunan daerah. Selaras pula, Suharto tidak bersimpati pada orang-orang yang terlibat kerusuhan daerah, atau pada maksud mereka. Suharto juga kecewa karena para komandan angkatan bersenjata telah melibatkan diri. Responsnya sederhana dan tegas, "Saya melihat kejadian itu sebagai permulaan timbulnya keretakan bangsa ... keutuhan Republik jangan sampai terganggu". Kendati demikian, ungkap Suharto, ia tidak terlibat; "Saya tidak mau campur dalam urusan politik di luar pegangan itu." Dia menegaskan bahwa sikap ini penting guna memastikan Jawa Tengah bersih dari kerusuhan.[75] Mungkin karena inilah Suharto enggan melibatkan pasukannya di Sumatra pada 1957 ketika, seperti dikemukakan Hatta kelak, Nasution telah "dua kali berupaya memobilisasi kekuatan ekspedisi melawan Sumatra Barat, namun, dalam kedua upaya itu, para komandan militer di Jawa menolak bekerja sama dengan alasan mereka tidak akan turut serta dalam satu situasi di mana rakyat Indonesia berperang melawan rakyat Indonesia."[76]

Posisi Suharto dalam masalah kerusuhan sosial ini adalah cermin kekolotannya yang monodimensi, sempit, dan dogmatis yang kini telah mengkristal menjadi filsafat politiknya. Bagaimanapun, tekadnya untuk memegang teguh filsafat itu tidak akan goyah jika terjadi masalah. Ini dengan tegas diungkapkannya di Munas (Musyawarah Nasional) yang diselenggarakan pada 9–14 September 1957 di Jakarta, "yang dihadiri pula oleh para tokoh politik dan militer dari seluruh penjuru Tanah Air."[77] Seperti

dikemukakan Lev, di sana Suharto "dengan tegas menganggap sikap untuk menerima para pembangkang di Sumatra dan Sulawesi sebagai sikap berpihak yang menyimpang. Ia menunjukkan bahwa 54 juta penduduk Jawa akan merasa diperlakukan tidak adil jika pemerintah mengendurkan usaha pembangunannya di sana demi memberi kesempatan daerah-daerah pemberontakan untuk menyusul."[78] Pandangannya mengenai arah umum Indonesia diungkapkan sama kuatnya dalam pesan penutup tahun 1957. Setelah melakukan kilas balik masalah-masalah sepanjang tahun, terutama krisis daerah yang terus berlangsung, Suharto memberi beberapa harapan, seperti pembentukan Kabinet Fungsional dan Dewan Nasional, serta penyelenggaraan musyawarah-musyawarah nasional. Tetapi, harapan ini buyar pada akhir tahun

> oleh kejadian-kejadian yang memanaskan suasana. Terjadinya pergolakan hebat di gedung Konstituante mengenai penetapan dasar Negara kita, yang karena panasnya suasana terpaksa ditunda atau dihentiken sementara waktu perdebatannya. Di lapangan diplomasi, kita mengalami kekecewaan hebat berhubung ditolaknya resolusi tentang Irian-Barat di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ditambah terjadinya peristiwa yang amat mengejutkan seluruh bangsa, yakni percobaan pembunuhan terhapap diri Kepala Negara kita Presiden Sukarno di Cikini-Jakarta .... Jadi sekarang ini kita hadapi gerbang tahun baru ini dalam suasana yang panas. Bukan karena chaos, bukan pula karena perpecahan, tetapi panas karena menggeloranya semangat rakyat yang tidak tahan lagi melihat hambatan-hambatan revolusi, yakni sisa-sisa kolonialisme yang masih bercokol di bumi tanah-air kita. Pemerintah menginsyafi keadaan ini.[79]

Suharto, kini berkumis tipis, dengan jelas menegaskan posisi dan tanggung jawabnya sebagai panglima dan penguasa militer regional. Ia mulai berminat pada masalah-masalah besar, bukan lagi pada urusan-urusan rutin militer yang sebelumnya digemarinya. Ketika pada awal 1958 pemerintah merasa sudah saatnya

menunjukkan kekuatan militer dalam menghadapi pemberontakan, Suhartolah panglima Jawa yang paling bersemangat mengirim pasukan untuk meneguhkan kendali pemerintah pusat terhadap daerah-daerah pemberontak. Pada awal Maret, ia mampu menyediakan "sekitar tiga batalion" yang, menurut Kedutaan A.S., "banyak disusupi komunis dan dipimpin oleh seorang prajurit komunis asal Sunda."[80] Batalion Pasukan Diponegoro (*Diponegoro Raider*), Bn 432, menjadi bagian dari "Operasi Tegas" yang mengamankan ladang minyak Sumatra Tengah. Yani, dipilih sebagai asisten II dan kemudian, pada 1957, sebagai deputi I (dengan pangkat kolonel) bagi Nasution menyusul kembalinya ia dari pelatihan di Fort Leavenworth dari akhir 1955 hingga pertengahan 1956, ditugaskan memimpin satu operasi bernama 'Operasi 17 Agustus' untuk menumpas pemberontak di Sumatra Barat. Pasukan-pasukannya, termasuk Bn 438 dan Bn 440 dari Divisi Diponegoro, di bawah pimpinan Letkol Suwito Haryoko dengan sukses menyerang Padang pada 17 April 1958. Pada akhir tahun, menurut perkiraan Sultan Yogyakarta, Divisi Diponegoro telah menerjunkan enam batalion ke wilayah Sumatra Barat. Ironisnya, para komandan Diponegoro di Sumatra Barat, walau telah menghancurkan pasukan pemberontak, mau tak mau harus menugaskan penduduk sipil komunis untuk membantu menjalankan pemerintahan sipil karena sentimen PRRI yang begitu meluas.

Kontras dengan jibaku berdarah ini, komandan Jawa Timur dan mantan komandan brigade Diponegoro Sarbini lambat menugaskan pasukannya untuk operasi itu. Sementara, respons dari Siliwangi Jawa Timur tampak ragu-ragu, yaitu hanya menyediakan satu batalion infantri untuk operasi menumpas pemberontak. Seraya sibuk memerangi Darul Islam, para komandan Siliwangi memahami sebagian perspektif para pemberontak, terutama perspektif tentang identitas Islam, kebencian akan supremasi Jawa, dan ketidakpercayaan terhadap sistem parlementer. Kepedulian Siliwangi juga dirasakan Sultan Yogyakarta yang merasa "kebijakan pemerintah yang tanpa kompromi terhadap pemberontakan itu

telah hilang arah dan tidak fleksibel.[81] Seseorang hanya bisa menduga-duga perbedaan pendapat antara Suharto dan Sultan mengenai masalah penting ini—komandan profesional yang tangguh dan keras melawan politisi yang sensitif dan kompleks. Sementara, Sukarno menggunakan kesempatan berkunjung ke Semarang pada April 1958 untuk memberi selamat pada pasukan TT IV beserta keluarga atas sumbangsih mereka "mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia."[82]

Dukungan Suharto terhadap aksi militer menumpas pemberontak sangat gencar dan bersinambung. Pada awal 1959, Resimen Tempur (RTP) II, berkekuatan 6.500 orang dan di bawah kepemimpinan Yoga Sugama, tiba di Sumatra Barat. Ketika seorang kepala staf Yoga dipindah ke Riau tidak lama setelah tiba di Bukittinggi, saran Yoga agar Ali Murtopo menggantikan kepala staf itu diterima oleh Suharto; Ali kemudian diberi pangkat pejabat mayor. Pada akhir Agustus dan awal September, Suharto beserta enam perwira lain menginspeksi daerah militer Sumatra Barat, tempat banyak pasukan Diponegoro "memegang peran penting dalam kampanye pembasmian pemberontak." Diiringi komandan Operasi 17 Agustus, Letkol Suryosumpeno, dan gubernur lokal, Suharto "memberi penjelasan mengenai kembalinya negara ke UUD 1945 dan ke program-program kabinet."[83]

ANGKATAN DARAT, SUKARNO, DAN POLITIK

Ketika Suharto sibuk mengurusi daerah lokalnya dan mengembangkan minat pada tema-tema nasional yang lebih luas, Sukarno dan Nasution bekerja sama memperkenalkan kerangka baru politik Indonesia. Oposisi yang mereka rasakan dari partai-partai ortodoks tidaklah kuat dan kompak, terutama dengan pudarnya Masyumi dan PSI (Partai Sosialis Indonesia) akibat munculnya pemberontakan daerah; memang, "kecuali PKI, nyaris semua partai berlomba menghancurkan diri sendiri."[84] Dengan jatuhnya kabinet Ali II, parlemen tidak lagi penting. Dan Dewan Nasional yang dibentuk

pada Mei 1957 berencana meneguhkan kedudukannya sebagai badan pembuat kebijakan, jika bukan peran sesungguhnya, untuk mendukung kabinet Juanda. Majelis Konstituante, yang dipilih pada 1955 untuk merancang konstitusi baru, terbukti tidak sepakat mengenai bentuk negara baru dan enggan mengadopsi UUD 1945 yang revolusioner. Sukarno, di mata seorang jurnalis Barat, "menjadi semakin terobsesi pada keyakinan bahwa dia bisa sendirian memecahkan masalah Indonesia."[85] Nasution, terkenal dengan pidato "jalan tengah" di Magelang pada 1958[86]—Suharto adalah salah seorang yang hadir mendengar pidato itu—menjadi corong bagi unsur pemikiran yang semakin berpengaruh di kalangan perwira angkatan bersenjata senior, yang menantang konsep bahwa pemerintahan adalah wewenang penuh kaum sipil. Pemikiran semacam itu didasarkan pada pandangan perjuangan revolusioner Angkatan Darat, keberhasilannya dalam mencegah disintegrasi bangsa karena pemberontakan daerah, semakin eratnya kesatuan bangsa akibat keberhasilan itu, dan pemahaman tajam akan kondisi politik mutakhir.

Dekrit Sukarno 5 Juli 1959, yang membuat Indonesia kembali kepada UUD 1945, secara efektif mengantar masuk masa Demokrasi Terpimpin yang otoriter di mana Presiden dan Angkatan Darat menorehkan pengaruh mereka secara permanen dalam politik dengan cara yang tak terbayangkan akal beberapa tahun sebelumnya. Sukarno semakin arogan dalam menempatkan diri sebagai guru ideologis untuk bangsa. Sementara Nasution, yang ditunjuk sebagai menteri pertahanan dalam kabinet presidensil pertama Sukarno pada Juli 1959 (dan juga tetap menjabat sebagai kepala staf angkatan bersenjata), berusaha membangun kontrol pusat yang baik terhadap Angkatan Darat sebagai hasil dari keberhasilan serangan terhadap pemberontak daerah. Nasution juga berusaha membentuk peran baru militer agar lebih berpengaruh di dalam pemerintahan dan lebih berkembang dalam hal kemampuan militer nasional. Peningkatan peran Angkatan Darat dalam pemerintahan ini terbukti dengan didapatkannya hampir sepertiga

kursi di kabinet baru (setelah tidak pernah mendapat posisi dalam kabinet apapun sebelum 1957). AD juga mendapat suara penting dalam organ-organ legislatif yang diamanatkan UUD 1945: MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) yang merupakan parlemen yang telah dirombak.

Suharto, yang berpartisipasi dalam berbagai pertemuan para komandan yang diadakan Nasution untuk memperkuat angkatan bersenjata dalam usaha menciptakan sistem pemerintahan baru, tampaknya sepakat dengan pandangan Nasution bahwa negara ini sedang dalam kerusakan serius karena praktik demokrasi liberalnya, bahwa diperlukan kepemimpinan yang lebih tegas dan keras, bahwa Angkatan Darat memiliki hak untuk ikut serta mengatur dan mengarahkan bangsa, dan bahwa UUD 1945 adalah sarana paling sesuai untuk menyampaikan aspirasi ini.

SUHARTO DAN POLITIK

Pada saat dipindah ke Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SSKAD) pada akhir 1959, pemikiran politik Suharto, terutama pemikirannya tentang bentuk dan sifat yang layak untuk negara, mungkin sudah sedikit lebih maju; mungkin juga tanpa disadarinya, pemikiran itu sudah melampaui ide-ide yang ia pegang teguh pada masa perjuangan. Ide-ide itu sangat akrab, tetapi tidak terlalu reflektif, dengan ide kesatuan bangsa Indonesia. Ini adalah cara pandang—yang secara umum konservatif yang berusaha berkembang dalam skema yang ada—alih-alih hasrat, bagi perubahan mendasar, sinisme terhadap prestasi potensial dan aktual politisi sipil, dan rasa segan pada keteraturan, hierarki, dan profesionalisme. Selain itu, Indonesia harus didasarkan pada ideal proklamasi kemerdekaan yang menolak segala bentuk perpecahan struktur Indonesia.

Bagi TNI, ungkap Suharto, kembali pada UUD 1945 berarti "kembalinya jiwa kepribadian semula ... pembaruan semangat

perjoangan demi penyelesaian revolusi nasional."[88] Kendati demikian, tampaknya besar kemungkinan dia tidak melihat peran penting militer dalam politik, kecuali bertindak sebagai kekuatan dinamis untuk membantu (dan, jika diperlukan, untuk memaksa serta mendesak) pemerintah sipil agar lebih baik dalam melaksanakan tugas. "Angkatan bersenjata," ujarnya dalam sebuah pengumuman pada malam pemilu daerah 1957, "bukanlah alat untuk menakut-nakuti, tetapi merupakan orgaan yang berjiwa hidup serta mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan diri."[89] Pada saat yang sama, Suharto lebih akrab dengan ide bahwa masalah ekonomi lebih baik diselesaikan dengan solusi kekeluargaan yang terarah. Ini tampak tidak hanya dari kegiatan yayasannya, melainkan juga dari sikapnya yang melindungi monopoli dukungan negara, seperti Koperasi Kopra Jawa Tengah. Ide-ide ini, terlepas dari sifatnya yang kurang canggih, kurang dalam, dan kurang variasi, dipegang mati-matian oleh Suharto.

Seperti kebanyakan temannya sesama perwira, Suharto sangat anti terhadap komunisme. Terlepas dari penilaian awalnya terhadap makna dan tujuan peristiwa Madiun 1948, ia dengan senang hati menerima tugas mengenyahkan komunis dan simpatisan mereka dari sektor-sektornya di Jawa Tengah. Bagaimanapun, yang lebih mendasar adalah pandangan konservatif Suharto yang terusik oleh berbagai pandangan lain, seperti pandangan ketua Partai Komunis D.N. Aidit, bahwa "Revolusi Agustus [1945] tidak tuntas menerapkan dua tugas dasar perjuangan: tugas revolusi anti-imperialis dan revolusi demokratis anti-feodal."[90] Dalam pandangan Suharto, penuntasan revolusi tidak membutuhkan penataan sosial secara besar-besaran. Pada tataran yang lebih praktis, ia mungkin melihat keberhasilan luar biasa PKI dalam pemilu 1957 sebagai tantangan langsung terhadap otoritas dan kekuasaannya. PKI tidak seperti partai lain; partai ini betul-betul berupaya keras menjangkau serta mendengarkan massanya. Sebaliknya, "banyak pemimpin partai [selain partai komunis] yang merasa memiliki massa yang jelas dan hanya memerlukan sedikit perhatian, karenanya, hal ini

membuat mereka merasa berhak penuh atas partisipasi dalam pemerintahan."[91]

Namun, PKI menyatakan bahwa "kegiatannya tidak terbatas pada kerja parlementer semata, namun juga dan terutama mencakup kegiatan di antara massa ... bertujuan mengubah imbangan kekuatan antara kaum imperialis, yaitu kelas pemilik tanah dan perantara di satu sisi, dan kekuatan rakyat di sisi lain."[92] Bagi seseorang dengan posisi seperti Suharto, satu program seperti ini yang bertujuan merombak dan bahkan menciptakan kembali sistem sosial Jawa tampak sangat berbahaya, demikian pula halnya dengan metode populer yang akan digunakan. Dengan melakukan hal itu, kaum komunis "tidak hanya mengancam partai-partai lain, tetapi juga mengancam elite tradisional secara keseluruhan."[93] Maka dari itu, Suharto menjalin hubungan dekat dengan Hadisubeno Sosrowerdoyo, walikota Semarang, ketua PNI di Jawa Tengah, anggota berpengaruh Dewan Nasional partai dan, sebagaimana kita lihat, antikomunis yang gigih.

Hadisubeno sudah menuai kebencian pemerintah karena sikap antikomunismenya, juga karena usahanya, sebagai ketua lokal kelompok pamong praja di Jawa Tengah, membela hak-hak istimewa kelompok pegawai pemerintahan itu. Hadisubeno berhasil menangkal usaha gigih menteri dalam negeri untuk memindahkannya ke Jakarta. Hadisubeno mewakili kecenderungan dalam PNI sehingga PKI menganggapnya sebagai ancaman besar bagi peran dan keberhasilannya. Semarang sendiri adalah pusat kekuatan PKI. Sesungguhnya, Semarang, dan terutama rel kereta apinya, adalah tempat lahirnya PKI pada 1910-an. Keberhasilan yang dinikmati PKI pada pemilu 1955 di Jawa Tengah menandakan hubungan yang "terus tegang"[94] antara Hadisubeno dan kaum komunis.

"PEMINDAHAN"

Akhirnya, kegiatan bisnis Suharto mulai menuai tuduhan korupsi. Nasution, menyadari semakin gencarnya kritik pihak sipil terhadap

korupsi yang didukung militer, dan kritik terhadap dirinya karena cenderung puritan, berusaha membersihkan Angkatan Bersenjata sejak setidaknya 1956 ketika ia membentuk sebuah inspektorat jenderal angkatan bersenjata sebagai 'tangan kanannya'. Pada April 1957, ia mengeluarkan sebuah peraturan berkaitan dengan korupsi dan memulai penyelidikan terhadap kegiatan-kegiatan komando teritorial, termasuk TT IV. Dari waktu ke waktu, berbagai peringatan mengenai kegiatan yang tak seharusnya dilakukan personel angkatan bersenjata dikeluarkan, terkadang memberikan hukuman kepada para perwira, seperti hukuman kepada Ibnu Sutowo pada awal 1959. Memang, Nasution menganggap penyelundupan sebagai "pelanggaran disiplin militer dan hal memalukan bagi Angkatan Darat."[95]

Pada 1959, menyusul kembalinya negara ke UUD 1945, dorongan antikorupsi Nasution semakin meninggi, tampaknya sebagai tanggapan atas kritik bahwa keadaan darurat perang telah memberi kesempatan militer untuk terlibat dalam korupsi yang parah. Pada 17 Juli, ia menyerukan disiplin, kesederhanaan, dan semangat juang dalam gaya hidup anggota TNI. Pada 5 Agustus, ia menyampaikan pidato tegas yang menyeru anggota TNI agar menjadi teladan perilaku terpuji dengan "membersihkan diri dari segala penyimpangan demi kepentingan pembangunan bangsa"; dalam satu wawancara yang menyusul kemudian, perwira penerangan angkatan bersenjata menyatakan bahwa "tindakan tegas" akan diambil "terhadap personil AD yang terlibat dalam pencemaran reputasi TNI di depan publik." Tidak lama setelah itu, deputi menteri pertahanan mengeluarkan sebuah instruksi yang melarang "anggota TNI ambil bagian dalam mencari laba bagi organisasi yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki kontak dengan TNI."[96]

Berbagai kegiatan Suharto, terutama yang terkait dengan perdagangan barter di mana para pengusaha swasta terlibat, telah menarik perhatian serius markas besar TNI di Jakarta. Pada 18 Juli 1959, menurut sebuah laporan *Antara*, "kelompok Inspeksi

Angkatan Darat yang dikepalai Inspektur Jenderal Angkatan Darat, Brigjen Sungkono, tiba di Semarang dari Jakarta ... untuk memeriksa kebijakan Penguasa Perang Jawa Tengah dalam bidang ekonomi dan finansial. Pembukuan Yayasan Pembangunan Territorium Empat Angkatan Darat dan aspek finansial pengambilalihan perusahaan Belanda di daerah ini akan diperiksa secara langsung oleh sebuah seksi khusus yang dipimpin Letkol Sumantri."[97] Setelah penyelidikan selesai, Sungkono mengeluarkan sebuah pernyataan pers di Semarang pada 13 Oktober yang merinci temuannya mengenai kegiatan YPTE dan YTE. Ia mengungkapkan bahwa YPTE, yang didirikan "untuk membalas budi kepada rakyat jelata yang dalam masa-masa permulaan revolusi banyak memberikan bantuan kepada Pemerintah umumnya,"[98] memegang dana Rp 42.174.300, selain Rp 33.576.500 yang sudah diberikan "untuk membeli pompa air, traktor, pupuk, dsbnya." Dana-dana ini didapat dari berbagai komisi produksi dan industri jasa yang kebanyakan dijalankan pemerintah. Menurut Sungkono, YPTE adalah satu-satunya yayasan dalam seluruh komando teritorial di Indonesia. Ia juga mendapati bahwa YTE didirikan "untuk menyejahterakan Angkatan Darat dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan bagi mantan anggota AD dan Ikatan Keluarga Anggota Tentara (IKAT) demi tujuan memenuhi kebutuhan dasar para anggota seperti beras, gula, sabun, dan yang juga menggalang bantuan jika ada kematian, pernikahan, dan lain-lain di antara para anggota."

Suharto, mungkin masih di bawah pengaruh operasi hidung sebulan sebelumnya yang membuat dia tidak bisa menghadiri pertemuan para komandan pada pertengahan Desember, diberi tahu bahwa dia akan dipindahkan dari posisinya di Divisi Diponegoro (tidak lama sebelum diberi kembali jabatan Kodam VII/Diponegoro dan diperintahkan untuk mengikuti sesi kedua kursus C di SSKAD yang rencananya dimulai pada 1 November 1959). Menurut penulis biografi Ibu Tien, tidak ada upacara serah terima jabatan resmi kepada komandan baru, yaitu kepala staf Suharto, Letkol Pranoto Reksosamudro. Dan ini ditafsirkan

Ibu Tien sebagai hinaan yang disengaja dan menyakitkan. Ketika Suharto pergi sendirian ke Bandung, istrinya terpaksa meninggalkan pula kediaman resmi dan memindahkan keluarganya ke rumah seorang sahabat.[99]

Ada misteri di balik ini semua. Meski kegiatan Suharto dikaitkan dengan kegiatan bisnisnya di Semarang, terutama karena keterlibatannya dalam barter gula, tidaklah jelas mengapa diambil tindakan terhadapnya padahal banyak temannya juga terlibat dalam kegiatan bisnis serupa. Mossman menunjuk adanya "kesulitan mencegah korupsi di angkatan bersenjata" serta mencatat "ada ratusan kasus penyelundupan terang-terangan oleh pejabat pemerintah pusat yang mendapat kendali atas bekas daerah pemberontak, sebagaimana di Jawa."[100] Selain itu, ada keyakinan umum di antara teman sesama perwira bahwa Suharto tidak terlibat dalam kegiatan yang bertujuan memperkaya diri. Bertahun-tahun kemudian, Sumitro berkata, "Saya tidak menganggap Pak Harto itu korup ... Ketika dia menjadi Komandan Daerah Militer di Semarang, memang benar terjadi banyak barter, tetapi orang lainlah yang mengambil keuntungan. Dan Pak Harto mampu membangun barak bagi unitnya. Rumahnya di Semarang sendiri sederhana."[101] Mantan perwira intelijennya, Marsudi, mengenang bahwa "Pak Harto lugu sekali [dalam hal selera]."[102] Bagaimanapun juga, hukuman yang diberikan kepadanya tidaklah berat. Kursus C dirancang sebagai tempat umum untuk mendidik para perwira. Perjalanan kariernya yang menanjak juga tidak terpengaruh, ia dipromosikan sebagai brigadir jenderal pada Januari 1960; sebagaimana diutarakan McVey, "lompatan dari kolonel ke brigadir jenderal adalah lompatan utama di Indonesia juga di angkatan bersenjata umumnya."[103]

Penjelasan atas hal itu mungkin melibatkan banyak faktor. Tampaknya, ada ketegangan kuat di kalangan staf Diponegoro Suharto di Semarang, dan terutama antara Suharto dan Pranoto. Pranoto, pendukung kuat Sukarno dan kebijakannya, terlepas dari kebimbangannya, tidak setuju dengan antipati Suharto terhadap

bangkitnya partai komunis dan dianggap oleh kelompok Suharto sebagai simpatisan PKI. Pranoto, meski awalnya mengklaim mendukung bisnis Suharto dan upaya pembangunannya, akhirnya menjadi salah satu dari kelompok perwira senior Diponegoro yang menentang segala bisnis itu. Mungkin dia kecewa karena Suharto kurang bersimpati pada PKI, kurang bersimpati pada upaya Sukarno mengendalikan PKI; dia juga kecewa terhadap kerjasama Suharto dan Hadisubeno dalam membendung partai itu. Pranoto mungkin juga kecewa terhadap besarnya skala kerajaan bisnis yang dibangun Suharto beserta rekan sejawatnya. Apa pun kebenarannya, Pranoto tampaknya adalah sumber utama yang mengeluhkan perilaku Suharto; keluhannya mungkin adalah bagian dari apa yang kelak disebut Yoga sebagai "pergeseran yang terencana" untuk mengeluarkan kelompok Suharto dari Divisi Diponegoro..[104]

Nasution tentu saja tidak berwenang mengambil tindakan, bahkan ketika inspektur jenderalnya telah menguak rincian mengenai kontrak-kontrak bisnis Suharto. Bagaimanapun, Nasution sendiri saat itu bersilang-sengketa dengan Sukarno; jaksa agung yang baru ditunjuk Sukarno, Gatot Tarunamiharja, berusaha menyeret Ibnu Sutowo dan Letkol Sukendro ke meja hijau atas peran mereka dalam peristiwa korupsi Tanjung Priok. Nasution menanggapi hal itu dengan memerintahkan agar Gatot Tarunamiharja ditangkap, mungkin dengan alasan untuk menjauhkan peristiwa ini dari sorotan publik. Nasution mungkin juga telah berpikir bahwa untuk menjaga kredibilitasnya, dalam situasi ini, ia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan terhadap Suharto. Sebenarnya, ketika membawa Suharto ke pengadilan, Nasution berada di bawah tekanan Sukarno yang mungkin didesak oleh Pranoto (orang yang lebih diinginkan Sukarno untuk memegang komando atas daerah yang sensitif dan penting, dan yang tampaknya terus memasok informasi terhadap Sukarno mengenai masalah ini) yang juga bermaksud memukul Hadisubeno.

Meski Nasution mengira ada bukti cukup atas Suharto, ia memutuskan untuk tidak melanjutkannya setelah melakukan per-

bincangan dengan Gatot Subroto dan Yani. Ia beralasan ada kasus-kasus korupsi lebih besar yang belum digarap. Operasi barter Suharto itu "kecil dibanding dengan kesemua itu dan Panglima Suharto berniat baik, yakni untuk proyek kesejahteraan prajurit dan pembangunan daerah."[105] Kendati demikian, ia tidak punya pilihan selain tunduk, meski sedikit, dalam kasus ini, dan membatalkan penunjukan Suharto serta menugaskannya ke SSKAD untuk belajar. Gatot, mantan atasan dan teman dekat Suharto, serta "pengagum Nasution,"[106] tampaknya menggunakan pengaruh kuatnya kepada kepala staf TNI untuk memastikan hukuman Suharto tidak terlalu berat dan prospek masa depannya tidak hancur. Gatot menyadari bahwa tanggungannya, anak asuhnya, 'Bob' Hasan, sangat terkait dengan bisnis Diponegoro; terlebih lagi, Gatot sendiri mungkin sangat bersimpati atas apa yang diusahakan untuk dibangun Suharto di Jawa Tengah selama masa jabatannya sebagai panglima. Sebenarnya, pada 1960, Gatot membeli PT Wasesa Lines yang mungkin sebelumnya adalah PT Pangeran Lines.

Penuturan fiktif Suharto mengenai peristiwa itu adalah usaha mengaburkan masalah sebenarnya dan mencuci tangan dari segala tuduhan kesalahan. Ia mengaku bahwa gosip "saya melakukan korupsi dalam perdagangan beras dan telah memperkaya diri dari usaha barter gula" muncul hanya setelah kepindahannya ke SSKAD, dan akibatnya, ia dipanggil ke Jakarta oleh Gatot Subroto dan diselidiki oleh tim khusus. Hasilnya adalah "Achirnya Pak Gatot memutuskan tidak ada yang dirugikan dan disalahkan atas tindakan saya itu, dan saya diperintahkan melanjutkan pendidikan di SSKAD sampai selesai."[107] Patut dicatat bahwa, menurut versi Roeder, alasan kepindahan Suharto ke Bandung bahkan tidak disinggung.[108]

Dengan menangnya kelompok Pranoto, maka berakhir pula apa yang disebut PKI sebagai "klik Soeharto" dalam markas Diponegoro.[109] Menurut penuturan Ali Murtopo, "ketiga-tiganya [Suharto, Yoga, dan dirinya] tersingkir dari Jawa Tengah."[110] Yoga,

yang sudah kembali ke Semarang pada awal 1960 dari tugasnya di Sumatra Barat, secara efektif dipinggirkan. Ia diberi waktu 6 bulan di Magelang untuk menulis laporan mengenai kegiatannya di Sumatra Barat, sebuah tugas yang ia selesaikan dalam 2 bulan. Ia kemudian dikirim ke Seskoad (nama baru SSKAD) untuk mengikuti kursus reguler bersama dengan mantan temannya di Diponegoro, Sutanto (asisten III) dan Hernomo (asisten IV), sebelum—atas nasihat Gatot Subroto—menerima kedudukan sebagai atase militer di Yugoslavia pada Februari 1962. Sujono tampaknya ingin meninggalkan Diponegoro ketika Suharto dipindahkan, tetapi ia bertahan selama satu tahun karena Suharto telah "memerintahkannya untuk tinggal dan membereskan masalah."[111] Sujono kemudian dilantik sebagai wakil deputi III (keuangan) kepala staf TNI di Jakarta, mungkin berkat upaya mantan atasannya, dan dipromosikan menjadi letnan kolonel pada 1961. Ali Murtopo terus berada di Divisi hingga ia menerima panggilan untuk bergabung dengan atasan lamanya di Jakarta pada 1961.

Dalam versinya, Pranoto menjelaskan, dalam pertemuan informal dengan para wartawan dua hari setelah penunjukannya, bahwa ia akan "meneruskan rencana-rencana serta membina benih-benih yang telah ditaburkan oleh Panglima Kol. Suharto, sedang yang kurang akan diperbaiki". Dalam hubungan dengan YPTE, Pranoto menjelaskan bahwa akan "ditinjau hasil-hasilnya yang langsung berguna bagi kepentingan rakyat". Menurutnya, tugas utamanya adalah mengedepankan kepentingan rakyat dan untuk meningkatkan serta menjaga kepribadian pasukannya.[112] Bisnis dan inisiatif pembangunan Suharto di daerah itu segera menjadi masa lalu.

KESIMPULAN

Masa tiga tahun ketika Suharto mengepalai Divisi Diponegoro adalah tahap kreatif penting dalam hidupnya. Untuk pertama kali, ia berada dalam posisi yang memiliki kekuatan mandiri dan tanggung jawab serius, dan dia tidak buang-buang waktu dalam

menerapkan otoritasnya. Ide-idenya—atau tepatnya renungan atas pengalamannya dalam konteks pandangannya yang sempit terhadap dunia namun yang lambat-laun berkembang—mulai diterapkan. Ia hanya bisa puas jika sudah berhasil menerapkan ide-idenya, bahkan ketika ia marah karena kekuasaan yang tengah dinikmatinya tiba-tiba direnggut dengan dipindahnya ia ke Bandung.

Masa-masa Semarang ini jelas merupakan masa kebahagiaan dan kepuasan dalam kehidupan Suharto. Keluarganya berkembang dengan lahirnya anak keempat, atau putri keduanya, Siti Hediyati Haryadi pada 14 April 1959. Ia berada dalam lingkungannya dan sangat berkuasa. Posisinya sebagai komandan divisi juga membuahkan hasil. Misalnya, ia mengawasi upacara pemakaman tokoh guru dan pemimpin nasionalis terkemuka, Ki Hadjar Dewantoro, di Yogya pada April 1959. Dia juga gembira dengan ditunjuknya dia pada 1 September 1957 sebagai salah satu anggota dewan perwalian Akademi Militer Nasional di Magelang. Selama masa ini, tampaknya Suharto juga mendapat beberapa kesempatan pendidikan. Ia menyebut "pengetahuan militer" yang didapat di akademi dan juga di kursus pertama dan kedua untuk perwira senior.[113]

Ketika menjabat panglima Diponegoro, Suharto bertindak layaknya seorang bapak terhadap kesejahteraan anak buahnya. Dalam sebuah pidato pada perayaan ulang tahun Divisi pada 1958, ia menegaskan bahwa "kekuasaan seorang pemimpin tidaklah absolut. Kekuasaan berakar pada kepercayaan yang diberikan kepada pemimpin oleh orang-orang yang dia pimpin. Tanpa kepercayaan ini, mustahil ada kepemimpinan sejati."[114] Suharto telah mendapat reputasi sebagai seorang "pemimpin tangguh namun tidak memihak,"[115] yang mendapat kepercayaan pasukannya karena dia menghargai pengabdian mereka dan mau bersusah-payah menjamin kesejahteraan fisik mereka serta kesejahteraan keluarga mereka, baik sebelum maupun sesudah pensiun.

Kedekatan Suharto dengan pasukannya adalah semacam kedekatan tuan tanah yang murah hati terhadap budaknya. Ia

menunjukkan, mungkin untuk pertama kali, jenis perilaku afektif yang berbeda terhadap sekelompok kecil perwira senior yang berada di sekitarnya; para perwira itu, hingga pada tingkat yang mengejutkan, menyerap nilai, harapan, dan sikap umumnya. Ia mempercayai mereka dan memberi mereka otonomi lebih besar dalam melaksanakan tugas; sebaliknya, mereka memberi Suharto perhatian, kesetiaan, dan pengabdian luar biasa dan tahan lama. Sukses yang dicapai oleh tim yang kecil tapi solid ini adalah sebuah pertanda bagi masa depan, dan pertanda gaya manajemen serupa yang sukses diterapkan Suharto. Bukan kebetulan bahwa tiga orang terdekat Suharto di Diponegoro—Yoga Sugama, Ali Murtopo, dan Sujono Humardani—semuanya memainkan peran sangat penting dan kreatif dalam Orde Baru; bahkan tokoh-tokoh yang tidak begitu menonjol, seperti Munadi, Hernomo, Sutanto, dan Suprapto, menempati posisi-posisi penting pada masa itu.

Dengan kepindahannya ke Bandung, Suharto pindah untuk selamanya dari dunia kota kecil Jawa Tengah. Tetapi, berbagai pengalaman dan kesempatannya di sana berguna dalam menyiapkan dirinya untuk menghadapi tuntutan yang lebih besar dari dunia Jakarta yang lebih luas dan kompleks.[]

4 Posisi Utama 1959–1965

SUHARTO MEMULAI studinya di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SSKAD) di Bandung pada 1 November 1959. Suharto mengenang bahwa usahanya di sana bernuansa perjuangan: berjuang menghadapi arena asing, gigih, dan, akhirnya, jaya. "Pada awalnya, saya sangat kesulitan mengikuti pendidikan militer di Seskoad,"[1] karena pendidikan militer formalnya yang kurang. Tetapi, dia merasa pengalaman taktik dan strateginya di masa revolusi telah menempatkannya di posisi baik. Suharto kelak menyebut dirinya sendiri di SSKAD sebagai seorang pendiam yang kurang percaya diri, seseorang yang mendengarkan obrolan orang lain dan, jika diminta, menunjukkan kemampuan istimewa untuk meringkas dan menyimpulkan diskusi.[2] Dia berhasil menyelesaikan pendidikannya—klaimnya dengan ranking teratas—pada akhir 1960.[3]

Masa di SSKAD ini, pada saat itu adalah pusat penggodokan masa depan politik dan ideologi militer, membawa pikiran Suharto ke wilayah baru dan asing. Di sana, dia mengenal Kolonel Suwarto, seorang perwira Siliwangi yang luar biasa dan berpengaruh serta cenderung ke PSI, yang pada saat itu menjabat deputi komandan sekolah. Pada masa-masa penting Demokrasi

Terpimpin ini, Suharto adalah salah seorang murid yang, di bawah pengaruh Suwarto, mulai mengembangkan seperangkat ide "yang sangat melebarkan peran Angkatan Darat dan membawanya ke dalam posisi tepat untuk melawan Partai Komunis yang semakin meluas."[4] Suwarto mendasarkan pemikirannya pada pandangan bahwa "keadaan negara kita yang secara technisch dan economisch, masih terbelakang ... walaupun tidak diuabaikan elemen progresiviteit dan modernisasi." Di negara-negara yang berada pada titik perkembangan ini, "tentara dibutuhkan sebagai alat stabilisasi dan alat kekerasan oleh karena di negara-negara tersebut umumnya belum dicapai stabiliteit di bidang politisch, economisch, dan kulturil." Dari sini, konsep perlunya identifikasi erat Angkatan Darat dengan rakyat tinggal sejengkal lagi: "kekuatan kita tidak terletak dalam kekuatan menagkis, akan tetapi dalam kekuatan mengikat."[5]

Bertolak dari konsep tentara daerah yang berada di tengah-tengah rakyat, yang dirancang oleh Nasution pada akhir 1940-an dan setelahnya, kelompok Suwarto menarik implikasi ke hubungan yang lebih luas antara Angkatan Darat dan masyarakat Indonesia. Konsepnya adalah Angkatan Darat harus berada di tengah-tengah rakyat, namun juga harus berusaha *mengelola* masalah-masalah dalam wilayah cakupannya, termasuk gagasan harus dikembangkannya satu paralel antara administrasi angkatan bersenjata dan administrasi wilayah sipil yang dikendalikan menteri dalam negeri, dengan sebuah mandat untuk memeriksa dan mengawasi otoritas-otoritas itu. Kemudian muncul juga ide mengenai "misi sipil" Angkatan Darat: Angkatan Darat harus memasuki kehidupan rakyat—kepada siapa ia mengabdi—dengan memberi bantuan praktis bagi rakyat dalam program-program pembangunan; bakti seperti itu berfungsi untuk meningkatkan keamanan internal dengan membantu mengurangi kemiskinan dan ketidakadilan, dan akan menyatukan Angkatan Darat dengan rakyat. Angkatan Darat harus berfungsi sebagai "'agency' untuk keamanan nasional ... 'agency' untuk nation building ... 'agency' untuk national growth

and national prosperity."[6] Suharto, sebagai anggota kelompok kedua di kursus-C, ikut serta dalam seminar SSKAD pada Desember 1960, tempat konsep-konsep ini dikembangkan.

Seminar Seskoad I, mengenai masalah pertahanan, diselenggarakan pada 9–15 Desember 1960, dihadiri oleh siswa Seskoad dan siswa Seskoad kursus-C, lulusan kursus-C pertama, serta "pejabat penting dari seluruh Indonesia, yaitu dari Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut."[7] Seminar ini dibuat sebagai alat pendidikan bagi para peserta dan sebagai sarana publikasi dan rangsangan bagi perdebatan lebih jauh tentang ide-ide yang dikembangkan dalam institusi itu. Siswa ditempatkan dalam kelompok-kelompok penelitian dan dituntut untuk menyerahkan hasil penelitian mereka atas masalah tertentu. Suharto, sebagai pemimpin Grup I, mempresentasikan sebuah makalah berjudul "Perang wilayah sebagai konsepsi pertahanan Indonesia".[8]

Dimulai dengan survei singkat mengenai pemikir-pemikir klasik ilmu perang, seperti Clausewitz dan Liddell Hart, Suharto langsung cepat berpindah membahas pokok permasalahan. Dia menulis bahwa Indonesia, berdasarkan ideologi Pancasila, lahir "dari kancah perjuangan melawan penjajahan"; setelah merdeka, Indonesia perlu mempertahankan diri melawan ancaman dari dalam dan luar, juga mengisi kemerdekaan dan menjadi "negara yang aman dan tenteram dari Sabang sampai ke Merauke, dengan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila." Berdasarkan konteks spiritual, politik, ekonomi, dan geografis, Angkatan Bersenjata tidak hanya berperan dalam pertahanan, melainkan juga sebagai "pelopor perjuangan dan sebagai pelopor pembangunan". Dengan mensurvei berbagai kemungkinan ancaman, Suharto menyimpulkan bahwa "kita harus menganut doktrin 'pertahanan daerah demi daerah'", di mana "daerah-daerah pertahanan itu merupakan kompartimen-kompartimen strategis yang harus berkemampuan untuk sendiri-sendiri melakukan kegiatan-kegiatan perang selama negara dalam keadaan perang". Dia melanjutkan dengan membagi Indonesia menjadi tiga wilayah pertahanan yang

masing-masingnya terbagi lagi menjadi wilayah-wilayah perang, sebuah konsep yang mengisyaratkan dan berlandaskan hubungan dekat antara angkatan bersenjata dan rakyat yang siap "mental dan moril" melakukan peran pertahanan mereka. Strategi semacam itu, Suharto menyimpulkan, bersandar pada kestabilan politik, kesadaran akan Pancasila sebagai ideologi tunggal, kepemimpinan yang bersatu, berwenang, dan berpengalaman, dan integrasi lengkap antara tiga angkatan bersenjata.[9] Seminar ini kemudian menyepakati ide-ide yang diajukan Suharto beserta timnya.

Selain masalah pertahanan wilayah, seminar ini juga membahas peran militer dalam keamanan internal; membahas berbagai "faham-faham dan gerakan-gerakan tersebut terujud dalam 'Multiparty System", dengan ekses-ekses yang tidak terkendalikan" dan yang menjadi sumber kekacauan bagi rakyat. Sama halnya, ada kelemahan dalam pemerintahan, perekonomian, dan kesatuan militer; perlu adanya koordinasi lebih besar antara usaha militer dan nonmiliter dalam bidang sosial-ekonomi-politik, dan keseragaman ideologi, Pancasila, yang akan dipropagandakan militer.[10] Memang, kelompok Suharto berpikir bahwa kekuatan militer bisa digunakan untuk membantu 'dalam segala kegiatan baik dalam bidang politik, sosial maupun ekonomi."[11]

Bidang utama upaya intelektual di SSKAD adalah seni militer—strategi dan taktik, perencanaan, organisasi staf, logistik—tetapi, di bawah pengaruh Suharto, banyak waktu juga dicurahkan untuk masalah-masalah seperti ideologi nasional, antropologi sosial, ekonomi pembangunan, hukum internasional, dan demokrasi dan ekonomi terpimpin; memang, jumlah studi kontekstual seperti itu, mengenai masyarakat, politik, ekonomi, dan budaya, lebih kerap dibahas oleh kelompok Suharto. Masa studi Suharto juga penting karena pada saat itulah dia juga berhubungan dengan para pengajar ekonomi sipil yang, atas undangan Suwarto, mengajar secara rutin di SSKAD dan yang "membantu mempertajam konsep Manajemen Wilayah."[12] Ide-ide mereka tentang pembangunan Indonesia tampaknya mengena ke diri Suharto.

Meski sebenarnya mungkin dimaksudkan sebagai hukuman ringan bagi Suharto, SSKAD malah terbukti menjadi titik balik dalam karier Suharto. Dia kelak mengakui bahwa kehadiran dan keberhasilannya di kursus "membuat saya bangga dan menambah kepercayaan pada diri saya,"[13] dan bahkan lebih dari itu. Kursus itu membuka matanya ke dunia pemikiran yang tidak dikenalnya sebelum itu, ke inti refleksi peran Angkatan Bersenjata dalam masyarakat, sekaligus memberinya kesempatan menyumbang sesuatu bagi proses penting pembentukan dan pengasahan diri Angkatan Bersenjata, serta secara fundamental mengubah sikapnya terhadap peran Angkatan Darat dalam pembangunan masyarakat Indonesia. Mungkin yang bahkan lebih penting lagi, kursus ini mengembangkan dunia pengalaman sosialnya yang masih sangat terbatas; kursus ini membawa Suharto ke dalam hubungan sehari-hari yang dekat dan kompak dengan berbagai kenalan berpengaruh dari berbagai daerah dan latar belakang, di antaranya adalah orang-orang terpintar dan terbaik sebayanya. Suharto sendiri menyebut sejumlah perwira teman kursusnya, termasuk Sarbini (mantan Panglima Divisi Brawijaya Jawa Timur, kenalan baik Suharto) dan Amirmachmud. Juga ikut dalam kursus itu adalah Kol. U. Rukman dari Siliwangi, Kol. Achmad Tahir, dan, "salah seorang teman baik[nya],"[14] Letkol Sutoyo, yang kelak termasuk dalam jajaran jenderal yang terbunuh pada 1 Oktober 1965.

Seperti kita lihat, Suharto dipromosikan ke pangkat brigadir jenderal tak lama setelah memulai pendidikan SSKAD-nya. Setelah menyelesaikan kursusnya pada 17 Desember 1960, dia ditugaskan di markas besar angkatan bersenjata di Jakarta dan ditunjuk sebagai deputi I (operasi) KSAD yang saat itu dijabat Nasution. Suharto tinggal di Jakarta di sebuah rumah dinas di Jl. Haji Agus Salim No.98, di wilayah elite perkotaan Menteng, bersama istri dan keluarganya yang tinggal di Semarang setelah kepindahannya ke Bandung. Tak lama setelah itu, mungkin atas kehendak Suharto sendiri, Ali Murtopo, mantan asisten Suharto, bergabung ke Jakarta menemani Suharto; ia ditunjuk untuk masuk dalam jajaran staf

Suharto sebagai deputi I Suharto. Tak lama setelah penugasannya di Jakarta, Suharto berada dalam situasi ideologis Demokrasi Terpimpin, dan ditunjuk sebagai kepala komite perlengkapan *ad hoc* Angkatan Bersenjata pada Desember 1960.

CADUAD

Pada Maret 1961, Suharto menerima tambahan tanggung jawab dengan ditunjuknya dia sebagai komandan Cadangan Umum Angkatan Darat (Caduad). Penunjukan ini kelak menjadi langkah penting dalam mempercepat kariernya yang relatif biasa. Caduad adalah usaha Nasution pertama kali dalam menciptakan kekuatan dinamis yang sangat terlatih dan tepercaya demi kepentingan nasional, dan secara langsung berada di bawah Staf Umum. Hal ini dianggap lebih baik ketimbang mengandalkan usaha membujuk segmen lokal angkatan bersenjata yang terorganisasi per wilayah untuk mengikutsertakan kekuatan mereka demi tujuan nasional. Menjelang pengumuman pada 27 Desember 1960 tentang rencananya menegakkan dan menempatkan prioritas utama pada Caduad, Nasution membentuk kelompok kerja beranggota tujuh orang yang istimewa, diketuai Suharto dan termasuk di dalamnya veteran-veteran Siliwangi Achmad Wiranatakusumah dan Letkol Amirmachmud, yang keduanya terkenal di Seskoad, serta Letkol Munadi dari staf Diponegoronya dulu, untuk mengembangkan konsep itu.

Hasil kerja mereka berbuah pada 6 Maret 1961 dengan berdirinya Korps Angkatan Darat Pertama/Caduad, disingkat Korra I/Caduad. Kekuatan dan struktur organisasionalnya diumumkan tidak lama setelah itu; Suharto ditunjuk sebagai panglima kekuatan baru ini sejak 1 Maret 1961, dengan Kolonel Achmad Wiranatakusumah sebagai kepala stafnya, Amirmachmud sebagai deputi kepala staf, Kolonel Rukman (satu lagi mantan teman Seskoadnya) sebagai Panglima Divisi II Korra I, dan beberapa mantan teman di Diponegoro pada posisi senior, termasuk Munadi dan Sruhar-

doyo. Mayor Ali Murtopo juga masuk jajaran staf Caduad pada 1961 sebagai asisten kepala staf, Divisi II/Korra I/Caduad, begitu juga Hernomo.

Seperti halnya bagi Suharto, pembentukan Caduad adalah tindakan penting bagi komando pusat angkatan bersenjata. Caduad mengambil unit tempur terkuat yang berasal dari tiga Kodam Jawa, melatih mereka untuk tugas-tugas parakomando, dan menyiapkan mereka untuk tugas mendadak, dengan unit RPKAD (resimen komando angkatan bersenjata yang juga berada di bawah komando Caduad), di belahan nusantara mana pun yang terancam. Jika tidak bertugas di Caduad, unit-unit yang ditugaskan ke Caduad tetap berada di bawah otoritas langsung panglima mereka dan tidak diberi tanggung jawab atas wilayah tertentu, tidak pula digabung dengan entitas organisasi yang lebih besar. Tetapi, Caduad tetap memiliki hak untuk memanggil unit-unit itu setiap saat bila diperlukan. Unit-unit yang ditugaskan di Caduad antara lain adalah Batalion (Bn) 454 Diponegoro, satu unit Pasukan Banteng (Banteng Raiders), Bn 530 dari Divisi Brawijaya Jawa Timur, dan Kujang Bn 328 dari Siliwangi.

Dipilihnya Suharto oleh Nasution untuk menduduki jabatan penting di Caduad adalah cermin karier Suharto yang panjang dan terkenal sebagai pemimpin perang dan mantan komandan pasukan, dan cermin keyakinan Nasution atas kesetiaan Suharto, kekolotan ide-idenya, dan kecenderungan Suharto dalam bersikap—terlihat dalam sikapnya terhadap peristiwa PRRI—dan bahwa kepentingan nasional mesti ditempatkan di atas kepentingan lokal. Selain itu, terpilihnya Suharto ini juga mencerminkan anggapan umum dalam lingkaran sipil dan perwira senior Angkatan Darat bahwa Suharto adalah seorang prajurit profesional, tidak berambisi politik, patuh, dan tidak berbahaya, bahkan, Suharto dapat dianggap salah satu dari sedikit orang di kalangan teman seangkatannya yang tidak menginginkan sesuatu yang lebih tinggi.[15]

Nyaris bisa dipastikan, berkat penunjukan ini—dan atas saran Yani yang ingin agar perwira senior berikutnya memiliki

pengalaman—Suharto untuk pertama kali mendampingi Nasution ke luar negeri pada Juni 1961. Menyusul keengganan pemerintah Eisenhower untuk menyetujui permintaan pribadi Nasution akan persenjataan pada Oktober 1960, ia terpaksa, meski dengan segan, berpaling pada sumber pasokan lain. Kemudian pada Januari 1961, Indonesia menyepakati pasokan militer dengan Moskow senilai US$ 400 juta dalam bentuk persenjataan; jadi, kepergian ini bertujuan untuk memastikan kesepakatan pembelian tersebut, dan mungkin inilah alasan Suharto ikut serta dalam perjalanan itu. Suharto tidak berangkat bersama Nasution—ia masih sibuk menyusun staf Caduadnya dan mengorganisasi pasukan—dan mendampingi Nasution hanya pada saat-saat di Belgrade, Paris, dan Bonn, alih-alih seluruh perjalanan panjang sang kepala staf angkatan darat.

Ketika di Jerman, Suharto bertemu kembali dengan B.J. Habibie yang kala itu baru saja menyelesaikan studi tekniknya dan sedang dalam tahap awal program doktoral teknik aeronautika di Aachen Institute of Technology. Pertemuan ini meninggalkan kesan bagi Suharto, "Saya menangkap dalam kesempatan itu semangat Insinyur Habibie dalam menghadapi bidang keahliannya, dunia teknologi dan industri, yang masih jauh dari jangkauan bangsa kita. Saya kenang percakapan dengannya, yang meninggalkan benih harapan untuk kita, di kemudian hari."[16] Suharto sendiri membisu tentang dampak—bagi dirinya—perkenalan pertamanya dengan dunia luar. Mungkin dia terkejut dengan semua itu; namun, agaknya ini menjadi petunjuk bahwa, pada usia empat puluh tahun, kepribadian dan caranya memandang dunia sudah terbentuk, atau setidaknya tidak mudah goyah.

Pada 1 Oktober tahun itu juga, Suharto menjadi pemimpin Komando Pertahanan Udara (Kohanudad) yang baru dibentuk Angkatan Darat. Penunjukan ini tampaknya adalah implikasi tanggung jawab barunya di Caduad dan minat lamanya pada kemampuan tempur udara; menurut McVey:

> [keduanya] membuat Suharto menaruh minat khusus pada perkembangan angkatan tempur yang terpusat di udara. Angkatan Bersenjata secara umum dan Angkatan Darat secara khusus, ujar Suharto, harus *'Para-minded'*. Suharto dan pemimpin Angkatan Darat lainnya yang menaruh minat pada kekuatan tempur udara berambisi menciptakan divisi Udara bagi Angkatan Darat. Tetapi, kerika Komando Mandala memulai operasi militer pada Januari 1962, hanya RPKAD dan Brigade Infantri III yang layak masuk.[17]

Sekitar pertengahan 1964, Suharto menunjukkan antusiasme dan keterpesonaannya pada pertempuran udara dengan mengikuti kursus terjun payung yang sukses dijalaninya dan mendapat lencana penerjun dari Angkatan Udara.

KAMPANYE IRIAN BARAT

Seiring dengan melesatnya karier Suharto sepanjang tahun 1961, ketegangan akibat pertikaian panjang antara Indonesia dan Belanda mengenai nasib Irian Barat, atau "duri dalam daging bagi Republik Indonesia", sebagaimana kelak disebut Suharto, kian menajam.[18] Klaim Indonesia atas daerah itu, yang ditolak Belanda untuk diikutkan dalam penyerahan kedaulatan 1949, dipicu oleh nasionalisme menggebu yang dicetuskan Sukarno dalam konteks Demokrasi Terpimpin; sebaliknya, respons Belanda lebih gencar: dalam upaya mengembangkan satu elite pribumi yang dapat menjadi sarana munculnya New Guinea yang merdeka di bawah patronase Belanda; dalam upaya bertahan dengan meluncurkan pesawat udara *Karel Doorman*, simbol dari tekad Belanda untuk tidak melepaskan kendali atas daerah itu. Suharto ditugaskan ke komite perencanaan kecil antar angkatan_bersenjata yang dibentuk pada April 1961 untuk mengembangkan rencana operasi militer pembebasan Irian Barat.

Dalam pidato pada 19 Desember 1961, Sukarno memaklumatkan Trikora, atau Tri Komando Rakyat. Tiga hal itu adalah,

"I. Gagalkanlah pembentukan Negara Boneka Papua, buatan Belanda-kolonial, II. Kibarkanlah Sang Merah Putih di Irian-Barat, Tanah Air Indonesia, III. Bersiaplah untuk mobilisasi-umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Sir dan Bangsa."[19] Pada 2 Januari 1962, Komando Mandala bagi Pembebasan Irian Barat dibentuk, dan pada 9 Januari Suharto_diumumkan sebagai panglimanya.[20] Pada saat yang sama, Suharto naik pangkat menjadi mayor jenderal. Suharto sangat bangga dengan penunjukan dirinya sebagai panglima Mandala; "Kejadian ini merupakan suatu tantangan, tetapi juga kehormatan yang luar biasa bagi Prajurit Sapta Marga."[21] Dalam satu tajuk rencana di *Merdeka* ditulis bahwa "ini adalah pengangkatan yang sudah lama dinanti-nantikan, karena dengan pengangkatan 'Panglima Mandala' atau 'Theater Commander' ini telah memberikan kelengkapan yang lebih konkret lagi kepada aparatur-aparatur pembebasan Irian Barat." Apalagi ditambah fakta, berdasarkan pengalaman serta kepemimpinannya ketika melancarkan serangan umum 1 Maret terhadap tentara Belanda di Yogyakarta pada 1949, "Brigadir Jenderal Suharto ternyata seorang 'field officer' yang baik."[22] Perjalanan kariernya, yang terbit dalam *Duta Masyarakat* di bawah pokok berita "Brigjen Suharto pernah mengubrak-abrik Belanda ketika Clash di Yogya," semakin menegaskan prestasi-prestasi militernya, termasuk prestasi mempertahankan Yogya dari agresi Belanda pada 19 Desember 1948, kepemimpinannya dalam serangan umum 1 Maret, serta prestasinya di Makasar.[23]

Dalam satu diskusi dengan para wartawan setelah penunjukannya, Suharto mengimbau mereka agar mengabdikan pena demi perjuangan Irian Barat. Dalam arus publisitas yang berpusar sekitar penunjukannya, Suharto diberi julukan "momok Belanda." Dalam percakapan santai dengan para wartawan, ketika ditanya bagaimana dia mendapat julukan itu, Suharto tersenyum dan menjawab "Ya, bagaimana ya, biasa saja ah?," dan tidak membesar-besarkan promosi terbarunya sebagai mayor jenderal. Suharto digambarkan "berwajah bersih; bahkan kadang-kadang seperti selalu

tersenyum. Rambutnya beriak-riak kecil tersisir ke belakang, dan kulitnya kuning langsat."[24]

Penunjukan Suharto di Mandala juga mengantarkannya ke posisi deputi panglima daerah Indonesia Timur, posisi yang sebelumnya diduduki Yani. Upacara serah terima jabatan, dilaksanakan Gatot Subroto dengan dihadiri Yani, terjadi di Makasar ketika hujan pada 23 Januari 1962. Dalam pidatonya pada acara itu, Gatot Subroto menyatakan bahwa penunjukan Suharto sudah tepat; Gatot Subroto mengenal Suharto secara pribadi sejak 1945; karena itu, pilihan Sukarno dan Nasution jelas tepat. Suharto "terkenal di kalangan Belanda sebagai momok dan di kalangan Indonesia sbg. seorang yang tidak menguta makan diri sendiri, mementingkan masyarakat dan jujur."[25] Dalam Perintah Harian (*Order of the Day*) pertamanya, Suharto menyeru Angkatan Bersenjata dan rakyat Indonesia Timur "untuk lebih-lebih memperbesar dan mempertinggi daya kemampuan , baik dhahir maupun bathin untu mempersiapkan diri dalam menghadapi tugas-tugas berat dan suci" guna melaksanakan Trikora.[26]

Ada beberapa kalangan yang terkejut dengan pengangkatan Suharto ke posisi amat penting berskala nasional ini. Atas kehendak Nasution, penunjukan ini didasarkan pada pertimbangan serupa yang mendorong penunjukan Suharto ke Caduad. Memang, alasannya sama seperti sebelumnya; komando Mandala membutuhkan kemampuan perencanaan strategis, pandangan yang luas akan lingkungan strategis Indonesia, profesionalisme yang tinggi, dan kepribadian yang waspada dan sistematis, terutama dalam konteks lemahnya militer Indonesia ketika berhadapan dengan Belanda. Selain itu, sebagaimana diakui McDonald, Suharto "tidak terlalu menjadi ancaman secara politis bagi atasan-atasannya."[27]

Setelah ritual selesai, Suharto melaksanakan tugasnya. Menurut Instruksi Presiden 10/1962, tugas Suharto berganda: pertama, "merencanakan, menyiapkan, dan melaksanakan operasi militer guna mengembalikan daerah Irian Barat ke otoritas Negara Republik Indonesia"; dan kedua, "membangun situasi militer di wilayah

Provinsi Irian Barat sesuai dengan taraf-taraf perjuangan di bidang politik dan supaya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, di wilayah Provinsi Irian Barat dapat secara *de facto* diciptakan daerah-daerah bebas dan/atau didudukan unsur-unsur kekuasaan Pemerintah Daerah Republik Indonesia."[28]

Suharto mengepalai komando Mandala dari markas Caduadnya hingga dia memindahkan markas besarnya ke kota Makasar pada 12 Maret 1962. Konsep komando Mandala melibatkan gagasan satu wilayah perang di mana unsur darat, udara, dan laut bisa digabung untuk tujuan operasional. Komandonya meliputi unit darat di Kodam XIII/Merdeka (Sulawesi Tengah), XIV/Hasanuddin (Sulawesi Tenggara dan Selatan), XV/Pattimura (Nusa Tenggara), XVI/Udayana (Maluku), Kodamar V, Kodamar VI, Korud II, dan Korud IV, dengan total 42.000 anggota pasukan; otoritasnya meliputi daerah seluas sekitar lima juta kilometer persegi. Dengan kata lain, komando Mandala Suharto meliputi seluruh wilayah timur Indonesia. Suharto langsung didampingi dua deputi panglima, Kol. Subono dari Angkatan Laut dan Kol. Leo Wattimena dari Angkatan Udara, dan di Staf Mandala Gabungan. Kepala stafnya adalah mantan teman belajarnya di SSKAD, Kol. Achmad Tahir; ditunjuk pula seorang kepala informasi untuk membantu Suharto "mengkoordinir dan mengorganisasir segala media penerangan."[29] Amirmachmud mengomandani Staf Operasional (G-2) di dalam Staf Gabungan, sementara Munadi mengomandani Staf Wilayah Gabungan dan Pertahanan Umum (G-5). Kol. Sudomo, kelak kita tahu lebih banyak tentang dirinya, ditunjuk sebagai panglima angkatan laut Mandala.[30] Suharto juga diberi pangkat gubernur militer Mandala, di mana pangkat tersebut memberinya kekuasaan hukum darurat efektif atas wilayah Mandala; tanggung jawabnya termasuk meningkatkan produksi pangan dan menyiapkan pemerintahan sipil Irian Barat untuk tugas-tugas pascapembebasan.

Menurut Suharto, "ditetapkan bahwa selambat-lambatnya 17 Agustus 1962, [bendera] Merah Putih akan berkibar di Irian Barat.

Ini berarti bahwa saya hanya diberi waktu tujuh bulan." Lagi pula, Suharto mulai dari nol. "Pangkalan tidak ada. Kesatuan tidak ada, karena tugasnya ditentukan dalam waktu pendek."[31] Memang, tidak lama setelah penunjukannya, angkatan laut Belanda menyerang tiga kapal torpedo Indonesia dan menewaskan deputi kepala staf Angkatan Laut, Yos Sudarso. Dalam situasi genting ini, pada 2 Maret, di tengah harapan Indonesia bahwa masalah Irian Barat masih bisa diselesaikan secara damai, Suharto melaporkan hal tersebut kepada Staf Operasional. Tak lama setelah itu, sukarelawan dilaporkan tiba di lini depan dan menjalani pelatihan. Dua minggu kemudian, Suharto kembali ke Jakarta untuk memberi laporan lain tentang perkembangan mulus persiapannya, dan kembali ke posnya pada 18 Maret. Tampaknya, kunjungan-kunjungan ke Jakarta adalah kesempatan Suharto untuk mengimbau rakyat agar tetap waspada dan siap melaksanakan perintah. Tak lama kemudian, Suharto mengantar Nasution berkeliling ke berbagai daerah Indonesia timur dalam perjalanan inspeksi sepuluh hari.

Berkat campur tangan Jaksa Agung AS Robert Kennedy, harapan akan adanya penyelesaian damai berbuah diskusi awal yang bersifat rahasia di dekat Washington antara delegasi Belanda dan Indonesia, dimulai pada 20 Maret dan difasilitasi oleh Ellsworth Bunker, seorang pensiunan diplomat Amerika yang diberi tugas sebagai fasilitator oleh Sekretaris Jenderal PBB U Thant. Tetapi, pembicaraan itu gagal, terutama karena Belanda "terus mendesakkan persyaratan yang akan membuat rakyat Papua bersikeras untuk menentukan nasib sendiri."[32] Menyusul kegagalan pembicaraan bulan Maret, Bunker membuat seperangkat proposal baru, termasuk proposal masa transisi singkat pengawasan PBB terhadap Irian Barat, untuk diikuti oleh pemerintah Indonesia, dan satu plebisit (pemungutan suara umum di suatu daerah untuk menentukan status daerah itu) oleh orang Irian mengenai masa depan mereka pada satu tanggal tertentu. Belanda pada awalnya menolak untuk mengikuti rencana Bunker karena dalam pan-

dangan mereka, rencana itu tidak memberi cukup jaminan akan hak orang Irian untuk menentukan nasib sendiri.

Gaya Suharto di Makasar adalah cerminan gaya yang dikembangkannya ketika bertugas di Diponegoro. Gaya ini dicirikan oleh kelompok perwira ala klik yang ia bentuk di sekelilingnya. Kelompok perwira ini adalah objek di mana Suharto memberi wewenang kepada mereka untuk mengambil inisiatif; mereka merespons Suharto dengan sangat loyal dan penuh hormat. Yang utama dalam kelompok ini adalah Sudomo, ditunjuk sebagai panglima Angkatan Laut Mandala, sementara Ali Murtopo ditempatkan di lapangan untuk mengembangkan kemampuan Mandala (dan Caduad) dalam bidang intelijensi dan operasi, terutama penyusupan. Ada juga partisipan lain dalam operasi yang kelak terkenal ini. Mantan teman Suharto di SSKAD, Rukman, rekan kerja dekat Suharto di markas Mandala, kelak pada September 1963 menggantikan dia mengomandoi daerah Indonesia Timur. Mayor Untung, mantan bawahan Suharto di Solo dan kini angota Bn 454, menjabat sebagai komandan Gerilya Irian Barat, sementara Mayor Benny Murdani menjabat sebagai prajurit komando. Keahlian lain yang dimiliki Suharto di lapangan juga tampak, yaitu membentuk kesetiaan di antara pasukannya dengan sangat memerhatikan kebutuhan mereka.

Di tengah-tengah usaha gencar ini, pada Juni 1962, Suharto mengetahui bahwa gurunya, Letnan Jenderal Gatot Subroto, wafat mendadak pada usia 54 tahun. Bersama perwira senior dan anggota keluarga, Suharto mengiring usungan jenazah Gatot dalam peti-mati-berselubung-bendera yang kemudian diterbangkan ke Semarang untuk dimakamkan di Ungaran. Bulan berikutnya, Suharto mendapat kabar gembira dari keluarganya. Tien, yang baru saja mengunjungi Suharto di markas Makasar, melahirkan anak kelima mereka, seorang putra, pada 15 Juli 1962. Suharto memberinya nama Hutomo Mandala Putra, suatu pertanda betapa kewajiban tugas yang diemban Suharto amat penting. Nama panggilan anak ini adalah Tommy. Sekitar dua tahun kemudian, Ibu Tien melahir-

kan anak keenam sekaligus bungsu, seorang putri, Siti Hutami Endang Adiningsih, pada 23 Agustus 1964; tanggal kelahirannya sama dengan tanggal kelahiran ibunya yang berusia 41 tahun.

Suharto menerapkan rencana yang rumit dalam mencapai tujuan militernya: strategi gabungan yang melibatkan kekuatan laut, udara, dan darat (kekuatan darat melibatkan unit-unit Caduad seperti Bn 454 dari Diponegoro dan Bn 530 dari Brawijaya). Rencana ini terdiri atas tiga tahap. Tahap pertama adalah penyusupan yang dijadwalkan selesai hingga akhir 1962. Pada tahap ini, sepuluh pasukan akan diterjunkan ke Irian Barat "dengan sasaran-sasaran tertentu untuk menciptakan daerah bebas 'de facto'"sebagai basis operasi gerilya untuk memancing dan mengunci angkatan bersenjata Belanda serta melaksanakan operasi sabotase; sepuluh pasukan ini akan merambah wilayah tersebut, melibatkan orang Irian sendiri dalam perjuangan, dan dalam proses itu, memberi perangkat penting bagi tawar-menawar diplomatik. Tahap kedua, dimulai pada 1963, melibatkan serangan terbuka terhadap angkatan bersenjata Belanda untuk "menduduki semua pos pertahanan musuh yang penting."[33] Tahap ketiga adalah konsolidasi. Serangan utama berasal dari taktik menyusupkan pasukan elite melalui laut atau udara. Taktik ini bertujuan memaksa Belanda mengeluarkan cadangan pasukan mereka untuk kemudian dihantam oleh kekuatan utama. Basis-basis didirikan di Morotai, Amahai, Letfuan, dan Ambon.

Penyusupan pasukan terjun payung semuanya kacau. Suharto, alih-alih melaksanakan tugasnya dengan baik karena mendapat tekanan politik cukup besar dari Sukarno, tampak merencanakan dan melaksanakan tugasnya dengan buruk. Sebagian besar pasukan terjun payungnya mendarat di belantara keras dan sulit ditaklukkan di sepanjang daerah berawa di pantai selatan, jauh dari konsentrasi pasukan Belanda. Banyak yang gagal dalam penerjunan, tewas ketika mendarat atau tenggelam karena beratnya peralatan. Prajurit yang selamat pun nyaris tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak yang terbunuh atau tertangkap; alih-alih disambut sebagai pembebas

Irian Barat, mereka disambut secara dingin dan biasanya diserahkan kepada tentara Belanda. Tentara-tentara yang lebih dulu diluncurkan dengan perahu kecil juga bernasib tidak lebih baik. Suharto berusaha tegar; akhir Juli, pada satu konferensi pers di Makasar, dia menyatakan bahwa pasukan gerilya yang diturunkan di Irian Barat telah "mencapai kemajuan-kemajuan yang memuaskan dalam usahanya untuk membebaskan Irian Barat"; "pada dasarnya gerilyawan-gerilyawan kita berhasil melakukan tugasnya dengan baik, sekalipun mengalami kesulitan-kesulitan akibat keadaan alam, tetapi hal ini bukan merupakan soal karena mereka mendapat dukungan penuh dari penduduk setempat."[34]

Kesulitan Suharto tidak semata dalam masalah operasi lapangan. Di tengah-tengah rencananya, politikus dan ideolog berpengaruh, Mohammad Yamin, memberi usul—mungkin karena adanya bencana kapal torpedo yang menewaskan Yos Sudarso—agar Indonesia mengkaramkan kapal Belanda untuk alasan politis. Suharto menolak keras usul ini; ia mungkin menganggap bahwa langkah semacam itu bisa mengentalkan permusuhan dan membuat Belanda menurunkan lebih banyak lagi bala tentaranya untuk kemudian mengacaukan rencana Suharto. Suharto dengan enggan akhirnya mematuhi perintah Sukarno akan hal ini seraya, pada saat yang sama, menuntut "jaminan bahwa dengan begitu Irian bisa masuk jadi wilayah kita."[35] Ide Yamin akhirnya tidak dijalankan. Inilah satu bukti lagi atas kemantapan tujuan dan keteguhan Suharto, dan tanda kegusarannya atas campur tangan sipil dalam isu-isu yang dianggap Suharto sebagai murni masalah militer. Suharto mengakui bahwa ia menerima dan melaksanakan rencana itu dengan beberapa syarat.

Kekeraskepalaan Belanda dalam meja perundingan membuat Suharto—tidak ragu lagi atas perintah atasannya yang sudah putus asa dengan perundingan berlarut-larut demi menunjukkan komitmen mereka yang tinggi dalam "membebaskan" Irian Barat—merumuskan langkah menyerang yang berbahaya dan menantang. Rencana ini, dinamakan Jayawijaya, merancang adanya serangan

ampibi terhadap Biak yang dianggap sebagai pangkalan militer Belanda terbesar, dan satu-satunya landasan terbang sementara di daerah itu (Namun, Suharto berusaha membuat Belanda berpikir bahwa serangan ampibi akan dilancarkan ke Kaimana). Demi serangan itu, Suharto mengumpulkan kekuatan yang terdiri atas dua brigade parasut (7.000 orang), brigade angkatan laut beranggotakan 4.500 prajurit dengan kemampuan ampibi, dan empat brigade infantri yang jumlah totalnya hampir 13.000 orang. Rencana Suharto adalah menghantam sistem pengamatan Belanda, menggunakan para penerjun payung dan marinir untuk membentuk garda depan yang akan menjadi jalan masuk bagi pasukan selanjutnya, dan kemudian mendaratkan infantri melalui armada kecil berisikan lebih dari seratus kapal kecil. Risiko rencana ini semakin tinggi oleh adanya fakta bahwa Belanda sudah mengetahui targetnya, jalur armada penyerang telah diincar oleh pesawat terbang pengintai Neptune dari Belanda, sehingga "Indonesia ... pasti akan mengalami kerugian besar sebelum mencapai tujuan."[36] Perbekalan pendaratan terencana itu, awalnya ditempatkan di serangkaian pulau tak berpenduduk di selatan Biak karena Indonesia takut terhadap kekuatan pasukan Belanda di Biak itu sendiri, sebenarnya sangat rapuh.

Suharto sendiri menyadari bahwa rencana serangan itu adalah "tindakan yang sangat berbahaya karena kekuatan Indonesia terbatas, termasuk kekuatan udara untuk serangan pertama."[37] Dia mengakui kepada pasukannya bahwa "kita ini hanya mampu menyusun satu kali kekuatan pukul yang terdiri atas darat, laut, dan udara. Lebih dari itu, toidak bisa. Kita tidak punya cadangan." Suharto memandang hal ini seperti pertandingan tinju: "sekali pukul dengan semua tenaga yang ada dan musuh k.o.."[38] Tetapi, dia "berharap kita bisa mengusir musuh dalam waktu satu minggu setelah pendaratan, sesuai dengan rencana. Dan saya yakin bahwa musuh juga memiliki kekuatan terbatas."[39]

Suharto tiba di tempat pertemuan di Peleng, di gugusan pulau lepas pantai Sulawesi Tengah, pada 5 Agustus 1962. Dia

telah menetapkan tanggal 9 Agustus untuk serangan ke Biak, tetapi pasukannya belum siap dan serangan ampibi ditunda hingga 14 Agustus. Tampaknya, sebagai usaha untuk membingungkan Belanda, 500 orang penerjun payung dijatuhkan di sekitar Sorong, Kaimana, Teminabuan, dan Merauke pada 13 dan 14 Agustus. Tetapi, di saat Suharto bersiap melaksanakan misinya, dia menerima perintah untuk menunda operasi. Di bawah tekanan AS agar menerima rencana Bunker, dipicu ketakutan akan berpindahnya Indonesia ke kubu komunis jika mereka gagal mendapatkan Irian Barat, dan kekhawatiran akan terjadinya serangan besar-besaran dari Indonesia, Belanda akhirnya sadar bahwa usaha untuk mempertahankan New Guinea Barat tampaknya tidak berguna.

Meski mungkin bingung dan terusik dengan fakta bahwa dia dibiarkan bergerak sedemikian jauh tanpa diberi tahu tentang negosiasi yang sedang berjalan, Suharto cukup lega bahwa "korban jiwa dan harta yang amat besar" bisa dihindarkan. Mungkin kesal karena dihentikan di tengah jalan, Suharto kemudian berusaha membesar-besarkan arti penting misinya, "Andaikata benar terjadi serangan kita, dunia Barat akan benar-benar terpukul waktu itu. Akan terjadi satu peristiwa seperti pada tahun 1905, antara Jepang dan Rusiadi Wladivostok." Baginya, "Operasi Jayawijaya dapat menerobos kemacetan diplomasi dan berhasil memasukkan Irian Barat (Irian Jaya) ke dalam pangkuan Negara Republik Indonesia."[40] Kesepakatan dengan Belanda, yang dicapai pada 15 Agustus, menyebabkan kendali atas Irian Barat diserahkan ke PBB pada tanggal 1 Oktober 1962 hingga 1 Mei 1963, saat ketika Indonesia akhirnya mendapat kendali administratif atas daerah itu. Gencatan senjata terjadi pada satu menit selepas tengah malam waktu GMT pada 18 September.

Dengan berakhirnya suasana permusuhan, kini dibantu oleh Amirmachmud sebagai kepala staf baru, Suharto menganggap bahwa tugasnya adalah "mengamankan agar persetujuan itu dapat berjalan dengan baik." Suharto melanjutkan bahwa yang perlu diperhatikan adalah "apakah benar-benar Belanda mau melak-

sanakan persetujuan itu, taukah masih meninggalkan taktik adu, dombanya sebagaimana telah kita ketahui dan alami di daerah-daerah bekas jajahannya, seperti Maluku dengan RMS-nya, Jabar [Jawa Barat] dengan Apranya dll sebagainya."[41] Suharto mengambil kesempatan untuk berjalan-jalan jauh sepanjang Irian Barat, memeriksa keadaan tentaranya, mencari dukungan di daerah, dan menyiapkan misi kegiatan sipil di sana. Karena pernah terlibat dalam masalah Irian Barat, Suharto amat memerhatikan pembangunan di sana. "17 tahun wilayah Irian Jaya tertinggal oleh wilayah Indonesia lainnya. Ini menyebabkan wilayah itu sangat ketinggalan sekali ... Sebab itu, waktu Orde Baru melaksanakan pembangunan, saya menaruh perhatian khusus kepada Irian Jaya."[42] Selebihnya, terlepas dari tugas seremonial seperti menutup pameran foto Mandala di Jakarta pada akhir November, menghadiri upacara pengibaran bendera di Irian Barat pada akhir 1962, dan menghadiri acara penyematan tanda jasa dan promosi pasukan yang bertugas dalam konflik itu (termasuk Mayor RPKAD Benny Murdani dan Mayor Untung), Suharto juga ikut dalam upacara pembubaran komando Mandala yang secara resmi dibubarkan Sukarno di Makasar pada 6 Mei 1963.

Pada acara pembubaran, Suharto melaporkan secara ringkas prestasinya, dan mengumumkan orang-orang yang tewas dalam kampanye Irian Barat tersebut. Suharto, Komodor Subono dan Sudomo, Komodor Udara Wattimena, dan Brigjen Tahir, semuanya menerima tanda jasa Bintang Dharma sebagai penghargaan atas jasa-jasa mereka. Dua minggu kemudian, untuk pertama kali dalam kapasitasnya sebagai pejabat sementara menteri dan panglima angkatan bersenjata, Suharto menyematkan tanda jasa kepada 249 anggota Bn 454 dalam satu upacara di Semarang. Dalam pidatonya, Suharto mengemukakan bahwa dengan masuknya Irian Barat bukan berarti revolusi telah selesai:

> Masih ada dua kerangka tujuan revolusi yang harus kita capai, yaitumasyarakat adil dan makmur dan persahabatan dengan bangsa-bangsa lain menuju perdamaian dunia .... Kita masih

harus terus berjoang dan dipundak angkatan perang masih terpikul be, ban yang berat yaitu ... menjamin keamanan juga sebagai karyawan harus ikut mensukseskan kedua kerangka revolusi tersebut .[43]

Beberapa hari kemudian, masih dalam kapasitasnya sebagai pejabat sementara, Suharto mengeluarkan Perintah Harian sehubungan dengan kerusuhan rasial yang terjadi di Jawa, memperingatkan semua anggota Angkatan Darat untuk tidak membiarkan diri terpengaruh hal yang akan merusak nama baik Angkatan Darat, negara dan bangsa, dan agar waspada menghadapi situasi yang membutuhkan bantuan angkatan bersenjata; dia mengingatkan, "pemerintah telah mengambil tindakan-tindakan yang tegas untuk menjaga agar peristiwa-peristiwa itu jangan meluas dan terulang lagi."[44]

Suharto keluar dari Mandala dengan reputasi pribadi dan kelembagaan yang menanjak. Dari sisi pribadi, dia memperoleh reputasi luas sebagai panglima perang yang sukses dan gigih. Lagipula, dia tampaknya adalah tipe orang yang bersedia berjuang mati-matian demi kesejahteraan bawahannya; ini terlihat dalam kunjungan inspeksinya dan usahanya mendirikan yayasan pada 1962 bernama Yayasan Anak Yatim Trikora—bertujuan merawat keluarga-keluarga yang kehilangan suami dan ayah dalam peperangan; hal ini membentuk ikatan kuat di antara anak buahnya. Pada tataran institusional, sebagai komandan Caduad, ia membimbing pasukan yang pergi berperang sebagai anggota komando sentral pertama Jakarta, bukan sebagai anggota organisasi tempur lokal. Hasilnya, pasukan itu berjaya, berpengalaman, dan memiliki perlengkapan lebih baik; semua itu berkat fakta adanya komando sentralistis.

KOSTRAD: BASIS KEKUATAN

Kesuksesan resolusi krisis Irian Barat memungkinkan Suharto kembali ke posisinya sebagai panglima Cadangan Umum, yang

dibentuk kembali pada Februari 1963 dengan nama Kostrad (Komando Strategis Angkatan Darat), di mana Suharto secara formal ditunjuk sebagai Panglima pada 1 Maret 1963. Suharto kini termasuk jajaran perwira ABRI paling senior. Pada pertengahan 1962, ada tiga puluh jenderal Angkatan Darat di jajaran pemerintahan atau militer aktif. Hanya satu jenderal berbintang empat, Nasution, dan hanya dua (Hidayat dan Jatikusumo) yang berpangkat letnan jenderal. Suharto adalah salah satu dari delapan mayor jenderal (lainnya adalah Yani, Sungkono, Azis Saleh, Bambang Sugeng, Suprayogi, Satrilo, dan Sudirman). Di bawahnya, ada sembilan belas brigadir jenderal. Dari April 1963, ketika Letjen Hidayat terpilih sebagai menteri komunikasi, Suharto menjadi perwira aktif senior di bawah panglima ABRI, dan dia secara rutin menggantikan Yani ketika Yani tidak di tempat. Pada bulan yang sama, seperti telah kita lihat, Suharto untuk pertama kalinya bertindak sebagai menteri/panglima ABRI saat Yani pergi ke luar negeri (ke Manila dan tempat-tempat lain) selama sebulan. Sejak itu, Suharto rutin menggantikan Yani ketika Yani sedang pergi; hal ini merupakan indikasi bahwa Suharto dipandang sebagai orang yang tidak berambisi mencapai posisi yang lebih tinggi; pada bulan Januari tahun berikutnya, misalnya, Suharto menggantikan Yani ketika sang kepala staf itu menemani Sukarno ke luar negeri.

Indikasi lebih lanjut tentang posisi Suharto adalah penunjukannya pada bulan Juli 1963 sebagai kepala deputi (bagi Mayor Jenderal Sudirman) lembaga baru, Wanjakti (Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi) yang diciptakan Yani. Wanjakti ini dimaksudkan untuk memberi masukan kepada Suharto mengenai penghargaan, penempatan, dan promosi ke tingkat senior. Peran ini memberi Suharto posisi sebagai suara penentu dalam memberi penghargaan dan tugas bagi perwira pada level paling senior, dan menjadi posisi yang sangat penting seiring berlalunya waktu, bahkan ketika Suharto tampaknya gagal menggolkan Yoga Sugama sebagai panglima Divisi Diponegoro. Jika kita menoleh ke belakang, dalam satu acara yang seakan-akan merupakan kilasan masa

depan, figurnya semakin diakui ketika dia ditunjuk untuk memimpin pasukan Kostrad dalam perayaan Hari ABRI 1963; perayaan ini menampilkan simulasi serangan udara terhadap daerah yang dekat dengan pangkalan udara Halim di Jakarta, yaitu daerah Lubang Buaya.

Penunjukan Suharto di Kostrad sangat penting bagi kariernya. Penunjukan ini memberi dia lahan yang bahkan lebih subur ketimbang posisinya dulu sebagai komandan Diponegoro; dia mengembangkan kelompok yang terdiri atas teman-teman sejawatnya yang satu pikiran dan dekat satu sama lain, dengan tujuan menciptakan satu kursi kekuasaan kuasi-independen. Terlepas dari kesulitan ekonomi serius yang dihadapi negara, Kostrad tidak mengalami pengetatan anggaran yang diberlakukan pada formasi angkatan bersenjata umum menyusul suksesnya kampanye Irian Barat. Sebaliknya, "Kostrad berkembang pesat: menambah brigade artileri, memperbaiki unsur infantri, dan memperkuat RPKAD."[45] Di satu sisi, meningkatnya ketegangan politik yang muncul pada akhir 1963 membuat peran Suharto semakin penting karena dia mengepalai nadi pergerakan militer pusat yang menangani krisis luar dan dalam negeri. Pada saat yang sama, Kostrad memberi Suharto basis kelembagaan untuk mengembangkan jaringan bisnis dan intelijen yang sangat menguntungkan dirinya saat itu dan lebih-lebih di masa mendatang.

Seperti yang dilakukannya saat menjabat sebagai panglima Diponegoro, Suharto berusaha, bersama para penasihat dekat yang amat dia percaya, untuk mengembangkan sumber pendapatan yang menguntungkan bagi Kostrad dan para anggotanya. Pada 28 April 1964, Suharto mendirikan Yayasan Kesejahteraan Sosial Dharma Putra—dengan modal awal Rp 40.000—yang bertujuan memajukan kepentingan kultural dan ekonomi para anggota dan keluarganya.[46] Dewan pengurus yayasan baru tersebut adalah Suharto sendiri, bersama dengan Achmad Wiranatakusumah, Cokropranolo, dan A.P. Nasution. Dari waktu ke waktu, yayasan, dan anggota Kostrad dari berbagai hierarki militer, terlibat dalam banyak bisnis

seperti perbankan, produksi film, transportasi, industri, dan proyek intensifikasi produksi pangan. Seperti akan kita lihat, Kostrad juga amat berkepentingan untuk terlibat dalam penyelundupan bahan primer dari pusat produksi di Sumatra Utara ke Singapura.

POLITIK KIRI

Tahun 1963 adalah masa meningkatnya politik pergerakan di Jakarta. Suharto kelak merenung, "situasi politik di dalam negeri tambah tidak menentu."[47] Menyusul krisis yang disebabkan oleh kejatuhan politik parlementer dan pemberontakan daerah, ketakutan Sukarno terhadap meningkatnya kekuatan Angkatan Darat, dan terhadap Nasution khususnya, politik telah dipandang sebagai pertandingan tersembunyi antara tiga kekuatan: Sukarno (ditunjuk sebagai Presiden Seumur Hidup oleh MPRS pada 1963), Angkatan Darat, dan PKI. Lembaga formal lain, seperti parlemen dan kabinet, menjadi kurang berarti bagi proses politik jika dibanding pertarungan penting ketiga kekuatan tadi. Mengingat Sukarno yang karismatis berada pada posisi yang tampaknya tak tergoyahkan, dan mengingat kekuatan fisik serta kekompakan yang bisa dikerahkan Angkatan Darat dalam keadaan krisis, PKI amat berhasrat memetik keuntungan dari mana pun. PKI menemukan karakter penuh warna dan amat menguntungkan dalam diri Sukarno yang kala itu sedang bersemangat dengan ideologi anti-Barat dan anti-liberal. Namun, meski kaum komunis sering mencetuskan kampanye ideologis yang sangat gencar, mereka tetap saja belum memiliki kekuatan riil. PKI hanya mendudukkan sebagian kecil orangnya dalam kabinet, satu yang menjadi sasaran kecurigaan dari kelompok politik yang lebih mapan, dan tidak memiliki kekuatan untuk menandingi ancaman fisik Angkatan Darat. Untuk menutupi kelemahan mereka, kaum komunis berusaha membangun keanggotaan luas dan mengobarkan semangat revolusioner, mungkin berharap bisa mendapat kekuasaan secara aklamasi.

Sementara, Sukarno sangat khawatir terhadap peran politik Angkatan Darat. Terlepas dari usahanya untuk meningkatkan pengaruh PKI, dan menggunakan retorikanya yang luar biasa serta kemampuannya yang tangguh dalam membentuk dan mewakili aspirasi publik guna menentukan agenda politik, Sukarno berusaha melemahkan Angkatan Darat secara internal. Dalam satu langkah licik, Sukarno berhasil meminggirkan Nasution pada pertengahan 1962 dengan memberinya posisi baru sebagai kepala staf Angkatan Bersenjata—intinya adalah jabatan tanpa signifikansi operasional yang, menggabungkan tugas-tugas seremonial dan tugas-tugas kearsipan, menghilangkan posisi sentral Nasution di Angkatan Darat—dan posisi lamanya sebagai kepala staf angkatan darat digantikan oleh Yani yang, meski karier militernya mengesankan, dianggap Sukarno sebagai tokoh yang lebih patuh ketimbang Nasution yang keras, penuh opini, dan antikomunis. Yani segera mengambil jarak dari Nasution; hal itu mencerminkan bukan hanya kondisi politik yang menguntungkan (dan penerimaan Yani terhadap kondisi itu), namun juga gaya hidup: Yani memiliki selera tinggi dalam hal kemapanan dan wanita cantik.

Suharto jelas tidak senang dengan gaya politik dalam negeri yang semakin agresif dan konfrontatif: dukungan Sukarno terhadap PKI, dukungan ideologis yang malah memecah alih-alih menyatukan (meski, menurut Roeder, Suharto "pada satu waktu pernah menerima NASAKOM");[48] semakin tunduknya ABRI di bawah agenda politik baru dan, sejak 1963, semakin berkiblat pada Beijing. Suharto pada saat ini tampaknya berusaha berperan sebagai seorang militer profesional yang nonpolitik; seorang militer yang sadar akan meningkatnya ketegangan antara Partai Komunis di satu sisi, dan kelompok militer serta kaum muslim di sisi lain, namun tidak yakin bagaimana mengatasi ketegangan ini. Suharto bahkan mengklaim pernah berpikir mengundurkan diri "menjadi supir taksi atau menjadi petani",[49] pemikiran yang mengundang tawa teman-temannya. Mengingat kariernya yang sedang meroket

sejak 1961, kita bisa mengabaikan munculnya pikiran seperti ini dari orang yang betul-betul percaya diri dalam memimpin.

KONFRONTASI TERHADAP MALAYSIA

Penunjukan Suharto di Kostrad seiring dengan meningkatnya ketegangan akibat rencana pembentukan Malaysia. Rencana pembentukan Federasi Malaysia nyaris tidak lagi dipermasalahkan di Indonesia hingga akhir 1962, ketika revolusi "kecil ala Gilbertian"[50] di Brunei menyedot dukungan Indonesia ke pihak yang menentang ide revolusi itu. Hubungan yang sangat kompleks dan membingungkan antara kebijakan luar negeri dan ketegangan politik dalam negeri yang mengobarkan upaya Konfrontasi Indonesia sejak akhir 1962, yang kemudian berpuncak setelah September 1963 dalam kampanye 'ganyang' Malaysia, tidak perlu dibahas di sini.[51] Tetapi, akhirnya Suharto, berkat posisinya yang strategis, tertarik ke dalamnya.

Ketika Konfrontasi melangkah ke tahapan yang relatif lebih terarah pada 1964, kekhawatiran ABRI akan taktik tersebut mulai muncul. Pada tahap awal, taktik ini memberi keuntungan politik tertentu bagi Angkatan Darat, terutama setelah berakhirnya keadaan perang pada 1 Mei 1963. Taktik ini membuat Angkatan Darat terhindar dari pemotongan anggaran besar-besaran akibat rencana stabilisasi ekonomi yang diajukan;[52] karenanya, Angkatan Darat bisa terus melengkapi persenjataan yang, pada gilirannya, memberi Angkatan Darat legitimasi untuk meminta peran lebih besar dalam politik. Tetapi, kini muncul kekhawatiran besar di jajaran perwira ABRI bahwa PKI akan menangguk banyak keuntungan dari kampanye Konfrontasi, sebagaimana didapatkannya dari kampanye Irian, dan bahwa Angkatan Darat sendiri tidak siap melawan armada Inggris dan Persemakmuran.

Pada awal Mei 1964, Sukarno mengumandangkan Dwikora (Dwi Komando Rakyat), dan dua minggu kemudian membentuk komando perang, Koga (Komando Siaga) yang dikepalai Marsekal

Udara Omar Dhani, untuk menyukseskan Konfrontasi Malaysia. Pembentukan Koga segera membuat pemimpin Angkatan Bersenjata waspada. Meskipun Brigjen Achmad Wiranatakusumah, kepala staf Kostrad-nya Suharto, ditunjuk sebagai Deputi II Koga, pembentukan komando ini dianggap "sebagai gerakan untuk mengurangi kapasitas angkatan bersenjata dalam menahan sisi militer kampanye itu."[53] Omar Dhani adalah seseorang yang tumbuh pesat di bawah bayangan Sukarno; pembentukan Koga yang dikepalainya dianggap sebagai bukti lebih jauh akan keinginan Sukarno untuk memecah-belah Angkatan Bersenjata demi mengedepankan dan mencapai tujuan politiknya sendiri. Yani, yang setia kepada Sukarno namun tidak sampai menjadi budaknya, hingga sekitar pertengahan 1964 mampu memastikan bahwa kegiatan militer Koga terhadap Malaysia dibatasi sebagian besar hanya pada apa yang disebut Mackie "operasi kuasi-gerilya yang tak berarti".[54] Tetapi, angkatan laut berskala kecil dan pendaratan parasut yang dipersiapkan tidak dengan matang di semenanjung Malaya pada pertengahan Agustus dan awal September 1964—tindakan yang diambil tanpa dukungan pemimpin Angkatan Bersenjata—adalah kegagalan besar, dan kinerja militer yang buruk dijadikan alasan, sejak Oktober 1964, oleh Yani untuk menegaskan kendali Angkatan Darat terhadap operasi militer. Memang, menurut Crouch, pemimpin Angkatan Bersenjata "sebenarnya telah kehilangan minat pada kampanye Konfrontasi sejak akhir 1964."[55] Dalam satu konsesi penting sikap angkatan bersenjata atas pelaksanaan kampanye itu, mungkin disulut kesan bahwa Angkatan Darat ingin mendapat peran lebih aktif dalam Konfrontasi, pada bulan Oktober Sukarno setuju untuk mereorganisasi Koga sebagai komando daerah, Kolaga (Komando Mandala Siaga), yang serupa dengan struktur terintegrasi komando Mandala terdahulu, dan meliputi semua operasi militer di Sumatra dan Kalimantan. Pada 1 Januari 1965, Suharto, sebagian karena pengalamannya di Mandala, diangkat sebagai Deputi I komandan di bawah Dhani dan diberi tanggung jawab utama atas urusan operasional. Penunjukan dirinya

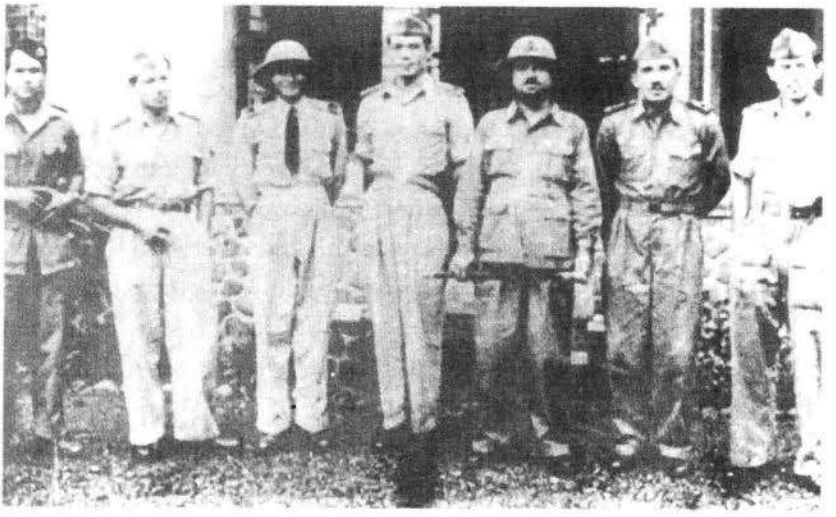

Suharto dan tokoh-tokoh senior lain dari divisi Diponegoro. Dari kiri, Letkol Slamet Riyadi; Suharto, Letkol Suadi Suromiharjo, Letkol Sarbini; Kol. Gatot Subroto; Letkol M. Bachrun dan Letkol Achmad Yani. (Ipphos).

Sukarno dan Suharto di Semarang, mungkin pada tahun 1958. (Ipphos)

Suharto dalam latihan untuk kualifikasi pasukan terjun payungnya, tahun 1964. (Sekretariat Negara, Indonesia)

Suharto mengawasi pengambilan jenazah para jenderal di Lubang Buaya, 4 Oktober 1965. (Departemen Penerangan, Indonesia).

Suharto di pemakaman para jenderal yang terbunuh, 5 Oktober 1965. (Departemen Penerangan, Indonesia)

Suharto dilantik sebagai Menteri/Panglima Angkatan Bersenjata, 16 Oktober 1965. (Ipphos).

Suharto, Sukarno, dan Nasution, tahun 1967. (Sekretaris Negara, Indonesia)

Suharto dilantik sebagai Pejabat Presiden. (Departemen Penerangan, Indonesia)

ke posisi deputi ditafsirkan Suharto sebagai indikasi bahwa Sukarno "tidak sepenuhnya mempercayai perwiranya, Suharto."[56]

Tampaknya, Suharto sendiri memegang peran penting dalam penunjukan baru ini. Terlepas dari pandangan yang dia ungkapkan dalam sebuah pidato di Lubang Buaya pada Juli 1964 bahwa "bagi AD kini tidak ada jalan lain kecuali harus lebih memperhebat pelaksanaan Dwikora untuk mempertinggi ketahanan revolusi kita serta untuk membantu perjuangan Rakyat-Rakyat di Malaya, Singapura dan Kalimantan Utara dalam membubarkan proyek neo-kolonialisme 'Malaysia'".,[57] Suharto, seperti Yani, tetap mendua dalam menyikapi pelaksanaan Konfrontasi, dan khawatir akan arah kampanye ini. Kekhawatiran Suharto tampaknya semakin meningkat ketika di pertengahan tahun dia diberi tahu oleh unit intelijensi Operasi Khusus (Opsus) tentang kemungkinan adanya langkah menentang kepemimpinan ABRI oleh Sukarno dan PKI, dan bahaya ditariknya kekuatan paling baik dan paling bisa diandalkan dari Jawa, di tengah-tengah ketidakpastian dan ketegangan politik serius, demi mendukung upaya Konfrontasi. Kemudian, tampaknya Suharto lekas berpikir bahwa Konfrontasi tidak lebih dari sekadar taktik PKI untuk mencapai tujuan ideologis dan meningkatkan dukungan. Keengganan Suharto dan Yani untuk mencurahkan diri sepenuhnya pada kampanye Konfrontasi tambah dalam lagi dengan timbulnya skeptisisme mereka akan kemungkinan suksesnya militer, ketidaksukaan mereka terhadap kepemimpinan kampanye—pada satu pertemuan dengan Sukarno, Suharto menyebut Dhani sebagai pemimpin yang "tidak layak"[58]—ketakutan mereka bahwa kampanye ini akan menghancurkan kedudukan Indonesia di kancah Internasional, kemarahan mereka atas kerugian dan penghinaan yang dialami oleh pasukan-pasukan yang dikirim untuk menjalani misi yang tidak direncanakan secara matang, dan kepedulian—yang beralasan—mereka bahwa setiap keberhasilan akan langsung diklaim sebagai hasil usaha PKI. BersamaYani, Suharto bersekutu memastikan kerahasiaan aktivitas militer dalam kancah operasi yang baru dibentuk.

Suharto menyebut upaya militer di bawah Koga-nya Dhani sebagai salah satu "kerancuan"; bersama Yani, Suharto tampaknya berusaha keras memastikan bahwa Kolaga tidak memberi ancaman militer yang signifikan terhadap Malaysia. Menyusul pengangkatannya sebagai deputi I, Suharto melakukan serangkaian inspeksi di Kalimantan Utara dan Sumatra Utara, tempat diluncurkannya serangan terhadap Malaysia. Hasil yang ia temukan mengecewakannya, "Saya melihat berbagai hal yang tidak beres. Maka saya mencoba membenahi keadaan yang kusut itu." Meski operasi yang sedang berjalan itu tidak bisa dihentikan, Suharto berhasil mencegah penerjunan yang terbukti selalu gagal.[59] Penambahan pasukan besar-besaran pun dihentikan. Di bawah pengaturan kancah baru Kolaga ini, semua pasukan yang dirancang untuk siap tempur di Sumatra atau Kalimantan harus dipindah dulu ke Kostrad, di bawah perintah langsung Suharto, sebelum diterjunkan ke kancah. Meski sebagai panglima Kostrad Suharto mengomandoi semua pasukan dalam wilayah Kolaga, dia tampaknya tidak mampu mencukupi kurangnya peralatan dan transportasi, serta mungkin juga pasukan untuk ditempatkan di garis depan di Kalimantan; "atau dia sengaja dihambat demi alasan politik tertentu."[60] Pengaturan Kolaga menuntut bahwa, karena kancah dibatasi hanya di Sumatra dan Kalimantan, tambahan pasukan dari Jawa harus diminta. Permintaan ini tidak selalu dipenuhi; pasukan yang tidak-siap dikirimkan sementara pasukan siap-tempur tetap di Jawa, dan struktur komando yang dianjurkan malah diabaikan. Di Sumatra Utara, Kol. Kemal Idris yang berperawakan pendek, kasar, dan tangguh, bukan pendukung komunis, ditempatkan sebagai komandan unit serangan terencana, mungkin sebagai isyarat bahwa akan ada serangan yang bakal terjadi. Brigjen M.S. Suparjo, perwira Siliwangi beraliran kiri dan Sukarnois sejati, ditempatkan untuk memimpin komando perang Kalimantan pada akhir 1964, namun dikelilingi oleh komandan-komandan lokal kepercayaan dan tidak pernah diberi unit perang yang bagus.

Sifat kampanye yang setengah hati serta kekangan yang diberlakukan komando tinggi angkatan bersenjata mencegah semakin meningkatnya permusuhan; "ini perang kecil jika melihat korban yang ada."[61] Namun demikian, Suharto ahli dalam menjaga citranya sebagai komandan yang sibuk. Pada Agustus 1965, misalnya, Suharto mengatakan bahwa kekuatan musuh di Kalimantan Utara "dalam keadaan panik", dan semua "serangan [mereka] ini mengalami kegagalan total". Seolah-olah tidak menyadari kontradiksi ini, Suharto meminta bantuan obat-obatan dan pakaian untuk orang-orang yang tinggal di daerah perbatasan, yang menderita karena rumah dan sekolah mereka dibakar dan merasa tidak aman karena serangan musuh.[62]

Tampaknya, tidak seorang pun berani menentang usaha Suharto untuk menghambat kegiatan militer aktif melawan Malaysia meski Sukarno dan Angkatan Udara serta Angkatan Laut—yang mendapat porsi sangat besar dalam operasi Konfrontasi—mengetahui kurangnya antusiasme Angkatan Darat dalam kampanye ini. Tetapi, bahkan sebelum dia memberi operasi bantuan, Suharto bertekad, "mungkin dengan persetujuan Jenderal Yani,"[63] melaksanakan strategi baru dan lebih licik yang dirancang agar tampak sebagai kelanjutan Konfrontasi dengan cara lain, namun sebenarnya—entah disengaja atau tidak, pada tahap ini, peluang tetap dibiarkan terbuka[64]—merupakan langkah awal dalam merundingkan sebuah akhir dari keinginan Indonesia untuk berperang. Pada Agustus–September 1964, di bawah kepemimpinan dan arahan asisten intelijen Suharto di Kostrad Ali Murtopo (pada saat itu ditarik ke Jakarta dari jabatan intelijennya sebagai asisten I Kopur II di Sumatra Utara), dan tidak pelak lagi atas sepengetahuan dan sepertujuan Yani, bersama dengan Murdani (baru saja dipindah dari RPKAD ke Kostrad) dan Letkol Abdul Rachman Ramly—keduanya anggota tim Opsus Murtopo—upaya-upaya ditujukan untuk membangun kontak tertutup dengan Malaysia. Melalui perantaraan orang asing yang dulu terkait pemberontakan PRRI—seperti Des Alwi, kelahiran Banda, anak asuh Sutan Syahrir

(tokoh yang kelak dipenjara) sekaligus orang bayaran Kementerian Luar Negeri Malaysia, dan Sumitro Joyohadikusumo—hubungan diresmikan oleh tokoh senior Malaysia seperti Tun Abdul Razak dan kepala Kementerian Luar Negeri Malaysia, Ghazalie Shafie. Tujuannya sederhana: meyakinkan pemerintah Malaysia dan sponsor Inggrisnya bahwa dukungan atas konflik oleh Angkatan Bersenjata Indonesia bukan berasal dari keyakinan dan tidak dilaksanakan dengan antusiasme; ABRI tidak ingin konflik semakin memanas, dan ingin mencari cara membuka perundingan dengan Malaysia untuk mengakhiri pertikaian. Pada November, Murtopo dan salah satu—rekan karibnya—asisten Kostrad lain, Kol. Cokropranolo, melakukan negosiasi rahasia dengan pejabat Malaysia untuk memastikan bahwa tidak ada peningkatan konflik dari kedua belah pihak. Pada awal 1965, Yoga Sugama, ketika tugasnya sebagai atase militer di Yugoslavia selesai, direkrut Suharto untuk bergabung dan mengepalai tim intelijennya menggantikan Hernomo sebagai asisten I Kostrad. Bersama Suharto dan Ali Murtopo, Yoga selesai membentuk tim yang akan melaksanakan negosiasi.

Berupaya lewat tataran lain, Suharto kelak mengklaim bahwa dia "ubah [strategi] dengan pembentukan kantong-kantong lebih dulu, dengan menghubungi orang-orang Malaysia yang pro-Republik,"[65] tampaknya merupakan usaha untuk menyusup dari belakang. Dengan sangat mengandalkan tim intelijennya, pada awal 1965 Suharto memerintahkan pendirian sebuah agen di Bangkok, di mana Benny Murdani diposisikan sebagai petugas tiket Garuda. Murdani membuat beberapa usaha sekadarnya untuk mengirim agen ke Malaysia dengan hasil yang tidak bisa dibilang sukses. Tampaknya sangat mungkin usaha-usaha ini dilakukan bukan untuk meningkatkan Konfrontasi, melainkan untuk menutupi negosiasi lebih dalam yang sedang terjadi pada saat bersamaan. Sementara itu, usaha diplomasi internasional untuk mendapat solusi bersama mulai memudar tanpa ada keberhasilan.

Tanggung jawab Suharto atas Konfrontasi juga memiliki tujuan komersil. Posisinya sebagai deputi I Kolaga dan panglima

Kostrad membuat dia memegang kendali efektif terhadap hasil wilayah perkebunan besar di Sumatra Utara dan Kalimantan, dan kemampuan untuk menyelundupkan jumlah besar hasil bumi ini ke Malaysia, yaitu pada saat ketika hubungan komersil formal telah terputus dengan dibentuknya Malaysia pada September 1963. Mungkin bukan kebetulan bahwa Ibu Tien mengunjungi Sumatra Utara pada masa Konfrontasi. Melalui tim Opsusnya, Suharto mengembangkan kegiatan komersil menguntungkan yang tampaknya terkamuflase oleh kegiatan intelijen Ali Murtopo yang berbasis di Medan dengan Kopur II: membawa karet dan barang-barang pertanian utama lainnya ke Malaya. Sejarah resmi Kostrad mencatat "Tenaga yang digunakan untuk pelaksanaan tugas ini 95% orang-orang Cina Nelayan dan bersama mereka menyamar SUKARELAWAN-SUKARELAWAN kita sebagai pedagang."[66] Kedekatan operasional antara intelijen dan perdagangan mungkin terjadi karena adanya kerancuan prioritas. Menurut McDonald, "perdagangan ini tidak sepenuhnya tertutupi. Pada satu rapat kabinet, Menteri Perdagangan Adam Malik menemukan sebundel dokumen bebas cukai Singapur di pejabat militer, dan menuduh Angkatan Darat telah menggerogoti Konfrontasi."[67] Mungkin memang saudara tiri Suharto, Probosutejo, terlibat dalam perdagangan ini; hidup di Medan pada awal 1960-an sebagai guru sekolah, Probo meninggalkan kariernya dan mulai membangun koneksi bisnis dengan seorang usahawan Cina.

ANGKATAN DARAT, PKI, DAN SUHARTO

Memanasnya suasana dan momentum Konfrontasi pada 1964 dan awal 1965 telah dimanfaatkan dan dieksploitasi dengan lihai oleh PKI untuk kepentingannya sendiri. Berkat dukungan Presiden ditambah ketidakpastian Angkatan Darat akan cara menempatkan diri dalam alam politik, PKI mulai membuat kemajuan. Sepanjang 1965, suhu politik di Jakarta terus meningkat. Ketegangan yang semakin meningkat dalam politik Indonesia mulai memasuki titik

rawan, dengan "meluasnya kesadaran ... bahwa sistem politik tidak bisa bertahan lebih lama lagi."[68] Tanda-tanda mendekatnya krisis dan keruntuhan semakin nyata. Di bidang ekonomi—pada tahap tertentu, karena terkuras untuk kampanye Irian dan Konfrontasi—inflasi mulai merambat, prasarana negara ini mulai memburuk, hasil produksi menurun, dan kepercayaan internasional yang sudah memudar terhadap masa depan ekonomi Indonesia semakin tergerus; tidak ada usaha nyata atau serius untuk memperbaiki keadaan. Prasarana pemerintahan menunjukkan tanda-tanda kebangkrutan serupa, tergerogoti oleh korupsi yang semakin menggila. Retorika revolusioner Sukarno menjadi semakin meracau dan memperburuk keadaan, terutama karena dia semakin enggan menerima lagi pandangan yang berbeda dengan pandangannya. Dalam tataran internasional yang lebih luas, kebijakan Indonesia yang semakin agresif dibarengi langkah menjalin hubungan lebih dekat dengan Cina, kemudian mengambil jarak dari Uni Soviet, dan semakin menjauh dari Amerika Serikat.

PKI tampaknya cenderung membuat terobosan serius ke kursi kekuasaan dengan mengeluarkan resolusi pada Januari 1965 bahwa petani dan buruh harus dipersenjatai dan dilatih, satu konsep yang kelak berubah wujud menjadi sebuah rencana membentuk suatu "kekuatan kelima" selain tiga angkatan bersenjata dan polisi, dan rencananya untuk "Nasakomisasi" Angkatan Bersenjata.[69] Lebih jauh lagi, kritik PKI terhadap 'kapitalis birokratis' dengan benar ditafsirkan sebagai serangan terhadap meningkatnya kepentingan bisnis pribadi banyak perwira kelas atas. Angkatan Darat tampaknya berusaha defensif dan tidak tahu pasti bagaimana harus bereaksi; Sukarno tampaknya semakin berpihak pada PKI demi tujuan "kelangsungan revolusi," satu tujuan yang agaknya merupakan satu langkah taktis untuk tetap menjinakkan Angkatan Darat, dan mungkin untuk membujuk pimpinan Angkatan Darat agar mengubah ide mereka tentang haluan bangsa.[70] Mengingat bahwa Sukarno kekurangan sarana institusional penting untuk menghadapi berbagai kepentingan di kalangan elite politik, gagas-

annya paling jelas tergambar dalam aspek simbolis kebijakan luar negeri, dan dalam pembentukan solidaritas domestik. Indonesia mengundurkan diri dari PBB pada 1 Januari 1965. Yang lebih parah lagi, Sukarno sendiri mulai menunjukkan tanda-tanda kemunduran fisik, sehingga timbul kekhawatiran hidupnya akan berakhir, dan ini adalah salah satu sebab meningkatnya ketegangan politik dalam negeri.

Tak diragukan lagi, akibat meningkatnya ancaman politik PKI inilah pemimpin angkatan bersenjata berusaha mengembangkan definisi yang lebih koheren mengenai peranan Angkatan Darat dalam kehidupan politik bangsa dan kejelasan akan arah taktik dan tujuan. Ketika Angkatan Darat memegang monopoli kekuatan persenjataan, para pemimpinnya menyadari bahwa ancaman kekerasan adalah instrumen politik yang lemah karena berpotensi meruntuhkan kesatuan internal Angkatan Darat yang masih lemah. Banyak anggota senior Angkatan Darat mengagumi Presiden, ada ketegangan ideologis di tataran bawah struktur ABRI, dan komando tinggi tidak memiliki arah strategis yang jelas. Selain itu, ada kecenderungan signifikan atas politik kiri di angkatan lain, terutama di Angkatan Udara. Akibatnya, Angkatan Darat harus puas dengan operasi dukungan reaktif yang pengaruh riilnya terhadap jalannya peristiwa hanya terbatas pada tantangan yang dihadapinya. Angkatan Darat, memiliki pengaruh cukup besar di lembaga pemerintahan namun tidak cukup menentukan, terpaksa harus mengakomodasi kondisi politik yang semakin ideologis. Masalahnya bukan terletak pada "apakah Angkatan Darat harus menolak PKI, melainkan kapan dan sejauh mana harus menarik batas."[71]

Posisi Suharto mungkin mencerminkan kecenderungan umum bahwa komando tinggi angkatan bersenjata kian waspada dan kian bingung; Suharto sendiri pastilah terganggu oleh pemecatan sahabat lamanya, Hadisubeno, dari posisinya di partai oleh pimpinan PNI yang berada di bawah pengaruh hebat komunis. Menurut penuturan melodramatis Roeder, Suharto "sering dimintai

informasi dan saran oleh anak buahnya. Jawabannya adalah "Saya tidak buta. Saya telah melaporkan kepada atasan saya tentang situasi gawat ini. Tidak ada reaksi. Apa yang bisa saya lakukan sebagai seorang prajurit?" Orang ini, yang menemukan jalan keluar atas kesulitan-kesulitan di saat genting dalam karier militernya, mengaku, "Saya tidak punya harapan.""[72] Sebagaimana kita lihat, meski Suharto bukanlah pendukung kebijakan asing—yang meledak-ledak—Sukarno, ia harus menyetujui, meski enggan, seluruh kebijakan tersebut. Pada saat yang sama, meski bukan seorang yang loyal pada Sukarno, seperti para perwira senior umumnya ia tetap menghormati dan memuja Sang Presiden. Senioritasnya, dan posisi penting yang dia duduki, menempatkan dia pada posisi berpengaruh untuk berusaha memecahkan konflik yang sedang terjadi dalam tubuh Angkatan Darat. Selain kedekatan dengan para stafnya di Kostrad, Suharto sendiri bukan bagian dari klik atau kelompok mana pun, dan secara umum dianggap sebagai penyendiri. Tampaknya, tidak seperti banyak jenderal lain di Jakarta yang mementingkan makan siang di hotel yang mewah, Suharto biasanya pulang ke rumah untuk makan siang dengan istrinya.

Sehubungan dengan kesetiaan kepada Sukarno beserta pandangannya, Suharto berada di antara kelompok perwira skeptis sekitar Nasution yang menganggap bahwa Yani terpaksa tunduk pada kebijakan dan pandangan Sukarno, dan orang-orang yang lebih dekat dengan, serta condong kepada, Presiden, yang mengelompok di sekitar Yani. Suharto, tentu saja, pernah berbeda pendapat dengan Nasution, yang memindahkannya pada tahun 1959, dan dengan Yani pada 1963 mengenai masalah struktur organisasi mana yang pantas bagi Kostrad, namun dalam hal intelektualitas dan gaya hidup, Suharto lebih dekat ke Nasution. Sekitar awal 1965, Suharto, bersama dengan perwira senior lainnya, mengunjungi Nasution, tampaknya sebagai upaya membujuk Nasution untuk mengubah sikap kritisnya terhadap Sukarno. Tak lama kemudian, pada tanggal 13 Januari, tampaknya atas permintaan

Nasution, Suharto—dan empat perwira lainnya yang tidak berpihak ke mana pun: Achmad Sukendro, Sarbini Martodiharjo, Basuki Rachmat, dan Sudirman—menghadiri satu pertemuan dengan anggota kelompok markas Yani untuk mempersempit perbedaan antara Nasution dan Yani; Suharto dan teman-temannya tampaknya mewakili pandangan Nasution terhadap orang-orang Yani. Pertemuan ini tidak berhasil membujuk lingkaran Yani agar mengembangkan sikap yang lebih berjarak dengan Sukarno; pertemuan ini hanya menghasilkan kesepakatan untuk menyelenggarakan seminar angkatan bersenjata, yang dijadwalkan pada April 1965, sebagai satu forum untuk membahas situasi politik terkini dan untuk memberi kesempatan bagi Angkatan Bersenjata merenungkan dan lebih jauh mengembangkan basis ideologis perannya dalam politik dan ekonomi; ABRI mengklaim dua peran: peran militer dan peran sebagai "kekuatan sosial-politik" independen yang terlibat secara utuh dalam berbagai area seperti agama dan ekonomi.[73] Menurut Subandrio, Suharto adalah pencetus doktrin "Tri Ubaya Sakti", yang muncul dari seminar tersebut.[74]

Komando tinggi angkatan bersenjata, terlepas dari perbedaan internal dan kerancuannya akan jalan ke depan, telah—mungkin karena ancaman yang semakin nyata dari PKI—membangun kesepakatan tentang beberapa prinsip dasar. Seluruh anggotanya dengan curiga melihat meningkatnya pengaruh komunis dan bertekad bahwa partai itu tidak boleh sampai ke puncak kekuasaan. Sikap ini tercermin dalam oposisi tegas Yani terhadap 'kekuatan kelima'.[75] Suharto sendiri juga 'sangat menentang rencana ini'.[76]

Pengalaman Suharto dalam pergolakan politik di tahun-tahun akhir Demokrasi Terpimpin ini—di mana nuansa, nasihat, kata-kata tak terucap, pernyataan-pernyataan strategis, dan intrik yang selalu berganti merupakan sarana umum dalam manuver politik—pasti sangat mempengaruhinya. Seperti banyak temannya sesama perwira yang beberapa tahun lalu agak buta politik-tinggi, Suharto langsung menjadi operator ahli dan lihai dalam politik zaman itu yang terkadang surealis. Selain itu, karena Yani tidak

mendapat otoritas independen dan tinggi seperti yang dialami pendahulunya (sebagian karena penunjukannya sebagai kepala staf angkatan bersenjata), Suharto dan perwira senior lain seperti komandan Siliwangi Ibrahim Ajie, dari waktu ke waktu, mampu menancapkan pengaruh kebijakan mereka. Memang, Suharto telah menjadi salah seorang yang paling kuat di Indonesia. Posisinya sebagai komandan pendiri Kostrad, reputasinya sebagai komandan perang, pangkat seniornya, komando operasinya dalam Kolaga, perannya sebagai deputi-pengganti Yani—sebagai menteri/panglima Angkatan Darat—dan citranya sebagai komandan paling senior yang aktif, semuanya membawa Suharto ke jajaran eselon atas berpengaruh di ibukota. Suharto selalu mengikuti sejumlah diskusi tingkat tinggi dan rapat strategi, terutama dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan keamanan nasional dan Angkatan Bersenjata.

Salah satu akibat keprihatinan komando angkatan bersenjata akan jalannya politik dalam negeri adalah berkembangnya "golongan fungsional" yang disponsori angkatan bersenjata pada akhir 1964: Sekber Golkar (Sekretariat Bersama Golongan Karya).[77] Teman dan tetangga sebelah Suharto, Mashuri, adalah salah seorang yang mengembangkan gagasan itu, dan sangat menggoda untuk menduga bahwa Suharto sendiri terlibat dalam diskusi-diskusi ini. Yani sendiri memerintahkan komando regional untuk mendukung pendirian organisasi lokal Sekber Golkar.

MENUJU 1 OKTOBER

Sebagian cerminan dari meningkatnya ketegangan awal 1965 dan, mungkin lebih spesifik, semakin kerasnya sikap bersama ABRI terhadap kemajuan PKI adalah kabar burung yang berkembang sebelum 1965 akan adanya Dewan Jenderal. Gosip ini, yang disebarkan PKI, adalah bahwa dewan itu dibentuk oleh para jenderal senior yang berupaya mengambil alih kekuasaan pada saat yang tepat. Kontroversi seputar Dewan Jenderal tersulut

dengan ditemukannya apa yang disebut dokumen Gilchrist, konon ditemukan di vila seorang distributor film Amerika yang sekaligus dituduh agen CIA di Puncak ketika vila tersebut diserang pada 1 April oleh sekelompok pemuda komunis. Dokumen ini, yang konon adalah telegram rahasia dari duta besar Inggris di Jakarta, Sir Andrew Gilchrist, kepada atasannya di London, menyebutkan kemungkinan kerja sama di masa depan antara Inggris dan "sahabat kami dari angkatan bersenjata lokal."[78]

Sukarno, yang kekhawatirannya akan niat ABRI tampaknya semakin bertambah akibat dokumen Gilchrist, meminta klarifikasi dari Yani pada pertemuan khusus empat panglima angkatan bersenjata pada dini hari 26 Mei. Yani kemudian menjawab bahwa dua stafnya, Parman dan Sukendro, terus berhubungan dengan kedutaan besar Amerika dan Inggris, dan bahwa perwira-perwira senior telah berkumpul di rumahnya untuk menyatakan pendapat mereka tentang situasi politik ini. Selain itu, Yani mengakui adanya satu dewan jenderal, yaitu Wanjakti, badan yang dibentuknya pada 1963 untuk merekomendasikan penempatan dan promosi ke tingkat lebih tinggi, namun menyangkal adanya satu badan rahasia. Tetapi, kabar burung bahwa sekelompok jenderal tingkat tinggi sedang berencana mengambil alih kekuasaan semakin menguat sejak Mei, diperparah terutama oleh sikap Yani yang semakin keras dalam menghadang kemajuan PKI, dan mungkin juga karena kesadaran bahwa Amerika sangat menginginkan perubahan politik di Indonesia. Pada Agustus dan September, kabar burung semacam itu sudah umum di Jakarta. Sukarno sendiri tampaknya sangat terusik oleh ketegasan Yani dalam masalah-masalah seperti "kekuatan kelima" dan "Nasakomisasi". Menurut Crouch, "Presiden mulai berpikir untuk mengganti Yani dengan panglima angkatan bersenjata yang lebih patuh"; memang "wajar-wajar saja [Sukarno] sering berbicara akan 'mengambil tindakan' menyingkirkan Yani."[79]

Tidak ada bukti kuat yang pernah muncul untuk menegaskan kabar bahwa Dewan Jenderal sedang merencanakan kudeta. Tetapi, mengingat panasnya suhu politik tahun 1965, tampaknya

mungkin saja perwira angkatan bersenjata senior di sekitar Yani, orang-orang yang kelak menjadi korban Gerakan 30 September, terbiasa mengadakan rapat membahas kondisi kancah politik, dan mungkin merencanakan berbagai skenario tindakan. Sukendro, seorang anggota lingkaran dekat penasihat markas besar di sekitar Yani, mengakui hal itu.[80] Menurut Hughes, "sulit untuk memercayai bahwa jenderal-jenderal tingkat tinggi Indonesia tidak memiliki rencana untuk merebut kekuasaan. Dalam suasana masa itu, jenderal-jenderal tersebut akan menjadi naif jika tidak membuat persiapan."[81]

Namun, dalam situasi kacau-balau masa itu, persepsi sering kali lebih penting ketimbang realitas. Tidak diragukan bahwa, terlepas dari ada tidaknya Dewan Jenderal, para pemimpin PKI berpikir bahwa Dewan Jenderal memang ada, sebagaimana partai ini menyadari bahwa eksistensi Dewan Jenderal menandai langkah cepat dan sengit melawan kaum komunis. PKI sendiri mulai membuat rencana serius untuk mencegah kemungkinan mengerikan ini. Pada saat yang hampir sama, unsur-unsur berpangkat lebih rendah dalam Angkatan Bersenjata mulai menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap perilaku para elite militer di Jakarta: gaya hidup kelas atas mereka, posisi enak mereka di tempat basah, kesibukan mereka dalam proses politik, dan minat mereka yang kurang terhadap apa yang dianggap sebagai nilai dasar Angkatan Bersenjata dan negara. Benturan kepentingan antara dua kelompok ini dengan cepat memunculkan apa yang kelak terkenal sebagai Gerakan 30 September. Upaya awal ini sudah mulai berjalan selama beberapa waktu, terutama melalui usaha Syam Kamaruzzaman, orang kepercayaan pemimpin PKI, D.N. Aidit, yang pada 1965 telah menjalin jaringan kontak antara "Biro Khusus" PKI dengan sejumlah kecil perwira yang terutama berada di Jawa Tengah, juga di Jawa Timur. Kekhawatiran terhadap niat Angkatan Darat, ditambah kekhawatiran terhadap kesehatan dan umur patronnya, Sukarno, yang pernah jatuh pingsan sesaat pada 5 Agustus, adalah motif yang menggerakkan unsur pimpinan PKI

untuk mencari cara praktis memadukan kepentingan mereka dengan berbagai kelompok Angkatan Bersenjata, mulai dari perwira yunior yang tidak puas di Jawa Tengah hingga kaum loyalis Sukarno di Angkatan Udara. Perpaduan kepentingan ini bertujuan menangkal apa yang mereka anggap sebagai kecenderungan serius angkatan bersenjata untuk lebih dahulu menyerang Sukarno; serangan yang terutama ditujukan untuk menghancurkan PKI.

Sementara itu, dalam kapasitasnya di Kostrad, Suharto telah ditunjuk sebagai perwira penanggung jawab perayaan besar—untuk menandingi perayaan ulang tahun ke-45 PKI yang diadakan sebelumnya pada bulan Mei—yang direncanakan untuk memperingati Hari Angkatan Bersenjata 5 Oktober. Perayaan ini kemudian tidak pernah terjadi.[]

5 Usaha Kudeta

Pada dini hari 30 September 1965, Suharto, kala itu Panglima Kostrad, sedang sibuk menginspeksi pasukan yang dia bawa dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, yang berlatih di stadion Senayan untuk kepentingan baris-berbaris pada Hari Angkatan Bersenjata tanggal 5 Oktober. Malam harinya, dari sekitar pukul 9 hingga seterusnya, Suharto menemani sang istri menunggui anak mereka yang berusia tiga tahun, Tommy, yang sakit karena dua hari sebelumnya tersiram air sup mendidih di rumah, sehingga harus dibawa ke rumah sakit Gatot Subroto untuk dirawat.[1] Sekitar pukul 10 malam, Suharto menerima kunjungan teman lama, Kolonel Abdul Latief, panglima Brigade Infantri I dari Komando Daerah Militer Jakarta, yang mampir membesuk Tommy. Sekitar tengah malam, menurut Ibu Tien, dia meminta Suharto pulang karena Mamiek, putri mereka yang berusia 1 tahun, sendirian di rumah hanya ditemani seorang pembantu.[2] Suharto segera pulang dan langsung pergi tidur.

Dia terbangun sekitar pukul 4.30 karena kunjungan seorang kameramen televisi bernama Hamid Syamsuddin yang melapor telah mendengar penembakan di wilayah kota. Suharto kelak

mengenang bahwa dia "belum berpikir panjang waktu itu."[3] Setengah jam kemudian, tetangganya Mashuri, ketua RT, bertamu mengabarkan hal serupa, sehingga Suharto "mulailah ... berpikir agak panjang."[4] Sebelum pukul 6 pagi, Suharto mendengar kabar bahwa beberapa perwira tinggi angkatan darat telah diculik. Dia langsung berpakaian dinas. Pada saat yang hampir sama, Letnan Kolonel Sujiman, utusan dari pimpinan Garnisun Militer Jakarta, dan Mayor Jenderal Umar Wirahadikusumah, datang ke rumah Suharto untuk melaporkan adanya pasukan tak dikenal yang sedang bergerak di bagian pusat kota dekat Monumen Nasional dan Istana Merdeka. Kemungkinan besar Umar memberi informasi kepada Suharto tentang identitas jenderal-jenderal yang diculik.

Suharto segera mengirim pesan kepada Umar lewat Sujiman bahwa dia sedang dalam perjalanan ke markas Kostrad yang terletak di ujung utara Jalan Merdeka Timur. Seraya mulai menyadari adanya kekosongan besar dalam jajaran kepemimpinan angkatan darat dengan ditangkapnya banyak jenderal, Suharto "menyadari Angkatan Darat sedang dalam bahaya dan saya memutuskan untuk mengambil alih tampuk komando angkatan darat."[5] Untuk itu, Suharto melakukan praktik, yang kini umum, sebagai wakil sementara Yani jika beliau tidak ada. Setelah memberi tahu keputusan ini kepada Umar, Suharto memutuskan untuk mengendarai sendiri Toyota Jeepnya ke markas Kostrad dengan berpakaian dinas. Dalam perjalanan, dia melihat banyak pasukan di sekitar Monumen Nasional di Lapangan Merdeka, dekat markas Kostrad. Pada saat dia tiba—perjalanan itu paling hanya memakan watu lima belas menit—dia berulang kali diberitahukan bahwa Sukarno tidak ada di istana dan sedang dalam perjalanan ke bandara Halim. Saat itu pukul 7 pagi kurang sedikit.

Pukul 7 lewat sedikit, dalam acara berita pagi, Radio Republik Indonesia (RRI) menyiarkan berita mengenai kegiatan sebuah kelompok yang menyebut dirinya sebagai "Gerakan 30 September". Berita ini mengungkap bahwa pasukan di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung, komandan batalion Resimen

Cakrabirawa yang bertugas sebagai pasukan pengawal istana, telah mengambil langkah-langkah untuk menggagalkan usaha kudeta oleh "Dewan Jenderal" yang konon disponsori CIA. Tindakan Untung adalah "semata-mata satu gerakan dalam Angkatan Darat yang diarahkan pada Dewan Jenderal."[6] Berita ini selanjutnya menyebutkan bahwa jenderal-jenderal ini beserta para pengikut mereka "telah mengabaikan rakyat dan malah hidup mewah dan bersenang-senang di atas penderitaan rakyat, menghina wanita kita, dan menghambur-hamburkan uang negara." Berita ini, Suharto kelak mengenang, segera memberinya "firasat. Lagi pula tahu siapa itu Letkol. Untung. Saya ingat, dia seorang yang dekat, rapat dengan PKI, malahan pernah jadi anak didik tokoh PKI, Alimin."[7] Firasat apa pun yang dialami Suharto mungkin diperkuat oleh fakta bahwa siaran pertama Gerakan itu tidak mengklaim telah memperoleh dukungan Sukarno.

MENGAMBIL TANGGUNG JAWAB

Pada saat ini, Suharto sudah ditemani di Kostrad oleh para stafnya, termasuk Ali Murtopo dan Yoga Sugama. Seperti Suharto, Yoga dan mungkin juga Ali Murtopo mengenal Untung ketika mereka bertugas di Jawa Tengah. Untung adalah anggota RTP (Resimen Tempur) II yang dipimpin Yoga di Sumatra Barat pada 1959. Suharto kelak mengingat bahwa ketika dia tiba di Kostrad, "dari semua staf perwira saya, tak satu pun yang mengetahui masalahnya."[8] Dalam situasi yang pasti kacau dan membingungkan ini, Suharto memutuskan untuk memberlakukan darurat militer. Karena yakin tidak ada perwira Kostrad yang memerintahkan pasukan untuk bergerak ke pusat kota, Suharto mengutus Ali Murtopo dan Brigadir Jenderal Sabirin Mochtar, mantan komandan batalion Brawijaya, untuk menghubungi para komandan yang membawahi kira-kira 2.000 pasukan di sekitar monumen, kini disebut sebagai batalion 454 (Jawa Tengah) dan 530 (Jawa Timur), yang berada di Jakarta atas perintah Suharto untuk perayaan ke-

13 Hari Angkatan Bersenjata. Utusan-utusan ini membawa perintah bagi para komandan batalion agar melapor kepada Suharto. Pada pukul 8.30 pagi, Ali dan Sabirin kembali melapor bahwa komandan yang bersangkutan tidak berada di tengah pasukan mereka, melainkan berada di dalam istana. Suharto segera memerintahkan Ali dan Sabirin untuk meminta wakil komandan agar melapor kepadanya. Mereka tiba di Kostrad sekitar jam 9 pagi dan menjelaskan kepada Suharto bahwa misi mereka adalah untuk melindungi Presiden dari kudeta Dewan Jenderal. Suharto langsung memutuskan untuk mengambil langkah tegas. Dia menasihati para perwira itu bahwa tindakan mereka adalah "pemberontakan" dan dia akan menentangnya. Dia memberi mereka waktu hingga pukul 6 sore untuk menyerah kepada Kostrad atau menghadapi serangan dari pasukannya.

Menurut Crouch, keinginan Suharto untuk lebih dahulu membujuk ketimbang langsung unjuk kekuatan adalah hasil dari kalkulasi matang sejumlah faktor: fakta bahwa Suharto tidak ingin memulai operasi militer melawan pasukan angkatan lain, terlebih di tengah-tengah kota; kemungkinan reaksi dari Angkatan Udara; dan fakta bahwa Sukarno ada di tengah-tengah para pemimpin Gerakan.[9] Pandangan seperti itu mungkin membuat Suharto dianggap memiliki terlalu banyak kewaspadaan taktis, belum lagi pengetahuan akan situasi riil, pada titik ini. Tampaknya pada saat itu—yaitu pada pagi-pagi buta—Suharto bertindak seperti itu karena dia tidak tahu banyak tentang situasinya, dan sifatnya yang cenderung hati-hati memaksanya untuk tidak bertindak tegas sebelum mengetahui kecenderungan dan pikiran dari pasukan yang ia hadapi dan, terutama, sebelum mengetahui perintah apa yang diberikan kepada mereka dan apa sebab perintah itu diberikan. Hingga titik ini, Suharto lebih memilih melakukan gertakan—gabungan dari ancaman dingin dan bujukan—ketimbang dengan kekerasan.

Sesudah membubarkan wakil komandan batalion, Suharto langsung menyerukan rapat staf sekitar pukul 9.15 pagi, dihadiri

oleh Yoga Sugama (asisten, intelijen), Kolonel Wahono (asisten, operasi), Kolonel Joko Basuki (asisten IV), Kolonel Sruhardoyo (asisten III), dan kepala stafnya, Brigadir Jenderal Achmad Wiranatakusumah. Suharto, menurut dia kelak, menjelaskan bahwa dia sudah lama mengenal Untung, "yang menjadi murid seorang tokoh PKI, Alimin, sejak 1945"; tidak ada yang namanya dewan jenderal. Suharto kemudian menuturkan pandangannya tentang apa yang terjadi kala itu, "Dalam pandangan saya, ini bukanlah gerakan untuk melawan apa yang dinamakan Dewan Jenderal, melainkan sesuatu yang berbeda. Mereka telah mengorganisasi usaha untuk mengambil alih kekuasaan negara dengan kekerasan. Dan PKI jelas berada di belakangnya." Suharto melanjutkan bahwa Gerakan harus ditentang bukan hanya karena ia menyerang para jenderal, namun juga karena dalam Gerakan ini "yang terancam adalah negara dan Pancasila."[10] Tanpa keraguan, tampaknya—mungkin cerminan solidaritas kelompok yang telah dibangun Suharto di sekitarnya—semua pembantunya setuju untuk membantunya melawan Gerakan. Rapat dibubarkan sekitar pukul 10 pagi.

Para jenderal yang dibidik Gerakan 30 September adalah Yani (menteri/panglima Angkatan Bersenjata), Nasution (menteri/korrdinator pertahanan dan keamanan), dan anggota utama Staf Umum (SUAD): Major Jenderal Suprapto (wakil II, administrasi), Mayor Jenderal Haryono (wakil III, hubungan masyarakat dan keuangan), Mayor Jenderal S. Parman (asisten 1, intelijen), Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan (asisten IV, logistik), dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo (jaksa umum Angkatan Darat). Tampaknya para penyerang itu, umumnya gabungan dari pasukan Brigade I Komando daerah militer Jakarta (Kodam V/Jaya) pimpinan Latief dan pasukan Cakrabirawa Untung, memberitahu para jenderal tersebut bahwa mereka diminta Presiden datang ke istana. Sebagian besar dari para jenderal itu menolak memercayai cerita ini, dan ada yang melawan. Yani, Haryono, dan Panjaitan dibunuh di rumah mereka; yang lainnya ditangkap hidup-hidup dan dibawa

ke pusat Gerakan di kompleks bandara Halim, beberapa kilometer di tenggara Jakarta. Tetapi, Nasution berhasil meloloskan diri dengan melompati pagar rumahnya dan bersembunyi di kebun kediaman duta besar Irak di sebelah rumahnya. Para penyerang menangkap salah seorang kepercayaan Nasution, Letnan Pierre Tendean, dan membawanya karena mereka salah mengira ia adalah Nasution, mungkin karena tekanan yang ada ketika itu. Putri Nasution, Ade Irma Suryani, terluka berat oleh tembakan pada saat penyergapan. Ketika sudah di Halim, tiga jenderal yang masih hidup, bersama dengan Tendean yang bernasib sial, dibunuh sekitar pukul 6.30.

Tetapi, pada pagi hari, Suharto masih belum mengetahui nasib para jenderal yang tertangkap. Dia hanya mengetahui ada enam jenderal yang diculik, Nasution telah mengundurkan diri, dan Sukarno telah pergi ke Halim yang kini menjadi pusat kekuatan pemberontak. Karena sudah memutuskan mengambil sikap oposisi tegas terhadap Gerakan 30 September, Suharto melanjutkan dengan mengorganisasi kekuatannya dan merancang strategi, yaitu menggunakan fasilitas gelombang-pendek di markas Kostrad. Suharto mengirim utusan dalam mobil anti peluru kepada Kolonel Sarwo Edhie, panglima pasukan komando Angkatan Darat (RPKAD) yang bermarkas di Cijantung, selatan Jakarta. Tetapi, Suharto kesulitan menarik Sarwo. Suharto juga menghubungi perwira pimpinan instansi militer lain. Karena tidak mampu menghubungi Marsekal Udara Omar Dhani, Suharto berbicara dengan Komodor Udara Leo Wattimena (wakil angkatan udara, bidang operasi). Menurut catatan semi-resmi angkatan udara, "Ketika [Suharto] akhirnya menghubungi Komodor Udara Leo Wattimena di bandara Halim, ia mendapat pernyataan yang tidak jelas."[11] Pesan Suharto kepada para perwira pimpinan itu jelas: ada rencana melawan negara, dan dia ingin melawannya dengan segala kekuatan yang ada. Hingga titik ini, Suharto untuk sementara sudah memegang komando Angkatan Darat, dan dia ingin menjalin kerja sama dengan angkatan lain untuk menarik kembali

pasukan mereka ke barak dan hanya boleh aktif kembali di bawah perintah langsung Kostrad. Semua perwira meyakinkan Suharto bahwa ia mendapat dukungan mereka, meski Wattimena "ingin bertemu dengan saya di Kostrad untuk mendapatkan penjelasan dan mengetahui latar belakang gerakan yang terjadi."[12]

Keberhasilan Suharto dalam meyakinkan para pemimpin angkatan untuk memberikan dukungan mereka saat situasi kacau dan genting adalah bukti nyata dari bukan hanya kemampuan Suharto melakukan negosiasi persuasif, melainkan juga bukti betapa Suharto begitu dihormati sebagai perwira lapangan dan karena posisinya sebagai panglima Kostrad. Untuk pastinya, dia tidak memiliki saingan berarti atas posisi yang diklaimnya sendiri; dengan belum diketahuinya keberadaan dan kondisi Nasution, perwira-perwira yang setingkat dengannya adalah perwira SUAD Mursyid (wakil I) dan Mayor Jenderal Pranoto Reksosamudro (asisten III, personel), keduanya dikenal Sukarnois. Akhirnya, Suharto juga merancang perintah yang ditujukan bagi para komandan daerah, berisi pemberitahuan tentang peristiwa di pagi hari itu dan arahan bahwa pergerakan pasukan harus dikoordinasi melalui Kostrad.

Setelah menghubungi basis pasukan Kostrad yang bertempat di Senayan untuk mencari tahu unit mana yang hilang, Suharto mampu memetakan kekuatan-kekuatan yang menentangnya. Demikian halnya, Suharto dapat mengandalkan pasukan yang loyalitasnya dia atur dari Jakarta. Terlepas dari pasukan garnisun Jakarta yang setia kepada Latief, Suharto mengantungi kekuatan Umar, belum lagi pasukan Kostrad yang ada di Jakarta untuk peringatan Hari Angkatan Bersenjata dan belum membantu pasukan Untung, terutama Batalion 328 parakomando Siliwangi dan Batalion Kavaleri II. Ketika Sarwo Edhie muncul—menurut Suharto, pasukan Sarwo datang ke markas Kostrad sekitar pukul 11 pagi untuk menerima perintah Suharto agar mengambil alih RRI dan fasilitas telekomunikasi—berarti Suharto pun sudah mengantungi RPKAD.[13] Suharto kini mendapat dukungan berlimpah yang melebihi

jumlah pasukan yang setia pada Gerakan 30 September, yang tidak memiliki persenjataan. Melalui Umar, Suharto juga mengetahui bahwa Suparjo sedang ada di istana mencari Sukarno—ini adalah kejutan bagi Suharto karena Suparjo seharusnya ada di Kalimantan mengomandani Kopur IV—dan dia mungkin menduga Suparjo terlibat gerakan kudeta.

Bagaimana dengan Sukarno? Malam sebelumnya, Sukarno berbicara di hadapan para delegasi pada Konferensi Nasional mengenai Teknologi di stadion olahraga tertutup Senayan. Setelah itu, Sukarno pergi ke rumah Ratna Sari Dewi, istri ketiganya, di Wisma Yaso, Jalan Gatot Subroto. Sekitar pukul 6.30, tampaknya telah diberi tahu tentang penembakan di rumah beberapa jenderal, Sukarno meninggalkan rumah Dewi dan berusaha pergi ke istana; dan tampaknya urung akibat berita tentang pasukan di Lapangan Merdeka, Sukarno pun pergi ke rumah istri keempatnya, Haryati, di daerah pinggiran Grogol. Kemudian, konon sudah diberi tahu tentang lolosnya Nasution, Sukarno bertekad pergi ke Halim di mana sebuah pesawat sudah menunggu dalam keadaan darurat, dan tiba di istana pukul 9.30.[14]

Sekitar tengah hari, RRI menyiarkan dekrit kelompok Untung yang mengumumkan terbentuknya "Dewan Revolusioner" guna "menyusun sumber segala otoritas" di Republik hingga terselenggaranya pemilu.[15] Sementara itu, kabinet sudah berstatus demisioner, sehingga menteri hanya bertugas mengatur kegiatan sehari-hari. Tidak disebutkan peran yang mungkin dimainkan Sukarno dalam rencana tatanan baru ini. Lalu, menyusul lagi dua keputusan Untung. Yang pertama mengumumkan Dewan Revolusioner. Anehnya, daftar nama ini, yang tidak memasukkan Suharto dan Sukarno, tampaknya dibuat tergesa-gesa (sebagian besar nama ini tidak mengetahui penunjukan mereka) dan didominasi oleh orang-orang Jawa dan Sunda, termasuk Umar yang kala itu sedang sibuk menghancurkan Gerakan, dan juga jenderal-jenderal antikomunis seperti Amirmachmud. Keputusan kedua adalah menghapus semua pangkat di atas letnan kolonel—pangkat

Untung—dan memberi promosi satu tingkat kepada semua NCO dan prajurit yang mendukung Gerakan, dan bahkan memberi promosi dua tingkat bagi mereka yang turut serta dalam Gerakan. Pernyataan atas nama Sukarno disiarkan sekitar pukul 1.30 pagi, mengabarkan bahwa Sukarno dalam keadaan sehat walafiat dan tetap mengendalikan negara dan revolusi.

Pengumuman keberadaan dan susunan Dewan Revolusioner pasti memiliki efek mendalam bagi Suharto yang saat itu masih berupaya memahami peristiwa yang ada dan masih belum yakin akan keberadaan dan nasib Presiden. Memang, menurut satu sumber, Suharto menghubungi Sultan Yogyakarta untuk membahas kemungkinan mendirikan pemerintahan-tandingan di bawah sultan, satu jalan yang tidak dianjurkan sultan untuk dilakukan Suharto.[16] Kegagalan terus-menerus Gerakan itu dalam memberi bukti nyata bahwa Presiden mendukung tindakannya—sinyal kuat bahwa Sukarno sudah mengambil jarak dari konspirasi dan agenda politik ini—semakin memperkuat tekad Suharto untuk menentangnya.

SUKARNO MENOLAK, SUHARTO BERKUASA

Di Halim, ketika diberi informasi oleh Suparjo selama satu jam saat tiba, Sukarno sedang menimbang-nimbang tanggung jawabnya, dan pilihan yang tersedia baginya. Karena sudah mengetahui lolosnya Nasution, dan sudah menerima laporan komandan Cakrabirawa Sabur bahwa Panjaitan telah terbunuh dan ditemukan noda darah di rumah Yani, Sukarno langsung memerintahkan Suparjo untuk menghentikan semua tindak kekerasan. Di sela-sela waktu istirahatnya, Sukarno mulai mencoba mencari nama yang cocok untuk menggantikan Yani sebagai panglima Angkatan Bersenjata. Nama Suharto (begitu juga Mursyid dan Basuki Rachmat) masuk ke dalam daftar nama yang diajukan kepada Sukarno oleh sekelompok menteri senior dan perwira angkatan yang cepat berkumpul di Halim. Tetapi, Sukarno—sama seperti pada peristiwa 3 Juli 1946—berpendapat bahwa Suharto itu "terlalu keras kepala."[17]

Suparjo, yang dibolehkan ikut dalam pertemuan, awalnya mengajukan Pranoto atau Basuki Rachmat, namun setelah berkonsultasi dengan Untung dan pemimpin Gerakan lain, ia lebih memilih Pranoto. Akhirnya, sekitar pukul 4 sore, atas inisiatif sendiri, Sukarno memutuskan untuk mengambil alih komando dan menunjuk pejabat sementara angkatan darat untuk urusan harian; pilihannya jatuh pada Pranoto Reksosamudro.

Penolakan Sukarno untuk memilih Suharto mungkin karena Sukarno mengetahui bahwa Suharto telah mengendalikan keadaan di pusat kota, sehingga Sukarno merasa tidak perlu memberi segala bentuk dukungan dalam situasi seperti itu sebelum gambarannya jelas. Khususnya pada saat seperti ini, Sukarno menginginkan seseorang yang senior, dihormati, dan relatif toleran, seseorang yang berseberangan dengan Nasution, seseorang yang bersimpati pada pandangan ideologis dan politik Sukarno, seseorang yang tidak mati-matian anti-PKI, dan seseorang yang bisa mengatur pasukan Diponegoro di Jawa Tengah, di mana satu corak kedaerahan Gerakan 30 September telah muncul di pertengahan hari. Pranoto adalah orang yang memenuhi semua kriteria itu. Selain itu, Sukarno hampir dapat dipastikan tahu tentang prasangka buruk yang berkembang antara Pranoto dan Suharto, dan mungkin merancang penunjukan itu untuk menorehkan pengaruh khasnya pada Angkatan Darat dan untuk memberi tanda bahwa dia jelas-jelas menolak Suharto—peringatan agar Suharto sadar akan posisinya dan tidak berbuat macam-macam.

Sementara itu, di rumah, Tien, bersama Tommy, dan ditemani oleh Probosutejo (kembali dari Medan dengan "sumber dayanya ... habis" dan tinggal dalam satu kamar dengan dua saudara Tien di rumah Suharto) dan adik Suharto ADC Wahyudi, telah meninggalkan rumah sakit pada siang hari karena mendengar berita tentang kejadian misterius di kota. Tien tiba di rumah dan mendapat pesan dari Suharto agar beserta anak-anak pindah ke kediaman Wahyudi di daerah pinggiran Kebayoran Baru, tempat Tien menginap untuk semalam.[18]

Rapat staf pukul 12.30 di markas Kostrad memutuskan untuk menyerang dan mengambil alih bandara Halim. Tidak lama setelah itu, menurut penuturan Suharto yang, anehnya, tidak menganggap penting peristiwa siang itu, ajudan Sukarno, Kolonel Bambang Wijanarko, tiba dari Halim. Dia menginformasikan Suharto bahwa Sukarno dalam keadaan sehat walafiat, serta memberitahu lokasi persis Sukarno di Halim. Suharto meminta Wijanarko untuk memastikan Sukarno pergi dari sana sebelum tengah malam karena bandara itu akan diserang.[19] Tetapi, penuturan-penuturan sahih lainnya menyatakan Wijanarko tiba siang menjelang sore; lebih penting lagi, berdasarkan penuturan tersebut, kedatangannya bukan sekadar melapor bahwa Presiden dalam keadaan sehat, tetapi juga meminta Pranoto, kala itu ada di markas Kostrad, melapor kepada Sukarno di Halim sehubungan dengan tujuan Sukarno menempatkan Pranoto sebagai penanggung jawab urusan sehari-hari Angkatan Darat.[20] Suharto—sebagaimana kita lihat sebelumnya, dia bukanlah teman Pranoto—menolak mengizinkan Pranoto untuk pergi ke Halim; Suharto juga menolak mengizinkan Umar, yang sebelumnya telah diperintahkan Sukarno agar pergi ke Halim, untuk pergi ke tempat yang telah diduduki itu.

Alasan Suharto cukup masuk akal: dia tidak ingin kehilangan lebih banyak jenderal, dan tidak ingin Halim tetap di tangan musuh. Responsnya terhadap Wijanarko—"jelas-jelas tindakan pembangkangan," menurut Crouch[21]—adalah titik balik penting pada hari itu. Suharto memutuskan untuk mengedepankan pertimbangannya sendiri alih-alih keinginan presidennya. Tentu saja, dia membela diri bahwa dia tidak tahu pasti hubungan Sukarno dengan para pemberontak atau tidak tahu seberapa bebas Sukarno dalam bertindak. Sementara itu, pihak para pemberontak pasti tahu bahwa mereka telah kalah dalam permainan gertak-dan-balas-menggertak yang berbahaya ini; penolakan Suharto untuk menuruti keinginan Sukarno menunjuk Pranoto mungkin berasal dari keyakinan Suharto bahwa dia memegang kartu truf militer dan siap memainkannya.

Pada siang menjelang senja, keadaan mulai berpihak kepada Suharto, ia makin yakin akan keputusannya mengambil alih kendali. Perintah Harian Omar Dhani—yang dikeluarkan pada pertengahan pagi, namun disiarkan hanya pada pertengahan siang—bahwa Gerakan 30 September telah melakukan "pembersihan dalam tubuh" Angkatan Darat untuk melindungi dan menyelamatkan revolusi dan Pemimpin Besar Revolusi dari serangan CIA, menegaskan keterlibatan Angkatan Udara.[22] Tidak lama setelah itu, Suharto menerima kabar bahwa Batalion 530 telah meninggalkan posnya di lapangan pusat dan menyerahkan diri ke Kostrad. Tampaknya Mayor Jenderal Basuki Rachmat, komandan Divisi Brawijaya, bersama dengan perwira senior lainnya, mampu membujuk batalion Brawijaya untuk menyerahkan diri kepada Suharto sekitar pukul 4 sore. Tampaknya, faktor penting yang membuat pasukan-pasukan itu menyerah adalah gagalnya kelompok kudeta untuk mengumpulkan makanan dan minuman bagi pasukan-pasukan itu. Sebaliknya, Batalion 454 Diponegoro terus melanjutkan pemberontakan, terlepas dari upaya Ali Murtopo membujuknya. Batalion itu memutuskan untuk meninggalkan daerah istana dan pergi ke Halim sekitar pukul 6 sore. Kepergian Batalion itu secara damai tidak diragukan lagi melegakan Suharto yang kini mengendalikan titik-titik penting kota. Ketika peristiwa-peristiwa ini terjadi, sekitar pukul 5.30 sore Nasution, yang sedang lelah dan tertekan memikirkan putrinya yang terluka, muncul di markas Kostrad ("atas permintaan saya," menurut Suharto).[23] Nasution meninggalkan kebun duta besar Irak setelah senja dan menghabiskan separo hari di tempat persembunyian dekat markas besarnya. Terlepas dari usaha tak pasti untuk menegaskan otoritasnya dan, tampaknya, untuk menasihati Suharto tentang bagaimana sebaiknya merespons penunjukan Pranoto oleh Sukarno, Nasution tidak diacuhkan oleh Suharto dan kelompok anti-kudetanya.

Tetapi, gaya Suharto tetap gaya yang waspada dan penuh perhitungan. Khawatir bahwa serangan siang hari yang dipercepat terhadap RRI dan gedung Telekomunikasi akan menghasilkan

"banyak korban", Suharto memerintahkan Sarwo Edhie untuk menunda rencana terhadap fasilitas-fasilitas tersebut.[24] Tidak lama kemudian, Sarwo juga diperintahkan bersiap-siap untuk satu penyerangan ke Halim. Tidak lama setelah malam tiba, rencana untuk mengambil alih RRI dan fasilitas Telekomunikasi di sisi selatan dan barat lapangan dimulai, sebuah tugas yang dilaksanakan secepat mungkin tanpa melepaskan satu tembakan pun dan sesuai dengan jadwal Suharto. Suharto kini mengendalikan semua fasilitas utama di pusat Jakarta, dan semua kekuatan musuh menyerah atau tercerai-berai. Ketika RRI jatuh ke tangannya, radio itu segera menyiarkan pernyataan yang telah Suharto rekam sebelumnya pada pukul 3 sore. Pernyataan itu singkat dan langsung ke inti permasalahan, mengulangi segala peristiwa hari itu yang berlangsung begitu cepat: penculikan jenderal, klaim licik "kontrarevolusioner" dari Gerakan 30 September, fakta bahwa Presiden sehat walafiat, solidnya Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Polisi di belakang Suharto, tindakannya memegang kendali sementara, dan tekadnya, dengan dukungan rakyat, untuk menghancurkan Gerakan.[25]

Sukarno, sudah mengetahui niat Suharto dari Bambang Wijanarko, pergi ke Istana Bogor pada senja hari menjelang malam, mungkin karena telah diperingatkan Suharto untuk tidak pindah ke Jawa Tengah. Sekitar tengah malam, atau mungkin sedikit lebih dini, dan senang karena Sukarno telah meninggalkan Halim—"Dia menyadari akibat buruk yang timbul jika sesuatu terjadi pada Presiden, yang pertanggungjawabannya kelak mungkin bisa tertuju kepada dirinya"[26]—Suharto memerintahkan pasukan Sarwo Edhie, gabungan dari RPKAD dan parakomando Siliwangi, untuk menyerang bandara Halim. Bertindak karena khawatir akan adanya serangan udara dari Halim terhadap ibukota, dan hanya dengan kerugian dan kerusakan kecil, sekitar pukul 6 malam pada tanggal 2 Oktober, pasukan Sarwo berusaha menduduki basis kelompok kudeta yang kini sudah nyaris seluruhnya ditinggalkan. Pada tanggal 1 Oktober sekitar pukul 10 malam, Suharto mengeluarkan satu pernyataan yang jelas-jelas mengutuk Gerakan dan

menegaskan bahwa perwira senior yang termasuk dalam Dewan Revolusioner sebetulnya ditunjuk tanpa sepengetahuan mereka. Suharto juga mengambil langkah-langkah untuk menangkal perintah kelompok pemberontak yang kemudian bertempat di Semarang, dan bahkan sempat menandatangani perintah untuk memecat Untung dan Suparjo secara tidak hormat. Sebelum tengah malam, Suharto untuk sementara waktu memindahkan markas Kostrad ke Senayan, "karena ada informasi, bahwa AURI akan melakukan pengeboman" terhadap markas besar.[27] Kini, Suharto mulai mengendalikan situasi di ibukota, unit angkatan darat mulai menyisir kota untuk mencari anggota komunis, dan surat kabar berhaluan kiri dibredel.

Di Jawa Tengah, Gerakan 30 September juga melancarkan serangan *preemptive*. Sekitar pukul 1 pagi pada 1 Oktober, pengumuman radio menyatakan bahwa kepala intelejensi Divisi Diponegoro, Kolonel Suherman, ditunjuk untuk mengepalai Gerakan di Jawa Tengah dan bahwa panglima Divisi, Brigadir Jenderal Suryosumpeno, diganti oleh Letnan Kolonel Usman Sastrodibroto. Suryosumpeno, yang sebelumnya pergi ke Salatiga, yaitu daerah yang didapatinya telah dikendalikan Gerakan, kembali ke Semarang dan mendapati para pemberontak telah memegang kendali pula di sana. Ia kemudian berlindung di Magelang, yang bebas dari cengkeraman pemberontak, dan menggunakannya sebagai basis untuk melancarkan serangan balik terhadap markas pemberontak di Semarang; tujuannya tercapai tanpa kekerasan pada pagi hari 2 Oktober. Di Yogya, Gerakan menangkap Kolonel Katamso, komandan Korem 72 dan kepala stafnya, Letnan Kolonel Sugiyono, kemudian membunuh mereka pada dini hari 2 Oktober. Sugiyono adalah pembantu Suharto pada masa Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogya, yaitu ketika ia menjadi bawahan Suharto di Brigade X, Yogya dan setelah revolusi di Brigade O. Di belahan lain di Jawa Tengah, sejumlah perwira lokal digantikan oleh perwira yang bersimpati pada Gerakan; memang, pada senja hari 1 Oktober, dari tujuh batalion infantri di Jawa Tengah, ada lima

yang berada di bawah komando pemberontak."[28] Tetapi, Gerakan di Jawa Tengah, sudah mencapai puncaknya pada malam 1 Oktober, persis saat rencananya di Jakarta gagal, lenyap nyaris secepat rekannya di Jakarta dan secara efektif telah mati pada 3 Oktober. Tetapi, meskipun Suryosumpeno kembali memegang kendali pada 2 Oktober, situasi masih sangat mencekam dan belum jelas siapa di pihak siapa karena "keseimbangan rapuh atas kesetiaan di dalam komandonya."[29] Namun, di luar Jakarta dan Jawa Tengah, hampir tidak ada letupan serupa.

POLITIK YANG TEGANG

Pada 2 Oktober, sekitar pukul 11 pagi, Suharto mengetahui dari radio tentang keinginan Presiden untuk bertemu dirinya pada satu rapat panglima angkatan; mungkin naluri bertahan hidup Sukarno yang tajam membuat ia sadar akan perlunya menegaskan otoritasnya—terutama terhadap Angkatan Darat—ketimbang tetap pasif menghadapi berbagai peristiwa. Suharto menunda kepergian, berbicara dengan Umar dan menunggu laporan Sarwo Edhie mengenai operasinya; menurut McDonald, "gerak-gerik awal Suharto—dari serangkaian gerak-geriknya yang telah dipelajari—mengisyaratkan bahwa dia terlalu sibuk untuk segera datang."[30] Akhirnya, dia pergi ke Bogor mengendarai jeep, dengan dikawal oleh para pengawal bersenjata, dan tiba sekitar pukul 2 pagi. Di sanalah terjadi diskusi tegang dan panjang dengan Sukarno, dihadiri pula oleh Leimena, Chaerul Saleh, Pranoto, Mursyid, Leo Wattimena, Omar Dhani, dan panglima angkatan lain. Sukarno berusaha mereduksi signifikansi peristiwa sehari sebelumnya; "kejadian seperti ini, kejadian biasa dalam revolusi," Suharto menuturkan pernyataan Sukarno. Sementara itu, Suharto sendiri berusaha mendesakkan keterlibatan Angkatan Udara dalam peristiwa 1 Oktober, atau menentang usaha Sukarno untuk membersihkan Angkatan Udara dari kesalahan.[31] Suharto, berusaha tetap tenang dalam situasi tegang, menolak keteguhan Sukarno untuk menempatkan komando

angkatan darat ke tangan Pranoto. Suharto juga menawarkan untuk menyerahkan jabatan pemimpin sementara Angkatan Darat yang dia pegang pada 1 Oktober, dan tidak perlu lagi bertanggung jawab atas pemeliharaan keamanan.

Keteguhan Suharto berujung pada pelimpahan wewenang oleh Sukarno yang khawatir akan akibat dari tawaran semacam itu pada Angkatan Darat yang sudah sedemikian cepat dikerahkan Suharto. Jadi, Suharto akan tetap bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban, meski Pranoto tetap sebagai pejabat sehari-hari, dan kepemimpinan Angkatan Darat secara formal tetap berada di tangan Sukarno. Suharto juga bersikeras agar Presiden memaklumatkan tanggung jawab resminya secara luas melalui siaran radio yang disiarkan sekitar pukul 1.30 keesokan paginya. Suharto sendiri membuat siaran lanjutan pada 3 Oktober yang mengulangi substansi pesan Sukarno, yaitu mengakui bahwa kepemimpinan Angkatan Darat ada di tangan Presiden yang bekerja sama dengan Suharto untuk memulihkan keamanan. Penerimaan Suharto yang ragu-ragu terhadap keadaan ini mungkin adalah tanda bahwa ia tidak mau menantang presidennya lebih lanjut pada saat ini, dan tanda bahwa ia tidak yakin akan kelanjutan drama politik yang terjadi. Ketika kembali, Suharto ditemui oleh Sarwo Edhie, yang menyertai Suharto ke Bogor dan ikut bertemu dengan Sukarno. Sarwo melaporkan bahwa Sukarno telah mengeluarkan perintah untuk menghentikan penembakan, satu perintah yang dibebankan kepada Suparjo.

Pertemuan di Bogor menandai perang panjang, penuh ketegangan, dan kompleks, antara Presiden yang bertekad meminimalisasi peristiwa 1 Oktober dan Angkatan Darat yang secara efektif di bawah kendali Suharto—yang memandang peristiwa-peristiwa pada 1 Oktober sebagai momen penting yang telah mengubah wajah politik bangsa. Meski terasa ada nuansa kompromi, pertemuan itu sebenarnya adalah kemenangan bagi Suharto. Suharto tidak bisa lagi menentang penunjukan Pranoto sebagaimana ia lakukan sehari sebelumnya dengan alasan tidak tahu

persis tentang kebebasan Sukarno dalam bertindak di Halim. Tetapi, Suharto bersikap tegas dan melawan; dia tahu bahwa kini ia telah mendapat kekuasaan dalam Angkatan Darat dan Sukarno tidak bisa mendepaknya tanpa menimbulkan akibat politik serius; konsesi yang dia desakkan kepada Sukarno sebenarnya adalah sinyal resmi kekuasaannya sekaligus isyarat bahwa kembali ke tatanan lama bukanlah hal yang akan ditoleransi Angkatan Darat. Kemampuan Sukarno dalam menggunakan karisma dan wibawanya telah merosot; dia tidak lagi kebal terhadap serangan Angkatan Darat. Proses membentuk ulang pola politik Indonesia telah dimulai.

JENDERAL-JENDERAL YANG TERBUNUH

Pada senja menjelang malam 3 Oktober, anak buah Suharto mengetahui dari Sukitman, seorang polisi yang ditangkap oleh para pemberontak di luar rumah Panjaitan namun berhasil lolos, mengenai nasib para jenderal. Dikabarkan mayat mereka dibuang ke sumur kering sedalam sepuluh meter yang ditutupi di Lubang Buaya, di daerah pinggiran bandara Halim. Berita ini segera dikabarkan kepada Suharto, yang memerintahkan penjagaan ketat terhadap sumur dan daerah sekitarnya. Pengambilan mayat mulai dilakukan keesokan paginya; Suharto tiba pukul 9 pagi untuk mengawasi kegiatan ini. Dia tidak membuang-buang kesempatan untuk mengeksploitasi prosesi mengerikan ini. Menurut Crouch, "penggalian mayat ... ditunda hingga segerombolan wartawan, reporter, fotografer, dan kameramen televisi berkumpul."[32] Ketika mayat terakhir, yaitu mayat Panjaitan, dibawa ke permukaan sekitar pukul 2 siang lewat sedikit, Suharto secara pribadi blak-blakan menyatakan keterlibatan Angkatan Udara dan PKI. Dia bahkan menjelek-jelekkan usaha Sukarno, dalam siaran pukul 1 pagi hari, untuk membersihkan keterlibatan Angkatan Udara dalam Gerakan 30 September. Pesannya jelas-jelas berani: Suharto akan melakukan segala hal yang dianggap perlu, termasuk menentang Presiden,

untuk membersihkan Pancasila dari orang-orang yang menyerangnya.

Foto-foto yang diambil di lokasi sumur menunjukkan wajah Suharto yang kelam, dengan berseragam loreng dan memakai kacamata hitam (dan bahkan penutup wajah untuk mengurangi bau mayat yang membusuk), dengan bertolak pinggang seraya menerawang. Prosesi suram ini adalah episode traumatis yang, menurut Suharto, membuat air matanya meleleh saat tubuh enam jenderal, termasuk juga tubuh Pierre Tendean (tubuh pertama yang muncul), diangkat ke permukaan. Menurut cerita Suharto, tubuh Suprapto dan Parman diikat bersama, seperti halnya tubuh Yani, Haryono, dan Sutoyo, dan "semua tubuh dalam keadaan rusak akibat penyiksaan." "Saya tidak akan melupakan kejadian ini. Sungguh, saya tidak akan melupakannya," Suharto melanjutkan. Suharto kemudian menukas, "Siapa pula yang bisa melupakan kejadian yang biadab seperti ini?" Penemuan mayat-mayat itu tampaknya membangkitkan ketegasan dalam dirinya, hasrat untuk memastikan bahwa para pelakunya akan diganjar tanpa peduli ongkos politik dan sosialnya. Suharto mulai meragukan versi Sukarno atas kejadian 1 Oktober; apa yang dia telah ketahui kini, dan dengan masuknya laporan intelijen tentang partisipasi kelompok PKI dan Angkatan Udara dalam peristiwa itu, mempertebal tekadnya untuk melakukan tindakan penting. "Sejak menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri apa yang didapat di Lubang Buaya, kegiatan saya yang utama adalah menghancurkan PKI, menumpas perlawanan mereka di mana-mana, di ibukota, di daerah-daerah, dan di pegunungan tempat perlarian mereka." Bagaimanapun, dia tidak ingin melibatkan Angkatan Darat secara langsung dalam konflik semacam itu, kecuali secara terbatas. "Saya lebih suka memberikan bantuan kepada rakyat ... untuk membersihkan daerahnya masing-masing dari benih-benih yang jahat."[33]

Mayat-mayat dipindahkan ke rumah sakit pusat angkatan darat dan kemudian dipindahkan lagi ke markas besar angkatan

darat, di mana Suharto terus berjaga-jaga sepanjang malam; menurut seorang koresponden, "wajahnya yang biasanya ramah tampak penuh amarah."[34] Suharto membatalkan perayaan tanggal 5 Oktober. Dia malah mengatur pemakaman, satu seremoni umum bagi para korban Gerakan 30 September. Di markas besar angkatan darat, pidato pemakaman yang muram, hening, dan menyentuh yang diucapkan Nasution menyuarakan tugas dan perjuangan terus-menerus, serta keadilan, kebenaran, dan kelemahan manusia. Peti mati para jenderal yang terbunuh, masing-masing diangkut dalam mobil antipeluru, diantarkan dalam prosesi militer melewati jalan berangin sepanjang 20 kilometer ke Taman Makam Pahlawan Kalibata di Jakarta selatan. Ribuan orang ikut mengantarkan pada hari yang mendung dan gerimis itu. Suharto memakai pakaian yang sama yang dia pakai sejak pagi 1 Oktober: pakaian loreng dan kacamata hitam. Sukarno sendiri tidak menghadiri pemakaman karena, seperti dituduhkan Suharto kemudian, khawatir akan keamanan dirinya pada peristiwa semacam itu.[35] Tetapi, ketidakhadiran Sukarno jelas disengaja untuk menunjukkan pandangannya bahwa peristiwa 1 Oktober itu tidak terlalu penting; di sisi lain, hal tersebut ternyata mengundang amarah para perwira senior angkatan darat.

Penampilan Suharto pada masa-masa dramatis ini sangat memukau. Kemampuannya untuk melangkah dengan tenang dan penuh pertimbangan hanya bisa dilampaui oleh kemampuannya yang luar biasa dalam menyesuaikan tindakan dengan kepekaan tinggi terhadap konteks drama tersebut. Ada sejumlah contoh visi taktisnya pada masa ini. Keputusan awalnya untuk mengambil alih sementara komando Angkatan Darat, kemampuannya dalam mendapatkan kepercayaan panglima angkatan darat dan angkatan lainnya pada pagi kudeta, penolakannya atas penunjukan Pranoto sebagai panglima sementara oleh Sukarno, dan penolakan selanjutnya untuk mundur dari kancah drama dengan baik, penanganan dramatisnya terhadap pengangkatan mayat-mayat para jenderal pada hari berikutnya adalah contoh paling jelas. Suharto tak

diragukan lagi terbantu oleh dukungan penuh stafnya—terutama Ali Murtopo yang pandai, yang bertindak sebagai penasihat strategi dan taktik, dan Sujono yang, menurut Sumitro, "sangat berjasa kepada Pak Harto dengan keahliannya dalam hal-hal mistik dan spiritual."[36]

SUHARTO DAN KUDETA

Kisah yang sudah-sudah selalu mengenai Suharto dan, dengan asumsi yang jelas, peranannya dalam peristiwa yang ada. Karena peristiwa 1 Oktober 1965 begitu penting bagi perjalanan sejarah Indonesia masa depan, dibuatlah banyak karya yang berusaha menjelaskannya. Di antara usaha-usaha untuk memahami kudeta ini, ada yang bagus namun ada juga yang tidak memuaskan,[37] bisa dipetakan dalam tiga interpretasi.

Pertama, versi yang dikembangkan rezim Orde Baru, adalah bahwa upaya kudeta adalah pekerjaan Partai Komunis Indonesia, yang merekrut anggota-anggota yang membangkang di Angkatan Darat dan Angkatan Udara—setelah lama "menangani" mereka—untuk membantu partai menghancurkan lawan-lawan berpengaruhnya di Staf Jenderal dan mengambil alih kekuasaan.[38] Kedua adalah bahwa upaya pemberontakan itu dirancang oleh anggota-anggota yang membangkang di Angkatan Bersenjata, dengan anggota PKI hanya terlibat dari luar dan secara insidental; pandangan ini menjadi terkenal karena diberitakan dalam "dokumen Cornell", yang menyatakan bahwa "kudeta 1 Oktober pada hakikatnya adalah urusan internal Angkatan Darat, berakar dari aliansi kecil di Divisi Diponegoro, yang berusaha memperalat Sukarno dan kepemimpinan PKI demi tujuannya. Usaha ini kemudian berhasil merusak total otoritas politik dan moral Sukarno di satu sisi, dan menyebabkan kehancuran fisik PKI di sisi lain."[39] Yang ketiga memandang "upaya kudeta" sebagai usaha bersama dan terkoordinasi antara anggota-anggota PKI dan perwira angkatan darat junior yang membangkang, di mana setiap pihak memiliki motif

berbeda, untuk menghancurkan atau setidaknya melumpuhkan Staf Jenderal yang korup.[40]

Tampaknya hampir mustahil kebenaran total mengenai peristiwa 1 Oktober akan terungkap; terlalu besar dan banyak kepentingan yang harus dilindungi, terlalu banyak kebohongan, dan terlalu dalam amarah yang terpendam. Politik tertutup Orde Baru dan, bahkan, keinginan rezim Orde Baru untuk menggunakan peristiwa itu sebagai fondasi tujuan politiknya telah secara manipulatif membentuk berbagai bukti. Pada saat bersamaan, lawan Orde Baru, frustrasi akan kelumpuhan mereka, terkadang memilih melakukan spekulasi berlebihan untuk mendapat pendengar macam apa pun. Namun, cukup beralasan untuk mengatakan bahwa skenario yang paling memuaskan adalah bahwa upaya kudeta itu merupakan usaha terkoordinasi antara beberapa pemimpin PKI dan perwira yunior yang sangat terkait dengan Divisi Diponegoro dan Angkatan Udara, untuk menangkap para jenderal yang mereka curigai akan melancarkan langkah serangan terhadap Presiden, PKI, atau keduanya. Tujuan tersebut tampaknya berskala terbatas dan berniat defensif: untuk menangkap para jenderal, membawa mereka menghadap Presiden, memastikan dukungan Presiden terhadap tindakan Gerakan melawan Dewan Jenderal, dan meruntuhkan para jenderal dengan menghabisi atau menghujat mereka. Menurut Latief, tidak ada rencana untuk membunuh para jenderal, dan dia beserta Suparjo "kaget" ketika mengetahui para jenderal itu dibunuh.[41] Dukungan PKI dan Angkatan Udara terhadap Gerakan (jika memang dukungan itu ada), dan aksi militer di Jawa Tengah dalam Divisi Diponegoro, paling sesuai dengan skenario ini. Jika saja upaya ini berhasil, PKI pasti akan dianggap sebagai pemenang dalam pertarungan melawan unsur kontrarevolusioner, peran Angkatan Udara semakin kuat, dan para pemimpin baru akan mendukung dan menghargai upaya mereka membersihkan diri dari para perwira yang menunjukkan sikap tidak loyal dan ingin berkonspirasi.

Sebagaimana kita ketahui, keadaan memang sudah kacau nyaris sejak awal. Meski tampaknya pasti bahwa para jenderal itu ditangkap hidup-hidup, tiga dari mereka ditembak atau dibayonet di rumah mereka oleh pasukan yang stres, mungkin karena tidak tahu peran mereka secara jelas dalam rencana yang berjalan dan ragu-ragu akan wewenang mereka jika kelak ditanya oleh para perwira senior yang akan mereka tangkap itu. Pembunuhan yang terjadi langsung membuat insiden ini memasuki dimensi baru dan berbahaya. Meski masuk akal bahwa Angkatan Darat mungkin saja runtuh, setidaknya dalam jangka pendek, karena para perwira seniornya difitnah, namun masalah lain lagi ketika perwira-perwira itu dibunuh, sesuatu yang tidak mungkin bisa ditelan begitu saja. Kedua, para penculik, dengan amat ceroboh, pertama-tama membiarkan Nasution lolos, tidak mau bersusah-payah memburunya, dan kemudian salah menangkap ajudannya yang mereka sangka sebagai Nasution. Namun, terlepas dari kelalaian itu, jika pada pertengahan pagi setelah tiba di Halim Sukarno mendukung tindakan itu dan memahami situasi, para pemberontak mungkin akan bisa berhasil.

Tetapi, naluri politik Sukarno yang tajam pastilah memberi peringatan bahwa, dengan kematian tiga jenderal dan lolosnya Nasution, konflik politik sedang mencapai fase baru, tak terduga, dan lebih berbahaya. Sukarno pasti berusaha keras menyatukan pola-pola kejadian yang membingungkan itu beserta signifikansinya ketika dia tiba di bandara. Dia menyadari bahwa dalam kondisi yang menghadangnya seperti itu, dia tidak bisa mendukung usaha kudeta dan akan berusaha memperbaiki keadaan dengan cara menunggu kesempatan dan bernegosiasi. Ketika dia memberi perintah kepada Suparjo untuk menghentikan pertumpahan darah, tuntas pula nasib Gerakan. Tanpa dukungan Sukarno, kudeta tidak akan berhasil. Dukungan yang kurang bagi para pemberontak saat keadaan kacau adalah satu indikasi lain betapa buruknya persiapan dan perencanaan upaya mereka dalam mengubah politik bangsa.

Ada juga teori-teori lain. Ada yang mengatakan bahwa Sukarnolah aktor utama yang mendorong dan mengendalikan tindakan pihak lain dalam menyingkirkan jenderal-jenderal bermasalah demi kepentingannya. Roeder, mungkin menyuarakan pendapat yang diajukan Suharto, menganggap bahwa

> Setelah lewat bertahun-tahun, hasil interogasi para perwira yang terlibat dalam pemberontakan mengungkap adanya perintah dari Sukarno kepada Komandan Pasukan Tjakrabirawa pada 28 September 1965, untuk menangkap para pemimpin Angkatan Darat yang keras kepala. Masih belum jelas apakah perintah-perintah ini tidak jadi dilaksanakan karena keraguan Komandan Tjakrabirawa atau karena pembunuhan para pemimpin Angkatan Darat pada malam 30 September/1 Oktober 1965.[42]

Menurut versi lain teori ini, Sukarno bersekongkol dengan PKI merancang satu kudeta untuk menyingkirkan "para jenderal pembangkang";[43] pada versi lain, Sukarno dianggap telah mendukung kelompok Untung, dan tidak ada keterlibatan signifikan dari PKI.

Ada satu alur interpretasi yang berbeda secara fundamental yang lebih penting bagi kisah kami. Sederhananya, alur interpretasi ini menyatakan bahwa Suharto sendiri sangat terlibat dalam rencana ini—"orang yang merancang segalanya sebagai satu provokasi yang dalam satu pukulan akan menyingkirkan saingannya di Angkatan Darat, menghancurkan Partai Komunis, dan mendongkel kekuasaan Sukarno"[44]—atau setidaknya sudah tahu sebelumnya tentang peristiwa ini, tidak melakukan apa-apa, dan kemudian mampu mengambil keuntungan dari pemindahan Staf Jenderal senior serta dari kekacauan politik yang menyertainya.[45]

Pandangan terakhir ini—yang terkubur dalam-dalam, sesekali dilontarkan oleh para ekspatriat yang dipaksa hengkang dan kritikus asing rezim Suharto, selama beberapa dasawarsa sebelum akhirnya menghangat kembali ketika Suharto *lengser* pada 21 Mei 1998—adalah akibat dari teka-teki inti yang tak terpecahkan

berkaitan dengan peristiwa-peristiwa kudeta. Termasuk dalam teka-teki itu adalah fakta bahwa Suharto tidak dijadikan sasaran oleh para pemberontak, bahwa markas besar Kostrad diabaikan oleh pasukan yang mengambil alih fasilitas di alun-alun Jakarta pada dini hari 1 Oktober, bahwa Suharto sendiri dikenal baik dan sebelumnya berhubungan dengan Untung dan Latief, dan bahwa dia mampu mengerahkan kekuatannya begitu cepat dan efektif pada hari itu. Pertanyaan paling menggoda adalah fakta bahwa, pada malam sebelumnya, Latief pergi ke rumah sakit tempat Suharto sedang membesuk putranya.

Teka-teki ini, yang umumnya diabaikan pada masa kekuasaan Suharto, kembali mengemuka dengan dibukanya penjara Cipinang tak lama setelah kejatuhan Suharto pada Mei 1998. Kolonel Latief diwawancarai pada saat '*open day*' di penjara dan dia mengulangi pernyataan yang pernah ia buat sebelumnya ketika diadili tahun 1978, bahwa dia telah memberi tahu Suharto tentang akan adanya serangan terhadap sekelompok jenderal senior, dan bahwa Suharto tidak melakukan apa pun untuk mencegahnya. Memang, Latief mengaku telah mengunjungi Suharto di rumahnya di Jl. Haji Agus Salim pada 28 September dan bertanya kepadanya tentang Dewan Jenderal. Suharto tidak mengacuhkan pertanyaan itu, dan mengatakan bahwa dia akan mengecek masalah itu nanti. Latief mengulangi klaim-klaim ini setelah itu dalam sejumlah wawancara baik sebelum maupun sesudah ia dibebaskan pada Maret 1999.[46] Memang, klaimnya masih menjadi subjek laporan yang sensasional.

Respons Suharto gampang diduga, "Itu omong kosong, tidak benar sama sekali." Dia menyangkal keras pernah berbicara dengan Latief di rumah sakit, meski mengakui bahwa Latief memang bertamu ke rumahnya pada 28 September, dan bahwa Suharto pernah melihatnya dari kejauhan di rumah sakit pada malam 30 September.[47] Selain itu, Suharto menambahkan, "ada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kekeruhan era reformasi saat ini dengan mumutarbalikkan sejarah G-30-S/PKI. Mereka sengaja berusaha

mengaburkan fakta-fakta seolah-olah mereka tidak bersalah. Padahal dalam kesaksian yang tegas, mereka telah melakukan pemberontakan sangat biadab, membantai putera-putera terbaik bangsa dalam tragedi nasional G-30-S/PKI."[48]

Absennya Suharto dari daftar para jenderal memang menuntut penjelasan. Orang-orang yang menganggap bahwa Suharto tidak terlalu dikenal saat itu berarti mengabaikan fakta bahwa Suharto adalah perwira senior angkatan darat yang masih aktif, wakil Yani, dan komandan Kostrad. Namun, tampaknya jelas bahwa para konspirator membidik para perwira staf jenderal yang dekat dengan Yani, yang dianggap sangat menentang desakan PKI untuk menuntut kekuasaan lebih, sangat berseberangan dengan Sukarno, dan terlibat dalam pertarungan dan intrik politik sehari-hari di masa Demokrasi Terpimpin. Suharto sendiri, meski memiliki hubungan baik dengan beberapa perwira yang jadi sasaran (sebagaimana telah kita lihat, Suharto mengaku bahwa Sutoyo adalah sahabat istimewa yang pernah sama-sama belajar di SSKAD), tentunya bukan termasuk dalam lingkaran perwira senior macam itu, dan memiliki dunia sosial dan psikologis yang sangat berbeda. Anderson dan McVey berpendapat bahwa Suharto, "dengan pendidikan formal yang rendah, dan secara psikologis sangat dekat dengan 'alam Diponegoro', secara umum berbicara dan berpikir ala Jawa, disiplin dan lurus ... berhasil mengambil jarak dari prajurit Diponegoro 'pemberontak' yang telah ditarik Djakarta. Tampaknya, hal inilah yang membuat Suharto terhindar dari menjadi target para perancang Gerakan 30 September."[49] Ketidaksukaan Suharto akan publisitas, sifatnya yang pendiam dan tidak suka kumpul-kumpul mengisyaratkan bahwa dirinya tidak termasuk dalam kubu mana pun dalam situasi perpecahan di Angkatan Darat, sehingga ia tidak tampak menonjol untuk layak dijadikan sasaran; memang, Suharto terbukti piawai dalam mengolah pandangan politiknya yang biasa-biasa saja. Fakta bahwa ia mengenal beberapa konspirator mungkin membuat mereka yakin bahwa

Suharto bukanlah ancaman serius; bahkan sebenarnya mendukung rencana mereka.

Latief sendiri pernah menjadi anak buah Suharto pada masa revolusi. Tetapi, detail tentang latar belakangnya tidak jelas dan kontradiktif. Dalam wawancara tahun 1998, Latief mengaku telah mengenal Suharto sejak awal 1948 dan menjabat sebagai komandan kompi dalam Brigade X Suharto pada 1948.[50] Menurut sumber lain, Latief adalah mantan anggota Pesindo yang ditarik masuk ke dalam brigade Suharto setelah jatuhnya Yogya ke tangan Belanda pada akhir 1948.[51] Pada pengadilannya tahun 1978, Latief membantah keras tuduhan bahwa dia terlibat dalam peristiwa Madiun 1948, dan mengaku menjadi komandan Brigade IV Medan di sekitar Wonosobo pada akhir 1947. Pada masa program rasionalisasi Angkatan Darat tahun 1948, Latief mengalami penurunan pangkat dari mayor ke kapten dan menjadi komandan kompi. Pasukannya dipindahkan ke Komando Militer Kota Yogyakarta pada masa-masa seputar serangan Belanda. Sesudah itu, ia ambil bagian dalam perang gerilya, termasuk ikut dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogya, dan bertanggung jawab kepada Suharto. Dari berita acara pengadilannya, tidak jelas apakah kompi yang dipimpin Latief pada saat itu adalah bagian dari Brigade X, atau sekadar kompi liar bawahan Brigade X pada saat situasi kacau perang gerilya, meski tampaknya posisi itu kemudian diformalkan dengan masuknya kompi tersebut ke dalam batalion Sujono. Dalam persidangannya, Latief mengaku bahwa dia adalah "bekas anak buah beliau [Suharto] yang langsung di bawah pimpinan beliau". Latief mengaku mendapat kepercayaan Suharto dalam perang gerilya; Suharto ingin merekrutnya sebagai komandan pasukan terjun payung; Suharto memintanya, beberapa bulan sebelum upaya kudeta, untuk mengomandani satu gugus tugas di Kalimantan Timur, satu permintaan yang ditolak oleh komandannya, Umar. Suharto dan istrinya, Latief mengklaim, datang ke rumah Latief menghadiri perayaan khitanan putra Latief.[52]

Untung adalah juga prajurit Diponegoro yang berada di bawah komando langsung Suharto pada pertengahan 1950-an dan mendapat penghargaan atas keberaniannya dalam operasi Mandala, mungkin atas rekomendasi Suharto. Memang, kepercayaan Suharto kepada Untung begitu besar sehingga Suharto rela pergi jauh-jauh menghadiri pernikahan Untung pada 1964 di Kebumen, Jawa Tengah. Menurut dokumen yang disertakan dalam pernyataan persidangan Latief, Suharto marah-marah ketika Untung dipindah ke Cakrabirawa; Suharto tampaknya ingin mempertahankan Untung dalam jajaran Kostrad.[53] Brigjen Suparjo, sebagaimana telah kita ketahui, bertanggung jawab atas satu komando perang Kolaga di Kalimantan Barat di bawah komando puncak Suharto; pada pertengahan Agustus 1965, hanya beberapa minggu sebelum kudeta, Suparjo, dalam kapasitasnya sebagai perwira di Kolaga, menemani Suharto dalam perjalanan menggunakan helikopter di daerah perbatasan Kalimantan Utara. Tetapi, tidak ada petunjuk bahwa Suparjo dan Suharto berhubungan dekat. Syam yang misterius, pemimpin "Biro Khusus" PKI, telah dikenal Suharto sejak 1945 ketika keduanya berada dalam kelompok Pathuk di Yogyakarta, meski peran Suharto dalam kelompok ini tidak terlalu menonjol.

Melihat catatan riwayat Suharto—dia lebih terkenal sebagai prajurit lapangan ketimbang sebagai politikus ambisius, dan tidak pernah berseberangan secara politik dengan Sukarno—maka bisa dimaklumi jika para konspirator menduga bahwa Suharto tidak akan dapat bergerak cepat dan tegas melawan mereka jika mereka telah mendapat dukungan Presiden, terlepas dari tewasnya para jenderal yang diculik. Memang, melihat sifat dari konspirasi itu, tidak masuk akal untuk memasukkan Suharto sebagai salah satu jenderal yang layak diculik.

Mungkin kita dapat menduga bahwa taktik utama para konspirator adalah melumpuhkan oposisi-bersenjata potensial terhadap serangan mereka kepada para jenderal. Seperti dikemukakan oleh seorang ilmuwan, "gedung Kostrad ... anehnya tidak diserang

sama sekali oleh unit-unit Gerakan 30 September."[54] Perkiraan lain, kegagalan "menyingkirkan" Suharto dan Umar adalah "salah satu misteri terbesar peristiwa itu."[55] Perkiraan ketiga mempermasalahkan kenapa "tidak ada satu upaya atau bahkan—sejauh yang telah diketahui selama ini—pertimbangan dari RPKAD untuk menghalangi aksi, atau campur tangan markas Kostrad yang mengontrol RPKAD."[56] Selain itu, sudah umum diketahui bahwa Kostrad memiliki sistem komunikasi radio militer nasional. Bagaimanapun, masalah ini mengasumsikan bahwa para konspirator menduga akan ada oposisi-bersenjata besar terhadap langkah mereka dari, salah satu atau bahkan keduanya, jenderal yang memiliki posisi untuk itu: Suharto sendiri atau Umar, komandan garnisun Jakarta, satu-satunya perwira senior selain Suharto di rantai komando pasukan. Kemungkinan besar, para konspirator tidak menduga akhir seperti itu akan terjadi.

Rencana para konspirator adalah melancarkan serangan kilat terhadap sekelompok jenderal yang mereka tuduh sedang merancang kudeta yang sesungguhnya. Serangan mereka bersifat antisipatif dan terbatas dalam tujuan. Mereka ingin menculik Nasution, Yani, dan lima staf jenderal, dengan harapan Sukarno akan segera memberi dukungan terhadap konspirasi itu. Jika saja rencana itu berjalan mulus, tampaknya konspirasi itu akan tuntas pada pertengahan pagi 1 Oktober, dengan difitnah dan dicopotnya para jenderal yang diculik dari posisi mereka. Dengan demikian, tujuan para konspirator angkatan bersenjata dan para pemimpin PKI pun tercapai. Pilihan untuk menggunakan kekuatan militer dalam melawan Gerakan tidak akan muncul. Penyusunan pasukan di alun-alun pusat tampaknya mendukung pandangan ini; pasukan-pasukan itu menduduki fasilitas komunikasi utama dan sempat muncul di istana. Tujuan pertama adalah mengendalikan komunikasi dengan penduduk umum, kedua adalah mengendalikan gerakan Sukarno. Tetapi, tidak ada upaya untuk meneguhkan kontrol militer terhadap oposisi potensial, mungkin karena hal itu dianggap berbahaya dan tidak perlu.

Lalu, bagaimana dengan kunjungan Latief ke rumah sakit ketika Suharto di sana? Meski ada pendapat yang menyatakan sebaliknya (terutama pendapat Wertheim bahwa "Kolonel Latief ... adalah salah satu kolaborator terdekat [Suharto]")[57] dan fakta bahwa keduanya telah lama saling kenal, tidak ada bukti kuat bahwa Latief dan Suharto sangat dekat. Jadi, tampaknya hampir tidak mungkin kunjungan Latief bersifat sosial, yaitu untuk mendukung keluarga Suharto di masa penuh cobaan. Kunjungannya pasti terkait dengan tindakan Gerakan 30 September. Tampaknya, ada dua penjelasan yang mungkin atas kunjungan itu. Pertama, Latief sekadar memeriksa apakah Suharto benar disibukkan oleh keadaan putranya, dan tampaknya dia tidak sedang dalam posisi cepat beraksi melawan para konspirator. Tampaknya, Latief juga mengunjungi rumah Nasution malam itu untuk mengukuhkan pola gerakannya di pagi hari. Kedua, Latief mencari Suharto untuk memberi tahu akan terjadinya tindakan terencana terhadap para jenderal. Latief sendiri menjelaskan bahwa dia telah diminta Untung dan Suparjo, yang mengunjunginya pada 30 September, untuk memberi tahu Suharto mengenai tindakan terencana itu, agar Suharto mau bekerja sama; mereka sendiri tidak bisa menyampaikan pesan itu karena ada "urusan lain" yang harus dikerjakan. Latief melanjutkan:

> Pada malam itu juga, saya datang ke RS Gatot Subroto, karena kebetulan Pak Harto sedang menunggui Tommy, yang tersiram sop. Di sana, ternyata sudah banyak tamu. Lalu saya *salamin* Bu Tien dan Pak Harto, tapi belum sempat bicara, karena tamunya masih banyak. Saya mencari-cari kesempatan untuk berbicara. Ketika kesempatan itu ada, saya katakan, "Di samping prihatin atas musibah putra Bapak, saya juga akan menyampaikan sesuatu bahwa besok pagi ada tujuh jenderal yang akan dihadapkan kepada Presiden".... [Suharto] manggut-manggut saja, dan dia tanya siapa pemimpinnya. Saya jawab: "Letkol Untung." Baru bicara begitu, ada tamu yang datang. Saya menunggu reaksi dari dia [Suharto], barangkali ada keputusan atau tidak. Ternyata Pak Harto diam saja, sampai saya pamitan lalu salaman dan pulang.[58]

Jika apa yang dikabarkan Latief benar—bahwa dia memberi informasi tentang rencana aksi kepada Suharto, sesuatu yang, seperti kita ketahui, dibantah keras—kami perlu menjelaskan mengapa dia harus memberi informasi ini kepada Suharto. Tampaknya aneh jika seorang tokoh pemimpin konspirasi besar memberi tahu seorang jenderal senior bahwa teman-temannya akan diculik, apalagi Suharto adalah seorang perwira lapangan berpengalaman yang mengendalikan pasukan yang sangat terlatih dan siap perang. Jika ini yang dilakukan Latief, itu lebih karena dia yakin bahwa Suharto tidak akan bertindak—memang, Latief berharap informasinya akan menyebabkan Suharto tidak segera bertindak saat dia mendengar berita tentang aksi itu keesokan paginya. Latief sendiri menjelaskan bahwa dia memberi informasi ini kepada Suharto karena "Saya kira dia sangat loyal kepada Bung Karno. Ternyata, saya salah." Kedatangannya ke rumah sakit diketahui dan disetujui pada pertemuan malam hari dengan Untung dan Suparjo, dan bertujuan mencari dukungan Suharto. Tetapi, sebagaimana dikemukakan Latief, "Beliau [Suharto] yang kami harapkan akan menjadi pembantu setia ... Sukarno menjadi berubah memusuhinya."[59]

Jika penuturan Latief benar, kegagalan Suharto untuk bertindak menghadapi ancaman terhadap kepemimpinan Angkatan Darat semacam itu menuntut penjelasan. Ada sejumlah penjelasan. Pertama, Suharto tidak menganggap serius peringatan Latief dan tidak mengacuhkannya. Penjelasan ini memang cukup masuk akal—terutama dalam suasana krisis masa itu ketika perbincangan tentang kudeta selalu simpang-siur, dan dalam masa ketika setidaknya beberapa jenderal mengetahui isu tentang serangan terhadap kepemimpinan angkatan bersenjata—tetapi tidak cukup tuntas. Tidak ada bukti bahwa Suharto biasa menerima informasi seperti ini, dan dia tahu bahwa Untung dan Latief, yang mengepalai pasukan lokal, memiliki aparat yang siap untuk melaksanakan ancaman mereka; Suharto yang waspada tentunya tidak akan lengah dalam menyikapi informasi yang datang kepadanya.

Kedua, mungkin saja Latief menyampaikan pesan dengan bahasa yang tidak jelas, sehingga Suharto tidak memahami makna sebenarnya. Dia mungkin menduga bahwa rencana aksi itu bukan hal yang aneh lagi dan merasa tidak mungkin ada tindak lanjutnya. Dengan kata lain, dia mungkin memahami bahwa Latief betul-betul memaksudkan bahwa para jenderal akan dipanggil ke istana (kejadian lazim bagi perwira senior pada saat itu, biasanya terjadi di saat-saat kacau) untuk diskusi, maklumat, atau kritik; dalam situasi semacam itu, bukanlah hal yang aneh bagi Untung, sebagai orang Cakrabirawa, untuk menyampaikan panggilan Presiden kepada para jenderal yang bersangkutan. Menurut penjelasan ini, Suharto, berdasarkan informasi Latief, tidak menyadari skala operasi yang ada, apalagi potensi bakal lepas kendalinya operasi itu.

Penjelasan ketiga mungkin adalah Suharto menyadari gawatnya situasi, tetapi memilih untuk tidak melakukan apa pun. Penjelasan ini didasarkan pada beberapa alasan; Suharto tidak dekat dengan Nasution, dan agak jauh dari Yani—memang ada permusuhan dan bahkan persaingan antara keduanya—dan jelas bukan anggota lingkaran Yani. Mungkin saja Suharto melihat kesempatan, meski kecil, untuk promosi karier pribadi dan memutuskan—sama seperti yang dia lakukan di Wiyoro pada peristiwa 3 Juli 1946—untuk melihat bagaimana kekuatan-kekuatan yang sedang bertikai saling menjatuhkan, sebelum akhirnya ia bertindak sendiri. Ada kemungkinan bahwa Suharto berpikir lebih jauh dari ini: ia mungkin telah memperhitungkan untuk memberi kesempatan pada kelompok Untung menjalankan aksinya sebelum kemudian membawa pasukannya sendiri guna menghancurkan Gerakan 30 September, menghancurkan komunis sekaligus Sukarno, dan naik ke puncak kekuasaan. Latief sendiri, pada pengadilannya tahun 1978, berusaha keras menunjukkan bahwa Suharto juga terlibat karena sebelumnya sudah tahu akan adanya upaya kudeta.[60]

Keempat, modifikasi penjelasan sebelumnya, adalah bahwa Suharto sendiri sangat terlibat dalam upaya kudeta. Dalam konteks ini, penjelasan tersebut amat didasarkan pada fakta bahwa Latief,

Untung, dan Suparjo dikenal oleh Suharto, begitu juga Syam. Tetapi, interpretasi semacam itu tetap saja menjadi spekulasi semata. Tidak ada bukti langsung yang mendukungnya, dan terlalu banyak bukti insidental yang simpang-siur. Seperti telah kita ketahui, meski Suharto tampaknya memiliki hubungan pertemanan, bahkan mungkin bersahabat, dengan Latief dan Untung, tidak ada bukti bahwa dia dekat dengan mereka, apalagi dengan Suparjo; ia juga tidak dekat dengan Syam. Kabar kedekatannya dengan Untung dan Latief terlalu dibesar-besarkan. Tidak ada alasan juga untuk menduga bahwa Suharto berpandangan sama dengan para konspirator angkatan bersenjata yang berpolitik kiri, apalagi memiliki antusiasme untuk melumpuhkan perwira senior, pun jika kesederhanaannya sejalan dengan ide puritan kelompok kiri—sehubungan dengan gaya hidup yang pantas. Tentu saja, ada kemungkinan bahwa Syam, kepala Biro Khusus PKI yang tugasnya menyusup ke militer dan "mengelola" simpatisan-simpatisan utama di militer, adalah agen ganda (yaitu agen Angkatan Darat yang menyusup ke PKI dan bertindak seolah-olah demi kepentingan PKI), tetapi tidak ada bukti kuat yang muncul untuk mendukung kemungkinan ini.

Ada kemungkinan bahwa Latief hanya mengarang cerita percakapannya dengan Suharto di rumah sakit. Tentu saja, Suharto telah membuat langkah yang diperlukan untuk memperjelas bahwa di rumah sakit, dia dan Latief hanya bertemu dan tidak pernah bercakap-cakap.[61] Berdasarkan hal ini, tuduhan Latief bahwa Suharto tahu tentang konspirasi adalah konstruksi kemudian yang muncul dari penolakan terhadap oposisi keras tak terduga dari Suharto terhadap, dan kemenangannya yang mengejutkan atas, konspirasi. Tetapi, kesimpulan itu sendiri memiliki beberapa kelemahan: terutama adalah ketidaksenangan dan penyangkalan Suharto terhadap kunjungan Latief ke rumah sakit. Sebagaimana diungkapkan May "tampaknya ada banyak upaya untuk menutupi pertemuan Suharto dengan Latief."[62] Selain itu, Suharto menawarkan penjelasan berbeda mengenai kehadiran Latief di rumah sakit.

Dalam wawancaranya dengan Brackman, Suharto mengatakan bahwa Latief datang untuk bertemu dengannya; dua tahun kemudian, dalam satu wawancara dengan majalah Jerman *Der Spiegel*, Suharto menuduh bahwa Latief datang ke rumah sakit untuk membunuhnya. Dalam otobiografinya, Suharto memberi informasi satu baris tentang kehadiran Latief, yaitu mengakui bahwa dia melihat Latief di dekat rumah sakit, dan tidak memberi komentar tambahan apa pun.[63] Pernyataan Latief selanjutnya semakin memunculkan kecurigaan tentang keterlibatan Suharto. Meski termasuk para konspirator pertama yang ditangkap, Latief tidak diizinkan tampil sebagai saksi di pengadilan Mahmilub hingga pengadilan Pono pada Januari 1972—kesaksian awalnya hanya diberikan dalam bentuk tulisan—dan dia sebenarnya tidak pernah dibawa ke pengadilan hingga 1978. Bahkan kemudian, Latief tidak diizinkan—berdasarkan irelevansi para saksi itu terhadap kasus yang disidangkan—memanggil saksi-saksi tertentu, terutama Suharto sendiri, yang bisa mengajukan bukti sehubungan dengan sadarnya Suharto sendiri akan rencana para konspirator.

Ketidaksenangan yang amat jelas terlihat dari Suharto akan kunjungan Latief membuat orang mungkin menduga bahwa memang betul ada percakapan antara keduanya pada malam 30 September 1965. Tetapi, bobot bukti yang ada tampaknya mengungkapkan bahwa Suharto tidak mengacuhkan, atau tepatnya salah memahami, pesan yang disampaikan kepadanya. Dengan kata lain, penjelasan paling mungkin adalah Suharto mengetahui bahwa sejumlah jenderal akan dipanggil menghadap Presiden karena satu atau lain kesalahan, yang mungkin menyulitkan karier sebagian jenderal itu, namun tidak lebih dari itu, apalagi sampai melebar ke hal yang akan mengguncang secara fundamental susunan politik yang ada dan yang menjerumuskan negara dan bangsa ke dalam keadaan krisis. Suharto mungkin tergugah untuk merenungkan bagaimana kejadian semacam itu dapat meningkatkan prospek kariernya, namun dia tidak akan membayangkan bahwa masalah ini perlu perhatian serius.

Skenario alternatif—bahwa Suharto tahu para jenderal akan menjadi sasaran kekerasan dan serangan yang mengancam nyawa, atau bahkan porsi yang lebih besar dari Staf Jenderal, bersama dengan Nasution, akan dienyahkan dalam satu pukulan, dan bahwa dia tidak melakukan apa pun untuk mencegah hal itu demi kepentingan pribadinya—tampaknya agak gegabah dan tak lazim mengingat sifat Suharto yang sangat hati-hati. Mungkin tampak ekstrem jika Suharto tidak melakukan sesuatu untuk mencegah kekacauan politik, belum lagi fisik—yang mungkin muncul akibat aksi itu—terhadap Angkatan Bersenjata kalau dia menyadari skala dan bahayanya rencana para pemberontak itu. Riwayat sebelumnya sebagai perwira angkatan darat—karier tiga puluh tahun mengabdi yang memberi dia status dan penghargaan—tidak satu pun memberi petunjuk bahwa Suharto akan berdiam diri sementara rekan perwira sejawatnya, dan reputasi serta pengaruh politik efektif Angkatan Bersenjata yang dia cintai, diserang. Kemungkinan bahwa seseorang yang sedemikian berhati-hati seperti Suharto akan mengambil risiko—apalagi mengingat bahwa Suharto pasti menyadari betapa tergesa-gesa, gegabah, dan rentannya konspirasi itu—semacam itu tampaknya meragukan.

Skenario yang ingin melibatkan Suharto dalam peristiwa itu juga menghadapi kesulitan besar lain: kesuksesan Suharto dalam mengumpulkan Angkatan Bersenjata pada pagi 1 Oktober dan kemudian mengendalikannya. Berdasarkan hal itu, tampaknya tidak mungkin seorang komandan seperti Sarwo Edhie, sahabat dekat Yani, akan mau melibatkan diri dengan Suharto jika dia menduga Suharto, baik saat itu atau sesudahnya, terlibat dalam persekongkolan. Tentu saja, sama tidak mungkinnya Nasution, yang kehilangan putrinya (dan ajudannya) saat diserang di rumahnya, akan tetap diam jika dia percaya Suharto sebelumnya mengetahui, atau terlibat, dalam upaya kudeta.

JALAN KE DEPAN

Peristiwa 1 Oktober 1965 adalah peristiwa paling penting dalam kehidupan Suharto. Reaksi Suharto terhadap peristiwa itu menunjukkan ketenangan pikiran dan kapasitas taktis luar biasa yang sebelumnya tidak pernah ditunjukkannya dengan begitu nyata, dan yang memberi jalan bagi promosi politiknya. Tanpa adanya peristiwa mengguncangkan yang dipicu oleh Gerakan 30 September, Suharto mungkin akan menghabiskan hari-harinya dalam ketidakjelasan. Bagaimanapun kini, hal-hal yang awalnya sebatas kemungkinan telah didobrak, dan aktor-aktor dalam drama politik yang memanas ini mulai menceburkan diri untuk bertempur memperjuangkan berbagai versi masa depan yang membentang. Hanya dalam beberapa hari, bentang politik bangsa telah berubah. Dominasi karismatis Sukarno dalam kancah politik telah tergerus secara serius, mungkin fatal. PKI telah tercemar karena merencanakan dan melakukan Gerakan 30 September. Kepemimpinan dalam Angkatan Bersenjata telah melemah, dan struktur kesatuan yang rapuh telah tercerai-berai.

Hanya satu tokoh utama—Suharto—yang muncul dari pergolakan ini dengan reputasi yang semakin meningkat. Kemunculannya semakin tampak hebat berkat kemenangannya pada masa-masa sebelumnya. Suharto bukan lagi tokoh gurem dan tak menonjol seperti di masa lalu. Suharto kini berada pada poros politik, tetapi tidak ada tokoh dalam kancah politik yang tahu banyak tentangnya, apalagi tahu bagaimana dia bisa sejalan dengan legitimasi yang baru dimenangkannya dan kesempatan luas yang membentang di hadapannya.[]

6 Langkah Menuju Kekuasaan, 1965–1968

Riwayat yang telah kita bicarakan sebelumnya tampak berfokus pada Suharto sebagai seorang manusia yang berkuasa dan bernasib baik, bergerak dengan pasti menuju puncak kekuasaan. Padahal, cerita yang sesungguhnya lebih kompleks dan memikat. Pada akhir pekan pertama bulan Oktober 1965, Suharto berada dalam posisi yang sangat berbahaya. Atas inisiatif sendiri dan tanpa dukungan nyata dari presiden, Suharto menghentikan dan dengan cepat melumpuhkan intervensi militer yang bertujuan mengubah neraca kekuatan di dalam negeri. Dalam menjalankan aksi, ia nyata-nyata tidak mematuhi komandan kesatuannya. Ia tidak tahu jelas seberapa besar dukungan yang diraihnya dalam hal apapun selain dalam aksi-aksi pertahanannya, tidak ada strategi solid akan apa yang kemudian harus dilakukan, begitu pun mengenai cara mencapai tujuan. Baginya yang jelas adalah, meski Gerakan 30 September gagal, serangan mendadak terhadap keseimbangan kekuasaan di Indonesia ini telah mengubah peta politik secara mendasar. Namun, hal ini merupakan satu permasalahan lain yang sulit diungkap dan bidang baru yang perlu dikaji lagi.

Karena kewaspadaan dan pemahamannya terhadap gaya politik Jakarta, Suharto bertindak penuh pertimbangan, hati-hati, dan waspada serta dengan "tindak-tanduk mengejutkan", sebagaimana diungkapkan salah satu pihak luar negeri yang bersimpati kepadanya.[1] Mackie menggambarkan proses dramatis dan menegangkan yang terjadi dua setengah tahun kemudian, saat Sukarno diturunkan dan Suharto naik, sebagai sesuatu "ketidakpastian yang ganjil".[2] Tetapi, meski tak memiliki kesiapan terhadap apa yang terjadi saat itu serta relatif tak dikenal (ia tak dikenal di kalangan rakyat Indonesia, dan nyaris bukan siapa-siapa bagi Amerika, sehingga tidak diperhitungkan), kekacauan dan ketidakpastian kekuasaan di Jakarta setelah tragedi awal Oktober, serta respons Sukarno yang tak bisa diduga, membuat Soeharto tak punya banyak pilihan kecuali maju dengan pertimbangan yang hati-hati, setidaknya untuk sementara. Ia tidak menyangka bahwa takdir pentingnya (meski, sebagai seorang pemimpin yang dimunculkan oleh situasi dan bukan pemimpin yang merintis jalannya secara normal,[3] Suharto selalu berpikir tentang betapa baiknya nasib berpihak kepadanya), kondisi genting usaha kudetalah yang membawanya ke puncak karier militer, juga memberinya kesempatan tak terduga dan menempatkannya pada posisi penting dalam tahapan kejadian itu.

Sifat dan gemblengan yang didapat Suharto mencegahnya dari memberi janji-janji muluk yang melambungkan harapan namun tak membuahkan hasil. Dengan caranya sendiri ia memutuskan untuk menerapkan taktik seorang perwira militer yang hati-hati, yaitu dengan menguji besarnya dukungan, mengantisipasi kelemahan, hanya membidik target yang yakin bisa dikuasainya, tidak pernah takabur dalam menghadapi lebih dari satu lawan dalam satu waktu, dan bertindak hanya ketika musuh sudah mendatanginya. Tak ada visi hebat atau rencana utopis. Politik atau sukses politik adalah proses manuver pragmatis. Mereka yang mempelajari dirinya pasti terkejut oleh apa yang mereka temukan. Seseorang yang tampaknya bodoh, tetapi seorang komandan la-

pangan yang hebat, mulai sekonyong-konyong menunjukkan kekuatan strategi politiknya. Memang, Suharto "terbukti sebagai seorang manipulator politik yang jauh lebih cerdik dan efektif ketimbang pendapat para komentator tentang dirinya di hari-hari menegangkan bulan Oktober 1965.[4]

SUKARNO DAN SUHARTO

Memperkirakan apa rencana besar Suharto pada hari-hari pertama setelah 1 Oktober adalah hal yang luar biasa. Menurut Crouch, Suharto "secara pribadi telah kehilangan simpati kepada Presiden", sebuah pernyataan yang perlu dianalisis lebih cermat.[5] Meski Suharto hanya tahu sedikit tentang kepribadian dan tindak-tanduk Sukarno, ia sangat menghormati posisi kepresidenan dan kedudukan yang dipegang, dan pada saat yang sama sangat takut akan popularitas Sukarno di kalangan Angkatan Bersenjata. Di sisi lain, ia menyadari bahwa tragedi 1 Oktober telah mengubah bentuk peran angkatan bersenjata secara mendasar dan memberinya sumber legitimasi baru dalam hubungannya dengan presiden. Untuk pertama kalinya, belenggu yang diterapkan di Orde Lama, dan pengaruh karismatik pribadi Sukarno, mulai memudar.

Suharto sangat terganggu dengan sikap Sukarno yang terus tidak mau memahami pergolakan situasi yang sedang terjadi. Pada 6 Oktober, Sukarno mengadakan pertemuan di Istana Bogor, di mana Suharto juga diundang untuk memberi laporan terkini sejak gagalnya Gerakan 30 September. Di antara yang hadir tampak anggota kabinet dari partai komunis, Lukman dan Nyoto, "yang bersikap seolah tak terjadi apa-apa".[6] Lebih lanjut, menurut penuturan Suharto, suasana pertemuan itu "sama sekali tidak melankolis atau sedih ... Dalam situasi yang penuh dengan tawa gembira, saya merasa terbeban. Saya merasa gusar melihat PKI di sana karena yakin mereka pasti terlibat dalam penculikan dan pembunuhan teman-teman saya." Sedangkan menurut Nyoto, ia

menyangkal keterlibatan komunis pada tragedi 1 Oktober, meski menurut Suharto, Sukarno tetap menyalahkan Nyoto dan PKI karena "mengobarkan peristiwa yang terkutuk itu".[7] Pertemuan ini adalah manifestasi paling nyata dari keinginan Sukarno yang menggebu-gebu untuk meminimalisasi pengaruh moral maupun politis aksi kudeta itu, demi kemudian mengambil alih kendali dan melanjutkan kekuasaannya seperti dulu. Pada hari yang sama, datang berita tentang wafatnya anak perempuan Nasution di rumah sakit akibat luka tembak yang dideritanya pada pagi duka itu.

Sinyal resmi paling jelas akan tegaknya dominasi baru Suharto adalah pengakuan Sukarno atas kekalahannya ketika menjawab pertanyaan Pranoto. Terlepas dari usaha lemah Presiden untuk mempertahankan Pranoto sebagai komandan harian Angkatan Bersenjata, Suharto mempertegas bahwa dengan porak-porandanya angkatan bersenjata akibat Gerakan 30 September, dia secara efektif memimpin Angkatan Darat—meski Nasution saat itu masih berpengaruh kuat. Dengan demikian, Sukarno dipaksa untuk tunduk, tak bisa menghindari penunjukan Suharto sebagai komandan Angkatan Bersenjata "mutlak" pada 14 Oktober. Baik Nasution maupun Suharto sama-sama tak pernah dekat dengan Sukarno. Keduanya juga tidak menyukai gaya politik inklusif Yani, yang menurut mereka terlalu memberi angin kepada PKI dan menyebabkan partai itu mendapat momentum politik yang semakin besar. Pada 16 Oktober, diselenggarakanlah sebuah upacara resmi di Istana Merdeka guna melantik Suharto sebagai komandan Angkatan Bersenjata dan kepala staf Koti (Komandan Operasi Tertinggi) serta menaikkan pangkatnya menjadi Letnan Jenderal. Pertentangan Sukarno dengan Suharto tampak jelas dan "suasana ... menjadi tegang".[8] Sukarno melanjutkan usahanya meminimalisasi arti penting tragedi 1 Oktober: dengan mengatakan "itu adalah sesuatu yang normal dan biasa dalam revolusi, dan hanyalah ombak di lautan revolusi".[9] Pada saat yang sama ia menganggap remeh pendapat yang mengatakan bahwa kekuasaannya sudah di ambang kehancuran. Bagaimanapun, naiknya

Suharto telah menjadi subjek antusiasme masyarakat, terutama di kalangan kelompok-kelompok muslim.

Periode yang mencekam dan menakutkan ini juga ditandai oleh jatuhnya beberapa figur penting Orde Lama seperti Deputi I Perdana Menteri Subandrio dan Menteri Luar Negeri Omar Dhani. Namun, pada periode itu, tak ada pembicaraan tentang aksi kudeta yang akan memengaruhi jabatan kepresidenan Sukarno yang masih memiliki karisma kuat dan kesetiaan mengakar dari berbagai lapisan masyarakat. Dalam Perintah Harian 17 Oktober, yang berisi ketetapan untuk "terus basmi sisa golongan petualang kontra-revolusi G-30-S/PKI," Suharto mengingatkan para prajurit untuk "tetap patuh dan taat serta setia kepada pimpinan Presiden/ Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno."[10] Seminggu kemudian ia mengumumkan bahwa "kita harus dapat mengamankan Pemimpin Besar Revolusi dan mengamalkan segala perintah dan ajuran daripada Pemimpin Besar Revolusi."[11] Pada 27 Oktober, bersama dengan Sukarno, Suharto menandatangani sebuah dokumen penting yang pokoknya adalah persetujuan mengenai aliran kiri, hakikat sosialis revolusi Indonesia yang terus berlanjut. Tindakan ini dapat dianggap sebuah tanda jelas bahwa ia tak begitu yakin akan hubungannya dengan Sukarno.[12] Pada akhir bulan, ia mengumumkan bahwa "kita akan patuh tanpa syarat terhadap semua perintah Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno."[13] Menurut penjelasan Suharto, "saya tidak punya pikiran sedikit pun untuk menjatuhkan Bung Karno. Di mata saya, beliau tetap pemimpin yang berjasa, sekalipun beliau punya penilaian lain terhadap apa yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 1965 itu. Tetapi saya tidak memandang perlu terus-menerus mengemukakan pendirian saya tentangnya di depan orang banyak waktu itu, kecuali pada saat-saat yang tepat." Agaknya, tak ada sedikit pun keraguan melintas di pikiran Sukarno begitu ia memulai usaha yang dirancang cermat untuk meminimalisasi pengaruh politis tragedi awal Oktober. Menurut Suharto,

"Presiden Soekarno mengumumkan sikap yang sama sekali lain daripada tindakan dan langkah-langkah yang saya buat."[14]

Beberapa pekan setelah kejadian itu, hubungan antara Presiden, Suharto, serta pimpinan militer lainnya, terutama Nasution, menjadi dingin dan menegangkan, bagai para petarung yang saling mencari kelemahan masing-masing dalam situasi baru yang tak menentu. Mungkin Suharto juga merasa khawatir sehingga ia berusaha, meski gagal, untuk menyatukan Sukarno dan Nasution; usaha Suharto menyatukan ini mungkin juga dimaksudkan untuk membatasi Nasution: agar Nasution tak melakukan hal-hal yang berada di luar antisipasi dan kalkulasi Suharto. Meski begitu, Suharto sudah sangat memahami bahwa tragedi 1 Oktober dengan segala konsekuensinya telah sangat melemahkan kekuasaan dan otonomi Sukarno, dan ia menolak mengikuti strategi Sukarno untuk mengembalikan kekuasaannya itu. Salah satu contohnya, menurut Duta Besar A.S. Marshall Green, pada bulan Desember 1965, sewaktu menjawab permintaan Sukarno akan deklarasi resmi tentang kepatuhan Angkatan Bersenjata kepada dirinya, Suharto dengan cerdik mengajukan syarat: saya akan mematuhi perintah-perintah yang sesuai dengan misi Angkatan Darat mempertahankan keamanan nasional."[15] Suharto semakin memahami bahwa pada saat itu sedang berlangsung proses reformasi politis pragmatis yang dapat membatasi kesewenang-wenangan Sukarno, membersihkan pemerintahan dari para politisi radikal dan korup, serta secara serius mulai memberikan perhatian pada kondisi ekonomi yang terpuruk.

MEMBIDIK PKI

Berkebalikan dari sikap menduanya terhadap Sukarno, sikap Suharto terhadap PKI sangat jelas. Akhirnya terbebas dari masa bermanis-manis dengan PKI yang menjadi ciri Orde Lama, inilah sebutan untuk masa itu, kebutuhan Suharto yang amat mendesak adalah menciptakan keamanan. Baginya, hal ini berarti perlu gerakan

cepat untuk menghapuskan PKI dari kehidupan nasional. Hanya dalam beberapa hari setelah aksi kudeta, organisasi PKI Jakarta dihantam, dan kantor-kantor partai serta organisasi yang berafiliasi dengannya ditutup. Pada 10 Oktober, Suharto membangun Kopkamtib (Komando Operasi untuk Keamanan dan Ketertiban). Ia juga mengeluarkan "instruksi yang berisikan dasar-dasar kebijaksanaan penertiban dan pembersihan personil sipil dari G.30S/PKI di kompartemen-kompartemen, departemen-departemen, dan lembaga-lembaga serta badan-badan lainnya dalam aparatur pemerintahan."[16]

Meski aksi kudeta itu sudah gagal dengan sendirinya, Suharto dan pemimpin Angkatan Bersenjata berusaha membangkitkan sentimen kebencian pada PKI dan menggalang dukungan untuk memberantasnya. Seorang kepala bidang politik Koti yang brilian, Brigadir Jenderal Sucipto, mengumpulkan partai-partai dan kelompok-kelompok muda antikomunis pada 2 Oktober. Dan dengan dukungan Angkatan Bersenjata, gerakan baru itu terbentuk di bawah pimpinan Subchan Z.E. dan Harry Can Silalahi, dengan nama "Komando Aksi Pemberantasan Gerakan 30 September (KAP G.30.S). Pada 4 Oktober, mereka mengadakan demonstrasi pertamanya dengan massa yang masih sedikit. Demonstrasi kedua, yang dihadiri massa yang sangat banyak seiring maraknya sentimen anti-PKI, diselenggarakan empat hari kemudian. Demonstrasi itu juga disusul oleh serangan terhadap kediaman para pemimpin PKI dan berakhir dengan pembakaran markas PKI tanpa adanya aksi pencegahan oleh Angkatan Bersenjata. Hughes melaporkan "tiga truk pemadam kebakaran sudah hadir, tapi mereka menunggu dengan hati-hati sampai api melalap habis dan hanya debu yang tertinggal, sebelum beraksi. Pasukan Angkatan Bersenjata ada di sekitar kawasan itu berbaris di sepanjang jalan ke arah markas besar Komunis. Tapi, mereka tak bertindak apa pun".[17]

Pada saat yang sama, berdasarkan petunjuk Ali Murtopo, Suharto memulai kampanye propaganda anti PKI yang kejahatannya tak terampuni. Propaganda ini ditujukan baik kepada

masyarakat dalam maupun luar negeri. Gerakan 30 September itu kini dinamakan "Gestapu". Meskipun terdengar janggal, akronim ini sangat efektif bagi Gerakan. Lebih kejam lagi, untuk melegitimasi aksinya, Suharto dan para pendukungnya memanfaatkan penuh dugaan adanya penyiksaan sadis dan mutilasi terhadap jenazah tiga orang Jenderal, termasuk gambaran pengebirian seksualitas yang menurut laporan dilakukan oleh anggota gerakan wanita PKI, Gerwani.[18] Apakah Suharto benar-benar percaya bahwa bahwa PKI memang benar-benar bertanggung jawab atas Gestapu, sulit dipastikan. Namun yang pasti adalah, ia melihat adanya kesempatan besar untuk mengalahkan musuhnya dan dengan antusias meraih kesempatan besar itu.

Dengan persenjataannya, Angkatan Bersenjata mulai memburu dan menangkap anggota PKI dan anggota organisasi yang terkait. Sampai 16 Oktober, sudah 1.334 orang di wilayah Jakarta yang ditahan dengan alasan terlibat PKI. Ada dua motivasi Suharto melakukan gerak cepat ini. Pertama, kesadaran bahwa suasana telah berubah secara mendasar sejak 1 Oktober, sehingga inilah kesempatan bagus untuk menghabisi musuhnya yang berbahaya tidak saja dari sisi ideologis, tapi juga dari sisi popularitas yang telah lama membuatnya gelisah. Apalagi saat ini mereka sedang dalam kondisi bingung, tak menentu, sangat lemah, dan mendapat sorotan buruk dari publik. Hal kedua lebih bernilai strategis: yaitu perlunya menggalang solidaritas dan meraih legitimasi, menggunakan momentum peristiwa itu untuk menyatukan masyarakat antikomunis di seluruh penjuru negeri (termasuk Angkatan Bersenjata yang struktur internalnya sendiri sedang berantakan) di belakangnya dengan menyodorkan kambing hitam.

Pada saat yang sama, Suharto tidak yakin harus bertindak apa dan bergerak ke mana, selain bahwa PKI harus dihancurkan. Sifatnya yang hati-hati ini sangat menolong dirinya. Alih-alih memberi perintah resmi, ia tampak lebih memilih menjadi pemimpin lokal Angkatan Darat—yang memberinya alasan kuat untuk memerangi PKI. Selain itu, potret bergambar jenazah tercabik-

cabik yang diangkat dari lubang buaya disebarkannya ke seluruh kesatuan di penjuru negeri, dan membiarkan masyarakat menilai hal terbaik apa yang perlu dilakukan dalam kondisi seperti itu. Di ibukota, ia bisa lebih terang-terangan, karena di sana komando Suharto adalah mutlak, sehingga dalam beberapa pekan lebih dari 2000 orang telah ditahan. Intensitas kekerasan terhadap PKI juga berbeda-beda; hal ini sebagian karena otonomi yang diberikan kepada komandan lokal, sebagian karena perbedaan kecepatan militer dalam bergerak di berbagai tempat, dan sebagian lagi karena perbedaan kekuatan lokal para pengikut PKI.

Di tempat-tempat seperti Jawa Barat di mana militer bergerak cepat melumpuhkan PKI dengan penangkapan besar-besaran, di mana banyak cabang PKI membubarkan diri secara "sukarela", di mana para anggota partai mengakui salahnya jalan yang mereka tempuh, dan di mana, dalam hal apapun, PKI mendapat dukungan yang relatif lemah, kekerasan yang terjadi relatif lebih sedikit. Hal serupa terjadi di Sumatera Utara, di mana Kemal Idris bergerak cepat melarang PKI dan menghancurkan organisasi lokalnya, meski kemudian kekerasan berskala luas pecah dan menimbulkan banyak korban pembunuhan. Sebaliknya, di Aceh, di tengah usaha Angkatan Bersenjata mencegah pembunuhan, masyarakat muslim mulai membunuh anggota PKI dan pengikutnya, bahkan keluarga mereka, sekitar pertengahan Oktober. Dengan cara yang sama, di Jawa Timur, masa tenang yang sulit dan ketidaktegasan Angkatan Bersenjata setelah aksi kudeta akhirnya ditanggulangi sekitar akhir pekan kedua Oktober oleh aksi pembunuhan massal anggota Anshor, organisasi pemuda Nahdlatul Ulama, sejenis angkatan kelima, "yang membunuh dengan kenikmatan fanatis."[19] Sumitro kemudian mengenang bahwa "saya masih bisa melihat betapa sungai Brantas dipenuhi mayat-mayat yang terapung di sepanjang alirannya, dan mayat-mayat yang tersangkut di dahan pohon yang menjuntai ke pinggir sungai."[20]

Di Jawa Tengah, apa yang mungkin masih berupa kekerasan berskala kecil, berubah menjadi kekerasan yang terhitung amat

besar akibat maraknya peristiwa yang terjadi sampai dengan akhir pekan ketiga bulan Oktober. Di sana, panglima Diponegoro, Suryosumpeno—dengan banyak pasukan andalannya tengah berada dalam tugas Konfrontasi di Sumatra serta memenuhi permintaan akan bantuan pasukan lokal untuk mengatasi Gerakan 30 September—hanya menjalankan kendali yang bersifat tarik-ulur terhadap banyak peristiwa, apalagi ternyata PKI telah dengan sengaja menjalankan aksi rendahan yang sesuai dengan strategi Sukarno yang hendak meminimalisasi dampak aksi kudeta. Untuk mengatasi masalah itu, Suharto memutuskan bahwa ia harus mengatur aksi yang cepat dan pasti. "Saya mesti mengadakan pengejaran, pembersihan, dan penghancuran."[21] Pada 17 Oktober, mungkin atas permintaan Sarwo Edhie, Suharto mengirimkan pasukan RPKAD Sarwo dalam parade besar-besaran ke Jawa Tengah untuk membantu Suryosempono mengembalikan stabilitas. Mereka bergerak melalui kota-kota Semarang, Magelang, kemudian ke Solo. Kehadiran mereka membangkitkan semangat pasukan yang sedang bingung mengendalikan keadaan. Sarwo, yang tak begitu yakin akan kemampuannya mengendalikan kawasan itu dari pertahanan PKI yang semakin kuat, meminta bantuan dan mendapat izin untuk melatih pasukan pemuda lokal guna membantu pembersihan di kawasan tersebut. Di bawah pimpinan pasukan RPKAD, dan dipicu oleh semangat untuk bangkit dari belenggu kebencian kelas dan agama, mereka menangkap dan membunuh ribuan anggota dan tersangka anggota PKI.

Di penjuru negeri, ketegangan yang terus meningkat selama satu dasawarsa atau lebih itu, yang menjadi landasan bagi PKI untuk mengembangkan diri, berubah menjadi gelombang kebencian yang menakutkan. Polanya kini terbentuk, sebuah periode kekerasan yang luar biasa kini dihantar masuk, terutama di wilayah di mana Angkatan Daratnya lamban bergerak memberantas komunis, atau di mana oposan-oposan sipil yang berani melepaskan rasa benci mereka terhadap PKI, atau di mana PKI mendapat dukungan luas. Di Bali, luapan kemarahan hanya terhenti sebentar.

Namun, di bulan Desember, terjadi proses yang mirip dengan yang terjadi di Jawa Tengah yang berujung pada pembantaian berdarah yang luar biasa bahkan untuk ukuran standar saat itu. Suharto mengirim Sarwo ke sana untuk menyelamatkan kawasan itu dari anarki, meski "eksekusi terhadap komunis tetap berlanjut dengan cara 'standar'."[22] Sebelum kekerasan berhenti pada bulan pertama tahun 1966, mungkin sekitar 500 ribu orang telah terbunuh. Menurut CIA, "ini adalah salah satu pembunuhan massal terburuk sepanjang abad ke-20."[23] Tapi, tujuan telah tercapai: PKI hampir seluruhnya hancur.

Suhartolah yang paling bertanggung jawab atas pembantaian massal itu. Ia berkonspirasi menciptakan kondisi yang menyulut balas dendam penuh kekerasan, dan mendorong serta menyetujui pembersihan total PKI di akhir tahun 1965 dan awal 1966, baik yang dilakukan oleh Angkatan Bersenjata maupun masyarakat sipil yang didukung militer. Dalam pidatonya pada permulaan November, Suharto membicarakan tentang "menghancurkan G30S sampai keakar-akarnya."[24] Meski besarnya skala kekerasan tidaklah diniatkan atau diharapkan Suharto—memang, pada pertengahan November, ia mengadakan kunjungan singkat ke Yogya dan kota-kota lain di Jawa Tengah, tampaknya untuk mengarahkan perwira militer lokal guna melakukan pembunuhan besar-besaran demi mengembalikan stabilitas di penjuru negeri. Meski tak berminat terlibat dengan agenda politis aktivis muslim, ia juga tampak tak menyesal, bahkan tidak untuk merenungkan skala besar kekerasan terhadap sesama rakyat Indonesia dengan mengerahkan prajurit dan sipil dalam menghancurkan musuh besar mereka. Terhadap upaya militer yang dilancarkannya untuk menjamin keamanan sosial dan nasional dari ancaman PKI itu, Suharto menegaskan:

> Pergerakan itu bukanlah pergerakan yang muncul tiba-tiba pada 30 September, tapi merupakan akumulasi dari rangkaian kejadian yang sudah dipersiapkan sejak lama. Suasana penuh hasutan dan fitnah, yang membangkitkan perasaan saling curiga

antara satu kelompok dan kelompok yang lain, serta iklim ekonomi yang buruk yang sudah dipersiapkan terlebih dulu, dengan mudah digunakan oleh mereka untuk memicu gerakan kontrarevolusi .... dalam setiap sandiwara selalu ada pemain utama, pembantu, dan dalangnya. Hal yang sama juga dimiliki oleh gerakan kontrarevolusi, yang menamakan dirinya Gerakan 30 September. Selalu ada aktor utama, ada juga peran pembantu, dan juga dalangnya, yaitu kelompok dalam yang terlibat. Aktor utama, yang mengatur kelompok lainnya, didalangi oleh kelompok Untung dan beberapa anggota ABRI. Sedangkan peran pembantu dijalankan oleh para anggota Pemuda Rakyat dan Gerwani. Dalangnya, menurut fakta, hasil-hasil dari interogasi dan dokumen-dokumen penting yang kami dapat, menunjuk adanya keterlibatan PKI sebagai otak gerakan kontra revolusi.[25]

Sementara pembantaian massal semakin meningkat di seluruh penjuru negeri, pembersihan pegawai pemerintahan berlanjut. Pada 29 Oktober, Brigadir Jenderal Syarif Thayeb, Menteri Pendidikan Tinggi, menskors anggota akademik maupun administratif yang terlibat PKI ataupun organisasi afiliasi PKI di lingkungan Departemennya. Pada pertengahan November, Suharto dikabarkan memberi instruksi untuk membersihkan semua departemen dan biro pemerintah dari pegawai negeri yang diduga terlibat Gerakan 30 September.[26] Sementara itu, rentetan propaganda serangan terhadap G30S/PKI terus dilanjutkan dan semakin canggih. Pada tanggal 1 Desember, Suharto menyatakan bahwa usaha kudeta merupakan tahap pertama dari tiga tahapan proses, yang mencakup pembunuhan terhadap tokoh-tokoh senior yang berseberangan dengan PKI dan berklimaks pada pembentukan kabinet baru.

Sejumlah pengamat mengungkapkan bahwa Amerika Serikat memberi dukungan kuat kepada Suharto pada saat genting ini. Marshall Green lebih lanjut mengatakan bahwa "peristiwa 1 Oktober 1965 merupakan kejutan besar bagi kami," sebuah pengakuan bahwa "Amerika Serikat mendukung dan mendapat banyak

manfaat dari momen perubahan ini." Tapi, ia menegaskan, "tidak ada campur tangan A.S. dalam hal ini. Ini murni hasil usaha Indonesia. Meskipun demikian, kebijakan A.S untuk mendukung secara diam-diam telah membantu kepemimpinan baru di Indonesia ketika kepemimpinan baru itu mulai membangun kembali negara yang selama bertahun-tahun terbelakang akibat ambisi Sukarno yang sewenang-wenang."[27] Namun, muncul bukti akan adanya bantuan besar Amerika, termasuk bantuan darurat rahasia yang diberikan oleh staf kedutaan Amerika Serikat di Jakarta berupa daftar rinci anggota PKI kepada Angkatan Darat, propaganda anti-PKI, pasokan obat-obatan, radio, beras, peralatan transportasi dan bahkan uang serta persenjataan ringan.[28]

MEMIMPIN ANGKATAN BERSENJATA

Penyaluran ketegangan terselubung dengan PKI ini menjadi mekanisme yang bermanfaat bagi legitimasi kedudukan Suharto, namun ia masih punya tugas untuk mengonsolidasikan kontrolnya terhadap Angkatan Darat yang terdiri atas begitu banyak kelompok dan divisi. Adalah salah jika mengira bahwa, ditugaskan di markas Kostradnya hingga Desember, ia bergerak dengan mudah ke sebuah posisi yang otoritasnya tak tergoyahkan dalam struktur organisasi angkatan bersenjata. Sebaliknya, ia harus melakukan rangkaian negosiasi yang panjang dan melelahkan yang membuat kekuasannya naik secara bertahap. Ia bukan saja perlu memperhitungkan sentimen nasionalis pro-Sukarno di kalangan petinggi angkatan bersenjata, atau mengatasi paham kedaerahan yang berlebihan, tapi juga harus mengakomodasi kekhawatiran sebagian orang yang merasa akan terancam posisinya karena posisi Suharto yang kian menguat. Kemudian, ada juga masalah persaingan antarangkatan, yang diperumit bukan saja oleh tragedi 1 Oktober, tapi juga oleh ketakutan angkatan lainnya—yang diperkuat oleh Sukarno sehingga sangat tergantung pada kepemimpinannya—akan karier mereka yang mungkin berakhir tragis jika Angkatan Darat bertambah kuat.

Di satu sisi, Suharto bisa dianggap *primus inter pares*, yang berusaha keras tanpa lelah untuk merebut kepercayaan dan dukungan pengikutnya. Demi tujuan ini, ia membentuk sebuah kelompok penasihat dalam Angkatan Bersenjata, yang dinamakan Tim Politik, untuk menyelenggarakan forum diskusi umum yang terdiri atas anggota staf umum, panglima lokal hingga pejabat senior yang memiliki jabatan fungsional. Tim Politik itu dimaksudkan untuk mendiskusikan kebijakan dan keputusan yang akan menjadi masukan bagi Suharto selaku panglima Angkatan Darat. Secara bersamaan, diberlakukan pula strategi membersihkan anggota ABRI yang dianggap bersimpati pada PKI. Wanjakti ditugaskan untuk mengganti atau memberhentikan pejabat tinggi ABRI yang menjadi tersangka, meski Suharto juga berhati-hati untuk tidak menyingkirkan anggota PKI yang masih mempunyai pengikut lokal sendiri dalam angkatan. Ia juga berusaha meningkatkan kapasitas lokal Angkatan Darat untuk mengamankan instruksinya. Pada akhir tahun 1965, ia membentuk stuktur komando militer setingkat rayon, Koramil (Komando Rayon Militer) dan menghadirkan militer di tingkat desa (Badesa), baik di Jawa Tengah maupun Jawa Timur yang merupakan basis terkuat pendukung komunis.

Inti strategi Suharto ini adalah untuk meyakinkan pengikut dan pasukannya bahwa keamanan dan kepentingan mereka, baik secara militer atau lainnya, akan terjamin bila mereka mendukungnya. Satu tanda atas sikapnya ini adalah adanya peningkatan gaji seluruh anggota ABRI dalam jumlah sangat besar. Ia juga mengusahakan agar sentimen kedaerahan terakomodasi dalam komando tingkat tinggi angkatan bersenjata. Penempatan dan peningkatan karier diberikan kepada anggota Siliwangi seperti Umar, yang menggantikan Suharto sebagai pemimpin Kostrad pada awal Desember 1965, Mayor Jenderal Amirmachmud, yang menggantikan posisi Umar sebagai panglima garnisun Jakarta, dan H.R. Dharsono yang menggantikan posisi Pranoto sebagai asisten III (personal) Suharto. Pejabat Brawijaya, seperti Basuki Rachmat dan

Sumitro, juga diakomodasi kepentingannya. Pendukung dekat tentu saja juga diberi imbalan. Maradean Panggabean, seorang Kristen Toba Batak, ditunjuk sebagai Deputi II. Sedangkan Munadi, bawahan langsung Suharto di Diponegoro dulu, ditempatkan pada jabatan setingkat Gubernur di jajaran pemerintahan daerah Jawa Tengah yang sangat rawan.

Dari semua ini, Suharto didukung oleh kenyataan bahwa komando tinggi angkatan bersenjata ini datang dari basis sosiologis yang sempit: sebagian besar anggotanya adalah orang Jawa yang bukan penganut Islam fanatik. Suharto juga memulai proses memindahkan panglima lokal yang diragukan kesetiaannya, seperti komandan berhaluan kiri dari Kodam Sumatera Barat, Brigadir Jenderal Panuju, yang diganti bulan Februari 1966. Meskipun demikian, otoritas kekuasaannya masih tidak aman dan perlu negosiasi lebih lanjut.

AWAL 1966: TITIK BALIK

Pada awal 1966, satu masalah terselesaikan: kerusakan fisik PKI. Seiring dengan hal itu, hilanglah penopang penting kekuasaan Sukarno dan kemampuannya untuk memanipulasi persaingan antara PKI dan AD demi keuntungannya sendiri. Tapi, arah negara ini selanjutnya masih belum jelas. Suharto sendiri sudah mengendalikan, meski belum sepenuhnya, AD yang, selain Sukarno, merupakan pilar kekuasaan paling kuat, namun Suharto masih ragu untuk melangkah lebih jauh. Sebenarnya, terlepas dari dukungan kuat yang dimiliki Sukarno, baik di kalangan Angkatan Bersenjata maupun para pemimpin partai senior yang khawatir kepemimpinan Suharto akan membatasi ruang lingkup pengaruh mereka, alasan paling kuat akan ketidakjelasan sikap Suharto adalah karena ia sendiri masih tak jelas akan tujuan jangka panjang serta peran yang harus dimainkannya. Belum ada haluan ideologi baru yang jelas, dan ada indikasi bahwa gagasan politik Suharto masih sempit dan tidak mau berubah; ini terlihat dari peringatannya

pada pers tentang bahaya liberalisme pers ("kita hanya mengenal pers Pancasila")[29] pada 5 November, dan peringatan selanjutnya pada pers tentang penulisan laporan berita yang tak akurat.[30] Tema-tema yang coba dikembangkannya itu sudah terkenal: gagasan tentang solidaritas ABRI dan rakyat ("Tanpa air, ikan tak dapat hidup, begitu pula halnya dengan ABRI yang tidak dapat hidup tanpa rakyat"), dan pensucian Pancasila (sesuatu yang ia sebut sebagai kunci pertahanan Indonesia sebagai sebuah bangsa).[31] Pada satu kesempatan lain, ia menjelaskan bahwa sesuatu yang kita butuhkan adalah "kembali kepada pemulihan kewibawaaan konstitusi kita."[32] Lalu, 17 September 1966, ia mengesahkan 1 Oktober sebagai "Hari Kesaktian Pancasila". Tidak ada tempat bagi rasisme ataupun "liberalisme Barat" dalam periode yang akan dikenal sebagai "Orde Baru".[33]

Oleh karena itu, pada awal 1966, Suharto menfokuskan perhatiannya pada agenda jangka pendek yaitu menggalang usaha mendesak Presiden agar mengambil langkah-langkah untuk mengembalikan negara ke kondisi yang relatif normal. Hal itu mencakup pelarangan PKI, menyingkirkan menteri-menteri yang diduga terlibat dalam usaha kudeta ataupun korupsi, serta mengambil langkah jelas dalam mengatasi masalah perekonomian dalam negeri dan kebijakan politik luar negeri. Pada tahap ini, belum terfikir untuk mengganti presiden ataupun menghukumnya. Apa yang diinginkan oleh Suharto dan para pendukungnya adalah masa depan yang aman dan dapat diprediksi, yang mengarah ke sebuah tujuan. Menundukkan Sukarno adalah kunci menuju tujuan ini. Berlatar belakang negosiasi alot dan merebaknya kekerasan, sebuah kekuatan politik baru yang penting sedang menjalani proses kelahiran. Pada akhir Oktober 1965, atas dukungan Syarif Thayeb, para mahasiswa dan kelompok muslim menggabungkan diri mereka ke dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI).

Problem besar penghalang strategi Suharto itu adalah penolakan Sukarno untuk bekerjasama. Meski Suharto secara pribadi berusaha keras membujuknya, Presiden tetap berkeras menolak

pelarangan PKI, bukan saja karena kesamaan identitas politiknya secara umum dengan karakter ideologi partai itu dan posisi penting partai itu dalam rumusan Nasakomnya, namun juga karena Sukarno menyadari pentingnya posisi yang dimainkan PKI secara institusional dalam bentuk rezim yang telah dibangunnya, dan betapa pelarangan terhadap partai itu mungkin menjadi sinyal bagi bangsa akan posisi dan wibawa Sukarno. Sementara berjuang mempertahankan kelangsungan hidup PKI sebagai organisasi, Sukarno juga menggali kemungkinan mendirikan lembaga lain yang memiliki kesamaan karakter untuk mengisi peran institusional serupa. AD merespons sikap keras kepala ini dengan cenderung semakin mengabaikan keinginan Sukarno; pengabaian ini mewujud pada awalnya atas inisiatif pribadi panglima Jawa Barat, Ajie, yang membubarkan PKI Jawa Barat yang memang sudah dibekukan sejak 17 November.

Kendala yang dihadapi Suharto, selain keluguannya dalam berpolitik bila dibandingkan Sukarno yang sudah piawai, adalah ketaksanggupannya memaksa Sukarno dengan keras karena tidak adanya dukungan kompak dari angkatan bersenjata. Suharto bahkan tak yakin mendapat dukungan di Jawa Timur, tempat para pendukung Sukarno masih kuat, apalagi di Jawa Tengah yang membangkang. Bahkan pasukan anti komunis yang gagah berani pimpinan Ajie di Jawa Barat, berkedudukan dekat dengan ibukota, tak bisa diandalkan untuk mendukung Suharto melawan Presiden bila terjadi pertempuran. Terlebih lagi, partai-partai masih tetap menjadi pendukung kuat Sukarno. Hal itu tampak pada pertengahan Februari saat Sukarno memenangkan perang kehendak melawan AD, dan terutama melawan Suharto; tampaknya tak ada cara efektif untuk mengatasi kerasnya pendirian Presiden. Asisten Alamsyah Prawiranegara kemudian kembali menyarankan Suharto agar lebih keras mendesak Sukarno; Suharto menjawab: "Saya mengerti yang Saudara maksud. Tapi Saudara tak mengerti prinsip-prinsip pegangan orang Jawa. Misalnya ada pegangan: 'Sabdo Pandito Ratu', yang kurang lebih artinya, raja itu tak

boleh dilawan."[34] Respons semacam itu sebenarnya hanyalah untuk menutupi kebingungannya sendiri akan tindakan apa yang harus dia ambil untuk mengatasi situasi ke depan.

Setelah menyadari bahwa masalah melanjutkan legalitas PKI adalah pilar utamanya, Sukarno memperjuangkan hal itu dengan cara meningkatkan karismanya—yang ternyata berhasil—untuk memberi tekanan psikologis kepada lawan-lawannya. Meskipun demikian, hal itu merupakan strategi dengan risiko besar membuat para pendukungnya terasing. Pada pidatonya di bulan Desember, contohnya, ia memuji kaum komunis sebagai pihak yang memberi pengorbanan terbesar sepanjang masa revolusi, sebuah ungkapan yang terkesan meremehkan AD, sehingga membuat mereka marah dan membuat banyak orang sipil menarik dukungannya.[35] Meski demikian, Suharto tidak mengambil kesempatan untuk menarik keuntungan dari keputusan yang salah ini. Ia tetap waspada, menunggu bagaimana hal tersebut berkembang. Pada akhirnya, ia diuntungkan oleh momen lain yang membawa dan mendorongnya dengan cepat ke arah yang tak ia duga. Katalisator pemecah kebuntuan politik ini datang di bulan Desember dan awal Januari ketika, dalam upaya nekatnya membangun kembali ekonomi yang terpuruk, pemerintah menetapkan sejumlah langkah ekonomi yang dipersiapkan dengan gegabah namun luas cakupannya, termasuk mendevaluasi rupiah senilai 1.000 poin pada 13 Desember dan menaikkan harga bahan bakar. Perpaduan antara kenaikan harga bahan bakar yang menggila dan dukungan yang terus menerus, hangat, dan bahkan dekat dari pejabat strategis penting AD, termasuk Kemal Idris, Sarwo Edhie, serta anggota pejabat komando daerah militer Jakarta dan orang intelijen Suharto yaitu Ali Murtopo dan Yoga, kepada para mahasiswa, memicu mereka melakukan aksi nyata di minggu awal 1966. Kenaikan harga membuat tarif bus melonjak sangat tinggi, suatu hal yang "menyebabkan para mahasiswa tidak tahan."[36] Pada 10 Januari, pertemuan KAMI di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Jakarta, di kawasan Salemba, yang dihadiri oleh Sarwo Edhie dan anak

buahnya, merancang 'Tri Tuntutan Rakyat' (Tritura) yang isinya: bubarkan PKI, bersihkan kabinet dari anggota yang terlibat G-30 S/PKI, dan turunkan harga. Pada saat yang sama, KAMI mengadakan seminar yang dihadiri oleh Nasution, di mana pada seminar itu, Suharto mengirim sebuah pesan yang isinya secara umum mendukung mahasiswa, yang menurutnya "berada di tengah rakyat, peduli dengan kesulitan rakyat, dan memahami aspirasi rakyat."[37]

Pergerakan mahasiswa, yang awalnya digalang di Bandung tapi selanjutnya dipusatkan di sekitar Fakultas Kedokteran UI di Salemba, adalah elemen penting dalam memperluas debat publik tentang peristiwa-peristiwa di balik tragedi 1 Oktober dan peran PKI di salah satu bidang kenegaraan dalam pemerintahan Sukarno. Setelah itu, hal tersebut menjadi perhatian dan wahana bagi perubahan politik; tanpa hal itu, sulit membayangkan bagaimana Suharto bisa melakukan manuver lihai terhadap Presiden yang semakin agresif. Pada Januari, contohnya, Suharto tampak tak cukup mampu menyatakan dukungannya terhadap tuntutan mahasiswa dan menentang Sukarno. Saat demonstrasi besar-besaran di luar Istana Bogor pada 15 Januari (banyak mahasiswa yang diangkut dengan truk oleh AD), di mana Sukarno mengundang delegasi mahasiswa untuk bertemu dengan dirinya, Suharto berdiri di atas pagar tembok di depan rapat besar massa yang berteriak "Bubarkan PKI", yang hanya bisa dijawab: "PKI sudah bubar, pulanglah dengan tenang." Empat hari kemudian, di sebuah pertemuan di Jakarta, Suharto memperingatkan mahasiswa untuk menjauhi aksi-aksi merusak yang bisa "mempersulit saya," serta menambahkan bahwa mereka harus "berhati-hati ... ada kelompok-kelompok tertentu terus mencari-cari kesalahan KAMI untuk menghancurkan kalian."[38]

Tampak jelas bahwa Suharto tak memiliki strategi lain saat itu selain memainkan peran sabar, berharap, serta menunggu mangsa buruan; termasuk dalam taktiknya adalah mengabaikan begitu saja keputusan Sukarno. Ia bukan saja sangat menyadari pentingnya menjaga tatanan sosial, tapi juga menyadari adanya

peluang yang ditawarkan oleh gerakan mahasiswa untuk mencapai perubahan yang diperlukan. Masalahnya adalah bagaimana menemukan cara untuk menyeimbangkan kedua kebutuhan ini. "Saya berulang kali mengadakan hubungan dengan para mahasiswa itu. Saya mendengarkan pendapat mereka, keinginan mereka, dan hasrat mereka. Saya merasa harus dekat dengan merek, sebab merekalah yang bakal bisa membantu saya, menjaga jangan sampai terjadi kekacauan yang berlebihan. *Chaos* tidak boleh terjadi."[39]

Optimis karena keberhasilan nyata serangannya melawan politik orang baru Suharto, Sukarno mengumandangkan seruan keras pada 15 Januari untuk "bentuklah barisan kalian, kumpulkanlah kekuatan kalian";[40] karismanya yang populer diteruskan oleh para pendukungnya dari beragam kalangan dan segera menjadi sebuah kampanye bagi 'Barisan Sukarno'. Meski kemudian Suharto mengungkapkan bahwa ia telah bertindak dengan tepat saat menjawab tantangan Sukarno ("saya lihat itu bisa berbehaya dan cepat saya cegat, saya tidal menyetujuinya. Maka terbendunglah behaya pertarungan fisik yang bisa membawa korban banyak itu".)[41], sebenarnya ia sedang lengah. AD, menurutnya, berdiri di belakang Presiden dan 'menunggu perintah selanjutnya'.[42] Kelemahan semacam itu mengindikasikan kurangnya pengalaman Suharto dalam pertarungan politik. Ketika sudah jelas terpojok, hal yang bisa dilakukannya hanyalah berpura-pura patuh menanti peluang selanjutnya. Nasution, seniornya yang jauh lebih berpengalaman dalam memahami politik Jakarta yang kompleks, tidak senang akan hal ini. Ia mengumpulkan semua pemimpin angkatan bersenjata, termasuk Suharto, namun pertemuan itu menghasilkan pernyataan dukungan yang jauh lebih tak jelas lagi bagi Presiden.

Jalan keluar dari situasi sulit—di mana Sukarno berhasil mengakali AD—diberikan oleh Ajie. Meski ia dengan kuat mendukung Presiden dan tidak setuju dengan gerakan mahasiswa, ia juga mengkritik usaha orang-orang di sekeliling Sukarno yang ingin memanfaatkan posisi presiden demi keuntungan mereka sendiri. Tiga hari setelah pidato Sukarno, Ajie memberi pernyataan

yang menangkal gerakan pembentukan Barisan Sukarno dengan menyatakan "bahwa seluruh badan pemerintah, warga negara, partai-partai politik, dan organisasi massa ... adalah sesungguhnya adalah pendukung Panca Sila dan Ajaran Pemimpin Besar Revolusi Indonesia ... dan karenanya secara otomatis mereka masuk dalam barisan yang berdiri di belakang Bung Karno."[43] Oleh sebab itu, Ajie melarang lembaga apapun untuk menamakan dirinya sebagai Barisan Sukarno. Sedangkan tanggapan Suharto justru sangat sederhana: melakukan upaya kasar untuk menegaskan pengawasan militer terhadap Barisan Sukarno yaitu dengan meminta agar kelompok dan orang-orang yang berminat masuk Barisan Sukarno mendaftarkan diri ke militer.

Sekitar pertengahan Februari, Suharto bertemu Sukarno di Istana Merdeka di Jakarta. Suharto semakin kecewa dengan sifat keras kepala Sukarno dalam hal menolak untuk mengakui seriusnya tragedi 1 Oktober. Senjata utama Sukarno—kewibawaannya yang membuat Suharto patuh—mulai memudar. Jadi, ketika Suharto berbicara kepada Sukarno dalam bahasa Jawa bahwa "Bapak tetap saya hormati seperti saya menghormati orang tua saya ," ia juga menambahkan "Saya ingin *mikul dhuwur* [menghormati orang tua dan menjunjung tinggti nama baik orang tua] terhadap Bapak. Sayang, yang mau di-*pikul dhuwur mendhem jero* [segala kekurangan orang tua itu tidak perlu ditonjol-tonjolkan] tidak mau ." Maksud Suharto adalah bahwa ia menginginkan Sukarno memutuskan hubungannya dengan PKI dan memperbaiki kembali arah pemerintahannya. Sukarno sadar sepenuhnya, meski Suharto sendiri tampaknya tidak, akan dampak langkah semacam itu—pupusnya kewibawaan dirinya, berakhirnya Nasakom, serta berakhirnya visi jangka panjang politiknya—lantas menolak permintaan Suharto untuk melarang PKI dan justru memerintahkannya untuk meredam demonstrasi mahasiswa. Kesetiaan Suharto kepada Sukarno kemudian terguncang, karena Suharto menghadapi dilema: "Saya tidak patuh secara begitu saja. Sebab, kalau saya menurut kehendak beliau, berarti saya berbuat salah ."[44] Sejak saat itu dan selanjutnya,

dan terutama karena Sukarno, terlepas dari usaha keras Suharto, bersikukuh dengan pendapatnya, Suharto memutuskan bahwa Sukarno harus diganti atau setidaknya dinonaktifkan.

Sukarno bergerak lebih jauh memanfaatkan peluang yang diberikan oleh angkatan bersenjata—yang terkotak-kotak dan tak pasti—kekosongan politik, sikap Suharto yang tak jelas—yang takut bertindak tergesa-gesa menentang Presiden karena bisa memicu serangan dari para petinggi angkatan bersenjata yang pro-Sukarno. Pada awal Februari, Sukarno merombak tugas utama KOTI. Lembaga ini kini berfokus pada tugas melakukan konfrontasi dengan Malaysia, sehingga membatasi kewenangan Suharto dalam posisinya sebagai Kepala Staf untuk melakukan upaya-upaya kepentingan politik dalam negeri. Memang, Suharto hanya berperan di balik layar dalam hal ini, dan memosisikan dirinya sebagai orang yang menyambut baik gagasan ini "mengingat ini bisa mengenyahkan 'pengacau' rezim militer." Sukarno semakin meningkatkan tekanannya, yaitu dengan memuji pengorbanan PKI yang membuahkan pergulatan kemerdekaan Indonesia, pada sebuah pidato pengukuhan Barisan Sukarno di pertengahan Februari, dan mulai mengatur pembebasan orang-orang yang dianggap mendukung PKI.[45] Setelah dengan hati-hati menggerakkan upayanya dan memerhatikan bahwa Suharto tampak hampir tunduk sepenuhnya, akhirnya Sukarno secara meyakinkan kembali memperpanas suasana dengan merombak kabinetnya pada 21 Februari menjadi "Kabinet Dwikora Reformasi". Pada kabinet baru ini, Nasution dan beberapa orang yang antikomunis diberhentikan, tapi para menteri yang dianggap dekat dengan PKI, terutama Subandrio dan Omar Dhani, dipertahankan. Dan di dalam kabinet itu, menteri-menteri militer, kecuali Suharto, dianggap sebagai pendukung Presiden. Diberhentikannya Nasution—tantangan jelas yang diberikan Sukarno kepada para penentangnya"[46]—telah menjadi 'petir di siang bolong' dan membuat posisinya sebagai kepala staf Angkatan Bersenjata juga tidak berfungsi lagi. Pada hari selanjutnya, Sukarno mengganti nama Koti menjadi Kogam (Komando Ganyang Malaysia), dengan

dirinya sebagai panglima dan Suharto sebagai kepala staf. Fungsi lembaga itu dibatasi hanya mengurus konfrontasi dengan Malaysia. Beberapa hari kemudian, pada 26 Februari, Sukarno membubarkan KAMI, sebuah tindakan yang mau tak mau harus dipatuhi Suharto. Demonstrasi mahasiswa dilarang kembali dan mahasiswa dilarang berkumpul bahkan dalam kelompok kecil sekalipun. Sukarno kembali berbicara dengan antusias tentang Marxisme.

Suharto sendiri sebenarnya sudah diajak berkonsultasi oleh Sukarno tentang bentuk kabinet barunya, meski kemudian ia mengungkapkan bahwa "pada waktu pelantikan kabinet baru tidak banyak memuaskan banyak pihak karena masih banyak wajah lama."[48] Sukarno memutuskan untuk memberhentikan Nasution dan menawarkan Suharto jabatan sebagai menteri koordinator pertahanan dan keamanan. Suharto menolak—mungkin sebagai tanda rasa simpatinya kepada Nasution, atau karena khawatir akan munculnya kecemburuan di kalangan teman-teman sejawatnya sekaligus ungkapan rasa enggannya untuk dianggap terlalu dekat dengan Presiden. Memang, menurut sebuah laporan, ia mengancam mengundurkan diri setelah mendengar nasib Nasution. Tapi, seperti yang diungkapkan Crouch, "diberhentikannya Nasution" mungkin tidaklah terlalu menyakitkan Suharto, karena Suharto semakin memiliki cengkeraman kuat dalam kepemimpinan AD akibat diberhentikannya Nasution itu."[50] Malam sebelum kabinet diumumkan, Suharto, sadar akan adanya perubahan yang sudah di ambang pintu, mengunjungi Nasution dengan sebuah skenario agar Nasution menerima penempatan sebagai Wakil Panglima Staf. Diterimanya usulan itu oleh Nasution menandakan titik balik hubungan mereka yang tegang. Pengaruh Nasution telah memudar sejak "promosinya" di tahun 1962. Beragam rumor tentang kemungkinan pemberhentiannya telah merebak di Jakarta beberapa bulan sebelum kudeta; kemudian, amat terpengaruh oleh kematian putrinya, khawatir akan kondisi rentan kesatuan angkatan bersenjata, dan mungkin terbebani oleh ketidakpastian yang terus menerus serta tuntutan untuk selalu memenangkan pertempuran, ia

tak mampu berkiprah efektif dalam politik. Meskipun demikian, karismanya masih tetap tinggi. Ia tak pernah menanggapi harapan teman sejawat militernya agar "maju menggantikan Bung Karno".[51]

Momentum di pertengahan dan akhir Februari menunjukkan betapa kecilnya perkembangan diplomasi "sabar" yang Suharto lakukan, dan perlunya keberpihakan yang lebih jelas melawan Sukarno. Menurut satu laporan kontemporer, "para jenderal tampak sudah kehilangan inisiatif dan solusi, sementara Sukarno di pihak lain telah memulihkan kembali kekuatan dan energi yang tampak hilang pasca 30 September."[52] Harapan untuk membangkitkan reformasi politik memudar secara bertahap seiring dengan sikap Suharto yang menolak untuk secara terang-terangan menentang Sukarno; hal ini membuat kesal masyarakat yang mendukungnya. Akhirnya, ia mengambil langkah tegas untuk mengubah jalur politik. Di satu sisi, ia menggunakan bukti-bukti yang ada untuk menegaskan keterlibatan Sukarno dalam usaha kudeta—atau setidaknya bukti-bukti bahwa Sukarno sudah mengetahui hal itu sedari awal—untuk makin meyakinkan keberpihakan para pejabat senior Angkatan Darat kepada dirinya. Lebih pentingnya lagi, ia memberi dukungan kepada para pejabat yang anti-Sukarno agar memicu gerakan mahasiswa yang lebih intensif dan meningkatkan ketegangan sehingga mencapai sebuah kondisi di mana Sukarno tak mempunyai pilihan lain selain meminta bantuan Suharto untuk mengendalikan keadaan. Meskipun Suharto mengaku telah mengendalikan gerakan mahasiswa[53] dan gerakan itu secara diam-diam mendapat dukungan dari militer, gerakan itu sendiri juga murni merupakan aspirasi rakyat. Kostrad, yang operasionalisasinya dipimpin oleh Kemal Idris, yang datang menemui Amirmachmud untuk mengkonsolidasikan kepemimpinan efektif pasukan di Jakarta, menjadi pusat intelijen gerakan mahasiswa. Suharto terus mendapatkan informasi tentang gerakan ini melalui mantan anggota intelijen Kostrad, terutama Yoga Sugama dan Ali Murtopo.[54] Ali Murtopo sendiri menjalankan peran aktif dalam mengatur

pola strategi unutk melindungi mahasiswa yang sedang berdemonstrasi.

Meski aktivitas mereka dilarang oleh Amirmachmud (ia sendiri dianggap bersimpati kepada Presiden karena pernah awalnya ditempatkan di Bogor, dan tak ingin melihat Jakarta menjadi medan pertempuran antara kekuatan pro dan anti-Sukarno), kelompok mahasiswa terdorong untuk memulai rangkaian eskalatif demonstrasi dari 23 Februari. Hari selanjutnya, pada acara pelantikan kabinet baru, untuk pertamakalinya mahasiswa melakukan aksi nyata memblokir jalan untuk mencegah para menteri baru menghadiri upacara pelantikan. Demonstrasi ini menyeruak masuk ke lingkungan Istana sehingga membuat pasukan Cakrabirawa melepaskan tembakan yang menewaskan seorang mahasiswa, Arif Rachman Hakim, dan seorang siswi SMU. Suharto mengirim karangan bunga ke upacara pemakaman Arif Rahman Hakim yang dipadati banyak massa. Pun pada hari selanjutnya setelah upacara pelepasan di kampus Universitas Indonesia, Salemba, dan prosesi panjang melalui jalan-jalan yang padat. Kematian Arif Rahman Hakim membuat eskalasi gerakan mahasiswa lebih besar lagi. Suharto menyarankan mahasiswa untuk bersabar dan sekaligus memerintahkan Kemal Idris untuk melindungi mereka dari Cakrabirawa.[55] Taktik tak langsungnya adalah menjadikan rekan terdekat Sukarno sebagai target. Orang itu adalah orang yang jelas-jelas merupakan rekannya yang paling erat dan paling dipercaya, yaitu Subandrio, dengan harapan, jika mereka dapat dipisahkan, agresivitas Sukarno akan menurun.

Suharto sudah sangat paham bahwa aksi berkelanjutan yang dilakukan mahasiswa mulai menghabiskan kesabaran Sukarno dan membuatnya cemas. Perjuangan kini bergerak ke tahap baru yang menentukan. Untuk melindungi mahasiswa, Kemal Idris mengatur pemindahan basis kedudukan mereka di universitas ke markas besar Kostrad di jalan Kebon Sirih, di mana unit pasukan khusus Ali Murtopo ditempatkan. Di bawah dukungan Kemal, Sarwo, dan Ali Murtopo, demonstrasi dimulai kembali dan mencapai

puncak ketegangan baru. Sarwo Edhie bahkan mendaftarkan diri sebagai mahasiswa sebuah universitas sebagai tanda solidaritasnya terhadap aspirasi mahasiswa. Sementara, Suharto terus mendesak pembubaran PKI, namun Sukarno tetap saja menolak untuk bertindak. Pada 4 Maret, Suharto mendesak Sukarno agar mengizinkannya untuk menahan para menteri yang diduga terlibat dengan aksi kudeta. Namun, kembali Sukarno menolak untuk bertindak. Untuk memecah kebuntuan, Suharto harus menemukan cara untuk memaksa Presiden agar bertindak, namun tetap melakukannya dengan cara elegan yang tak memicu oposisi serius dari pihak militer yang loyal kepada presiden. Ia mengumumkan bahwa, "ABRI selaku alat revolusi tidaklah ada pilihan lain selain daripada bersiap untuk menghadapi tantangan-tantangan tsb."[56]

Pada awal Maret, Suharto mengadakan pertemuan dengan staf jenderal di kantor Sugih Arto (asisten I). Setelah mendiskusikan beberapa hal, ia berkesimpulan bahwa pada rapat kabinet yang dijadwalkan tanggal 11 Maret di Istana Merdeka, ia harus menahan anggota kabinet yang bermasalah. Perintah dibuat tertulis agar RPKAD dapat mengambil tindakan, meski kemudian Suharto mendapat laporan agar menunda rencana itu karena khawatir akan keselamatan Presiden. Tampak bahwa rencana itu menjadi salah satu unjuk kekuatan, sejalan dengan konteks ramainya aksi mahasiswa yang menjurus ke anarki, dengan harapan dapat mendesak Sukarno agar bertindak sesuai anjuran yang diberikan Suharto. Sulit diketahui apakah Suharto diam-diam mengetahui rincian rencana tersebut atau tidak, walau Sarwo dan Kemal kelak menyangkal bahwa Suharto mengetahui hal itu.[57] Meski demikian, ia mungkin selalu mendapat informasi terbaru dari staf intelijennya tentang perkembangan yang terjadi, dan tak mengambil langkah apapun untuk membendung aksi pasukan militer yang radikal. Sukarno perlu diyakinkan bahwa gejolak politik yang dipicu oleh aksi mahasiswa dan prajurit yang radikal mulai tak bisa dikendalikan, dan hanya Suharto yang dapat mengatasi hal itu. Sejarah resmi versi Kostrad tak lazimnya mengakui hal ini; pada rapat

tanggal 6 Maret dengan para stafnya, Suharto mengulangi ancaman awal terhadap Sukarno bahwa "stemming dikalangan TNI sudah demikian buruknya sehingga saya tidak dapat bertanggung jawab apabila mereka ada yang meninggalkan pasukan melanggar disiplin untuk menggabungkan aksi-aksi rakyat. Bahkan kalau keadaan demikian buruknya sayapun akan rela mananggalkan pangkat dan meninggalkan jabatan untuk bergabung dengan mereka."[58]

Memang, rencana itu berjalan lebih baik dari yang diharapkan oleh para konspirator, mungkin karena Sukarno telah mendengar gagasan awal yang sudah direncanakan. Pada pagi dini hari tanggal 10 Maret, Suharto, mengadakan pertemuan di markas besar Kostrad dengan para pemimpin mahasiswa, sudah disibukkan oleh laporan adanya serangan terhadap gedung-gedung organisasi pemerintah Cina di seluruh kota. Rapat itu mungkin bermaksud menginformasikan para mahasiswa tentang apa yang akan dilakukannya. Meski kemudian ia menyangkal adanya konspirasi, apa yang terjadi di kemudian hari justru menjelaskan gejala itu. Suharto bertindak dengan hati-hati demi mendapatkan hasil yang diharapkannya itu. "Pak Harto tak melakukan langkah tergesa-gesa," Sumitro kelak menjelaskan, "Ia tak pernah melakukan aksi tanpa pertimbangan matang."[59] Ini bukan bermaksud mengatakan bahwa konspirasi diadakan dengan sangat rinci, dan bukan juga mengatakan bahwa Suharto memiliki kendali penuh terhadap semua aktor di AD. Sebaliknya, rencana itu lebih merupakan upaya untuk menekan Presiden dengan cara yang belum pernah ditempuh sebelumnya, dan untuk meraih peluang dari kelemahan dan kesalahan apapun yang mungkin dilakukan Sukarno.

SUPERSEMAR

Tanggal 11 Maret 1966, Sukarno memulai rapat kabinet sekitar pukul 9 pagi, dengan mendapat jaminan dari Pangdam Jaya, Amirmachmud, bahwa situasi aman. Suharto tidak hadir, ia mengeluh sakit tenggorokan. Sepuluh menit menjelang rapat, Brigjen

Amirmachmud, yang juga diundang pada rapat itu (terlepas dari protesnya) oleh Sukarno, menerima nota dari Brigjen Sabur, ajudan Sukarno, meminta Amirmachmud untuk meninggalkan rapat beberapa saat karena ada beberapa tentara tak dikenal di luar. Mereka adalah "tentara RPKAD Sarwo Edhie, tapi, sebagaimana Sarwo Edhie katakan kepada saya dengan datar beberapa bulan kemudian, 'Kami tidak terang-terangan. Kami tidak memakai baret merah'."[60] Amirmachmud yang tak ingin mengganggu rapat memberi tanda kepada Sabur bahwa tak ada yang perlu dikhawatirkan ("tidak akan terjadi apa-apa"). Sukarno melanjutkan pembicaraannya dalam rapat. Lima menit kemudian, Sabur mengirimi Amirmachmud nota lainnya, dengan satu permintaan yang lebih tegas agar keluar dari ruangan. Pada saat yang sama, Sabur mengirimi Sukarno pesan serupa. Menurut Amirmachmud, tangan Sukarno serta merta gemetar ketika membacanya; ia kemudian meneruskan pesan itu kepada Subandrio. Setelah berdiskusi beberapa saat dengan Subandrio, Sukarno, mungkin mengetahui maksud dari semua ini, dan mungkin mengamati ketidakhadiran Suharto, menunda kelanjutan rapat, menyerahkan kursi pimpinan kabinet kepada Leimena, kemudian meninggalkan rapat. Amirmachmud menemaninya, meyakinkan bahwa Sukarno akan aman. Ia mengantar Sukarno, setelah beberapa saat berbicara mengenai ke mana Sukarno akan pergi, ke helikopter Sukarno di halaman istana. Sukarno ditemani Subandrio yang tak bersepatu, dan juga Chaerul Saleh. Helikopter mengudara menuju istana kepresidenan Bogor.

Segera setelah rapat dibuka kembali untuk kemudian ditutup oleh Leimena, Amirmachmud keluar dari istana bersama-sama dengan Mayjen Basuki Rachmat dan Brigjen Moh.Yusuf, yang menghadiri rapat dalam kapasitas mereka sebagai menteri masalah veteran dan menteri perindustrian. Menurut penuturan Amirmachmud, Yusuf menyarankan agar mereka bertiga pergi ke Bogor untuk melakukan pembicaraan bersama Sukarno, "sehingga Bung Karno tidak merasa telah ditinggal oleh Angkatan Darat".[61] Sebelum berangkat, mereka melapor kepada Suharto di rumahnya di

Jl. Haji Agus Salim saat ia sedang beristirahat. Mereka bercerita kepada Suharto perihal dihentikannya rapat kabinet secara mendadak, minta izin untuk berangkat ke Bogor, dan bertanya jika ada yang harus disampaikan kepada Sukarno. Menurut Amirmachmud, Suharto menjawab: "Pertama, sampaikan salam saya kepada Bung Karno dan kedua, Bung Kamo tidak usah khawatir. Kitil sanggup menyelamatkan Pancasila, UUD 1945, menyelamatkan Revolusi Indonesia dan memelihara keamanan, asal kita diberi kepercayaan untuk itu"[62] Suharto di kemudian hari menyatakan bahwa ia "mengutus" ketiga pejabat itu untuk menyampaikan kepada Sukarno kesiapsiagaannya dalam "mengatasi keadaan apabila Presiden Soekarno memberi tugas dan kepercayaan penuh kepada saya".[63] Saat itu, menurut Amirmachmud, ia tak menyebut-nyebut surat pelimpahan wewenang.

Ketiga pejabat ini kembali ke Istana dengan memakai helikopter Sukarno yang sudah dipersiapkan untuk perjalanan ke Bogor. Selama perjalanan, mereka berdoa. Ketegangan luar biasa dari drama yang akan terjadi ini tercermin dalam penuturan terperinci Amirmachmud (yang mungkin saja disesuaikan untuk memperkuat perannya).[64]

> Kita tiba di Bogor antara pukul 12.00–13.00. Pada waktu itu Bung Karno sedang tidur. Kita diterima oleh Brigjen Sabur. Kita menunggu sampai Bung Karno bangun. Setelah Bung Karno bangun kemudian beliau duduk di pavilyun, dengan hanya memakai celana kolor putih sampai lutut dengan kaos oblong, yang selanjutnya menanyakan kepada kita apa maksudnya datang ke Bogor menemui beliau itu. Kemudian Pak Basuki Rachmat menjawab bahwa kedatangannya untuk mendampingi, supaya Bapak tidak dipengaruhi oleh situasi atau kejadian pada waktu sidang tadi dan tidak merasa diasingkan, dan sebagainya, dan sebagainya. Sehingga Bapak tenang dan sanggup mengatasi persoalan.. Lalu beliau menanyakan bagaimana situasi sebenarnya kepada Pak Basuki Rachmat, kepada Pak Yusuf dan kepada saya, saya menjawab bahwa keadaannya aman. Pada waktu itu saya

dibentak oleh beliau sebagai berikut: "Kau bilang aman, aman, tetapi demontrasi berjalan terus."."

Sesudah itu kita berdiskusi, berdialog serta bertukar pikiran yang akhirnya Bung Karno melemparkan pertanyaan bagaimana mengatasi semua itu. Pada waktu itu, suasana hening sejenak. Pak Basuki Rachmat sebagai perwira yang paling senior yang hadir pada waktu itu tidak memberikan jawaban atas pertanyaan yang dilemparkan oleh Bung Karno. Demikian pula Pak Yusuf juga tidak memberikan tanggapan. Dalam keadaan yang demikian itulah maka secara spontan saya menyeletuk dengan polos sebagai berikut: "Alah gampang Pak. Bapak perintah saja sarna Pak Harto. Bapak tahu beres. Yaitu Pancasila diamankan, Undang-Undang Dasar 1945 diamankan, Revolusi dilanjutkan, pembangunan dilanjutkan dan keluarga Bapak dijamin keselamatannya." Saya sendiri heran kenapa saya berani nyeletuk demikian sebab sesuai dengan adat ketimuran, mestinya saya sebagai perwira yang lebih junior tidak sepantasnya memberikan tanggapan mendahului para senior yang hadir pada waktu itu.

Kemudian atas saran saya tersebut Bung Kamo kembali bertanya: "Bentuk bagaimana?" Saya menjawab sebagai berikut: "Bentuk saja team. Saya sarankan Pak Basuki Rachmat Ketua Team, Pak Yusuf sebagai anggota, dan Brigjen Sabur sebagai Sekretaris. Saya sendiri tak perlu duduk dalam team, karena saya seorang Panglima." Ternyata saran saya tersebut disetujui oleh Bung Karno. Sekalipun saya tidak duduk dalam team tersebut, namun dalam perumusan ternyata saya diikutsertakan dalam pembicaraan. Setelah rumusan diselesaikan oleh team, maka Bung Karno memanggil anggota Presidium yang pada waktu itu juga hadir di Istana Bogor. Konsep rumusan yang ditulis tangan dengan vulpen itu kemudian dibaca oleh Bung Karno. Setelah dibaca oleh Bung Karno selanjutnya dibaca oleh Leimena dan lain-lainnya. Dan waktu sampai giliran kepada Subandrio, makil ia mengusulkan beberapa koreksi yang sifatnya tidak prinsipil, tapi hanya koreksi secara redaksional.

Sesudah dikoreksi oleh Subandrio selanjutnya konsep dikembalikan kepada Bung Karno. Dan sesudah dibaca oleh Bung Karno kemudian Brigjen Sabur diperintahkan untuk mengetiknya.

Perlu saya jelaskan bahwa peristiwa itu semua terjadi di ruangan tengah dari pavilyun Istana Bogor, yaitu di tempat meja makan, sehingga pada waktu pengetikan dilakukan, kita bertiga lalu berkumpul di pavilyun bagian muka. Kemudian setelah sembah yang Magrib kita kumpul kembali. Pada waktu itu Bung Karno memakai piyama biru muda, dan Ibu Hartini mendampinginya. Anggota Presidium semuanya juga hadir. Kemudian Brigjen Sabur datang membawa konsep yang telah ditik tadi.

Sabur menginformasikan kepada Bung Karno tentang hambatan administratif bahwa Surat Perintah seperti ini tidak sah karena dari halaman satu ke halaman kedua, tidak ada kata-kata penghubung di bagian bawah halamannya. Pendapat Brigjen Sabur memang tepat, namun saya juga takut jika masalah ini dibicarakan lagi, masalah baru akan timbul. Sayapun spontan menjawab, "Sayang sekali, di saat revolusi kita masih memikirkan rincian administratif. Serahkan saja itu kepada Bung Karno." Kemudian Bung Karno membacanya dengan tenang. Lalu beliau bertanya, "Jadi, saya tanda tangan atau tidak?" Berulang-ulang beliau bertanya dengan kalimat yang sama. Beliau juga menanyakan hal itu kepada anggota Presidium. Mengingat bahwa, karena ketidak-jelasan Bung Karno, hal ini bisa saja mentah begitu saja atau tak jadi dilakukan, saya kembali menyela, "Lakukan saja Pak, dengan nama Allah SWT" Kata-kata saya 'dengan nama Allah' diulang oleh semua anggota Presidium, pertama Pak Leimena, yang Anda kenal, beragama Kristen, lalu diikuti semua yang hadir. Kemudian setelah Bung Karno juga mengatakan 'dengan nama Allah', yang kemudian juga diulang oleh semua yang hadir, Bung Karno menandatangani naskah itu. Setelah menandatangani dokumen itu, Bung Karno memberikannya langsung kepada Pak Basuki Rachmat.

Kemudian kami bertiga kembali lagi ke Jakarta memakai mobil. Di Jembatan Satu Duit, Bogor, saya meminjam naskah itu, dan saya harus membacanya dengan menggunakan senter karena hari telah gelap [saat adzan Isya]. Setelah mempelajarinya saya berteriak, "Wah, wah. Ini pemindahan kekuasaan." Kami semua terkejut karena saat itu, benar-benar saat itu kami tak memikirkan atau membayangkan situasi pemindahan kekuasaan. Setelah tiba di Jakarta, kami langsung ke Jl. Haji Agus Salim

> [Rumah Suharto] untuk melapor kepada Pak Harto, namun Pak Harto pada saat itu sedang berada di Markas Kostrad menerima para panglima yang berdatangan dari daerah-daerah. Karena itu, kami bertiga langsung ke Markas Kostrad dan dokumen itu langsung diserahkan kepada Pak Harto oleh Pak Basuki Rachmat.

Meski ada nuansa menyombongkan diri sendiri dalam penuturan ini, cerita ini sesuai dengan versi lain, termasuk versi Suharto. Tampaknya sangat tidak mungkin bahwa Suharto telah memberi instruksi tegas kepada ketiga jenderal itu sebelum mereka berangkat ke Bogor; lebih tidak mungkin lagi jika mereka membawa sejenis rancangan untuk mendapat tanda tangan Sukarno. Bagaimanapun, mereka bertugas menekan Sukarno agar mengambil tindakan mengatasi situasi kacau yang dengan cepat terjadi, dan membuat Sukarno menyadari bahwa di tangan Suhartolah dirinya dengan cepat dapat diselamatkan. Tak diragukan lagi bahwa ketiga jendral itu mendesak Sukarno yang khawatir, ketakutan, dan mungkin secara psikologis cemas, untuk menandatangani Supersemar. Dalam suasana seperti itu, tindakan tersebut merupakan jalan dengan risiko terkecil, mengingat Sukarno berpandangan bahwa ia bisa selalu menguasai Suharto dalam situasi politik ibukota yang sulit. Suharto, untuk pertama kalinya akan membuktikan bahwa Sukarno salah. Ia telah menyiapkan jalannya, dan merasa yakin bahwa Sukarno tak akan lagi mengubah arahnya.

Malam itu di Kostrad, Suharto, mengenakan seragam loreng dan syal kuning di lehernya, memerintahkan rapat staf, yang juga dihadiri oleh kelompok-kelompok sipil pendukung. Telah jelas bahwa kekuasaan yang dilimpahkan kepadanya, setidaknya di atas kertas, jauh melampaui apa yang diharapkannya, meski ketika menerima surat itu ia tak menunjukkan mimik emosional. Sekitar pukul 10 malam, ia muncul, bersama-sama Basuki Rachmat, berbicara dengan kelompok yang telah berkumpul, dan menjelaskan substansi perintah Presiden. Ia bergegas menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dengan membubarkan dan melarang PKI serta badan-badan terkaitnya. Sesaat sebelum tengah

malam, perintah-perintah untuk merancang ketetapan penting diberikan lagi kepada Kol. Sudharmono, dibantu oleh Letnan Murdiono. Suharto menandatanganinya pada dini hari tanggal 12 Maret. Entah bagaimana, surat itu dalam bentuk keputusan presiden, dibuat atas nama presiden, bukan Suharto sendiri. Isinya disiarkan pada pukul 6 pagi oleh RRI.

SETELAH SUPERSEMAR

Dampak langsung setelah keluarnya Supersemar adalah terjadinya ketegangan umum yang menyelimuti ibu kota. Beredar banyak isu seputar pertikaian antara Angkatan Darat dan Angkatan Udara. Tanggal 12 Maret, Sarwo Edhie memimpin pasukannya dalam sebuah parade kemenangan spontan, sekalipun ada bahaya, melalui jalan-jalan di Jakarta, dan disambut dengan antusias oleh warga masyarakat. Tentara, barangkali atas dorongan Suharto, juga dengan garang menyerbu kantor pusat BPI (Biro Pusat Intelijen) yang diketuai Subandrio di Menteng, dan merampas banyak sekali dokumen.

Terlepas dari fakta bahwa pembubaran PKI adalah salah satu tujuan utama Suharto sejak 1 Oktober, Sukarno terkejut dan marah atas tindakannya yang cepat dan tegas itu. Menurut Amirmachmud, "setelah Suharto membubarkan PKI, Sukarno mengirim Leimena ke rumah Suharto, menyampaikan teguran keras kepada Suharto karena membubarkan PKI." [Menurut Subandrio, jawaban Suharto singkat dan tegas: "Pak Leimena jangan ikut campur. Sekarang saya yang kuasa.]"[65] Leimena jugalah yang mengemban perintah perihal Suharto yang menyuruh kami bertiga, yaitu Pak Basuki Rachmat, Pak Yusuf, dan saya sendiri, menghadap Sukarno di Bogor.[66] Ketika ketiganya memang muncul di Bogor atas persetujuan Suharto, Sukarno memojokkan mereka dengan mengatakan bahwa ia tidak pernah menyebutkan dalam perintahnya agar PKI dibubarkan. Namun, ia tak pernah berusaha membatalkan atau memungkiri perintah itu, dan ia kemudian terlihat

berbicara santai dengan Suharto hari itu. Dalam beberapa hari, AU dan AD sama-sama mengeluarkan pernyataan mendukung Suharto, pengemban Supersemar. Karena surat itu berasal dari Sukarno, mereka tak punya pilihan lain.

Memang saat itu terjadi perdebatan panas mengenai sifat dan cakupan kekuasaan yang dilimpahkan kepada Suharto dengan keluarnya Supersemar—suatu "tindakan lihai promosi politik."[67] Suharto akhirnya berpendirian tegas: "menurut saya, perintah itu dikeluarkan di saat negara dalam keadaan gawat, di mana integritas Presiden, ABRI, dan Rakyat sedang berada dalam bahaya, sedangkan keamanan, ketertiban dan pemerintahan berada dalam keadaan berantakan."[68] Ia tampak tak pernah ragu bahwa, saat kekuasaan diberikan kepadanya, ia bisa saja menyalahgunakan kekuasaan itu secara sewenang-wenang sebagai alat untuk memenuhi tujuan-tujuan yang ia inginkan sebelumnya, yang sayangnya ditolak oleh Presiden. Memang, kekuatan Supersemar secara fundamental bertambah karena cara dan gaya Suharto dalam menjalankannya. Itu adalah senjata mengejutkan—"bukan sebagai alat untuk unjuk kekuasaan namun lebih sebagai sebuah alat untuk meraih kekuasaan"[69]—untuk digunakan dalam cara terbatas bagi tujuan tertentu dan dalam konteks tertentu. Terlebih lagi, ini adalah wewenang terbatas untuk bertindak. Kekuasaan tertinggi negara masih berada di tangan Presiden, sebagaimana dengan susah payah berusaha ditekankan Sukarno dalam sebuah pengumuman tanggal 17 Maret,[70] yang disikapi Suharto dengan sangat hati-hati. Suharto memang belum memiliki rencana jangka panjang untuk merebut kekuasaan.

Sulit untuk menduga terlalu jauh arti penting Supersemar—atau arti penting interpretasi berlebihan atas Supersemar yang disepakati Suharto—baik secara psikologis maupun hukum. Supersemar, sebagaimana penulis biografi Ibu Tien menyebutnya secara berlebihan, "berkembang menjadi tonggak sejarah sebuah negara yang lahir kembali". Menurut Sumitro, "yang paling penting adalah apa yang dilakukan Pak Harto saat surat itu keluar."[71] Kemudian,

dalam sebaris kalimat memorandum DPR-GR tanggal 9 Juni, Supersemar menjadi "kunci menuju lembaran baru sejarah Revolusi Indonesia, dan merupakan titik balik ke tujuan dasar Revolusi yang murni dan sejati seperti yang dicita-citakan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan tertuang dalam Pembukaan serta Batang Tubuh UUD 1945."[72] Agak tak jujur, Suharto kelak mengatakan bahwa "Saya tidak pernah menganggap 'Supersemar' itu sebagai tujuan untuk memperoleh kekuasaan. Surat Perintah 11 Maret itu juga bukan merupakan alat untuk mengadakan *coup* secara terselubung".[73] Tindak-tanduk Suharto sendiri setelah menerima surat itu membuktikan kebohongan pernyataannya tersebut. Supersemar, sebagaimana diakui Suharto, adalah "tonggak sejarah yang sangat penting bagi keselamatan rakyat, bangsa, dan negara".[74] Supersemar juga, klaim Suharto, "adalah awal perjuangan Orde Baru".[75]

Tindakan Suharto melarang PKI dengan mengatasnamakan kekuasaan barunya mampu memecahkan kebuntuan politik. Pada akhirnya ia berhasil menggeser Presiden secara meyakinkan, dan, karena Supersemar berasal dari tangan Presiden sendiri, Suharto melakukan hal itu dengan cara yang tak bisa ditafsirkan sebagai menyerang atau menjatuhkan Sukarno. Beberapa hari setelah peristiwa Supersemar, ia mengatakan kepada wartawan bahwa "Presiden Sukarno .... tetap dalam fungsinya sebagai kepala negara. Segala sesuatunya berjalan sebagaimana biasa."[76] Berbesar hati atas diterimanya usulan pelarangan Partai Komunis—tercermin dalam dukungan yang kian luas terhadap demonstrasi Sarwo di Jakarta pada 12 Maret—Suharto bergerak cepat dan tak terduga guna memperluas pengaruhnya di mana-mana. Ia mengeluarkan pernyataan resmi, mendesak pemerintah dan kalangan bisnis untuk menunaikan tanggung jawab mereka lagi, dan melarang partai politik menerima anggota dari mantan PKI. Orang yang semula tak terlalu berbakat dalam berpidato ini sekarang membuat pidato dan pengumuman setiap hari. ("perilakunya menjadi kaku dan pidatonya menjemukan," demikian pendapat seorang asing).[77] Kini,

ia segera membuang retorika revolusioner yang pernah mendominasi wacana politik di masa-masa kejayaan Sukarno.

Lebih berani ketimbang hal-hal yang telah disebut sebelumnya, bagaimanapun, adalah langkah Suharto pada 18 Maret, di bawah tekanan para mahasiswa dan unsur garis keras angkatan darat, menahan 15 anggota dari apa yang disebut sebagai kabinet Dwikora yang direformasi, karena dicurigai berperan dalam percobaan kudeta atau karena korupsi. Sukarno dengan keras mencegah usaha tentara untuk mengubah kabinetnya, tapi penahanan dramatis ini menunjukkan betapa cepat kekuasaannya memudar karena Supersemar. Meski begitu, Suharto berhati-hati untuk tidak memaksakan "memenggal orang yang pernah menjadi 'raja'-nya",[78] dan mungkin menganggap hal tersebut bukan sebagai pilihan yang realistis atau bahkan diinginkan pada saat itu.

SUHARTO DALAM KEKUASAAN EKSEKUTIF

Setelah kudeta terselubung dapat diatasi, Suharto kini dapat mulai menampakkan pengaruhnya di pemerintahan Indonesia. Langkah pertamanya adalah membantu Sukarno membuat kabinet baru (Kabinet Dwikora yang disempurnakan) di akhir Maret untuk mengganti mereka yang dicopot dari keanggotaannya melalui penangkapan dua pekan sebelumnya. Dalam kabinet baru, Suharto adalah salah satu dari enam deputi utama (yang lain adalah Adam Malik, Sultan Yogyakarta, Leimena, Ruslan Abdulgani, dan Idham Chalid) yang membentuk sebuah presidium, dan ia sendiri memegang posisi menteri pertahanan, dan Panglima ABRI, serta kepala staf Koti. Tapi, dalam hal komposisi keanggotaan, kabinet ini adalah sebuah sinyal kesinambungan alih-alih perubahan radikal, meski ABRI merupakan mayoritas. Suharto menyatakan bahwa sebagai sebuah tahap awal, hal ini mencerminkan kemajuan paling maksimum.

Meski demikian, kepercayaan dirinya dalam mengarahkan masalah tampak semakin meningkat, dan ia makin cenderung membuat pidato berisi nasihat perihal sifat masyarakat Indonesia serta arah yang tepat bagi mereka. Beberapa hari kemudian ia menyatakan bahwa "Indonesia tidak puas dengan demokrasi barat dan demokrasi luar lainnya, dengan ekonomi liberal atau totaliter". Hal-hal yang didasarkan pada liberalisme atau materialisme "tidak memberi kepuasan kepada jiwa bangsa Indonesia". Pada peristiwa-peristiwa penting 1966, ia berkata bahwa "rakyat Indonesia tak mengenal klas-klas, dan perjuangan kaum buruh Indonesia bukanlah perjangan Klas". Bulan Agustus, ia menyatakan bahwa meski ABRI bukanlah ahli di bidang politik atau ekonomi, "ABRI cukup mengetahui dan menyadari persoalan-persoalan nasional dan internasional yang dihadapi, bagaimana penyelesaiannya dan siapa-siapa yang dapat mangatur pelaksanaannya."[80] Gaya yang ia tunjukkan pada kesempatan seperti itu adalah gaya yang sangat memohon agar diberi kepercayaan dan dukungan dari rakyat, walaupun tindakan-tindakan yang ia ambil hanyalah jawaban atas harapan dan desakan mereka.

Kabinet baru, secara efektif merupakan tritunggal antara Suharto sendiri, Adam Malik sebagai menlu, dan Sultan yang menangani masalah ekonomi. Mereka berdua (Adam Malik dan Sultan) adalah pilihan yang menarik dan cerdas: keduanya sipil, memiliki mandat revolusioner, dan terhindar dari cacat nama baik seperti saat politik sipil jatuh semasa 1950-an. Mereka memberi Suharto wajah yang dapat dipercaya untuk rezim baru yang tengah dalam proses pembentukan. Tugas Adam Malik adalah memperbaiki hubungan politik dengan negara tetangga dan khususnya dengan dunia Barat. Sultan punya tugas berat membangun kembali kepercayaan investor asing dan menciptakan paradigma baru pembangunan Indonesia. Bersama-sama, tiga serangkai ini membentuk kepemimpinan kolektif, di mana Suharto sendiri bukanlah yang tertinggi.

Meski jelas bahwa Suharto memiliki pendirian tegas perihal arah kebijakan umum yang akan ia ambil, ia masih kurang jelas perihal lingkup dan bentuk pemerintahan yang bakal ia bangun, serta hubungannya dengan Presiden. Dia tentunya masih belum yakin akan loyalitas pejabat senior, terutama di unit-unit daerah angkatan lain dan di unit-unit daerah Angkatan Darat di Jawa Timur, tempat para perwira masih setia mendukung Sukarno, dan masih berupaya keras menghindari tindakan apa pun yang bisa mengacaukan keadaan. Tapi, sejak saat itu dan seterusnya, ia mulai memperlihatkan ketegasan yang lebih besar ketika melakukan manuver untuk memperkuat cengkeramannya terhadap Angkatan Bersenjata dan aparat negara. Sejumlah menteri telah ditangkap, para pejabat di birokrasi mulai mengalami pembersihan (dan penghijauan tingkat senior dengan memasukkan fungsionaris militer), sejumlah besar pejabat di AU juga ditangkap dan Pasukan Pengawal Presiden, Cakrabirawa, dibubarkan. Pembersihan anggota kabinet parlementer terus berlangsung, dan meningkat di bulan Maret dengan disingkirkannya 63 anggota PKI lainnya. Pembersihan politik juga meluas ke PNI pada April 1966. Pada kongres partai di Bandung, Angkatan Darat, bekerja sama dengan pembangkang antikomunis PNI seperti kolega Suharto dari Jawa Tengah, Hadisubeno dan Hardi, mengganti kepemimpinan yang Sukarnois dengan kepemimpinan yang lebih bisa berkompromi dengan situasi baru. Ketika membuka kongres itu, Suharto menyatakan bahwa pandangan partai "harus selalu bersesuaian dengan harapan rakyat, jika tidak, partai akan dikoreksi oleh rakyat; bahkan bisa dihancurkan oleh rakyat sendiri".[81] Kepolisian juga menjadi sasaran pembersihan skala kecil pada pertengahan 1966, sebuah proses yang meraih momentum pada 1967.

Para pejabat eselon senior AD juga menjadi perhatian. Pada Mei 1966, Suharto mengirim Ajie, Umar, dan Pangdam Diponegoro, Suryosumpeno, untuk mengikuti kursus khusus di Seskoad. Ajie ditunjuk sebagai dubes di London pada bulan Juli. Pada bulan yang sama, Rukman, mantan pangdam Brawijaya dan

panglima antardaerah Indonesia Timur (juga mantan teman sekelas Suharto di SSKAD/Seskoad) diangkat menjadi staf di markas besar AD. Suryosumpeno menjadi sekretaris militer Sukarno dan beberapa waktu kemudian mendapat jabatan tinggi di Departemen Dalam Negeri. Ia digantikan oleh anak buah Suharto dan mantan koleganya di Divisi Diponegoro, Mayjen Surono pada bulan Juli, dan Divisi itu sendiri menciut menjadi 2.500 orang saja. Pada saat yang nyaris bersamaan, Sumitro mengambil alih jabatan panglima Brawijaya di Jawa Timur, di mana "ia menghancurkan usaha-usaha di kalangan perwira dan veteran divisi untuk menghimpun dukungan bagi Sukarno pada akhir 1966".[82] Menjelang pertengahan 1967, Mursyid dan panglima antardaerah Sumatra yang Sukarnois, Letjen Mokoginta, yang ambisinya akan kekuasaan tampak kurang disukai Suharto, dipindahkan ke tugas diplomatik. Satu per satu, perwira-perwira itu, yang dianggap Suharto tidak bisa diandalkan, para pesaing potensial atau agresif, diberi kesempatan untuk mengundurkan diri dengan hormat dan dengan kompensasi menguntungkan. Panglima daerah juga digoyang kedudukannya, sehingga pada awal 1967, Suharto telah menempatkan pendukungnya di seluruh daerah dan komando antardaerah. Perwira-perwira yang masih loyal kepada Sukarno tak punya pilihan lain, seberapa pun enggannya mereka, selain berkompromi dengan kenyataan baru.

Posisi Nasution menciptakan masalah berbeda bagi Suharto. Dulu, Nasution adalah jendral senior AD, seseorang yang bereputasi tinggi, namun ia jatuh seiring dengan kepemimpinan Suharto pada 1 Oktober. Keragu-raguan Nasution setidaknya sebagian disebabkan oleh lukanya, guncangan dan gangguan emosionalnya sendiri, dan mungkin oleh kenyataan bahwa, mengingat hubungannya yang kurang harmonis dengan Sukarno, ia lebih baik bersikap rendah hati. Lagi pula, banyak pemimpin AD tak rela jika Nasution yang puritan kembali memimpin meskipun, menurut Sumitro, "perwira senior saat itu mengharap Jendral Nasution akan maju menggantikan Sukarno."[83] Saat itu, terlebih lagi, ada

tanda jelas bahwa Nasution tak mau menerima kesempatan yang ditawarkan kepadanya, mungkin karena kepercayaan diri dan semangatnya yang kurang, bercampur dengan keinginan hatinya yang paling dalam untuk berbuat hal yang benar bagi negara pada saat ujian besar ini. Suharto sendiri bukanlah teman Nasution; ia tidak berupaya membujuk atau menekan Sukarno agar mengubah pemikirannya untuk tidak mengangkat Nasution sebagai panglima ABRI pada Oktober 1965 dan menolak memberikan Nasution kursi di kabinet pada Februari 1966. Pada akhirnya, terlepas dari upaya tak jelas agar diangkat sebagai wakil presiden untuk jangka waktu yang panjang, Nasution melihat masa depan politik-militernya terbatas, dan ia menerima tawaran Suharto untuk menjadi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara.

Dalam semua manuvernya yang sulit itu, Suharto dan para pendukungnya berhati-hati menekankan reputasi baik ABRI dalam mengemban tugas, dan sifat dasar kesatuan semangat dan antusiasme ABRI dengan rakyat, juga perhatian Suharto bahwa dasar-dasar konstitusional harus selalu dijaga melebihi kekuasaan semata. Bangsa Indonesia, ujarnya pada 4 April, berdasar pada hukum dan bukan absolutisme. Tanggal 13 April, ia mengulang lagi tema lama bahwa TNI/ABRI lahir dari perjuangan rakyat untuk kemerdekaan.[84] Bulan November, ia menyatakan bahwa TNI adalah "inti dan pelopor di dalam memperjuangkan tuntutan hati nurani rakyat,"[85] dan menolak segala gagasan yang mengasumsikan ABRI sebagai kekuatan diktatorial. Kemudian ia, agak berbeda dari biasanya, lalu bersedia diwawancarai dan bahkan ikut menyelenggarakan aksi sosial bersama media asing guna menjelaskan kepada mereka mengenai situasi di Indonesia.[86]

SIDANG MPRS

Meski kekuasaannya meningkat, Suharto masih terancam oleh kedudukan konstitusional Sukarno, oleh fakta bahwa Supersemar bisa saja ditarik kembali kapan pun, serta oleh wibawa politik

Sukarno yang legendaris. Dalam rangka melengkapi dirinya sendiri dengan penyeimbang institusional yang penting, ia berusaha mengimbau terlaksananya sidang MPRS, sumber kekuasaan tertinggi di negara Indonesia, guna menyokong kedudukannya.

Naluri politik Sukarno yang tajam mencium adanya bahaya, sehingga ia mempercepat rapat lebih lanjut dengan pimpinan ABRI. Pada akhir April, Sukarno mengganti lagi keanggotaan DPA sesuai dengan keinginannya; Suharto menanggapi dengan cara mencegah terlaksananya rapat dan melanjutkan "pembersihan" tubuh DPR dan MPRS dari pengaruh PKI. Sukarno balas menanggapi dengan mengancam untuk membubarkan MPRS dan tuntutan terselenggaranya pemilu, serta untuk sementara, bersama dengan Komisi Nasional, memerintah ala masa revolusi. Angkatan Darat, bagaimanapun, dengan dukungan kuat dari mahasiswa, menolak untuk tunduk pada upaya Sukarno memegang peranan—Sukarno, demikian Suharto mengingatkan para pendengarnya, tunduk pada MPRS[87]—dan Suharto menunda sidang MPRS hingga awal Juni.

Mengendalikan hal ini, sidang umum keempat MPRS, penuh tipu muslihat. Tindakan Suharto yang hati-hati terlihat jelas. "Saya melaporkan pada pembukaan sidang MPRS itu apa-apa yang sebenarnya, dengan berusaha menelakkan timbulnya emosi yang tidak kita inginkan. Saya bicara sehati-hati mungkin. Saya tidak menginginkan goncangan yang lebih keras terjadi di negara kita ini." Namun, terlepas dari pernyataannya bahwa ia "tidak mempunyai niat untuk menggeser Bung Karno dari kedudukannya sebagai Presiden",[88] tujuan dibuatnya keputusan MPRS adalah jelas untuk memperkuat kesan bahwa periode transisi telah mulai berjalan. Memang pada pertengahan 1966, Suharto akhirnya memutuskan bahwa Sukarno harus diganti, mungkin oleh dirinya sendiri, tapi proses itu harus dilakukan secara perlahan, hati-hati, sistematis, dan dengan cara yang sah dan konstitusional.

MPRS, ketika itu memiliki 532 orang anggota, mengadakan rapat mulai 20 Juni hingga 5 Juli, dilatarbelakangi oleh gejolak massa dan aksi mahasiswa yang bersinambungan yang berfokus

pada sosok Sukarno; "balai rakyat digaungi nada-nada revolusioner dari para mahasiswa dan Front Aksi".[89] Pada 21 Juni, mengingat surat perintah 11 Maret adalah "upaya khusus untuk mengatasi bahaya yang mengancam keselamatan pemerintah dan arah revolusi, kekuasaan dan kepemimpinan revolusi, serta integritas negara dan bangsa" yang telah diterima baik oleh rakyat maupun DPR-GR, MPRS memutuskan untuk "mengadopsi dan menyetujui kebijakan Presiden ... yang ditetapkan dalam Surat Perintah 11 Maret 1966 yang diserahkan kepada Letnan Jendral Suharto".[90] Pengesahan ketetapan ini menjadi tugas paling mendasar dari MPRS, karena hal ini berarti meninggikan status Supersemar dari pelimpahan wewenang Presiden, yang pada hakekatnya bisa dicabut kapan saja oleh Presiden, menjadi keputusan dari badan tertinggi negara yang tak bisa dibatalkan oleh Presiden.

Hari selanjutnya, tanggal 22 Juni, MPRS mendengarkan laporan pertanggungjawaban Sukarno, pidato 'Nawaksara'. Sukarno memanfaatkan kesempatan ini untuk menekankan peran kepemimpinan yang diberikan kepadanya oleh Majelis ("Saya mengharap seluruh rakyat, termasuk anggota MPRS, agar selalu mengikuti, menjalankan, dan melaksanakan semua yang termaktub dalam kepemimpinan saya!").[91] Sukarno menegaskan lagi prinsip-prinsip yang memandunya, yang terbungkus akronim seperti biasanya. Ini semua adalah bantahan. Dalam pernyataannya yang relatif singkat, tak ada satu pun yang mirip dengan pernyataan maaf, dan tak ada upaya sedikitpun untuk berdalih atas perannya sehubungan dengan peristiwa 1 Oktober 1965. MPRS tidak terkesan dengan apa yang telah disampaikannya, "ini jauh dari harapan rakyat, khususnya anggota MPR Sementara, karena pidato itu jelas tidak mengandung laporan pertanggungjawaban atas kebijakan Presiden ... sehubungan dengan 'Gerakan 30 September'/ upaya Partai Komunis Indonesia serta akibatnya yang kontra-revolusioner". Majelis memintanya untuk "menyempurnakan laporan pertanggungjawabannya pada MPRS, khususnya yang berkaitan dengan sebab terjadinya peristiwa 'Gerakan 30 September'/upaya

Partai Komunis Indonesia beserta akibat yang ditimbulkannya, dan perekonomian juga kemunduran moral".[92]

Tanggal 5 Juli, sadar akan kewajiban "untuk menghentikan penyimpangan UUD 1945", MPRS menetapkan bahwa "semua lembaga negara baik di pusat maupun di daerah adalah seperti yang diatur dalam UUD 1945".[93] Pada hari yang sama, MPRS juga menyepakati sepuluh ketetapan lain yang di antaranya meminta pemilu diadakan tanggal 5 Juli 1968; memberlakukan kembali kebijakan luar negeri Indonesia yang 'bebas dan aktif'; meminta pembentukan kabinet ('Ampera') baru, di bawah Suharto, untuk menggantikan kabinet Dwikora pada 17 Agustus 1966; memutuskan bahwa "jika Presiden berhalangan melaksanakan tugasnya, pemegang Surat Perintah 11 Maret 1966 akan menggantikannya sebagai Pemegang Jabatan Presiden"; mencabut pengangkatan diri Sukarno sebagai 'Presiden Seumur Hidup'; menugaskan pemerintah dan DPR-GR untuk meninjau arah tindakan dan aturan bagi Presiden, terbit sejak pemberlakuan kembali UUD 1945 pada 1959, dan mengubah UU pemerintah dan hukum yang tidak sesuai dengan UUD 1945; menerima dan mengukuhkan keputusan Suharto pada 12 Maret untuk membubarkan dan melarang PKI; dan melarang penyebarluasan ide-ide komunis.[94]

Pada tanggal yang sama, MPRS mengirim catatan ke DPR-GR: menginformasikan bentuk pandangan materi kebijakan luar negeri yang beragam. Pada daftar teratas adalah masalah konfrontasi dengan Malaysia. Majelis menyampaikan harapannya atas "penyelesaian damai masalah ini" dan mencari cara "untuk menghentikan kebijakan konfrontasi". Dalam pidato pembukaan sidang akhir MPRS, Nasution tidak menyinggung Suharto; dengan demikian, meskipun Supersemar telah "memberi kesempatan untuk menyalurkan semua harapan itu ... pada akhirnya pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuenlah yang akan menjadi jalan terbaik untuk mencapai tujuan ini. Jika cara ini tidak diambil, semua gerakan ini akan mengarah pada anarki, kediktatoran militer, liberalisme, dan fenomena berbahaya lainnya". Nasu-

tion berusaha keras menyinggung bahwa wewenang Suharto tak lepas dari kaitannya dengan Presiden: "Pelaksana Surat Perintah 11 Maret tak bisa dipisahkan dari orang yang memberi ia tugas, yaitu Presiden, dan dalam melaksanakan tugas itu, mereka harus bekerja dalam semangat kebersamaan membahas semua masalah dan mencari kesepakatan di antara mereka."[95]

Hasil dari proses ini adalah Sukarno tetap pada jabatannya, namun seremonial belaka sifatnya. Perasaan tersinggung dan jengkelnya pada hasil kerja MPRS telah jelas. Meski begitu, pernyataannya yang seperti biasa mudah dicerna—dan mengakomodasi pandangan-pandangan yang tampak berlawanan—menyiratkan kesan pengunduran dirinya. Ia akan, ujarnya, "menerima diposisikan sebagai Mandataris MPRS."[96] Pokok utama kekesalannya adalah kenyataan bahwa kabinet baru menjadi tugas Suharto, bukan dirinya, dan ini adalah sebuah kebijakan yang dianggapnya tidak konstitusional. Sukarno, walau bagaimanapun, mengalami kekalahan telak. Suharto pada akhirnya ditugaskan untuk mengepalai pemerintahan. Pada pidato yang menyertai ditutupnya sidang akhir MPRS, Suharto memperingatkan bahwa "siapa pun yang menolak keputusan Sid. Umum Ke.IV MPRS dengan cara apapun, maka sebenarnya adalah menentang landasan strukturil UUD '45".[97] Tak lama setelah itu, ia memuji Sukarno atas 'kebesaran jiwanya' dalam menerima keputusan Majelis.[98]

Dua puluh tujuh anggota baru Kabinet Ampera yang diumumkan pada 25 Juli—setelah musyawarah panjang antara Suharto dan partai-partai, kelompok-kelompok mahasiswa, dan kelompok-kelompok sosial lain—dalam kadar tertentu, seperti dikatakan oleh Suharto sendiri, adalah "kompromi antara pikiran lama dan pendapat baru".[99] Tugas utama kabinet tersebut adalah menstabilkan kondisi politik dan ekonomi. Dua belas menteri, enam dari mereka adalah tentara, berasal dari ABRI, namun bukan rezim militer. Partai-partai sedikit terwakili (dua dari PNI, dua dari Nahdlatul Ulama), dan kelompok sipil sisanya kebanyakan adalah teknokrat nonpartai. Ini adalah indikasi bahwa Suharto

mengacu pada pendekatan fungsional terhadap pemerintahan. Suharto sendiri diangkat sebagai ketua dari lima anggota presidium kabinet dan tetap sebagai menteri pertahanan dan keamanan. Tiga serangkai yang telah terbangun muncul lebih jelas dalam presidium itu, sebuah "tim yang kompak dan serasi".[100] Menurut Suharto, kabinet ini akan tanggap terhadap rakyat dan sangat membutuhkan "oposisi yang sehat dan konstruktif, kritik yang membangun, baik dalam forum Lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat, maupun mass-media".[101] Tiga hari setelah itu, Sukarno mengusulkan agar Suharto naik pangkat menjadi jendral penuh.

Suharto, setidaknya di depan publik, mempertahankan pandangannya bahwa Sukarno patut untuk terus mendapat kehormatan sebagai Presiden. Namun, di sisi lain, ia bergerak cepat menyingkirkan lembaga-lembaga dan kebijakan Orde Lama, sebuah tindakan yang pasti telah diperhitungkannya dan yang dapat merusak legitimasi Sukarno. Ia menghapus banyak badan-badan kenegaraan lama, yang tak memiliki dasar konstitusional, yang diabdikan untuk memperkuat cengkeraman Sukarno atas kekuasaan, "seperti Front Nasional, dan KOTI (Komando Operasi Tertinggi).Begitu pun Kogam, Kotrar (Komando Tertinggi Retooling Aparatur Revolusi), Kolognas (Komando Logistik Nasional), dan beberapa lagi."[102]

TIM SUHARTO

Runtuhnya kelompok Yani pada 1 Oktober 1965 telah memberi Suharto keleluasaan yang luar biasa untuk memilih stafnya. Seperti biasanya, ia memilih kelompok orang-orang yang sebagian besar benar-benar ia kenal dan percayai, dan yang bertugas bersamanya dahulu. Dari staf lama Yani, hanya Mursyid dan Alamsyah, mantan kolega junior Suharto, yang diangkat sebagai pejabat staf, masing-masing sebagai deputi I (Operasi) dan asisten VII (keuangan). Tanggal 3 November, Sugih Arto, Sumitro, dan Daryatmo diangkat, masing-masing sebagai asisten I, II, dan VI. Lebih cepat dan

lebih penting ketimbang staf militernya adalah jaringan asisten pribadi yang dibangunnya. Tim kecil yang terdiri atas pejabat militer ini, yang diresmikan sekitar Agustus 1966, disebut Spri (Staf Pribadi), yang memberi masukan intelijen maupun nasihat bagi Suharto. Tiap anggota diberi tema khusus untuk dibahas, seperti keuangan, ekonomi, atau intelijen. Inilah gaya organisasi yang erat kaitannya dengan pengalaman panjang kehidupan militer Suharto, ketika ia dikelilingi oleh kelompok kecil dan setia yang terdiri atas sahabat-sahabat dekatnya yang sama-sama mewarisi tradisi Jawa Tengah.

Pimpinan staf pribadi Suharto adalah Alamsyah Prawiranegara. Sementara, aktivitas intelijen menjadi tanggung jawab Ali Murtopo sekembalinya ke Jakarta setelah perjalanannya ke Asia (untuk mencari legitimasi dan dana yang sangat dibutuhkan dari sumber bisnis Cina dan tempat lain seperti Singapura, Hong Kong, dan Taiwan) dan setelah berada di Jawa Tengah (untuk menyelesaikan masalah politik Diponegoro) pada 1966 bersama Yoga Sugama. Sementara masalah finansial, yang agak kurang terpikirkan, ada di tangan Sujono Humardani meski ia kurang memiliki pengalaman formal di bidang ekonomi. Murtopo mengasah dan memperluas aparat Opsus (Operasi Khusus) yang dikembangkan selama masa jaya Kostrad, menunjukkan keahlian khusus dalam merekrut jaringan kelompok intelijen sipil informal. Untuk memberi semangat dan energi intelektual, ia membawa sejumlah intelektual Cina-Katolik, yang menggabungkan kelompok antikomunis fanatik dan kelompok garis keras politik Islam, dengan disiplin pribadi yang kuat dan ide-ide korporat yang tegas yang ditanamkan oleh guru mereka, pendeta Jesuit, Pater Jopie Beek. Murtopo juga ditugaskan sebagai kepala deputi badan intelijen baru negara, Bakin (Badan Koordinasi Intelijens Negara), menggantikan BPI pimpinan Subandrio. Pengalaman terdahulu Sujono sebagai agen bisnis Suharto di Jawa Tengah tak diragukan lagi sangat penting bagi tugas barunya, demikian juga keyakinannya yang tak tergoyahkan kepada Suharto sendiri ("dia percaya Presiden

Soeharto mempunyai mission, mempunyai wahyu, untuk mengangkat bangsa Indonesia ke tatanen yang lebih baik").[103] Penasehat pribadi ekonomi dan keuangan Suharto ini diberi tugas untuk menemukan dan mengembangkan sumber pendapatan di luar anggaran untuk rezim barunya. Spri terdiri atas enam anggota pada saat pengesahan awal Agustus 1966, dan menjadi dua belas sebelum 1968.

Konsolidasi para penasihat Suharto adalah wujud lain kepercayaan diri dan pengaruh Suharto yang meningkat. Pada masa-masa awal setelah percobaan kudeta, ia meminta saran sekaligus jawaban yang memuaskan dari kolega-koleganya yang luas, akan sebuah taktik yang barangkali terkait dengan kebutuhannya untuk memelihara hubungan dengan berbagai macam kelompok dan kepentingan. Kekompakan yang kian terjalin dalam tim asisten pribadinya, terutama setelah memudarnya tim politiknya terdahulu seiring masuknya anggota-anggota kuncinya, Basuki Rachmat dan Sucipto, ke dalam kabinet Ampera, serta keleluasaan besar yang diberikannya kepada mereka dalam melaksanakan tugas tertentu—menjadi sumber ketegangan di antara para pejabat senior yang merasa di luar lingkaran yang beruntung itu. Menurut Nasution, ini membuat Suharto tak bisa menerima nasihat dari mereka yang mendukung paradigma politik reformis dan progresif bagi rezim baru, terutama dirinya sendiri, serta Kemal dan Dharsono.[104]

Setelah penasihat terdekatnya, hal lain yang dibangun Suharto adalah Kopkamtib yang penting sekali pada masa awal Orde Baru, yang "muncul sebagai badan yang paling menindas dan menakutkan pada rezim itu, yang dapat campur tangan pada aktivitas setiap organisasi dan menangkap orang dengan semena-mena."[105] Kekuatan khusus yang dimiliki Kopkamtib memberi kuasa komandan Angkatan Darat daerah untuk menangkap tanpa surat perintah, menanyai, serta menahan tanpa jangka waktu jelas, orang-orang yang perilakunya mencurigakan dan merugikan keamanan; akibatnya, bagi rezim baru, Kopkamtib menjadi sebuah kekuatan pengaman di luar hukum dan terus bekerja melakukan

aksi intelijen dan keamanan. Komandan-komandan daerah, dipersiapkan sebagai pelaksana Kopkamtib, berlanjut menyelenggarakan operasi keamanan di bawah panji Kopkamtib, bahkan ketika persetujuan darurat Pepelrada (Penguasa Pelaksanaan Dwikora Daerah) dihapuskan pada tahun 1967.

Kombinasi antara kolega dekat yang terpercaya dan kekuatan pengaman internal yang amat terkendali namun luas serta aktif adalah sifat masa awal Orde Baru. Bagi Suharto, tak ada alternatif lain selain bertindak dengan cara itu, mengingat adanya gejolak sosial politik dan munculnya ketidakpastian mengenai loyalitas dan kontrol politik, serta keengganannya—yang bisa dimengerti—untuk menggunakan mesin institusional Orde Lama. Spri di satu pihak, dan eselon teratas Kopkamtib di lain pihak pada hakikatnya merupakan sebuah struktur jaringan patronase yang dibentuk secara vertikal. Tapi, mungkin terlalu membatasi jika melihat perkembangan ini dalam kerangka personal semata. Perkembangan ini tak hanya menandai munculnya kekuasaan Suharto, namun juga tumbuhnya pengaruh politik Angkatan Darat.

MENGAKHIRI KONFRONTASI, BERGABUNG LAGI DENGAN DUNIA

Sebelumnya saya telah menjelaskan bahwa Angkatan Darat tidak terlalu menekankan aspek-aspek operasional Konfrontasi Malaysia sejak sekitar awal Oktober 1964. Buntut dari peristiwa kudeta, Angkatan Darat membatasi aktivitas di Kalimantan. Mulai saat dibentuknya kabinet baru pada akhir Maret 1966, Suharto, benar-benar menjaga retorikanya, mulai bergerak secara terbuka untuk membawa konflik ke arah hubungan normal yang pulih dan dekat dengan Malaysia, dengan mengumumkan bahwa Indonesia bisa mengakomodasi konsep Malaysia jika memang rakyat Borneo Utara sungguh-sungguh menginginkannya. Kebijakan Konfrontasi dalam pandangan Suharto, "cuma taktik PKI untuk melibatkan kita ke dalam sebanyak mungkin konfrontasi, supaya PKI bisa meng-

himpun kekuatan yang akhirnya bisa memberontak dan memegang kekuasaan."[106] Konfrontasi itu selalu menjadi strategi militer yang berbahaya bagi Indonesia, mengingat kekuatan udara maupun laut dari koalisi kepentingan yang membela Malaysia. Dalam konteks baru, menurut Suharto, amat penting jika Konfrontasi dihilangkan agar Indonesia dapat berhasil dalam negosiasi bantuan finansial dengan Barat.

Sejak sekitar akhir 1965, Suharto menugaskan Ali Murtopo—yang cerdas, pintar membujuk, serta memiliki keahlian khusus—untuk mencari solusi bagi masalah rumit, membereskan segala sesuatu. Ali, pada gilirannya, menggunakan kontak-kontak yang telah dibangun sebelumnya oleh tim Bangkoknya, khususnya warga Indonesia yang tinggal di luar negeri, seperti Des Alwi, Sumitro Joyohadikusumo, dan Daan Mogot, untuk mengadakan pembicaran formal dengan tokoh senior Malaysia. Pada akhir Mei 1966, pembicaraan rahasia diadakan di Bangkok antara Adam Malik dan Tun Abdul Razak, deputi PM Malaysia, yang akhirnya menghasilkan persetujuan untuk memberi kebebasan kepada rakyat Sabah dan Sarawak guna memilih masuk Malaysia melalui pemilihan umum untuk menghentikan kekerasan sesegera mungkin dan memulai kembali hubungan diplomatik. Tentangan keras dari Nasution—dan pandangannya ini didukung oleh pejabat lain di ABRI—yang merasa terganggu karena prinsip-prinsip telah dikorbankan demi negosiasi itu, mengadakan diskusi lanjutan di mana Suharto (yang gelisah apakah kesepakatan itu mampu memberi ruang atau tidak untuk Sukarno melakukan manuver atau kesempatan untuk Nasution mencoba lagi peruntungannya) memainkan peran besar melalui usulan tambahan rahasia yang diimbuhkan dalam perjanjian yang ditandatangani 11 Agustus 1966 dalam rangka normalisasi hubungan. Pada akhirnya, sebagian karena kuatnya propaganda Ali Murtopo, penghentian Konfrontasi secara cepat "diterima, tak seperti biasanya, dengan hanya sedikit protes dari para politisi dan masyarakat yang sebelumnya dengan antusias

menyambut slogan-slogan Konfrontasi."[107] Kogam dibubarkan pada 22 Agustus 1966.

Kepercayaan diri Suharto dalam mengatasi Sukarno tumbuh semakin kuat; hal ini terlihat dari keputusannya bahwa Indonesia harus kembali bergabung dengan PBB, "jika PBB telah melakukan koreksi terhadap kelemahan-kelemahannya".[108] Menurut Sujono, jawaban Suharto atas pertanyaannya mengenai sikap Indonesia pada badan dunia tersebut hanya satu kata: "masuk". Indonesia diterima kembali pada 28 September 1966.

SEMINAR ANGKATAN BERSENJATA, BANDUNG, 1966

Seminar kedua Angkatan Bersenjata yang diadakan di Bandung pada akhir Agustus 1966 dimaksudkan sebagai forum bagi para pemimpin ABRI untuk mendiskusikan tujuan dan strategi bagi era baru politik Indonesia. Suharto, dalam pidato pembukaannya, memberi dua tugas pada seminar itu; membuat strategi untuk stabilitas dan membuat metode pembangunan ekonomi.[109] Seminar ini terbukti penting dalam menyumbang muatan intelektual dan program sebagai cikal-bakal Orde Baru. Memang Suharto kemudian menyatakan bahwa seminar itu "merumuskan 'Orde Baru', didasarkan pada Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila".[110] Menurut Sumitro, "seminar seperti itu adalah sumber utama, jika bukan satu-satunya sumber, inspirasi bagi Orde Baru ... Orde Baru lahir di Bandung."[111]

Seminar itu diketuai Panggabean, yang baru saja diangkat menjadi deputi panglima Angkatan Darat dan dinaikkan pangkatnya menjadi letnan jendral, yang terpengaruh oleh tampilnya pemikiran PSI yang sangat pragmatis dan rasionalis dari Suwarto, yang pernah menjadi sumber tetap nasihat strategis bagi Suharto sejak peristiwa kudeta. Juga hadir pada seminar itu para ahli ekonomi, seperti ahli ekonomi didikan Barat berusia 35 tahun, dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Wijoyo Nitisastro,

Mohammad Sadli, Sabirin Sumawinata, Subroto, dan Emil Salim. Ikut pula akademisi didikan Barat lainnya, Selo Sumarjan, yang menyumbang kerangka ekonomi politik strategis di masa awal Orde Baru. Seminar itu sendiri mengelompok menjadi 3 bagian yang masing-masingnya membahas masalah-masalah ekonomi, politik, dan militer. Berpikir dalam kerangka seperti ini adalah sesuatu yang baru bagi banyak anggota militer yang hadir, menurut Sumitro, "kebanyakan dari kita di ABRI, kecuali mereka yang bergabung dengan partai politik, sangat sedikit yang paham akan politik ... ABRI sesungguhnya secara dominan terdiri atas orang-orang seperti saya yang tak mempunyai akar politik."[112]

Sebagian pertanyaan tentang ekonomi, politik, dan khususnya pertanyaan penting tentang pemilu, menempati porsi utama. Suharto sendiri tak antusias mengadakan pemilu lebih cepat, meski ia mengakui kebutuhan untuk itu demi alasan sosiologis dan praktis. Bagaimanapun, pengelolaan pemilu akan memunculkan masalah serius: situasi yang rawan keamanan dan bergejolak tidak kondusif untuk melaksanakan dengan semestinya hak demokrasi rakyat; pemilu bisa sungguh-sungguh melahirkan kembali partai-partai politik, dan para politisi, dari era 1950-an. Bagaimanapun, Suharto menyimpulkan, pemilu Orde Baru akan sangat berbeda ketimbang di masa 1950-an.

Pertama, pemilu ini takkan bersifat "ideologis". Pertengahan 1966, ia berkata kepada wartawan bahwa "PKI sebagai partai sudah hancur, yang mungkin tinggal adalah PKI sebagai idee. Saya tahu betul idee tak dapat hancur kecuali dengan suatu counter-idee. Untunglah bahwa counter-idee yang menentang idee PKI cukup kuat di Indonesia, karena memang idee PKI adalah asing bagi Indonesia yang religieus dan ber-Pancasila ini."[113] Kemudian, "rentetan segala krisis nasional yang telah timbul sebelum 1966 bersumber pada penyimpanan-penyimpanan terhadap Pancasila dan UUD '45."[114] Maka dari itu, pemilu perlu dilaksanakan tak hanya dalam suasana aman, namun di bawah payung ideologis Pancasila yang bisa membantu menjamin bahwa

Pemilu itu tidak akan menyebabkan ketidakstabilan. Kedua, diperlukan langkah-langkah untuk mengatur sistem kepartaian yang ada; Sarbini Sumawinata, yang dekat dengan Suwarto dan mantan pemimpin PSI, mengajukan satu mekanisme pada seminar Angkatan Darat. Mekanisme ini bertujuan memecah atau setidaknya melumpuhkan kekuatan partai yang berbasis di Jakarta. Berdasarkan pandangan seminar bahwa "kekuatan Pancasila harus menang dalam Pemilu",[115] ia mengusulkan perubahan prinsip pemilu dari sistem proporsional yang sudah ada menjadi sistem distrik satu-anggota dengan aturan sesuai tempat tinggalnya. Ketiga, peran ABRI dalam politik harus diakui.

Ide Suharto sendiri mengenai fungsi militer cukup jelas pada 1966. Tahun itu ia menyampaikan kepada seorang wartawan bahwa

> Kedudukan anggota militer di Indonesia adalah jauh berlainan dengan kedudukan militer dinegara-negara Barat. Dalam ketata-negaraan Indonesia, militer mempunyai 2 fungsi yakni sebagai alat negara yang bersenjata dan sebagai golongan karya untuk mencapai tujuan revolusi.Oleh karena kedua funksi yang legaal ini, maka ABRI mengambil bahagian aktip dalam kehidupan politik dalam rangka sistem gotong royong yang menjadi kebiasaan nenek moyang kami yang ribuan tahun.[116]

Pada kesempatan lain, ia menyatakan bahwa "penugasan ABRI, chususnya TNI AD untuk menyelamatkan Negara, bangsa dari bencana", dan dalam pidatonya di hari ABRI 1966, ia menyatakan bahwa rakyat menyerahkan "harapan dan kepercayaannya" pada ABRI.[117]

TEKNOKRAT, REFORMASI EKONOMI, DAN BISNIS ABRI

Mungkin warisan terpenting dari seminar ABRI adalah bahwa seminar ini berfungsi sebagai platform kebijakan bagi ekonom-ekonom Universitas Indonesia, yang sebagian besar mengajar di

Seskoad. Di bawah petunjuk Suwarto, mereka mempertajam ide-ide mereka mengenai masalah stabilisasi ekonomi dan mempresentasikannya di seminar. Bagi sebagian besar mereka, ini adalah pertemuan pribadi pertama mereka dengan Suharto. Hampir buta sepenuhnya mengenai teori ekonomi, Suharto sangat terkesan dengan kejernihan ide, kelugasan cara presentasi, dan kepragmatisan mereka. Ia menugaskan mereka untuk mengembangkan sebuah program rehabilitasi ekonomi, yang membuahkan sebundel cakupan reformasi ekonomi yang dikonsep setelah berkonsultasi dengan misi IMF di Jakarta, dan kemudian diumumkan pada 3 Oktober 1966. Rancangan ini bertujuan menyeimbangkan anggaran melalui kenaikan harga dan pemangkasan subsidi: untuk membatasi utang, untuk memperbaiki mekanisme nilai tukar, untuk membatasi kredit, untuk mendirikan kembali prasarana, dan untuk mendorong produktivitas pertanian.[118]

Para ekonom yang disebut "Teknokrat" ini membentuk kelompok penasihat ahli khusus bagi Suharto. Mereka memainkan peran kunci dalam pembangunan kebijakan ekonomi di tahun-tahun awal Orde Baru.[119] Di bawah kepemimpinan Wijoyo yang piawai, terbentuk kolaborasi orang-orang jenius, kesatuan tujuan, fokus internasional, dan orientasi umum ke pasar. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan rezim Sukarno di masa lampau yang sentralistis dan suka mengagungkan diri sendiri. Sementara, kenaifan politik dan ketiadaan ambisi politik para ekonom tersebut justru sangat cocok dengan peran mereka. Kebalikannya, satu tim penasihat politik lainnya, dikepalai Sarbini dan berisi figur-figur seperti Deliar Noer dan Fuad Hasan, tak mampu membuat rencana pragmatis serupa untuk konsumsi politis sehingga mereka tidak digunakan. Pengaruh visi para Teknokrat semakin dikembangkan ketika Ali Murtopo, yang hampir selalu menjadi penasihat Suharto, mengusahakan kembalinya pembimbing mereka, Sumitro Joyohadikusumo, seorang mantan menteri, tokoh PSI dan pemberontak PRRI, dari pengasingannya yang cukup lama. Memang, konsep pemikiran yang ketat dan pragmatis yang menjadi ciri

khas para ekonom ternyata sesuai dengan tipe pemikiran PSI di masa sebelumnya dan sangat sejalan dengan konsep pemikiran Suharto yang juga teratur dan pragmatis.

Suharto sendiri bukanlah seorang ekonom. Namun ia telah melihat kegelisahan sosial dan keguncangan moral akibat tindakan Sukarno yang lama mengabaikan ekonomi. Ia sudah lama yakin akan perlunya pembangunan ekonomi dan juga peran pembangunan semacam itu dalam menjinakkan politik: "segala kemunduran yang kita alami selama itu [sebelum 1966] bersumber pada ditelantarkannya pembangunan ekonomi".[120] Dalam kesempatan lain ia menekankan bahwa "stabilitas politik perlu adanya pembangunan ekonomi".[121] Meski demikian, Suharto sendiri berangkat dari pemahaman yang awam. Pada 1964 maupun 1965, dengan alasan utama kondisi politik, defisit pembelanjaan menjadi lebih besar ketimbang pendapatan total pemerintah. Inflasi besar-besaran (600 persen pada 1965), defisit yang kian meningkat, bangkrutnya sistem perbankan dan sistem mata uang, dan masalah utang luar negeri yang sangat besar—pendapatan ekspor pada 1965 hanya sedikit di atas total jumlah dana yang dijadwalkan untuk membayar kembali utang pada 1966—berhadap-hadapan dengan kaum reformis. Ketimbang Sukarno, Suharto memiliki respons yang beralasan dan tidak rumit: "yang perlu kami atasi adalah menyetop inflasi, mempertinggi produksi dan memperbanyak devizen guna meningkatkan taraf hidup rakyat." Masalah terpenting yang dibidiknya adalah "memberi keimbangan antara pendapatan dan pengeluaran nasional."[122] Namun, hanya sedikit kemampuan yang tersedia, baik secara ekonomis maupun politis, untuk memanfaatkan sumber daya domestik dan merestrukturisasi ekonomi domestik demi pembangunan ekonomi; selain kemiskinan ekonomi domestik, Suharto tak bisa mengambil risiko mengesampingkan kelompok-kelompok penting atau masyarakat umum dengan menuntut pemangkasan anggaran atau mobilisasi ekonomi besar-besaran. Satu-satunya jalan yang ditempuhnya adalah mencari sumber daya penting di luar negeri.

Masalah utama adalah menciptakan situasi domestik yang tampak menyenangkan bagi investor internasional. Dalam hal ini, fokus utama yang jadi daya tarik adalah sumber daya Indonesia, terutama pertambangan dan minyak. Adam Malik menyatakan, "Saya diinstruksikan oleh presiden Suharto untuk mengambil alih masalah bantuan luar negeri bagi pembangunan ekonomi Indonesia ... Saya melanglang buana ke seluruh negeri ...Hasil dari perjalanan kilat ini ditindaklanjuti dan dijalankan oleh sebuah kelompok ahli."[123] Bersama sultan, kerja memuaskan Adam Malik, terutama di Jepang dan Amerika Serikat yang ingin kembali menanamkan pengaruh mereka di Indonesia, membuahkan hasil yang manis: bantuan luar negeri mulai mengalir, terutama setelah pembentukan International Governmental Group on Indonesia (IGGI). Usaha untuk menjadual ulang utang Indonesia dimulai. Dan penanaman modal asing mulai bergairah—keterbukaan terhadap penanaman modal asing ini adalah "salah satu tonggak utama kebijakan ekonomi rezim baru"[124]—terpicu oleh kondisi kondusif yang mulai muncul akibat Undang-Undang Penanaman Modal Asing yang diperkenalkan awal 1967.

Meskipun demikian, adalah suatu kekeliruan besar jika kita memandang terlalu silau ketatnya kebijakan rasionalisasi ekonomi tanpa memahami perilaku ekonomi yang menyimpang yang dipraktikkan oleh sang figur utama Orde Baru sejak awal masa pemerintahannya itu. Banyak jenderal yang menjadi tulang punggung politik rezim Suharto sudah sejak dulu terbiasa mencari proyek-proyek fiktif dalam urusan bisnis mereka. Sering kali, mereka memanfaatkan kemampuan negosiasi pengusaha Indo-Cina seperti "Bob Hasan", mantan rekan bermain golf Jenderal Yani yang terbunuh. Dominasi politik AD kini memberi peluang tak terbatas untuk mengembangkan jangkauan dan kedalaman usaha mereka, dan ini menyumbang dukungan bagi pengembangan gagasan "dwi fungsi"; komando Kostrad Suharto yang lama terbukti sebagai pemain yang handal. Lebih tegasnya lagi, catatan sejarah Suharto sendiri menunjukkan antusiasme dalam mendukung

militer untuk terlibat dalam aktivitas bisnis, dan kecenderungan mengizinkan teman–teman dekatnya yang memiliki bakat wirausaha untuk maju dan eksis. Kemudian, pada tahun 1966, Ibnu Sutowo, kepala perusahaan minyak Permina (sejak 1968 menjadi Pertamina) milik pemerintah dan Direktur Jenderal perusahaan minyak dan gas, tanpa memedulikan wewenang Menteri Pertambangan Slamet Bratanata, membuat kontrak bagi-hasil yang tak sesuai aturan—dianggap sebagai sumbangan Indonesia bagi minyak dunia[125]—dengan perusahaan minyak asing. Pada tahun 1967, Slamet mengetahui bahwa Suharto telah mengalihkan otoritas kementeriannya atas minyak ke otoritas lingkaran pribadinya sehingga memungkinkan Ibnu untuk melanjutkan bisnisnya itu. Suharto bahkan merasa perlu untuk mempertahankan Ibnu dari tuduhan korupsi ("menurut Jend. Harto, sampai sampai kini tak dapat bukti, bahwa Ibnu Sutowo melakukan korupsi").[126]

Sederhananya, Suharto memerlukan penghasilan yang tak terlacak, di luar anggaran—yang jumlah totalnya mungkin separuh belanja asli pemerintah pada tahun-tahun awal Orde Baru—yang disediakan oleh orang seperti Ibnu untuk memeroleh dan memperkuat dukungan politis dari ABRI dan pihak lainnya. Meski sudah terbentuk Tim Teknis Penanaman Modal Asing yang tersusun pada 1967, diketuai Sadli, untuk memeriksa kelengkapan syarat penanaman modal, tim tersebut tak memiliki kekuatan untuk menentukan kebijakan dan sering kali tak mampu mengendalikan proyek penanaman modal asing yang melibatkan tokoh senior ABRI di dalamnya (yang sering kali bersaing langsung dengan industri dalam negeri). Ibnu Sutowo menyepelekan semua tim itu. Penyelundupan yang dilakukan ABRI, juga ketangkasan lama untuk memanfaatkan celah dalam struktur formal perekonomian nasional, memperparah masalah yang harus diperbaiki.

Munculnya pola yang kontradiktif itu bukannya tidak disengaja oleh Suharto. Meski jelas memahami pentingnya reformasi kebijakan nasional dalam segi ekonomi, ia juga sepenuhnya paham akan dinamika politik ABRI, dan akan kebutuhan untuk tidak

mengasingkan basis-basis dukungan penting di dalam tubuh ABRI sendiri serta di tempat-tempat lain, dengan terlalu mengedepankan kebijakan ekonomi ketat. Pada 1967, ia dikabarkan "secara pribadi mengakui bahwa ia tak bisa mengambil risiko menjauhi militer karena sebagian besar orang pemerintah yang masih eksis merupakan anggota ABRI yang loyal".[127] Patronase semacam ini terwujud dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, memberikan kenaikan gaji 100% bagi pegawai negeri dan anggota ABRI pada Desember 1966.

Singkatnya, gagasan Suharto mengenai kaitan antara politik dan ekonomi sangat berseberangan dengan gagasan liberal, gagasan-gagasan yang berorientasi pasar dari para penasihat ekonominya. Meski ia merestui para teknokrat untuk menerapkan reformasi orientasi pasar mereka, ia sendiri tetap dengan sungguh-sungguh mempertahankan visi gotong-royong di Indonesia. "Negara kami adalah negara sosialisme yang atas dasar Pancasila", ujarnya kepada seorang wartawan Portugis pada 1966. Kebebasan rakyat "tidaklah bersifat mutlak, tetapi terbatas kepada kepentingan masyarakat".[128] Kebebasan bukan berarti bebas mengganggu kepentingan orang lain dalam rangka mengejar kepentingan pribadi. Sosialisme Indonesia merupakan kombinasi antara kebebasan individu di Barat dan kendali masyarakat yang merupakan pemikiran Timur. Dalam konteks gabungan seperti ini, bagi Suharto, aktivitas bisnis modern yang dijalankan kolega-koleganya adalah metode efisien dalam menyediakan barang dan jasa sekaligus, secara umum, sebuah standar hidup yang lebih baik bagi masyarakat awam yang kebutuhannya ia penuhi.

Tak pelak lagi, hasilnya adalah munculnya korupsi masyarakat dalam skala sedemikian luas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meski legitimasi awal yang diperoleh Suharto, beserta akibat wajar yang ditimbulkannya yaitu jatuhnya otoritas Sukarno, didasarkan, setidaknya dalam kadar tertentu, pada kepercayaan masyarakat kepada dirinya untuk bertindak jujur, dan terutama karena aksinya dalam memberi harapan dan menghukum tokoh

koruptor besar Orde Lama seperti Yusuf Muda Dalam (lihat berikut ini), masalah kejujuran para pejabat dan para pemimpin Orde Baru segera menjadi bahan pertanyaan. Menanggapi hal itu, Suharto sepakat bahwa pers dan pemerintah harus bekerjasama untuk menyingkap korupsi. Hal itu direalisasikannya pada bulan April 1967 dengan mengaktifkan kembali lembaga yang pernah didirikannya sejak awal 1966 untuk menyingkap praktik korupsi pejabat Orde Lama. Lembaga itu disebut Pekuneg (Tim Pengatur Keuangan Negara), di pimpin oleh Jenderal Suryo, mantan kepala keuangan Koti sekaligus salah seorang teman dekat Suharto.

Tentang semua ini, Suharto bertindak sangat hati-hati dan penuh kewaspadaan terhadap kemungkinan digunakannya korupsi sebagai isu politik. Ia kemudian mengungkapkan bahwa "korupsi sebagai issue politik memang paling ampuh mudah sekali diterima rakyat. Kita harus berhati-hati menghadapinya, tanpa mengurangi usaha untuk mencegah dan menghancurkan korupsi itu sendiri".[129] Korupsi belum pernah dan tak akan pernah menjadi masalah yang mengganggu dan menyulitkan baginya sehingga ia perlu melakukan usaha sistematis untuk mengatasinya, apalagi sampai membuat malu orang-orang yang mendukung dan menganggapnya "pemimpin yang brilian".[130] Juga, ada kecurigaan kuat bahwa pihak yang mengajukan tuntutan korupsi terkadang menyembunyikan agenda untuk mengadu domba di balik kedok kepedulian mereka.

MENUJU POSISI KEPRESIDENAN

Untuk mengadili para pemimpin yang masih hidup yang dikenai dakwaan terlibat dalam peristiwa kudeta, Suharto memutuskan untuk menjalankan mekanisme mahkamah militer luar biasa (Mahmillub) yang ditetapkan berdasarkan keputusan presiden no.370 tanggal 24 Desember 1963. Pada 4 Desember 1965, Sukarno mengeluarkan sebuah keputusan presiden yang menyatakan bahwa para pemimpin Gerakan 30 September harus diadili di Mahmillub ini; Suharto diberi kekuasaan untuk menentukan komposisi peng-

adilan itu serta siapa saja, berdasarkan penyelidikan pendahuluan, yang harus dibawa ke hadapannya. Tidak sampai tiga minggu kemudian, pada 21 Desember, Suharto mengeluarkan sebuah keputusan yang menunjuk sebuah tim beranggotakan tujuh jenderal yang bertugas menentukan siapa saja anggota Angkatan Darat dan kelompok sipil yang akan dibawa ke Mahmillub; dia sendiri memegang keputusan dalam kasus-kasus yang berkenaan dengan para anggota Angkatan Udara, Kepolisian, dan Angkatan Laut. Pada tanggal 13 Oktober, dia sudah memerintahkan para panglima Kodam setempat untuk membentuk tim-tim penyelidikan guna mengumpulkan bukti mengenai mereka yang terlibat dalam Gerakan 30 September. Tim-tim ini dibentuk secara resmi pada 29 Oktober.[131]

Ketua PKI, Nyono, menjadi orang pertama yang menghadap pengadilan pada 14 Februari 1966. Persidangan terhadap Nyono berlangsung siang dan malam di gedung Bappenas di Menteng. Hanya selang beberapa saat kemudian, Untung diadili. Keduanya dinyatakan bersalah dan dihukum mati, demikian juga halnya dengan Suparjo setelah ditangkap dan diadili pada 1967. Dalam kasus-kasus ini, Suharto tidak kenal belas kasihan, mungkin merupakan indikasi akan kebenciannya terhadap komunis serta para anggota militer yang terlibat dalam usaha penggulingan kekuasaan tersebut, dan mungkin juga merupakan indikasi akan usahanya untuk memperlihatkan keseriusan kepada Sukarno. Keputusan untuk menghadapkan para menteri senior yang ditangkap pada bulan Maret ke hadapan pengadilan menjadi cara untuk meningkatkan tekanan kepada Presiden, baik dengan cara menyingkap aspek-aspek perilaku negatif sang Presiden atau dengan menunjukkan betapa kekuatan sang Presiden telah melemah sehingga tidak mampu mengendalikan aksi merusak seperti itu. Faktanya, pengadilan-pengadilan tersebut menjadi titik balik penting dalam menyelesaikan krisis politik ini. Menteri pertama yang ditahan awal tahun itu, Yusuf Muda Dalam, diseret ke pengadilan dan, pada September 1966, dinyatakan bersalah melakukan tindak

korupsi dan subversi serta dijatuhi hukuman mati; ia meninggal dunia sebelum hukuman tersebut terlaksana. Tidak lama kemudian, Subandrio diadili; dia dinyatakan bersalah karena turut ambil bagian dalam percobaan kudeta 1 Oktober 1965 dan sama-sama dijatuhi hukuman mati. Pengadilan terhadap Omar Dhani memberi alasan untuk yakin bahwa Sukarno terlibat, atau minimal mengetahui, usaha penggulingan kekuasaan tersebut. Bukti-bukti dari pengadilan-pengadilan ini membuat tidak disiplinnya pemerintahan Sukarno diketahui masyarakat luas, dan tak pelak lagi mencoreng nama sang Presiden sendiri.

Pengadilan itu sendiri menjadi bahan perseteruan antara dua kelompok berbeda; dalam sebuah bentrokan, seorang wartawan kampus, Zaenal Zakse, tertembak; dia kemudian meninggal dunia di Belanda saat mendapat perawatan medis akibat luka-lukanya. Didorong oleh Kemal Idris dan Sarwo Edhie, para mahasiswa meningkatkan kembali suhu politik, kali ini dengan menuntut agar Presiden digulingkan dan dibawa ke pengadilan. Kelompok lainnya, termasuk kelompok nasional yang terdiri atas para pengacara dan hakim, mengikuti langkah para mahasiswa. Penolakan Suharto atas permintaan mereka ini menjadi sinyal pertama runtuhnya aliansi manis antara Suharto dan mahasiswa—solidaritas yang dulu mereka miliki kini dengan cepat mengarah ke perpecahan ketika akar kemarahan mereka, Sukarno, telah digulingkan—dengan tentara Kostrad menggunakan cara kekerasan untuk membubarkan demonstrasi mahasiswa pada Oktober 1966. Malah, di akhir 1967 dan awal 1968, di bawah pemerintahan Orde Baru, terjadi kegelisahan sosial yang terus meningkat yang disebabkan oleh, antara lain, naiknya harga bahan-bahan pokok (harga beras naik tiga kali lipat antara Januari dan November 1967), kesan bahwa otoritas Angkatan Darat terlalu berlebihan, dan kegagalan dalam berurusan dengan Sukarno. Pada awal 1968, Suharto menerima sekelompok mahasiswa untuk mendengar pandangan mereka; "saya sependapat dengan mereka. Perubahan-perubahan pokok harus dilakukan. Tetapi harus dengan jalan konstitusional."[132]

Suharto, kini penguasa politik Sukarno, menghadapi masalah mengenai apa yang harus dilakukan terhadap presidennya. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh rekan-rekannya seperti Malik,[133] dia tidak boleh lagi menolerir masalah dan kemarahan yang ditimbulkan oleh Sukarno dari posisi formalnya yang tinggi. Meski mengalami hantaman politik dalam rapat MPRS, Sukarno terus menentang para pemimpin militer dan mengeluhkan arahan-arahan baru pemerintahan tersebut. Meski ada tentangan dari beberapa perwira militer kunci untuk mengambil langkah tegas terhadap Presiden, dan ketakutan akan timbulnya kegelisahan di kalangan Angkatan Bersenjata, tekanan terhadap Suharto untuk mengambil sikap semakin meningkat secara signifikan menjelang akhir 1966, saat bukti dari persidangan Yusuf Muda Dalam dan Omar Dhani menunjukkan gagalnya Sukarno dalam menjalankan tugas dan mungkin keterlibatannya dalam percobaan kudeta tersebut.[134]

Bukti persidangan tersebut menjadi pukulan tambahan bagi pemerintahan Sukarno yang kini sangat goyah. Namun, ia melanjutkan retorika revolusinya; hasilnya: terjadi perpecahan di masyarakat antara mereka yang mendukung Sukarno dan kekuatan-kekuatan Orde Baru. Suharto jelas memahami ketegangan yang meningkat ini; "saya berusaha keras mengekang kembali agar jangan sampai terjadi benturan antara pasukan yang satu dengan pasukan lainnya. Konflik senjata akan membawa kita binasa." Dia sendiri berada dalam tekanan yang terus meningkat dari elemen-elemen Siliwangi, yang berseberangan dengan Sukarno, agar mengambil garis tegas dengan sang Presiden. Sementara itu, Sukarno tetap bergeming menghadapi seruan oposisi yang semakin meningkat. Dalam melakukan perlawanan, dia memperoleh dukungan dari para perwira militer di Jawa Timur, tempat disusunnya sebuah persekongkolan untuk membawanya ke tempat perlindungan selama rencana kunjungan ke Surabaya dalam rangka memperingati Hari Pahlawan (10 November 1960) dan membangun pertahanan bagi kepemimpinannya. Sukarno menolak persekongkolan ini atas namanya sendiri, dan Suharto, yang pasti

mengabarkan apa yang sedang terjadi, turut campur dan melarangnya melakukan perjalanan tersebut; "aaya melihat bahaya kalau sampai beliau terbang ke sana. Keselamatan kesatuan bangsa yang harus saya jaga."[135]

Meski mendapat segala macam tekanan ini, Suharto tampak enggan bertindak tegas terhadap Presiden yang sudah babak-belur. Malah, menurut salah seorang pengamat, "jika saja Sukarno dapat menunjukkan tanda-tanda mengaku bersalah yang mungkin dapat menyelamatkan posisinya, Suharto tidak akan menghalangi."[136] Keengganan Suharto sudah tentu sebagian karena sikapnya yang selalu hati-hati, namun dia juga enggan terlibat dalam aktivitas yang mungkin membuat kelompok Siliwangi yang agresif bertindak melampaui daerah operasinya dan menyebabkan pecahnya pertempuran serius antara tentara yang menentang dan mendukung Sukarno. Selain karena perhitungan politik yang memang sudah menjadi ciri khasnya – termasuk keinginannya untuk tidak memulai suatu preseden dengan menyeret pendahulunya ke pengadilan – Suharto tampaknya masih memiliki sisa-sisa rasa hormat terhadap Sukarno secara pribadi. Menurut Sumitro, "Pak Harto sangat peduli dengan situasi yang dialami Bung Karno ... Pak Harto tidak ingin melihat Bung Karno terluka dengan cara apa pun. Beliau tidak ingin melakukan kesalahan terhadap Bung Karno."[137] Meski Suharto tahu bahwa Sukarno harus tersingkir, dia pasti merasa tersiksa oleh besarnya tindakan yang akan dilakukan, dan kesetiaan yang harus ditanggalkan untuk melakukannya.

Di bulan-bulan terakhir 1966, ketegangan politik semakin meningkat akibat kesengsaraan yang diderita oleh rakyat Indonesia dan sikap keras kepala Sukarno yang tidak menyadari bahwa dia harus menyesuaikan diri dengan keadaan baru tersebut. Tuntutan agar Sukarno turun semakin gencar, dan Suharto dipandang sebagai orang yang tepat untuk menggantikan Sukarno. Nasution, misalnya, menyerukan agar Sukarno bertanggung jawab atas "tragedi nasional" yang diakibatkan oleh kebijakannya. Amirmachmud menyatakan bahwa Sukarno menanggung beban tanggung jawab

atas kematian para jenderal, dan mempertanyakan kelanjutan posisinya sebagai presiden.[138] Sikap resmi Suharto tetap tidak berubah: Sukarno adalah presiden yang sah, yang layak mendapat rasa hormat, tak peduli apapun kondisinya. Pada bulan November, Suharto menjelaskan bahwa, setelah mempelajari pidato Sukarno pada 17 Agustus dan pidato-pidato lainnya, dia menyimpulkan bahwa Sukarno sebenarnya "sudade mengutuk G-30-S sekalipun dengan menggunakan istilah Gestok dan ... tidak menghalangi pembubaran PKI."[139] Sedangkan dirinya sendiri tidak memiliki ambisi untuk menjadi presiden. Selain itu, Suharto sendiri benar-benar ragu akan kemampuan dirinya untuk melaksanakan tugas tersebut; "saya tidak pernah menyiapkan diri untuk itu. Tidak pernah sekolah untuk itu. Malahan mimpi pun tidak menfenai hal itu. Waktu itu saya mengaku saya tidak mempunyai kemampuan untuk memangku jabatan tertinggi itu."[140]

Sikap ini boleh dianggap sebagai sikap pura-pura. Sadar atau tidak, seluruh tindakannya sejak pertengahan 1966 telah menjadi sebuah delegitimasi yang efektif terhadap kepemimpinan Presiden Sukarno, yang tidak punya jalan keluar lain selain turun dari jabatannya. Pada Desember, dengan berakhirnya pengadilan terhadap Omar Dhani, pandangan ini semakin kuat: kelompok-kelompok aksi mahasiswa menuding Sukarno terlibat dalam G-30-S; surat kabar memberitakan keterangan tak menguntungkan (mengenai apa yang dilakukan Sukarno di Halim pada 1 Oktober 1965) yang disampaikan dalam pengadilan tersebut; Mashuri menilai bahwa Sukarno "jelas-jelas terlibat" dalam aksi kudeta tersebut, dan menuduhnya bersikap pengecut saat Belanda menyerang Yogya.[141] Sebuah pernyataan yang dikeluarkan ABRI pada 21 Desember dan ditandatangani oleh Suharto serta kepala staf lainnya—yang menjanjikan tindakan tegas terhadap siapa pun yang tidak mengikuti keputusan MPRS dan Undang-Undang Dasar—jelas merupakan ancaman terbuka terhadap Sukarno, dan merupakan katalis terlaksananya serangkaian pertemuan antara dirinya dan Suharto, di mana Suharto jelas-jelas menekan sang Presiden

untuk menimbang ulang posisinya. Setelah pembahasan menegangkan bersama kabinet dan para pemimpin militer, Sukarno akhirnya sepakat untuk menambah suplemen pada laporan pidato Nawaksara-nya yang dia berikan ke MPRS secara tertulis pada 10 Januari 1967. Dalam suplemen tersebut, hampir tidak ada tambahan berarti bagi pernyataannya sebelumnya. Selain itu, suplemen ini juga tidak membuka kemungkinan memecahkan ketegangan yang terus meningkat, dan malah meningkatkan ketegangan baru. Kira-kira di saat yang bersamaan, Suharto menunjuk 180 anggota baru untuk DPR-GR, sehingga lembaga ini memiliki 350 orang anggota. Kelompok radikal Siliwangi mulai melakukan persiapan militer guna menghadapi apa yang mereka pandang sebagai pertempuran akhir yang tak terelakkan antara kelompok anti-Sukarno dan pro-Sukarno; Nasution sendiri menyerukan agar Sukarno diadili,[142] dan di Jawa Barat, DPRD menyarankan para pemimpin MPRS agar menurunkan Sukarno dan menggantikannya dengan Suharto, sebuah langkah yang tidak lama kemudian diikuti oleh DPR-GR. Para mahasiswa melancarkan demonstrasi besar-besaran yang mendapat perhatian cukup besar dari media massa—jeep yang dikendarai Suharto sempat terjebak dalam salah satu demonstrasi tersebut. Mereka menyerukan agar Sukarno diadili. Adam Malik menyerukan agar Supersemar digunakan "untuk menyelesaikan dualisme politik".[143]

Namun, Presiden masih memperoleh dukungan kuat dari Angkatan Bersenjata, terutama di kalangan marinir (KKO), Angkatan Laut dan Kepolisian (termasuk para kepala staf masing-masing), dan di kalangan tentara di Jawa Tengah dan Timur, Kalimantan Timur, dan beberapa bagian Sumatera. Jika saja Sukarno menangani krisis ini dengan cara kasar, ancaman perpecahan dalam militer dan antarangkatan bukanlah hal main-main. Suharto, yang selalu waspada terhadap potensi terjadinya ketidakstabilan jika Sukarno dibiarkan memperoleh kesempatan menjadi martir, menanggapi dengan menebarkan pesona senyumannya dan dengan berpidato mengenai pentingnya kesatuan, sambil

melemparkan ancaman akan membalas dengan cepat siapa saja yang melakukan manuver melawannya. Dia memerintahkan penyelidikan yang berjalan lambat terhadap tuduhan akan keterlibatan Sukarno; penyelidikan itu sendiri tidak pernah mencapai kesimpulan akhir.

Terobosan muncul dari Jawa Timur. Pada 3 Februari, sekelompok mantan perwira Brawijaya, anggota "keluarga besar Brawijaya", yang dipimpin oleh Sumitro yang waktu itu menjabat sebagai pangdam, pergi menemui Sukarno dan mengungkapkan solidaritas terselubung terhadapnya. Sarbini, mantan pangdam Brawijaya, yang tidak menghadiri pertemuan tersebut, meminta dan menerima izin dari Suharto untuk bicara dengan Sukarno pada 5 Februari. Mungkin motivasi pendekatan Sarbini sebenarnya datang dari Suharto sendiri. Tampaknya jelas bahwa, terlepas dari adanya kemungkinan pemberitaan nakal dari media massa, para perwira ini memberitahu Sukarno bahwa dukungan untuknya di Jawa Timur semakin memudar, dan dia harus menciptakan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang mengelilingi posisinya. Manuver mereka menandakan bahwa kekuatan pro-Sukarno di tubuh Angkatan Bersenjata telah mengambil kesimpulan bahwa Sukarno tidak dapat diselamatkan, dan bahwa posisi mereka sendiri akan terancam jika terus bersikap keras kepala dengan mendukung Sukarno. Di acara wisuda Universitas Indonesia, pada Februari 1967, pesan Suharto dapat dipahami dengan jelas: "Sebagai panglima Angkatan Bersenjata, pada kesempatan ini saya ingin memperjelas bahwa ABRI telah dengan tegas menyatakan keberpihakannya pada Orde Baru. Sikap ABRI ini bukan hanya omongan belaka, melainkan akan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh."[144] Pada 6 Februari, Panglima Kostrad Umar memperingatkan bahwa "pada suatu waktu kesabaran itu akan sampai pada batasnya."[145]

Pada 7 Februari, melalui tokoh PNI, Hardi, Sukarno mengirim dua surat kepada Suharto.[146] Salah satu surat tersebut lebih penting ketimbang surat lainnya karena berisi sebuah tawaran yang

akan memungkinkan Suharto mengambil-alih pelaksanaan pemerintahan sehari-hari namun seraya tetap menjalin hubungan konsultasi dengan Presiden, yang akan tetap menjadi kepala negara dan terus menentukan garis besar kebijakan. Suharto, yang kini yakin bahwa mangsanya sudah berada dalam jarak sergap dan bisa dikatakan berada dalam kendali—dan dalam konteks seruan parlemen pada 9 Februari untuk menyelenggarakan Sidang Khusus MPRS guna menurunkan Sukarno—menolak usulan Sukarno tersebut pada 10 Februari. Selama sembilan hari berikutnya, serangkaian pertemuan antara Sukarno, pemimpin AD, dan kepala staf lainnya tampaknya menghasilkan jalan buntu. Pada hari kedua puluh, Suharto akhirnya berhasil meyakinkan Sukarno dan para kepala staf pendukungnya bahwa sang Presiden sudah tamat riwayatnya. Selain karena Suharto menolak usaha terakhir Sukarno yang menawarkan sebagian kekuasaan sebagaimana disebut sebelum ini, keberhasilan negosiasi ini mungkin juga berkat keterlibatan Suharto dalam meyakinkan bahwa Sukarno akan ditangani selembut mungkin dan tidak akan dihadapkan pada proses pengadilan. Pada hari itu juga, Sukarno setuju menyerahkan kekuasaan kepada Suharto.

Pada 22 Februari, keputusan untuk menyerahkan kekuasaan dari Sukarno ke Suharto diumumkan ke masyarakat, sementara upacara formal penyerahan kekuasaan tersebut tinggal menunggu waktu. Keesokan harinya, DPR-GR mengeluarkan resolusi yang disosialisasikan pada 15 Februari, meminta sidang khusus MPRS untuk menunjuk Suharto sebagai pejabat presiden. Suharto, yang menyadari kemungkinan terjadinya perpecahan dan kekacauan, mengadakan pertemuan dengan 500 perwira senior untuk menjelaskan kepada mereka tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. "Malam harinya saya menyampaikan pidato ke seluruh pelosok tanah air. Saya memilihara ketenteraman."[147] Pidato tersebut, campuran antara rasa puas akan apa yang telah dicapai dan ingatan akan tantangan yang masih harus dihadapi, singkat saja dan tidak berlebih-lebihan. Perdebatan ringan mengenai keabsahan pengaturan

pengalihan kekuasaan tersebut tenggelam dalam gelombang dukungan.[148]

Di masa awal kejayaannya, Suharto sudah sibuk menciptakan warisan. Dengan cara yang belum pernah dikenal sebelumnya, diselenggarakanlah perayaan memperingati serangan umum 1 Maret 1949 atas Yogyakarta. Sultan menghadiri perayaan serangan umum tersebut, dan Suharto sendiri menyumbang banyak peralatan dan pakaian bagi para veteran gerilya yang ikut ambil bagian dalam perayaan peringatan tersebut di Yogya. Peringatan serangan umum 1 Maret 1949 diselenggarakan "diseluruh wilayah Jateng dan dipusatkan di Yogayakarta dimana puluhan Jenderal beserta puluhan perwira lainnya hadir."[149]

Karena tekanan kuat—dari Suharto sendiri, Angkatan Darat, dan pemerintah—yang dialami sidang khusus MPRS, tidak diragukan lagi sidang tersebut menjadi ajang untuk mendongkel Sukarno. Yang menjadi masalah adalah cara pendongkelan itu. Saat sidang tersebut dibuka pada 7 Maret, Suharto, yang sangat tidak ingin Sukarno diadili, mencoba meminimalkan hubungan Sukarno dengan G.30.S, dengan membingkai langkah sang Presiden hanya sebatas masalah kekeliruan penilaian politik dan moral. Dia mencoba menghasilkan resolusi kompromis yang membuat Sukarno tetap memegang jabatan Presiden namun tidak memiliki kapasitas menjalankan kekuasaan sesuai dengan jabatannya tersebut, sekaligus menyingkirkannya dari kehidupan politik. Resolusi kompromi tersebut memberi Suharto posisi sebagai 'pejabat Presiden'—diambil sumpahnya oleh Ketua MPRS—hingga sebuah MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) yang dihasilkan melalui pemilihan umum berhasil menunjuk seorang presiden, dan resolusi ini membuatnya mengemban tugas untuk menentukan tindakan lebih lanjut yang harus diambil terhadap Sukarno.

Solusi yang disepakati pada 12 Maret ini jelas-jelas mendua, namun pada kenyataannya, solusi ini merupakan jalan keluar yang sederhana. Sebagaimana yang dinyatakan Suharto dalam sebuah pidato penjelasan pada 13 Maret, "untuk sementara waktu kami

akan memperlakukan beliau sebagai Presiden yang tidak berkuasa lagi , sebagai Presiden yang tidak mempunyai kewenangan apa pun di bidang politik, kenegaraan dan pemerintahan."[150] Menyadari betapa bahayanya kegelisahan serius yang masih membayang, Suharto merasa puas dengan apa yang telah dia capai, dan tidak berminat melucuti jabatan formal sang Presiden saat ini juga atau menyeretnya ke meja hijau. Tak diragukan lagi, mereka yang dulu mendukung Sukarno dijamin oleh Suharto tidak akan mengalami perlakuan semena-mena. Suharto dan para pendukungnya sadar bahwa riwayat Sukarno sudah tamat. Malah, Jenderal Sumitro telah mulai menggantung gambar Suharto di kantor-kantor publik sebelum pertemuan MPRS Maret 1967. Layaknya memainkan sebuah fiksi surealis, sebagai akibat langsung sidang khusus tersebut, Suharto hati-hati berpegang pada bentuk legal itu—dan protokol yang dihasilkannya—bahwa Sukarno tetap menjadi presiden.

Herannya, keberhasilan momen yang cukup berharga tersebut tidak dirayakan. Sebelum pertemuan MPRS, Suharto memanfaatkan waktu untuk menunjukkan bahwa ia tidak memiliki ambisi, bahwa ia lemah dan tidak mampu mengemban beban berat tugas kepresidenan. Menurut Sumitro, "Pak Harto enggan menjadi Presiden."[151] Sikap pura-pura rendah hati itu mungkin adalah cermin kurangnya kepercayaan diri Suharto akan tingkat tanggung jawab yang diembannya saat ini sebagai pengganti Sukarno, dan juga keinginan untuk menutupi ambisinya. Namun, pada dasarnya, dia dan semua orang tahu betul bahwa tidak ada kandidat lain yang serius untuk posisi tersebut, dan sungguh-sungguh berusaha menyelamatkan konsensus dukungan umum sebelum mengambil langkah terakhir. Seluruh kartu penting ada di tangannya, dan dia tahu itu. Pada kesempatan berikutnya, dia menyatakan, "mereka kemudian bisa meyakinkan saya bahwa benar mereka tidak mampu mendapatkan orang lain. Mereka lebih percaya kepada saya daripada kepada orang lain." Penunjukkan itu, dari sudut pandangnya, adalah sebuah tantangan untuk membantu rakyat di saat yang paling dibutuhkan; sebuah tantangan

untuk bangkit dan mengorbankan diri demi orang lain. Berlaku sebaliknya sama saja dengan menjadi pengecut. Dia akan maju, dengan catatan bahwa dia benar-benar mendapat kepercayaan dari rakyat seperti yang disuarakan oleh banyak pemimpin mereka: "mereka percaya kepada saya. Kepercayaan itulah yang jadi kunci mengapa pintu hati saya jadi terbuka untuk mengatakan 'ya' pada achirnya". Pada akhirnya, ujar Suharto, dia menerima tugas tersebut, namun dengan syarat bahwa posisinya sebagai pejabat presiden hanya berlangsung selama setahun; "masa itu kita pergunakan untuk saling menimbang: apakah saya mampu, apakah di tengah jalan tidak ada perubahan pikiran, tidak ada perubahan pilihan."[152]

Di satu sisi, kegigihan Suharto untuk menerima posisi sebagai pejabat presiden hanya selama satu periode tertentu bisa dibilang memperlihatkan tingkat kesabarannya. Namun, syarat tentang adanya pilihan baginya untuk mengundurkan diri secara elegan jika tugas tersebut ternyata terlalu berat atau jika otoritasnya memudar juga memperlihatkan kurangnya keyakinan dirinya. Selain itu, hal ini juga menjadi petunjuk adanya kewaspadaan strategis. Dia selalu berpendapat, "lebih baik pelan tapi pasti berhasil daripada cepat-cepat tetapi tidak berhasil." Sikapnya ini juga mengawali apa yang akhirnya menjadi tema ulangan dalam pencalonannya sebagai presiden: sebuah pernyataan bahwa jika rakyat telah kehilangan kepercayaan terhadapnya, dia akan dengan senang hati mundur—"saya tidak akan mempertahankan kedudukan saya, apalagi mempertahankannya dengan mempergunakan kekuatan bersenjata. Sama sekali saya tidak akan berbuat seperti itu."[153]

Salah bila kita memandang naiknya Suharto ke posisi pejabat presiden sebagai hasil dari ambisi terbuka. Dalam situasi lain, mungkin betul jika kita katakan bahwa dia akan merasa puas dengan meniti kariernya di militer sebagai seorang perwira senior yang baik, efisien, dan bertanggung jawab. Namun, saat keadaan berubah secara dramatis pada 1 Oktober 1965, dan saat mendapati dirinya masuk ke peran sentral, dia menikmatinya, malah bangkit

menerima tantangan dan kehormatan yang mengarah kepadanya. Dia merasa senang memegang kendali, seraya tidak pernah melupakan bahwa kendali tersebut bisa saja runtuh. Jadi, dia sampai pada posisinya berkat ambisi kuat namun mendua. Dia mau menjalankannya, meski tidak ingin, karena merasa itu adalah tugasnya, dan dengan syarat mendapat dukungan dari rekan-rekannya. Dia tidak siap berebut kekuasaan dengan orang lain. Dia juga tidak bersedia menempatkan dirinya dalam bahaya dan ketidakpastian dengan merebut kekuasaan melalui cara ilegal dan mungkin penuh kekerasan. Dia mau melakukannya dengan syarat-syarat yang diajukannya sendiri, dengan gayanya sendiri, dengan langkah-langkahnya sendiri, dan dengan cara yang menghormati detail konstitusional dan prosedural. Namun, dia mau melakukannya. Tidak diragukan lagi, untuk mencapai keputusan ini, ujarnya, dia meminta saran dan dukungan dari istrinya.[154] Sang istri, tak diragukan lagi, setidaknya sama-sama antusias menerima tantangan tersebut.

MEMETAKAN ORDE BARU

Begitu Suharto memegang jabatan kepala negara secara resmi, gaya politiknya mulai merujuk pada arahan baru; sebagaimana kelak dinyatakannya, "jiwa pejuang saya muncul." Dia memandang tugasnya sebagai mengubah masyarakat dengan cara sebaik-baiknya sehingga dapat mengakhiri masa kekacauan dan perpecahan, dan mengembalikan ketertiban serta kepastian dalam bidang sosial politik. Tak pelak lagi, dalam hal ini dia terbantu oleh terlepasnya ketegangan luar biasa yang telah mencengkeram kehidupan sosial politik sejak pertengahan 1965; malah, trauma masa pascakudeta itu sendiri adalah faktor penting dalam menciptakan sebuah ketertiban sosial yang secara ideologis jauh lebih datar serta sangat kaku dan lamban. Teka-teki seputar posisi sandiwara Sukarno sebagai Presiden mulai lekas menghilang, dan tidak lama kemudian, Sukarno menjalani tahanan rumah ("karantina politik", kalau

menurut istilah yang digunakan Suharto) di Istana Bogor.[155] Hak Sukarno untuk menggunakan jabatan kepresidenan beserta hak lain yang terkait dengan jabatan itu dilucuti oleh Suharto pada Mei; fotonya tidak lama kemudian menghilang dari kantor-kantor pemerintah. Suharto melarangnya menggunakan istana negara di Jakarta untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-66. Pada 29 Juni, pemerintah mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa Sukarno tidak lagi menjadi presiden dan tidak diizinkan menggunakan gelar Kepala Negara dan Presiden Republik Indonesia.

Dengan caranya yang khas, Suharto mulai benar-benar tekun mempelajari pengetahuan dan kemahiran yang dibutuhkan sebagai presiden. Retorika revolusioner yang awalnya sering dia gunakan untuk membela diri atas tindakannya pada 1 Oktober kini telah hilang sepenuhnya, digantikan oleh mantra ideologi lainnya, yaitu Pancasila dan modernisasi/pembangunan, yang menekankan ketahanan mental dan kebenaran sikap dalam mengatasi kesulitan.[156] Momentum bagi reformasi politik yang mencerahkan mulai terasa seperti ilusi sebagaimana dahulu. Pada saat bersamaan, dia mulai kadang-kadang lebih memilih mengenakan pakaian sipil ketimbang militer. Sebagai konsesi lebih jauh atas peningkatan statusnya, pada Maret 1966, dia pindah rumah dari Jl. Haji Agus Salim 98 ke sebuah bungalo sederhana di sebuah jalan kecil tak jauh dari situ, Jalan Cendana, yang menawarkan keamanan yang jauh lebih baik, dan di mana perubahan, tambahan, dan perluasan ruang dapat digunakan bagi fungsi-fungsi kenegaraan. Dia terus bekerja di luar kantor gedung kepresidenan di Medan Merdeka Barat 15. Tidak seperti Sukarno, dia menolak tinggal di Istana Merdeka karena, ujarnya, dia ingin keluarganya tetap menikmati sedikit kebebasan dan tidak melupakan kehidupan rumah mereka. Kedekatannya dengan anak-anaknya ini cukup tulus; juga sebagai usaha untuk menanamkan nilai-nilainya sendiri kepada mereka. Namun, tanggung jawab barunya membuat ia tidak dapat memberi anak-anaknya perhatian yang mereka butuhkan; Sumitro kelak menyatakan bahwa "hanya setelah menjabat sebagai presidenlah, saya

perhatikan, beliau kehilangan kendali terhadap keluarganya.... Beliau tidak lagi punya waktu untuk dicurahkan pada keluarganya."[157]

Ironisnya, saat Suharto bangkit dari kebingungan satu setengah tahun sebelumnya, posisi jangka panjangnya menjadi tidak pasti. Pemerintahannya dipandang tidak tegas dan tidak efektif. Banyak perwira senior menolerir peningkatan cepat yang dialami Suharto, karena memang tidak ada alternatif lain, dan mereka antusias dalam mengukur cara dia menangani otoritas barunya. PKI menunjukkan tanda-tanda kebangkitan militan, dengan membangun basis perlawanan di daerah selatan-tengah Jawa Timur, sekitar Blitar, dan melebarkan kegiatannya di kalangan masyarakat Cina di Kalimantan Barat. Tugas Suharto dalam bidang ekonomi tampak cukup jelas, sebagaimana diungkapkannya dalam sebuah pidato pada sebuah seminar ekonomi di Bogor tidak lama setelah penunjukkannya sebagai pejabat presiden: menstabilkan ekonomi, menekan inflasi, dan mengatasi masalah harga.[158] Pada April 1967, pembangunan berdasarkan rencana ekonomi baru lima tahunan dimulai. Namun, harga-harga terus melambung, dan banyak rakyat Indonesia semakin merasa sulit; harga beras, terutama, naik lebih dulu menjelang akhir 1967, sehingga menyebabkan Suharto mengadakan kunjungan ke pasar-pasar beras Jakarta untuk menanyakan sumber kenaikan harga. Penurunan tingkat suku bunga pada April 1967 memang menjadi sebuah usaha untuk mengendalikan pengaruh-pengaruh deflasi yang diakibatkan oleh kebijakan kredit Oktober 1966. Profesor Sumitro Joyohadikusumo mencatat bahwa "selama sembilan bulan sejak reformasi [Oktober] diperkenalkan, tidak terjadi perbaikan kondisi. Seiring dengan berlalunya waktu, kritik terhadap kebijakan ekonomi dasar Pemerintahan Suharto meningkat."[159] Pemberontakan masih membayang, terbukti dari adanya rencana yang jelas-jelas berusaha mengembalikan Sukarno ke tampuk kekuasaan, dan laporan-laporan di tahun berikutnya mengenai "rencana komunis untuk membunuh Suharto, para anggota kabinet, dan para pemimpin tentara."[160] Terlebih lagi,

Orde Baru tampaknya menjadi mangsa dari dosa korupsi serupa sebagaimana yang menimpa Orde Lama, meski tulang punggung militernya menyebarkan para anggota dan pengaruhnya tanpa kenal lelah ke seluruh aparatur negara.

Keadaan ini mungkin membuat Suharto tidak memiliki alternatif lain selain mengadopsi pendekatan yang lebih langsung dan dalam beberapa hal kurang akomodatif, yang menekankan pada kembalinya disiplin sosial dan militer, pentingnya keselarasan sosial, dan perjuangan terus-menerus untuk melakukan reformasi ekonomi. Malah, dalam pidato intimidasi yang kerap ia berikan, Suharto menyebut reformasi ekonomi ini sebagai langkah untuk melanjutkan perjuangan dan pengorbanan para pendahulu, dan dia selalu menekankan betapa perlunya solidaritas sosial demi kebaikan umum, perlunya mencapai keberhasilan—yang, meskipun solid, tidak mencukupi kaum miskin. Pada pertengahan 1967, empat panglima di Jawa, bersama panglima Kostrad dan RPKAD, bersumpah di Yogyakarta untuk mengambil tindakan terhadap siapapun yang menentang Pancasila dan UUD 1945. Bulan berikutnya, Suharto menyebut Angkatan Darat sebagai alat negara untuk mempertahankan dan melindungi revolusi. Angkatan Darat menghancurkan kebangkitan kembali PKI yang berbasis di Jawa Timur pada 1968 dan pada saat yang bersamaan menjalankan aksi terhadap kebangkitan PKI di kalangan masyarakat Cina di Kalimantan Barat. Meski menang mudah, Angkatan Darat—yang pasti dikipas-kipasi oleh Suharto—terus melemparkan propaganda bahwa PKI tetap menjadi ancaman laten bagi stabilitas politik bangsa. Propaganda ini membuat pihak berwenang mendapat kapasitas untuk menindak pusat-pusat oposisi dengan tuduhan terlibat PKI, untuk mengingatkan rakyat akan teror masa pasca-kudeta, dan untuk menampilkan PKI sebagai ancaman pasti terhadap ketertiban umum.

Namun, alasan yang lebih fundamental dan malah lebih awet atas oposisi keras Suharto terhadap PKI adalah karena PKI tidak dapat masuk ke dalam visinya mengenai masyarakat Indo-

nesia. Masyarakat Indonesia dalam visi Suharto adalah—seperti kerap diungkapkan dalam pidato-pidatonya—masyakarat yang berdasarkan Pancasila, di mana warga negara Indonesia hidup selaras dan berdampingan tanpa memedulikan perbedaan di antara mereka; "Orde Baru adalah orde Demokrasi Pancasila yang mengutamakan kepentingan rakyat dan bukan kepentingan golongan atau pribadi." Dalam sebuah kesempatan, dia menyatakan, Orde Baru "mengejar institusionalisasi dan menolak individualisasi," yang berarti bahwa media massa harus mewartakan " politik pemberitaan yang mengutamakan kepentingan rakyat, bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi para pemimpin seperti yang kita alami di masa Orde Lama."[161] Dia juga menyerukan suatu "konsepsi pendidikan nasional" yang "mampu menjamin pemahaman Pancasila" di kalangan murid sekolah dasar. Mereka yang perilakunya tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD '45 akan berhadapan dengan ABRI. Pada Mei 1967, Suharto menandaskan, "kita harus mempertahankan Pancasila dan UUD 45."[162] Pada pidato pertamanya di peringatan Proklamasi Kemerdekaan pada 1967—di mana dia mematahkan tradisi dengan mengucapkan "pidato kenegaraannya" yang panjang dan serius di hadapan DPR-GR pada 16 Agustus, sementara Sukarno dulu mengucapkan pidato menggebu-gebu penuh warna pada 17 Agustus—Suharto memantapkan bingkai kerja Orde Baru, dengan menggunakan kata "Pancasila" tidak kurang dari 64 kali.[163] Orde Lama telah menyimpang dari Pancasila dan UUD 45.

Namun, Suharto tidak memberi pandangan yang radikal pada Orde Baru-nya; visinya sangat konservatif di mana di dalamnya, status quo telah diubah untuk mencerminkan kekuasaan sebenarnya setelah 1 Oktober. Perubahan merupakan sesuatu yang dihindari, sebuah jalur yang ditempuh hanya jika diperlukan dan dengan kewaspadaan tinggi. Visi politiknya terpusat kepada dirinya sendiri. Dalam sebuah pidato pada 23 Oktober, dia menandaskan bahwa tidak perlu lagi mempermasalahkan ideologi, "sebab kita telah mempunyai satu ideologi, yaitu Pancasila."[164] Pada awal 1968,

larangan untuk melakukan demonstrasi di Jakarta diberlakukan; menurut Suharto, demonstrasi mengenai tingginya harga beras pada dasarnya adalah sebuah tindakan yang bersifat politis dan bukanlah sesuatu yang bersifat ekonomi.[165]

Bagaimanapun, dalam rangka memerangi komunisme, yang dikedepankan oleh Suharto adalah visi akan perlunya meminimalkan perbedaan sosial dan memajukan keselarasan sosial di antara beragam kelompok masyarakat Indonesia. Dalam kasus "masalah orang Cina", visi ini menuntut warga negara Indonesia keturunan Cina untuk menanggalkan perbedaan identitas dan berasimilasi ke populasi yang lebih besar. Dalam sebuah pidato pada 1967 (yang sebagian alasannya adalah sebagai reaksi atas demonstrasi warga asing Cina di Jakarta pada April, dan sebagai tanggapan atas kekerasan yang dilakukan orang Indonesia) mengenai "masalah orang Cina", Suharto mengingatkan para pendengar bahwa

> kita harus menarik garis yang jelas antara orang Cina dengan warganegara asing dan warganegara Indonesia keturunan Cina. Warganegara Indonesia keturunan Cina, meskipun ia keturunan Cina, ia adalah warganegara Indonesia, yang mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan warganegara Indonesia asli. Kepada warganegara Indonesia keturunan Cina waktu itu kam serukan untuk tidak menunda-nunda lagi berintegrasi dan berasimilasi dengan masyarakat Indonesia (asli). Terhadap orang Cina warganegara asing akan tetap diberikan perlakuan seperto yang diberikan kepada warganegara asing lainnya, sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan internasional yang berlaku, tanpa mengurangi kewaspadaan kita terhadap kemungkinan-kemungkinan usaha-usaha subversi dan infiltrasinya.[166]

Pada bulan Desember tahun yang sama, dia mengangkat tema toleransi beragama: "kita semua wajib menjalankan toleransi agama karena agama bertolak dari keyakinan yang melekat pada hati nurani manusia. Oleh karena itu, keyakinan agama tidak

boleh dipaksakan. Lebih-lebih lagi tidak boleh dipaksakan dari luar."[167] Pada Maret 1968, dia memperpanjang tempo bagi warga negara Indonesia yang menggunakan nama Cina untuk mengubah nama mereka menjadi nama "Indonesia". Efektifnya, kebijakan ini berarti bahwa, meski warga negara Indonesia keturunan Cina memperoleh hak yang sama sebagaimana orang Indonesia pribumi, mereka harus menjalankan agama dan merayakan warisan budaya Cina mereka secara tertutup; mereka terpaksa mengubah nama mereka agar terdengar Indonesia; mereka bisa dibilang tidak lagi memiliki akses untuk memperoleh surat kabar berbahasa Cina, dan penggunaan aksara Cina di muka umum dilarang.

Kecenderungan yang kontradiktif ini muncul pula dengan cara lain. Pada Oktober 1967, Suharto melakukan perombakan terhadap Kabinet Ampera, dengan menghilangkan presidium dan memperkecil ukuran kabinet menjadi hanya 23 anggota, serta menyingkirkan Slamet Bratanata dan Harjasudurja—keduanya membuat kesalahan fatal dengan mencoba membatasi campur tangan bisnis tentara dalam urusan negara. Kira-kira di waktu yang bersamaan, Suharto mengawali keterlibatan formalnya yang awet dengan seorang Cina-Indonesia, Liem Siu Liong, yang hingga waktu itu adalah seorang "pengusaha Jakarta yang cukup berhasil."[168] Bank Windu Kencana, yang sejak lama menjadi kendaraan finansial Liem, mengalami restrukturisasi skala besar; akibatnya dua anggota staf pribadi Suharto, Sujono Humardani dan Suryo Wiryohadiputro, ditunjuk untuk duduk dalam dewan direksi bank tersebut, sehingga mereka berhak memperoleh bagian dari laba bank. Dukungan Suharto terhadap Liem—dengan melanjutkan praktek yang dulu dijalankannya, yaitu mencari rekanan bisnis strategis dengan sekelompok kecil pengusaha Indonesia-Cina terpilih—mungkin dapat dipahami sebaik-baiknya jika kita melihat kecenderungan lazimnya untuk menangani urusan-urusan penting hanya dengan sekelompok kecil kolega yang sangat terpercaya dan memiliki ikatan pribadi yang kuat. Kecenderungan itu semakin kuat mengejewantah dalam bidang politik selama 1967, dengan

makin kuatnya pengaruh kelompok Spri terhadap kebijakan pemerintah, dan makin kuatnya lingkaran penasihat di sekitar Suharto—di antara para penasihat itu, yang paling menonjol adalah Panggabean, Basuki Rachmat, dan Ibnu Sutowo. Di bulan-bulan awal 1967, mulai muncul keluhan bahwa Suharto dijauhkan dan diisolasi dari para tamu dan pengunjung oleh para penasihatnya.[169]

Ketidakselarasan politik dalam negeri ini juga tercermin dalam usaha Suharto yang mungkin tidak fokus dalam menjalankan kebijakan luar negeri, sebuah arena yang diakui sendiri oleh Suharto tidak sepenting tugas utama memulihkan dan menstabilkan ekonomi.[170] Hubungan yang memburuk dengan Cina ("disebabkan provokasi dari fihak RRT [Republik Rakyat Cina]")[171] yang muncul setelah usaha kudeta tersebut—berkat bujukan Adam Malik—tidak sampai mengarah pada pemutusan hubungan diplomatik secara resmi, meski hubungan di antara keduanya secara efektif dibekukan pada 1967, dan Suharto membatalkan kesepakatan kewarganegaraan ganda dengan Cina. Namun, di saat yang bersamaan, Suharto sangat antusias untuk membangun hubungan antarnegara dalam kawasan yang terpengaruh langsung oleh Indonesia, ikatan yang akan didasarkan, ujarnya, pada kepentingan bersama dan bukan pada perbedaan ideologi serta politik praktis dalam negeri. Indonesia akan dengan teguh menolak untuk masuk pakta militer, dan tidak akan bergabung dengan suatu negara tertentu untuk memusuhi negara lain.[172] Hasilnya adalah berdirinya ASEAN (Association of South East Asian Nations) pada Agustus 1967. Dia menekankan bahwa Indonesia tidak memiliki ambisi untuk menguasai kawasan "karena hal ini bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45."[173]

PARTAI-PARTAI DAN PEMILU

Dalam rangka memenuhi mandat Sidang MPRS pada 1966 mengenai pemilihan umum, tiga rancangan undang-undang, yang dibuat setelah ditutupnya seminar tentara di Bandung, pada

akhirnya diserahkan ke DPR-GR awal tahun 1967. RUU tersebut mencoba menetapkan aturan-aturan dasar berkenaan dengan partai politik, mekanisme yang akan diikuti dalam mengadakan pemilu, dan komposisi MPR, DPR, serta DPRD. Belum apa-apa, jadwal ini sudah tertinggal jauh dari yang diusulkan MPRS, karena realitas politik sedemikian fleksibel dan terbuka sekaligus sedemikian rapuh. Terlebih lagi, usulan-usulan tersebut segera mendapat tentangan dari dalam DPR-GR sendiri yang dipenuhi oleh para politisi partai, karena rancangan undang-undang tersebut secara terselubung merupakan serangan terhadap partai politik dan bahkan terhadap sistem partai politik yang lama. Hal ini sebenarnya tidak mengejutkan mengingat para pemimpin militer—termasuk Suharto—menaruh kecurigaan teramat dalam terhadap partai politik dan politisi partai, dan mereka tidak mau menyerahkan buah kemenangan mereka kepada para politisi partai. Kemarahan partai-partai itu bukan hanya karena efek yang ditimbulkan oleh rancangan undang-undang tersebut—dengan sistem satu wakil untuk satu distrik, RUU tersebut akan lebih menguntungkan para kandidat lokal terkenal yang tidak memiliki ikatan dengan partai ketimbang para kandidat yang didukung partai—namun juga karena sebagian di antara partai tersebut, terutama Nahdlatul Ulama, sadar akan sumbangsih mereka dalam menghancurkan PKI dan memperkenalkan Orde Baru, dan mengharapkan suatu imbalan politik yang royal.

Secara umum, ada tiga pendekatan terhadap masalah pemilu ini. Pendekatan pertama dianut oleh kelompok radikal Orde Baru, yang dikepalai oleh H. R. Dharsono serta Kemal Idris, Sarwo Edhie, Juarsa, Witono, dan Solihin, serta kelompok intelektual sipil sekuler yang terpengaruh PSI, yang menginginkan penghancuran total terhadap partai politik yang didominasi kaum sipil. Dalam beberapa kasus, mereka berhasil mengenyahkan badan-badan lokal PNI, terlepas dari pandangan Suharto bahwa PNI tidak boleh dihancurkan.[174] Dalam pandangan mereka, politik seharusnya bersifat nonideologis, sebuah kontes terbatas antara

kekuatan-kekuatan yang berbeda dalam masyarakat, dirancang berdasarkan peran mereka dalam masyarakat dan memiliki komitmen terhadap pembangunan serta modernisasi masyarakat; malah, Dharsono mendorong munculnya kelompok-kelompok program "nonideologis" di Jawa Barat pada 1967.[175] Kelompok kedua, yang dipimpin oleh para mahasiswa angkatan 1966 dan rekan mereka dari angkatan sebelumnya yang menganut paham liberal, menginginkan kembalinya sistem liberal 'persaingan bebas' yang dianut pada awal dan pertengahan 1950-an. Dari perdebatan dua kelompok ini, muncul kelompok ketiga. Kelompok ketiga ini ingin membatasi mobilisasi sosial dan pertentangan yang muncul di masa demokrasi parlementer, dan memberi suara bagi kelompok-kelompok fungsional dalam masyarakat. Namun, kelompok ini juga melihat adanya bahaya besar yang mengancam jika partai politik yang telah ada, yang sebagian didasarkan pada marka-marka modern sentimen primordial dan memiliki pendukung yang luas dan fanatik dalam masyarakat, dihapuskan dan disingkirkan. Kelompok ini juga ingin, seperti ditegaskan oleh Suharto sendiri, agar pemilu "seharusnya dimenangkan oleh Orde baru melalui suatu demokrasi yang jujur."[176]

Setelah melalui perdebatan panjang, kelompok ketiga—Suharto termasuk didalamnya—menang. Tidak terjadi perubahan fundamental terhadap tatanan politik, meski ada tekanan cukup besar dari para mahasiswa dan reformis militer yang menuntut perubahan. Perubahan dibatasi dan dikelola secara hati-hati untuk mempertahankan stabilitas. Dalam sebuah pidato pada tanggal 4 Juli 1967, Suharto menyatakan pandangan bahwa partai politik adalah alat penting bagi demokrasi Pancasila. Menjelang akhir 1967, dia memberi kebebasan lebih besar bagi PNI untuk beraktivitas di daerah-daerah di mana sebelum itu aktivitasnya dibatasi. Selain itu, dia juga memerintahkan para komandan tentara setempat untuk membantu usaha PNI dalam mereformasi partai mereka dan, setelah sedikit kebohongan seputar penolakannya untuk mengizinkan berdirinya partai Islam baru, Suharto menyetujui

terbentuknya sebuah partai Islam baru yang modernis, Parmusi, pada awal 1968. Namun, fungsi partai-partai tersebut perlu dibatasi, bukan hanya demi pembangunan ekonomi melainkan juga demi keselarasan dan kestabilan politik. Menurut Suharto, demokrasi Pancasila adalah sebuah demokrasi yang mencerminkan dan mewakili kepentingan rakyat umum—demokrasi Pancasila bukanlah sebuah lahan persaingan antarpartai politik, di mana pihak mayoritas akan berkuasa. Pada Juli 1967, tercapailah sebuah kompromi yang menjadi wujud kekalahan kelompok radikal Orde Baru; kompromi itu mempertahankan perwakilan berdasarkan proporsi, menghilangkan persyaratan tempat tinggal, dan pada saat bersamaan memungkinkan pemerintah menunjuk sejumlah perwakilan untuk duduk di MPR dan DPR. Penundaan lebih lanjutpun terjadi karena undang-undang tersebut harus dirancang ulang berdasarkan kompromi yang tercapai pada bulan Juli, dan karena terjadinya perdebatan tak terelakkan akibat rancang ulang itu. Pada 10 Januari 1968, Suharto melapor ke MPRS bahwa pemilu tidak dapat dilaksanakan pada waktu yang telah ditetapkan oleh sidang MPRS 1966.[177]

Namun, elemen-elemen yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilu yang mungkin saja berfungsi untuk melegitimasi pemerintahan Suharto kini sudah siap. Bagaimanapun, beberapa kaum sipil yang lebih bijak tetap waspada: "Mungkinkah seseorang yang berlatar militer [Suharto] mampu lebih demokratis ketimbang seseorang seperti Sukarno, yang telah sejak lama berpikir tentang kemerdekaan dan masalah-masalahnya seraya berjuang membebaskan bangsa dari kolonialisme?"[178]

PRESIDEN PENUH

Pada awal 1968, langkah akhir dalam drama panjang yang melesatkan Suharto ke puncak kekuasaan mulai diayunkan. Pada Februari dan Maret, ia berusaha mengukuhkan legitimasi kekuasaannya dalam situasi politik cair dengan cara mereorganisasi parlemen

dan MPRS, mengganti anggota-anggota yang diduga terkait dengan Gerakan 30 September, dan membagikan kembali kursi kosong kepada anggota partai, memberi kursi pada front aksi, dan meningkatkan perwakilan pihak militer dan "kelompok fungsional".[179] Perlakuan seperti itu menggambarkan betapa sempitnya pemahaman politik partisipatoris yang dianut Suharto dan pendukungnya. Kekuasaan sesungguhnya dipegang dan dijalankan di luar ruang badan perwakilan.

Terlepas dari kerendahan hatinya dulu sehubungan dengan masalah itu, penobatan Suharto sebagai presiden penuh hanyalah sekadar formalitas. Suharto telah berupaya keras mengatasi "persoalan kekompakan ABRI itulah [yang] senantiasa mempengaruhi pikiran saya" dan memperkuat kendalinya.[180] Tidak ada pesaing politik serius yang muncul. Sebenarnya, terlepas dari sejumlah pihak antipemerintah yang terinspirasi oleh komunis yang muncul di Surabaya pada Januari, dan demonstrasi front aksi mahasiswa menentang tingginya harga beras, hanya ada sedikit oposisi terhadap pemerintahannya. Kemudian, pada Sidang MPRS V pada Maret 1968—yang diajukan DPR baru atas permintaan Suharto, dan aman berkat langkah efisien panglima Jakarta Amirmachmud dalam meredam aksi protes sipil—Suharto terpilih sebagai presiden untuk jangka waktu lima tahun, dan dimandatkan untuk melanjutkan upayanya menstabilkan politik bangsa dan meningkatkan kinerja ekonomi melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun. Langsung berbicara setelah diangkat sumpahnya pada 27 Maret, Suharto, yang berbusana sipil dengan sebuah peci di kepalanya, menekankan konsep kembar: pembangunan dengan kebebasan dan konsititusi dengan demokrasi.[181] Begitu sekadar formalitasnya upacara ini hingga keesokan paginya Suharto langsung bertolak mengunjungi Jepang dan Kamboja; ini kali pertama ia pergi ke luar negeri sejak 1961.

Bagaimanapun, sidang MPRS bukanlah kemenangan mutlak. Di balik pintu tertutup, Majelis bersikeras membatasi kekuasaan darurat Suharto secara lebih ketat, terlepas dari usaha persuasif

penasihat politiknya yang dipimpin oleh Ali Murtopo. Sidang ini tak mampu menyepakati garis-garis besar haluan negara karena adanya perpecahan antara perwakilan sekuler dan perwakilan kaum muslim yang ingin memasukkan jaminan kunci bagi kaum muslim. Pertikaian juga mengandaskan usulan untuk menentukan dan melindungi hak dan kewajiban warga negara, sementara kekuatan Supersemar Suharto dipertegas dan dibatasi. Pemilu, yang tertunda selama tiga tahun dan bukannya lima tahun seperti direncanakan, dijadualkan untuk diselenggarakan sebelum Juli 1971. Di luar ruang perwakilan, hadirnya militer—tiga puluh batalion di bawah komando Amirmachmud—sebelum dan sesudah sidang, dan kerasnya mereka dalam menangani demonstran mahasiswa sangat kontras dengan protes Suharto tentang proses demokratis.[182] Ini menjadi sinyal kekalahan akhir nan pahit dari kelompok-kelompok sipil yang semula menggabungkan diri mereka dengan Suharto dengan harapan bisa menciptakan satu sistem politik yang lebih terbuka. Kekerasan yang digunakan pada sidang MPRS menandai akhir koalisi sipil-militer yang membantu Suharto berkuasa dan membuka sisi koersif kekuasaan Orde Baru. Sukarno, dalam keadaan tua, sakit-sakitan, dan sekarat, serta tidak boleh bergerak bebas, menulis kepada Suharto, memberi selamat atas terpilihnya ia sebagai presiden.[183]

KESIMPULAN

Perlu waktu cukup lama bagi banyak kaum elite Jakarta untuk menyadari bahwa Suharto yang kalem, tenang, pendiam, dan selalu tersenyum, telah berubah menjadi politikus manipulatif yang kejam dan dingin, politikus yang mampu menghitung saat yang tepat, gertakan, serta ancaman, untuk menumbangkan bapak bangsa Indonesia guna mencapai posisi tertinggi di negara Indonesia dalam waktu tiga puluh bulan sesudah peristiwa 1 Oktober.

Kenaikan luar biasa ke puncak kekuasaan oleh seseorang yang kariernya, sebelum 1965, hanya ditandai oleh kompetensi

kelas pekerja, sedikitnya ambisi politik atau ketertarikan untuk terlibat dalam politik, kekurangsukaan pada publisitas, wajah tak menarik serta dingin, perilaku yang jauh berbeda dengan Sukarno yang karismatis, adalah sesuatu yang perlu dijelaskan. Tidak adanya pesaing yang serius, terutama ketika Sukarno tumbang karena menolak untuk menyesuaikan diri dengan realitas baru situasi politik setelah 1 Oktober, sebagian menjelaskan hal itu. Nasution, yang satu-satunya selamat di antara para jenderal senior yang telah dihabisi aksi kudeta 1 Oktober, memiliki legitimasi untuk menyaingi Suharto, tapi Nasution tidak memiliki syaraf baja untuk ikut bertarung dan tidak juga mendapat dukungan aktif dari eselon senior Angkatan Darat, terutama ketika Suharto menegaskan bahwa ia tidak akan ikut campur, dan malah akan meningkatkan patronase berlimpah dalam kepentingan bisnis angkatan bersenjata. Manipulasi lihai arena politik oleh Suharto dan para pendukung dekatnya membuat kemungkinan munculnya lawan sipil yang penting menjadi mustahil. Namun, di atas itu semua, keahlian dan dan kesabarannya dalam memanfaatkan momen politik yang tepatlah yang membantu Suharto. Suharto sangat cermat melakukan hal ini dengan gaya yang bisa dinilai sesuai dengan prosedur konstitusional formal, memupuk (atau kalau perlu memaksakan) tujuannya melalui tiga sidang MPRS yang merupakan satu-satunya lembaga yang berkuasa mengangkat dan menjatuhkan presiden. Ia sangat berhati-hati dalam bertindak demi meningkatkan bobotnya dalam politik.

Kesabaran, kekeraskepalaan, dan perhitungan adalah konsep andalan Suharto—mendesak maju ketika melihat celah, bertahan ketika kesempatan tertutup, membuat rancangan untuk mengenyahkan dan menyingkirkan pengacau atau penghambat yang potensial. Terkadang, sikapnya ini mendatangkan kritik baginya: bahwa dia terlalu diam, rendah hati, atau tak tegas. Seperti yang dikemukakan oleh seorang teknokrat, "Ada satu hal yang telah saya pelajari selama bekerja sama dengan Presiden: memegang teguh tujuan utama seraya melakukan berbagai manuver untuk

menyelesaikan masalah."[184] Dalam melakukan itu, Suharto berhasil menorehkan reputasi sebagai seseorang yang sukses, seseorang yang pada akhirnya mampu memberi hasil yang diharapkan.[]

7 Legitimasi dan Konsolidasi 1968–1973

KITA TAHU bahwa tak lama setelah diambil sumpahnya sebagai presiden, Presiden Suharto beserta istri berangkat ke Jepang untuk kunjungan resmi, dengan memercayakan tanggung jawab urusan sehari-hari pemerintahan kepada Sri Sultan. Dalam dua babak pembicaraan resmi dengan Perdana Menteri Sato dan juga di tempat lain, Suharto berusaha keras mendapat peningkatan bantuan ekonomi dari Jepang untuk tugas pembangunan ekonomi Indonesia. Namun, upaya ini lebih terkesan sebagai kegagalan yang memalukan. Suharto, atas nasihat dari Alamsyah yang telah mengatur upaya ini, sebelumnya berharap pihak Jepang akan menjalankan komitmen dengan memberi sejumlah besar uang, lebih dari US$100 juta, dalam bentuk bantuan pada Indonesia. Namun, hasil maksimal yang dapat diperoleh Suharto hanyalah bahwa Jepang akan berusaha mempertimbangkan untuk menaikkan bantuan mereka, tanpa merinci jumlahnya, bagi tahun anggaran yang sedang berjalan; tak ada komunike akhir yang ditandatangani usai pembicaraan tersebut. Terlepas dari kekecewaan Suharto atas tanggapan Jepang, perjalanan tersebut memberi peluang pertama kepada Suharto untuk menekankan pada dunia internasional

gagasan-gagasannya tentang kebijakan luar negeri Indonesia serta posisi Indonesia di mata dunia. Di Kamboja, misalnya, yang ia kunjungi sepulang dari Jepang, Suharto menegaskan pandangannya bahwa "bangsa-bangsa Asia Tenggara mempunyai kebebasan untuk memilih martabatnya sesuai dengan kepentingan dan cita-cita sendiri."[1]

KABINET PEMBANGUNAN PERTAMA

Kini Suharto adalah presiden dari salah satu negara paling besar dan kompleks di dunia; hanya selang dua setengah tahun sejak ia melejit dari antah-berantah. Sekarang, ia ditugaskan dan diberi wewenang untuk memimpin negerinya yang luas dan sulit diatur itu. Dengan kebiasaannya untuk rapi—yang sejak lama ia pupuk dan sempurnakan—ia mulai semakin sering tampil mengenakan pakaian sipil, dengan meninggalkan seragam tentara yang di mata publik lekat dengan dirinya selama lebih dari tiga puluh bulan sebelumnya.

Di antara tugas-tugas pertamanya sebagai presiden adalah membentuk kabinet baru, yang diberi nama Kabinet Pembangunan Pertama untuk membedakan kabinet itu dari kabinet-kabinet sebelumnya yang menekankan berbagai aspek rekayasa sosial yang berorientasi ideologi. Kabinet baru ini merupakan 'kombinasi antara tenaga-tenaga ahli dari lingkungan universitas dan ABRI"[2]—buah dari diskusi dan perundingan yang berlarut-larut dengan para pemimpin militer dan orang-orang sipil dari kalangan partai maupun nonpartai. Kabinet baru itu, yang terdiri atas delapan belas menteri kepala departemen dan lima menteri negara, diumumkan pada 6 Juni 1968, saat ulang tahun Soekarno. Jumlah menteri dari kalangan militer dikurangi dari sembilan menjadi enam, sementara banyak dari para menteri sipil adalah orang-orang yang terkemuka karena keahlian maupun prestasi akademis mereka. Sebagaimana lazimnya, orang-orang dari kalangan militer ditempatkan dalam jabatan di mana keamanan merupakan masalah

yang peka; di mana ekonomi membutuhkan perhatian, Suharto menunjuk para teknokrat penasihatnya. Sumitro Joyohadikusumo—yang terkejut oleh tajamnya kemerosotan ekonomi Indonesia selama kepergiannya yang panjang akibat pengasingan dirinya ke luar negeri—ditunjuk sebagai menteri perdagangan, dengan disambut hangat oleh sebagian kalangan walau ada juga tanda-tanda oposisi dari sebagian kalangan lain atas pengangkatannya. Sementara itu, Ali Wardhana ditunjuk sebagai menteri keuangan. Frans Seda, yang sebelumnya menteri keuangan, dialihkan ke departemen perhubungan setelah ada tekanan dari kepentingan-kepentingan dagang muslim yang dilancarkan terhadap dirinya.[3] Dalam benak Suharto, Orde Baru yang masih muda itu menghadapi tiga tantangan utama: perbaikan ekonomi, pengembangan sistem politik yang didasarkan pada asas-asas UUD 1945 (yang mencakup "demokrasi yang sehat, negara hukum, dan sistem konstitusional"), serta perlawanan atas bahaya laten komunisme.[4] Suharto sangat lekat dengan pikiran bahwa rakyat Indonesia sudah terlalu menderita karena pendahulunya cenderung bermain-main dengan politik. Bagi dirinya, seperti yang ia katakan kepada para anggota dari kesatuan-kesatuan aksi pada Maret 1968, "yang paling penting dewasa ini ialah soal Pembangunan."[5] Selanjutnya, pemerintahannya sendiri tercirikan oleh upaya tak kenal lelah dalam meningkatkan kekayaan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Karena itu pula, ia memercayakan pengembangan rangkaian pertama pembangunan lima tahun yang berkelanjutan untuk membangun kembali serta memperbaiki perekonomian Indonesia yang hancur. Suharto selalu membayangkan bahwa konsepnya tentang pengembangan yang bertahap, yang akan membawa Indonesia menuju industrialisasi, akan membutuhkan waktu sedikitnya satu generasi untuk mewujudkannya. Sementara itu, MPRS belum menentukan garis-garis besar haluan negara, karenanya, presiden baru sangat leluasa untuk bertindak sesuai keinginannya. Menurut pandangan Suharto, ada lima sasaran utama pemerintah: "stabilitas politik termasuk pelaksanaan politik luar negeri; pemilihan umum; pe-

ngembalian ketertiban dan keamanan; penyempuran dan pembersihan aparatur negara, dan stabilitas ekonomi serta pembangunan lima tahun yang pertama."[6]

Kabinetnya sendiri tidak dimaksudkan sebagai roket pendorong terlaksananya formula sederhana Suharto akan keamananan dan pembangunan. Sebaliknya, bentuk kabinet itu lebih merupakan pertemuan para menteri, yang jumlah orangnya sama dengan kabinet selama masa pemerintahan Soekarnó. Bedanya, pertemuannya lebih sering dan teratur (diselenggarakan tiap bulan), untuk mendengarkan pengarahan dari sang ketua, untuk mendengarkan laporan para menteri (yang dianjurkan Suharto agar singkat dan langsung masuk ke permasalahan), serta untuk memperoleh pemahaman umum mengenai agenda pemerintahan. Monolog-monolog yang bertele-tele dari pendahulunya kini digantikan oleh rapat terbuka—dan amat didukung oleh sekretaris negaranya yang gemar bekerja keras, berdisiplin tinggi, dan cerdik itu, yaitu oditur militer Sudharmono (yang "lihai dalam memanfaatkan peluang yang muncul")[7]—di mana keahlian Suharto dalam detail serta penekanannya pada hasil-hasil yang jelas dan kokoh tampak sangat menonjol. Kadang-kadang, Suharto mengundang orang-orang nonkabinet untuk ikut hadir dalam rapat-rapat itu, apalagi jika keahlian mereka dipandang perlu: sebagai masukan atau untuk menyelesaikan permasalahan. Keputusan-keputusan yang diambil oleh kabinet hampir selalu diawali oleh diskusi yang cakupannya luas, dan yang selanjutnya disimpulkan dengan rapi oleh Suharto, serta yang sifatnya berupa kesepakatan umum mengenai parameter-parameter luas langkah yang akan diambil. Suharto, yang pada dasarnya penuh curiga dan rahasia, dan sudah amat terbiasa dengan pekerjaan staf, lebih menyukai diskusi problematik yang terselenggara dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil pada level lebih bawah dari struktur pemerintahan.

Pada Juni 1968, Suharto menggunakan kesempatan untuk melakukan bedah kosmetik pada susunan staf pribadinya sebagai tanggapan atas kecaman yang semakin meningkat dari mahasiswa

dan pers bahwa para staf pribadinya terlalu berpengaruh dalam masalah-masalah kebijakan negara. Suharto kemudian membubarkan kelompok penasihat dekatnya, Spri. Tiga penasihatnya yang paling penting dan berpengaruh, yang semuanya berasal dari Angkatan Darat, sesudahnya diangkat sebagai "asisten pribadi" (Aspri). Mereka itu antara lain adalah Sujono Humardani (yang setahun sebelumnya sudah dinaikkan pangkatnya menjadi brigadir-jenderal) yang menjadi pemberi masukan bagi Suharto mengenai masalah-masalah keuangan dan politik pada umumnya selain juga berfungsi sebagai utusan pribadinya, serta Ali Murtopo, kepala Opsus.

Para mantan anggota inti Spri lainnya diberi jabatan-jabatan penasihat dan administratif yang memiliki pengaruh dan berada dekat dengan pusat kegiatan kenegaraan. Suharto sangat mempercayai orang-orang ini; mereka dibuat merasa seolah-olah memikul tanggung jawab khusus atas tugas-tugas yang ia percayakan kepada mereka. Pada gilirannya, mereka membalas dengan kesetiaan dan pengabdian yang tak pernah goyah; sesudahnya, pengaruh mereka yang menonjol terhadap keputusan-keputusan yang diambil oleh Suharto tampaknya menjadi semakin besar saja.

Namun demikian, Alamsyah toh melakukan kesalahan karena memberi informasi keliru kepada Suharto tentang siapnya Jepang dalam memberi bantuan keuangan pada Indonesia; setidaknya begitulah persepsi Suharto. Sementara Alamsyah masih tetap sebagai sekretaris negara—jabatan yang dipercayakan kepadanya pada awal 1968—pengaruhnya sudah mulai memudar, dan ia tidak termasuk yang diangkat menjadi Aspri. Sebaliknya, Sujono Humardani dengan cepat menggantikan Alamsyah sebagai penasihat dan penjalin hubungan dengan Jepang. Spri dan, dalam skala yang sedikit lebih kecil, Aspri bukan saja merupakan wujud lemahnya serta terkotak-kotaknya kelembagaan dalam perpolitikan Indonesia, namun juga wujud keinginan Suharto untuk dikelilingi oleh rekan-rekannya yang dekat dan terpercaya yang bisa menjamin bahwa kehendak-kehendaknya pasti terlaksana.

Aspri merupakan mekanisme pemerintahan yang sangat dipersonalisasikan di mana dinamika dan kepekaan antarpribadi memainkan peran yang menentukan. Terlepas dari pendelegasian tugas-tugas resmi kepada para Asprinya, Suharto tetap saja ingin mereka memahami dan mengakomodasi cara berpikirnya. Sujono Humardani, misalnya, kelak menjelaskan bahwa "ia tidak sabar menunggu saat Suharto datang kepadanya untuk minta nasihat, tapi ia juga harus mengantisipasi pertanyaan yang akan diajukan Suharto serta mempersiapkan jawabannya dengan baik."[8] Penentuan kebijakan dan personalitas pun sering digabungkan—dan membingungkan:

> Waktu saya [Suharto] akan menetapkan kebijaksanaan menaikkan harga minyak dari Rp 4,- menjadi Rp 16,- per liter, pada tahun '67 atatu '68, Ali Murtopo bingung. Ia sampai-sampai menangis di depan saya, sambil mengatakan agar saya jangan mengambil keputusan demikian. 'Kalau mengambil keputusan seperti itu,' katanya, 'rakyat pasti memberontak dan pemerintah bisa jatuh. Kita ingin mempertahankan Pak Harto,' katanya. 'Kalau tetap akan diambil keputusan menaikkan harga minyak, itu akan menhancurkan pemerintah Orde Baru.' .... Saya katakan, "Saya sudah menghitung keseluruhannya.' Memang saya sudah menghitung dari segala segi dalam mempersiapkannya.[9]

Selain itu, sebagian besar pekerjaan pemerintah berada dalam badan-badan serta instansi-instansi yang dibentuk oleh Suharto untuk tugas-tugas khusus. Demikianlah, Ibnu Sutowo secara pribadi bertanggung jawab atas industri perminyakan, mantan perwira Kostrad Brigjen Achmad Tirtosudiro ditunjuk mengepalai sebuah badan baru, Bulog (Badan Urusan Logistik dari Dewan Logistik Nasional pada 1967), sebuah organ perdagangan beras yang didukung oleh negara, sementara, Suhardiman memimpin PT Berdikari, sebuah perusahaan dagang yang dikuasai Angkatan Darat. Suharto juga berupaya keras menegakkan prosedur-prosedur administratif yang lebih tertib di seluruh jajaran departemen-

departemen pemerintah yang hingga saat itu kacau dalam bidang administrasi.

REHABILITASI EKONOMI

Masalah utama yang dihadapi pemerintahan baru Suharto adalah keadaan ekonomi. Langkah-langkah pembaruan 3 Oktober 1966, kendati disambut oleh pasar luar negeri, belum memperlihatkan hasil-hasil yang dijanjikan. Malah, tak lama sesudah terpilihnya Suharto, terjadi demonstrasi yang dipimpin oleh KAPPI di Tanjung Priok, yang menentang kenaikan harga barang-barang, yang mengakibatkan seorang mahasiswa meninggal serta sejumlah lainnya luka-luka.[10] Sidang kabinet pada 1 Mei 1968 menekankan kembali perlunya kebijakan-kebijakan ekonomi yang hebat. Salah satu hasil dari disiplin anggaran pemerintah adalah melambung tingginya harga bahan bakar, yang merupakan strategi dalam mengatasi belanja-belanja tak terduga di pos-pos lain APBN. Suharto menerima cobaan di masa sulit ini dengan tegar: "Lebih baik kita susah sekarang, tapi nantinya akan lebih baik. Kita pasti akan merasa senang dikemudian hari, setelah kita mengalami suatu keadaan yang pahit seperti sekarang ini."[11]

Pada pertengahan Juni 1968, Presiden Direktur Bank Dunia Robert McNamarra memilih untuk memulai perjalanan luar negeri pertamanya dari Jakarta, di mana ia menawarkan pinjaman pembangunan dalam jumlah kecil serta konsultasi teknis mengenai masalah-masalah ekonomi. Beberapa hari sesudahnya, Menteri Perdagangan Sumitro Joyohadikusumo memberlakukan serangkaian langkah guna membatasi impor barang yang tidak esensial. Ini merupakan langkah awal dalam kebijakan 'barter' antara pemodal luar negeri dengan pemerintah Indonesia; pihak pertama menyediakan dana yang sangat dibutuhkan bagi stabilisasi ekonomi Indonesia, sementara pemerintah Indonesia menciptakan kondisi-kondisi yang menguntungkan agar modal internasional leluasa bergerak. Tim penasihat yang ditunjuk oleh Suharto untuk meman-

du pembuatan kebijakan ekonomi itu terdiri atas Wijoyo (ketua), Sumitro Joyohadikusumo, Ali Wardhana, Sadli, Emil Salim, Subroto, Frans Seda, dan Radius Prawiro. Mereka inilah yang meletakkan kerangka-kerangka makronya; khususnya Wijoyo, sebagai Ketua Bappenas, bertanggung jawab atas perumusan Rencana Pembangunan Lima Tahun I (Repelita I) Orde Baru, yang dimulai pada 1969. Pemerintah, yang dipimpin oleh Suharto, kemudian menawarkan tim teknokrat ini kepada komunitas keuangan internasional. Misalnya, pada September 1968, Suharto menerima kelompok yang terdiri atas 40 orang pengusaha asing, terlibat dalam perundingan dengan para pejabat pemerintah dan pengusaha Indonesia, guna membeberkan peluang-peluang investasi yang ada di Indonesia.

Sasaran-sasaran utama investasi asing adalah industri-industri eksploitasi sumber daya alam yang padat modal. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam mencapai sasaran tersebut menganaktirikan kalangan pengusaha pribumi, yang hampir tidak memiliki pengaruh dalam konstelasi politik baru itu. Di tahap-tahap awal upaya stabilisasi ekonomi ini, tak banyak perhatian yang diberikan pada pengembangan industri manufaktur. Dan kebijakan-kebijakan baru ini bukan saja memfasilitasi masuknya perusahaan-perusahaan asing untuk dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan Indonesia, arus barang-barang konsumen impor pun meningkat dan merugikan kepentingan kalangan produsen Indonesia. "Keadaannya," tulis Crouch, "jelas tidak menguntungkan bagi terbentuknya 'kelas menengah nasional'" serta malah berakibat pada melemahnya para pengusaha muslim; Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri, yang diberlakukan pada November 1968, dibuat dengan tujuan untuk meringankan penderitaan kelompok ini.[12]

Komponen yang cukup menentukan dari arus modal asing ini adalah pinjaman yang membantu pemulihan ekonomi. Terlepas dari masalah-masalah sebelumnya dengan pihak Jepang, Suharto, melalui perantaraan tak kenal lelah dari Sujono Humardani, pada

akhirnya berhasil membina hubungan kerja yang baik yang tampaknya dimulai pada April 1969 dengan berkunjungnya Menteri Keuangan Jepang Takeo Fukuda ke Jakarta, dan yang selanjutnya berkembang di awal era 1970-an. Kunjungan Suharto pada Mei 1972 pun dipersiapkan dengan baik; didahului oleh kunjungan Gubernur Bank Indonesia, Radius Prawiro, yang memuluskan jalan bagi kedatangan Suharto. Pertemuan-pertemuannya dengan pihak Jepang pun berhasil membuahkan komitmen mereka untuk membantu lewat pinjaman lunak dengan imbalan pasokan minyak mentah berkadar belerang rendah.

Penerapan kebijakan ekonomi yang terkesan sangat konservatif dan kurang peka dalam mengendalikan inflasi, ternyata berhasil menstabilkan mata uang dan memperbaiki investasi dengan membawa dua dampak penting. Yang pertama adalah munculnya, nyaris spontan, visi pembaruan ekonomi dan pembangunan yang bertentangan dengan pendekatan para teknokrat yang berorientasi ke AS itu. Kebijakan pembaruan ini berpusat pada orang-orang yang dekat dengan Suharto, terutama Sujono Humardani dan Ali Murtopo, yang sama-sama menganut gagasan akan nasionalisme ekonomi/birokrasi yang dipimpin oleh negara dengan meniru pengalaman restorasi Jepang di akhir abad ke-19 serta Singapura yang modern. Kedua orang ini lebih menyukai pendekatan pembangunan yang dapat melindungi Indonesia dari kerakusan modal asing serta yang kelak akan lebih memerhatikan kemampuan-kemampuan lokal Indonesia.[13] Suharto sendiri cukup bersimpati terhadap pendekatan ini. Misalnya, pada November 1968, ia berkomentar bahwa perekonomian Indonesia "sekali-kali tidak akan meluncur ke arah liberalisme."[14]

Yang kedua adalah terbentuknya, berbarengan dengan pendekatan pasar bebas para teknokrat, perekonomian yang terselubung rahasia—yang pada dasarnya bertentangan dengan konsep pasar bebas—yang lebih menghargai hak-hak istimewa ketimbang persaingan sehat. Pelopor perekonomian cara ini sudah tentu tak lain adalah Ibnu Sutowo. Sebagai akibatnya, muncullah dualisme

aneh dalam perekonomian. Di permukaan, perekonomian tampak sebagai pasar yang mulus, terbuka, teratur, yang merupakan hasil karya para ekonom lulusan AS dan dikendalikan secara rasional. Namun, di lapisan-lapisan bawah permukaan, perekonomian berjalan dengan cara-cara lain serta sim-salabim. Para teknokrat boleh-boleh saja membuat anggaran belanja, tapi itu bukan anggaran yang sebenarnya—setidaknya di tahap awal Orde Baru. Crouch meragukan "apakah anggaran belanja resmi yang naik lebih dari separo pemasukan memang benar digunakan oleh aparat pemerintah."[15] Mereka juga tidak bisa mengendalikan pergerakan sumber daya pada lapisan bawah permukaan, yang bersumber pada Pertamina (yang semakin berlimpah dana sejak 1968 dan seterusnya ketika perusahaan-perusahaan minyak asing semakin mengalah pada konsep Ibnu mengenai kontrak bagi-hasil, dan ketika Pertamina membuat variasi masuk ke industri asuransi, angkutan, petrokimia, dan baja), dalam yayasan-yayasan yang mulai bermunculan yang didukung militer serta dari bentuk-bentuk lain usaha tentara. Kendati para teknokrat kecewa atas praktik-praktik siluman ini, mereka tetap saja melakukan apa yang dapat mereka lakukan dalam keterbatasan-keterbatasan struktural mereka. Mereka sendiri, karena lama menjalin hubungan dengan pihak Angkatan Darat, sangat menyadari gaya bisnis tentara ini serta tampaknya bersyukur bahwa dominasi tentara dalam politik setidaknya memberi mereka situasi yang stabil. Wijoyo sendiri pernah menyatakan bahwa "tentara paling tidak memiliki organisasi serta peraturan yang amat jelas menyangkut prosedur-prosedur memerintah. Inilah yang tidak dimiliki oleh partai politik maupun kalangan sipil."[16]

Persaingan antara ekonomi resmi dan tidak resmi ini melahirkan ketegangan, yang kadang-kadang bermanfaat, tapi kadang-kadang juga menjadi bencana, antara para pelopor dari model-model pembangunan yang berbeda ini; hal itu membuat Suharto semakin kuat dan menonjol; ia tampak sudah cukup siap menghadapi hal itu dengan pengalamannya sebagai Panglima Divisi Diponegoro dan Kostrad. Pucuk dicinta ulam tiba, persaingan ini

benar-benar pas dengan niat Suharto untuk dapat menunjuk pada naiknya tingkat investasi internasional serta efek samping yang dibawanya; di saat yang sama, persaingan ini juga pas dengan gaya Suharto untuk mengenyahkan segala sarana yang dapat memenuhi kebutuhan lawan-lawan politik potensialnya serta untuk melumurkan dan melicinkan roda-roda perpolitikan. Pada tahap awal karier kepresidenannya ini, ia sangat menyadari perlunya mengamankan konsensus serta tidak mengambil sikap yang dapat mendestabilisasi cengkeramannya yang masih longgar terhadap kekuasaan.

Di lingkup perekonomian resmi, perhatian paling besar ditujukan pada pengembangan pertanian; seperti ditekankan dalam Repelita I, "bidang perjuangan yang dipilih adalah bidang pertanian."[17] Rencana tersebut, yang diterapkan lewat program Bimas (bimbingan massal), mencanangkan peningkatan produksi beras hampir lima puluh persen, yang harus dicapai melalui penggunaan varietas-varietas unggul bibit padi, perbaikan irigasi, serta penggunaan pupuk dan pestisida. Suharto sendiri mengumumkan bahwa, menjelang 1973, Indonesia akan mencapai swasembada beras.

Kendati ada perbaikan-perbaikan luar biasa dalam produksi beras, program ini menghadapi berbagai masalah, mulai dari paksaan terhadap para petani untuk ikut serta dalam program tersebut, peliknya pengadaan paket-paket masukan bagi para petani, tidak mampunya para petani membayar kembali kredit-kredit pertanian yang dipinjamkan kepada mereka, serta aturan-aturan komersial dengan para pemasok asing kebutuhan pertanian, terutama bahan-bahan kimia, yang salah satu di antaranya, Jenderal Suryo, salah seorang staf pribadi Suharto, tampaknya memiliki kepentingan yang cukup besar walau tidak secara langsung.

Suharto sendiri, dalam upaya menaksir reaksi masyarakat terhadap kampanye Bimasnya, mengadakan kunjungan tidak resmi ke desa-desa di Jawa Barat dan Jawa Tengah pada April 1970. "Ia mengenakan pakaian yang biasa ia kenakan di istana, jas safari

hijau atau abu-abu, tapi mengenakan topi serta memegang tongkat,"[18] dan bincang-bincangnya dengan para petani mengungkap seriusnya kekecewaan mereka terhadap program Bimas tersebut, yang ia hentikan sebulan sesudahnya sebagai awal dari perubahan mendasar: menjadikan program itu sebuah program yang tidak menyertakan pihak asing.

Aspek penting kedua dari pengembangan pertanian adalah fokus lebih pada transmigrasi. Suharto menekankan "pentingnya transmigrasi dalam melaksanakan Repelita"; transmigrasi, ujarnya, bukan hanya berarti "penyebaran penduduk dari satu daerah ke daerah lainnya", melainkan lebih sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan dengan memungkinkan petani memperoleh akses ke ladang-ladang yang lebih baik dan produksi yang lebih tinggi.[19]

Kontak yang begitu dekat dengan masyarakat petani—kunjungan ke daerah-daerah lain Indonesia yang kerap dilakukannya guna memantau keadaan berbagai proyek pembangunan pada saat itu sudah merupakan bagian baku dari acara tetap kepresidenannya—menunjukkan kepedulian Suharto yang besar terhadap masalah pertanian, yang merupakan hasil dari tak hanya pendidikan masa kecilnya namun juga perhatiannya semasa menjabat sebagai panglima Divisi Diponegoro. Peran ini ia mainkan terus dengan baik, menggamit publisitas maksimal dari upayanya mendekatkan diri dengan masalah sehari-hari rakyat kecil. Selain kunjungan ke komunitas-komunitas pertanian, Suharto juga membuat kebiasaan memberi sumbangan peralatan pertanian—secara simbolis—ke desa-desa. Pada awal 1969, misalnya, ia menyumbang lima pompa air bagi desa Wuryantoro, di Wonogiri, Jawa Tengah, "agar penduduk setempat dapat meningkatkan produksi pangan dengan pompa-pompa tersebut."[20] Pada September 1971, ia menyumbangkan penggilingan beras, alat penyemprot, dan motor kepada para kepala desa di Riau; masih di bulan yang sama, untuk merayakan Hari Petani, ia menerima kunjungan 500 orang petani di Istana Negara. Sejak 1969, setiap desa di Indonesia

menerima uang sebesar Rp 100.000 untuk proyek-proyek pengembangan pertanian setempat.

Bersama dengan intensifikasi pertanian, Suharto mengupayakan perubahan mendasar sikap masyarakat Indonesia terhadap keluarga berencana, "masalah yang peka dan tidak gampang";[21] Pendahulunya, Sukarno, tidak setuju pada setiap pendapat bahwa Indonesia sebaiknya menghentikan laju pertumbuhan penduduknya secepat mungkin. Pandangan Suharto mengenai keluarga berencana tampaknya muncul berkat nasihat para teknokratnya, yang meyakinkan Suharto akan hubungan antara pertumbuhan penduduk yang tak terkendali, pengembangan pertanian, lapangan kerja, serta kemakmuran.

Pada 1967, Indonesia ikut menandatangani Deklarasi Kependudukan PBB. Pada September 1968, Suharto, yang setahun sebelumnya membentuk panitia khusus sehubungan dengan keluarga berencana, menginstruksikan Menteri Sosial Idham Chalid agar ("segera") membentuk Lembaga Keluarga Berencana nasional, yang pada 1970 disempurnakan Suharto menjadi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional—yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Keluarga berencana pun ternyata berhasil dengan gemilang, terbukti dari cepat dikonsumsinya alat-alat konstrasepsi selama tahun-tahun awal dekade 1980-an.

Dalam menggalakkan keluarga berencana, Suharto kelak mengakui bahwa sebagai presiden dengan enam anak, ia mengalami kesulitan menganjurkan kepada orang-orang bahwa dua anak itu cukup, dan menanggapi dengan senyum masam sebuah koran yang memuat fotonya ketika meresmikan pabrik kondom. Namun demikian, ia menolak aborsi sebagai salah satu cara keluarga berencana: "aborsi bertentangan dengan agama."[22]

Suharto juga berupaya menangani masalah birokrasi yang membengkak dan tidak efisien. Dalam sebuah langkah yang jenius, ia berupaya menyingkirkan pegawai yang berlebih—atau, sebenarnya, lebih bermaksud mendorong mereka untuk tidak masuk kerja—seraya masih tetap membayar gaji mereka. Tapi, langkah

ini terhenti karena mendapat kecaman masyarakat. Ia juga melarang perekrutan pegawai baru serta menaikkan gaji pegawai cukup tinggi, namun tanpa ada perbaikan nyata dalam kinerja mereka. Upaya-upayanya bahkan merambah hingga ke masalah instruksi kepresidenan, pada 1972, yang menetapkan berbagai jenis seragam yang harus dikenakan oleh para pegawai pemerintah. Strategi-strategi ini bukanlah hal pokok dari pembaruan yang dijalankannya melainkan lebih sebagai upaya licik untuk memasukkan sosok-sosok militer ke dalam birokrasi sipil, namun, secara keseluruhan, strategi-strategi ini berdampak pada terjadinya depolitisasi radikal birokrasi sipil serta semakin jauhnya proses transformasi birokrasi sipil itu menjadi alat rezim.

Di tengah-tengah ricuhnya pembuatan kebijakan ekonomi makro serta penerapannya, Suharto tetap menunjukkan rasa tertariknya—yang telah muncul sejak lama—akan koperasi. Dalam pidato pada pertengahan tahun 1968 memperingati Hari Koperasi yang ke-27, ia menonjolkan prospek-prospek ekonomis koperasi, dengan mengecam mereka yang menyatakan bahwa "koperasi hanya hidup dari bantuan pemerintah", serta memuji peran yang dapat dimainkan koperasi dalam pembangunan.[23]

Secara perlahan dan bertahap, dan kendati ada kecaman-kecaman serta prediksi-prediksi suram, perekonomian mulai membaik: laju inflasi dapat dikendalikan, stabilitas harga yang jauh lebih baik sudah tampak pada akhir 1967, panen padi yang sangat baik pada 1968, serta penerimaan pajak yang memadai guna menutupi belanja rutin pada 1968. Dalam pidato akhir-tahun pada 1968, Suharto merasa cukup percaya diri untuk mengumumkan bahwa "kita telah tercapai landasan-landasan yang memungkinkan pelaksanaan Pembangunan." Tekadnya untuk berhasil tak bisa dipungkiri: "pembangunan ini tidak akan gagal dan tidak boleh gagal."[24] Pada 1970, seorang pengamat berkomentar bahwa "tentara telah membawa negeri ini ke jalan yang benar. Operasi penyelamatan yang mengagumkan telah menghasilkan stabilisasi ekonomi. Stabilisasi ini diimbangi dengan stabilisasi

politik yang mencengangkan pula, yang menjanjikan bahwa Indonesia akan tetap ditempatkan pada jalur pragmatis ke arah pembangunan yang wajar untuk beberapa waktu mendatang."[25] Kalaupun ada masalah-masalah ekonomi yang timbul, umumnya dapat ditangani dengan mengeluarkan penyesuaian-penyesuaian, seperti keputusan Suharto untuk mendevaluasi matauang sebesar sepuluh persen pada Agustus 1971—devaluasi yang pertama selama masa Orde Baru. Keberhasilan ekonomi pun mendatangkan manfaat politis. Mereka yang prospek lapangan kerjanya menjadi bertambah baik, mereka yang gajinya naik, mereka yang peluang usahanya menjadi berlipat-ganda, dan mereka yang lebih merasa aman di masa itu ketimbang di masa akhir Orde Lama yang penuh ketidakpastian yang bergolak serta kerapuhan ekonomi, semuanya punya banyak alasan untuk mengagumi hasil kerja Suharto.

IDEOLOGI

Selain meletakkan kerangka dasar bagi pemulihan ekonomi, Suharto berhati-hati sekali dalam menekankan landasan ideologis pemerintahannya, dengan memanfaatkan, memperkuat, dan memperluas gagasan-gagasan yang ia kembangkan pada tahun 1950-an. Dasar pemikirannya adalah ideologi Pancasila. Tak lama setelah ia menjabat sebagai presiden penuh, ia menegaskan bahwa persepsinya tentang Pancasila telah dibangun secara sempit. Dalam sebuah pidato pada 15 April 1968, ia menegaskan bahwa "mencoba-mencoba menggunakan dasar negara yang lain dari Pancasila atau menyelewengkan pelaksanaannya, hanya akan membawa malapetaka bagi seluruh bangsa seperti pengalaman pahit yang lalu."

Beberapa hari kemudian (18 April), ia membakukan rumusan Pancasila serta melarang peringkasannya. Menjelang akhir tahun itu, ia menegaskan bahwa "satu-satunya ideologi ABRI adalah Pancasila ... ABRI tidak akan membiarkan Pancasila berobah dengan bentuk apapun, bilamanapun dan oleh siapapun. Karena berobahnya Pancasila berarti pengkhianatan terhadap kemurnian

perjuangan ABRI sendiri."[26] Pada 1972, ia berujar bahwa amat penting untuk meneruskan semangat '45' kepada generasi berikutnya agar menjadi panduan mereka dalam bersikap dengan tepat untuk mengembangkan persatuan bangsa.[27]

Di tengah-tengah keprihatinan publik akan peran Angkatan Darat dalam politik, Suharto berkali-kali menegaskan bahwa tidak ada niat di kalangan tentara untuk merebut kekuasaan atau menegakkan kediktatoran militer—kendati tentara memang memiliki kepentingan dan keperluan, karena perannya yang ganda, dalam lingkup sosial dan politis, dwifungsi "tidak akan digunakan untuk memonopoli kekuasaan." "ABRI telah menjadi pelopor Orde Baru dan kini harus menjadi pelopor orde pembangunan," komentarnya pada upacara peringatan hari jadi ke-17 RPKAD pada 1969.[28]

Apa yang diinginkan Suharto, sudah tentu, adalah stabilitas politik yang menurut dia adalah prakondisi bagi kinerja perekonomian. ABRI adalah kunci bagi stabilitas tersebut. "Sejarah," ujarnya pada April 1969, "telah menempatkan Angkatan Bersenjata Indonesia sebagai stabilisator dalam mewujudkan perjuangan bangsa,"[29] komentar yang tampaknya meramalkan peran tetap seperti ini di masa yang akan datang. Dan memang, pada tahun berikutnya, ia menegaskan bahwa "dwifungsi ABRI adalah salahsatu segi dari pelaksanaan demokrasi berdasarkan Pancasila dan sistim ketatanegaraan bangsa Indonesia."[30]

Dalam sebuah kunjungan ke Lampung, pada Juni 1968, Suharto mendorong rakyat "untuk meninggalkan pertentangan-pertentangan politik dan agama, sehingga dapat dicapai stabilitas nasional yang merupakan syarat mutlak bagi pelaksanaan pembangunan."[31] Dalam pidato yang membahas banyak topik di depan MPR pada malam peringatan Hari Kemerdekaan 1968—yang merupakan pidato pertamanya sebagai presiden penuh Republik—ia menekankan bahwa pembangunan ("perjoangan pembebasan Rakyat dari kemelaratan")[32] dilandaskan pada stabilitas, serta bahwa stabilitas harus didasarkan pada kesetiaan kokoh terhadap semangat UUD 1945 yang menurut pemahamannya tidak dapat diubah.

Pembangunan yang berhasil, ia mengingatkan 200.000 orang yang datang menyambutnya di Medan pada 1 September, dilandaskan dan didahului oleh terciptanya stabilitas politik. Perjuangan dan slogan-slogan ideologis yang menjadi ciri Orde Lama harus dibiarkan menjadi bagian dari masa lalu saja. Pertentangan-pertentangan ideologis ini "tidak ada gunanya dan hanya menimbulkan kekacauan saja;" dan memang, "masalah ideologi bukanpersoalan dan tidak boleh dipersoalkan lagi karena ideologi sudah jelas Pancasila." Ideologi-ideologi yang sempit, menurut dia, telah "menjadi sumber keruncing dan pertentangan pada masa-masa yang lampau."[33]

Ideologi Suharto, memang, kelak menjadi ideologi pembangunan, dengan keamanan menjadi kondisi yang disyaratkan sekaligus hasil yang diharapkan. Pembangunan, dalam berbagai aspeknya, merupakan tema yang sering diulang-ulang—hingga jadi menjemukan—dalam pidato yang tak terhitung banyaknya yang ia bacakan, dari hari ke hari, selama masa awal kepresidenannya. Malah, hampir tidak ada pidato di mana kata 'pembangunan' ini absen. Di tangan Suharto, tugas pembangunan memperoleh tambahan dimensi yang heroik. Pidatonya pada peringatan Hari Pahlawan pada 1968 berpusat di seputar tema bahwa para pahlawan dibutuhkan "bukan hanya dalam perang kemerdekaan tetapi juga di bidang pembangunan." Perjuangan demi pembangunan, ujarnya, merupakan "perjuangan memberi isi" pada kemerdekaan yang sudah sejak lama dicapai. Namun demikian, pembangunan, bergantung pada sejumlah faktor:

> 1) stabilitas politik yang semakin kuat, 2) keadaan ekonomi yang makin mantap dan pembangunan yang terus meluas, 3) aparatur negara yang makin tertib dan lebih mampu melaksanakan tugas-tugas rutin maupun pembangunan, 4) kekompakan angkatan bersenjata yang makin mendalam, dan kemampuannya yang tetap terpilihara untuk menjamin keamanan, 5) rakyat yang makin gandrung kepada pembangunan, dan 6) kepercayaan luar negeri yang semakin besar .[34]

Namun, masa lalu tidak pernah dapat dilupakan, dan Suharto cepat bergerak guna memastikan bahwa, bila dibentuk dengan cara yang benar, masa lalu kelak dapat memainkan fungsi ideologisnya. Upacara mengenang aksi kudeta pada 1968 yang diselenggarakan di Lubang Buaya dihadiri oleh semua pejabat tinggi negara, yang "berkumpul ke sana untuk memperingatinya". Usai upacara, termasuk pembacaan Pancasila oleh Nasution, Suharto mempersembahkan tahap pertama pembangunan monumen besar itu kepada "tujuh pahlawan revolusi" yang tewas dalam percobaan kudeta tersebut. Selain itu, ia juga berupaya menampilkan, dan menonjolkan, masa lalu lainnya di mana ia berperan. Pada 1 Maret 1973, ia meresmikan monumen yang dibangun di pusat kota Yogyakarta untuk mengenang serangan umum 1 Maret 1949.[35]

ANTIKOMUNISME

Akibat wajar dari kepedulian Suharto terhadap konservatisme ekstrem adalah mempertahankan oposisi sengit rezimnya terhadap komunisme—yang diperkuat oleh adanya bukti kebangkitan kembali militansi PKI. Pada awal 1967, Suharto menegaskan bahwa sisa-sisa PKI masih berniat melancarkan perebutan kekuasaan, serta bahwa kaum komunis "akan selalu mempergunakan setiap keadaan ... untuk mencapai tujuannya," termasuk menyusup ke dalam organisasi-organisasi antikomunis.[36] Peringatan akan bahaya kebangkitan kembali komunis ini muncul lagi dari waktu ke waktu. Dalam pikiran Suharto, ada tiga cara menyerang PKI: penghancuran sisa-sisa PKI secara fisik, semangat persatuan nasional, serta peningkatan taraf hidup. Laporan-laporan tentang sisa-sisa PKI yang berniat melancarkan kekacauan muncul hampir secara berkala.[37] Seperti yang telah saya kemukakan, kebangkitan kembali komunis di Blitar selatan pada pertengahan tahun 1968 dengan cepat dipadamkan oleh Angkatan Darat, sementara kegiatan gerilya di Kalimantan Barat teratasi menjelang akhir tahun itu.

Sementara itu, pembersihan aparat pemerintahan pun berlanjut; di Jawa Timur saja, hampir 9.000 pegawai diberhentikan antara Maret dan awal Juni karena dugaan terlibat dalam Gerakan 30 September. Pada saat yang sama, ABRI dibersihkan dari mereka yang diduga simpatisan PKI atau rezim lama. Laporan-laporan tentang pembunuhan massal atas para narapidana yang ditempatkan dalam kamp-kamp penahanan juga muncul.[38] Mungkin, bukan kebetulan pula bahwa para pemimpin PKI seperti Nyono, Sudisman, dan Wiryomartono dihukum mati pada Oktober 1968.

Kendati gerakan komunis praktis dihancurkan menjelang akhir 1968, momok PKI terus dibangkit-bangkitkan sesudahnya sebagai barang jualan Orde Baru. Pada 11 Maret 1969, misalnya, Suharto, dengan mengacu pada pembubaran PKI tiga tahun sebelumnya, berkomentar bahwa "bila kita mempelajari doktrin dan taktik-taktik PKI ... (kita akan menyadari) bahwa partai itu akan terus melancarkan gerakan-gerakan ilegalnya untuk berusaha muncul kembali." Pada akhir 1969 dan awal 1970, Suharto berbicara tentang perlunya untuk terus menindak sisa-sisa Gerakan 30 September yang masih ada di tengah-tengah masyarakat.[39] Tujuan PKI pada 1965 sama dengan ketika pada 1948, komentar Suharto pada peringatan tahun kelima Supersemar pada 1971: "merobah Panca Sila dan Undang-undang Dasar 1945, untuk diganti dengan sistim yang lain."[40]

Pada Agustus 1971, ia memperingatkan bahwa, kendati kekuatan fisik PKI mungkin sudah hancur, "mereka tetap berusaha mengadakan kegiatan-kegiatan sabotase, subversif, dan bentuk-bentuk lainnya." Sekembalinya dari kunjungan kenegaraan ke Australia dan Selandia Baru pada awal 1972, ia mencermati bahwa demonstrasi-demonstrasi kecil yang ia alami merupakan bukti dari upaya komunisme internasional untuk menghidupkan kembali PKI.[41] Pengulangan yang tak henti-hentinya akan "ancaman" PKI itu amat berjasa dalam membenarkan taktik-taktik yang semakin agresif dan otoriter dari unsur-unsur pemerintah, dalam membatasi

kebebasan, menekan para politisi, dan mentransformasi politik sesuai dengan keinginan mereka.

Perlakuan pemerintah Suharto atas mereka yang terkena penahanan sesudah kalahnya Gerakan 30 September merupakan salah satu contoh pemikiran ini. Mereka yang berpihak pada kekuatan yang berada di balik kudeta 1965 itu tidak boleh diberi hati. Brian May melaporkan perbincangan dengan Suharto mengenai pengarang terkemuka Pramudya Ananta Tur:

> Dalam sebuah wawancara pada November 1972, saya bertanya kepada Suharto apakah menurut dia Pramoedya benar tahu tentang konspirasi (G-30-S) tersebut. "Tidak," jawabnya sambil tersenyum; tapi Pramoedya, lanjutnya, adalah anggota Lekra yang dibentuk oleh PKI sebagai bagian dari rencana mereka untuk "mengonsolidasi kekuatan mereka dan menggulingkan pemerintah." Seandainya kudetanya berhasil, orang-orang seperti Pramoedya pasti akan menyetujuinya, ujarnya. Suharto kemudian tidak memberikan komentar lagi; tampaknya, menurut dia, hal itu sudah cukup menjadi pembenaran atas pengasingan dan penghancuran mental para seniman dan akademisi di Pulau Buru.[42]

MENGAMANKAN DAN MENGUASAI NEGARA

Pola umum taktik-taktik politik Suharto cukup jelas. Di satu sisi, ia sangat sadar akan perlunya melakukan kompromi dan mencapai konsensus untuk memastikan bahwa ia tidak berlebih-lebihan dalam memberi landasan yang mungkin dapat meretakkan kekuasaannya yang belum teruji yang bagaimanapun juga, didasarkan pada koalisi yang masih goyah dengan para tentara pendukungnya. Di sisi lain, menilik sifat pribadi dan pengalamannya, ia waspada terhadap potensi merebaknya kerusuhan setempat serta perpecahan, dan sejak awal masa pemerintahannya, ia menekankan pentingnya pengembangan pendekatan keamanan/intelijen bagi kekuasaan pemerintah.

Opsus (Operasi Khusus)-nya Ali Murtopo merupakan salah satu cabang pendekatan ini, namun wujud utamanya muncul dalam pengembangan Kopkamtib (Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban). Lembaga yang pada awalnya dibentuk dengan mandat untuk mengamankan negara terhadap ancaman komunis ini, tak diragukan lagi, atas dorongan Suharto, dan mungkin berbarengan dengan langkahnya untuk memusatkan kekuatan ABRI, semakin mewujudkan dirinya sebagai alat untuk menindas kalangan mana pun yang diduga mengancam negara. Pada 1969, ruang gerak otoritas lembaga ini diperluas hingga meliputi berbagai jenis ekstremisme serta perilaku subversif, serta untuk memastikan keamanan dan integritas aparat pemerintahan. Suharto, yang sudah melepaskan diri dari pengawasan operasional langsung atas ABRI dengan menciptakan jabatan wakil panglima, dan diisi oleh Panggabean, mengalihkan, dengan cara serupa, pengendalian operasional Kopkamtib kepada wakil panglima, Sumitro.

Kopkamtib bukanlah, seperti yang telah saya kemukakan, kekuatan yang independen. Sebaliknya, lembaga ini merupakan seperangkat otoritas baru yang diberikan kepada para panglima tentara di berbagai tingkat hierarki militer untuk mengambil langkah terhadap apa yang dipandang sebagai ancaman atas keamanan. Di bawah arahan dan kepiawaian Sumitro dalam berorganisasi, reputasi Kopkamtib sebagai lembaga yang ditakuti pun semakin kuat terasa. Wewenang yang dimilikinya juga luas sekali serta semena-mena, termasuk wewenang untuk membreidel atau melarang terbitnya surat kabar dan menangkap para demonstran; Kopkamtib, dengan demikian, menjadi "alat utama dalam menegakkan wewenang pemerintah."[43] Dalam melaksanakan tugasnya, Kopkamtib dibantu oleh Bakin (Badan Koordinasi Intelijen Negara), yang mulai dari Januari 1970 dikepalai oleh Sutopo Yuwono dan bertanggungjawab atas intelijen di luar militer. Fenomena ini mendorong seorang peneliti, menulis pada awal tahun-tahun 1970-an, untuk berkomentar bahwa "perhatian yang menggebu-gebu

dan gigih terhadap masalah keamanan sejak 1965 tampaknya luar biasa sengit." [44]

Di luar pemerintahan pusat, dominasi militer atas pemerintahan daerah pun berjalan seirama. Menjelang 1969, jumlah para perwira militer yang menjabat sebagai bupati dan walikota di seluruh Indonesia mencapai lebih dari separuh. Pada awal 1971, lebih dari 70 persen para gubernur dari 26 propinsi di Indonesia memiliki latar belakang militer, dan persentasenya pun bertambah tinggi sesudah itu.

Ini bukanlah menyangkut masalah keamanan dan pengendalian, melainkan cara memberi akses ke bermacam-macam penghasilan tambahan yang ada dalam pemerintahan kepada pihak tentara, termasuk pengangkatan, lisensi, dan kontrak-kontrak. "Penghijauan" daerah-daerah pun disempurnakan dengan dimantapkannya kegiatan-kegiatan "kekaryaan" lama. Pada awal 1969, Angkatan Darat mengumumkan bahwa sepertiga pasukannya akan dikerahkan ke daerah-daerah pedesaan untuk membantu masyarakat-masyarakat pertanian. Otonomi daerah, kendati terkadang dibahas, ternyata tak banyak artinya: "pemberian otonomi daerah," komentar Suharto, "akan disesuaikan dengan kemampuan daerah masih-masing,dan daerah yang tak memumngkinkan menyelenggarakan rumahtangga sendiri maka secara tehnis sulit untuk diberikan otonomi."[45]

IRIAN BARAT: "MENENTUKAN NASIB-SENDIRI"

Mengamankan negara juga berarti merampungkan formalitas pengintegrasian Iran Barat ke dalam negara Indonesia. Ketentuan-ketentuan dari perjanjian 1962 mengharuskan Indonesia menyelenggarakan plebisit sebelum akhir 1969 guna menentukan pendapat rakyat tentang integrasi. Dengan memahami, dan tanpa kecuali, pendapat elite politik Indonesia bahwa Irian Barat merupakan bagian integral dari negara yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 ini, serta melihat kurang pedulinya masyarakat

internasional pada status wilayah tersebut, masalah sebenarnya bukan terletak pada apa kehendak rakyat Irian, melainkan sebaliknya, bagaimana memastikan agar mereka memberi respons dengan cara yang tepat. Memang, Sukarno pada 1965 nyaris mengeluarkan ancaman tidak akan menggubris sama sekali proses konsultatif macam apa pun karena, menurut dia, rakyat Irian jelas menyetujui integrasi.

Suharto, yang sadar akan perlunya kebaikan hati pihak Barat, tidak memiliki opsi tersebut—pada 1967, ia menegaskan bahwa rakyat Irian akan diberi hak plebisit . Namun, sebagai panglima operasi Mandala pada 1962, ia menganut pendapat yang bahkan lebih kuat ketimbang pendapat sebagian besar rekannya bahwa Irian Barat adalah bagian yang tak dapat dipisahkan dari Republik Indonesia serta bahwa setiap gagasan tentang kemerdekaannya benar-benar tidak akan ditoleransi. Suara yang menyetujui separatisme, bagaimana pun juga, akan merupakan bencana politik baginya.

Setelah menolak permohonan atas otonomi yang lebih besar dari sebuah delegasi Irian Barat pada 1966—ia menyalahkan pemerintah Belanda yang menelantarkan keadaan mereka—dan setelah berbicara pada 1968 tentang plebisit yang hanya sebagai formalitas saja, pada 1969 ia merasa perlu menegaskan bahwa keputusan untuk menyetujui pemisahan akan sama artinya dengan pengkhianatan.[46] Oleh karena itu, ia menginstruksikan Ali Murtopo untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan bahwa rakyat Irian memberikan suara yang menyetujui integrasi mereka dengan Indonesia.

Cara-cara yang digunakan Ali serupa dengan cara-cara yang kemudian ia gunakan pada pemilihan umum 1971: perpaduan antara kebijakan untuk menakut-nakuti serta mengintimidasi (termasuk oleh Suharto sendiri dalam pertemuannya dengan para kepala suku Irian di Jakarta), dan membujuk serta menyuap. Cara yang disebut terakhir ini dilakukan dengan cara mendatangkan barang-barang konsumsi serta hadiah dalam jumlah amat besar

ke Irian Barat dan membagi-bagikannya kepada para kepala suku setempat serta para wakil rakyat; selain itu, ada juga upaya-upaya untuk melakukan konversi politik yang dijalankan oleh kader-kader asuhan Fr. Beek. Cara yang disebut pertama tampak jelas dilihat dari kuatnya kehadiran tentara, di bawah pimpinan Sarwo Edhie yang banyak dikagumi orang serta dapat diandalkan itu, yang tidak mengizinkan terungkapnya keinginan apa pun untuk merdeka, serta dengan leluasa menahan mereka yang berani menyuarakan pendapat-pendapat seperti itu.

Pada akhirnya, Indonesia memutuskan bahwa "penentuan nasib sendiri" akan diselenggarakan oleh sidang-sidang konsultatif khusus yang akan mewakili aspirasi sejati rakyat. Ali Murtopo memastikan agar sidang-sidang ini cukup banyak dihadiri oleh orang-orang Irian yang prointegrasi. Pada Agustus, sidang-sidang ini menghasilkan suara setuju yang diharapkan, dan Suharto secara resmi menetapkan Irian Barat sebagai 'propinsi otonom' Indonesia pada 16 September 1969. Kendati ada protes-protes yang disampaikan oleh wakil PBB, F. Ortiz Sanz, tentang pembatasan-pembatasan yang diberlakukan dalam pelaksanaan hak-hak rakyat, terutama masalah kebebasan dalam mengungkapkan pendapat, PBB, pada 19 November 'mencatat' hasilnya tanpa mengajukan perbedaan, yang merupakan langkah praktis mengesahkan 'plebisit' serta memperluas pengakuan formal kedaulatan Indonesia atas wilayah tersebut. Mengenai perannya sendiri, Suharto pada Oktober 1969 mengumumkan rencana untuk membantu pengembangan Irian dengan menitipkan 200.000 anak-anak Irian pada keluarga-keluarga Indonesia.[47]

MENINGKATNYA KEPELIKAN

Mencuatnya Suharto ke jabatan kepresidenan, situasi politik dengan potensi eksplosif yang mendahuluinya, serta upaya-upaya sesudahnya untuk menegaskan kekuasaan politik yang luas, praktis mengakhiri sisa-sisa dukungan antusias mahasiswa dan kalangan

sipil reformis terhadap rezim yang baru terkonsolidasi tersebut. Suharto sendiri menegaskan bahwa para mahasiswa harus menyesuaikan diri dengan realitas-realitas baru ini. Selain itu, ada kesan bahwa gerakan mahasiswa yang mulai retak itu, yang sebelumnya tergalang sesaat hanya berkat keinginan mereka untuk membebaskan negeri dari Sukarno dan para pendukungnya, semakin kehilangan daya dan sedang mencari-cari agenda baru untuk mempertahankan momentumnya yang turun. Selain itu, beberapa dari tokoh-tokoh utama mahasiswa menggabungkan diri dengan rezim, dengan memainkan peran "fungsional" di dalam lembaga-lembaga seperti DPR.

Namun, para mahasiswa yang menolak untuk diredam, mulai melancarkan kecaman-kecaman mereka terhadap rezim yang ikut mereka bantu kelahirannya ini, dengan menjadikan tokoh-tokoh senior tertentu di dalam Orde Baru yang mereka anggap korup sebagai sasarannya. Tanggapan Suharto sejalan dengan meningkatnya kepekaan terhadap kecaman serta sikap-sikap rezimnya yang semakin otoriter, kendati sesekali ada pernyataan tentang kepekaan pemerintahannya terhadap kritik-kritik yang "membangun".

Dalam pertemuannya dengan para pemimpin KAPPI pada Januari 1969, ia mengatakan bahwa "demonstrasi tidak lagi sesuai dengan keadaan sekarang ini, sebab dalam masa pembangunan, cara-cara seperti itu mengganggu ketenteraman dan ketenangan serta usaha stabilisasi politik yang telah dirintis."[48] Ketika, pada Agustus, sebuah majalah menegaskan bahwa Suharto telah memerintahkan "de-Siliwangisasi" Angkatan Bersenjata, ia menyebut laporan tersebut "fitnah", seraya menambahkan bahwa ia bermaksud memerintahkan Kejaksaan Agung untuk memulai penyelidikan atas mingguan tersebut.[49]

Sejalan dengan munculnya gejala kekakuan dan kepercayaan diri politiknya yang semakin meningkat adalah keengganannya yang semakin kentara dalam menanggapi pertanyaan para wartawan. Namun, sudah tentu ada pengecualian. Pada Februari 1969,

ia menerima 55 wartawan AS, yang datang berkunjung atas bantuan kementerian penerangan, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Namun, keterlibatannya secara langsung dengan pers pun cenderung lebih erat ditentukan dan dibatasi pada peristiwa-peristiwa yang ia pandang dapat mendatangkan keuntungan politik yang jelas dengan cara mengakomodasi media. Maka, pada 1 April, hari pencanangan Repelita, ia menggunakan "*personal approach*", dengan menerima wartawan-wartawan Jakarta di Istana Bogor agar dapat melibatkan media dengan lebih baik dalam tugas menyukseskan Repelita.[50] Pertemuannya dengan para wartawan, dalam kunjungannya ke Jerman Barat pada Agustus 1970, tampaknya dimaksudkan untuk mencairkan kesannya di kalangan media sebagai orang kuat tentara.

AKHIR SUKARNO YANG MENGENASKAN

Sementara itu, Sukarno makin sakit-sakitan. Pada Mei 1968, Sukarno diizinkan sebentar untuk meninggalkan kediamannya di Bogor guna menghadiri pernikahan putrinya, Megawati, di Jakarta. Sukarno pindah, seizin Suharto, pada awal 1968 dari paviliun Istana Bogor ke rumahnya di Batutulis, dekat Bogor, atas pertimbangan kondisi kesehatannya. Selanjutnya, pada awal 1969 ia dipindahkan ke Jakarta, ke Wisma Yaso di Jalan Gatot Subroto. Selama dalam masa tahanan yang pada praktiknya adalah tahanan rumah, Sukarno dipaksa oleh para agen Kopkamtib—tampaknya atas perintah Suharto, dalam rangka mengantisipasi kemungkinan untuk lebih lanjut mengajukan mantan presiden itu ke pengadilan—untuk menjalani interogasi mengenai hubungannya dengan PKI. Namun, ketika Suharto mendengar tentang seriusnya sakit Sukarno, ia memerintahkan agar interogasi-interogasi tersebut diakhiri. Pada 15 Juni 1970, Sukarno dibawa ke rumah sakit Gatot Subroto, dan meninggal di sana pada 21 Juni pukul 7 pagi, hampir seminggu sesudah dirawat. Ketika mendengar beritanya, Suharto "cepat ... menjenguknya ke rumah sakit."[51] Namun,

pikirannya mungkin sudah terpusat pada dampak-dampak politis kematian mantan presiden tersebut.

Kematian Sukarno sekali lagi menggambarkan perasaan mendua Suharto terhadap mantan presidennya itu. Ia menyelenggarakan pemakaman kenegaraan bagi Sukarno, namun menolak untuk meluluskan permintaan mantan presiden itu, serta pihak keluarganya, agar "membiarkannya beristirahat di bawah pohon yang rimbun, dikelilingi oleh pemandangan indah, di tepi sungai dengan udara segar ... aku ingin rumah terakhirku adalah wilayah Bandung Priangan yang subur, bergunung, dan sejuk itu."[52] Daerah yang diinginkan Soekarno itu terlalu dekat dengan ibukota, dan di masa mendatang mungkin akan sangat mudah mengundang banyak pengunjung yang bersimpati, bahkan mungkin berkembang menjadi monumen perlawanan terhadap Orde Baru. Oleh karena itu, Suharto tidak menghiraukan permohonan dari kerabat Sukarno dan memerintahkan agar jasad mantan presiden itu dikuburkan saja di kota kecil di Jawa Timur, Blitar, dekat makam ibunya. Suharto sendiri tidak menghadiri upacara pemakaman Sukarno pada 22 Juni.

KEBIJAKAN LUAR NEGERI

Begitu menjabat sebagai presiden, kentara sekali bahwa perhatian Suharto dalam hal kebijakan luar negeri relatif kurang. Tak seperti pendahulunya, Sukarno, ia memusatkan perhatian pada masalah-masalah dalam negeri serta kerawanan nasional yang menyertainya. Di arena kebijakan luar negeri, ia hanya melakukan apa yang harus dilakukannya untuk memperoleh kerja sama dan keamanan regional, kendati sejak awal ia menunjuk pada kesenjangan ekonomi antara negara-negara kaya dan miskin. Prakarsa-prakarsa kebijakan luar negeri yang lebih detail ia serahkan kepada Adam Malik, yang dengan piawai menanganinya sekaligus menepis aspirasi orang-orang Opsus-nya Ali Murtopo, juga para jenderal lainnya, untuk membangun pakta pertahanan yang erat bersama

AS serta mendesak agar Asean menjadi pakta militer saja. Kendati ada ketegangan-ketegangan sejenis, seperti yang muncul pada 1968 karena sikap ngotot Singapura dalam menghadapi permohonan pribadi Suharto yang memintakan ampunan (yang disampaikan pada pihak Singapura oleh utusan khususnya, Cokropranolo) bagi dua marinir Indonesia yang ditangkap semasa era Konfrontasi dan kemudian dijatuhi hukuman gantung, Suharto melihat solidaritas Asean yang lebih berkembang dan kuat sebagai sarana untuk melumpuhkan upaya-upaya luar dalam mencampuri urusan kawasan tersebut.

Suharto melakukan lawatan kepresidenannya untuk kali kedua ke luar negeri pada Maret 1970, kunjungan selama seminggu ke Malaysia, dan merupakan kunjungan kali pertama yang pernah dilakukan oleh presiden Indonesia. Namun, ia tetap tak terlalu bersemangat mengenai pemulihan hubungan dengan Cina. "Indonesia tidak akan mudah melupakan, dan akan selalu menjadikan pelajaran, bantuan Peking kepada PKI yang melancarkan kudeta terhadap pemerintah yang sah," komentarnya pada Oktober 1972, kendati ia mengakui beberapa bulan sesudahnya bahwa ia sama sekali tidak mengesampingkan kemungkinan tersebut.[53] Hubungan dengan kekuatan besar komunis lainnya, Uni Soviet, yang merosot drastis menyusul kudeta tersebut, kemudian pulih kembali hingga tiba pada kesepakatan tentang pembayaran kembali utang Indonesia yang akhirnya diselesaikan pada 1970.

Dan, Suharto semakin memperoleh pujian Barat atas upaya-upayanya dalam mengembangkan perekonomian serta stabilitas politik dalam negeri. Dukungan terbesar bagi kebijakan-kebijakan Suharto adalah kunjungan Presiden A.S. Nixon ke Jakarta pada Juli 1969; kunjungan ini adalah kunjungan kali pertama presiden AS ke Indonesia. Retorika Suharto mencerminkan kepentingan sejatinya yang terpusat kuat pada keadaan dalam negeri: "untuk dapat memberikan sumbangan yang efktif terhadap usaha-usaha perdamaian dunia, maka RI harus kuat di dalam negeri." Tak sampai dua minggu kemudian ia bertutur tentang jawabannya

kepada Nixon ketika ditanya tentang musuh terbesar Indonesia; ia mengatakan bahwa "musuh Indonesia paling besar adalah kalau Pelita gagal ... kalau Pelita gagal, maka rakyat tidak akan percaya lagi kepada pemerintah dengan segala rencana pembangunannya dan tidak percaya lagi pada dirinya sendiri." Ini adalah sikap serupa dalam menangani apa yang dipandangnya sebagai prioritas utama Indonesia, yang membuatnya memutuskan untuk tidak menghadiri perayaan 25 tahun PBB; ia terlalu terobsesi "dengan berbagai kesibukan Presiden di dalam negeri". Namun demikian, Suharto senang menerima para pejabat tinggi asing; pertemuan-pertemuan ini membuat ia senang terutama bila kehadiran mereka berarti petunjuk adanya dukungan terhadap pemerintahannya; begitulah misalnya pada Maret 1970 ia menerima Pangeran Bernhard, "anggota Kerajaan Belanda pertama yang mengunjungi Indonesia setelah 25 tahun kita merdeka."[54]

Kecenderungan Suharto untuk berorientasi ke dalam ketimbang ke luar bertambah kuat lagi akibat pengalaman pertamanya berhubungan dengan Gerakan Non-Blok di Lusaka pada September 1970, yang tidak membuat ia terkesan dan malah membuat ia jera. Sepertinya bagi Suharto, alih-alih mewujudkan asas "bebas dan aktif" yang menjadi ciri kebijakan luar negeri Indonesia, sebagian besar anggota gerakan ini malah sangat anti-Barat dan praktis memihak salah satu dari blok-blok komunis. Karena pelarangannya atas partai komunis di dalam negeri, "mereka tidak menyukai kehadiran saya di sana."[55] Sebagai akibat dari pengalaman yang tidak menyenangkan ini—yang diabadikan dengan sempurna dalam foto yang memperlihatkan wajah Suharto yang tampak bosan dan murung pada salah satu sidang konferensi tersebut—ia sempat lama tidak memberi perhatian pada Gerakan Non-Blok. Dan kalaupun ia melakukan perjalanan ke luar negeri, yang tampaknya membuat ia paling bergairah adalah adanya peluang untuk menjajaki berbagai contoh model pembangunan ekonomi serta untuk menimbang-nimbang kemungkinan penerapannya di Indonesia. Sehubungan dengan hal ini, di awal tahun

1970-an Suharto menunjukkan minat besar pada teknologi. Pada 1972 di Swiss, perpaduan antara teknologi industri dan manajemen modern ala Swiss "mendorongnya untuk memandang negara itu sebagai sumber inspirasi untuk cita-cita perdamaian dan pembangunan."[56]

MEREORGANISASI ANGKATAN BERSENJATA

Pada 1969, kekuasaan Suharto atas Angkatan Darat sudah tak tersaingi. Ini adalah hasil dari kinerja politik serta langkah-langkah klinis yang dilakukannya melalui pengangkatan panglima serta pembagi-bagian jabatan nonmiliter selama beberapa tahun sebelumnya. Angkatan Udara Republik Indonesia mengalami pembersihan cermat sesudah aksi kudeta tersebut, namun Angkatan Laut dan Kepolisian masih memiliki otonomi yang cukup besar seperti yang mereka miliki selama tahun-tahun pemerintahan Sukarno, meski ada penghapusan jabatan menteri angkatan yang berdiri sendiri pada Agustus 1967. Angkatan Kepolisian mengalami proses pembersihan secara bertahap yang mencapai puncaknya pada 1968 dengan digantinya panglima polisi, Sucipto Yudodiharjo, oleh wakil pertamanya, Hugeng Imam Santoso, sosok yang berhaluan reformis dan umumnya dipandang terbiasa dengan pemikiran ala PSI. Angkatan Laut ternyata lebih sulit untuk dibenahi, karena kekuatan marinir yang dimilikinya telah dihancurkan dan sempat menunjukkan tanda-tanda perlawanan pada upaya-upaya pembersihan sebelumnya. Namun, sekali lagi, Suhartolah yang menang dalam penataan ulang struktur komando AL dengan menawarkan tambahan penghasilan lewat berbagai posisi duta besar serta memberlakukan tahanan rumah terhadap perwira-perwira yang tidak mau menyerah. Kawan lamanya dari masa-masa pembebasan Irian Barat, Laksamana Sudomo, ditempatkan pada pucuk pimpinan Angkatan Laut di akhir 1969. Seperti juga pelindungnya, Sudomo adalah siswa pasukan parakomando berusia 50-an, dan ia melakukan tugas yang diharapkan Suharto darinya: "menurut penuturannya

sendiri, Sudomo membersihkan lebih dari 1.500 perwira Angkatan Laut antara 1969 dan 1973."[57]

Pada Oktober dan November 1969, tampaknya sesudah lebih dari dua tahun menimbang-nimbang dan membuat perencanaan, Suharto meneruskan penyatuan komando-komando yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri itu, dengan mengurangi status para panglima angkatan menjadi kepala staf di bawah pengawasannya yang menyeluruh sebagai panglima Angkatan Bersenjata. Enam komando wilayah pertahanan (Kowilhan) kemudian diciptakan guna mengintegrasikan kegiatan-kegiatan angkatan bersenjata dari tingkat staf komando ke bawah, sementara wewenang nonmiliter (artinya, politis) maupun lingkup kegiatan yang sebelumnya dimiliki oleh para panglima angkatan dan Kodam selanjutnya dihapuskan dan dialihkan ke Kementerian Pertahanan—artinya berada di bawah Suharto sendiri.

Dampak dari langkah-langkah ini adalah terpusatnya struktur komando secara sempurna di tangan Presiden, dan bukan di tangan panglima angkatan atau panglima teritorial di samping juga penyusutan yang ada hubungannya dengan kekuasaan independen Angkatan Darat; "ia tidak lagi bisa mengawasi dari dekat," seorang pengulas berkomentar, "dan karenanya, ia harus mencegah Angkatan Darat agar tidak menjadi senjata yang terlalu kuat di tangan orang lain."[58] Dengan rampungnya proses pemusatan tersebut, "praktis tak ada lagi oposisi yang tersisa dalam angkatan bersenjata;"[59] angkatan bersenjata, akhirnya praktis tunduk pada rezim, dan "era *warlordism* panglima-panglima perang pun dengan demikian berakhir."[60]

MEREORGANISASI PARTAI-PARTAI

Keputusan Suharto untuk mengizinkan partai-partai politik bertarung dalam pemilihan umum yang ditargetkan terselenggara pada 1971 adalah pengakuan atas akar-akar kokoh yang dimiliki partai dalam masyarakat serta ketakutannya bahwa pengingkaran terhadap

kehidupan berpartai akan dapat mengundang kerusuhan sosial yang serius. Namun, keputusan ini melahirkan serangkaian masalah yang ia selesaikan dengan sabar dan sistematis, tanggap terhadap para pelaku lainnya beserta kemungkinan-kemungkinan keterbatasan mereka; ia selalu siap membahas permasalahan namun tetap bersikap analitis jika sudah mempertimbangkan semuanya dan memutuskan untuk bertindak.

Seperti yang telah kita lihat, Suharto sangat menyadari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh reformasi radikal atas sendi-sendi masyarakat. Sejalan dengan ini, ia menentang gagasan radikalis-radikalis Orde Baru, terlepas dari persamaan intelektual tertentu dengan sasaran-sasaran mereka. Ketika Dharsono secara paksa menawarkan modifikasi atas gagasan-gagasannya—di mana partai-partai dibentuk menjadi dua kelompok program—ke beberapa anggota DPRD Jawa Barat, Suharto akhirnya mengambil langkah untuk melumpuhkan gerakan radikal ini, dengan menggali kelemahan gagasan tersebut untuk membangun front yang lebih besar dan merakyat.

Kemal Idris kemudian dipindahkan ke Indonesia Timur, sementara Dharsono dikeluarkan dari panggung politik dengan cara diberi jabatan di kementerian luar negeri dan selanjutnya diangkat sebagai duta besar RI untuk Thailand. Suharto semakin yakin dengan langkahnya meredam mereka berdasarkan kenyataan bahwa serangan-serangan blak-blakan pasangan ini terhadap para jenderal "berduit" yang begitu dekat dengan Suharto, terutama Ibnu Sutowo, selain gigih dan tak kenal kompriminya permainan politik mereka, tidak juga membuat para pemimpin angkatan darat lainnya tertarik—walau secara umum bersimpati dengan gagasan-gagasan kedua orang ini.

Suharto kemudian mengambil keputusan—berdasarkan kekhawatiran bahwa penundaan lebih lanjut akan dapat memperlemah wewenang maupun keabsahannya, selain juga peran dwifungsi ABRI, serta meski berlawanan dengan masukan dari para

penasihatnya—untuk tetap menyelenggarakan pemilihan umum dalam kurun waktu yang ditentukan oleh MPRS. Dengan melakukan serangkaian pertemuan dengan para pemimpin partai pada Oktober 1969, ia menegaskan tekadnya untuk tetap mematuhi batas waktu MPRS, sebuah contoh politik positif yang rapi yang meruntuhkan upaya partai-partai untuk mencuri peluang atas butir-butir RUU pemilihan umum tersebut—terutama, hak pengangkatan para wakil rakyat oleh Suharto. Para pemimpin partai tak lama kemudian membatalkan tuntutan-tuntutan mereka atas penyesuaian RUU elektoral tersebut. RUU tentang komposisi DPR baru yang akhirnya disepakati itu menetapkan bahwa 100 dari 460 kursi disisihkan bagi Angkatan Bersenjata. Pada 22 November, undang-undang itu disahkan oleh parlemen dan pemerintah mengumumkan bahwa pemilihan umum akan diselenggarakan pada 5 Juli 1971.

Suharto sendiri tidak memiliki wewenang atas partai-partai yang reputasinya semasa demokrasi liberal maupun demokrasi terpimpin, dalam pandangannya, diwarnai oleh kepentingan kelompok serta wawasan yang sempit, yang berbeda dengan agenda mengamankan kepentingan nasional yang ia dan para pendukungnya berikan sekarang. Namun demikian, ia menyatakan, pemerintah "selalu menjamin hak eksistensi partai-partai politik hanya karena mereka adalah bukti penting adanya demokrasi." Muslihatnya adalah "mencari bagaimana partai-partai politik sebagai wahana demokrasi dapat menunaikan tugasnya secara efektif,"[61] yang merupakan aturan Orde Baru dalam rangka menciptakan serangkaian mekanisme yang akan mencegah, atau setidaknya secara signifikan menghindari, pengaruh partai—khususnya yang memiliki akar-akar Orde Lama—baik di dalam DPR maupun MPR.

Sementara itu, Suharto sudah memiliki gambaran jelas akan hasil pemilihan umum: "Sasaran strategis yang harus dicapai sebagai hasil Pemilu adalah tetap: dipertahankannya Pancasila dan UUD 45, diperkuatnya stabilitas politik, tambahnya kegairahan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dan pelaksanaan

dwifungsi ABRI dengan lebih effektif sesuai dengan kebutuhan perjoangan bangsa."[62]

Mekanisme pertamanya adalah mengupayakan pembentukan partai dengan cara yang dapat diterima oleh anggota-anggotanya. Saya sudah kemukakan arah yang diambil Suharto pada April 1966, ketika kelompok Hardi/Hadisubeno merebut kekuasaan kepemimpinan PNI Ali Sastroamijoyo. Bahkan, meski sebagian dari para panglimanya, terutama Sarwo Edhie dan Juarsa, amat bersemangat dalam membabat PNI di wilayah-wilayah mereka, Suharto berhasil mengekang mereka agar menjaga kebijakannya untuk mempertahankan PNI yang dimurnikan sebagai komponen dari Orde Baru.

Ketika rencana-rencananya menjadi lebih sulit akibat wafatnya Osa Maliki—pemimpin PNI yang didukung tentara—secara tiba-tiba pada September 1969, Suharto menegaskan melalui Opsus-nya Ali Murtopo bahwa ia menghendaki Osa digantikan oleh Hadisubeno, teman lamanya dari masa-masa sebagai panglima Diponegoro di Semarang, dan bukan Hardi, yang santun, moderat, dan cenderung bersikap inklusif, serta diduga menganut paham-paham antimiliter dan mungkin terlalu dekat dengan nuansa-nuansa pemikiran PSI.

Hitung-hitungan Suharto dan Ali Murtopo tampaknya adalah bahwa Hadisubeno, meski menganut pandangan-pandangan yang pro-Sukarno, paling baik diposisikan untuk membangun kerangka pemahaman antara PNI dan rezim Suharto. Dalam upaya-upaya ini, pada kenyataannya Suharto dibantu oleh Opsus yang memberi dukungan keuangan yang cukup berarti bagi PNI. Terhadap rencana ini, ditambahkan pula tekanan yang cukup besar yang dilancarkan secara terang-terangan kepada para peserta kongres, dan disampaikan lewat para panglima tentara setempat sebelum kongres PNI di Semarang pada April 1970, serta oleh para agen Opsus itu sendiri pada saat berlangsungnya kongres. Para peserta kongres benar-benar dibuat sadar bahwa masa depan partai mereka bergantung pada keputusan tepat yang mereka ambil dalam memi-

lih pemimpin, dan mereka pun bertindak seperti yang diinstruksikan. Pilihan mereka dengan serta-merta mengembalikan PNI ke sosoknya yang khas Jawa dan Sukarnois.[63]

Upaya-upaya serupa pun dimulai dalam menata-ulang perpolitikan Islam. Pertama-tama, ada kebutuhan untuk memberi wahana politik bagi para pendukung partai Masyumi, yang dilarang pada 1960. Sebagai gantinya, Parmusi (Partai Muslim Indonesia) pun didirikan, dan diharapkan bisa menjadi wahana bagi aspirasi-aspirasi yang sudah mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan ini, yang semakin meningkat karena pendekatan sekuler Orde Baru terhadap politik—yang sudah tentu dimaksudkan sebagai cara untuk menahan dan menguasai, dan bukan untuk mengekspresikan kebebasan.

Langkah ini merupakan sebuah konsesi yang cukup berarti yang dilakukan Suharto yang banyak dikenal orang karena perlawanannya terhadap pemberontakan daerah 1958. Memang, pada awal 1967, ia menolak upaya-upaya untuk menghidupkan kembali Masyumi yang menurut dia, "belum mengutuk secara resmi perbuatan para anggotanya dalam mendukung PRRI (gerakan yang melawan pemerintah)." Dengan demikian, "faktor-faktor politis dan psikologis telah membuat angkatan bersenjata sampai pada kesimpulan bahwa angkatan bersenjata tidak dapat menerima rehabilitasi partai politik lama, Masyumi."[64] Namun, tak lama sesudah itu, Suharto—berupaya menyeimbangkan oposisi yang dalam berakar di kalangan militer dan partai-partai yang berbasis di Jawa terhadap munculnya kembali Masyumi dengan kebutuhan untuk menciptakan wahana guna menampung serta menyalurkan aspirasi politik ala-Masyumi dan bukan cuma memotongnya dan membiarkannya terkatung-katung—membuka jalan bagi terbentuknya partai baru. Sudah tentu, ia mengambil langkah-langkah untuk memastikan agar partai baru ini tidak memakai ideologi warisan Masyumi.

Pada pertemuan dengan utusan Parmusi di bulan Agustus 1968, ia menyerukan partai baru itu agar menjauhkan diri dari

ideologi lama dan menggantinya dengan politik yang berorientasikan program, berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Namun, ia berhati-hati sekali dalam memberi izin operasi bagi partai ini, sebelum ia merasa yakin dan puas bahwa kepemimpinan partai ini sudah cukup akomodatif terhadap Orde Baru.

Sebagai akibatnya, baru pada Februari 1968 partai baru ini memperoleh pengakuan resmi. Sesudah partai ini menunjukkan beberapa pendapat berbeda yang berkenaan dengan pemilihan kepemimpinan baru yang memiliki hubungan dekat dengan Masyumi lama pada penghujung 1968—pemerintah menolak mengakui dewan baru tersebut—Opsus-nya Ali Murtopo pun merekayasa perebutan kekuasaan yang menghasilkan pengukuhan kepemimpinan baru partai pada Oktober 1970. Reaksi balik yang dapat diduga atas ketidakjujuran ini kemudian mengundang campur tangan pemerintah.

Pada November, Suharto menempatkan salah satu menterinya, Mintareja, seorang Islamis yang memiliki sikap yang cenderung akomodatif, untuk menjabat sebagai ketua partai "untuk mengatasi perpecahan yang terjadi dalam partai tersebut,"[65] keputusan yang membuat partai jadi "berantakan total".[66] Parmusi pun menjadi milik Orde Baru, "dibentuk berdasarkan keputusan presiden, perubahan-perubahan kepemimpinan diganjal oposisi kepresidenan, reorganisasi eksekutif dipengaruhi oleh keputusan presiden."[67]

Sementara itu, partai terbesar ketiga, Nahdlatul Ulama (NU), tidak dipandang sebagai ancaman potensial bagi Orde Baru, karena kebiasaan mereka selama ini untuk selalu mengakomodasi kecenderungan terbesar. Dengan demikian, pemerintah memandang tidak perlu mencampuri urusan internal partai, setidaknya hingga awal 1972 ketika pemimpin NU yang berpikiran independen dan mantan aktivis mahasiswa Subchan menjadi korban dari langkah Opsus yang melemparkannya dari peran kepemimpinan NU.

Mereorganisasi partai-partai dan menjinakkannya adalah tugas pertama Suharto. Tugasnya yang kedua dan secara keselu-

ruhan lebih sulit adalah menyusun wilayah pemilihan sedemikian rupa sehingga menghalangi partai-partai, meski sudah mengalami reorganisasi, untuk meraih jumlah suara dalam porsi besar pada pemilihan umum mendatang. "Penyelenggaraan pemilu itu," kata Suharto kelak, "harus dapat menjamin kemanfaatan tujuan pemilu itu sendiri ... untuk menciptakan stabilitas politik ... pelaksanaan pemilu harus dapat kita laksanakan demikian rupa sehingga dapat tetap menjamin dipertahankannya Pancasila daqn UUD '45, tidak akan mengganggu kelancaran pelaksanaan Repelita dan sekaligus untuk lebih memperkuat stabilitas politik."[68] Pemilihan umum yang hanya menghasilkan kembalinya fanatisme sempit ala Orde Lama, berikut masalah-masalah yang menyertainya, tidak akan mendatangkan manfaat. Tapi, bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan ini? Jenderal Sumitro kelak berkomentar bahwa "karena perekonomian, khususnya pengembangan perekonomian nasional, adalah kepedulian utama, kita berharap mengurangi jumlah para politisi, yaitu para lulusan fakultas sosial-politik, dalam DPR. Kita ingin melihat kursi-kursi mereka diisi oleh para teknokrat, para ahli dalam perekonomian dan keuangan, selain juga dalam bidang-bidang terkait lainnya."[69] Kunci menuju restrukturisasi radikal wilayah elektoral ini adalah Golkar.

GOLKAR DAN STRATEGI PEMILIHAN UMUM

Suharto punya banyak pertimbangan, baik yang bersifat domestik maupun internasional, dalam keinginannya menyelenggarakan pemilihan umum. Di dalam negeri, ia sangat ingin agar kekuatan-kekuatan politik dapat melatih diri mereka dalam kontes pemilihan umum guna menciptakan semacam rasa solidaritas dengan Orde Baru; ada juga pertimbangan bahwa, karena telah memutuskan untuk menggunakan alat dwifungsi dalam kaitan dengan lembaga-lembaga sipil dan bukan mengupayakan kekuasaan militer murni, ia tak memiliki pilihan kecuali mengupayakan pertarungan lewat

pemilihan umum. Secara internasional, pemilihan umum menawarkan tercapainya sasaran legitimasi maupun stabilitas.

Bagaimanapun, dalam semua hal ini, yang paling penting adalah bahwa keunggulan pemerintah tidak boleh terancam. Dengan melihat perkiraan awal bahwa partai-partai politik akan mendominasi hasil pemilihan umum, Suharto merasa perlu mereorganisasi kepemimpinan partai-partai sehingga mereka kelak cukup jinak dalam parlemen.

Sementara itu, pemerintah juga ingin punya suara sendiri dalam parlemen, dalam bentuk Sekber Golkar (Sekretariat Bersama Golongan Karya), entitas yang didirikan pada 1964 oleh Angkatan Darat guna mengoordinasikan kelompok-kelompok antikomunis; malah, pemerintah telah mengawali dengan menunjuk para pendukung sipil mereka sebagai wakil-wakil Golkar di parlemen pada 1967 dan 1968. Waktu itu diperkirakan bahwa Golkar kelak dapat memenangkan tak lebih dari tiga puluh persen jumlah suara dalam pemilihan umum—yang menjadi alasan utama kenapa Ali Murtopo ingin menunda pemilihan umum selama mungkin asalkan masih sopan. Namun demikian, segera setelah Suharto bertekad menyelenggarakan pemilihan umum pada Juli 1971, ia menugaskan Ali Murtopo untuk berusaha menarik dukungan elektoral sebanyak mungkin bagi Golkar.

Sulit sekali menganalisis asal-mula Suharto memutuskan untuk menggunakan Golkar serta merekayasanya dengan cara seperti yang dilakukannya. Memang, ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa ia pada mulanya tertarik pada gagasan membentuk semacam kemitraan dengan PNI. Ali Murtopo, menurut satu penuturannya, pada awalnya tidak tertarik dengan konsep Golkar, karena reputasinya yang kurang cemerlang dan karena kecenderungan konservatif (artinya, Sukarnois) beberapa pemimpinnya. Suharto sendiri pada mulanya tak banyak terlibat dalam Sekber Golkar, meski, sebagaimana halnya dengan lembaga-lembaga lain, ia sudah membersihkan dan menjinakkan kepemimpinannya dalam tahun-tahun pertama Orde Baru. Namun, secara intuitif ia

mungkin tertarik pada konsep mendapatkan tempat khusus bagi kelompok-kelompok fungsional dalam perpolitikan Indonesia, tempat yang sangat berbeda dari yang pernah diisi oleh sistem partai politik lama dan dengan satu kapasitas untuk menstabilkan sistem politik menghadapi kemungkinan dominasi partai. Mungkin juga, ia dipengaruhi oleh orang-orang seperti rekan lamanya di militer, Daryatmo, yang cukup memiliki pengalaman politik bersama Golkar di masa-masa awal terbentuknya. Namun, daya tarik paling besar dari Golkar adalah bahwa entitas ini menyajikan struktur sebuah partai negara yang tanpa politisi-politisi partai. Segera setelah strategi mobilisasi Golkar diterima, Suharto menugaskan Ali Murtopo dan Sujono Humardani memastikan keberhasilannya.

Waktu sangat mendesak. Golkar sama sekali tidak memiliki akar politik dalam masyarakat—seorang pengamat yang banyak makan asam garam berkomentar bahwa "meski kepopuleran [Suharto] jelas dirasakan oleh rakyat, ia belum memiliki basis partai lewat mana ia bisa mencalonkan diri untuk masa jabatan yang kedua"[70]—dan Golkar menghadapi lawan-lawan elektoral yang memiliki semua prospek meraih kemenangan dengan mengimbau dukungan atas dasar kesetiaan-kesetiaan primordial, meski sejumlah besar (hampir 22 juta) dari para pemilih belum pernah sebelumnya memperoleh hak memberikan suara dalam pemilihan umum.

Strategi yang diterapkan oleh Suharto dan manajer pemilihan umumnya, Ali Murtopo—setelah Ali Murtopo "membajak" Sekber Golkar untuk misi baru mereka—terdiri atas tiga aspek. Pertama, akan dilakukan upaya untuk membangun ideologi yang jelas berbeda dari partai-partai yang ada. Ideologinya akan didasarkan pada tema-tema nonideologi: pembangunan, stabilitas, ketertiban, persatuan. Gagasan pengelompokan fungsional yang tidak berlindung di balik politik yang berpihak dan bernuansa ideologis namun yang menampilkan dirinya sebagai pembawa visi kuat pembangunan Indonesia membuat mereka sangat kontras dengan partai-partai lainnya.

Aspek nonideologis, pragmatis, dan programatis program Golkar ini terbukti sangat menarik bagi banyak intelektual perkotaan yang sekuler, khususnya mereka dari latar belakang PSI dan Katolik, yang tidak menyukai dan khawatir dengan politik ideologi serta partai-partai yang mementingkan diri sendiri ala era Sukarno dan yang sekarang mencari pendekatan politik yang lebih modern serta maju. Aspek kedua tidak begitu luhur, namun dipastikan akan lebih efektif: sederhananya, Golkar akan menggunakan aksesnya ke sumber dana sumbangan pemerintah untuk membeli posisi dengan menempatkan diri mereka sebagai alat distribusi patronase. Ketiga, Golkar akan menggunakan aksesnya ke kekuasaan politik untuk mengubah keadaan sehingga akan menguntungkannya.

Pikiran Ali yang tajam namun tak etis itu pun menyambut tugas ini dengan senang hati. Ia dan orang-orang Opsusnya, termasuk orang-orang seperti mantan pemimpin buruh dan mahasiswa serta aktivis, Harry Can Silalahi, menyusun sebagian besar strategi yang drancang untuk melumpuhkan dukungan bagi partai-partai dan selanjutnya membesarkan Golkar. Di antara strategi tersebut adalah wewenang melarang para calon untuk ikut dalam kontes pemilihan. Strategi yang lebih tersamar adalah upaya-upaya Ali dalam menjinakkan PWI; ketika upayanya untuk membuat B.M. Diah terpilih sebagai Ketua PWI tidak berhasil mengalahkan kelompok pendukung Rosihan Anwar, pemerintah dengan enteng saja mengakui kelompok Diah sebagai wakil sah PWI. Selain itu, Ali sudah menguasai dua surat kabar untuk menyebarluaskan pesan-pesan Golkar: *Berita Yudha* dan *Suara Karya*.

Dukungan pemerintah terhadap Golkar memungkinkan kelompok ini mendesak maju ke wilayah-wilayah kantong dukungan partai tanpa banyak mengalami kesulitan. Bahkan, meski peraturan-peraturan pada tahun 1970 memungkinkan sebagian besar pegawai pemerintah ikut kelompok-kelompok politik dan tidak harus mengundurkan diri hingga mereka benar-benar sudah menerima kursi dalam parlemen, menteri dalam negeri waktu itu, Amir

Machmud yang tak berperasaan dan tak etis itu, "bertekad bahwa departemennya akan menjadi tulang punggung Golkar."[71] Pada 1970, Amir Machmud memberlakukan peraturan yang tidak mengizinkan personil ABRI serta karyawan sipil Departemen Pertahanan, selain para hakim dan jaksa, menjadi anggota partai. Ketimbang saat pemilihan umum 1955, departemennya memiliki wewenang yang sangat bertambah besar dalam mengelola proses pemilihan; melalui konsep kesetiaan tunggal, ia melancarkan tekanan berat kepada para karyawan Kementerian Dalam Negeri, yang sebelumnya memiliki hubungan kuat dengan PNI, agar mendukung Golkar. Dan memang, seperti dikemukakan oleh seorang peneliti yang memantau proses pemilihan dari dekat di Jawa Timur, "identifikasi pemerintah dengan Golkar, walau agak terselubung di tingkat provinsi, menjadi semakin lekat saja bila orang turun ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah."[72]

Aturan-aturan kampanye yang dibuat Amir Machmud mencegah setiap tindakan yang mempermasalahkan Pancasila atau UUD 1945, yang mengecam agama atau pemerintah beserta agen-agennya, juga yang mengejek organisasi-organisasi lain yang ikut dalam pemilihan. Para tahanan politik yang masuk dalam kategori A, B, atau C tidak diizinkan untuk ikut memberi suara. Upaya-upayanya ini terbantu secara fisik melalui pencoblosan di tempat kerja, sehingga "pegawai yang berani memberi suara menentang Golkar memikul risiko ketahuan."[73] Kopkamtib juga diberdayakan untuk menyisir daftar para calon dan menyingkirkan nama-nama mereka yang dianggap tidak cocok, selain juga menggunakan kekuasaannya yang tak terbatas untuk memelihara "keamanan" selama kampanye.

Peran Ali Murtopo adalah melancarkan tekanan berat kepada para pejabat setempat agar mengamankan kuota jumlah suara yang sudah ditentukan di daerah-daerah. Perannya sebagai kepala Dewan Pengadaan dan Komisi Logistik Pemilihan Umum memberinya sumber patronase yang menyenangkan. Komentar Crouch, "dengan menarik orang-orang yang pernah menjadi tulang pung-

gung PNI ke sisi mereka, Golkar mampu cukup banyak menghancurkan pengaruh elektoral PNI."[74] Taktik yang sama memanfaatkan hubungan patrimonial tampak jelas dalam pendekatan pemerintah terhadap para pemimpin Muslim, di mana janji dana naik haji ke Mekah, dana untuk bangunan-bangunan keagamaan, dan jabatan-jabatan empuk di organisasi-organisasi pemerintah ditawarkan guna memastikan agar para pemimpin membawa suara konstituen mereka ke Golkar.

Ali Murtopo, yang menghidupkan kembali Gabungan Usaha-usaha Perbaikan Pendidikan Islam (GUPPI), berupaya menarik para pemimpin muslim yang berpengaruh untuk masuk ke Golkar. Suharto sendiri membawa tiga kyai bersamanya dalam lawatannya ke Eropa pada 1970, dan melakukan kunjungan yang banyak diliput ke Jawa Tengah dan Timur pada pertengahan tahun 1970 di mana kedermawanannya pada pesantren-pesantren tak lain hanya untuk memperkuat kesan bahwa Golkar dapat memberi dana besar bagi mereka yang mendukungnya.

Identifikasi erat Golkar dengan Angkatan Bersenjata maupun pemerintah juga memudahkan penghimpunan dana pemilihan umum. Safari pemilihan umum Golkar memasukkan unsur hiburan selain juga janji kedermawanan, serta membantu membentuk identifikasi-identifikasi kuat: "Golkar adalah Pantja Sila, jadi janganlah anti-Golkar; Golkar adalah pemerintah, yang memusatkan diri pada pembangunan, seperti mesjid indah itu, kantor bupati yang megah itu, yang terbaik di Asia; Golkar adalah ABRI, jadi janganlah mengecam Golkar karena ABRI akan mengambil tindakan."[75] Taktik-taktik keras Angkatan Darat juga jelas tampak dalam mengamankan perolehan hasil pemilu, khususnya dengan "membujuk" para mantan anggota PKI dan rekan mereka agar memilih Golkar.

Putra sulung Sukarno, Guntur Sukarnoputra, tidak diperkenankan mencalonkan diri untuk PNI (meski ia dengan gesit ikut ambil bagian dalam kampanye), dan rencananya untuk memanfaatkan makam Sukarno guna memperingati wafatnya beliau

ditolak mentah-mentah. Suharto sendiri layaknya seorang negarawan berupaya menjaga jarak dari percekcokan elektoral, dengan menampilkan dirinya sebagai sosok paman pelindung serta membagi-bagikan dana dan kendaraan kepada kelompok-kelompok pemilih; namun ketika ia tidak dapat menahan diri untuk menunjukkan keberpihakannya, ia menegaskan bahwa ia sangat mendukung pemberian suara bagi Golkar.

Satu-satunya pertanda oposisi sengit yang tidak mendua datang dari Golongan Putih (Golput), dipimpin oleh para anggota "Generasi 66" yang tidak puas seperti Arief Budiman, yang mendorong agar para pemilih memberikan suaranya secara informal karena pilihan-pilihan yang ditawarkan—antara partai-partai atau Golkar—tak layak mendapat dukungan dan hanya layak untuk diprotes saja. Pemerintah menanggapi dengan menolak memberi izin bagi pertemuan-pertemuan diskusi Golput serta melarang Golput pada pertengahan Juni 1970.[76]

Walau memperoleh dukungan yang luar biasa besar termasuk dari pihak yang berwenang, prospek Golkar diperkirakan relatif sedang-sedang saja karena singkatnya waktu yang dimilikinya untuk mempersiapkan diri. Namun demikian, hasil pemilihan umum sangat menentukan dan mengherankan: Golkar meraih 62,8 persen dari jumlah suara yang berarti 236 kursi di DPR. Dari sembilan partai yang diizinkan Suharto untuk ikut bertarung dalam pemilihan umum, hanya NU yang tampil tanpa cedera dari pertarungan yang tidak berimbang itu—dan malah, suara yang diraihnya sedikit lebih baik ketimbang hasil pemilihan umum 1955—hanya karena sejak awal NU sudah memutuskan untuk tidak ikut bertarung. PNI, yang hancur akibat dampak kampanye kesetiaan tunggal di kalangan pegawai negeri, kalah besar, sementara perolehan suara Parmusi malah lebih buruk lagi.

Namun, satu-satunya arti penting pemilu 1971 bagi Suharto bukan terletak pada dimensi kemenangan itu sendiri, melainkan pada apa yang diwakilinya serta prospeknya bagi dunia politik dan masyarakat Indonesia. Rekayasa keberhasilan pemilu tersebut

menunjukkan tekad Suharto untuk berhasil dengan visi rekayasa sosialnya. Rakyat sendiri tidak dapat dipercaya untuk menyampaikan mandat; sebaliknya, keputusan tersebut, seperti memang demikian adanya, adalah hasil dari konstruksi sinis yang sangat licik. Terlebih lagi, sebuah lahan bagi pembangunan superstruktur rezim Suharto sekarang tampaknya sudah dibuka, yang di dalamnya—meski ia sering memperingatkan Golkar untuk tidak sekadar menganggukkan kepala pada kehendak pemerintah[77]—visi-visi politik dan masa depan alternatif tidak memperoleh tempat.

Segera setelah itu, Suharto memulai pembangunannya, menganjurkan—bukan untuk pertama kali—agar jumlah fraksi dalam parlemen baru dikurangi dari tiga belas menjadi empat. Dan partai-partai sepakat dengan usulannya mengenai arsitektur baru partai-partai serta fraksi-fraksi itu (yang disebutkan sebagai "material-spiritual, spiritual-material, Golkar, dan ABRI").[78] Seperti dijelaskan Suharto kelak, "kalau porosnya sudah ada, yakni yang satu itu, mengapa kendaraannya mesti begitu banyak, sampai mesti sembilan? Mengapa pula mesti kebut-kebutan, langgar-langgaran? ... Tidak perlu terlalu banyak begitu. Tetapi tidak perlu pula hanya satu kendaraan. Dua atau tiga kendaraan, baiklah."[79]

Ketika para wakil rakyat itu dikukuhkan pada akhir Oktober, ia menyampaikan keyakinannya bahwa hanya dua "pengelompokan" partai, bersama dengan Golkar, yang akan tampil dalam pemilihan umum berikutnya yang rencananya akan diselenggarakan pada 1976. Ia juga menegaskan bahwa, sejalan dengan semangat UUD 1945, tidak akan ada oposisi resmi dalam parlemen yang baru dipilih itu, namun bukan, tambahnya dengan cepat, berarti bahwa pemerintah akan berkuasa tanpa pengawasan. Setahun setelah itu, pada acara pengambilan sumpah para anggota MPR, Suharto menekankan bahwa "mempertahankan dan melaksanakan Pancasila merupakan kewajiban yang harus kita lakukan tanpa keragu-raguan sedikitpun."[80]

Keberhasilan mengejutkan latihan rekayasa politik ini tak pelak lagi mengundang pertanyaan seputar pemahaman Suharto

mengenai demokrasi. Demokrasinya bukanlah jenis Barat yang liberal, yang sudah pernah dicoba, dan terbukti tidak memadai serta ditinggalkan, seperti yang ia kemukakan dalam pidatonya pada Hari Kemerdekaan 1969.[81] Sebaliknya, ia melihat demokrasi ini sebagai ciptaan khas Indonesia, yang dibangun di atas budaya asli serta identitas nasional, yang tunduk pada dan terkandung dalam Pancasila, serta bertanggung jawab.

Versi demokrasi ini, "Demokrasi Pancasila"—demikianlah demokrasi ini kemudian disebut—kelak akan "sehat dan bertanggungjawab, berdasarkan moral dan pemikiran sehat, berlandaskan pasa suatu ideologi tunggal, yaitu Pancasila."[82] Sementara Suharto sendiri sebelumnya mengelu-elukan kebebasan mengungkapkan pendapat serta kebebasan pers yang ditegakkan rezimnya sebagai bukti atas tumbuhnya kembali demokrasi, demokrasi versi Indonesia, seperti kata Suharto dalam pidato akhir tahunnya pada 1970, "memadukan kebebasan dan tanggungjawab terhadap kepentingan umum, terhadap bangsa dan negara" dan "mendukung dan mengairahkan pelaksanaan pembangunan."[83]

Malah pada pertengahan 1969, ia sudah mengumumkan bahwa "dalam demokrasi kita yang berdasarkan Panca Sila ini, perbedaan pendapat boleh saja terjadi.Yang tidak boleh adalah peruncingan perbedaan-perbedaan itu yang dapat mengakibatkan perpecahan." Menurut Suharto, demokrasi harus menunggu hingga pembangunan tercapai; pembangunan dan demokrasi adalah dua hal yang bisa diterapkan secara bersamaan." Pada akhir 1971, Suharto merasa puas dengan hasil-hasil pemilihan umum, yang merupakan "langkah-langkah penting dalam upaya kita mengembangkan demokrasi yang sehat;" pada saat yang sama, ia memperingatkan bahwa "kita tidak bisa mengizinkan penyalahgunaan hak-hak demokratis yang hanya memiliki tujuan destruktif dan yang memicu kerusuhan serta kekecewaan di dalam masyarakat."[84]

STRUKTUR POLITIK KORPORAT

Sebelumnya sudah ada sedikit gambaran tentang bentuk medan politik baru dari Orde Baru. Seperti yang kita lihat, sudah sejak Februari 1970 Suharto menyatakan bahwa kebutuhan-kebutuhan bangsa akan paling baik terpenuhi dengan cara menyederhanakan sembilan partai yang ada beserta Golkar menjadi tiga kelompok—"nasional", "spiritual", dan "fungsional"—yang akan mewakili, dan bukan sebagai partai-partai kontestan, tiga aspek berbeda agenda pembangunan Orde Baru.[85] Apa yang diinginkan Suharto adalah partai-partai programatis yang bersatu atas landasan ideologis Pancasila. Juga tidak boleh ada kemunduran kembali ke era liberalisme atau Demokrasi Terpimpin. Partai-partai, yang sekarang sudah sangat patah semangatnya, hanya dapat memberi isyarat "konsensus" mereka atas usulan ini. Logika yang sama mendorong perkembangan besar kedua—gagasan "massa mengambang"—"guna mengalihkan perhatian rakyat dari masalah politik serta keeksklusifan ideologis,"[86] sehingga dapat lebih baik memusatkan diri mereka pada tugas pembangunan, serta agar menerima kejinakan politik yang dimaksud oleh gagasan tersebut. Gagasannya, pada awalnya, dikemukakan oleh pemimpin mahasiswa muslim Nurcholish Majid, namun, tak lama kemudian, disetujui dan diperkuat oleh panglima Diponegoro Mayor Jenderal Widodo, dan kemudian oleh Ali Murtopo.[87]

Tak pelak lagi dan tak dapat ditawar-tawar, proses-proses ini mengikuti jalan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pada Januari 1973, sembilan partai yang ikut bertarung dalam pemilihan umum 1971 diciutkan menjadi dua partai yang programatis dan nonpartisan: Partai Persatuan Pembangunan (PPP), gabungan dari empat partai Islam yang ada (NU, Parmusi, PSII, dan Perti); serta Partai Demokrasi Indonesia (PDI), yang di dalamnya termasuk lima partai non-Islam (Partai Katolik dan Protestan, bersama-sama dengan PNI, IPKI, dan Murba) Konsep "massa mengambang" ini mengakar kuat setelah pemilihan umum. Dengan demikian, komentar Ali Murtopo, berakhirlah masa "partai-partai

politik yang berlebihan jumlahnya yang masing-masing memiliki ideologi khususnya sendiri" serta resmilah "dimulainya persaingan politik berdasarkan manfaat program partai masing-masing, dan bukan ideologi."[88]

Korporatisasi atau penggabungan menjadi satu badan mulai meluas hingga ke luar arena politik. Pada akhir 1971, pemerintah mengumumkan terbentuknya organisasi tunggal untuk melayani semua pegawai pemerintah: Korpri (Korps Pegawai Republik Indonesia). Pertimbangan serupa melahirkan terbentuknya satu organisasi serikat buruh untuk mencakup kebutuhan semua pekerja: FBSI (Federasi Buruh Seluruh Indonesia) yang didirikan pada Februari 1973 di bawah kendali Menteri Tenaga Kerja Mohammad Sadli, dengan cepat disusul oleh terbentuknya Himpunan Koperasi Tani Indonesia pada bulan April serta Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia pada Juli. Kepedulian yang selalu ditekankan dalam semua upaya korporatisasi ini adalah konsep kemitraan, bukan antagonisme, antara karyawan dan pemilik perusahaan serta pekerja mereka; semua harus bekerja bersama untuk kemaslahatan seluruh masyarakat.

Ciri selanjutnya yang menentukan dari korporasi politik Suharto yang semakin berkembang itu adalah sikapnya terhadap hukum. Meski ia sering membuat pernyataan yang berkenaan dengan penghormatan terhadap hukum yang ada dalam pemerintahan Orde Baru ("salah satu sasaran penting Orde Baru ialah menegakkan kembali hukum dan menjunjung tinggi keadilan," yang harus dicapai dengan "mengembalikan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah"),[89] ia tak pernah memahami konsep-konsep Barat tentang pemisahan kekuasaan.

SUHARTO DAN BISNIS

Karier bisnis Suharto pada 1959 dikesampingkan sementara waktu dengan diberhentikannya ia sebagai panglima Divisi Diponegoro

karena kegiatan-kegiatan penggalangan dana yang tidak lazim. Ia, boleh dikata, sedang sial saja, karena kegiatan seperti itu adalah hal lumrah dalam upaya memperoleh sarana untuk menutupi kekurangan dalam pembiayaan yang dianggarkan. Dengan munculnya dan terkonsolidasinya Orde Baru, seperti yang telah kita saksikan, cara-cara menggalang dana seperti ini semakin kuat saja seiring dengan kuatnya cengkeraman kekuasaan Angkatan Darat atas masyarakat bernegara ini.

Pada umumnya, perkembangan ini dimaksudkan agar para perwira tentara diizinkan, bahkan didorong, untuk melakukan atau memperluas bisnis guna memperoleh sumber-sumber dana baru bagi operasi mereka dan, memang juga, bagi keuntungan pribadi para perwira yang bersangkutan. Sementara itu, rezimnya akan memberikan kondisi-kondisi dan dukungan yang diperlukan, untuk memungkinkan kegiatan-kegiatan seperti ini berlanjut, dan pemerintah berharap memperoleh bagian yang layak dari dana yang diperoleh melalui cara seperti ini. Dan memang, gedung kantor Suharto, Bina Graha, yang berdampingan dengan Istana Merdeka, dibangun sepenuhnya dengan menggunakan dana-dana Pertamina, dan di tahun-tahun awal masa kepresidenannya, Pertamina adalah penyumbang tunggal terbesar nonpemerintah bagi Angkatan Bersenjata, tanpa terusik tata krama bahwa sumber-sumber dana tersebut pertama-tama harus dialirkan lewat peti-peti uang pemerintah. Otonomi bisnis yang diberikan kepada para perwira militer seperti Ibnu Sutowo sama sekali tak terancam pembatasan, selama dana-dana yang diperlukan pemerintah terus mengalir. Salah satu contoh fleksibilitas menyenangkan yang mereka berikan kepada Suharto diwujudkan pada akhir 1971 ketika ia menyerahkan 110 kendaraan jip kepada para panglima militer Jawa dari sumber-sumber dananya sendiri "karena Departement Hankam (Kementerian Pertahanan dan Keamanan) tidak dapat menyediakannya."[90]

Pertamina adalah contoh terbaik sebuah perusahaan tentara. Di bawah kendali Ibnu Sutowo, perusahaan minyak ini berkembang dari awal-awal yang tidak begitu menjanjikan menjadi per-

usahaan yang mendominasi industri minyak. Ibnu memiliki hubungan khusus dengan Suharto, sampai-sampai ia praktis diberi otonomi penuh dalam mengelola Pertamina. Seperti kita lihat, upaya-upaya pada 1966 oleh Menteri Pertambangan, Slamet Bratanata, untuk membuat Ibnu Sutowo mempertanggungjawabkan pengelolaan Pertamina dijawab oleh Suharto dengan mengalihkan direktorat minyak dan gas ke kantor kepresidenan serta memberhentikan sang menteri tahun berikutnya. Bulog juga merupakan sapi perah andalan terbaik bagi rezim Orde Baru, selain juga bagi staf tentara yang mengelolanya, sementara para teknokrat terus saja dibuat jengkel karenanya. Bulog didirikan pada 1966 sebagai badan untuk membeli beras (sebagian besar di pasar internasional, untuk keperluan mana badan ini memperoleh monopoli) bagi para pejabat pemerintah dan anggota Angkatan Bersenjata. Pada 1970, badan ini menjadi mekanisme pemerintah dalam mengendalikan fluktuasi harga beras dengan menciptakan stok beras minimum (*buffer stock*). Bulog memiliki akses ke pinjaman-pinjaman murah dari bank sentral dan mendapat untung besar dari penjualan beras dan dari menanamkan kembali kredit murah mereka pada bank-bank swasta dengan bunga yang jauh lebih tinggi. Namun, fokus Bulog dalam mencetak uang kadang-kadang membuatnya berada dalam posisi buruk untuk mencapai tujuan utamanya menciptakan stabilitas harga beras. PT Berdikari, perusahaan dagang besar negara yang dikelola oleh tentara yang juga didirikan pada 1966, kurang begitu berhasil dalam kurun waktu jangka panjang ketimbang saudara-saudaranya dan mengalami kesulitan keuangan ketika banknya bangkrut pada 1968. Tahun berikutnya, Angkatan Darat mengonsolidasikan banyak yayasan mereka sebagai perusahaan-perusahaan swasta di bawah payung perusahaan angkatan darat bernama PT Tri Usaha Bakti.[91]

Rezim Suharto juga mensponsori bentuk-bentuk lain usaha "swasta", khususnya bekerja sama dengan sejumlah kecil pengusaha Indonesia keturunan Cina. Modus operandinya yang umum adalah pemerintah menyediakan fasilitas kredit atau akses istimewa ke

pasar tertentu, dengan harapan bahwa para anggota pemerintah (sering kali dengan pengaturan pemberian saham kosong) akan dibayar dengan pantas atas kerjasama mereka. Di antara para pengusaha utama di masa awal Orde Baru adalah Liem Siu Liong, yang sejak lama merupakan pialang bagi program-program bisnis angkatan darat namun sekarang melambung ke puncak-puncak baru berkat dominasi Angkatan Darat dalam politik. Liem sudah membentuk kemitraan bisnis di masa awal Orde Baru dengan sepupu Suharto, Sudwikatmono, bersama dengan Johar Sutanto dan Ibrahim Risyad, dalam perusahaan CV Waringin yang berkembang pesat karena memperoleh kredit pemerintah dan bantuan para pejabat.

Pada 1969 Liem mendirikan, bersama dengan para mitra usahanya, PT Bogasari, sebuah perusahaan penggilingan tepung yang diresmikan sendiri oleh Suharto pada 1971. Sebagian dari laba Bogasari disalurkan ke yayasan-yayasan yang ada hubungannya dengan tentara. Pada 1968, atas bantuan Sumitro Joyohadikusumo, Liem memperoleh sebagian saham dalam monopoli impor cengkeh lewat perusahaannya PT Mega. Saham selebihnya diberikan pada PT Mercu Buana sebuah perusahaan yang dimiliki oleh Probosutejo, saudara tiri Suharto. Pada 1970, perusahaan tekstil PT Tarumatex milik Liem dilaporkan telah dibantu dalam memperoleh kontrak yang menguntungkan untuk pengadaan seragam militer bagi Angkatan Darat.[92]

Kisah serupa tentang keberhasilan perusahaan yang begitu cepat juga terjadi pada kelompok perusahaan Astra milik William Suryajaya (Cia Kian Liong). Koneksi politiknya, termasuk antara lain Sujono Humardani—bersama dengan investasi besar dalam pabrik perakitan mobil General Motors yang dimiliki pemerintah—ternyata menguntungkan juga. Ia bergerak dengan cepat menjadikan dirinya pialang bagi perusahaan-perusahaan asing yang ingin mengekspor ke Indonesia, dengan menjadi agen tunggal bagi produsen-produsen besar Jepang dan A.S. seperti Toyota, Xerox, dan Kodak, selain juga sebagai sosok yang dominan dalam pembuatan kendaraan di Indonesia.

Di antara pengusaha Indonesia keturunan Cina lainnya yang menonjol yang ikut dalam bisnis tentara adalah Nyoo Han Siang, Yap Swie Kie, dan 'Bob' Hasan. Kerja sama Angkatan Darat dengan pengusaha keturunan Cina juga tercermin dalam usaha yayasan-yayasan Kostrad (yang didirikan oleh Suharto pada 1964 dan dikelola oleh Brig. Jen. Sofyar), yang berkembang cepat dalam konteks ini, terbantu berkat hubungan dekat Suharto dengan Liem Siu Liong. Bersama-sama, Sofyar dan Liem mereorganisasi Bank Windu Kencana, dan bank itu (berlimpah deposito berkat koneksi politiknya yang rapi) membiayai pengembangan bisnis lebih lanjut hingga ke angkutan udara, konstruksi, dan pengolahan.

Perusahaan lainnya yang disponsori tentara, Inkopad, merampungkan pembangunan gedung properti kelas atas Kartika Plaza bekerja sama dengan perusahaan Hong Kong. Tri Usaha Bakti, yang merupakan holding dari sejumlah perusahaan yang disponsori ABRI, adalah tempat serupa bagi usaha pialang bisnis yang disukai tentara itu. Para panglima setempat juga sama bergairahnya dalam menggalang dana seperti mitra Jakarta mereka. Seperti juga halnya di Jakarta, peran para panglima di daerah adalah melancarkan jalur politik (memperoleh izin, lisensi, monopoli) bagi mitra-mitra Cina atau rekan-rekan asing mereka yang bertugas menjalankan perusahaan sehari-hari, dan memberikan "perlindungan" kepada mereka dari oposisi yang tak dikehendaki serta ancaman gugatan apabila kegiatan-kegiatan mereka menyangkut hal-hal yang illegal.[93]

Tak pelak lagi, terutama sehubungan dengan modal asing yang semakin sering menimbulkan kecemburuan nasional, hubungan kerja yang begitu membuahkan hasil dengan para pengusaha keturunan berdampak pada politik dan membangkitkan ketegangan sosial. "Kelompok keturunan Cina dituduh menjadi anak emas tentara dan memperoleh kontrak serta kredit yang tidak diperoleh oleh para pengusaha pribumi," komentar seorang wartawan pada 1971.[94]

Untuk menangani keresahan yang semakin meningkat sehubungan dengan dominasi Cina atas dunia usaha Indonesia, Suharto

pada Maret 1972 mengusulkan agar pemerintah membeli 50% saham-saham perusahaan ini dan menjualnya kepada pengusaha pribumi dengan suku bunga yang ringan. Hari-hari berikutnya, pertama-tama Sudharmono dan kemudian Suharto sendiri melunakkan usulan tersebut. Hal itu, ujar Sudharmono, hanya usulan saja, sementara Suharto menyatakan bahwa paksaan terhadap para pengusaha Cina hanya akan menjadi kontraproduktif dan mereka tidak akan terpengaruh untuk menjalankan gagasannya.[95]

Namun, masalahnya tetap tak dapat diredam. Masa-masa ini ditandai oleh usulan-usulan dan debat-debat yang tidak membuahkan apa pun tentang cara terbaik untuk menggalakkan kepentingan para pengusaha pribumi tanpa terjadi pelonggaran hubungan bisnis antara para perwira tentara dan kalangan pengusaha Cina. Dan kebijakan resmi Suharto tentang investasi usaha tetap saja tak berubah. Berbicara pada sebuah pertemuan di Bengkulu pada Juni 1972, ia berkomentar bahwa "utang-utang luar negeri kita peroleh dengan syarat yang ringan sekali, dan kesemuanya dipergunakan untuk pembangunan."[96]

Satu aspek yang terkait dengan usaha-usaha ini adalah bersemangatnya istri Suharto, Tien, dalam melakukan kegiatan pengumpulan dana yang diarahkan untuk tujuan-tujuan kemanusiaan. Malah sudah sejak awal 1966 Tien membentuk perkumpulan para istri menteri guna melaksanakan pekerjaan pembangunan sosial demi menaikkan taraf hidup rakyat. Bisnis ciptaannya yang paling terkenal—Yayasan 'Harapan Kita', yang didirikan bersama istri Ibnu Sutowo—membangun keberhasilannya tanpa malu-malu dengan meminta 'sumbangan' dari perusahaan-perusahaan yang takut membuat pemerintah tidak senang, dan berdasarkan aturan-aturan yang membuat yayasan mendapat persentase tertentu dari penjualan perusahaan seperti PT Bogasari. Yayasan lainnya, Yayasan Mangadek, mengkhususkan diri pada pemeliharaan warisan budaya keraton Mangkunegaran Solo (dengan mana Ibu Tien memiliki hubungan jauh), serta dikelola oleh pengusaha dan rekan Ibu

Tien, Sukamdani, yang juga ikut dalam berbagai usaha patungan, termasuk ekspor kayu.

Kegiatan-kegiatan bisnis Ibu Tien, sudah tentu, adalah bagian dari rangkaian tugas yang lebih besar yang kebanyakan berpusat pada keluarga. Anak-anaknya yang sudah besar-besar saat itu mulai menanjak dewasa. Meski ada upaya-upayanya untuk mengawasi keluarga, tanda-tanda ketidakdisiplinan di antara anak-anaknya tetap muncul, mungkin disebabkan oleh kesibukan ayah mereka, serta sorotan publik yang mengikuti setiap gerak ayah mereka bahkan di saat-saat paling pribadi seperti peringatan ulang-tahun ke-50 Suharto di rumah orang tua Ibu Tien di Kalitan, Solo. Pada Juli 1968, misalnya, Sigit didenda karena ngebut menyusul kecelakaan lalu-lintas. Tutut, anak perempuan tertua Suharto, mengikuti kuliah pada Fakultas Teknologi Universitas Trisakti, lembaga pendidikan tinggi swasta yang populer di kalangan anak-anak elite Jakarta, di mana ia memulai studi (yang tidak sempat diselesaikan) teknologi, dengan minat khusus pada penerbangan. Ia menikah dengan Indra Rukmana Kuwara pada Februari 1972. Semua anak-anak Suharto masuk SMP swasta di Cikini sebelum melanjutkan ke SMU, yang juga swasta, di Jl. Budi Utomo. Kebanggaan Suharto pada keluarganya yang menanjak dewasa teredam oleh rasa kehilangan yang pasti amat memengaruhinya: kematian ibu tirinya—Ibu Prawiroharjo, perempuan yang merawatnya hingga ia dewasa—pada 1971. Sikap bermusuhan, yang menjadi ciri khasnya, terhadap apa yang ia pandang sebagai tindakan mengusut-usut sejarah keluarganya sudah mulai kelihatan jelas. Salah seorang anggota delegasi dagang ke Taiwan dikabarkan memperkenalkan diri sebagai adik Suharto; hal itu serta-merta memicu penyelidikan oleh pihak kejaksaan.

SKANDAL, KORUPSI, DAN KRITIK

Suharto meraih jabatan kepresidenan karena memperoleh simpati besar serta dukungan rakyat. Namun, penanganan yang tidak rapi

atas proses pemilihan umum, sinisme yang semakin meningkat terhadap dwifungsi ABRI serta, yang lebih langsung, bukti yang semakin kuat tentang korupsi dan kolusi di dalam pemerintahannya, berpadu sekitar awal tahun 1970 dengan bangkitnya kekecewaan pertama yang konsisten dan meluas atas pemerintahannya. Selama beberapa tahun berikutnya, kecaman tentang korupsi Orde Baru menjadi menu sehari-hari suara orang-orang yang tak sepakat, dan sasaran utama protes-protes tersebut adalah para jenderal yang paling dekat dengan Suharto: Ibnu Sutowo, Sujono, Achmad Tirtosudiro, Alamsyah, Suhardiman, dan Suryo. Anehnya, Suharto sendiri tetap bebas dari kecaman pribadi atas praktik-praktik ini.[97]

Letupan besar pertama yang terkait dengan ketidakpuasan terhadap rezim Suharto terjadi segera pada Januari 1970, ketika naiknya harga minyak tanah, bensin, dan bahan-bahan pokok kontras dengan gaya hidup mewah yang diperlihatkan dan semakin dinikmati oleh orang-orang sekitar Suharto. Demonstrasi-demonstrasi itu, yang dipimpin oleh para aktivis mahasiswa seperti Arief Budiman, Marsillam Simanjuntak, dan Syahrir, oleh seorang pengamat dianggap sebagai "ledakan antikorupsi paling kuat dalam sejarah 25 tahun Republik."[98] Demonstrasi-demonstrasi dengan skala serupa terjadi enam bulan sesudahnya. Terkejut dan mungkin juga terheran-heran atas reaksi ini, pada 31 Januari 1970, Suharto, yang jengkel dengan kesigapan pers melaporkan hal-hal yang berhubungan dengan korupsi, dan menekan reputasi baiknya sebelum itu serta kesediaannya memerangi korupsi "secara fundamental mendasar",[99] kemudian menunjuk komisi yang beranggotakan empat orang, diketuai oleh mantan Perdana Menteri Wilopo dan dibantu oleh Mohammad Hatta, agar menyelidiki dan memberikan laporan tentang korupsi. Suharto memberi komentar pada awal Februari:

> Perbuatan korupsi dan tindakan penyelewengan di bidang ekonomi umumnya bukan saja melanggar hukum dan ketertiban,

> tetapi jelas bertentangan dengan moral menusuk rasa keadilan. Korupsi menghambat pelaksanaan program-program negara, merusak sendi-sendi dan memerosotkan kewibawaan aparatur Pemerintah, apabila tidak dikekang,, dikurangi, dan ditekan sampai batas-batas seminimul mungkin.[100]

Ketidaksabaran Suharto karena meningkatnya gelombang kecaman tampak jelas dari reaksinya terhadap Kelompok "Kita Ingin Tahu". Pemerintah tidak mau lagi mengakomodasi keinginan mereka, dan Achmad Tirtosudiro, yang dijadwalkan hadir dalam forum "Kita Ingin Tahu" pada bulan Februari, diinstruksikan agar tidak berbicara.

Beberapa bulan berikutnya, Komisi Empat menjalankan tugasnya dengan penuh semangat, menyelenggarakan pertemuan panjang dengan Suharto sendiri dan dengan tokoh-tokoh penting dalam penyelidikan korupsi, seperti Kepala Bulog, Achmad Tirtosudiro. Komisi ini menghasilkan banyak laporan yang sangat kritis terhadap Suharto, dengan membeberkan serangkaian kejanggalan finansial, praktik-praktik yang teledor, dan modus-modus operandi yang tak lazim dalam aparat-aparat pemerintahan seperti Pertamina, Bulog, dan Perhutani, perusahaan kehutanan milik negara, selain hubungan-hubungan yang dapat dipertanyakan antara BUMN dan individu-individu swasta.

Pada pertengahan tahun, kecaman mahasiswa tentang korupsi mulai terdengar. Tampaknya semakin berhati-hati dengan apa yang ia ketahui sebegitu jauh dari temuan-temuan Komisi Empat, Suharto menggunakan variasi cara yang ia gunakan ketika menghadapi permasalahan Bimas. Bertatap muka dengan delegasi mahasiswa yang beranggotakan lima belas orang pada 14 Juli, ia mengemukakan sulitnya melanjutkan dakwaan korupsi tanpa bukti pelanggaran yang jelas dan memadai, dan ia sepakat meluangkan waktu secara teratur (setiap Sabtu, antara pukul 9 pagi dan 12 siang) untuk menerima para mahasiswa yang bisa memberinya bukti tersebut. Empat hari kemudian, empat mahasiswa, termasuk Arief Budiman dan Mar'ie Muhammad, muncul dengan bukti

bahwa rekan dekat Suharto, Jenderal Suryo, telah membuka rekening dalam jumlah besar dalam bentuk gulden Belanda. Namun, Suharto, yang menunjukkan air muka tenang, ramah dan wajar, menolak untuk mengambil tindakan atas pertimbangan bahwa tak ada yang salah dengan apa yang telah dilakukan oleh Suryo, serta bahwa belum jelas apakah Suryo sendiri yang mengantongi jumlah uang yang dipermasalahkan itu.

Menurut penuturan Arief Budiman sendiri, Presiden "mengatakan kepada mereka bahwa mereka dimanfaatkan sebagai alat oleh para politisi."[101] Suharto selanjutnya meneruskan kebiasaan meluangkan waktu untuk mendengarkan keluhan mahasiswa seputar korupsi selama beberapa minggu lagi sebelum akhirnya menghentikannya "karena mereka-mereka yang datang ... tidak memberikan informasi yang kongkrit."[102] Arief, seperti yang dituturkannya kembali setelah itu, "merasa kecewa melihat bahwa kelompok yang dengan patuh mengabdi kepada Suharto menjadi semakin kuat, sementara mereka yang dengan kritis mendukung Suharto secara pelan-pelan dikeluarkan dari lingkarannya."[103]

Sementara itu, Komisi Empat sudah merampungkan penyelidikannya, dengan mengecam praktik-praktik dana nonbujeter, terutama yang dapat digunakan Presiden, serta merekomendasikan pembaruan struktural pada Kejaksaan Agung dan, selain itu, menyarankan agar diambil tindakan terhadap kasus yang melibatkan tokoh-tokoh termasuk Jenderal Suryo dan saudara sepupu Suharto, Sudwikatmono. Kejadian ini sangat memalukan bagi Suharto karena laporan komisi tersebut sampai bocor ke pers dan dimuat oleh *Sinar Harapan* pada akhir Juli, di mana hal tersebut jelas merupakan langkah dengan motif politik.[104]

Namun, hal itu tidak membuahkan pembaruan-pembaruan yang diinginkan, karena meski dipermalukan, ia sama sekali tidak punya rencana untuk mengorbankan mereka yang begitu dekat dengan dirinya guna menenangkan gerutuan masyarakat. Namun, ia tetap menegaskan, menjelang pidato tahunan Peringatan Hari Kemerdekaan, bahwa "tidak perlu diragukan lagi: Saya memimpin

lang ing pemberantasan korupsi."[105] Namun, tindakan-tindakan yang dihasilkannya hanya membuahkan hukuman atas beberapa pejabat kecil, ketentuan yang mengharuskan para pejabat mengungkapkan aset-aset pribadi yang mereka miliki, undang-undang baru tentang korupsi, dan satu lagi, upaya mengawasi kegiatan-kegiatan Pertamina secara lebih ketat.

Perlu ditekankan, bahwa Suharto adalah orang publik sepanjang hayatnya, selalu dekat dengan negara dan kegiatannya, selalu menekankan bahwa pekerjaannya adalah pekerjaan negara. Para pengecam Suharto mestinya tidak usah heran akan kepasifan serta apa yang tampak sebagai kurangnya komitmen Suharto pada upaya-upaya dirinya dalam memberantas korupsi. Suharto sendiri adalah produk dari budaya dan pengalaman hidup yang tidak menegaskan garis batas antara lingkup publik dan lingkup pribadi serta antara milik negara dan milik pribadi—yang tercermin dari definisinya tentang korupsi sebagai "mengambil sesuatu yang kita tidak punya hak atasnya untuk memperoleh manfaat pribadi." Dalam pemahamannya, kekayaan negara bisa digunakan untuk tujuan-tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Pemahaman seperti inilah yang mendorong upaya-upaya Suharto sebelumnya di Semarang pada akhir dekade 50-an untuk menarik pajak dari rakyat dengan pertimbangan kesejahteraan bagi tentara-tentaranya. Logika yang sama dapat dengan mudah diubah menjadi menguntungkan kepentingan bisnis mereka yang ia tahu bisa mendatangkan hasil. Bila mereka bisa memajukan pembangunan yang ia cintai, maka mereka harus diizinkan untuk berbuat demikian dan dibayar sepadan dengan jerih-payah mereka.

Sejalan dengan persepsi ini, Suharto tampaknya mengalami kesulitan yang cukup serius, dan tidak dibuat-buat, dalam memahami apa sebenarnya yang diributkan oleh sebagian masyarakat. Di satu sisi, ia menghukum mereka yang, karena ditekan keadaan, memanfaatkan barang-barang milik negara, sementara di sisi lain membersihkan orang-orang dari tuduhan berdasarkan 'keyakinan'-nya bahwa "korupsi di negeri kita bukan sebagai akibat dari

mentalitas yang korup, melainkan sebagai akibat dari tekanan ekonomi."[106] Namun, ia tidak mengomentari mereka yang sudah kaya dan masih mau memperkaya diri dengan merugikan negara atau memungut setoran dan komisi swasta—asalkan mereka terus melaksanakan tugas dan tidak mempermalukan pemerintah—dan kebungkamannya semata-mata bisa diartikan bahwa ia tidak melihat adanya masalah moral bila para pemimpin masyarakat menggunakan barang-barang negara untuk manfaat mereka sendiri asalkan kegiatan umum mereka mendatangkan kemaslahatan yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan—yaitu proses pembangunan. Perilakunya sendiri, tentu saja, sudah sejak lama dipengaruhi oleh pemikiran seperti ini. Sejalan dengan itu, tindakan-tindakan yang ia ambil, seperti bermain-main dengan 'Tim Pemberantasan Korupsi' dan dekrit Agustus 1970-nya yang membatasi kewajiban dan kekuasaan Aspri serta tidak memberi mereka kekuasaan eksekutif apa pun, dimaksudkan bukan untuk menyelesaikan masalah korupsi itu sendiri, melainkan, lebih merupakan upaya untuk meredam kerugian politik yang diakibatkan oleh pembeberan-pembeberan korupsi tingkat tinggi tersebut.

Kecaman-kecaman Suharto atas perilaku korup juga memiliki ciri serupa. Ia mengecam mereka yang membeli barang-barang impor asing hanya untuk pamer. Di puncak heboh korupsi tersebut pada awal 1970, Suharto dengan marah menyampaikan imbauan dalam pertemuan para panglima ABRI agar para anggota Angkatan Bersenjata beserta keluarga mereka tidak hidup mewah, mengendalikan anak-anak mereka ("dalam soal-soal seperti *ngebut*, mempergunakan mobil dinas, membawa senjata api, berambut gondrong"), dan agar para istri anggota ABRI tidak mengenakan rok mini. Pada awal 1972, ia mengeluarkan instruksi melarang penggunaan pesawat telepon milik pemerintah untuk keperluan pribadi, dan sekali lagi memperingatkan para anggota ABRI akan bahayanya jika anak-anak mereka merusak nama baik Angkatan Bersenjata.[107]

Pernyataan Suharto ini jangan dipandang bahwa Suharto sengaja bermuka-dua, seolah ia menyuarakan aspirasi ini sekadar untuk konsumsi publik tanpa bermaksud sungguh-sungguh dengan apa yang ia katakan. Ia memang benar-benar prihatin waktu itu dengan korupsi, namun pemahamannya akan korupsi tergolong pemahaman yang terbatas dan aneh serta rancu. Inti kecamannya bukanlah bahwa pemakaian barang-barang negara untuk manfaat pribadi itu pada dasarnya salah secara moral—dalam 'kamus' Suharto entri ini tidak ada—melainkan bahwa perilaku seperti itu mungkin dapat mencemarkan reputasi baik pemerintah serta Angkatan Bersenjata dan dengan demikian merusak tatanan rezim tersebut.

Ruwetnya perilaku pribadi Suharto, meski pada awalnya menimbulkan teka-teki, memberi kita beberapa petunjuk yang dapat digunakan sebagai penjelasan. Sementara sudah kaya pada saat itu, dan walau sudah hidup nyaman, gaya hidup Suharto (demikian juga gayanya dalam berkomunikasi) tak heboh dan pamer, dan mencerminkan sisa-sisa puritanisme yang kuat. Rumahnya di Menteng juga sederhana (tak seperti rumah banyak rekan tentara dan rekan bisnisnya, yang saling berlomba satu sama lain secara berlebih-lebihan namun tak berselera), begitu pula selera budayanya.

Walau ada pernyataan yang menyatakan sebaliknya ("Amat menggoda untuk menduga bahwa ketamakan pribadi juga penting dalam motif Suharto sedari awal"),[108] secara pribadi ia tidaklah suka merampas atau serakah, dan juga bukan orang yang suka menggunakan kekayaan yang dimilikinya sebagai sarana untuk memuaskan materi pribadi. Ia menggunakan kekayaannya—atau lebih tepat, aksesnya ke dana-dana—lewat cara-cara yang sesuai dengan atau yang mengedepankan tujuan-tujuan umumnya bagi bangsa, dan oleh karena itu baginya, masalah korupsi benar-benar tak pernah menjadi persoalan. Sejalan dengan gagasan-gagasan korporatnya yang fundamental, pemakaian barang-barang pemerintah untuk kepentingan pribadi tidak dapat diterima hanya jika

kepentingan umum, seperti yang ia sebutkan, menjadi dirugikan karenanya.

Akhirnya, ada alasan penting lain atas enggannya Suharto untuk mengambil langkah tegas terhadap korupsi di tingkat tinggi. Tidak berpengalaman dalam memerintah, menghadapi beragam masalah dan, meski populer, cengkeramannya atas kekuasaan sebenarnya longgar, ia terdesak—dalam memerintah—oleh semacam konsensus dari para jenderalnya. Ia menyadari bahwa menyinggung perasaan secara serius, apalagi memberhentikan, seorang pendukung militer dengan kaliber, kekuasaan, dan sumber daya seperti Ibnu Sutowo, juga pendukung kuatnya seperti Alamsyah, dalam menghadapi kecaman publik, bisa-bisa mendatangkan akibat yang membawa bencana bagi rezimnya serta segala yang diwakilinya. Dan memang, desas-desus tentang konspirasi para perwira untuk memulihkan kekuasaan Sukarno menjadi alasan ditahannya Mayjen Mursyid pada akhir tahun 1969 dan, tak lama setelah itu, ditahan pula Mayjen Suadi, Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional, tampaknya karena kontak-kontak dekat mereka dengan Sukarno. Salah seorang pengamat berpendapat bahwa "di tingkat letnan-jenderal, beberapa perwira masih memandang Suharto sebagai 'anak petani', 'penganut aliran mistik yang tak berpendidikan', yang 'tidak memiliki latar belakang keluarga yang baik'. Mereka ini berpendapat bahwa masih ada pemimpin lain yang lebih baik."[109] Jika melihat situasinya, dan jika melihat bahwa tidak ada jaminan para pengganti Suharto akan lebih bersih, dan malah bisa jadi jauh lebih tidak dapat diandalkan, mengganggu keadaan yang ada menjadi tidak bermanfaat dan tidak perlu. Atas penjelasan ini orang mungkin dapat menambahkan fakta bahwa mereka yang paling dekat dengan skandal korupsi adalah bagian integral dari kelompok pribadi Suharto—kepada siapa presiden merasakan adanya kesetiaan kuat serta atas siapa ia begitu erat bergantung untuk mendapatkan nasihat dan dukungan.

Seandainya Suharto berusaha untuk sedikit terlepas dari tekanan politik dalam negeri melalui kunjungan-kunjungan kenega-

raan pada awal September 1970, ia jelas tidak berhasil. Memang, ia terpaksa menunda keberangkatannya ke Negeri Belanda, Jerman Barat, dan Zambia selama 48 jam karena adanya demonstrasi-demonstrasi keras anti-Orde Baru di Negeri Belanda, dan Suharto sendiri mengalami demonstrasi-demonstrasi lebih lanjut di sana maupun di Jerman. Pengalamannya lebih lanjut pada konferensi Gerakan Non-Blok di Lusaka melengkapkan gambaran tentang lawatan luar negerinya yang tidak menyenangkan itu.

Sekembalinya dari lawatan luar negeri itu, Suharto berhadapan dengan munculnya suasana ketidakpuasan masyarakat terhadap arah Orde Baru, satu titik balik mengejutkan dari melesatnya ia secara sukses ke tampuk kepresidenan delapan belas bulan sebelumnya. Menjelang akhir tahun itu, ia terpaksa membantah dengan tegas tuduhan bahwa ia tidak lagi mendengarkan para mahasiswa.[110] Setahun kemudian, seorang pengamat menulis

> suara-suara mahasiswa serta unsur-unsur kalangan sipil yang berbeda pendapat tidak mau begitu saja diredam. Umumnya, para mahasiswa terutama, tetap resah dan skeptis akan masa depan. Mereka tidak menyukai cara Suharto memerintah. Mereka terlalu banyak menemukan ketidakjelasan mengenai sasaran-sasaran dan maksud pemerintahannya, terlalu banyak yang bersifat sementara dan 'darurat' dalam rencananya, serta sering kali terlalu banyak rahasia dalam cara-cara pemerintahannya beroperasi.[111]

Demonstrasi-demonstrasi yang jauh lebih kecil selama kunjungan Suharto ke Australia dan Selandia Baru pada awal 1972 disebutnya, seperti yang kita ketahui, sebagai pekerjaan kaum komunis.

Gagalnya Suharto menyadari dimensi sebenarnya dari masalah korupsi tercermin dalam contoh dua skandal setelah itu. Skandal pertama adalah ketika Kepala Polisi Jenderal Hugeng Imam Santoso, pada September 1971, mengumumkan keberhasilannya membongkar kegiatan penyelundupan impor mobil-mobil mewah di pelabuhan Tanjung Priok yang mendapat perlindungan dari tentara (serta laporan keterlibatan aktif Ibu Tien) dengan

tujuan memperoleh untung atas penjualannya kembali. "Penghargaan" yang diterima Hugeng adalah diberhentikannya ia beberapa hari setelah itu dan digantikan oleh pejabat yang lebih "berpengalaman" menangani masalah seperti ini.

Skandal kedua adalah pengembangan impian Ibu Tien, Taman Mini Indonesia Indah—taman hiburan yang ia kembangkan di sebelah tenggara Jakarta meniru Disneyland dan taman budaya Thailand, Timland. Untuk membiayai impiannya itu, diciptakan pada 1971, Ibu Tien menegaskan kepada para pemimpin dunia usaha dan para pejabat daerah bahwa mereka lebih baik memberi sumbangan berarti dalam membiayai pengembangan Taman Mini, di mana Yayasan Harapan Kita adalah penanggung jawabnya.

Proyek tersebut mengundang kemarahan mahasiswa serta para pembangkang sipil lainnya, bukan saja karena cara-cara penghimpunan dana oleh Ibu Tien serta keyakinan bahwa rakyat dipaksa menjual tanah mereka untuk tempat yang direncanakan itu, tapi juga karena mereka memandang hal tersebut sebagai penghamburan uang—tahap pertamanya saja waktu itu menelan biaya Rp 4,5 miliar—yang tidak dapat ditanggung oleh Indonesia yang sedang jatuh miskin, sebuah pengalihan krusial, untuk maksud yang tidak jelas, atas dana-dana yang amat dibutuhkan.

Tugas untuk menepis para mahasiswa tukang protes diserahkan kepada veteran ajudan kepresidenan Cokropranolo serta kepada Sukamdani yang sangat terlibat dalam pembangunan Taman Mini. Preman-preman bersenjata kemudian menampar para mahasiswa tukang protes, berdalih membela nama Ibu Tien serta "untuk memberi peringatan kepada "orang-orang di balik" gerakan protes tersebut."[112] Menghadapi protes-protes ini, Ibu Tien tetap saja gigih bertekad untuk melanjutkan proyek tersebut.

Perseteruan itu mengundang kemarahan Suharto sedemikian rupa, kemarahan yang belum pernah mereka saksikan sejak hari-hari kelam awal Oktober 1965. Dengan menunjukkan ketidakpahamannya atas keberatan-keberatan terhadap kasus Taman Mini,

ia menggunakan kesempatan untuk menyerang pada peresmian Rumah Sakit Pertamina yang mewah pada Januari 1972, yang merupakan proyek "mercusuar" yang berlandaskan konsep gengsi sama yang juga melahirkan Taman Mini. Berbicara tanpa teks, Suharto mengecam para pengkritik Ibu Tien. Ia menuduh para pengecamnya bersekongkol untuk mengganggu stabilitas nasional serta menentang kepentingan bangsa, dan ia mengancam akan menggunakan wewenang Supersemar untuk menanganinya. "Saya akan menghantam siapa saja yang mencoba melanggar konstitusi, dan saya akan mendapat dukungan dari ABRI," ujarnya dengan marah; lebih jauh, "kalau ada seorang ahli hukum yang mengatakan bahwa Presiden tidak bisa menindak orang yang tidak mengerti dan tidak mau mengerti, maka Supersemar bisa saya gunakan sebagai alasan karena mengganggu ketertiban umum." Menjadi semakin bersemangat terhadap tugasnya itu, ia menolak pandangan bahwa proyek Taman Mini adalah beban mubazir atas rakyat, serta menyatakan bahwa isu tersebut hanyalah kedok bagi kampanye yang bertujuan menjelek-jelekannya rezimnya, menyingkirkan ABRI dari arena politik, dan menggantikannya. "Dan saya tegaskan bahwa saya tidak akan melepaskan dwifungsi ABRI," lanjutnya, apalagi mengalah pada tuntutan-tuntutan pengusiran atas dirinya.

Suharto diangkat oleh MPR dan hanya bisa diberhentikan oleh MPR, dan setiap upaya untuk mengubah keadaan secara inkonstitusional akan ditanggapi dengan kekerasan. "Saya akan kembali mengambil sikap yang saya ambil pada 1 Oktober 1965 ketika menghadapi PKI. Pada waktu itu hanya istri saya saja yang mendukung saya, sementara Front Pancasila dan Angkatan '66 belum lahir."[113] Di antara mereka yang ditahan tak lama kemudian adalah Arief Budiman, Aristides Katoppo, redaktur pelaksana *Sinar Harapan*, dan aktivis keturunan Belanda dan pembangkang empat-zaman serta ketua Yayasan Hak Asasi Manusia, Haji Johannes Princen. Unjuk kemarahan Suharto di depan publik mungkin sangat dipengaruhi oleh solidaritas mendalam yang ia miliki terhadap istrinya. Namun, secara pribadi, ia sendiri

yang memerintahkan agar proyek tersebut dijalankan secara perlahan dan tanpa gembar-gembor.

Kekhawatiran terhadap korupsi terang-terangan serta pengalihan sumber dana pemerintah untuk proyek-proyek yang tidak berguna bagi masyarakat pelan-pelan tergalang menjadi kecaman yang makin serius terhadap struktur dan sifat Orde Baru, yang terkait seputar tema *modal asing*, terutama Jepang, serta dominasi modal tersebut yang semakin kuat atas perekonomian dan masyarakat.[114] Oposisi terhadap kecenderungan-kecenderungan seperti ini tidak terbatas pada kalangan sipil saja. Para perwira militer, yang sebagian dari mereka lebih muda dan profesional lulusan Akademi Militer Nasional di Magelang—yang didirikan pada 1957—dan sekarang mulai menduduki posisi-posisi senior, melihat perkembangan-perkembangan ini sebagai pengaruh tak sehat di kalangan para eselon senior ketentaraan—yang dikenal dengan sebutan angkatan 45—yang menggoda mereka untuk berkhianat pada cita-cita revolusi.

Terlebih lagi, para perwira muda ini menjadi semakin gelisah dengan ekses-ekses korupsi serta kegagalan-kegagalan manajerial yang terkait dengan para jenderal yang "mengerumuni" Suharto serta kemungkinan dampak dari semua ini pada tingkat legitimasi politik serta kelanggengan Orde Baru. Mereka yang sesekali juga dibuat jengkel oleh kegiatan-kegiatan politik kelompok Suharto ini—yang menimbulkan masalah di lapangan bagi para panglima di daerah—berupaya menciptakan pola-pola perilaku militer yang lebih teratur dan profesional.

Sejalan dengan hal ini, muncul kritik di kalangan sipil maupun para perwira yang 'berpikiran profesional' ini; kritik yang berfokus pada dampak-dampak sosial yang fatal dari modal asing, terutama Jepang, yang diduga dapat berakibat pada hilangnya kemandirian maupun semangat bangsa. Atmosfir ini otomatis mengarah kepada orang-orang dekat Suharto, yang dipandang sebagai dalang dari permasalahan saat itu serta yang paling banyak memetik manfaat dari penerapan modal asing. Perwujudan hal

seperti ini di kalangan militer berpusat di seputar orang-orang seperti Sumitro, Sutopo Yuwono, pesaing lama Ali Murtopo dalam urusan intelijen serta dalam konteks yang lebih sempit, lulusan Magelang yang berusia lebih muda, Sayidiman Suryohadiprojo, wakil kepala staf Angkatan Darat; mereka semua adalah para pemimpin informal dari 'para profesional' yang populer dijuluki sebagai 'kelompok Hankam'. Tanggapan pemerintah atas atmosfir perpecahan ini adalah sering kali dengan menyebut bahwa kekacauan tersebut pasti ada kaitannya dengan upaya-upaya subversi yang didalangi komunis. Namun, Suharto sendiri sadar akan dampak-dampak pengaruh budaya asing dan jarak yang semakin jauh dari cita-cita pokok dan mendasar revolusi terhadap identitas kalangan muda. Ia pun kemudian menegaskan bahwa "masyarakat harus dapat merasakan hasil pembangunan," dan bahkan membangkitkan momok "'revolusi sosial' ... mungkin timbul jika hasil pembangunan nasional tidak dapat meningkatkan taraf hidup rakyat."[115]

Menjelang 1973, kecaman-kecaman atas Orde Baru semakin menguat ketika para mahasiswa yang terpusat di Jakarta dan Bandung mengambil sikap yang terus mempertanyakan landasan dan orientasi dasar Orde Baru. Pada tingkat yang lebih tinggi, kecaman-kecaman ini prihatin atas apa yang dianggap sebagai ciri tiadanya roh dan pragmatisme di pusat kekuasaan Orde Baru. Pada 1969, Nasution menyatakan kepada seorang akademisi Australia yang berkunjung bahwa "kita tidak bisa terus-terusan mengabaikan masalah ideologi."[116] Yang ia maksudkan adalah bahwa Orde Baru hanya berupaya menyingkirkan perpecahan melalui dekrit, bukan melalui proses debat yang bisa diterima nalar, atau melalui kompromi, lewat penggantian kepedulian ideologis dengan pragmatisme kering. Pada kesempatan lain, Nasution mengatakan bahwa, tidak ada "pandangan baru", hanya "strategi lama. Yakni stabilisasi dan pembangunan ekonomi."[117]

Sementara gaya politik seperti ini boleh dibilang memiliki daya tarik tertentu setelah drama tingkat tinggi pemerintahan

Sukarno, menjelang 1970 gaya ini jadi membosankan, menjengkelkan, dan sangat tidak memuaskan kelompok-kelompok—yang mulai tiba pada kesimpulan—bahwa kepercayaan mereka di awal kepada Suharto benar-benar salah alamat. Suharto sendiri mulai makin mengambil jarak dari masyarakat; bahkan sejak awal dekade 70-an, ciri khasnya dalam berinteraksi dengan pers menjadi semakin jelas: para menteri, ajudan, pejabat senior, dan jenderal akan ikut serta dalam pembicaraan-pembicaraan dengannya, biasanya di rumahnya di Jl. Cendana. Mengenai kehadiran mereka ini, mereka akan memberi penjelasan pada media tentang isi pembicaraan mereka, menjadi saluran untuk menyampaikan pandangan-pandangan Suharto tentang masalah-masalah politik, sosial, dan ekonomi. Cara kontak langsung yang begitu berhasil ia gunakan di pertengahan dan akhir dasawarsa 60-an pun mulai menyurut.

JALAN MENUJU PEMILU KEMBALI

Namun, para pengecamnya, baik dari kalangan sipil juga kelompok "profesional" dari kalangan militer, tetap saja relatif kecil baik dalam jumlah maupun pengaruhnya. Dengan rampung dan berhasilnya pemilu, Suharto bersiap-siap menjalani sisa masa jabatan kepresidenannya, dan malah mempersiapkan diri untuk masa jabatan berikutnya. Langkah pertamanya adalah merombak kabinet pada September 1971 dengan mengurangi wakil ABRI dalam kabinet menjadi tinggal lima—untuk menutupi keadaan sebenarnya, yaitu dominasi besar tentara atas pemerintahan. Pengangkatan anggota kabinet adalah kemenangan bagi para teknokrat, dengan ditunjuknya Sadli, Wijoyo, dan Emil Salim untuk memimpin, masing-masing, tenaga kerja, perencanaan dan pengembangan, serta aparat negara. Tujuh dari para penasihat ekonomi Presiden sekarang duduk dalam kabinet, dan yang kedelapan, Radius Prawiro, diangkat sebagai gubernur bank sentral.

Dua perubahan menonjol dilakukan, salah satunya menyangkut pengangkatan Prof. H. A. Mukti Ali sebagai menteri agama—untuk pertama kalinya dalam 18 tahun kementerian ini tidak dipimpin oleh seorang pemimpin NU; hal ini menjadi petunjuk dominannya sikap sekuler Suharto terhadap Islam dalam politik—Panggabean sebagai menteri negara yang membantu Presiden dalam hal pertahanan dan keamanan, dengan sebutan wakil panglima ABRI. Langkah kedua Suharto, yang sudah diperkirakan sejak lama, adalah pembagian parlemen menjadi empat fraksi, sebuah pengaturan yang diformalkan pada awal 1973 dengan dibentuknya dua partai baru guna memasukkan peran-peran yang dimainkan oleh sembilan partai yang ada. Sistem partai yang lama pun mati; dan kini terkubur.

Pada Maret 1973, dengan digelarnya pengamanan militer ketat, MPR bersidang untuk pertama kalinya sejak 1968 guna menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya. Nasution tidak lagi mengetuai lembaga ini. Karena tidak perlu lagi dilunakkan, ia pun disingkirkan dari peran sebelumnya melalui mekanisme sederhana, yaitu, dengan tidak lagi menunjuknya. Untuk pertama kalinya, MPR mendengarkan pidato pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Suharto, penjelasan tentang pelaksanaan mandat yang dipercayakan kepadanya pada 1968. Dalam pidato yang lamanya tiga-jam, ia memuji prestasi-prestasi masa jabatan pertamanya, terutama kemajuan di bidang ekonomi serta stabilisasi politik, selain juga mengulang beberapa tema usang: pendekatan yang hati-hati namun tidak menyesali masalah pemulihan hubungan dengan Cina, berlanjutnya ancaman komunisme, perlunya menerima warga Indonesia keturunan Cina sebagai warga negara Indonesia.

Setelah mengesahkan kinerja Presiden, Sidang Tahunan MPR berlanjut secara analitis dan dingin—prosesnya cuma memakan waktu delapan menit—untuk mengesahkan pencalonan kembali dirinya tanpa ada suara yang menentang serta pemilihan kembali dirinya untuk masa lima tahun berikutnya—yang untuk pertama

kalinya MPR melakukan tugas ini—serta untuk memilih wakil presiden. Pilihan Suharto, Sultan Hamengkubuwono, orang yang sangat disukai rakyat, tak mengalami masalah. Dengan menyempurnakan tugasnya, MPR memperpanjang kekuasaan Supersemar Suharto, menetapkan mekanisme penggantiannya bila presiden dan wakil presiden berhalangan dalam melaksanakan tugas-tugas mereka, serta mengajukan dokumen—yang sudah disiapkan oleh pemerintah (atas mana, Suharto menyatakan, bahwa ia ikut menyumbang dengan "mengumpulkan bahan dari berbagai lapisan masyarakat dengan cara yang demoratis")[118]—yang menetapkan garis-garis besar haluan negara.

KESIMPULAN

Meski ada masalah-masalah yang secara bertahap kian menumpuk seputar dirinya, Suharto sekarang tampaknya kebal serangan, dibentengi di satu sisi oleh kekuasaan militer dan, di sisi lain, oleh penerimaan tanpa protes kalangan sipil terhadap rezimnya secara umum. "Sesudah semua pergolakan yang melelahkan itu," seorang pengamat mengomentari, "pemerintahan yang kuat dan memiliki tujuan adalah apa yang jelas dimaksudkan oleh sebagian besar rakyat Indonesia, yang mungkin jelas sangat berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh beberapa intelektual."[119] Kabinet Pembangunan Keduanya, yang diumumkan pada malam 27 Maret 1973, adalah masalah penghalusan saja.

Profesor Sumitro Joyohadikusumo, "yang terlalu menonjol sebagai primadona,"[120] serta koneksi-koneksi lamanya di PSI juga menjadi sumber antagonisme saat itu, diturunkan dari pos Perdagangannya ke portfolio Riset yang kurang penting, namun cengkeraman para teknokrat atas badan-badan pengembangan tetap saja kuat. Selain Sumitro Joyohadikusumo, para anggota kabinet lainnya antara lain adalah Ali Wardhana (menteri keuangan), Radius Prawiro, Sadli, Emil Salim, dan Subroto, dengan Wijoyo memegang peran sebagai menteri koordinator untuk ekonomi,

keuangan dan industri, selain juga ketua Bappenas. Kabinet baru ini memiliki orientasi yang sangat konservatif, memberi tekanan pada stabilitas dan melanjutkan serta meningkatkan arah-arah yang diambil oleh kabinet pertama. Di samping itu, kabinet ini juga ditugaskan untuk menyelenggarakan pemilihan umum kedua Orde Baru selambat-lambatnya pada 1977.

Masa jabatan kepresidenan pertama Suharto ditandai oleh masa-masa kreativitas politik yang profetis sekaligus menakutkan. Berkebalikan dengan tuduhan-tuduhan yang dinisbahkan kepadanya bahwa ia adalah seorang pemimpin yang kelewat pragmatis, reaktif dan kaku, ia secara bertahap, mengembangkan dengan sistematis dan terarah sistem politik yang sama sekali baru dan mewujudkan serta menerapkan pemahaman uniknya tentang struktur yang tepat bagi Indonesia maupun keinginan sejati rakyatnya.

Kebijakan-kebijakan ekonomi yang ia pimpin, termasuk "kisah sukses Repelita I",[121] menghasilkan laju pertumbuhan yang mengesankan, sangat didukung oleh aliran modal asing, perluasan ekspor yang sangat besar—sebagian besar kayu dan minyak—serta *boom* dalam produksi beras (walau sempat ada kegagalan panen luar biasa pada 1972) yang menjanjikan swasembada menjelang pertengahan dasawarsa tersebut.

Orde Baru Suharto, sudah tentu, adalah bangunan yang awet namun, seperti yang akan kita lihat, dibangun di atas serangkaian kontradiksi baik dalam struktur dan dampak yang akan, pada akhirnya, membuatnya tumbang. Sinyal pertama atas permasalahan-permasalahan inherennya mulai muncul menjelang akhir tahun 1960-an. Namun, Suharto tidak melakukan hal positif untuk melindungi dirinya dari mendung kecaman dan serangan yang semakin menebal. Memang, ia dan kelompoknya yang berkuasa, sekarang terikat erat dan semakin terasing dari masyarakat yang mereka perintah, mencoba meremehkan atau mengabaikan maupun menepis begitu saja kecaman-kecaman terhadap gaya dan substansi pemerintahannya, serta menindas mereka yang menganut gagasan-gagasan itu. Meski kepemimpinan serta kelanggengan

pemerintahannya tak bisa dipungkiri, ia menghadapi dasawarsa panjang yang penuh perjuangan dan pergolakan dalam mempertahankan posisi serta keutuhan visinya tentang Indonesia.[]

8 Menegosiasikan Permasalahan Orde Baru 1973–1983

Awal masa kepresidenan kedua Suharto diwarnai oleh periode pergulatan politik dalam negeri yang sengit serta lama, berbeda dari yang pernah ia alami selama masa *status quo* pasca-Gestapu bersama Sukarno, maupun masa yang lebih ringan yang membuatnya berhasil mereorganisasi struktur politik Indonesia secara mendasar. Ciri khas tahap ini—kecuali periode kejatuhannya yang merupakan tahap paling menentukan, tahap yang sulit dan berbahaya selama kekuasaannya yang panjang—adalah terkonsolidasinya serta paling sengitnya penerapan logika Orde Baru selain berhasilnya penyingkiran atas mereka yang berupaya menangani politik Indonesia dengan cara berbeda. Namun, Suharto tidak menyadari bahwa pertempuran terbesarnya adalah menghadapi mereka yang pernah ikut mendukungnya dalam perjalanannya meraih kekuasaan. Dan memang, ketika krisis silih berganti mendera, Suharto menunjukkan rasa heran bercampur kemarahan yang semakin memuncak dan sikap yang menekan, mengapa rakyat serta para pendukungnya dulu malah memilih untuk berbalik mengancam, menentang, bahkan mengkhianati, visi Indonesianya.

JALAN MENUJU MALARI

Ketika Orde Baru beranjak memasuki usia dewasa, tanda-tanda munculnya korporatisme pun semakin kentara. Gejala-gejala ini mewujud, seperti telah kita sebut sebelumnya, dalam pembentukan payung tunggal bagi semua serikat buruh di Indonesia, Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI), tugas yang dilaksanakan dengan maksimal oleh Subroto dalam kapasitasya sebagai menteri tenaga kerja—serta mendapat pujian dari Suharto. Menjelang pertengahan tahun 1974, Subroto melapor kepada Suharto tentang terbentuknya dewan manajemen FBSI di 23 provinsi di Indonesia. "Buruh dan perusahaan," ujar Suharto pada 1975, "bukan merupakan kekuatan yang harus saling berhadap-hadapan, melainkan sebagai kawan seperjuangan yang bersama-sama bertujuan membangun Indonesia." Dengan demikian, pemogokan bukan saja tidak perlu, tapi tidak sesuai dengan perburuhan yang berdasarkan Pancasila. Pendidikan juga menjadi sasaran korporatisme karena tanpa "pendidikan yang mempunyai dasar dan tujuan Pancasila," ujar Suharto, "tidak mungkin pula kita dapat membangun masyarakat yang berdasarkan Pancasila." Seluruh rakyat Indonesia, ujarnya tak lama kemudian, harus "memasyarakatkan Pancasila dan mempancasilakan masyarakat."[1]

Korporatisme yang semakin bangkit juga tampak dalam pengembangan Golkar pascapemilu. Dalam kongres nasional pertama kelompok ini di Surabaya, Suharto, yang disertai satu rombongan menteri senior dan Aspri serta para tokoh ABRI, membuka acaranya dan mengukuhkan kekuasaannya atas organisasi tersebut. Sebagai sesepuh Golkar, Suharto memiliki kewenangan dalam menentukan keanggotaan dewan pimpinan pusat. Kemitraan ABRI dengan Golkar ditegaskan dengan sangat jelas. Namun demikian, peran Golkar tetap saja, dan memang disengaja, bersifat kabur dan tidak jelas. Tapi, Suharto sendiri cukup jelas melihat bahwa Golkar tak lebih dari sekadar wahana kelembagaan untuk menghimpun dukungan rakyat secara periodik, dan sama sekali

tidak merasa bahwa Golkar perlu memulai proses memperluas akar serta mengembangkan opsi-opsi sebagai masukan dalam proses kebijakan.

Namun, pada saat yang sama, seperti yang telah kita saksikan, tanda-tanda persaingan di kalangan elite pun mulai tampak—yang paling mencolok adalah upaya-upaya kelompok Hankam reformis yang pelan-pelan bergabung di sekitar Panglima Kopkamtib Sumitro. Kelompok ini sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai PSI, yang sangat ingin mempertahankan dan memelihara profesionalisme Angkatan Darat (apalagi kini dengan siap sedianya dana resmi untuk menjalankan hal itu) serta menghimpun dukungan dari kalangan para perwira muda yang memiliki pendidikan akademis—maupun basis yang lebih luas. Kelompok ini pada prinsipnya berupaya membatasi gerak bebas yang diberikan Suharto pada kelompok Murtopo/Sujono khususnya, serta para perwira "politik" dan "keuangan" pada umumnya—yang berusaha keras memperluas kekuasaan Angkatan Darat dalam politik, bisnis, dan masyarakat umumnya, selain telah memetik manfaat cukup besar dari strategi-strategi patronase politik Suharto. Kelompok Hankam ini meraih keberhasilan pertamanya pada kongres Golkar dengan terpilihnya Jenderal Amir Murtono sebagai ketua pertama Golkar—langkah yang bertujuan melemahkan upaya-upaya Ali Murtopo dalam mengembangkan organisasi ini untuk menjadi kendaraannya sendiri. Namun, Suharto tidak mau membiarkan mereka bergerak terlalu jauh sehingga membahayakan keseimbangan. Suharto menolak upaya Sumitro untuk mengangkat calon favoritnya, Charis Suhud, menjadi wakil panglima Kopkamtib, dan sebaliknya mengangkat konco lamanya, Laksamana Sudomo yang juga dekat dengan Murtopo.

Langkah-langkah ini memperlihatkan kepercayaan diri yang semakin matang dari Suharto terhadap posisi serta gengsinya, selain juga perhatiannya pada peran sentral yang bisa ia mainkan. Jakarta waktu itu dengan cepat menjadi mercusuar bagi para pemimpin dunia, baik dari negara-negara industri maju (yang ingin sekali

menawarkan pinjaman serta melakukan investasi di Indonesia baru) atau dari negara berkembang (yang ingin mencari tahu bagaimana ekonomi yang sebelumnya berantakan itu dapat—dengan begitu menakjubkan—diremajakan kembali).

Posisi sentral Suharto, seperti yang telah kita lihat, juga tercermin dalam pelembagaan dan pelestarian gayanya dalam berkomunikasi dengan rakyat. Kini, setiap pertemuan-pertemuan kabinet atau forum-forum lainnya, atau sesudah pembahasan dengan menteri-menteri atau para tokoh lainnya yang berkumpul, rincian dari materi yang dibahas dibagikan oleh orang yang diajak Suharto berbicara—atau juru bicara yang ditunjuk—kepada kalangan media yang berkerumun menunggu. Suharto sendiri, meski sering muncul di depan umum, menjadi semakin enggan berhadapan dengan pers secara langsung.

Penampilan Suharto yang semakin bersifat pribadi itu berkembang sejalan dengan tumbuhnya ketidaksenangan publik terhadap kebijakan serta arah pemerintahannya—khususnya tentang sistem patronase tentara yang, sejalan dengan meningkatnya arus investasi asing, terutama dari Jepang, dalam manufaktur, merugikan prospek perekonomian para pengusaha dan pekerja setempat. Keresahan sipil yang semakin terasa, tampak dari kerasnya kerusuhan anti-Cina yang terjadi di Bandung pada 5 Agustus 1973—yang sebenarnya berawal dari kecelakaan lalu-lintas yang tidak begitu berarti. Kelompok-kelompok liar pun mengamuk, menjadikan toko-toko dan rumah-rumah warga keturunan Cina sebagai sasaran mereka, serta merusak lebih dari 1.000 bangunan, selain juga membakar mobil. Kerugian akibat kejadian ini dilaporkan hampir mencapai US$3 juta.[2] Tiadanya kesungguhan dari tentara Divisi Siliwangi setempat dalam memulihkan ketertiban—setelah hampir sembilan jam, mereka baru merespons—tampaknya menunjukkan adanya simpati terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan massa serta, yang lebih umum dan serius, ketidaksenangan yang cukup besar terhadap apa yang mereka rasakan sebagai kebijakan-

kebijakan pemerintah yang berpihak pada kepentingan warga Cina keturunan maupun perusahaan-perusahaan asing.

Suharto juga tidak lamban dalam menangkap makna atas apa yang terjadi dan dalam mengambil tindakan tegas untuk membatasi kerusakan akibat kerusuhan itu. "Pemerintah akan menindak tegas semua yang terlibat dalam kerusuhan itu," ujarnya.[3] Ia memanggil Sumitro untuk memberi penjelasan pada kabinet mengenai insiden tersebut, dan berhati-hati sekali dalam menekankan perlunya integrasi nasional. Ia juga "menginterogasi" Gubernur Jawa Barat, Solihin, dan memaksanya memberi jaminan bahwa kejadian-kejadian seperti itu tidak akan terjadi lagi di masa mendatang.

Wujud perpecahan politik lain pada paruh kedua tahun itu adalah heboh sehubungan dengan upaya pemerintah memberlakukan undang-undang pernikahan yang seragam. RUU revisinya yang, antara lain, menerapkan pembatasan-pembatasan baru atas perceraian dan poligami, pada dasarnya adalah pekerjaan Ali Murtopo dan lembaga *think-tank*-nya (Centre for Strategic and International Studies, didirikan pada awal 1970-an), dan disusun tanpa mengacu maupun meminta nasihat alim-ulama. RUU pernikahan ini, yang merupakan bagian dari strategi besar Murtopo dalam mendepolitisasi masyarakat serta memperkuat sekuleritas 'rasional'-nya, tak ayal mengundang badai protes dari para politisi dan pemimpin muslim yang melihat hal tersebut sebagai penghinaan terhadap nilai-nilai Islam serta ancaman umum terhadap stabilitas sosial—meski Suharto membantah dengan tegas bahwa RUU tersebut menyinggung asas-asas Islam.[4]

Kedua insiden tersebut mengkristalkan keresahan dan kecaman yang semakin meningkat atas sikap-sikap pemerintah. Para mahasiswa menjadi semakin vokal dalam menyerang apa yang mereka pandang sebagai hilangnya rasa akan moralitas nasional (terbukti dengan banyak munculnya kasino dan panti-panti pijat di Jakarta) serta kedaulatan atas kekayaan bangsa. Mereka menggunakan peristiwa-peristiwa seperti penyusunan "Petisi 24 Oktober"

oleh para mahasiswa Universitas Indonesia serta kunjungan menteri pengembangan dan kerja sama Belanda, Dr. J. P. Pronk, pada pertengahan November, untuk memaksimalkan dampak politik persepsi-persepsi mereka tentang korupsi dan investasi asing.[5] Selain menuntut suara yang lebih besar dalam masalah-masalah nasional, para mahasiswa menjadikan badan-badan seperti Aspri sebagai sasaran mereka—badan yang mereka anggap menghambat dampak aspirasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Suharto sendiri dengan gigih membela kebijakan-kebijakan pembangunannya, dengan mendekatkan keterkaitan pembangunan dengan agama;

> Pembangunan dan agama adalah senafas) ... agama tanpa pembangunan tidak akan maju, sedangkan pembangunan tanpa agama akan salah arah ... pembangunan selamanya mengakibatkan perubahan-perubahan yang apabila kita tidak berhati-hati dapat merosotkan martabat manusia. Dalam hal ini, ajaran-ajaran moral dan kesusilaan yang ditunjukkan oleh agama akan merupakan benteng kokoh yang akan menghindarkan kita dari akibat-akibat samping yang buruk dalam melaksanakan pembangunan itu.[6]

Suasana tidak puas yang muncul memberi peluang pada kelompok Hankam Sumitro, mungkin terkejut dengan kejadian-kejadian di Thailand pada Oktober 1973 yang mengakibatkan jatuhnya pemerintahan PM Thanom Kittikachorn yang didominasi militer itu, dalam memosisikan diri mereka untuk memperoleh simpati rakyat. Meski Sumitro menjabat sebagai Panglima Kopkamtib, ia tidak mengambil langkah-langkah efektif dalam mengendalikan protes-protes yang kian menguat itu. Dan memang, kehadirannya yang teratur juga mewarnai kegiatan di kampus-kampus pada November di mana ia berbicara dengan menyebut-nyebut "pola kepemimpinan baru", pemerintah yang lebih peka terhadap pendapat masyarakat, dan perlunya komunikasi "dua-arah" antara rakyat dan pemerintah—ungkapan-ungkapan yang tak dapat dihindarkan lagi kian mengundang eskalasi kegiatan mahasiswa.[7]

Sambutan mahasiswa terhadap Sumitro sangat kontras dan mencolok sekali dengan apa yang diterima oleh para teknokrat ketika mereka berupaya meredakan ketakutan mahasiswa akan arah kebijakan perekonomian; demikian kerasnya Sumitro Joyohadikusumo ditantang pada sebuah pertemuan di Institut Teknologi Bandung, sampai-sampai ia terpaksa harus meninggalkan kampus.

Bersama-sama dengan Kepala Bakin SutopoYuwono, Jenderal Sumitro juga memainkan peran sebagai perantara dalam masalah undang-undang pernikahan yang diusulkan itu, serta memaksakan solusi kompromi dengan kelompok-kelompok muslim yang menjadi basis UU baru tersebut—yang disahkan parlemen pada Desember. (Yang agak ironis, jika melihat situasinya saat itu, Suharto kelak menyatakan bahwa disetujuinya RUU tersebut adalah berkat jasanya.)[8]

Sikap Sumitro yang berbeda itu adalah tantangan nyata yang pertama terhadap keunggulan Suharto sejak masa-masa awal Orde Baru. Sikap ini merupakan perpaduan antara sikap yang kurang begitu lihai dalam menjauhkan diri dari rezim, serangan terhadap (dan bahkan mendorong yang lain agar mengecam) orang-orang yang dekat dengan Suharto, terutama kelompok Aspri dan, khususnya Ali Murtopo (yang perilaku busuk dan suka campur tangan serta konsep-konsep pembangunan antiteknokratnya disebut sebagai penyebab kemerosotan sosial dan moral dalam pelaksanan kebijakan-kebijakan perekonomian Orde Baru), dan upaya terang-terangan merayu kelompok-kelompok disiden sosial penting, para mahasiswa, kelompok-kelompok muslim, serta pers yang baru mulai menunjukkan kegigihannya. Sumitro juga secara resmi menyetujui pagelaran drama oleh penyair W.S. Rendra yang kritis terhadap pemerintah, bahkan mensponsori kunjungan pers ke kamp tahanan politik di Pulau Buru.

Sementara itu, Ali Murtopo dan Sujono Humardani sendiri bereaksi dengan melancarkan serangan-serangan terhadap visi pengembangan Indonesia dari para teknokrat—yang wujud paling kuatnya diwakili oleh Bappenas. Upaya-upaya Suharto yang tam-

paknya keras dan cepat dalam mendisiplinkan Sumitro serta memulihkan hubungan kerja dengan Murtopo, dimulai pada November dan mencapai puncaknya pada hari-hari pertama bulan Januari 1974, ternyata tidak berhasil. Sumitro terus saja menjalankan upaya menghimpun dukungan lebih lanjut di kalangan para tokoh militer yang dikucilkan seperti Nasution serta Sarwo Edhie selama dua minggu sesudahnya.[9] Drama politik yang tengah berlangsung ini mencapai titik akhir dalam kerusuhan serius yang dikenal sebagai peristiwa Malari yang terjadi pada pertengahan Januari.

Peristiwa langsung yang memicu terjadinya kerusuhan adalah kunjungan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka. Arti penting kunjungan simbolis ini—penetrasi ekonomi Jepang ke perkotaan Indonesia dalam bidang-bidang seperti peralatan listrik dan kendaraan saat itu sudah semakin nyata—dalam konteks persaingan politik antara Sumitro dan Ali Murtopo, serta salah perhitungan Sumitro atas dampak keamanan keputusannya sendiri dalam membebaskan protes para mahasiswa terhadap korupsi, serta apa yang mereka lihat sebagai pengaruh tidak wajar yang dimainkan oleh para tokoh senior seperti Ali dan Sujono, berakibat pada demonstrasi-demonstrasi besar. Demonstrasi ini dengan cepat berubah menjadi kerusuhan terbuka (yang praktis dimanfaatkan oleh kelompok besar kaum miskin dan papa Jakarta), mengakibatkan tewasnya 11 orang, terlukaberatnya hampir 200 orang, dan ditahannya lebih dari 800 orang, serta meluasnya kendaraan dan bangunan yang dirusak (termasuk dibakarnya *showroom* Astra Motor Corp di pusat kota Jakarta serta pusat perbelanjaan Senen pada hari berikutnya). Suharto pun terpaksa menggunakan helikopter untuk mengantar keberangkatan pulang tamu perdana menterinya ke bandar udara pada pagi tanggal 17 Januari.

Spekulasi Sumitro untuk mempermalukan Ali dan Sujono ternyata berbalik membawa bencana ketika kerusuhan itu menjadi tak terkendali. Motif-motif Sumitro pun sampai sekarang masih tetap belum jelas; penggunaan demonstrasi-demonstrasi itu mung-

kin juga menjadi alasan untuk menahan Ali dan Sujono, dan mengakhiri karier politik mereka, dengan tujuan merebut status—tidak diragukan lagi—sebagai orang kedua paling kuat dalam rezim tersebut—dan bahkan, mungkin juga menggunakan situasi tersebut sebagai batu loncatan untuk rencana yang lebih besar yaitu menggeser Suharto sendiri (tuduhan yang dibantah dengan sengit oleh Sumitro). Apa yang diperkirakan Sumitro sebagai wujud ketidaksenangan rakyat terhadap Ali dan Sujono ternyata berkembang menjadi momok keamanan yang serius dan bahkan mungkin meningkat menjadi sesuatu yang lebih mencekam seandainya ia meneruskan spekulasinya.

Suharto pun bereaksi cepat terhadap kerusuhan 15-16 Januari yang memalukan itu, yang ia akui kemudian sebagai akibat dari pergulatan kekuasaan antara bagian-bagian dari angkatan darat dengan Ali dan Sujono, di mana kedua pihak sama-sama bersalah. Sesegera mungkin ia memimpin pertemuan kabinet yang intinya membahas krisis tersebut, sekembalinya dari mengantar Tanaka ke Bandar udara. Sumitro praktis diberhentikan sebagai panglima Kopkamtib pada akhir Januari, dan pada bulan Maret dipaksa untuk mengundurkan diri dari jabatan sebagai wakil panglima ABRI. Berbeda dengan pola normal bagi para perwira yang melanggar batas dan kemudian digeser, Sumitro menolak tawaran Suharto untuk posisi duta besar di Washington. Mereka yang dekat dengan Sumitro dalam kelompok Hankam, terutama Sutopo Yuwono, Kharis Suhud, dan Sayidiman, juga digeser dari jabatan-jabatan yang berpengaruh dan disisihkan ke jabatan duta besar serta tugas-tugas serupa yang ringan dan tanpa kekuasaan. Sanksi ringan yang dikenakan terhadap mereka, selain keputusan Suharto untuk mengganti Sumitro dengan Surono sebagai wakil panglima Angkatan Bersenjata, menunjukkan kekhawatiran Suharto bahwa aspirasi yang mereka wakili memiliki dukungan luas di kalangan Angkatan Darat—yang akan berarti tindakan yang sangat ceroboh bila ia menghadapinya terlalu keras. Suharto juga menggunakan kesempatan pertemuan dengan para wartawan senior untuk mem-

bantah keras laporan-laporan bahwa ia atau keluarganya, terutama Ibu Tien, memiliki hubungan dengan perusahaan-perusahaan besar.[10]

Suharto juga mengambil langkah-langkah cepat guna memperbaiki kekosongan kelembagaan yang terjadi. Sudomo ditugaskan menjalankan kendali operasional Kopkamtib yang, setelah Suharto mengangkat kembali dirinya sebagai panglimanya, kini ia pantau dengan awas untuk memastikan bahwa lembaga itu tidak lagi meneruskan kemandirian yang dimilikinya saat di bawah kepemimpinan Sumitro. Wewenang kekuasaan Ali Murtopo yang tampak tak terkendali itu pun dibatasi, setidaknya dalam arti bahwa kredibilitas dan keandalannya di mata bosnya berkurang—meski ia atau yang lain yang sepaham dengan Sujono dan Suryo tetap saja dekat dengan Suharto.

Suharto, yang tampak terkejut dengan akibat dari pertarungan serius pertama di dalam elite militer ini, juga berupaya membersihkan jajaran keamanan dan intelijen guna menguatkan cengkeraman kekuasaannya—dan untuk mengintegrasikan kegiatan-kegiatan mereka secara lebih ketat di bawah kendalinya. Benny Murdani, yang sudah berserah diri dan tampaknya nyaman dengan jabatan diplomatisnya di Korea Selatan, dengan cepat dipanggil pulang. Bertemu dalam kesempatan singkat dengan Suharto, ia diberi tahu bahwa ada "masalah kepemimpinan", dan diinstruksikan menduduki posisi sebagai wakil kepala G-1 di Hankam guna menyelesaikan aspek-aspek intelijennya.[11] Yoga Sugama, yang dibiarkan santai sebagai wakil Indonesia di PBB sejak 1971 setelah skandal kecil yang menimbulkan perselisihan dengan Suharto, juga dipanggil pulang untuk mengepalai Bakin menggantikan Sutopo Yuwono. Guna mengalihkan perhatian publik dari pertengkaran antar elite tentara, penyebab kerusuhan itu ditimpakan pada para pendukung partai-partai lama PSI dan Masyumi. Sejumlah warga sipil yang dituduh sebagai agitator ditahan atas tuduhan subversif, termasuk tokoh-tokoh yang ada hubungannya dengan PSI seperti Sarbini Sumawinata dan Subadio Sastrosatomo; sebagian dari mereka, termasuk para pemimpin mahasiswa Hariman Siregar dan

Syahrir, dijatuhi hukuman penjara yang lama sementara yang lainnya ditahan tanpa peradilan selama lebih dari dua tahun. Sebagai penutup, Suharto mengeluarkan instruksi presiden yang melarang anggota Angkatan Bersenjata dan pegawai pemerintah memasuki tempat-tempat perjudian, kelab malam, dan tempat-tempat mandi uap, serta membatasi hak-hak istimewa resmi mereka.[12]

Lebih umum lagi, Suharto bersiap memperkenalkan langkah-langkah baru sejenis sistem perekonomian nasionalis, yang dirancang untuk meredakan santernya kecaman yang dilancarkan atas tindakan-tindakan para asistennya maupun arah kebijakan perekonomian. Hanya seminggu sesudah kerusuhan tersebut, tampaknya atas instruksi langsung dari Suharto, perubahan-perubahan pun diterapkan guna memperketat persyaratan investasi asing beserta lingkup maupun cara-cara beroperasinya, dan guna membantu pengusaha pribumi dalam keikutsertaan dan kepemilikan bisnis. Ia juga berupaya mendisiplinkan gaya hidup para perwira serta membatasi impor barang-barang konsumsi yang mencolok, dan memperbaiki tingkat hidup para serdadu biasa "yang sikap ramah mereka terhadap para demonstran mahasiswa mulai mengundang kekhawatiran."[13] Pada Mei 1975, misalnya, Suharto memberlakukan pembatasan terhadap registrasi mobil-mobil mewah impor, dalam rangka menggalakkan "cara hidup sederhana" dan juga agar orang-orang kaya "tidak lagi memamerkan kekayaan mereka".[14] Yang lebih spesifik, pada akhir Januari Suharto menghapuskan lembaga Aspri yang beranggotakan empat-orang itu, yang di mata banyak kalangan kelas menengah Indonesia merupakan simbol isolasi congkak pemerintah. Sementara itu, Panggabean dan Yoga Sugama ditugaskan melakukan perjalanan luar negeri yang dimaksudkan untuk meyakinkan kembali para investor akan keamanan komitmen-komitmen mereka.

Yang paling penting dari semua ini, Suharto menyadari bahaya akut yang timbul jika persaingan di kalangan elite tentara terus dibiarkan menggelegak tanpa henti dan apalagi, mengizinkan

mereka yang dekat dengan dirinya memiliki landasan kekuasaan dalam menjalankan kebijakan publik, bahkan yang secara samar-samar terpisah dari kemudahan darinya namun yang dengannya ia mungkin bisa terancam. Dan ia pun tak pernah membuat kesalahan yang sama lagi.[15] Sementara gaya pemerintahannya yang terdahulu diwarnai oleh kecenderungan ke arah sikap pasif dan mengambang pada saat keadaan berjalan normal, kini ia mulai menyadari bahwa ia harus selalu, dan untuk seterusnya, awas secara politis maupun manajerial.

Hasilnya adalah struktur kekuasaan menyempit yang jauh lebih ketat lagi pada puncak Orde Baru, di mana Suharto menempatkan dirinya sebagai manajer utama. Para penasihat tetapnya benar-benar dibuat sadar bahwa jabatan mereka sepenuhnya bergantung pada itikad baik Presiden. Mereka tidak memiliki basis politik maupun kekuatan militer, tak punya sumber pengaruh apa pun kecuali yang diberikan Suharto kepada mereka. Sementara mereka saling bersaing, seperti atom-atom bebas yang mengelilingi nukleus, dalam memperoleh perhatian dan kemurahan hatinya—Suharto kadang-kadang mendorong persaingan di antara mereka untuk menguji gagasan-gagasan dan kebijakan-kebijakan serta untuk memastikan terpeliharanya semacam ketegangan kreatif di dalam jajaran mereka—mereka dibuat sama sekali tidak boleh melupakan dari mana sumber status, jabatan, maupun pengaruh mereka berasal. Mereka menyadari bahwa, sekali fungsi mereka sebagai agen-agen Suharto sirna, atau bahkan yang lebih penting lagi, sekali kepercayaan Suharto kepada mereka menguap, mereka sudah tidak punya masa depan politik lagi.

Terlebih lagi, insiden Malari semakin memperkuat alasan Suharto, itu pun kalau ia memerlukannya, untuk meneruskan pembangunan Orde Barunya yang bersifat korporatis tersebut. Bahayanya jika membiarkan ketidakpuasan dari kekuatan-kekuatan partisipatif yang berbasis-masyarakat, apakah itu dimanipulasi atau tidak, memengaruhi penanganan politik pada puncak kekuasaan

Orde Baru, sudah menjadi semakin jelas. Ketidakpuasan ini tidak akan dibiarkan muncul lagi. Menyusul peristiwa tersebut, Suharto membentuk Dewan Stabilisasi Politik dan Keamanan Nasional. Salah satu dari keputusan-keputusan awalnya adalah memberi subsidi royal pada partai-partai baru dan Golkar, selain juga membiayai kongres-kongres mereka. Insiden Januari tersebut melengkapkan gerak Orde Baru dari warna populis pada awalnya ke arah rezim di mana penindasan dan kekerasan menjadi instrumen penting dalam meredam setiap kecenderungan pluralis yang mungkin muncul, dan di mana penciptaan sebuah "masyarakat Pancasila" secara korporatis akan menjadi kepedulian utama.[16] Peran dari partai-partai dan Golkar, Suharto menjelaskan, adalah untuk menjadi "wadah penyaluran aspirasi-rakyat."[17] Sejalan dengan ini, episode Januari tersebut menegaskan sifat rezim yang eksklusioner dan menjamin lahirnya oposisi mandul yang merengut dan frustasi yang terdiri atas kalangan sipil (termasuk gerakan mahasiswa yang sudah dbuat takut) maupun anggota Angkatan Bersenjata. Satu wujud penting dari suasana yang semakin menguat itu adalah RUU 1974 tentang otonomi daerah, yang berjalan cepat dan berhasil menembus DPR dan yang, malah, merupakan sarana untuk meningkatkan pemerintahan yang terpusat, menetapkan sistem administrasi yang vertikal dan seragam di seluruh Indonesia—dengan memberi kekuasaan menentukan yang sangat luas kepada menteri dalam negeri dan memberi hak pribadi kepada Suharto untuk mengangkat gubernur-gubernur propinsi.

Jarak Suharto yang semakin besar dengan rakyatnya diimbangi dengan kepekaan yang semakin tinggi terhadap hal-hal yang menyentuh kehidupan pribadinya. Letupan emosi pada peresmian rumah sakit Pertamina pada 1972 merupakan contoh awal. Pada akhir 1974, polanya muncul kembali dengan penerbitan, telah disebutkan sebelumnya, tentang silsilah keluarga Suharto dalam majalah *POP*, mensinyalir bahwa ia masih keturunan keraton Yogyakarta. Dugaan-dugaan seperti itu sangat menyinggung Suharto yang sejak lama membangun citra dirinya sebagai seorang anak

petani yang berani dan tabah, yang berhasil dalam hidup meski menghadapi berbagai tantangan.

Tulisan itu juga membangkitkan, seperti yang telah kita lihat, masalah keabsahan orangtua Suharto. Ironisnya, tampaknya tulisan itu adalah upaya menyanjung yang dilakukan oleh Ali Murtopo (yang agen senior Opsusnya, Kol. Aloysius Sugianto, adalah pemilik majalah tersebut) untuk memperbarui kembali hubungannya dengan Suharto yang "mengalami cedera" akibat insiden Malari. Tanggapan Suharto, seperti yang kita ketahui sebelumnya, pedas dan tidak main-main. Dalam konferensi pers yang sudah dipersiapkan, ia menyampaikan pembelaan yang menggebu-gebu akan asal-usul petaninya, lengkap dengan mengumpulkan berbagai orang yang disebutnya sebagai kerabat untuk memberikan kebenaran lebih jauh. Yang menarik, dan tak sejalan dengan unjuk solidaritas keluarga yang mengesankan, Suharto sendiri tidak menjadikan kunjungan ke desa keluarganya itu sebuah kebiasaan, pun jika ia berada di dekatnya dalam urusan resmi berhari-hari di kawasan Yogyakarta.

Penjagaan jarak yang tergolong berbeda, namun dengan gaung pertanian serupa ("Saya sangat betah di lingkungan pertanian dan peternakan. Saya menghayatinya. Pengalaman semasa kecil menyebabkan saya menaruh perhatian besar pada soal-soal pertanian dan peternakan")[18] terjadi dengan dikembangkannya *ranch* Suharto pada 1974, Tapos. Ranch yang luasnya sekitar 700 hektar itu, dan yang awalnya merupakan perkebunan Belanda yang diambil-alih oleh negara, diberikan oleh gubernur Jawa Barat, Solihin G.P., untuk dipakai oleh Suharto dan dikelola oleh badan yang berbentuk perusahaan, PT Rejo Sari Bumi—Unit Tapos, saham-sahamnya dimiliki oleh anak-anaknya Suharto. Suharto segera mengembangkan Tapos menjadi semacam stasiun percontohan bagi eksperimen pertanian. Misalnya, pada Agustus 1975, ia menghadiahkan 10 ekor biri-biri Australia unggulan kepada enam bupati di Jawa Barat untuk digunakan sebagai pejantan dalam kegiatan pembiakan ternak di wilayah mereka masing-

masing. Suharto sangat bangga dengan *ranch*-nya, dan tak ada yang bisa membuatnya lebih senang selain saat memberi "kuliah" kepada para tamunya yang berkumpul—yang mungkin merasa bingung bercampur jemu, mendengarkan seluk-beluk beternak sapi atau hobi-hobi pertanian lainnya. Tapos merupakan selingan yang sangat disukai Suharto di tengah tuntutan pekerjaannya yang berat, yang semakin meningkat, serta mencakup jadwal peresmian pembukaan dan peresmian proyek-proyek baru yang tak ada hentinya—pabrik kimia, pabrik semen, pabrik plastik, dan bahkan lapangan golf—pada saat infrastruktur industri di Indonesia berekspansi dengan cepat.

Unsur utama keberhasilan Suharto dalam mengatasi krisis politik 1973–74 adalah arus pesat pendapatan dari minyak, yang mendanai anggaran belanja negara maupun mengatasi berkurangnya sumber pembiayaan pemerintah—dengan kemampuan belanja untuk berbagai proyek besar yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Minyak tidak saja memberi peluang lebih baik kepada para anggota elite Orde Baru dalam melakukan transaksi bisnis, tapi juga memompakan uang ke seluruh perekonomian serta menyediakan infrastruktur dan lapangan pekerjaan dengan skala yang jauh lebih besar, khususnya di kalangan kelas menengah perkotaan. Perusahaan-perusahaan dengan akses tingkat tinggi ke pusat kekuasaan pun berkembang subur: saudara laki-laki Ibu Tien, misalnya, diberi kontrak reboisasi yang besar di Sulawesi Selatan pada 1976; anak laki-laki Amirmachmud memperoleh kontrak besar pada 1978 untuk mengembangkan pasar baru di Ujung Pandang, yang dibiayai berdasarkan program Inpres (Instruksi Presiden). Konglomerat-konglomerat bisnis swasta pun, khususnya yang memiliki koneksi-koneksi politik yang menguntungkan, tumbuh dengan cepat.

Minyak membantu Suharto memperoleh apa yang kelak dijuluki dengan istilah "keabsahan kinerja". Tanpa minyak, situasinya mungkin merupakan bencana bagi perencanaan maupun struktur rezimnya. Namun, pada saat yang sama, *boom* minyak

ini sangat melemahkan pengaruh para teknokrat dalam menentukan arah kebijakan perekonomian. Disiplin-disiplin pasar murni yang diyakini dan dihayati para teknokrat menjadi kurang relevan lagi serta tak banyak mendatangkan keuntungan politik Kekuatan para teknokrat di saat-saat sebelumnya adalah kemampuan mereka dalam menyusun kebijakan-kebijakan yang bersahabat dengan kepentingan-kepentingan modal internasional sebagai sarana menarik Indonesia keluar dari kekacauan keuangan pada 1965. Pada saat uang minyak mengalir melimpah, peran sentral mereka di lingkup pembuatan kebijakan perekonomian pun menyurut drastis.

Pada saat Suharto memimpin peningkatan dan perincian gaya bagi-bagi rezeki pemerintahan, ia tetap saja terobsesi—hampir terkesan kekanak-kanakan—pada gagasan koperasi. Koperasi, komentarnya pada pertengahan tahun 1973, "mempunyai peranan yang besar dalam pembangunan Indonesia." Beberapa tahun sesudahnya ia menyatakan bahwa koperasi 'merupakan bentuk perekonomian yang paling baik untuk Indonesia."[19] Pada 1981 ia menekankan bahwa "dalam jangka panjang, koperasi harus menjadi sokoguru ekonomi nasional kita."[20]

Bersamaan dengan retorika koperasinya—dan yang makna utamanya terkait erat dengan gagasan tersebut—muncullah gagasan pengembangan yayasan-yayasan oleh Suharto. "Jelas bagi saya," ujarnya kemudian, "bahwa tidak seluruh masalah bisa ditangani oleh pemerintah ... kita perlu mencari tambahan dari luar pemerintah. [Dana-dana seperti itu] akan menjadi besar untuk melaksanakan pembangunan materiel."[21] Yayasan Beasiswa Supersemar, dana yang dimaksudkan untuk membantu para mahasiswa yang kekurangan biaya namun layak dibantu dengan jalan membiayai pendidikan mereka, didirikan pada 1974. Setahun sesudahnya, Yayasan Dharmais pun lahir. Didirikan "dengan maksud dan tujuan menghimpun dana yang dibutuhkan oleh semua panti asuhan," salah satu tujuannya kemudian adalah memberi bantuan kepada para janda dan anak yatim dari para prajurit yang terbunuh

di Timor Timur, selain juga para veteran yang cacat akibat konflik tersebut.[22]

TIMOR TIMUR

Sengatan kerusuhan Malari belum lagi mereda ketika ada masalah tak terduga yang muncul dan mengganggu Suharto. Revolusi April 1974 Portugis secara mendadak melahirkan kemungkinan dekolonisasi cepat oleh Portugal dalam suasana yang semakin meningkatkan kegelisahan Suharto dan para penasihat militernya—yang paling berpengaruh di antara mereka pada waktu itu berasal dari intelijen dan keamanan, dan bukan dari latar belakang operasional—karena dampaknya atas kawasan Indonesia maupun keamanan dan integritas dalam negeri.

Perkembangan cepat di Timor Portugis atas partai-partai politik setempat, yang terhimpun dan terkoordinasi seputar pilihan-pilihan politik bagi koloni tersebut—asosiasi dengan Portugal, integrasi dengan Indonesia, atau merdeka—sementara pihak berwenang Portugal yang juga lebih cenderung pada opsi kemerdekaan ingin secepatnya menghentikan kekuasaan mereka, membangkitkan ketakutan genting di kalangan elite keamanan Indonesia bahwa Timor Timur yang merdeka dan berhaluan kiri akan muncul di tengah-tengah kepulauan Indonesia.[23] "Kita ... sangat prihatin," komentar Ali Murtopo kepada seorang wartawan pada Oktober 1975, "bagaimana agar perkembangan di Timor Portugis tidak mengganggu keamanan dan stabilitas kita," dan khususnya prihatin bila Portugal kelak mendukung deklarasi kemerdekaan sepihak oleh Fretilin.[24] Ketakutan-ketakutan ini diperkuat oleh friksi serta instabilitas yang berlanjut di antara kelompok-kelompok partai Timor Timur, dan diwarnai oleh pecahnya pertikaian sipil yang timbul setelah upaya kudeta yang dilancarkan oleh UDT (Uni Demokratis Timor) pada 10 Agustus 1975 dan yang praktis membuahkan kemenangan penuh bagi pasukan Fretilin (Front Revolusioner Timor Timur Merdeka) pada awal September.

Pendekatan Suharto pada munculnya masalah Timor Timur didominasi oleh sikap hati-hati yang sudah menjadi cirinya. Malah sejak pertengahan 1974, Adam Malik telah meyakinkan utusan Timor, Jose Ramos Horta, bahwa Indonesia tidak berniat melibatkan diri dalam situasi tersebut. Pada Oktober, Suharto tampaknya mendukung pendirian tersebut dengan meyakinkan menteri koordinasi antar-wilayah Portugal, Almeida Santos, bahwa Indonesia tidak berniat mengolonisasi atau pun melakukan ekspansi ke wilayah Timor Portugis—meski ia tidak mengesampingkan kemungkinan berintegrasinya Timor-Timur ke Indonesia.[25] Pada April 1975, di Townsville, Queensland Utara, Suharto meyakinkan Perdana Menteri Gough Whitlam bahwa Indonesia tidak punya rencana atas wilayah tersebut dan membantah adanya niat mencari solusi militer terhadap masalah tersebut.[26] Namun demikian, pada awal Juli, sekembalinya dari Amerika Serikat, ia menegaskan secara resmi bahwa kemerdekaan Timor Timur bukanlah pilihan yang praktis.

Pada Agustus, ia menginstruksikan para perwira keamanan dan intelijennya agar mengikuti dengan cermat perkembangan di sana dengan harapan bahwa permasalahannya akan dapat diselesaikan secara langsung oleh rakyat Timor Portugis sendiri. Beberapa hari kemudian, dalam pidato kenegaraan memperingati Hari Kemerdekaan, ia sekali lagi menekankan bahwa Indonesia tidak memiliki ambisi territorial yang berkaitan dengan Timor Portugis, namun Indonesia membuka diri bagi prospek integrasi wilayah tersebut dengan Republik Indonesia jika rakyatnya menghendaki demikian.[27] Meski ia takut dengan bangkitnya Timor Timur yang cenderung kiri dan merdeka—serta mungkin juga menjadi tak terkendali—ia tidak ingin mempertaruhkan kebaikan hati para pendukung asingnya (khususnya sehubungan dengan bangkrutnya Pertamina, yang akan dibahas lebih banyak lagi setelah ini), atau meresahkan sekutu-sekutu kawasannya, bila mencoba menyelesaikan masalah ini dengan menerapkan kekuatan militer.

Tapi, pandangan Suharto diperdebatkan dengan sengit di kalangan atas militer ("sebagian besar para pemimpin puncak militer ... berpendapat bahwa satu atau dua batalion tentara reguler saja akan bisa menyelesaikan permasalahan itu dalam beberapa hari, jika tidak beberapa jam saja").[28] Sebaliknya, Suharto lebih suka memainkan peran menunggu. Ia pertama-tama berharap bahwa, terutama melalui strategi 'diplomatis' rahasia—berorientasi internasional namun tidak menolak, di bawah selubung 'Operasi Komodo' yang diilhami Bakin, untuk melakukan upaya-upaya agresif guna membentuk pendapat rakyat serta menguatkan aspirasi pro-Indonesia di Timor Timur—yang ia percayakan kepada Ali Murtopo dan rekan-rekannya (termasuk orang-orang seperti Kol. Aloysius Sugianto dan Harry Can Silalahi) pada akhir 1974, dan sementara itu, pemerintah Portugal akan tetap tetap berada di Timor hingga waktu yang tepat ketika integrasi Timor dengan Indonesia sudah dapat diterima oleh rakyat setempat. Ketika harapan ini buyar, Suharto yakin bahwa blokade Indonesia atas wilayah tersebut, dukungan yang diperolehnya dari kekuatan-kekuatan lokal—yang sebagian besar lebih menyukai integrasi koloni tersebut dengan Indonesia demi kepentingan jangka-panjang keamanan regional, dan berdasarkan kenyataan kurangnya dukungan internasional terhadap Fretilin—diperkirakan akan membuat gerakan kemerdekaan ini ambruk.

Agaknya didukung oleh kepercayaannya terhadap kemampuan Ali Murtopo untuk merekayasa hasil yang diinginkan dan terselubung atas krisis tersebut, serta nasihat agar berhati-hati dari Sujono Humardani, barulah Suharto bergerak dengan amat enggan. Bahkan setelah adanya "kudeta balik" Fretilin pada 11 Agustus, Suharto menolak menanggapi usulan untuk melancarkan serangan singkat dan keras pada akhir Agustus untuk menduduki Dili dan mengundang pihak Portugis kembali meneruskan pemerintahan mereka. Suharto, sebaliknya, lebih menyukai opsi menggunakan para "sukarelawan" untuk membantu kekuatan-kekuatan pro-Jakarta yang berkumpul di perbatasan Barat wilayah tersebut.

Pada 15 September, Suharto menerima permintaan dari partai-partai UDT, Trabalista, dan Kota yang menyatakan "kehendak rakyat" Timor Portugis untuk berintegrasi ke Indonesia, namun ia tetap saja bergeming. Menurut Duta Besar Australia, Richard Woolcott, Murdani menyatakan pada akhir September bahwa "pak tua itu ... masih berpendirian keras" serta bahwa Suharto "tidak ingin disalahkan sepanjang hidupnya" karena telah melakukan intervensi militer yang berlebihan.[29] Bahkan pada akhir November, Murdani menyatakan kepada Woolcott bahwa "Presiden tetap saja berpendirian bahwa tujuan-tujuan Indonesia akan bisa dicapai melalui tekanan yang mantap dan terus-menerus."[30] Baru setelah ada deklarasi "Republik Demokratis Timor Timur" oleh Fretilin pada 28 November, dan setelah menerima perintah dari jajaran paling tinggi di AS,[31] ia "mengesahkan" invasi militer besar-besaran pada 7 Desember 1975. Bahkan waktu itu pun, menurut Yusuf Wanandi, "Presiden tak pernah mengeluarkan instruksi jelas untuk masuk ke sana. Ia hanya menunjukkan dengan cara Jawa bahwa pekerjaannya harus dilaksanakan, tapi ia tidak mau tahu bagaimana caranya."[32]

Pada dasarnya, Suharto tidak mau memikul risiko terhadap kesatuan nasional; ia dan kalangannya menganggap bahwa kehadiran sebuah negara merdeka yang baru dan berhaluan-kiri akan menjadi sumber potensial subversi dalam negeri yang berbasis di jantung kepulauan Indonesia. Selain itu, Suharto mengalah pada dorongan-dorongan dari para penasihat militernya bahwa, sehubungan dengan keberhasilan komunis di Vietnam, negara Timor Timur mungkin akan menimbulkan bahaya terhadap keamanan eksternal serta keleluasaan bergerak Indonesia. Selanjutnya, posisi dalam negeri Suharto yang melemah, setelah kasus Malari, mungkin membuat ia, pada akhirnya, tak punya pilihan selain mengikuti strategi militer garis-keras bila semua opsi lainnya tidak dapat digunakan.

Setelah invasinya terlaksana (meski kinerja pasukan penyerbunya cukup menyedihkan), Timor Timur dimasukkan ke dalam

Republik Indonesia: "Ratusan tahun," ujar Suharto, "kita telah dipisahkan oleh pagar-pagar buatan pemerintahan-pemerintahan penjajahan ... Rakyat Timor Timur akan bergabung dengan saudara-saudara sekandungnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia." Suharto waktu itu harus menanggung cacian internasional yang muncul yang ia hadapi dengan amat tabah: "Indonesia tidak mungkin berpangku tangan," ujarnya dalam pidato akhir tahunnya, "dalam menghadapi kemelut yang terjadi di bekas koloni Portugis yang berbatasan langsung dengan Indonesia itu, sebab keadaan di sana mengganggu dan dapat membahayakan keutuhan wilayah Republik Indonesia."[33] Ia, terutama, sangat tersinggung oleh pendapat bahwa tindakan-tindakannya dalam mendukung invasi tersebut berasal dari visi ekspansionis: "Saya dipilih untuk membangun Indonesia," ujarnya kepada seorang tamu yang berkunjung, "bukan untuk melibatkan diri dalam perang, karena kalau mau, Indonesia sebenarnya bisa mengambil Timor kapan saja. Tapi kita tidak mau. Pada Repelita I dan II kita tidak punya uang yang dianggarkan untuk Timor Timur."[34] Meski intervensinya banyak memakan korban, pada awalnya semua berjalan baik-baik saja sejauh yang dimungkinkan oleh keadaan.

Suharto, setelah sebelumnya sepakat untuk menerima gelar "Bapak Petani" Timor Timur, melakukan kunjungan pertamanya ke provinsi baru itu pada pertengahan 1978 untuk merayakan peringatan kedua integrasinya ke Republik. Sambutan yang ia terima, apakah itu diatur sebelumnya atau tidak, jelas cukup mengesankan baginya, membuatnya menyampaikan pidato spontan mengenai dua tema yang paling lekat di hatinya: pembangunan dan kesatuan.[35] Waktu itu Fretilin tinggal merupakan kekuatan kecil dan sudah kocar-kacir, dengan jumlah tak lebih dari 3.000 orang, serta tampaknya melakukan perlawanan yang sia-sia.

Masalah Timor Timur adalah salah satu aspek dari pertarungan yang lebih besar dan terus-menerus antara Adam Malik, yang adalah kampiun kebijakan luar negeri berhaluan nonintervensi "bebas-aktif", dan para jenderal yang terobsesi dengan keamanan

di kalangan lingkaran dalam Suharto, terutama Panggabean. Malik, kokoh dengan pendiriannya, tetap saja menentang konsep agar ASEAN mengembangkan sebuah aspek keamanan, juga menentang upaya-upaya untuk melibatkan tentara Indonesia dalam peperangan di Vietnam dan Kamboja guna mendukung pihak AS. Adam Malik juga cenderung menganut kebijakan yang lebih lunak terhadap Cina dibandingkan dengan yang dianut oleh kalangan jenderal. Suharto dalam masalah ini mendukung Adam Malik, bahwa inti dari ASEAN haruslah bersifat kerja sama ekonomi, dan bukan militer. Meski demikian, kepemimpinannya dalam pertemuan puncak para kepala negara di Bali pada Februari 1976 menghasilkan serangan diplomatik ASEAN yang bertujuan mengurangi kekuasaan Vietnam (dan Soviet) di kawasan tersebut.

Kepeduliannya pada perdamaian dan keamanan di kawasan ini membuahkan hasil yang lain juga. Melalui orang-orang intelijennya (terutama Yoga Sugama dan Benny Murdani), ia mengupayakan campur tangan yang produktif dalam perselisihan Malaysia dengan Filipina mengenai masalah Sabah, selain juga memainkan peran menjadi penengah dalam "masalah" Moro Philipina di selatan. Perdana Menteri Papua Nugini Michael Somare dibujuk agar mencegah wilayahnya digunakan sebagai pangkalan dan tempat berlindung oleh kelompok-kelompok yang ada hubungannya dengan 'Gerakan Papua Merdeka' (OPM) yang memperjuangkan kemerdekaan Irian Jaya dari kekuasaan Indonesia. Selain itu, Suharto menginstruksikan menteri kehakimannya, pengacara terkemuka, Mochtar Kusumaatmaja, agar memperjuangkan pengakuan internasional atas konsep wawasan Nusantara dalam mengembangkan pembahasan Hukum Laut. Lebih umum lagi, Suharto mulai memperoleh pemahaman yang lebih tajam tentang apa yang kemudian berkembang menjadi Dialog Utara-Selatan; "negara-negara maju," ujarnya pada 1976, "juga mempunyai tanggung jawab moral untuk membantu negara-negara yang sedang membangun."[36]

Namun, pada umumnya, minat Suharto terpusat di dalam negeri. Setelah pengalamannya yang tidak menyenangkan di konferensi Gerakan Non-Blok di Lusaka, misalnya, ia memutuskan bahwa partisipasi Indonesia dalam pergerakan itu sebaiknya bersifat formal saja dan tidak terlibat secara berlebihan atau terlalu bersemangat. Suharto tidak mengirimkan wakil-wakilnya ke konferensi para menteri luar negeri Gerakan Non-Blok di Georgetown pada 1972 dan mengirim Adam Malik ke konferensi di Aljazair pada September 1973—dengan menggunakan alasan sibuk kerja sehingga tidak bisa hadir. Setelah selang waktu yang cukup lama barulah Suharto kembali menghadiri konferensi-konferensi Gerakan Non-Blok.

SKANDAL PERTAMINA

Dengan berbagai masalah yang sudah semakin mengental yang dihadapi oleh Orde Baru, muncul kemudian kebangkrutan mengejutkan dari sapi perah rezim ini, Pertamina, pada Februari 1975. Penyebab krisis tersebut cukup sederhana, sebagian besar berasal dari ekspansi maupun diversifikasi yang tak ada habisnya dan tak terkendali yang dilakukan oleh Ibnu Sutowo dalam kegiatan-kegiatan perusahaan minyak itu untuk merambah ke bidang-bidang seperti baja (terutama proyek kilang baja Krakatau Steel di Jawa Barat yang sudah sejak lama bermasalah itu), gas alam, properti, asuransi, pertanian, perkapalan, pariwisata, konstruksi, dan petrokimia. Kegiatan-kegiatan ini dibiayai dengan kredit-kredit jangka pendek ini; ketika tiba saat jatuh tempo, kredit-kredit ini tidak dapat diperpanjang lagi. Masalah-masalah likuiditas ini diperparah lagi dengan komitmen-komitmen keuangan yang dibengkakkan (*mark-up*) atau dalam jumlah sangat besar dan membuat bangkrut, untuk pembelian kapal-kapal tanker, yang kesemuanya itu menghasilkan lautan utang senilai US$10 miliar—yang harus dicicil dan dinegosiasi-ulang oleh Bank Indonesia.

Pada awalnya, Suharto enggan, dan itu dapat dipahami, untuk berurusan dengan Ibnu yang memiliki hubungan dekat dan akrab dengan dirinya. Ibnu sebelumnya berjaya dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh Suharto. Ibnu boleh dikata "seorang diri" membangun industri minyak Indonesia dengan gaya entrepreneurialnya yang luar biasa, koneksi-koneksi internasional yang kuat dan bercabang-banyak, visi untuk mengembangkan industri Indonesia, di samping kemampuan teknis yang tak ada tandingannya. Sumbangan-sumbangan keuangannya yang bersifat strategis sangat vital bagi pengembangan dan pemeliharaan kinerja perekonomian Orde Baru. Ia adalah, seperti dikatakan seorang pengamat, "contoh nyata bagi banyak warga Indonesia bahwa masalah utang luar negeri bisa berubah dengan cepat, serta bahwa keberanian seperti ini dapat menghasilkan jalan-jalan pintas dalam tugas-tugas berat untuk mengembangkan negeri yang jatuh miskin."[37] Pertamina, oleh karena itu, menjadi, dan memang dalam kenyataannya menyerupai, "lembaga pembangunan nasional".[38]

Suharto sendiri sudah tahu tentang masalah besar Pertamina yang membayang itu setidaknya sejak Oktober 1974, namun ia tidak mengambil langkah sungguh-sungguh guna mengendalikan keadaan—mungkin karena merasa yakin bahwa Ibnu akan bisa menyelesaikan sendiri permasalahannya. Sementara kebebasan berbisnis dan meminjam uang Ibnu dibatasi dengan ketat segera setelah bencana tersebut terungkap, dan komisi yang diketuai oleh Letjen Hasnan Habib ditugaskan pada Juni untuk mereformasi dan mereorganisasi urusan perusahaan tersebut serta kendali-kendali wewenang dan tanggung jawabnya, Suharto sendiri tidak mengambil langkah untuk menggantikan Ibnu. Dan memang, ia malah berupaya mengalihkan perhatian dari kinerja Ibnu dalam pidato kemerdekaan 16 Agustusnya dengan dalih bahwa "apa yang harus kita nilai adalah pengalaman kolektif kita, dan bukan kesalahan-kesalahan atau jasa-jasa individu."[39] Dukungan kuat yang diberikan kepada Ibnu oleh Ali Murtopo, yang bukan sahabat dari para teknokrat, juga berpengaruh. Ali dikabarkan menyarankan Suharto

bahwa Ibnu tidak bisa diganti. Sementara Suharto—yang menyadari utang besarnya kepada Ibnu, serta kenyataan bahwa dorongan dan permintaan-permintaannya bagi pembiayaan berbagai proyek telah ikut membuat Ibnu terlalu banyak memikul beban—juga dikabarkan meminta Ali untuk membela Ibnu dari serangan-serangan.

Baru pada akhir 1975, ketika pengungkapan-pengungkapan tentang tanker minyak itu bermunculan (masalah yang tampaknya tak dilaporkan Ibnu kepada Suharto) bersama dengan laporan-laporan tentang ekses-ekses yang mencengangkan—yang disebut oleh seorang wartawan dengan istilah "korupsi produktif"[40]—, salah-urus yang luar biasa tak terkendali, sikap congkak Ibnu—yang tak menunjukkan rasa menyesal selain bersikap agresif terhadap penyelidikan-penyelidikan selama masa jabatannya—serta semakin jelasnya kerugian yang diakibatkan krisis tersebut atas APBN, barulah Suharto (yang belum lama sembuh dari operasi kandung empedu pada bulan Desember) terpaksa mengambil langkah terhadap teman lamanya itu.

Ia memanggil Ibnu untuk "diberhentikan secara hormat" pada 3 Maret 1976, sekembalinya ia berobat dari Amerika Serikat melalui kesempatan pertemuan puncak para pemimpin ASEAN di Bali pada 23 Februari (di mana perilaku Ibnu yang suka ikut campur dan angkuh itu, pada sebuah pertemuan di mana Suharto ingin mendominasi, mungkin telah membuat Suharto marah), dan mencopotnya dari posisi sebagai direktur utama Pertamina serta menggantinya dengan teknokrat dari angkatan darat Mayor Jenderal Piet Haryono.[41]

Ibnu sendiri dipensiunkan dan tidak pernah diajukan ke pengadilan, meski sempat dikenakan tahanan rumah tidak resmi pada 1977–78, tampaknya untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum Indonesia dalam pertarungan yang terus berlanjut di pengadilan tentang kewajiban-kewajiban pembayaran atas tanker-tanker minyak Ibnu, dan sesekali adanya petunjuk terselubung

tentang keadaan yang malah sebaliknya (piutang). Tampaknya setelah dilarang oleh Suharto untuk tidak menonjolkan diri di masyarakat, Ibnu selanjutnya menikmati masa pensiun yang makmur dan sibuk sebagai pengusaha yang berhasil. Secara pribadi, ia tidak merasa, ujarnya setelah itu, "bertanggung jawab atas kesulitan yang dialami Pertamina maupun Indonesia."[42]

Kejadian-kejadian seputar pemecatan Ibnu itu menunjukkan kesabaran dan kehati-hatian Suharto dalam menangani kasus tersebut ("Saya diamkan dulu air yang mendidih itu supaya saya bisa meminumnya") serta kemampuannya untuk berbalik, memukul secara tiba-tiba dan mematikan mereka yang telah menyianyiakan batas yang diberikan kepada mereka dan yang menurut dia telah mengkhianati kepercayaannya, selain ketakutannya terhadap pusat-pusat kekuasaan independen di luar kekuasaan langsungnya. Ia kemudian menyatakan, "Masalah Pertamina itu sungguh merupakan pengalaman yang pahit dan harus manjadi pelajaran bagi kita semua."[43] Cara-cara Suharto waktu itu yang secara langsung—yang bukan merupakan kebiasaannya—menunjuk skandal Pertamina dan kegagalan manajerial yang menyebabkannya menandakan bahwa kedudukan Ibnu berada dalam bahaya.

Semakin jelas saat itu bahwa bencana keuangan yang ditimpakan Pertamina atas perekonomian Indonesia telah membuat Suharto—karena sebelumnya ia berharap banyak dari kinerja Ibnu di bidang tersebut—tertekan pikirannya dan marah. Tampaknya kemungkinan besar Ibnu juga menolak upaya-upaya Suharto untuk menggesernya secara bertahap dan terhormat, membuat Suharto tak punya pilihan selain mengeluarkannya, betapa pun menyakitkan bagi Suharto untuk mengambil tindakan tersebut. Terlebih lagi, Ibnu diberhentikan bersama-sama dengan tujuh direktur Pertamina lainnya; keenamnya kemudian diangkat kembali, untuk menanamkan pengertian bahwa pengangkatan kembali diri mereka adalah atas kebaikan hati Suharto sendiri, dan bukan Ibnu. "Pesan inti kesetiaan itu [telah] disampaikan."[44]

Ibnu adalah raksasa Orde Baru kedua yang menjadi korban dalam tempo dua tahun; hal ini menandakan keinginan yang semakin besar di pihak Suharto untuk memperketat dan mempersempit struktur kekuasaan pemerintahannya. Pertemanan yang menandai tahun-tahun awal Orde Baru pun kini menguap sudah. Suharto tak diragukan lagi menjadi satu-satunya orang yang menentukan politik Indonesia. Petunjuk lebih lanjut tentang menguatnya kecenderungan Suharto pada kendali yang lebih ketat terlihat pada pengangkatan Let.Jen Cokropranolo—teman lama dan asisten setianya—pada pertengahan 1977 sebagai gubernur Jakarta menggantikan Ali Sadikin yang karismatis, populis, dan flamboyan itu, yang selama 11 tahun menjabat telah mengubah Jakarta. Ali Sadikin belakangan cenderung menjauhkan diri dari kebijakan dan sikap rezim Orde Baru—dan semakin menjadi fokus pandangan politik alternatif. Cokropranolo, yang sudah berdinas di Kostrad pada awal 1960-an, dan kemudian menjadi salah seorang dari kelompok Aspri Suharto serta menjadi sekretaris pribadinya dalam masalah-masalah militer, adalah orang yang tepat yang dicari Suharto untuk jabatan peka ini—karena ia setia, dapat diandalkan, tak memiliki agenda terselubung serta secara politis tidak merupakan ancaman.

Pembenahan yang diberlakukan terhadap Pertamina kemudian mematahkan kekuasaan Ibnu, karena pendapatan yang dulu bisa mereka gunakan sekarang disalurkan ke Bank Indonesia. Pembenahan tersebut juga menegaskan kembali pengaruh para teknokrat—yang selama beberapa tahun memudar menghadapi cemerlangnya pembangunan Ibnu—beserta pendekatan "perencanaan serta ketertiban ekonomi"[45] mereka yang sangat kontras dengan dinamisme Ibnu yang 'bergairah untuk melayani' itu. Pembenahan tersebut juga mengakibatkan merosotnya pengaruh Ali Murtopo yang kegiatan-kegiatannya dibiayai dengan royal oleh Ibnu.

Ironisnya, sifat dan dimensi bencana Pertamina itu sendiri malah menonjolkan kekuatan prestasi ekonomi positif pemerintah,

yang mencatat, antara 1967 dan 1976, pertumbuhan tahunan sekitar tujuh persen, kenaikan yang begitu besar dalam produksi industri dan pangan, kenaikan besar dalam impor, serta kemajuan pada bidang sosial seperti pengendalian pertambahan penduduk. Namun, krisis minyak—sudah tentu sedikit-banyak ikut menguatkan angka-angka ini—kecenderungannya memang sudah ada sebelum terjadinya lonjakan harga minyak tersebut. Menyusul kebangkrutan Pertamina, yang juga terlihat sama menonjolnya adalah munculnya pertanyaan-pertanyaan gencar tentang kemampuan manajerial Suharto—yang telah membiarkan keadaan menjadi begitu tak terkendali.

Krisis Pertamina, selain pola pertumbuhan ekonomi riil, ikut berjasa memperkuat kendali para teknokrat sipil maupun kalangan profesional militer karena tersedianya dana untuk memperkuat anggaran berdasarkan cara-cara yang lazim dan, sejalan dengan itu, berkurangnya ketergantungan pemerintah pada sumber-sumber pendapatan nonbudjeter maupun pada mereka yang mengelolanya.

Setidaknya untuk sementara waktu, para teknokrat, yang kesatuan tujuan dan pengaruhnya pada kebijakan sentral sudah menipis sejak awal 1970-an akibat penugasan mereka pada tugas-tugas kementerian yang khusus, kembali mencuat dan bersatu dalam pergulatan faksi yang terus berlanjut menghadapi kubu ekonomi nasionalis yang diwakili antara lain oleh para penganutnya seperti Ibnu, Ali Murtopo, dan Ali Sadikin. Namun, kenaikan mereka tidak bertahan lama, terpukul oleh kegairahan *boom* minyak kedua pada 1979.[46]

Ironisnya, siapnya masyarakat keuangan internasional untuk membantu Indonesia mengatasi krisis Pertamina adalah wujud penting kepercayaan mereka pada rezim Suharto, lebih khususnya lagi adalah mosi percaya pada kemampuannya mengelola permasalahan dengan cara yang rasional dan sistematis. Kepercayaan seperti ini semakin memperkuat gengsi Suharto di dalam negeri. Ironisnya lagi, ada "kebetulan" antara pensiun yang dipaksakan

atas Ibnu—yang tak lama kemudian disusul—dengan pensiunnya Suharto dari Angkatan Bersenjata. Ketika Suharto menginjak usia 55 pada 8 Juni 1976, ia secara resmi mengakhiri karier aktifnya yang hampir mencapai 31 tahun di dinas angkatan. Pensiunnya terjadi sekitar sebulan sesudah kematian ayah angkat yang sangat ia cintai, Prawirowiharjo.

MENGEMBANGKAN PEMBANGUNAN

Masalah-masalah dalam negeri tampaknya tidak mengalihkan dan, malah, sebaliknya menguatkan keyakinan Suharto akan perlunya pembangunan bagi negerinya. Rencana Pembangunan Lima Tahun kedua dengan cepat disusun dan diumumkan pada April 1974, bertujuan melanjutkan stabilisasi perekonomian yang telah diletakkan berdasarkan rencana pertama, memacu pembangunan pertanian, dan meraih laju pertumbuhan yang lebih tinggi. Lawatan 1975 Suharto ke Timur Tengah, Eropa Timur, Amerika Utara, dan Jepang bertujuan untuk memperoleh kredit bagi proyek-proyek pembangunan serta peralatan, di antaranya yang paling hebat adalah proyek besar hidrolistrik/aluminium senilai US$2 miliar di Sumatra—di mana Sujono Humardani memainkan peran penting dalam pembangunannya. Misi ke Timur Tengah pada Oktober 1977 sama maksudnya, yaitu untuk mendatangkan dana-dana investasi dalam jumlah yang cukup besar. Pertimbangan yang memainkan peran menentukan dalam semua pengaturan ini adalah status baru Indonesia sebagai salah satu negara utama pengekspor minyak.

Pada 1975, Indonesia memiliki "proyek-proyek atau program-program investasi, baik di pihak pemerintah maupun swasta 'apakah itu dalam tahap-tahap awal penerapan, siap untuk dimulai, sedang mencari pembiayaan, atau dalam tahap-tahap perencanaan akhir'yang keseluruhannya mencapai kira-kira setara dengan PDB Indonesia."[47] Dalam anggaran 1976–77, sisi pembangunan APBN, untuk pertama kalinya, lebih besar dari jumlah yang diproyeksikan

untuk belanja rutin. Menjelang 1978, terutama di Sumatra, proyek-proyek pengembangan besar seperti ladang gas Arun serta proyek-proyek besar seperti pupuk, minyak, semen, aluminium, dan batubara, yang sebagian besar dibiayai dari pinjaman Jepang, berikut proyek-proyek infrastuktur terkait yang bertujuan mengeksploitasi dan mendayagunakan sumber daya alam Indonesia, gencar dilaksanakan. Dalam skala yang lebih kecil, industri-industri perkebunan karet, lada, kopi, dan PIR (Perkebunan Inti Rakyat) serta perikanan mencatat adanya investasi-investasi baru.

Namun, pembangunan sudah tentu memiliki sisi lain juga. Pada 20 April 1975, Suharto meresmikan upacara pembukaan proyek kegemaran istrinya, taman hiburan Taman Mini. Meski ada heboh mengenai pembangunannya, Suharto menyebutkan dalam pidatonya bahwa taman tersebut merupakan "tambahan kekayaan nasional dan behagian dari pembangunan nasional, karena ia sesuai dengan pola dasar pembangunan yang telah ditetapkan di dalam GBHN."[48]

Boom minyak berperan penting dalam pengadaan dana untuk program-program penyerapan tenaga kerja di wilayah-wilayah pedesaan, yang program terpentingnya adalah program kabupaten (yang ditetapkan pada 1970 untuk mengembangkan infrastruktur transport dan irigasi setempat) serta program Inpres. Pada saat yang sama, pinjaman luar negeri tetap penting walau kurang menentukan dibanding pada masa-masa awal rezim tersebut. Dengan menyadari potensi kelumpuhan politis yang diakibatkan oleh kepedulian-kepedulian nasionalis ekonomis akan tingkat-tingkat bantuan asing, serta kehancuran politis yang disebabkan oleh krisis Pertamina, Suharto berhati-hati sekali dalam menjelaskan pada pidato Hari Kemerdekaan 1976-nya bahwa pinjaman luar negeri tidak akan mengurangi kedaulatan dan kemerdekaan bangsa dalam bertindak, serta mendesak agar kedua aspek ini tetap diperhatikan dalam pembangunan. Dalam pidatonya, ia menekankan pesannya bahwa pembangunan merupakan perjuangan yang berat dan panjang, pertempuran tanpa-akhir meng-

hadapi berbagai cobaan, namun yang tujuannya adalah membebaskan rakyat. Maka, dalam pidato 1977-nya, ia menyatakan bahwa

> pembangunan yang dikerjakan sekarang bertujuan untuk memanusiakan manusia ... cita-cita yang besar itu bukan impian, akan tetapi sesuatu yang harus diperjuangkan agar lambat laun menjadi kenyataan. Perjuangan itu tentu akan panjang, mungkin sangat panjang, dan mungkin juga berat ... pembangunan hanya akan berhasil apabila seluruh lapisan masyarakat, semua golongan dan segenap kekuatan bangsa Indonesia ikut berperan di dalamnya.[49]

SKANDAL SAWITO

Berbagai ketegangan dan ketidakpuasan terpendam di masa rezim Orde Baru sejak 1976—di mana otoritas pribadi Suharto sangat ternoda oleh krisis-krisis yang terjadi belakangan—meledak dalam skandal aneh Sawito Kartowibowo, seorang karyawan nonaktif Departemen Pertanian yang juga penganut aliran kebatinan Jawa. Sawito, yang merasa yakin lewat meditasi-meditasi serta latihan-latihan kebatinannya bahwa ia telah dipilih Tuhan untuk memerintah Jawa, pada Juli 1976 mulai menerbitkan dokumen-dokumen yang secara pribadi sangat mengecam kinerja Suharto sebagai presiden, juga mengecam kondisi kemerosotan moral yang ditimpakan Orde Baru terhadap bangsa. Dan memang, salah satu dokumennya mengimbau Suharto agar mengalihkan kepresidenan kepada mantan wakil presiden Mohammad Hatta sebagai ketua dari kelompok berkuasa yang terdiri atas empat orang. Sawito juga menulis dokumen berjudul "Menuju Keselamatan" yang menunjuk pada kemerosotan moral dan keterasingan budaya akibat program pembangunan Orde Baru serta—sebagai pertanda dari nuansa politik surealistis waktu itu—berhasil meyakinkan sejumlah tokoh nasional penting, termasuk yang paling terkemuka yaitu Hatta sendiri, untuk menandatanganinya.[50]

Presiden terpilih, Maret 1968 (Departemen Informasi ,Indonesia)

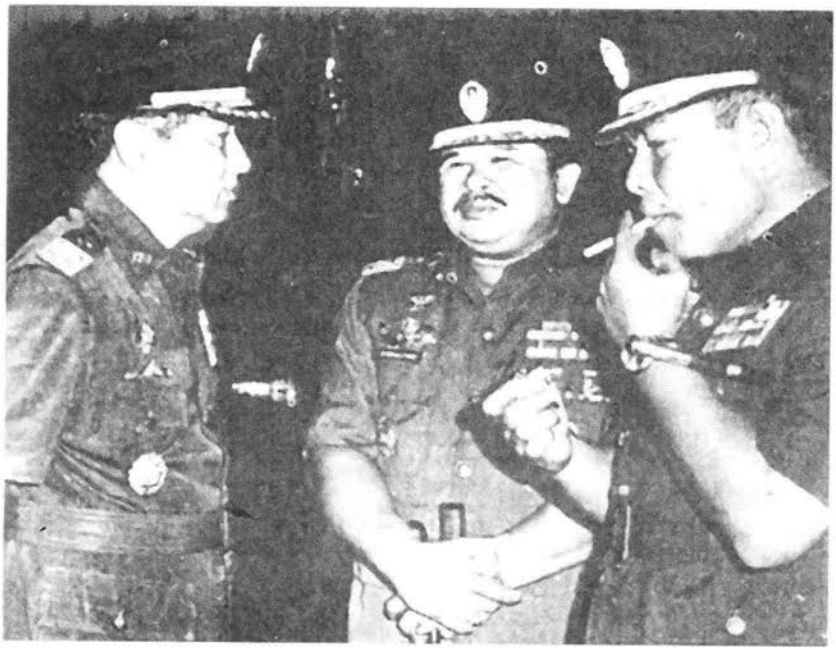

Suharto, Sumitro, dan Panggaabean

Suharto pada pertemuan Gerakan Non-Blok di Lusaka, 1970. (Sekretariat Negara, Indonesia)

Berdoa di sebelah jenazah Ali Murtopo, Mei 1984. (Kompas)

Menikmati bincang-bincang dengan petani di Jawa Barat. (Sekretariat Negara, Indonesia)

Suharto dan Try Sutrisno. (Sekretariat Negara, Indonesia)

Ciuman untuk Ibu Tien. (Sekretariat Negara, Indonesia)

Suharto bertemu Arafat pada 1984 (Kompas)

Suharto dan Sudharmono (Sekretariat Negara Indonesia)

Suharto bermain tenis (Sekretariat Negara Indonesia)

Kejadian ganjil ini menarik untuk dicatat karena ketika Suharto mengetahui kegiatan-kegiatan Sawito pada September 1976, ia menanggapinya dengan begitu sengit. Reaksi kerasnya ini sebagian mungkin disebabkan oleh berhasilnya para tokoh terkemuka ini dihimpun untuk mendukung tujuan Sawito—yang dengan demikian memberi tambahan serta kredibilitas bagi kecaman-kecamannya atas arah kebijakan dan moral Orde Baru, selain memberi kesan bahwa pandangan mereka mendapat dukungan yang lebih luas di kalangan elite Jakarta. Selain itu, cara yang digunakan oleh Sawito—meski Suharto sendiri sering menekankan dengan rapi dan tertib perlunya kepatutan konstitusional dalam hal penggantian presiden—sangat mirip, sekaligus meresahkan, dengan model Supersemar yang begitu berhasil digunakan oleh Suharto sepuluh tahun sebelumnya (salah satu inti pembelaan yang dengan tajam dan berulang-ulang dikemukakan dalam persidangan Sawito oleh pengacaranya, Yap Thiam Hien). Mungkin juga ada persepsi di benak Suharto bahwa kekuatan-kekuatan yang lebih besar dan tidak kelihatan ada di balik upaya Sawito tersebut; satu hal yang harus dihadapi secara langsung dan keras.

Mungkin, yang paling menjadi masalah adalah karena Sawito melakukan serangan yang sifatnya sangat pribadi terhadap Presiden, selain juga menuduh keluarganya. Ini mengundang tanggapan yang sengit dari Suharto. Sawito, ujarnya, telah melakukan "penilaian yang sangat kejam" atas prestasi-prestasi Orde Baru dan telah "menyerang orang yang tak berdosa".[51] Sikap bermusuhan Suharto adalah perwujudan rasa tidak aman yang ia rasakan baik dalam kinerja pemerintahannya maupun dalam rasa memiliki atas perannya sendiri dan kekuasaannya. Tak seorang pun dari anggota keluarganya, ujarnya menegaskan, memperoleh untung dari jabatannya; konferensi pers—mengikuti tren di Jakarta—yang diselenggarakan oleh saudara tirinya, Probosutejo, dan anak laki-laki sulungnya, Sigit, mengulangi ungkapan-ungkapan serupa ini.[52] Sudharmono kemudian juga mengedarkan dokumen panjang-lebar yang mengisyaratkan keterlibatan Sawito dalam gerakan yang

"ilegal". Sikap ramai-ramai membantah ini mendatangkan hasil. Dalam edisi 8 November 1976-nya, majalah internasional *Newsweek* memuat berita utama yang sangat kritis tentang kepemimpinan Suharto dan terutama korupsi yang konon melibatkan keluarganya.[53] Tanggapan Suharto, dan mereka yang dekat dengannya yang ingin menonjolkan kesetiaan mereka, keras sifatnya dan sudah dapat diduga sebelumnya. Serangan atas presiden ini diartikan sebagai serangan terhadap integritas bangsa, dan majalah (serta para wartawannya) pun kontan dilarang.[54]

Segera setelah permasalahannya dibeberkan kepada umum, pasukan keamanan pun menahan Sawito serta para anggota kelompoknya, dan Suharto berusaha keras agar para penandatangannya menarik dukungan yang telah mereka berikan pada perjuangan Sawito. Semua penandatangan ini dengan segera memenuhi permintaannya, dan sebagian besar mengaku bahwa mereka ditipu dan terkecoh sehingga mau menandatanganinya. Meski demikian, bahwa persekongkolan yang begitu ganjil ini dapat mengundang minat para tokoh senior dan, malah perencanaan dan konseptualisasinya pun memperoleh dukungan dari yang lain, seperti Jenderal Ishak Juarsa, menunjukkan betapa dalamnya ketidakpuasan serta keterasingan yang dirasakan sebagian elite Jakarta pada saat Suharto semakin mengonsolidasikan posisinya. Pengadilan Sawito, berlangsung dari akhir 1977 hingga pertengahan 1978 dan selalu dipadati pengunjung itu, sarat dengan tuduhan-tuduhan yang sama anehnya dan kesaksian-kesaksian yang sama pura-puranya kejadian-kejadian yang mendahuluinya. Sawito dinyatakan bersalah, dan menurut Suharto, gerakannya adalah upaya halus untuk menjatuhkan pemerintahan [55]—serta dijatuhi hukuman penjara delapan tahun.

Pada pertengahan November 1976, merasa jenuh atau terguncang oleh serangkaian musibah yang mendera kehidupannya selama beberapa waktu terakhir, Suharto mencari tempat menyepi dan saat untuk merenung dengan melakukan safari yang tidak diumumkan dan tidak resmi ke Jawa Timur dan Jawa Tengah,

"berdialog dengan para petani, pedagang kecil serta guru di daerah-daerah pedesaan",[56] agar dirinya mendapat sesuatu tentang keadaan serta masalah mereka. Ini adalah salah satu kegiatan yang sangat disukainya: bahwa ia mau melakukannya mungkin mencerminkan perasaannya bahwa dalam masa-masa sulit ia merasa perlu kontak lagi dengan apa yang ia bayangkan sebagai Indonesia yang sebenarnya. Seperti yang ia nyatakan dalam pidato Tahun Barunya pada 1977, tahun mendatang akan "penuh tantangan dan ujian."[57]

PEMILIHAN UMUM, MAHASISWA, DAN KERESAHAN SOSIAL

Dalam menjamin "keberhasilan" pemilihan umum 1977, masalah besar yang dihadapi Golkar bukanlah "intinya bahwa Golkar tidak akan memperoleh cukup suara melainkan sebaliknya bahwa mereka akan memperoleh terlalu banyak suara."[58] Ali Murtopo sendiri berkomentar pada 1976: "dapat diantisipasi bahwa Golkar akan memperoleh proporsi suara yang kira-kira sama seperti pada pemilihan umum 1971, atau mungkin sedikit lebih banyak, akibat perbaikan-perbaikan besar yang telah dicatat dalam hal konsolidasi internal serta pelatihan kader sejak 1971."[59] Keresahan pemerintah khususnya terkait dengan kemungkinan bahwa rakyat jelata yang lemah dan terpecah yang merupakan pendukung PDI—yang kongres pertamanya pada April 1976 diwarnai oleh pertarungan sengit di dalam tubuhnya, bahkan sampai adu jotos— akan kalah besar sehingga politik setelah itu mungkin akan menjadi persaingan yang tidak menyenangkan antara pemerintah dan PPP yang muslim. Menyadari ancaman muslim ini, Suharto menegaskan bahwa ia tidak akan mengizinkan khotbah-khotbah di mesjid-mesjid digunakan sebagai sarana untuk berpolitik atau mengecam pemerintahannya. Namun, ia mungkin tidak menyadari ironinya bahwa justru penindasan pemerintahannyalah yang memompa semangat pada kehidupan politik Islam, terutama di kalangan

muda; "kegiatan Islam menjadi paling menonjol di kampus-kampus."[60]

Upaya-upaya pemerintahan Suharto untuk membatasi kebangkitan entitas politik muslim yang kritis—"hanya PPP-lah yang memiliki saluran-saluran komunikasi untuk menantang cengkeraman Golkar atas saluran-saluran pemerintah," komentar seorang pengamat asing pada 1976[61]—mencapai puncaknya pada kisah aneh Komando Jihad. Komando Jihad pertama kali menjadi berita pada April 1977 dengan ditahannya 700 orang, sebagian besar berasal dari daerah-daerah yang dikenal karena ketaatan yang kuat pada Islam, oleh Kopkamtib atas tuduhan kegiatan teroris yang dilakukan gerakan tersebut. Suasana ketakutan yang diciptakan oleh "ditemukannya" Komando Jihad yang dituduh sebagai kebangkitan kembali gerakan Darul Islam, memungkinkan pemerintah untuk bertindak dengan keleluasaan yang tidak lazim dalam melumpuhkan kegiatan-kegiatan para politisi muslim dan menyebut PPP sebagai terancam terseret ke dalam gerakan fundamentalisme Islam.

Namun demikian, munculnya Komando Jihad pada saat yang pas mengundang banyak kecurigaan di kalangan muslim maupun yang lain; kecurigaan akan sifat sebenarnya maupun sumber kelompok ini—terutama ketika beberapa dari mereka yang ditahan dikabarkan terbukti bergerak mengikuti skenario yang dibuat oleh pihak intelijen Angkatan Darat. Sementara memang tampaknya ada kemungkinan bahwa Komando Jihad, dalam arti sebuah kekuatan muslim militan, memang benar ada, kekuatan ini mungkin disusupi oleh agen-agen Ali Murtopo yang menghasut para anggotanya untuk bertindak: hal yang pasti akan menarik perhatian, terutama seputar keberadaan kelompok ini serta dugaan ancamannya bagi keamanan nasional. Mana pun yang benar, skandal tersebut menjadi penangkal petir yang pas bagi pemerintah menjelang diselenggarakannya pemilihan umum yang dijadwalkan berlangsung pada 2 Mei 1977.

Kampanye pemilihan umum tersebut ditandai, walau tidak sekasar seperti pada pemilihan umum 1971, oleh pembatasan pemerintah atas debat-debat politik yang substantif maupun peka, serta oleh intimidasi dan tekanan atas para pemilih agar mendukung Golkar—yang dilancarkan baik oleh pihak militer maupun pejabat pemerintah setempat. Keluhan-keluhan serta protes akan keganjilan-keganjilan pemilihan yang menguntungkan Golkar dipatahkan oleh ancaman Suharto terhadap mereka yang berupaya meragukan hasil-hasil dari kehendak rakyat. Golkar, di bawah kepemimpinan Murtono, menjadi partai pembangunan yang telah begitu banyak menyumbang bagi Indonesia. Golkar pun menjadi partai patronase dan jantung pemerintah. Identifikasi-identifikasi seperti ini meninggalkan bekas mendalam, namun, walaupun pengelolaan pemilihan umum oleh pemerintah cukup efisien, perolehan suara Golkar sedikit di bawah prestasi 1971 mereka. Sementara PPP, setelah melakukan kampanye bersemangat yang riuh, mencatat beberapa kemenangan lokal, termasuk menang mutlak di jantung Orde Baru di Jakarta. Kinerja PDI yang menyedihkan mencerminkan keadaan menjengkelkan dari organisasinya maupun kepemimpinannya. Hasil pemilihan umum itu mengonfirmasikan potensi politik kebangkitan Islam. Bagi Suharto pribadi, pemilihan umum ini—yang pertama sejak ia pensiun dari militer—adalah pemilu pertama di mana ia ikut memberikan suaranya sejak 1957.

Sementara Suharto mungkin tidak langsung terlibat dalam upaya-upaya membatasi kebangkitan semangat politik Islam, ia tak diragukan lagi menyadari permasalahannya serta diberi tahu tentang kebijakan-kebijakan yang diberlakukan untuk membatasi keberhasilan PPP dalam pemilihan umum. Sikapnya terhadap ekspresi politik Islam memiliki ciri-ciri persamaan yang kuat dengan yang sebelumnya dianut oleh pemerintah kolonial Belanda. Ia membantu dan menggalakkan kegiatan-kegiatan Islam yang murni agama serta bekerja tak kenal lelah untuk menciptakan toleransi terhadap agama-agama lain di kalangan umat muslim

("Kerukunan dan persatuan nasional hanya dapat diwujudkan apabila ada kerukunan dan persatuan antara kelompok-kelompok dalam keluarga besar bangsa Indonesia"),[62] namun mengambil tindakan tegas terhadap apa yang ia pandang sebagai ekspresi-ekspresi Islam yang berwawasan sempit dan membahayakan kesatuan serta stabilitas nasional karena memperjuangkan versi negara Islam tertentu. "Saya menentang keras perselisahan agama yang meruncing. Pancasila telah menetapkan dalam silanya yang pertama, yakni Ketuhanan yang Maha Esa, dan itu tidak khusus untuk satu kepercayaan agama."[63] Sejak awal pada 1978, Suharto mengemukakan bahwa "kita selalu merasa prihatin melihat adanya gejala-gejala yang menunjukkan fanatisme golongan dan kurang melihat kepentingan yang lebih besar, yaitu keutuhan dan kesatuan bangsa."[64] Secara pribadi, ia dikabarkan menyambut sekelompok orang-orang Katolik terkemuka sekitar saat pemilihan umum 1977 dengan pernyataan: "Musuh bersama kita adalah Islam!" [65]

Dengan pengecualian soal ancaman politik Islam, mungkin aspek yang paling menonjol dari taktik tersebut adalah bahwa hal itu memberi konteks bagi kebangkitan kembali aktivisme politis mahasiswa—meski ada instruksi Suharto kepada para rektor pada awal 1977 agar "mengembangkan kehidupan kampus yang khas dengan corak keindonesiaan, sehingga kampuskita tidak berkembang menjadi kampus yang semata-mata meniru pola asing" [66]—yang muncul dari kebungkaman serta kepasifan yang diakibatkan oleh penumpasan keras menyusul skandal Malari awal 1974. Hidupnya kembali kepedulian politik mahasiswa adalah tanggapan terhadap suasana politik yang dominan selama 1975-1977, suasana di mana ada perasaan umum bahwa Orde Baru Suharto tidak memberikan hasil-hasil pembangunan yang dijanjikan di semua lapisan masyarakat, terjebak dalam korupsi tingkat-tinggi serta kehampaan moral, serta menjadi semakin represif dan tidak tanggap saja.

Terlebih lagi, untuk pertama kalinya dalam sejarah Orde Baru, sasaran dari kemarahan para mahasiswa adalah Suharto

sendiri. Tanggapan pemerintah Orde Baru pada pertengahan 1977 adalah berupa hukuman penjara yang dikenakan terhadap empat mahasiswa atas dakwaan menghina Presiden dan keluarganya. Selain langkah-langkah simbolis, seperti "pencalonan" Ali Sadikin sebagai presiden oleh seorang bekas Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia, gerakan mahasiswa yang bergiat kembali ini mengupayakan dialog dengan pemerintah.

Dalam menanggapi hal itu, Suharto, atas nasihat Prof. Sumitro Joyohadikusumo, sepakat dengan pendapat bahwa para teknokrat sebaiknya berupaya mendidik para mahasiswa akan sifat dari kebijakan-kebijakan perekonomian Orde Baru. Upaya-upaya tersebut, yang dilakukan pada Agustus-Septermber 1977, ternyata merupakan upaya hubungan masyarakat yang gagal total serta malah membuat para mahasiswa lebih bersikeras lagi. Kunjungan delegasi menteri-menteri ke kampus-kampus disambut dengan cemoohan dan diiringi dengan pertanyaan-pertanyaan tajam mengenai hal-hal yang berkaitan dengan korupsi, Angkatan Bersenjata, dwifungsi, serta mesin keamanan dalam negeri, selain juga upaya-upaya pembaruan pers. Akhirnya, di Bandung, tim Sumitro meninggalkan pertemuan di Universitas Pajajaran serta jadwal kunjungan-kunjungan berikutnya pun dibatalkan.

Upaya humas serupa dilancarkan oleh kepala Kopkamtib Sudomo sejak pertengahan 1977 atas permintaan Suharto. Dengan menggunakan nama Opstib (Operasi Tertib), kampanye Sudomo yang diliput luas oleh pers itu bertujuan melacak dan menghukum mereka yang terlibat dalam tindak korupsi. Yang terutama dijadikan sasaran adalah pungutan-pungutan tidak resmi atas angkutan serta pungutan liar (pungli) lainnya; kampanye ini mencatat keberhasilan yang cukup berarti, namun uniknya, tidak banyak membatasi korupsi sistematis pada lapisan masyarakat yang lebih tinggi apalagi membuat para pelakunya mempertanggungjawabkan perbuatannya. Seperti kampanye-kampanye serupa sebelumnya (dan sesudahnya), kampanye ini mengedepankan beberapa pejabat tinggi

yang secara politis tidak penting, beberapa korban tingkat menengah, kenaikan harga, serta sinisme publik yang cukup besar.

Kokohnya cengkeraman politis Suharto—menyusul tanggapannya yang tidak arif terhadap dugaan-dugaan atas Sawito setahun sebelumnya—semakin diuji ketika muncul berita-berita tentang rencana pembangunan makam keluarganya di bukit di sebelah selatan Jawa Tengah, dekat Solo, yang dikabarkan menelan biaya hampir US$10 juta. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila gerakan mahasiswa menjadi semakin kuat saat semangat Orde Baru merosot di bawah tekanan serangan para pengecamnya serta ketidakbecusannya mengendalikan peristiwa-peristiwa.

Seperti kebiasaannya pada saat-saat krisis, Suharto memperingatkan, dalam pidato Hari Kemerdekaan 1977-nya, tentang ancaman bahaya sisa-sisa Gerakan 30 September yang komunis itu. Tahun berikutnya, ia mendesak dipercepatnya penerbitan Buku Putih yang memberikan versi "benar" peristiwa-peristiwa tentang dan seputar 1 Oktober 1965.[67] Lebih lanjut, dalam perkembangan aneh yang bukan tidak mungkin memiliki dasar pemikiran politik dalam negeri, ia dan Ibu Tien melakukan kunjungan ke Timur Tengah pada Oktober yang, bersama-sama dengan upaya menggalakkan investasi, juga mencakup perjalanan umrah ke Mekah.[68] Sekembalinya, Suharto menyediakan subsidi bagi pembangunan mesjid serta bangunan keagamaan lainnya.

Namun, upaya-upaya seperti ini tak banyak membawa dampak dalam meredam keresahan. Demonstrasi-demonstrasi besar mahasiswa di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan di tempat lain pada awal November mencemooh kekurangan Suharto dan kelompok kepemimpinannya. "Rakyat lapar sementara bos menyiapkan kuburannya," bunyi sebuah poster di Jakarta. Para mahasiswa Bandung membuat Suharto marah dengan menuduh mereka telah melanggar Konstitusi. Kecaman-kecaman mahasiswa memperoleh dukungan menjelang pertengahan November oleh komentar-komentar Alamsyah, wakil ketua Dewan Pertimbangan Agung dan berbicara atas nama badan tersebut, yang mengacu pada kegagalan-

kegagalan rencana pembangunan Indonesia dalam mencapai sasaran-sasarannya, pada kejahatan dan korupsi yang makin menggejala, serta pada melebarnya kesenjangan antara yang kaya dan miskin.

Pada November, Bung Tomo, pahlawan Pertempuran Surabaya pada 1945, ditahan menyusul serangkaian pidato-pidatonya yang mengecam pemerintah. Rasa ketidaksenangan publik tercermin lebih luas dalam kebudayaan populer yang menyindir korupsi di kalangan pemerintahan. Adalah tidak sulit, misalnya, untuk melihat persamaan antara "Tante Sun", pengusaha perempuan Jakarta yang diparodikan dalam lagu rok yang diciptakan oleh sekelompok pemusik Bandung, dan Ibu Tien.[69]

Reaksi Suharto terhadap kecaman mahasiswa yang semakin berani itu tentang diri dan keluarganya—bukan hanya Ibu Tien, tapi juga Sigit, anak laki-laki tertuanya, yang dikabarkan membeli rumah besar salah seorang rekan bisnis (dan rekan mancing) Suharto, Hasyim Ning—pun tidak usah menunggu lama. Ia jelas sangat terluka dan marah karena sifat pribadi serangan-serangan tersebut yang secara teratur ditujukan kepada dirinya. Tanggapannya berkisar mulai dari upaya-upaya untuk membela prestasi-prestasinya (termasuk meminta TVRI agar meningkatkan liputan atas manfaat-manfaat yang mengalir akibat pembangunan), menyerukan pasukan keamanan agar meningkatkan kewaspadaan mereka, dan bahkan memberi kuliah kepada para rektor universitas agar memberi penjelasan kepada para mahasiswa tentang kebenaran dari proyek makam tersebut.

Akhirnya, sebuah pertemuan tertutup dua-hari para pemimpin Angkatan Bersenjata di Jakarta pada Desember, yang dihimpun oleh Panggabean namun jelas atas permintaan Suharto dalam suasana krisis yang semakin memuncak, dengan semangat menegaskan bahwa Angkatan Darat akan menindak tegas dan tuntas setiap oposisi terhadap kepemimpinan bangsa. Suharto sendiri dikabarkan mengulang-ulang tema yang sudah sering ia gunakan bahwa meski ia tidak pernah menginginkan jabatan kepresidenan,

ia akan memikul bebannya sebaik mungkin sejauh yang dapat ia lakukan; namun ia juga khawatir bahwa kritik-kritik menyindir yang terus berlanjut akan merongrong secara serius kekuatan-kekuatan pemerintah di masa mendatang. Kompaknya militer berdiri di belakang Suharto juga merupakan pertanda jelas bahwa batas-batas keterbukaan telah dilampaui, serta menandai dimulainya penindasan yang lebih keras dan kuat. Yang lebih penting lagi mungkin adalah bahwa kekompakan itu menunjukkan bahwa Suharto tidak memiliki pesaing politik yang berarti serta bahwa pihak militer—yang kendalinya atas aparat negara sama sekali tak terancam—praktis memberinya kemananan berlapis emas untuk jabatan tertinggi negeri itu.

Alasan-alasan militer mendukung Suharto cukup sederhana. Suharto adalah pasak pengait dalam pembangunan sistem kekuasaan yang sangat cocok dengan kepentingan-kepentingan militer. Sebagai salah seorang mantan tentara yang juga memiliki sejarah transaksi bisnis yang panjang dan pendirian kuat tentang perlunya Angkatan Bersenjata memiliki peran politik, Suharto memahami "perlunya" sosok-sosok militer dalam mengembangkan kepentingan-kepentingan politik dan keuangan demi kesejahteraan Angkatan Bersenjata serta bangsa secara keseluruhan. Tak ada orang lain yang memiliki pemahaman yang teratur dan luas tentang realitas-realitas kekuasaan yang ia miliki. Juga tak ada orang lain yang sama terampilnya dalam menangani aspek-aspek patronase kekuasaan politik. Demikian pula, tak ada orang lain yang begitu dapat diramalkan seperti Suharto. Pernyataan para jenderal pada Desember itu dengan demikian praktis merupakan penyerahan kekuasaan independen mereka kepada pribadi Suharto. Pada 1978, ia memulai langkah terakhirnya ke puncak politik. Tiga orang yang mungkin dapat menjadi penantang, atau sedikitnya memberi saluran alternatif kekuasaan politik—Jend. Sumitro, Ibnu Sutowo, dan Ali Murtopo (yang pengaruhnya tengah memudar, dan mengalami masalah kesehatan selama 1977)—diputuskan kekuasaannya atau disisihkan dengan tanpa ampun.

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pasukan keamanan bertindak cepat ketika para mahasiswa menguji tekad politik pemerintah dengan serangkaian demonstrasi serta deklarasi-deklarasi anti-Suharto pada awal Januari 1978, mencapai puncak ketika "Buku Putih" diterbitkan, sebuah manifesto mahasiswa Bandung yang menyerukan perubahan politik yang mendasar. Pemerintah juga mengambil tindakan pada 20 Januari untuk memberangus empat koran utama, termasuk koran-koran beroplah besar *Kompas* dan *Sinar Harapan.* Suharto kemudian menjelaskan bahwa ia terpaksa mengambil langkah ini karena, "menjelang akhir bulan Januari yang baru lalu, kebebasan pers telah berkembang hampir-hampir tanpa kendali, yang mendekatkan bahaya kemantapan stabilitas nasional yang dinamis. Dan apabila sedikit lagi dibiarkan berkembang, maka nyaris membawa bahaya bagi keselamatan Bangsa dan Negara."[70] Secara simultan, pihak penguasa pun mulai menangkapi para aktivis mahasiswa di seluruh Jawa. Sekitar waktu yang bersamaan, diumumkan juga sebuah keputusan bahwa Sekjen Asean, Let. Jen. H. R. Dharsono, akan dicopot dari posisinya, diduga karena pendapatnya yang sangat kritis yang ia sampaikan di Bandung pada 13 Januari tentang rezim Orde Baru. Pada 9 Februari, markas-markas mahasiswa di Institut Teknologi Bandung dikepung dan kampus diduduki oleh satuan-satuan Divisi Siliwangi; hal ini menandai serangkaian konfrontasi serupa antara tentara dan mahasiswa di seluruh Indonesia yang praktis berdampak pada ditutupnya universitas-universitas terkemuka menjelang pemilihan presiden.

Suharto kemudian memberi keterangan seperti ini: "Menteri P & K [Pendidikan dan Kebudayaan] Syarif Thayeb menyelesaikan soal kampus itu dengan para rektor."[71] Pekerjaan Syarif dilanjutkan dengan bersemangat oleh menteri pendidikan dan kebudayaan yang menggantikannya, Daud Yusuf yang lulusan Prancis itu. Daud berupaya mendepolitisasi kampus-kampus serta mengalihkan kembali perhatian para mahasiswa pada studi mereka. Apa yang ia sebut sebagai "normalisasi kehidupan kampus" terwujud dalam

penghapusan dewan-dewan mahasiswa yang independen, mengharuskan para rektor universitas bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan mahasiswa mereka, serta menarik universitas-universitas untuk semakin ketat berada di bawah pengawasan negara.[72]

TERPILIH KEMBALI SEBAGAI PRESIDEN

Suasana tantangan politik, meski ada langkah penindasan yang menguat, terus bertahan hingga sidang umum MPR—yang terselenggara pada 11 Maret 1978 untuk menerima pidato pertanggungjawaban Suharto, untuk memilih presiden dan wakil presiden, dan untuk mengesahkan Garis-garis Besar Haluan Negara; cetak biru yang dimaksudkan untuk menentukan arah-arah kebijakan secara umum bagi masa lima tahun berikutnya. Setelah menolak saran agar ia sebaiknya membacakan pidato pertanggungjawabannya kepada MPR lama yang memilihnya dan bukan dari hasil pemilihan umum 1977 (360 anggota) serta pengangkatan 560 anggota lainnya lagi setelah itu, Suharto terus saja melanjutkan membaca teks setebal 93 halaman yang memakan waktu tiga-setengah jam, guna mempertanggungjawabkan lima tahun masa jabatannya sebagai presiden.[73]

Bahkan sebelum MPR bersidang, Suharto dan orang-orangnya telah mempersiapkan serangkaian upaya untuk memerangi dan mengacaukan kelompok politik muslim yang mereka anggap sebagai dasar tumbuhnya aspirasi oposisi terhadap Orde Baru sejak awal dasawarsa 70-an. Untuk pertama kalinya, apa yang kemudian menjadi tema berulang suksesi kepresidenan dikemukakan secara sungguh-sungguh. Seperti diakui Suharto setelah itu, "benar, waktu itu ada kelompok tertentu yang tidak menghindaki dicalonkannya kembali saya sebagai Presiden. Tetapi saya mengikuti saja apa yang diinginkan oleh rakyat."[74] Garis-garis kebijakan negara berisi acuan-acuan yang menyebut tentang aliran kepercayaan, yang ditafsirkan banyak orang (termasuk negarawan sepuh yang disegani Muhammad Natsir) mendukung praktik-praktik meditatif—yang

merupakan langkah pertama untuk menerima kepercayaan sebagai salah satu dari agama-agama yang diakui secara resmi di Indonesia, selain juga merupakan upaya tersirat dalam mengurangi pengaruh komunitas muslim.

Satu-satunya suara berbeda dalam menjawab pidato pertanggungjawaban Suharto datang dari pemimpin PPP, Chalid Mawardi. Dalam pidatonya yang membahas berbagai topik itu, ia menyerang serbuan militer atas para mahasiswa, mengemukakan keprihatinán atas etika prosedur-prosedur pemilihan umum 1977, mempertanyakan arah dan kinerja kebijakan-kebijakan perekonomian Suharto, serta menuduh pemerintah mengintimidasi umat Islam dan organisasi-organisasi Islam.[75]

Debat mengenai Garis-garis Besar Haluan Negara pun mencetuskan oposisi lebih lanjut dari PPP; PPP, terutama, marah atas dimasukkannya aliran kepercayaan dan atas kebijakan yang lebih luas mengenai Pancasila. Setelah memaksakan *voting* tentang amandemen-amandemen—sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah MPR Orde Baru—satu blok besar anggota PPP melakukan *walk-out* ketika *voting* ini dilakukan. Tindakan seperti ini tujuannya simbolis saja karena terpilihnya Suharto sudah tidak dapat diragukan lagi. Suharto malah sebelumnya sudah dicalonkan oleh tiga dari empat fraksi dalam MPR, selain itu juga tidak ada calon layak lainnya; dan memang, kemungkinan bahwa ia tidak mencalonkan diri lagi, hal yang pernah secara samar dikemukakannya, "dipandang oleh para pemimpin Orde Baru sebagai bencana nasional."[76] Pada 22 Maret, Suharto terpilih, tanpa perlawanan dan secara aklamasi, untuk masa jabatannya yang ketiga, dengan menghindarkan pertarungan lewat pemilihan umum yang sempat dilontarkan sebelumnya oleh beberapa politisi muslim vokal yang mengancam mau melakukannya.

Namun, pemilihannya diliputi oleh mendung dengan keputusan Sultan Hamengkubuwono IX pada saat-saat terakhir untuk tidak mencalonkan diri lagi sebagai wakil presiden. Sri Sultan sebelumnya adalah wakil presiden yang setia dan tidak menon-

jolkan diri, namun tampaknya ia telah dibuat kesal selama menjabat karena dipinggirkan dalam masalah-masalah kebijakan oleh Suharto dan para penasihatnya. Sultan juga dikabarkan sangat marah dengan korupsi tingkat-tinggi serta kerasnya penindasan pemerintah atas gerakan mahasiswa yang baru tumbuh kembali serta atas para pengecam pemerintah lainnya. Ia, secara pribadi, juga menderita karena keleluasaan bergeraknya dibatasi oleh pihak keamanan. Sementara ia sudah bertekad jauh sebelum akhir masa jabatannya untuk tidak lagi mencalonkan diri, ia menunda untuk memberi tahu Suharto, langkah yang jelas dimaksudkan untuk mempermalukan Presiden.

Suharto memang juga benar-benar terkejut dan kecewa mendengar keputusan Sultan. Begitu terkejutnya Suharto hingga diperlukan tiga surat resmi dari Sultan sebelum Suharto akhirnya menyetujui, dengan berat hati, pengunduran dirinya.[77] Suharto kemudian terpaksa melakukan upaya pencarian yang memalukan untuk calon wakil presidennya dalam tempo singkat—sangat besar kemungkinannya bahwa pengunduran diri Sultan yang terlambat itu dimaksudkan untuk menyulitkan Suharto. Presiden akhirnya berhasil—setelah upaya untuk merekrut pemimpin NU Idham Chalid untuk jabatan itu gagal—membujuk mantan menteri luar negeri dan Ketua DPR Adam Malik saat itu untuk menerima jabatan tersebut.

Malik, meski memiliki kebiasaan berbicara secara blak-blakan, kritis perihal kekurangan-kekurangan Orde Baru, dan cenderung untuk mendahului—cara berpikir yang mengganggu Suharto yang biasa mengendalikan diri dan disiplin itu—garis kebijakan luar negeri pemerintah, terutama yang berkaitan dengan masalah memulihkan hubungan dengan Cina, terbukti merupakan wakil yang cakap dan setia. Keterusterangannya memberi kontras yang pas dengan sikap displin dan keras Suharto. Pada akhirnya, meski ada kesulitan yang ditimbulkan oleh pengunduran diri Sultan di saat-saat akhir, protes-protes simbolis dari para politisi muslim, serta terjadinya ledakan di gedung MPR pada 19 Maret

yang konon dilakukan oleh para aktivis muda, sidang MPR tersebut berlangsung cukup mulus.

Dalam merancang Kabinet Pembangunan Ketiga, Suharto menegaskan di mana letak pembagian kekuasaan baru itu. Melalui pidatonya pada 29 Maret yang mengumumkan komposisi kabinet, ia menekankan, dengan mengacu pada Penjelasan UUD, bahwa para anggota kabinet tidak "bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat ... mereka ialah Pembantu Presiden."[78] Suharto selanjutnya menjabarkan apa yang ia sebut sebagai tujuh sasaran kabinet barunya, dengan menekankan pada keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi, stabilitas, aparatur negara yang bersih dan berwibawa, persatuan yang berlandaskan Pancasila, keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum, serta kebijakan luar negeri yang menguntungkan kepentingan nasional.

Selain dari 17 menteri portfolio serta enam menteri muda dengan tugas-tugas khusus seperti di bidang transmigrasi, pemuda, koperasi, dan perumahan, Suharto menciptakan tiga menteri koordinator: Panggabean diangkat sebagai "'menteri super' Politik dan Keamanan", Surono mengurusi kesejahteraan sosial dan masalah agama dan kebudayaan, sementara Wijoyo menangani ekonomi, keuangan, industri, perdagangan, pertanian, pertambangan, dan komunikasi. Susunan ini saja merupakan wujud lebih lanjut kepercayaan Suharto pada kendalinya yang lebih pasti atas kancah politik; mereka yang diberikan peran koordinasi pada intinya adalah yang suka bekerja keras, setia tanpa batas, orang-orang yang menyadari bahwa karier mereka adalah berkat kebaikan hati Suharto. Sehubungan dengan Panggabean dan Surono, jabatan-jabatan baru mereka sebenarnya tak lebih dari cara-cara halus membuat mereka pensiun dari politik.

Yang juga mencolok adalah tidak adanya pemimpin partai politik pada jajaran kabinet, serta nasib Ali Murtopo. Ali Murtopo, yang sejak lama haus akan peran formal yang cukup berpengaruh, berjuang agar dapat diangkat untuk posisi di kementerian Dalam Negeri yang memiliki kekuasaan besar serta bergengsi itu, atau

mungkin Kementerian Luar Negeri. Namun, Suharto membuyarkan harapan-harapannya, pertama dengan mengangkatnya ke tingkat kementerian, dan kemudian memposisikannya pada Kementerian Penerangan yang relatif tidak penting. Bangsawan Bugis muslim yang saleh, Jenderal Mohammad Yusuf, diangkat sebagai menteri pertahanan, yang kemudian dengan segera mengimbau para perwira militer agar menganut gaya hidup yang lebih menahan-diri, dan berupaya menjembatani kesenjangan antara militer dan masyarakat serta membawa tingkat yang lebih tinggi dalam profesionalisme dan ketrampilan militer di jajaran angkatan bersenjata.

Sementara itu, Sudharmono diangkat sebagai menteri sekretaris negara; jabatan tersebut merupakan pengakuan atas kepercayaan penuh yang diberikan kepadanya oleh Suharto. Wewenangnya dengan cepat meningkat di dalam dunia politik elite di mana ia memainkan—dan meningkatkan—perannya sebagai manajer kabinet. Yang lebih penting lagi, dalam gaya politik Jakarta yang sangat bersifat pribadi, adalah tugasnya menjadi "penjaga pintu" untuk Suharto; menjadi orang yang mengoordinasi dan mengendalikan akses ke Presiden bagi semua orang—kecuali lingkaran kecil orang-orang kepercayaan terdekat dan penasihat presiden.

Pendatang baru adalah Prof. Dr. B.J. Habibie, yang ditunjuk sebagai menteri riset dan teknologi. Namun, Habibie sebenarnya sudah lama dikenal Suharto, yang terus mengamati kemajuannya sejak pertemuan pertama mereka di Makasar pada 1950. Habibie, yang dikirim ke Jerman pada pertengahan tahun 1950-an atas instruksi Muhammad Yamin untuk melanjutkan studi tekniknya, meraih gelar doktor dalam teknik aeronautika di Technische Hochschule Aachen pada 1965, dan pada 1974 sudah meraih reputasi bergengsi di bidangnya dan dipromosikan menjadi wakil presiden direktur pada perusahan pembuat pesawat terbang Messerschmitt-Bolkow-Blohm.

Sekembalinya ke Indonesia pada 1974, atas permintaan Suharto (permintaan yang tampaknya disampaikan sewaktu Ibnu Sutowo berkunjung ke Jerman Barat pada Desember 1973), Habi-

bie diangkat sebagai penasihat kepresidenan untuk bidang teknologi dan ditempatkan pada divisi teknologi Pertamina untuk mengembangkan industri pesawat terbang di Bandung: PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio, yang didirikan pada April 1976.[79] Habibie merupakan komponen kunci dalam rencana-rencana Presiden untuk masa mendatang. Seperti dikatakan oleh Suharto kemudian, "sesuai dengan tahapan pembangunan industri tangguh pada umumnya dan industri maju sekaligus pada khususnya dalam pengamanannya, sejak memasuki tahap kedua pembangunan jangka panjang sudah sangat diperlukan suatu lembaga tingkat pusat, untuk mendampingi Bappenas ... yang mempunyai tugas pengkajian dan penerapan teknologi, dan mampu mempersiapkan perencanaan mendetail (mikro) dari industri yang perlu dibangun."[80]

Dengan terwujudnya pemilihan-kembali dirinya, Suharto menghadapi banyak masalah politik yang merupakan kesempatan untuk melakukan beberapa pengkajian-ulang atas arah pemerintahan. Penindasan yang sudah menjadi kebiasaan masih belum ditinggalkan. Orang-orang terkemuka seperti Mahbub Junaidi, dan, lagi-lagi, Bung Tomo, ditahan pada April 1978, tampaknya dalam upaya membungkam kecaman-kecaman mereka. Namun demikian, ada juga bukti tentang inklusivisme yang lebih bermotivasikan pertimbangan strategis. Tantangan yang segera muncul adalah perlunya membatasi kekuatan politik muslim yang baru giat lagi. Tanggapan pragmatis yang sudah menjadi ciri Suharto adalah dengan menghidupkan kembali PDI yang hampir sekarat itu dengan cara mengingatkan kembali keterikatannya pada Sukarno dan mengubah citra, namun bukan substansi, PNI lama. Malah sudah sejak perayaan lima tahun PDI pada Januari 1978, Ali Murtopo mengumumkan proyek untuk merenovasi kuburan Sukarno yang tak jelas bentuknya itu di Blitar, dan proyek itu diwujudkan dengan sungguh-sungguh pada peringatan delapan tahun wafatnya Sukarno pada Juni 1978—ketika rencana untuk membangun peringatan mengenang Sukarno yang terbuat dari marmer diumumkan pada sebuah upacara khusus di makam tersebut.

Namun, secara umum masih ada masalah dalam menenangkan masyarakat sipil yang berkembang, bergolak, dan gelisah itu—yang menuntut pembaruan serta orientasi baru. Suharto menanggapi dengan lebih mengaitkan kebijakan-kebijakannya dengan apa yang dipandang sebagai kebutuhan rakyat. Opstib, misalnya, mengambil sikap yang benar-benar lebih agresif terhadap korupsi. Persepsi bahwa Suharto menjadi semakin memperhatikan masalah-masalah struktural—yang mengundang badai kecaman selama pertengahan tahun 1970-an—juga tercermin dalam pembahasan-pembahasan kebijakan yang mengarah ke pengembangan Rencana Pembangunan Lima Tahun III yang menurut jadwal akan diterapkan pada April 1979.

Menyadari kecaman bahwa pembangunan yang gencar digembar-gemborkan itu tidak banyak mendatangkan perbaikan riil bagi sebagian besar rakyat—menurut seorang pengamat kontemporer, "sejumlah besar penduduk pedesaan secara keseluruhan tampaknya tak banyak mencatat peningkatan dalam kemakmuran, dan beberapa bahkan sebenarnya mengalami kemunduran dalam kesejahteraan"[81]—Suharto mengambil langkah-langkah untuk mengubah penekanan pembangunan. Berbeda dengan dua rencana sebelumnya, seperti yang ia singgung dalam pidato Hari Kemerdekaan 1978-nya, yang menekankan pada stabilisasi dan selanjutnya pertumbuhan agregat, rencana yang baru itu berupaya memusatkan pada "kebutuhan mendasar" rakyat serta pemerataan yang lebih baik dari hasil-hasil pembangunan.[82] Selain itu, Suharto berupaya meredakan kecaman kalangan muslim dengan ketentuan, yang diberlakukan oleh Menteri Agama Alamsyah, yang melarang taktik-taktik pencarian pemeluk baru serta mengharuskan bantuan keagamaan asing disalurkan dan diarahkan oleh Departemen Agama. Sikap serupa juga tertuang pada dipercepatnya pembebasan para tahanan yang ditahan setelah upaya kudeta 1965. Hasilnya, semua tahanan golongan B yang tidak harus diajukan ke pengadilan dibebaskan pada akhir 1979.[83]

Langkah-langkah akomodatif seperti ini tidak bisa ditafsirkan sebagai pertanda menciutnya dominasi menyeluruh Suharto atas perpolitikan Indonesia. Hal ini terlihat dari pengangkatannya sebagai ketua Dewan Pembina Golkar yang baru dibentuk—dengan kewenangan mengangkat anggota dewan—pada kongres kedua Golkar pada Oktober 1978 di Bali. Suharto juga—dengan semangat baru—menyelesaikan proyek berkelanjutan untuk mengorporatisasi perpolitikan Indonesia. Saatnya pun tepat untuk menerapkan visi yang ia anut sejak lama bahwa "penerapan Pancasila dan UUD 1945 dalam seluruh segi kehidupan bangsa kita inilah yang akan merupakan jaminan bagi pertumbuhan dan keselamatan bangsa kita seterusnya."[84] Seperti diceritakannya kemudian:

> Saya menyadari, berdasarkan pengalaman kita sendiri, bahwa sistem politiek dan sistem banyak partai di masa lampau telah gagal mengantarkan bangsa kita meraih kemajuan melalui pembangunan. Dalam membangun kehidupan politik, kita tidak akan berjalan kembali ke belakang. Kita tidak akan kembali ke Demokrasi Parlementer atau Demokrasi Terpimpin yang gagal mendukung pembangunan nasional. Sebaliknya kita memandang ke depan untuk meningatkan penerapan Denmokrasi Pancasila sejalan dengan tercapainya tahap yang lebih maju dari pembangunan kita pada umumnya.[85]

Sejalan dengan itu, pada 1978 upaya Suharto untuk "memasyarakatkan Pancasila dan mempancasilakan masyarakat kita" mencapai titik lepas-landasnya. Pada November, ia berkomentar bahwa

> sebagai negeri yang telah mengalami berbagai krisis dan kemelut pergolakan politik di masa lampau, kita harus mencegah terulangnya kembali kejadian-kejadian-destruktif yang hanya mendatangkan penderitaan kepada rakyat banyak. Kejadian-kejadian yang menyedihkan itu mungkin timbul, apabila kita lupa atau

> alpa dalam menghayati dan mengamalkan gagasan-gagasan dasar yang telah kita terima dan kita miliki bersama. Dan gagasan-gagasan dasar itu ... tidak lain adalah apa yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.[86]

Yang sudah dipersiapkannya adalah program pendidikan besar-besaran untuk "menghayati dan mengamalkan Pancasila". Program yang dikenal dengan singkatan P-4 ini merupakan "babak baru dalam usaha kita semua untuk mewujudkan dan melestarikan Pancasila."[87] Program ini mengharuskan terbentuknya sejumlah badan-badan pengelola bagi pengembangan dan penyelenggaraan program tersebut. Badan-badan ini selanjutnya menyelenggarakan rangkaian-rangkaian kursus yang berlanjut, yang pada awalnya ditujukan bagi pegawai negeri dan anggota Angkatan Bersenjata. "Hanya pegawai negeri dan anggota ABRI yang memahami Pancasila, UUD '45, dan GBHN-lah yang akan dapat mengemban tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dengan baik."[88] Program P-4 ini dibimbing oleh komisi penasehat kepresidenan yang kemudian dikenal dengan nama P-7. Tim lainnya menyusun propaganda instruksi serta melatih para instruktur indoktrinasi. Tim yang ketiga, BP-7 (Badan Pengawas Pelaksanaan Pengarahan untuk Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), mengawasi seluruh program indoktrinasi massal tersebut.

Kebijakan ini semuanya amat cocok dengan pandangan berprasangka Suharto terhadap gagasan-gagasan liberal. Kebebasan pers, misalnya, ditafsirkan menjadi kebebasan 'yang bertanggung jawab': "pers yang bebas dan bertanggungjawab akan memperkokoh pengembangan stabilitas nasional yang dinamis, tumbuhnya kreatifitas dan mekarnya demokrasi yang sehat." Sementara perbedaan pandangan dapat diterima, bahkan dengan pemerintah sekali pun, perbedaan-perbedaan itu harus "disertai dengan jalan keluar yang baik, sedangkan usaha untuk melaksanakan pendapat yang berbeda harus dilakukan dengan cara-cara yang demokratis berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945."

Sejalan dengan ini, konsep *rule of law* memerlukan pemahaman yang berhati-hati dalam konteks Indonesia. "Sebagai negara yang berdasarkan hukum, Indonesia wajib mempertahankan *rule of law*, tetapi sendi ini wajib pula ditafsirkan secara positif dan dinamis. Ini berarti bahwa didalam pelaksanaannya, *rule of law* wajib senantiasa ditumbuhkan sesuai dengan perkembangan kepentingan dan aspirasi didalam masyarakat." Hak-hak dan kemerdekaan membawa serta "tanggungjawab dan kewajiban-kewajiban ... kebebasan itu tidak mutlak." Secara lebih umum, demokrasi tidak berarti kebebasan berbuat apa saja: "demokrasi harus mengenal disiplin dan tanggungjawab, karena tanpa kedua hal itu maka demokrasi hanyalah berarti kekacauan." Pancasila melandasi semuanya: "Pancasila adalah sumber dari segala gagasan kita mengenai wujud masyarakat yang kita anggap baik, yang menjamin kesentosaan kita semua, yang mampu memberi kesejahteraan lahir batin bagi kita semua."[89]

FOSKO DAN PETISI 50

Resminya Suharto pensiun dari dinas aktif pada 1976 menandai dimulainya perubahan generasi di dalam Angkatan Darat. Mereka yang sudah berdinas bersamanya di tahun 1950-an dan 1960-an, dan bahkan dalam masa-masa revolusi, mulai memasuki masa pensiun. Namun, bagi sekelompok kecil perwira ini, pensiun bukan hanya berarti waktu dan kemudahan untuk lebih banyak terlibat dalam bisnis atau main golf, melainkan juga peluang, setelah bebas dari belenggu disiplin tentara, untuk mengungkapkan ketidakpuasan mereka yang menumpuk terhadap cara dan arah kebijakan Orde Baru.

Wujud serius pertama dari ketidakpuasan para veteran ini terjadi pada 1977. Para perwira senior yang sudah pensiun dari "divisi-divisi" Diponegoro, Brawijaya, dan Siliwangi berupaya mendirikan klub studi dan diskusi untuk mempertemukan mereka yang sama-sama memiliki pandangan berbeda dengan Orde Baru.

Dengan memperoleh persetujuan dari Kepala Staf Angkatan Darat pada April 1978 dan dengan menggunakan nama Fosko (Forum Studi dan Komunikasi Angkatan Darat), kelompok ini tak lama kemudian menyalurkan arus gagasan kritis yang semakin detail ke markas angkatan darat, yaitu gagasan akan perlunya mengencerkan kepekatan konsep dwifungsi militer serta memperbaiki prosedur-prosedur demokrasi. Tahun berikutnya, pada Juni, Nasution—yang sangat kritis terhadap cacat-cacat demokratis pemilihan umum 1977 dan selanjutnya menyebut-nyebut tentang adanya krisis kepemimpinan[90]—dengan mendapat dukungan dari para tokoh pensiunan militer lainnya seperti Ali Sadikin dan Hugeng, serta tokoh lain termasuk Mohammad Hatta yang disegani itu, mendirikan badan lainnya: Yayasan Lembaga Kesadaran Berkonstitusi (LKB).

Reaksi pemerintah, yang terkejut oleh membanjirnya perbedaan pendapat—yang menyertai kampanye pemilihan umum 1977 serta menjelang pemilihan presiden—di kalangan sipil, sudah dapat diduga. Sebuah seminar LKB yang dijadwalkan diselenggarakan pada Januari 1979 tidak memperoleh izin penyelenggaraan—atas instruksi dari Sudomo. Tak kehilangan akal, kelompok ini berhasil membujuk para anggota DPR, termasuk mereka yang terkait dengan fraksi ABRI, agar ikut serta dalam diskusi-diskusi dalam bulan-bulan sesudah bulan Agustus. Namun, dalam jangka panjangnya, keragaman pandangan di dalam LKB sendiri membuatnya tidak dapat berperan efektif. Kelompok ini, seperti dikatakan oleh Jenkins, merupakan "aliansi yang rapuh dan pada dasarnya bersifat sementara."[91]

Fosko itu sendiri, yang juga membuat Suharto tidak senang, dibubarkan pada Mei 1979 atas instruksi Widodo, dan digantikan oleh penggantinya yang dikabarkan lumpuh serta tidak diperbolehkan menyiarkan pandangan-pandangannya, sebagai akibat dari invasi Fosko ke wilayah-wilayah yang peka seperti dwifungsi Angkatan Bersenjata. Ketika Fosko terbukti tidak dapat bertahan

dengan sikap pasif seperti ini, Angkatan Darat kemudian menghentikan hubungannya dengan kelompok ini pada pertengahan 1980.

Inti dari keresahan ini adalah sangat kuatnya persepsi yang dirasakan bahwa Angkatan Bersenjata telah menyimpang dari perannya yang benar sebagai penjamin independen nilai-nilai kebangsaan Indonesia serta terlalu dekat mengasosiasikan dirinya dengan rezim dan kebijakan-kebijakan Suharto, serta Golkar pada khususnya—"ada 'kontradiksi' antara klaim ABRI untuk mengatasi semua golongan dalam masyarakat serta kenyataan dukungannya yang berlanjut terhadap Golkar."[92] Dalam serta kerapnya penyisipan sosok-sosok militer ke dalam peran-peran fungsional dalam masyarakat—yang di masa lalu sebagian besar adalah cagar wilayah kalangan sipil—menjadi keprihatinan khusus.

Pada pertengahan tahun 1970-an, lebih dari 20.000 anggota militer berdinas dalam peran-peran nonmiliter, mulai dari duta besar dan gubernur provinsi hingga rektor universitas dan pegawai-pegawai sipil departemen. Tugas utama mereka adalah memberi tulang punggung yang berdisiplin dan responsif pada struktur yang pada dasarnya adalah layanan sipil. Ada persepsi yang kuat, baik di kalangan kelompok veteran dan bahkan dalam jajaran ABRI yang lebih tinggi, termasuk staf pada Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) di Bandung, bahwa perlu adanya pengurangan yang cukup berarti dari peran kekaryaan yang dijalankan oleh militer ini, serta bahwa kegiatan seperti ini hanya merongrong kemurnian tujuan Angkatan Bersenjata. Beberapa anggota staf di Seskoad menyusun makalah pada pertengahan 1977; makalah yang dengan kuat mengajukan alasan agar ABRI mundur dari jenis-jenis kolusi politik dengan Golkar yang mana jenis kolusi ini telah menandai kampanye pemilihan umum 1977. Pada Oktober tahun berikutnya, Kepala Staf Angkatan Darat Widodo yang baru diangkat itu mengeluarkan kertas kerja yang mirip dengan aspirasi makalah Seskoad tersebut.[93]

Suharto waktu itu marah sekali dengan perkembangan-perkembangan seperti ini, dan tampaknya terperangah mendapati

bahwa ada kalangan yang merasa perlu menentang gagasan kesatuan tujuan yang esensial antara Golkar dan ABRI—yang tampaknya merupakan isi instruksi Suharto kepada Sudomo pada Oktober 1979.[94] Ia juga merasa jengkel dengan aksi *walk-out* di DPR yang dilakukan oleh unsur-unsur NU di dalam PPP sewaktu pembahasan tentang RUU Pemilihan Umum di DPR pada Februari 1980. Berbicara tanpa menggunakan teks pada Rapat Pimpinan ABRI di Pekanbaru pada 27 Maret,[95] Suharto berbicara dengan cara-cara yang mengingatkan orang pada pembelaannya yang terkenal atas Ibu Tien di rumah sakit Pertamina hampir satu dasawarsa sebelumnya. ABRI, ujarnya, harus memilih sebagai mitranya mereka yang membela Pancasila serta UUD 1945—yang membuat para pendengarnya berkesimpulan bahwa kampiun Pancasila adalah Golkar serta musuhya adalah kekuatan-kekuatan politis muslim, terutama NU, yang dikabarkan menolak menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Pernyataan Suhrto ini bertentangan dengan jaminan-jaminan yang diberikan oleh Menteri Pertahanan M. Yusuf bahwa ABRI tidak akan menjagokan perjuangan tertentu melainkan berdiri di atas semua pelaku politik. Sekitar tiga minggu setelah itu, dalam pidato spontan dan sengit lainnya pada resepsi peringatan ulang tahun Kopassandha di Cijantung, Jawa Barat, Suharto menyerang apa yang disebutnya sebagai musuh-musuh Pancasila, kabar-kabar yang diungkapkan kepada umum tentang dugaan kegiatan-kegiatan korup istrinya, dan bahkan kisah-kisah tentang skandalnya dengan bintang film.[96]

Menanggapi hal tersebut, sekelompok jenderal yang sudah pensiun, termasuk Nasution, Mokoginta, Yasin, Hugeng, dan Ali Sadikin, umumnya disebut dengan julukan kelompok sakit hati—bersama-sama dengan para tokoh sipil terkemuka yang tidak puas, di antaranya para mantan perdana Menteri Mohammad Natsir dan Burhanudin Harahap, serta pemimpin pemerintahan darurat di Sumatra semasa tahap-tahap sesudah revolusi, Syafruddin Prawiranegara—menyusun sebuah petisi dan disampaikan kepada DPR pada 13 Mei. Petisi 50, begitu nama julukannya, sangat kritis

terhadap Suharto karena mengadopsi penafsiran Pancasila yang menguntungkan diri sendiri serta sempit itu dan menggalakkan kolaborasi ABRI dengan Golkar, pada saat ABRI mestinya berdiri di atas semua kekuatan-kekuatan sosial. Yasin, mantan panglima Brawijaya serta wakil KSAD, menambahkan pengkajian tujuh-halamannya sendiri atas rezim Suharto selain juga antara lain mengecam akuisisi Suharto atas *ranch* sapi serta perlengkapannya, Tapos, dan menuduhnya bersikap munafik.[97]

Petisi 50 itu membuat marah Suharto: "apa yang dilakukan oleh mereka ... tidak saya sukai. Cara-caranya tidak saya sukai." Apa yang tampaknya membuatnya sangat marah adalah gagasan tentang oposisi yang kuat dan menetap yang mungkin akan dapat mengancam dengan cara menciptakan instabilitas yang berkelanjutan. "Oposisi seperti di Barat kita tidak kenal di sini. Oposisi yang asal saja menentang, asal saja berbeda, tidak kita kenal di sini."[98] Dalam tindakan balasan yang kasar dan klasik, Sudomo dan Yoga membuat dokumen yang jelas dibuat-buat dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi majalah dan surat kabar; dokumen yang menurut Yoga berasal dari para jenderal sakit hati dan yang menyerukan penggulingan pemerintah. Setelah itu, menurut Ali Sadikin, ketika 199 anggota DPR mengajukan pertanyaan pada Juli kepada pemerintah tentang komentar Suharto, Sudharmono diutus oleh Suharto untuk menanggapinya; ia melampirkan transkrip pidato-pidato itu pada jawaban Suharto, yang mencakup pesan agar para anggota DPR mempelajarinya. Bila mereka tidak puas, mereka sebaiknya menindaklanjuti melalui wahana fraksi DPR. Namun, tak ada kelanjutan dari fraksi tersebut.

Meski dalam kenyataannya Petisi 50 menimbulkan heboh publik yang besar, walau tak berlangsung lama, dampak politisnya sebenarnya tidak banyak. Masalah yang diperdebatkan terlalu sulit dimengerti dan jauh dari kepedulian-kepedulian langsung sebagian besar rakyat Indonesia; debat-debatnya pun dilakukan dalam eselon-eselon yang begitu tinggi sehingga kecil kemungkinan akan dapat memicu kemarahan berarti dari publik. Suharto sendiri

dengan cepat menyimpulkan bahwa senjata terbaiknya menghadapi petisi adalah dengan membiarkannya saja; pers pun diinstruksikan agar bertindak serupa. Para penandatangan petisi itu selanjutnya dikenakan pembatasan-pembatasan yang mengganggu dan menyusahkan (yang sebagian sifatnya sepele saja, sebagian lagi merugikan) atas kegiatan-kegiatan mereka, termasuk diberhentikannya pemberian kredit kepada mereka, tidak diberikannya kontrak-kontrak pemerintah pada usaha-usaha mereka, intimidasi yang semena-mena, hilangnya hak bepergian ke luar negeri—dan, atas instruksi kilat Suharto, dicoret dari daftar undangan untuk perayaan Hari Kemerdekaan di Istana—yang semuanya terkesan lebih bersifat dengki ketimbang takut akan adanya bahaya politik. Pada April 1981, pemulihan kekakuan konservatisme ditandai dengan dibuatnya laporan yang panjang, yang dikenal dengan nama makalah Hankam—oleh sekelompok penulis yang dipilih dan diketuai oleh Dr. Nugroho Notosusanto, direktur Pusat Sejarah Angkatan Bersenjata—yang menyetujui inti dari pandangan presiden tentang dwifungsi Angkatan Bersenjata.[99]

PEMILU DAN PEMILU-KEMBALI

Penghancuran yang efektif atas gerakan pembaruan—meski sesekali ada petisi-petisi dengan pendapat berbeda yang muncul dari para anggota elite yang tidak puas—yang terpusat di seputar para anggota Petisi 50 membuat perpolitikan Indonesia diliputi kebungkaman yang sangat aneh. Dan memang, upaya-upaya pemerintah untuk membatasi oposisi bahkan berakibat pada diusirnya wartawan Australia Warwick Beutler (tampaknya karena siaran-siaran Radio Australia tentang dugaan-dugaan korupsi yang ditujukan kepada diri Suharto dalam persidangan kasus di Singapura)[100] serta Peter Rodgers (karena melaporkan tentang kelaparan di Timor Timur) masing-masing pada Juni 1980 dan Februari 1981.[101] Para politisi muslim juga mendapat pelajaran pada awal 1981 dari peristiwa pembajakan pesawat terbang jet Garuda yang sedang

dalam penerbangan domestik—kabarnya oleh para ekstremis muslim yang terkait dengan komando Jihad—serta penyelamatan para sanderanya oleh pasukan khusus Indonesia di bandar udara Bangkok.

Kampanye pemilihan umum yang agak lesu—"dengan partai-partai oposisi dalam keadaan yang lebih buruk ketimbang pada saat pemilihan umum 1977"[102]—meski kadang berkembang menjadi keras, termasuk kerusuhan besar pada sebuah rapat umum Golkar di lapangan Banteng di Jakarta, dan dengan korban yang terkait dengan pemilihan umum mencapai sekitar 60 orang, mencapai puncaknya pada 4 Mei 1982 dengan kemenangan mudah lagi oleh Golkar. Kali ini, kemenangan yang sudah menjadi seperti ritual itu pada "pesta demokrasi" ini dicapai berkat organisasi politik yang lebih baik serta dengan dukungan yang kurang begitu terang-terangan dari ABRI, yang diperintahkan oleh Yusuf agar mengambil sikap netral dalam kampanye tersebut. Bulan berikutnya, Suharto masuk rumah sakit untuk menjalani operasi kelenjar prostat.

Dalam menyiapkan pemilihan kepresidenan 1983, Suharto, yang belajar dari pengalamannya pada 1978, berusaha keras menghindari upaya dibuat malu oleh berita mendadak seperti pengunduran diri Sultan dari pencalonan wakil kepresidenan. Agar lebih siap, ia berkonsultasi dengan para anggota Golkar dan ABRI, dan menunjuk tim beranggotakan lima orang untuk menilai para calon wakil presiden yang potensial. Meski konsultasi-konsultasi ini dilakukan, sudah pasti bahwa Suharto sendirilah yang menentukan dalam keputusan akhirnya, yaitu Umar Wirahadikusumah yang etnis Sunda, seorang mantan perwira Siliwangi, yang paling dikenal sebagai panglima garnizun Jakarta pada saat peristiwa G-30-S, serta yang terakhir menjabat sebagai Kepala Badan Pengawas Keuangan.

Masalah-masalah potensial lainnya masih tetap ada, a.l. keresahan sosial tentang apa yang tampak sebagai menurunnya tingkat kesejahteraan di pedesaan, yang tercermin dalam kerusuhan

anti-Cina di Solo dan Semarang pada 1980. Menanggapi kesulitan-kesulitan ini, Suharto, yang tak diragukan lagi menjadi lebih peka akibat heboh belum lama berselang tentang dwifungsi dan perlunya menarik peran fungsional ABRI dalam mengelola negeri, mulai menyadari bahwa ia harus membuat jenis wahana baru untuk ambisi-ambisi politiknya.

Mulai tahun 1970-an dan seterusnya, Suharto secara bertahap bergerak lebih dekat ke arah pembantu terpercayanya, Sudharmono, pelopor pengelolaan ekonomi yang disponsori negara (yang sekaligus mengurangi kekuasaan yang dimiliki para teknokrat sebelum *boom* minyak kedua), dengan mempersiapkan rangkaian strategi untuk mengembangkan basis dukungan sipil yang lebih berbeda seraya pada saat yang sama mempersempit penekanan ideologis rezimnya.

Dalam pidato Hari Kemerdekaan 1981-nya, Suharto menggarisbawahi bahwa basis pemerintahannya adalah Pancasila dan UUD 1945, dan menjelaskan bahwa pengangkatannya oleh sebagian anggota MPR secara tegas dimaksudkan untuk mencegah amandemen terhadap Konstitusi—bukan untuk mendudukkannya sebagai presiden seumur hidup. Perekonomian yang cocok untuk Indonesia menurutnya adalah yang didasarkan pada penguasaan oleh negara dan pada akhirnya terpusat pada koperasi. Dalam pidato 1982-nya, ia menyatakan bahwa kekerasan kampanye pemilihan umum diakibatkan karena beberapa kelompok menolak menerima Pancasila sebagai landasan mereka; ia juga memperingatkan akan pemurnian ideologi di masa-masa mendatang.[103]

KESIMPULAN

Masa dari pertengahan tahun 1970-an hingga awal 1980-an merupakan titik terendah dalam karier kepresidenan Suharto. Pemerintahannya tiada henti didera oleh krisis yang hampir semuanya adalah akibat warisan dari kejanggalan struktural Orde Baru. Meski posisinya sendiri masih kuat, presiden yang semakin defensif

dan dicabik-cabik kecaman yang tak putus-putusnya ini—terutama dari para mantan rekan dan pendukungnya di kalangan militer—menyadari bahwa koalisi dukungan luas yang membawanya ke puncak kekuasaan pada akhir tahun 1960-an telah menciut ke tingkat yang membahayakan; "setiap lima tahun, lingkaran teman Suharto menjadi semakin kecil," Nasution berkomentar.[104]

Meski ada bahaya dan kesulitan ini—dan sudah menjadi cirinya bila ia memperingatkan pada 1982 akan perlunya melipatgandakan kewaspadaan menghadapi ancaman laten komunisme—Suharto mencatat beberapa kemajuan penting dalam pembangunan rezimnya selama periode ini. Pada sisi infrastruktur, ia memimpin negara yang memiliki modal alat dan manusia serta kemampuan di berbagai sektor, baik dalam lingkup pemerintahan maupun swasta—yang hanya bisa diimpikan saja oleh pendahulunya—yang dengan cepat mengubah wajah masyarakatnya. Salah satu tanda ditingkatkannya kemampuan negara adalah pertumbuhan sekitar 66 persen dalam jajaran birokrasi dalam sepuluh tahun sejak 1974; yang lainnya adalah porsi PDB yang meningkat secara bertahap dan yang terkait dengan kegiatan negara.

Di bidang ideologis, ia telah mengomposisikan bahan-bahan bangunan pokok untuk korporatisasi Indonesia. Menjelang peralihan ke tahun 1980-an, lonjakan harga minyak yang menguat lagi serta serangkaian panen padi yang istimewa ikut membantunya dalam memantapkan kembali legitimasinya yang sempat dikatakan oleh beberapa kalangan sedang surut. Dan memang, pada 1981, Suharto mengungkapkan tekad bulatnya untuk tidak melakukan hal lain di sisa hidupnya kecuali "untuk mengabdi bagi kepentingan rakyat."[105]

Perkembangan sosial dan ekonomi pada gilirannya meletakkan landasan bagi Indonesia baru—di mana kekuasaan militer tidak begitu diperlukan dan juga tidak cocok lagi. Jika menoleh ke belakang, sangatlah tepat bahwa tahun-tahun awal 1980-an memperlihatkan kebangkitan birokrasi dan keahlian hukum-sebagai-kekuasaan sebagai kekuatan yang berdiri sendiri. Pelaku utamanya

adalah Sudharmono, yang merupakan tangan kanan Suharto sejak akhir tahun 1960-an, dengan didukung oleh jaringan yang sangat efektif yang terdiri atas para administrator hukum dan sipil senior yang cenderung menganut paham perekonomian nasionalis.

Sebagai tanda semakin meningkatnya kekuasaan Sudharmono, dan realitas-realitas sosial dan kelembagaan yang mendorongnya, adalah keputusan presiden No.10 tahun 1980, yang memberikan hak-hak menentukan atas semua pembelian keperluan negara yang jumlahnya di atas Rp. 500 juta[106] kepadanya dan 'Tim 10'-nya (yang diberi nama sesuai dengan nomor keputusan tersebut). Indonesia baru pun membuka peluang kepada Sudharmono dalam meraih keunggulan selain memberi jalan kepada Suharto untuk menjauhkan diri dari rekan-rekan tentaranya yang semakin uzur seperti Ali Murtopo, dan dari para pengecam yang mengesalkannya dari kalangan militer—serta untuk mulai mengakhiri ketergantungannya terhadap militer. Program ini dimaksudkan sebagai sarana bagi Suharto untuk kian mewujudkan kekuasaannya.[]

9 Kejayaan

Undangan Kepada Suharto untuk menghadiri peringatan 40 tahun Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) di Roma pada November 1985 merupakan sumber kebanggaan luar biasa baginya—begitu besarnya sehingga ia kemudian memilih peristiwa itu untuk memulai penulisan otobiografinya. Suka citanya yang jelas tampak atas penghormatan tersebut—yang merupakan pengakuan atas keberhasilan Indonesia melipatgandakan produksi beras dalam 15 tahun sesudah 1969 serta mencapai sasaran swasembada beras yang sejak lama diidamkan pada 1984—memberi wawasan tajam pada citra-diri orang yang selalu membanggakan dirinya sebagai anak laki-laki sederhana dari seorang penduduk desa Jawa, dan yang dengan demikian dekat dengan hati dan roh apa yang ia artikan sebagai Indonesia asli. Banyaknya masalah yang dihadapi program swasembada beras, kenangnya, diselesaikan berkat "tekad yang gigih".

"Hendaknya Saudara bayangkan," tuturnya, "seseorang yang lebih dari enam puluh tahun ke belakang masih anak bermandi lumpur di tengah kehidupan petani di desa Kemusuk saat itu naik mimbar dan bicara di depan sekian banyak ahli dan negara-

wan dunia."[1] Guna menggarisbawahi pesannya, Suharto mengakhiri pidatonya dengan mengumumkan sumbangan negerinya berupa 100.000 ton beras yang belum digiling untuk dibagi-bagikan kepada para korban kelaparan di Ethiopia. Pada Juli 1986 di Jakarta, untuk memperingati prestasi swasembada beras, direktur jenderal FAO menghadiahkan Suharto—yang menerimanya dengan tersenyum lebar—dua medali emas bergambar relief serta bertuliskan namanya.

Keberhasilan ini merupakan prestasi puncak dari apa yang Suharto kerap melihatnya sebagai program pembangunan bertahap yang semakin berhasil di bawah bimbingannya. "Saya melihat dan merasa—sebab itu saya bersyukur dan berbahagia—bahwa tingkat kesejahteraan umum dan kecerdasan bangsa kita mengalami kemajuan-kemajuan yang bermakna." Bukan saja fokus dari pengembangan dan intensifikasi pertanian telah mendatangkan perbaikan-perbaikan produksi yang luar biasa bagi keluarga-keluarga petani—"lapisan terbesar masyarakat kita"—tapi arah pembangunan secara umum juga telah membawa serta keberhasilan dalam keluarga berencana ("Dewasa ini kira-kira enam di antara sepuluh pasangan usia subur kitamengikuti program Keluarga Berencana kita inidengan penuh kesadaran, dengan hampir 16 juta peserta aktif Keluarga Berencana"), dalam peningkatan peluang pendidikan bagi semua anak-anak, serta dalam pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomis di seluruh negeri, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan.

Tak usah disebutkan lagi, penekanan pada produksi pertanian serta keberhasilannya telah meletakkan landasan bagi stabilitas di sektor pedesaan, di mana kemakmuran tampak pada umumnya, maupun di kota-kota, di mana makanan murah—harganya dikendalikan dengan hati-hati untuk mengimbangi kepentingan konsumen dan produsen—menopang kepuasan politik. "Sampai sekarang,masih ada kekurangan akibat pembangunan ini. Masih ada orang yang melarat, sementara di pihak lain sudah ada yang jadi kaya. Tetapi ini memang proses. Kalau kita tidak mengabil

kebijaksanaan demikian, misalnya terus langsung melakukan pemerataan, mana ada orang bermodal yang mau bekerja mati-matian tanpa melihat bakal untung banyak?"[2] Pernyataan-pernyataan kemenangan Suharto mencerminkan kenyataan bahwa pertengahan tahun 1980-an adalah puncak kekuasaan dan pengaruhnya di Indonesia, masa yang praktis merupakan kemenangan politiknya yang sempurna.

Pengakuan internasional diterima Suharto setahun setelah pemilihannya secara aklamasi untuk masa jabatan lima-tahun yang keempat sebagai presiden, dan MPR memberinya gelar Bapak Pembangunan. Seperti sebelumnya, komponen penting kekuasaannya atas MPR yang sekarang sudah menyerah itu—tak ada *voting* yang dilakukan dan tak terjadi pengulangan *walkout* seperti pada 1978 selama sidang 11 hari pada Maret 1983—adalah keberhasilan yang lebih baik dari Golkar dalam pemilihan umum 1982. Meski demikian, ia sesumbar bahwa, "Tetapi kalaupun tidak begitu halnya, tampak-tampaknya tawaran kepada saya untuk kembali duduk sebagai Presiden untuk masa jabatan berikutnya tidaklah akan berubah. Sebab, bukan saja Golkar yang telah meminta saya untuk kembali menjabat jabatan Presiden, melainkan juga partai-partai."[3]

Para anggota Kabinet Pembangunan Keempat Suharto terdiri atas orang-orang dengan persyaratan yang sama seperti pilihannya untuk wakil presiden: tak menonjolkan diri, profesional, berpengalaman, aman, meski beberapa orang kuat yang berdinas lama seperti Amirmachmud tidak ada lagi di dalamnya. Walau Wijoyo juga pergi, pengaruh teknokrat masih tetap kuat, dengan Ali Wardhana menggantikan Wijoyo sebagai menteri koordinator. Ali Murtopo, yang sakit keras dan pengaruhnya jauh menyusut, akhirnya dikesampingkan—ia digantikan Harmoko, seorang mantan wartawan yang berpengaruh—ke jabatan enteng pada Dewan Pertimbangan Agung. Sementara itu pengaruh Sudharmono juga berkembang semakin dalam.

MENGAMANKAN ORDE BARU: INTEGRITAS KORPORAT

Namun, kemenangan ekonomi dan politik tidak dengan sendirinya menjamin keamanan yang sesuai dengan kehendak Suharto. Untuk mewujudkannya, ia mengambil langkah dari dua front. Pertama adalah dengan melanjutkan dan, memang, mengintensifkan hukuman tanpa ampun terhadap mereka yang ia pandang mengganggu ketenangan pasif yang ia idam-idamkan itu. Kedua adalah upaya-upayanya untuk semakin meningkatkan korporatisasi negara Indonesia.

Ada dua contoh utama dari ketidaktoleransian Suharto terhadap setiap nada oposisi—yang tidak patuh pada pembangunan—yang semakin meluas dari masyarakat pasifnya itu. Yang pertama adalah berupa serangkaian pembunuhan atas orang-orang yang diduga tokoh-tokoh kriminal bawah tanah serta para mantan narapidana pada awal dan pertengahan tahun 1980-an. Dimulai di Yogyakarta pada Maret 1983, mayat-mayat para tokoh kriminal yang dibunuh ditemukan di tempat-tempat umum; tak lama kemudian gejala yang diberi akronim Petrus (Penembak Misterius) meluas ke Jakarta dan kota-kota lainnya di Jawa serta di luar Jawa.

Panglima Angkatan Bersenjata yang baru diangkat, Benny Murdani, berulang kali membantah bahwa pasukan keamanan terlibat dalam pembunuhan-pembunuhan tersebut, dengan menyebut kejadian-kejadian tersebut merupakan perang antargang-gang kriminal—meski masyarakat banyak yakin bahwa pasukan keamanan main hakim sendiri dalam upaya mengurangi tingkat kriminalitas yang membubung yang ikut marak mengikuti pembangunan perekonomian serta penggusuran-penggusuran di kota-kota Indonesia yang padat penduduknya itu.[4]

Baru setelah penerbitan otobiografi Suharto pada 1989 ia mengakui di depan umum untuk pertama kalinya tentang luasnya keterlibatan pemerintah:

> Kejadian itu, misterius juga tidak. Masalah yang sebenarnya adalah bahwa kejadian itu didahului oleh ketakutan yang dirasakan oleh rakyat. Ancaman-ancaman yang datang dari orang-orang jahat, perampok, pembunuh, dan sebagainya. Ketenteraman terganggu. Seolah-olah ketenteraman di negeri ini sudah tidak ada. Yang ada seolah-olah hanya rasa takut saja. Orang-orang jahat itu sudah bertindak melebihi batas perikemanusiaan. Mereka tidak hanya melanggar hukum, tetapi sudah bertindak melebihi batas perikemanusiaan. Umpamanya saja, orang tua sudah dirampaspelbagai miliknya, kemudian masih dibunuh. Itu *'kan* sudah di luar kemanusiaan. Kalau mengambil, ya mengambillah, tetapi jangan lantas membunuh. Kemudian ada perempuan yang diambil kekayaannya dan si istri orang lain itu masih juga diperkosa oleh orang jahat itu, di depan suaminya lagi. Itu sudah keterlaluan! Apa hal itu mau didiamkan saja?Dengan sendirinya kita harus mangadakan *treatment*, tindakan yang tegas. Tindakan tegas bagaimana? Ya, harus dengan kekerasan. Tetapi, kekerasan itu bukan lantas dengan tembakan, dor! dor! begitu saja. Bukan! Tetapi yang melawan, ya, mereka mau tidak mau harus ditembak. Karena melawan, maka mereka ditembak. Lalu ada yang mayatnya ditinggalkan begitu saja. Ini untuk *shock therapy*, terapi goncongan. Supaya, orang banyak mengerti bahwa terhadap perbuatan jahat masih ada yang bisa bertindak dan mangatasinya. Tindakan itu dilakukan supaya bisa menupmas semua kejahatan yang sudah melampaui batas perikemanusiaan. Maka kemudian meredalah kejahatan-kejahatan yang menjijikkan itu.[5]

Kampanye Petrus itu, seperti dikatakan oleh seorang ilmuwan, "contoh klasik dari kampanye teror negara yang berbasis intelijen."[6] Petrus tampaknya bermula atas prakarsa seorang perwira militer di Yogyakarta, namun dengan cepat menjalar ke wilayah lainnya sebagai cara yang efisien dalam mengatasi gelombang kejahatan yang melanda Indonesia, yang tidak dapat dibuat jera oleh penanganan polisi serta prosedur peradilan biasa, dan yang kejahatannya bertahan karena tidak ada langkah yang diambil untuk menghentikannya. Sementara Suharto sendiri tidak menganjurkan gagas-

an ini; ia mengetahui gagasan ini dan tidak melakukan sesuatu untuk mengendalikannya. Dan memang, selain pengecualian kecil bahwa hanya mereka yang "melawan" yang ditembak, Suharto sama sekali tidak menunjukkan penyesalan dan malah dalam otobiografinya menunjukkan rasa cukup puas dengan hasil yang dicapai.

Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa sasaran utama dari kampanye Petrus itu adalah penjahat kelas teri dan tukang pukul yang sebelumnya menjadi agen-agen Ali Murtopo untuk berbagai kegiatan yang berkaitan dengan keamanan, namun yang kemudian memiliki potensi mempermalukan pemerintah atau sudah tidak berguna lagi, atau ternyata tidak dapat dipakai untuk tujuan-tujuan baru Murdani.[7]

Namun, tidak ada bukti jelas akan pendapat ini, dan pendapat tentang perlunya rezim Orde Baru memberlakukan kedamaian berdasarkan versinya sendiri menjadi masuk akal dan sejalan dengan etos yang berlaku bahwa individu pada dasarnya mesti tunduk pada kebutuhan masyarakat. Tak dapat diragukan lagi bahwa pihak keamanan seluruhnya terlibat dalam operasi tersebut; operasi yang menelan korban 5.000 hingga 10.000 orang sebelum diakhiri pada awal 1985.

Dalam wawancara pada 1998, Murdani menjelaskan bahwa pengadilan benar-benar tidak mampu menangani gelombang kejahatan tersebut. Sejalan dengan itu, pasukan intelijen membuntuti setiap penjahat yang dicurigai untuk memastikan bahwa penjahat tersebut memang benar seperti kenampakannya. Kalau dugaan itu sudah diperkuat, penjahat itu dihabisi begitu saja.[8]

Sikap dominan yang sama diterapkan dalam gaya oposisi pemerintah menghadapi kerusuhan politik yang baru hendak berkembang. Seperti yang telah kita saksikan, sumber utama kegelisahan seperti itu sejak akhir tahun 1970-an adalah unsur-unsur Islam yang tidak puas. Reaksi Orde Baru selama itu adalah tindakan tegas yang bermusuhan terhadap setiap pendapat bahwa gagasan politik dan sosial Islam sebaiknya didengarkan. Sikap bermusuhan itu juga menebal akibat kecurigaan rezim Suharto

bahwa kekuatan-kekuatan Islam akan lebih kuat menentang kebijakan-kebijakan persatuan Indonesia dibanding kekuatan-kekuatan lainnya. Suharto juga berulang kali menekankan bahwa Indonesia bukan negara agama, bahwa Indonesia didasarkan pada kebebasan beragama, serta bahwa ia sangat menghargai kehidupan beragama.

Permasalahan mencapai puncaknya pada September 1984, ketika sebuah insiden di wilayah pelabuhan Jakarta, Tanjung Priok, di mana tentara dikabarkan mengotori kesucian sebuah mesjid, berujung pada kerusuhan besar-besaran antipemerintah, yang dipadamkan dengan ganas oleh garnisun Jakarta dan menewaskan puluhan orang—bahkan mungkin ratusan. Selanjutnya, pasukan keamanan menahan sejumlah pemimpin politik dan agama, yang dikenai tuduhan berkonspirasi sehubungan dengan serangan-serangan bom atas dua kantor cabang Bank Sentral Asia di Jakarta pada awal Oktober. Di antara yang ditahan adalah Let. Jen (Pur.) H. R. Dhasono yang, bersama dengan 23 orang lainnya yang sebagian besar adalah anggota dari kelompok Petisi 50, sebelumnya telah menandatangani pernyataan mempertanyakan penjelasan insiden Tanjung Priok yang dilakukan Murdani serta menyerukan dilakukannya penyelidikan independen atas masalah tersebut. Dharsono sebelumnya menghadiri pertemuan-pertemuan antipemerintah yang diselenggarakan di rumah seorang pemimpin dan pendakwah Islam terkenal (dan mantan asisten masalah keagamaan Ali Sadikin) A.M. Fatwa, yang juga ditahan oleh Kopkamtib pada September. Sanusi Harjadinata, mantan menteri dalam negeri (1957–59) semasa era Sukarno dan anggota kabinet Ampera (1967–68), juga ditahan pada awal Oktober.[9]

Ketidakpuasan yang diperlihatkan oleh unsur-unsur Islam serta oleh para anggota kelompok Petisi 50 seperti Sanusi, Nasution, dan Natsir, dan yang mewujud dalam kerusuhan Tanjung Priok, dipicu oleh niat pemerintah untuk membuat undang-undang yang menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal bagi semua organisasi massa di Indonesia.[10] Hasilnya adalah serangkaian tindakan, ancaman, kekerasan yang lebih lanjut, termasuk ledakan besar

depot amunisi di sebuah pangkalan marinir di Cilandak, Jakarta Selatan, pada 29 Oktober. Suharto sendiri, "yang belum memberi komentar atas kerusuhan politik yang belum lama terjadi,"[11] melakukan kunjungan diam-diam untuk memeriksa lokasi ledakan dan berbicara dengan orang-orang yang rumahnya hancur akibat ledakan tersebut. Ia datang ditemani oleh Murdani yang mengabaikan insiden tersebut dan menyebutnya sebagai peristiwa kebakaran saja. Pada Januari 1985, sebuah bom menghancurkan beberapa stupa yang ada di puncak monumen Buddha yang indah dari abad kesembilan yang terletak dekat Magelang, Jawa Tengah.

Seperti setiap orang yang menganut falsafah sederhana yang kaku, Suharto merasa sulit menerima kekacauan-kekacauan seperti itu:

> Nyatanya yang jadi alasannya waktu itu [insiden Tanjung Priok] ialah mengenai Pancasila. Yang bersangkutan menentang ditetapkannya Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam ketatanegaraaan kita. Ia tidak mengerti duduk soalnya. Ia mengira bahwa dengan konsensus kita itu Pancasila akan menggantikan agama dan sebagainya. Maka ia menghasut rakyat agar memberontak ... Rupanya, seperti Dharsono, ia mempunyai perhitungan, pemerintah tidak akan berani mengambil tindakan karena ia bekas panglima. Ia mengira pengaruhnya besar.

Tentang ledakan di Candi Borobudur, Suharto berkomentar: "sembilan stupa diledakkan orang yang tidak berbudaya itu. Peledakan ini adalah contoh dari sikap orang-orang yang tidak mempunyai kebanggaan nasional ... Orang-orang yang melakukan itu picik sekali. Pikir mereka sempit. Mengecewakan sekali, karena melakukannya dengan menyebutkan diri berdasarkan agama. Yang jelas, mereka tidak mengtahui ajaran agama yang benar."[12] Strateginya, seperti sebelumnya, adalah dengan mengurangi potensi politik Islam dan mengaitkannya dengan instabilitas politik serta teror. Masalah-masalah ini membuat semakin jelas baginya betapa

amat penting dan perlunya menanamkan visi korporat politiknya yang kolot itu ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Seorang pengamat pernah mengemukakan bahwa "pada hakekatnya sulit menemukan adanya konsep-konsep sosial yang berarti di balik [kebijakan-kebijakan Suharto]," serta bahwa "keterampilan politik Suharto yang utama adalah sebagai seorang ahli pembuat taktik, dan bukan seorang ahli strategi jangka-panjang."[13] Namun, pandangan seperti ini mengabaikan hal yang sangat sentral dan penting bagi Suharto dalam upayanya mengorporatisasi masyarakat Indonesia. Ia membayangkan penerapan Pancasila sebagai 'landasan tunggal', sebagai dasar dari bangunan Orde Barunya:

> Keputusan ini merupakan langkah yang kita ambil guna meletakkan kerangka landasan di bidang ideologi dan politik sebagai persiapan menuju tahap tinggal landas nanti. ... Tujuan kita tidak lain adalah untuk memanunggalkan semua lapisan, golongan, kekuatan, dan generasi bangsa kita dengan dasar, ideologi, dan cita-cita bangsa dan negaranya. Dengan demikian, seluruh lapisan, golongan, dan kekuatan bangsa kita akan dapat terhindar dari konflik-konflik batin dan ketegangan-ketegangan yang menjadi sumber perpecahan dan luka-luka bangsa.[14]

Dengan kata lain, melalui penerapan Pancasila "segala tuntutan yang kelihatannya saling bertentangan, segala perbedaan dalam masyarakat yang serba majemuk, tidak kita biarkan berkembang menjadi sumber perbenturan dan konflik." Apa yang hendak dilakukannya adalah mengesahkan keyakinan-keyakinan politik dan falsafah kemanunggalannya. Ia menjadi semakin menyadari bahwa, "berdasarkan pengalaman kita sendiri sistem politik dan sistem banyak partai di masa lampau telah gagal mentantarkan bangsa kita meraih kemajuan melalui pembangunan." Demokrasi Pancasila, sebaliknya, "berpangkal tolak dari paham kekeluargaan dan gotong royong. Demokrasi Pancasila bukan ditentukan oleh 'paksaan kekuatan', melainkan kebulatan mufakat yang dikedepankan sebagai hasil hikmah kebijaksanaan."

"Dalam demokrasi Pancasila," ia kemudian berkomentar, "tidak ada tempat untuk oposisi ala Barat. Dalam alam Demokrasi Pancasila kita mengenal musyawarah untuk memperoleh mufakat rakyat ... Oposisi seperti di Barat tidak kita kenal di sini. Oposisi yang asal saja menentang. asal saja berbeda, tidak kita kenal di sini." Masyarakat, ujarnya menekankan, harus selalu didahulukan atas individu. UUD sendiri menetapkan bahwa "kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang." Pandangan ini didasarkan pada kenyataan bahwa "sebagian besar hidup kita itu sebetulnya bergantung pada orang lain. Jadi, hidup kebersamaan itulah yang sebenarnya yang lebih menentukan walaupun sifat individunya jangan sampai ditiadakan."

Selanjutnya, komentarnya, "dalam melaksanakan pembangunan yang kita tempuh, mutlak kita harus yakin akan kebenaran Pancasila. Masyarakat yang tidak yakin akan kebenaran Pancasila tidak akan membangun masyarakat Pancasila." Dengan demikian, "saya menyerukan agar kita hati-hati dengan paham-paham yang ekstrem, yang ekstrem kiri dan yang ekstrem kanan. Hati-hati dengan pengaruh-pengaruh yang datang dari luar!. Kita tidak menginginkan yang lain selain daripada Pancasila dan UUD '45." Pemantapan dan penghayatan asas-asas ini akan memberi landasan kuat bagi pengakuan serta penyelenggaraan keunikan daerah: "Pada kurun waktu persatuan dan kesatuan nasional kukuh kuat seperti sekarang, penggalian kembali budayadaerah itu bukan lagi merupakan bahaya yang akan memecah belah bangsa."[15]

Pancasila adalah wujud Orde Baru akan aliran pemikiran integralis atau organis. Pancasila memberi "landasan retorika bagi penolakan pemerintah atas gagasan-gagasan 'Barat' tentang hak asasi serta demokrasi plural." Orde Baru diduga memanfaatkan konsep-konsep tradisional asli tentang tatanan masyarakat yang benar, terutama masyarakat desa, kemudian mengawinkannya dengan maksud-maksud politik mereka dan menyebutnya sebagai gagasan-gagasan kepribadian nasional. Pancasila merupakan "ideo-

logi yang menolak setiap konsep oposisi, dengan menggambarkan oposisi sebagai sikap yang tidak-Indonesia." [16]

Pandangan ini terwujud dengan sempurna dalam undang-undang tentang organisasi massa yang umumnya dikenal dengan akronim ormas, yang disahkan pada pertengahan 1985 dan yang, selain menyerang pluralisme dengan memaksakan diterimanya Pancasila sebagai landasan tunggal organisasi massa, juga memberlakukan kendala-kendala hukum yang tidak memungkinkan perubahan UUD. Yang kurang begitu menonjol, namun tak kalah pentingnya, adalah UU lainnya yang disahkan pada 1985 yang meningkatkan jumlah anggota DPR dari 470 menjadi 500 (yang dengan demikian meningkatkan jumlah para wakil yang diangkat) serta menjamin dominasi Golkar.

Bagi banyak kalangan muslim, UU Keormasan merupakan penolakan telak atas nilai-nilai yang amat tinggi mereka hargai. Sementara banyak kalangan muslim mengakui keunggulan politik Pancasila, mereka berupaya memadukannya dengan aspirasi-aspirasi dan nilai-nilai Islam serta merasa sangat terganggu akan pengukuhan Pancasila sebagai landasan tunggal yang diartikan sebagai pengingkaran terhadap sentralitas Islam bagi kehidupan spiritual dan sipil bangsa. Wujud jelas dari perkembangan ini adalah perundang-undangan pada 1985 yang mengharuskan partai-partai menggunakan simbol-simbol Pancasila, yang dengan demikian tidak mengizinkan penggunaan gambar Ka'bah sebagai simbol partai oleh PPP. Yang lainnya, yang kurang begitu dikomentari, adalah program di mana para guru agama dikirim untuk pendidikan lebih lanjut ke universitas-universitas Barat (terutama Universitas McGill di Kanada), dan bukan ke lembaga-lembaga Islam yang dihormati di Timur Tengah.

Dampak pertama dari Undang-Undang Keormasan adalah kursus-kursus ideologi Pancasila, sebagai akibat dari dekrit-dekrit MPR 1978 yang, antara lain, seperti dikatakan Suharto, "memberikan penugasan secara khusus kepada saya untuk melaksanakan

ketetapan-ketetapan ... tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila." Yang dihasilkan oleh program P-4, seperti yang telah kita lihat, adalah diselenggarakannya program pelatihan ideologis massal; pelatihan yang sangat birokratis, mengganggu, dan luar biasa mahalnya, yang dengan sangat gencar ditujukan kepada para aparat negara serta Angkatan Bersenjata. Seperti dikatakan oleh Suharto, "hanya pegawai negeri dan anggota ABRI yang memahami Pancasila, UUD '45, dan GBHN-lah yang akan dapat mengemban tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dengan baik."

Secara lebih umum, Suharto mengharapkan program P-4 akan memainkan "bagian yang penting dari pembangunan bidang ideologi, khususnya pemantapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa kita," serta akan "meningkatkan pendidikan politik bagi rakyat sehingga makin tinggi kesadaran warganegara kita akan hak dan kewajibannya, dan dengan demikian seluruh warganegara kita akan ikutserta secara aktif dalam kehidupan kenegaraan dan pembangunan." "Saya menaruh arti yang sangat penting kepada penataran ini," komentarnya dengan merasa agak puas bahwa "sampai Maret 1983, tidak kurang dari 1,8 juta pegawai negeri sipil dan hampir 150.000 anggota ABRI telah mengikuti penataran." Secara lebih umum, "pendidikan nasional kita tidak hanya semata-mata untuk mencerdaskan kehidupan bangsa *tok*, tetapi harus juga menjadikan manusia yang berwatak Pancasila."

P-4 tak lain dan tak bukan adalah upaya mati-matian Suharto dalam membangun kesadaran baru dan menyeluruh tentang apa artinya menjadi orang Indonesia, termasuk penolakan kepentingan kelompok berdasarkan agama (baca: Islam) dan kesukuan, pembasmian pemikiran kiri dan liberal ("pikiran liberalisme ... tidak berakar pada kepribadian sendiri"), pemahaman kelompok atas UUD 1945 yang tidak memberi landasan bagi konsep-konsep hak asasi, serta dianutnya rasa kebersamaan yang dipaksakan untuk menjauhkan budaya lama konflik dan ketidakrukunan.[17]

Karena Pancasila harus diterapkan "dalam seluruh segi kehidupan bangsa dan negara kita,"[18] arah dari gelombang Pancasila ini ditujukan, dapat diduga sebelumnya dan secara konsisten, ke bidang lain seperti pers. Tak ada yang namanya kebebasan pers yang murni; pengungkapan pendapat bebas harus diatur dengan kepedulian pada kebaikan masyarakat umum. "Pengalaman kita menunjukkan, bahwa kebebasan saja tanpa tanggung jawab ternyata bisa merusak," Suharto kelak mengenang. Dengan demikian, "pers nasional ... perlu terus meningkatkan peranan kontrol sosial yang konstruktif, serta menampung dan menyalurkan perasaan yang timbul dalam masyarakat."[19] Namun, dengan menggunakan logika integralisme yang kental itu, Suharto pada saat yang sama enteng saja menyatakan bahwa "tidak perlu ada kekhawatiran bahwa dengan Pancasila sebagai satu-satunya asas, maka kemerdekaan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pendapat lalu dibatasi."[20]

Namun, pada 1986, pemerintah—yang dibuat jengkel oleh sebuah tulisan di sebuah surat kabar di Sydney yang ditulis oleh wartawan yang sangat terpandang David Jenkins, yang judulnya terkesan membandingkan Suharto dengan Marcos yang sangat busuk dan baru saja tumbang itu—menginstruksikan seluruh wisatawan Australia dalam satu pesawat yang akan ke Bali untuk pulang. Pemerintah selanjutnya juga melarang wartawan-wartawan Australia meliput kunjungan Presiden AS Reagan ke Bali tak lama kemudian, serta menolak memperpanjang visa wartawan Australia Michael Byrnes. Sementara itu, Bakin memberlakukan larangan penuh atas pengeluaran visa bagi wartawan Australia. (Berita-berita surat kabar A.S. yang kritis terhadap Suharto sekitar masa ini juga tidak digubris.) [21]

Pada awal Oktober, surat kabar sore *Sinar Harapan* yang sangat dihormati itu, yang masih menganut aspirasi-aspirasi intelektual liberal, juga dilarang—mungkin atas prakarsa pribadi Suharto—tampaknya karena surat kabar itu berani berspekulasi (dengan cara-cara yang merangsang perhatian keluarga presiden serta rekan-rekan bisnisnya) tentang rencana Suharto untuk mengubah sistem-

sistem monopoli impor (NTB) yang telah memungkinkan sekelompok pengusaha yang dekat dengan istana menguasai impor komoditas-komoditas penting. Namun kemudian, tampaknya Suharto mengalah pada pendapat bahwa pelarangan surat kabar tersebut tak ada gunanya serta merusak citra internasional Indonesia, dan ia pun mengizinkannya terbit lagi dengan menggunakan nama lain.

Dengan cara serupa, buruh yang terorganisasi harus menempatkan dirinya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan nasional pula. "Sebenarnya kita tidak perlu melarang mogok. Tetapi mogok tidak perlu kalau kedua belah pihak bisa bekerja sama dengan baik. Kita tidak melarang mogok itu sendiri ... Tiga semangat itu harus menjadi satu yakni semangat buruh, majikan, dan pemerintah. Maka tidaklah perlu terjadi mogok."[22] Juga, sejalan dengan ini, bukan kebetulan, terutama sehubungan dengan kesulitan-kesulitan perekonomian pada pertengahan era 1980-an, serta kampanye setelah itu bagi pemulihan ekonomi melalui penggalakan ekspor, mantan kepala Kopkamtib dan kawan lama Suharto—Sudomo—diangkat sebagai menteri tenaga kerja pada 1983, berbarengan dengan pengangkatan Sutopo Yuwono.

Di bawah Sudomo dan Yuwono, konsep hubungan perburuhan Pancasila—yang mencakup pandangan bahwa hasil produksi buruh industri berasal dari kolaborasi tripartit antara pemerintah, pemilik perusahaan, dan buruh—mencapai puncaknya dalam pembentukan satu serikat buruh yang dikendalikan secara terpusat, SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) pada 1985. Dalam kaitan ini, buruh tidak dapat—dan, memang juga, tidak perlu, menurut para ahli ideologi Orde Baru—mengambil sikap beroposisi atau berkonfrontasi dalam masalah-masalah yang dihadapinya. Pun seandainya mereka memiliki rencana-rencana seperti itu, tim-tim intelijen dan intervensi akan dikerahkan untuk memberi pelajaran bahwa semua harapan itu akan sia-sia saja. Makhluk ciptaan serupa, sudah tentu, adalah HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia); menurut Suharto, "HKTI perlu menjadikan

dirinya sebagai gerakan untuk memajukan kaum tani khususnya, dan pembangunan pertanian umumnya."[23]

Penerapan pemikiran integralis yang kuat, bersama dengan pengerahan otot yang disediakan oleh Angkatan Darat (yang juga sangat tertarik dengan agenda integralis yang begitu serupa dengan konsep favorit kekaryaan dan dwifungsi mereka), menghasilkan tingkat penguasaan sosial yang dijuluki oleh seorang ilmuwan asing "luar biasa, kalau melihat keterpecahbelahan penduduknya di masa lalu serta kesulitan-kesulitan perekonomian Indonesia sebelumnya."[24] Suharto mengklaim bahwa ia tidak melakukan apa-apa kecuali mengembalikan negeri ke kemurnian asalnya: "koreksi total dan pembaharuan yang dilakukan oleh Orde Baru tidak lain daripada untuk meluruskan kembali penyimpangan-penyimpangan dan mengoreksi kesalahan-kesalahan dalam melaksanakan Pancasila dan UUD '45."[25] Cacat-cacat ini bukan saja memperlemah kesatuan Republik menyusul tercapainya kemerdekaan, tapi Pancasila juga menjadi terpinggirkan selama masa-masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin.

Namun, apa yang diupayakan Suharto adalah masyarakat yang bebas dari kesumbangan sekecil apa pun, sehingga pekerjaan pembangunan yang nyata dapat mencapai puncaknya. "Selama pertentangan ideologi dan politik itu masih terus berlanjut, pembangunan yang ditujukan untuk memperbaiki taraf kehidupan rakyat pasti tidak akan terwujud," dan juga, "janganlah sampai kestabilan nasional terganggu karena ini merupakan syarat untuk melaksanakan pembangunan."[26]

Meski Suharto berulang kali menegaskan bahwa programnya bukanlah dimaksudkan sebagai pelaksanaan depolitisasi (yang lebih lanjut), dan menyatakan bahwa orang-orang masih tetap boleh memiliki perbedaan pendapat yang adalah hal wajar dalam masyarakat,[27] kenyataan akan hambarnya "konsensus" Pancasila yang mencakup hampir seluruh aspek kehidupan itu sudah jelas.

Menjelang akhir era 1980-an, Suharto merasa puas bahwa tugas menciptakan masyarakat yang terpadu kurang lebih sudah

tercapai. "Lengkaplah dasar hukumnya untuk membangun landasan politik dalam menyongsong tahap tinggal landas" sudah rampun. "Alhamdulillah," ia menulis pada halaman-halaman akhir otobiografinya, "sekarang sistem yang bisa menjamin kelangsungan hidup negara dan bangsa sudah kita dapatkan. Terbukti diperlukan waktu berjuang dan bermufakat sampai 20 tahun untuk sampai pada titik menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas. Tetapi bagaimanapun, kita berkesampaian"[28]

Keberhasilan upaya-upaya Suharto, serta kelompok penyusun ideologi Orde Baru yang jumlahnya kian banyak itu, dalam menciptakan pendapat di mana oposisi dipandang bukan saja menyulitkan tapi juga subversif dan anti-Indonesia terlihat dalam suasana murung serta sinis kepatuhan dan kepasifan politik yang mencekam negeri ini. Gerakan mahasiswa—dengan pengecualian yang ganjil, seperti kerusuhan mahasiswa pada November 1987 di Ujung Pandang (Makasar)—yang diarahkan untuk menentang pembatasan yang dijalankan pemerintah setempat (mengawasi peraturan baru yang mengharuskan pengendara sepeda motor menggunakan helm) dan keadaan perekonomian yang merosot—serta protes-protes dan demonstrasi berikutnya oleh para mahasiswa Bandung—sangat tidak setara dan tidak siap untuk tugas melawan raksasa ideologis konservatif Orde Baru maupun peraturan-peraturan NKK-nya yang, seperti telah kita lihat, sangat efektif dalam pelarangan kegiatan politik di dalam kampus.

Wujud mencekam kekuasaan Suharto adalah dihukum matinya para tahanan yang sudah sejak lama dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati, namun pelaksanaan vonisnya dibiarkan terkatung-katung, atas keterlibatan mereka dalam Gerakan 30 September. Pada Mei 1985, anggota Politbiro PKI Mohammad Munir dihukum mati tanpa gembar-gembor maupun publisitas. Tak lama kemudian, tiga orang lainnya yang dijatuhi hukuman pada 1975 juga dihukum mati. Pada September 1986, sembilan lainnya yang, antara 1966 dan 1972, sudah dijatuhi hukuman mati sebagai akibat dari keyakinan serta keterlibatan mereka pada

kejadian-kejadian pada 1965, dikenai nasib yang sama. Yang utama di antara mereka, menurut laporan, adalah Syam, yang diduga adalah dalang dari konspirasi kudeta tersebut.[29]

Karena hanya Suharto saja yang memiliki kekuasaan untuk memerintahkan pelaksanaan hukuman mati, kita harus mencari tahu alasan kenapa orang-orang tua ini dihukum mati pada waktu itu setelah selang waktu yang panjang sejak vonis mereka dibacakan—dan malah sejak akhir era 1960-an ketika pelaku lainnya yang diduga terlibat dalam upaya kudeta itu sudah dihukum mati—yang juga pasti sempat membangkitkan harapan mereka bahwa hukuman mati mereka sudah ditangguhkan untuk selamanya.

Beberapa pengamat bertanya-tanya apakah pelaksanaan hukuman mati tersebut dimaksudkan sebagai peringatan bagi radikalisme yang mulai tumbuh ketika ekonomi melambat drastis dan kediktatoran Marcos ambruk. Atau apakah itu dimaksudkan untuk memadamkan aspirasi muslim yang baru saja terluka oleh bencana-bencana Tanjung Priok dan UU Keormasan, serta dihukum-matinya seorang pemimpin Komando Jihad. Atau, sekali lagi, apakah itu dimaksudkan sebagai isyarat bagi Cina untuk tidak berharap terlalu banyak secara politis dari hubungan ekonomi yang lebih dekat, atau mungkin juga bahkan sebagai sarana memperbaiki hubungan dengan menghilangkan aib pemenjaraan tokoh-tokoh komunis Indonesia itu. Beberapa kalangan juga mengemukakan bahwa pelaksanaan hukuman mati itu selama ini ditunda dengan beberapa pertimbangan antara lain agar tidak menimbulkan kegelisahan di kalangan para istri atau kerabat sang terhukum[30] dengan meninggalnya para istri dan kerabat sang terhukum ini, hukuman-hukuman mati itu mungkin untuk dilaksanakan. Malah ada lagi pendapat yang menyatakan bahwa pemerintah perlu merasa yakin benar bahwa mereka sudah menguras habis setiap potongan informasi terakhir dari para tahanan sebelum menghukum mati mereka.

Sementara beberapa atau semua motif ini mungkin saja berperan dalam benak Suharto, sulit sekali mengelak dari kesimpulan bahwa hukuman-hukuman mati ini merupakan semacam simbol dari apa yang ia artikan sebagai kemenangan akhir Orde Baru. Langkah ini merupakan pertanda bahwa—bahkan kalaupun kemenangan ini tidak dapat dikatakan memang sudah semestinya—keefektifan program politiknya mulai memperlihatkan kekuatan, masa depannya pun dapat dijamin. Itulah sebabnya kenapa menjelang akhir dasawarsa 80-an ia mengatakan, "secara umum sekarang ini Pancasila telah mengakar lebih luas; masyarakat menjadi lebih sadar, lebih jujur, dan lebih yakin jika dibandingkan dengan keadaan sebelum ini."[31]

ALIANSI-ALIANSI BARU

Kepuasan Suharto semakin meningkat di awal era 1980-an dengan hasil kerajinan ideologi dan ekonominya menjadi landasan bagi perubahan yang bersifat generasional, dan yang lebih penting lagi, perubahan sikap serta perubahan strategi dalam hubungannya dengan militer. Seperti yang kita lihat, bintang Ali Murtopo, yang sudah begitu lama berkuasa, mulai memudar sesudah ia mendapat serangan jantung pada 1978 (ia meninggal pada Mei 1984), sementara pengaruh Sujono Humardani menyurut pada awal era 1980-an dengan hadirnya para birokrat yang lebih profesional dan terampil. Suharto, sejalan dengan itu, mulai mencari-cari gaya kepemimpinan militer yang baru.

Ia menemukannya dalam sosok anak-didik Murtopo, Benny Murdani yang memiliki tabiat keras, suka menantang dan berbicara blak-blakan, yang dengan cepat dipromosikan dari posisi resminya sebagai asisten untuk masalah intelijen di markas angkatan darat (selama masa mana ia juga bertindak sebagai orang untuk 'tugas-tugas khusus' Suharto yang banyak bepergian) ke posisi Panglima ABRI pada Maret 1983. Murdani, yang berpengalaman lama dalam menjalankan tugas-tugas khusus untuk Suharto—meski tak

memiliki pengalaman memimpin satuan yang lebih besar dari batalion—menampilkan wajah yang lebih keras dan lebih profesional atas hubungan Angkatan Darat dengan pemerintah yang berkuasa.

Pengangkatan Murdani merupakan pertanda yang cukup berarti akan pendekatan baru Suharto dalam hal penempatan dan promosi—yang kemudian menghantui kesatuan ABRI dengan permasalahan. Suharto yang tak lagi dikelilingi para rekan tua, dekat, dan terpercaya yang muncul dan naik dalam jajaran militer bersamanya, kemudian mengambil langkah untuk mengangkat orang-orang yang berada langsung di bawah jajaran senioritas tertinggi, kemudian mempromosikan mereka dengan cepat, dan dengan demikian secara pribadi mengikat mereka kepadanya. Penyematan bintang keempat yang dilakukan oleh Suharto sendiri ketika Murdani dipromosikan menjadi jenderal penuh memiliki makna yang sangat besar.

Posisi Murdani diperkuat secara formal oleh ketentuan-ketentuan UU 1982 mengenai "Ketentuan-ketentuan Dasar bagi Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia" yang akhirnya memberi kekuatan hukum pada fungsi ganda ABRI. Ia juga melakukan perombakan pada kemampuan intelijen Angkatan Bersenjata dengan membentuk Bais (Badan Intelijen dan Strategis) ABRI pada 1983 dari badan yang lebih kecil, Pusintelstrat (Pusat Intelijen Strategis), dan menghubungkan para eselon senior Angkatan Darat dengan berbagai lapisan perwira intelijen di seluruh komando wilayah dan, bila perlu, wewenang-wewenang Kopkamtib dari para komandan setempat, hingga ke desa-desa dan kampung-kampung.

Pengangkatan Murdani, seperti yang telah saya komentari, memulai pola bagi pengangkatan-pengangkatan mendatang dalam Angkatan Bersenjata. Sebelumnya, Suharto merasa sangat nyaman dengan mereka yang sudah berdinas dengannya sejak masa-masa awalnya. Namun, mereka ini mulai memudar. Awal dan pertengahan era 1980-an ditandai oleh kematian banyak anggota

generasinya: Murtopo, Adam Malik, Sujono Humardani.[32] Yang dicari-cari Suharto adalah orang yang sudah terbukti berjasa dan setia dalam dinas angkatan selain juga memiliki tekad baja seperti dirinya dalam menyelesaikan pekerjaan. Juga kebetulan Murdani beragama Katolik dan, oleh karena itu, terhalang, segala maksud maupun tujuan, dari peluang untuk menggunakan posisinya sebagai batu loncatan ke jabatan kepresidenan. Pengangkatannya melanjutkan tradisi bahwa tak ada panglima ABRI yang sekaligus orang Jawa dan Islam. Dalam pengangkatan ini, seperti dalam pengangkatan lain yang ia lakukan, Suharto tidak ingin membangkitkan ambisi melambung di kalangan mereka yang ia pilih. Suharto bergerak keluar dari daftar normal senioritas dalam memilih orangnya. Murdani melompati banyak yang lain yang mungkin merasa lebih memiliki kualifikasi, dan, tak diragukan lagi, pasti merasa sakit hati karena dilewati.

Persepsi profesionalisme yang ditingkatkan di kalangan ABRI tampak dalam upaya-upaya Murdani untuk beralih dari gagasan lama tentang kekuatan gerilya yang berbasis-masyarakat ke arah struktur yang menggabungkan kemampuan pengawasan politik dalam negeri dengan kemampuan pertahanan konvensional yang canggih terhadap acanam luar. Struktur baru itu, yang diumumkan pada 1985, meningkatkan pengawasan langsung Murdani atas pasukan-pasukannya dengan membubarkan keempat komando regional Kowilhan, mereorganisasi enam belas Kodam menjadi hanya sepuluh yang semuanya bertanggung jawab ke pusat, serta memperkuat peran sosial-politik pada tingkat Kodam dan Korem. Penekanannya adalah pada pengembangan lebih jauh pasukan elite yang bersifat mobil dan sangat terlatih serta pada akuisisi-akuisisi sistem senjata baru.

Sejalan dengan ini, tidak ada lagi ruang bagi operasi terselubung Opsus. Dengan kepergian Ali, Opsus praktis hilang begitu saja, dan digantikan oleh kekuasaan Murdani yang lebih menyeluruh atas aparat keamanan dalam negeri yang lebih diformalkan dan dibirokratisasikan. Pendekatan yang digunakan galak dan tak

kenal ampun—yang kelak dijuluki "pendekatan keamanan"—terhadap apa yang mereka pandang sebagai ancaman bagi keamanan dalam negeri. Eselon puncak militer pun menjadi sarat diisi oleh perwira dengan latar belakang intelijen dan keamanan.

Namun, Suharto punya rencana-rencana yang lebih rapi. Berbarengan dengan meningkatkan profesionalisme Angkatan Bersenjata dan mengikat lebih dekat para anggotanya dengan menggunakan kebaikan hatinya, ada sinyal-sinyal jelas pertama minat Suharto untuk secara politis menjauhkan diri dari ketergantungan pada militer—serta menyusun kerangka politik baru untuk Orde Barunya. Seperti yang telah saya kemukakan, wujud yang paling mencolok dan berarti dari niatnya ini adalah langkah-langkah bertahapnya dalam memperkuat kendali sekretaris negaranya yang setia, Sudharmono. Terkait dengan perkembangan ini, muncul gagasan bahwa Golkar harus mencoba mengembangkan diri ke arah partai politik yang sesungguhnya, yang memerlukan ketentuan bahwa perorangan dapat menjadi anggota (sebelumnya hanya kelompok-kelompok saja yang dapat menjadi anggota), dan upaya untuk memperluas jumlahnya secara cukup berarti dijalankan melalui proses kaderisasi dan penyipilan.

Prestasi Sudharmono yang mengejutkan dalam meraih jabatan ketua umum Golkar dari 1983 membawa dampak melemahkan kekuasaan ABRI atas Golkar serta meningkatkan pengaruh birokratis/sipil dalam organisasinya, yang di dalamnya banyak orang progresif yang dinamis dan cerdik, seperti Sarwono Kusumaatmaja yang menjabat sebagai sekretaris jenderal sejak 1983, mulai memperlihatkan keefektifan diri mereka. Suharto sendiri menjadi anggota perorangan Golkar yang pertama dalam sebuah upacara di rumahya pada Januari 1984.[33] Ia, seperti yang akan kita lihat, waktu itu mulai meletakkan kerangka landasan bagi sebuah arsitektur politik baru yang lebih tanggap, dalam kerangka ideologi Pancasila totalnya, terhadap Indonesia baru yang ia ciptakan.

KRISIS MINYAK DAN PARADIGMA EKONOMI BARU

Pada saat Suharto berupaya, dengan keberhasilan nyata, untuk mengonsolidasikan kepiawaian politiknya, Orde Barunya menghadapi tantangan mendadak berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang selama ini selalu menopang keberhasilan politiknya. Menjelang awal era 1980-an, *boom* minyak yang sebelumnya memotori pertumbuhan ekonomi Indonesia serta mengamankan stabilitas politiknya mulai melemah. Pendapatan dari ekspor minyak dan gas, mencapai puncaknya dengan hampir mencatat US$19 miliar pada 1981–82, merosot menjadi US$14,7 miliar pada 1982–83—kemerosotan yang disusul dengan devaluasi rupiah 27,6 persen pada Maret 1983—dan mencatat hanya US$12,4 miliar pada 1985-86. Pada 1986, harga minyak anjlok sama sekali. Pendapatan gas dan minyak pada 1986–87 hanya mencatat pemasukan kurus sebesar US$ 6,9 miliar; pada 1986, perekonomian hanya tumbuh 1.9 persen. Masalahnya diperburuk dengan lemahnya dolar AS serta turunnya—secara cukup berarti—nilai ekspor nonminyak-gas Indonesia.

Perkembangan ini merupakan krisis dengan dimensi serta keseriusan yang tak diantisipasi sebelumnya oleh Suharto ("di hadapan kita terbentang medan juang yang sulit dan berat"),[34] yang sangat condong pada kegiatan ekonomi yang disponsori negara serta perilaku bagi-bagi rezeki untuk para asisten yang ia sukai (meski ia berkomentar bahwa "sekarang di zaman Orde Baru, setiap hutang [asing] harus kita pergunakan untuk membangun, jangan untuk konsumsi, apalagi untuk mercusuar-mercusuaran.")[35] Rasa percaya dirinya yang tak pernah kendur bahwa uang minyak (dan pinjaman) yang mengucur deras melalui sistem pemerintahan akan berlanjut tanpa henti sangat memperkuat kemampuannya dalam melakukan penggalakan nasionalisme perekonomian serta, memang terbukti, membawanya melambung semakin tinggi di bawah pengelolaan Sudharmono.

Sudharmono (bersama dengan para asistennya, terutama Ginanjar, yang semuanya merupakan Tim 10 yang terkenal itu) terus bergerak untuk memperluas kendali mereka atas imperium pendapatan pemerintah, dan pada saat yang sama meningkatkan kekuasaan patronase mereka secara besar-besaran seraya menggalakkan kepentingan bisnis pribumi selain juga kepentingan Golkar.

Kepercayaan Suharto pada dirinya sendiri serta pada proyek Orde Baru—"tidak ada kesulitan yang tidak bisa kita atasi" [36]—sudah cukup baginya, asalkan para teknokrat akhirnya berhasil membuat ia yakin akan pentingnya hal itu, untuk memulai pengembangan sebuah paradigma ekonomi baru yang secara potensial berbahaya dan sama sekali baru. Sederhananya, ia tak punya pilihan, karena ia menyadari betapa rezimnya—serta keamanan politik pribadinya sendiri yang hanya berbasiskan patronase—tergantung pada mantapnya kembali kesehatan perekonomian. Pidato Hari Kemerdekaan 1984-nya merupakan seruan untuk "menghindari sikap destruktif, seolah-olah pembangunan yang tengah dikerjakan akan mengalami kegagalan total dan hari depan bangsa Indonesia akan diliputi kegelapan."[37] Dengan memakai lagi para teknokrat yang praktis ia turunkan dari puncak pembuatan kebijakan sejak awal era1980-an—meski ia berhati-hati agar tidak membiarkan mereka melebar ke bidang pembaruan hukum atau pembaruan birokratis/pemerintahan yang lebih luas—ia memberi mereka kendali yang cukup longgar guna mulai mengembangkan perekonomian yang lebih efisien, terderegulasi, serta berorientasi pasar; sebuah awal radikal dari kebijakan substitusi impor yang introspektif bahwa minyak dan pinjaman telah dibiarkan begitu lama mendominasi namun tak lagi bisa dipertahankan. Para teknokrat ini, pada gilirannya, memulai tugas ekonomi yang ortodoks yang, dalam konteks Indonesia, memakan waktu lama serta secara politis berbahaya karena harus membongkar kebijakan pemerintah yang berorientasi substitusi impor dan dikuasai negara, dan menggantikannya dengan paradigma

pertumbuhan ekonomi lewat deregulasi dan orientasi ekspor—dengan mempekerjakan buruh perkotaan murah yang merupakan aset Indonesia.

Pada September 1986, Suharto mengambil "keputusan yang sangat sulit dan berat" dalam mendevaluasi rupiah—yang untuk keempat kalinya ia lakukan selama pemerintahan Orde Baru—sebesar 31 persen.[38] Paket-paket pembaruan besar pun diumumkan pada Mei dan Oktober 1986 dan pada Januari dan Desember 1987. Yang merupakan bagian integral dari strategi ini adalah upaya-upaya untuk menggalakkan arus modal asing dengan menderegulasi sektor perbankan (undang-undang perbankan 1967 yang lama melarang pendirian bank-bank baru), memangkas jerat-jerat regulasi yang mengatur lisensi—di awal-awal era 1980-an, misalnya, untuk memperoleh lisensi dan izin yang diperlukan untuk mendirikan hotel ... diperlukan lebih dari 20 tandatangan—serta mengurangi bea masuk atas berbagai barang.[39]

Sebagai ciri dari rencana baru ini—serta ciri dari rasa percaya diri Suharto pada kemampuannya untuk mengelola rencana ini secara efektif dengan hanya mendapat oposisi dalam negeri yang boleh dikata minimal—adalah keputusannya yang mengejutkan pada 1985 untuk menggunakan perusahaan Swiss (Societe Generale de Surveillance) dalam menangani inspeksi dan pemungutan bea atas barang-barang di pelabuhan. Sama pentingnya adalah ditariknya, pada 1988, kekuasaan yang sebelumnya diberikan kepada Tim 10.

Menjelang akhir era 1980-an, perekonomian Indonesia sudah berjalan cukup jauh ke arah pemulihan. Perekonomian pun seperti hewan yang kelihatan lebih langsing dan lebih efisien, yang dibuat bergairah oleh pergeseran yang cukup berarti dalam kegiatan ekonomi dari pemerintah (yang sebelumnya selalu mendominasi kegiatan perekonomian) ke sektor swasta, serta yang disapih dari ketergantungan lamanya pada produksi pertanian maupun pengarahan oleh negara. Menurut seorang pengamat yang mengomentari lama setelah itu, "Dalam masa pembaruan 1983–92, Indonesia

belum pernah dalam perkembangannya berada begitu dekat ke arah perekonomian pasar dibandingkan masa yang sudah-sudah."[40]

Namun, akan salah bila mengatakan bahwa Suharto sudah lepas tangan sepenuhnya. Deregulasi tidak pernah ia biarkan berjalan tak terpantau, meski ada pertumbuhan besar dalam sektor swasta, dan bahkan bila "monopolisasi 'negara' serta isolasi proses kebijakan ini tidak lagi begitu sempurna,"[41] Suharto cukup cerdik dalam mempertahankan unsur-unsur kunci dari sistem negara/bagi-bagi rezeki yang lama. Seperti dikatakan oleh seorang pengamat, "ia mengizinkan para menterinya melakukan liberalisasi secukupnya saja guna menjamin arus pinjaman luar negeri dan investasi setiap tahunnya." Apa yang muncul kemudian merupakan dualisme aneh dalam perekonomian.

Di satu sisi, deregulasi menghendaki aturan-aturan yang jelas, kepastian, dan transparansi. Pada saat yang sama, Suharto bersikeras mempertahankan karakter bagi-bagi rezeki utama yang menurut dia sangat penting bagi berlanjutnya kekuasaan politiknya. Dengan demikian, "para teknokrat melakukan upaya-upaya luar biasa dalam membentuk panorama perekonomian yang baru, namun tidak mampu mengubah secara mendasar kaitan sosio-kultural yang menguasai lingkungannya ... Apa yang sebenarnya mereka lakukan adalah menciptakan dekor yang sangat hebat."[42]

Dualisme serupa muncul sehubungan dengan upaya-upaya Suharto dalam mencapai pemerataan yang lebih besar. Repelita IV, yang dimulai pada 1984, memiliki dasar pemikiran seputar gagasan pemerataan yang lebih besar ke seluruh Indonesia, dengan sumber-sumber daya didistribusikan ke seluruh kepulauan melalui sebuah birokrasi yang sangat besar dan terpusat di Jakarta. Namun, pada saat yang sama, Suharto berupaya meredam persepsi bahwa perbedaan pendapatan antarindividu pastilah menjadi penyebab ketidakpuasan atau konflik. "Hendaknya mereka yang mempunyai kemampuan terbatas bisa mencari kepuasan sesuai dengan kemampuan sendiri. Dan mereka yang mampu hendaknya janganlah

mengumbar nafsunya untuk kepuasan sendiri dan mengabaikan keadaan masyarakat yang masih dalam keadaan serba terbatas."[43]

Dengan demikian, bahkan meski "permusuhan lama terhadap kapitalisme dan kekuatan pasar [telah mulai] hilang pada era1980-an,"[44] langkah Suharto menuju paradigma perekonomian baru hanya bersifat sebagian saja, dan sangat terhambat bukan saja oleh pola pembiayaan bagi-bagi rezekinya dan keresahan akan arah swasta perekonomian, tapi juga oleh nasionalisme perekonomian yang kaku serta sikap hati-hati seputar bahaya hegemoni keuangan Barat. Dalam otobiografinya, Suharto mengomentari dengan kritis kebijakan-kebijakan perekonomian Barat:

> Lihatlah perkembangan pelaksanaan gagasan Dialog Utara-Selatan. Dialog Utara-Selatan itu tidak lancar, kalau tidak bisa dikatakan *mandeg* sama sekali. Lalu adanya proteksi perdagangan yang diterapkan negara maju. Itu merupakan bukti bahwa mereka kurang memperhatikan kepentingan negara-negara sedeang berkembang. Saya yakin, kita harus membangun dengan kekuatan sendiri, seperti sewaktu kita berjuang mencapai kemerdekaan kita.[45]

ANAK-ANAK SUHARTO DAN KEGIATAN NIAGA MEREKA

Mungkin wujud paling jelas dari dualisme pemikiran ekonomi-politik Suharto dapat dilihat dari sikapnya terhadap kepentingan-kepentingan bisnis anak-anaknya. Sejak awal era 1980-an, anak-anaknya mulai benar-benar menanjak dewasa. Meski sebagian dari mereka melanjutkan studi di perguruan tinggi, tak ada yang khususnya cemerlang secara akademis. Siti Hediyati Haryadi (Titiek) lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan menikah dengan perwira militer yang sedang menanjak kariernya dan adalah anak laki-laki dari Sumitro Joyohadikusumo, Mayor Prabowo Subianto, dalam upacara yang megah di Taman Mini. Siti Hutami Endang Adiningsih (Mamiek) lulus dari Fakultas

Matematika Institut Pertanian Bogor pada 1987, indekos di Bogor selama studinya, serta sebelumnya punya niat untuk menjadi ahli statistik pertanian sebelum akhirnya menikah. Namun, sebenarnya dunia bisnislah, dan bukan dunia intelektual (pada waktu itu) atau politik, yang tampaknya memanggil mereka.

Tommy, anak laki-lakinya paling bungsu, setelah menyelesaikan SMP, melanjutkan studinya ke Akademi Penerbangan Sipil sebelum meneruskan ke A.S. untuk belajar pertanian, dan kembali tanpa menyelesaikan studinya. Ia kemudian mulai menanjak pesat di dunia bisnis, hanya bisa disaingi oleh kecepatan mobil sport dan perahu motor balapnya, dan merasa kian yakin akan kemampuannya menggaet kontrak-kontrak besar yang disponsori pemerintah. Bersama kakak lelaki tertuanya, Sigit Harjoyudanto, ia mendirikan kelompok Humpuss pada 1984, dan memiliki sendiri 60 persen sahamnya. Sementara itu Sigit, yang adalah pejudi berat, memilih tidak menonjolkan diri serta tampaknya puas berperan sebagai penanam modal ketimbang sebagai manajer yang aktif. Tommy tebukti merupakan pelaku bisnis yang energik dan benar-benar flamboyan, sangat gigih dalam melobi koneksi-koneksinya yang rapi guna masuk ke usaha-usaha baru—ditandai kebiasaannya yang tanpa malu-malu untuk menguasai kegiatan-kegiatan bisnis BUMN demi keuntungan pribadinya. Setelah Tommy pertama kali menggaet sebagian hak-hak Pertamina yang berkaitan dengan distribusi, Humpuss pun berdiversifikasi dengan cepat selama era 1980-an.[46]

Pada 1982, anak laki-laki kedua Suharto, Bambang Trihatmojo bersama dengan tiga temannya mendirikan kelompok Bimantara. Usahanya sebelum itu, lisensi monopoli untuk mengimpor dan mengekspor barang-barang lewat udara, disusul pada 1984 oleh tender sukses perusahaannya dalam membeli, merenovasi, dan kemudian menjual kembali satelit Palapa B-2R yang merupakan bagian integral dari jaringan telekomunikasi Indonesia.

Pada usaha ini ditambahkan lagi bisnis-bisnis tanah, termasuk pembangunan hotel Grand Hyatt yang mewah di atas

tanah yang diperoleh dengan murah di bundaran Hotel Indonesia di pusat kota Jakarta. Dengan memanfaatkan koneksi-koneksinya, serta di bawah pengelolaan direktur eksekutifnya yang cerdas, Peter Gontha, Bimantara dengan cepat memperoleh bagian hak monopoli mengimpor plastik serta izin untuk mengekspor sebagian dari minyak Pertamina. Bambang juga bergerak masuk ke komunikasi dengan mendirikan pemancar TV RCTI (Rajawali Citra Televisi Indonesia) pada 1988; larangan atas televisi komersial, yang diterapkan oleh pemerintah karena tidak mendukung pembangunan, dicabut begitu saja pada 1988, yang dengan demikian mengizinkan RCTI melakukan siaran di Jakarta.[47]

Tutut juga terbukti banyak akalnya dalam bisnis seperti saudara-saudara laki-lakinya. Bersama suami dan saudara-saudara perempuannya, ia mendirikan kelompok bisnisnya sendiri, Citra Lamtoro Gung, pada 1983. Selain sahamnya dalam Bank Central Asia milik Liem Siu Liong di mana ia sama-sama berbagi dengan Sigit, ia memiliki sekumpulan bisnis sejak akhir era 1980-an, terutama pembangunan jalan tol dan akuisisi atas saluran televisi pendidikan yang menggunakan sarana-sarana TVRI tanpa bayar. Selain itu, ia bermitra dengan Titiek dalam mendirikan kelompok bisnis lainnya, Daya Tata Matra (Datam), pada awal era 1980-an.[48]

Suharto bukan saja mendorong perusahaan-perusahaan negara agar membantu anak-anaknya, tapi juga—bahkan selagi ia menggalakkan nilai-nilai deregulasi dan disiplin perekonomian—secara diam-diam menggamit pengusaha-pengusaha swasta agar melakukan hal yang sama. Seorang pengamat politik terkemuka mengemukakan pada awal era 1990-an bahwa "imperium-imperium bisnis anak-anaknya (Suharto) yang semakin berkembang dan tampaknya mendapat prioritas pertama dalam setiap kontrak-kontrak pemerintah yang besar maupun yang kecil,"[49] cukup menuai keprihatinan beberapa kalangan dari kelompok-kelompok bisnis militer yang sebelumnya sudah digerogoti oleh Tim 10-nya Sudharmono.

Cara Suharto yang terlalu memanjakan anak-anaknya, meski ada risiko politik yang semakin besar yang mesti ditanggungnya, pasti memiliki alasan. Penilaian psikologis Jend. Sumitro adalah karena Suharto "lemah dalam hubungannya dengan keluarga, dan kepada merekalah ia merasa berutang sesuatu."[50] Ia juga menyatakan bahwa kurangnya perhatian Suharto pada keluarganya karena tugas-tugas militer dan politiknya yang mendesak—terlepas dari laporan-laporan tentang dirinya yang dengan penuh tanggung jawab memantau Tommy dan Mamiek mengerjakan PR matematika mereka ketika mereka masih kecil[51]—mungkin telah menimbulkan rasa bersalah yang hanya dapat diredakan dengan memanjakan mereka. Anak-anak Suharto itu sendiri, tambah Sumitro, merupakan sasaran menarik bagi para pengusaha yang ingin memperoleh gengsi serta jaminan keberhasilan yang berasal dari kedekatan dengan keluarga Suharto.[52] Sementara ada juga yang mengatakan bahwa asal-usul Suharto sendiri yang sederhana, serta kesulitan-kesulitan identitas dan keluarga yang ia alami selama masa kecilnya yang penuh gejolak emosional, menuntunnya pada keyakinan bahwa anak-anaknya tidak boleh mengalami penderitaan yang sama.[53] Selain itu, ada juga pandangan bahwa intensitas kental masuknya anak-anak Suharto ke dalam bisnis dimaksudkan sebagai bentuk jaminan dalam mempertahankan pengaruh mereka bila ayah mereka sudah tidak lagi berpolitik.[54] Dengan demikian, Suharto kelak dapat mengacu pada prestasi anak-anaknya untuk membantah kecaman bahwa ia terlalu mempromosikan kepentingan-kepentingan bisnis orang-orang Indonesia keturunan Cina.

Mungkin, penjelasan yang paling baik adalah kebutaan khas Suharto dalam menarik perbedaan antara keuntungan publik dan pribadi. Ketika ditanya tentang kegiatan anak-anaknya, tanggapannya yang umum, yang disampaikan dengan nada agak marah, adalah bahwa keberhasilan mereka adalah berkat ketrampilan mereka sebagai pengusaha. Jadi, ia seolah-olah menolak mengakui, seperti layaknya orang-orang yang berkuasa, betapa luasnya dominasi politiknya menyusupi sektor-sektor kegiatan lainnya. Terserah

mana yang benar, sudah jelas bahwa keberhasilan dramatis anak-anaknya terletak pada didapatkannya hak-hak istimewa serta monopoli—meski ada penegasan Suharto yang membuat terperangah bahwa "monopoli perseorangan tidak dibenarkan di Indonesia"[55]—dalam sektor usaha negara dan swasta, biasanya sebagai importir barang-barang khusus atau sebagai kontraktor untuk tender proyek-proyek besar dan sangat menguntungkan.

BAGI-BAGI REZEKI YANG SEMAKIN MENGENTAL, KORUPSI YANG SEMAKIN MEMBENGKAK

Cara Suharto memperlakukan anak-anaknya cocok sekali dengan gaya transaksi bisnisnya yang khas dengan mereka yang dekat dengan dirinya. Saya sudah membahas hubungan sentralnya dengan para pengusaha Indonesia-Cina pada awal masa Orde Baru. Dalam masa hangat-hangatnya deregulasi pada pertengahan era 1980-an, hubungan-hubungan tersebut bahkan menjadi, bagi mereka yang diuntungkan, lebih menentukan keberhasilan komersial. Era konglomerat besar—yang embrionya sudah muncul sejak panen pendapatan dari *boom*-minyak telah berperan memperdalam dan memperluas perekonomian nasional—pun melanda Indonesia dengan tak kenal ampun.

Pengusaha yang paling disukai Suharto, dan yang paling terkenal, masih tetap Liem Siu Liong. Kepentingan-kepentingan bisnisnya berkembang secara spektakuler selama tahun-tahun tersebut. Yang paling kuat di antara kegiatan-kegiatannya yang terdiversifikasi itu adalah Bank Central Asia yang, di bawah pengelolaan Mochtar Riady (Lee Mo Sing), tumbuh dari dua cabang pada awal 1975 menjadi 49 cabang pada pertengahan 1988 dan hingga menjadi bank swasta terbesar Indonesia.

Menjelang pertengahan era 1980-an, sebagai hasil dari akuisisi-akuisisi yang cerdik, imperium Liem meluas hingga masuk ke semen, baja, real estate, dan pengembangan properti, perkapalan, tekstil, pertambangan, asuransi, bahan makanan, kendaraan ber-

motor, dan sudah tentu, penggilingan tepung. Pada 1988, kelompok ini diperkirakan memiliki aset senilai US$3,5 miliar.[56] Kedekatan mereka dengan rezim Suharto terutama terwujud dengan adanya saudara tiri Suharto, Sudwikatmono, dalam kelompok Liem; hal ini menjadikan mereka sasaran yang sangat menarik bagi para investor asing, namun mereka juga cakap dalam apa yang mereka lakukan. Selain itu, pentingnya aspek politik mereka memberi arti bahwa mereka bisa meminta dukungan dari pemerintah pada saat-saat yang diperlukan, seperti pada keputusan untuk mengambil 35 persen saham perusahaan Indocement-nya Liem pada 1985 ketika perekonomian lesu dan perusahaan mengalami kapasitas berlebih yang cukup besar. Pada 1990, pemasukan tahunan Kelompok Salim mendekati US$10 miliar. Para bos konglomerat terkemuka lainnya di kancah bisnis Indonesia adalah termasuk William Suryajaya, Prayogo Pangestu (Phang Jun Phen), dan Sofyan Wanandi.

Mungkin sebagian untuk menepis kecaman di dalam negeri akan keberhasilan membubung (khususnya pada saat berlangsungnya deregulasi) para teman bisnisnya, khususnya yang keturunan Cina, Suharto mulai lagi pada akhir era 1980-an menekankan pentingnya ruh koperasi bagi perekonomian Indonesia.[57] Sudah tentu, ada juga riwayat historis lebih jauh menuju keterpukauannya pada konsep (kalau tidak dapat dikatakan pelaksanaan) koperasi.

Saya sudah mengemukakan pengembangan koperasinya pada awal era 1950-an. Selain itu, mesti ditambahkan kenyataan bahwa kemanunggalan/kekeluargaan yang begitu gencar dipromosikan untuk tujuan-tujuan politik dan sosial pada era 1980-an bersumber dari gagasan yang sama seperti pemikiran koperasinya. Sementara juga mengakui bahwa masih banyak yang harus dilakukan dalam mengembangkan konsep ini—secara samar-samar ia berbicara tentang koperasi yang memainkan peran lebih penting pada "tahap berikutnya" bila modal swasta sudah diizinkan untuk memaksimalkan asetnya—Suharto menyatakan bahwa "koperasi harus menjadi tulang punggung kehidupan ekonomi kita", sebuah tahap

pada mana perekonomian Indonesia akan maju menyusul era investasi swasta, ketika "koperasi achirnya harus turut memiliki perusahaan-perusahaan swasta itu."[58]

Sejalan dengan itu, ia kerap mengecilkan peran modal swasta dalam perekonomian, dengan mengatakan, misalnya—bahkan bila menurut teori bahwa penjualan saham akan mendistribusikan kepemilikan dengan lebih merata ke seluruh masyarakat—"belum mungkin" untuk mengambil langkah ini di Indonesia. Bursa saham publik sebenarnya akan berakibat pada kesenjangan dalam masyarakat, karena "sekarang [1987] ... *'go public'* itu hakikatnya hanya akan jatuh pada perseorangan yang kuat." "Pemerataaan" menurut dia merupakan salah satu dari trilogi pembangunan (yang lainnya adalah stabilitas nasional dan pertumbuhan perekonomian).[59] Berbagai upaya dilakukan untuk membela kebijakan-kebijakan tentang monopoli, biasanya dengan menyatakan bahwa itu bukan dimaksudkan untuk memberi untung kepada segelintir anggota elite, melainkan untuk memenuhi tujuan-tujuan sosial yang penting seperti stabilisasi harga di dalam negeri.[60] Suharto sendiri melancarkan pembelaan serupa ketika ia mengemukakan bahwa "kesejahteraan masyarakatlah, atau orang-orang banyaklah ... harus diutamakan." Namun, pada saat yang sama, ia ingin sekali mengakui sumbangan para pemodal Indonesia keturunan Cina dalam pembangunan bangsa. Aset mereka merupakan bagian dari "potensi nasional .... Modal dan pengalaman serta kepandaian mereka, semua itu harus kita himpun. Lebih-lebih lagi kalau diingat bahwa potensi yang ada pada mereka lebih besar daripada yang dimiliki oleh rakyat jelata kita."[61]

Selama krisis perekonomian pada era 1980-an, pembaruan-pembaruan perekonomian tidak terlalu menggerogoti kemampuan Suharto dalam menyalurkan uang ke mereka yang dukungannya ia butuhkan. Pertamina, misalnya, tetap menjadi sumber pembiayaan nonbudjeter yang cukup besar bagi pembelian senjata ABRI, dan perannya yang cukup berarti—bersama-sama dengan kegiatan-kegiatan bisnis ABRI lainnya, yang berdasarkan salah satu estimasi,

menghasilkan hingga 35 persen anggaran resmi bagi ABRI—menjadi semakin meningkat sehubungan dengan penurunan anggaran resmi militer yang relatif besar. Dugaan-dugaan korupsi dengan mudah ditepis dengan menyatakan bahwa hal itu tidak ada hubungannya dengan tindakan-tindakan maupun kebijakan Suharto. "Tentu saja," Suharto berkomentar, "Pemerintah tidak akan membiarkan korupsi. Pemerintah akan mengambil tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku terhadap korupsi dan semua bentuk penyelewengan lainnya. Karena semuanya itu merupakan tindakan yang melanggar hukum dan menghambat jalannya pembangunan."[62] Namun, masalahnya adalah bagaimana menemukan bukti bahwa orang-orang telah bertindak dengan cara yang tidak benar ini.

YAYASAN-YAYASAN YANG BEREKSPANSI

Kunci penting dalam pemeliharaan kekuasaan finansial pribadi Suharto terletak pada yayasan-yayasannya yang memiliki jangkauan yang semakin luas, yang sejak lama menjadi cara yang paling ia sukai dalam memberikan "pembiayaan ekstra"—yang secara langsung tidak dapat diberikan oleh negara—bagi tujuan-tujuan yang diperlukan. Salah satu yayasan seperti ini didirikan di bawah pengayomannya pada 1982, Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, yang kabarnya menghimpun dana untuk pembangunan mesjid-mesjid serta sarana-sarana Islam lainnya. Para pegawai negeri "dianjurkan" untuk menyumbangkan sejumlah kecil dari gaji mereka setiap bulannya; dari pendapatan ini, ujar Suharto, "kita bisa membangun tiga mesjid tiap bulan." Dengan demikian, "Saya tarik uang dari pegawai negeri untuk membangun mesjid sebagai amal bakti muslim Pancasila. Saya ingat, tidak semua pegawai negeri itu muslim. Maka sedekah yang dikumpulkan sebagai amal dari pegawai negeri yang Kristen dan yang bukan muslim lainnya itu saya pisahkan, dan saya salurkan melalui Yayasan Dharmais untuk yatim piatu."[63]

Yayasan yang lebih dekat dengan kepentingannya sendiri, Yayasan Dana Abadi Karya Bakti (DAKAB), dimaksudkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan "Keluarga Besar Golkar"—"mesin pencetak uang," menurut seorang pengamat[64]—dan yayasan ini menyumbang Rp 250 juta setiap bulannya kepada berbagai lapisan organisasi ini. Pada 1985, Suharto menyatakan dengan bangga bahwa asetnya mencapai Rp 43 miliar.[65] Partai-partai lainnya menerima bantuan dari dana umum bantuan kepresidenan (Banpres) yang bersumber dari laba pendapatan atas monopoli cengkeh yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Liem Siu Liong dan Probosutejo, dan yang juga memberikan bantuan bagi usaha pertanian skala kecil serta sumbangan-sumbangan sosial mendesak lainnya. Pendistribusian dana-dana yang diberi sentuhan pribadi ini berada sepenuhnya di luar anggaran negara dan oleh karena itu tidak dipertanggungjawabkan. Menurut seorang ilmuwan, "ada kesan bahwa rahasia cengkeraman Suharto atas kekuasaan bukan melalui kekuatan senjata melainkan melalui kekuatan dompet."[66]

Meski kekayaan yayasan-yayasannya menakjubkan, dan keberhasilan bisnis anak-anaknya semakin melaju, Suharto dengan marah membantah bahwa ia pribadi ikut kecipratan untungnya. "Kalau ada orang yang mengatakan bahwa saya ini kaya, memang saya kaya, tetapi sebagai Ketua Yayasan." Ia sendiri, ujarnya, mengaku hanya menjadi pengelola dananya. Ia juga memasukkan anak-anaknya untuk membantu, dengan tanpa digaji, menjalankan yayasan-yayasan tersebut.

Dengan demikian, "Sigit bersama Indra (suami Tutut) duduk dalam Yayasan Dharmais. Kemudian Tomy bersama Bambang saya masukkan ke dalam Yayasan DAKAB. Begitu mereka bisa melatih diri mulai memikirkan dan memberikan sumbangannya bagi kegiatan-kegiatan sosial."[67]

Minat istrinya sejak lama terhadap yayasan-yayasan tersebut masih tetap kuat. Selain Yayasan Harapan Kita yang sudah ada sejak lama, yang antara lain menyediakan dana bagi pembangunan

gedung Perpustakaan Nasional di Jakarta yang diresmikan pada 1989, Ibu Tien mendirikan yayasan keluarga, Yayasan Putra Bhakti Pertiwi, dan Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, untuk membantu para korban gempa. Yayasan yang disebut terakhir ini menampung sumbangan-sumbangan dermawan dari para pengusaha Indonesia. Yayasan-yayasan ini merupakan bisnis besar, begitu besarnya sehingga memiliki gedung-gedung baru megah sendiri pada 1990 untuk menjalankan pekerjaan mereka.

DI PUNCAK KEKUASAAN

Di akhir era1980-an, Suharto berada pada puncak kekuasaannya, dan kekuasaannya begitu luas. Tak ada keputusan yang berdampak cukup luas dapat diambil tanpa persetujuannya. Dengan mulai menyurutnya ancaman keambrukan perekonomian akibat anjloknya harga minyak, legitimasinya sebagai penyelenggara pembangunan perekonomian pun semakin kuat. Kampanye ideologisnya untuk lebih mempersempit fokus maupun pemikiran politik diterima tanpa hambatan berarti. Ia adalah "empu"-nya sistem politik yang telah ia ciptakan.

Setelah menundukkan atau menjinakkan semua oposisi sipil, ia tak menghadapi lawan dalam posisinya sebagai kekuasaan tertinggi dalam negara. Ia sendiri semakin menikmati status itu; status yang cukup terlepas dari kekuasaan Angkatan Bersenjata yang telah menopang kemajuannya sejak 1965. "Suharto," komentar dua orang ilmuwan terkemuka, " telah ... melekatkan cap pribadi dan gaya politiknya yang begitu kuat atas Orde Baru ... sehingga kita benar-benar tidak bisa mengabaikan faktor pribadi dalam setiap analisis tentang dinamika politik, social, maupun struktural rezim tersebut."[68] Ia mengembangkan konsep bangsa baru bagi negerinya yang dibangun di atas landasan pertumbuhan dan stabilitas yang dinyatakannya sendiri dengan kepuasan serta kenikmatan yang tampak jelas—biasanya disertai oleh satu rom-

bongan menteri dan pejabat senior—dalam meresmikan pembangkit listrik yang ini ataupun pabrik yang itu.

Prestasi-prestasinya memang cukup mengesankan, sejarah Indonesia sebelumnya sebagai negara merdeka ditandai oleh pergolakan, perpecahan, dan kekerasan yang kerap muncul. Suharto, akhirnya, berhasil menciptakan persepsi stabilitas dan tujuan dalam perpolitikan Indonesia. Ia berhasil memenangkan perang untuk swasembada pangan, mencatat kemajuan besar dalam membebaskan negerinya dari kemiskinan yang hina serta berkepanjangan yang seolah telah menjadi ciri, mengakhiri sengketa-sengketa yang tampaknya abadi tentang agama dan kesukuan, serta menjadikan negerinya objek kekaguman internasional.

Tak ada lagi ancaman-ancaman atas tampuk pemerintahannya, dan tak ada lagi sumber-sumber kekuatan politik berarti yang independen; memang, ada aura yang semakin terbangun seputar pribadinya akan betapa pentingnya dirinya. Ia adalah pasak penghubung dari apa yang disebut oleh seorang pengamat sebagai "pusat politik yang percaya diri dan kuat".[69] Orde Baru, yang disempurnakan dan dikonsolidasikan, berjalan lancar sebagai negara yang tidak ada bandingannya dalam sejarah Indonesia—bahkan sejak masa jaya kolonialisme Belanda pada era 1920-an.

Suharto sendiri semakin menjadi contoh pribadi dari sistem yang ia bangun. Ia semakin diminta meluangkan waktu untuk membuat pernyataan-pernyataan resmi tentang nilai-nilai dan tujuan yang dianut Orde Baru. Foto-fotonya muncul di surat kabar-surat kabar dengan dirinya sebagai model warga negara Orde Baru; datang ke kantor pajak untuk menyerahkan laporan pajaknya, berolah raga untuk menggalakkan kebugaran raga, menggalakkan kampanye-kampanye imunisasi anak.[70]

Rasa aman, percaya diri politik, dan prestasi-prestasinya membuatnya berkiprah dengan keyakinan dan orientasi yang semakin besar di panggung dunia yang sebelumnya ia anggap pinggiran dibandingkan kepentingan-kepentingan nyatanya (dan memang, pada awal era 1980-an, seorang pengamat asing menge-

mukakan bahwa, meski Indonesia "ikut dalam semua forum Dunia Ketiga, Indonesia tidak mau menonjol dalam forum-forum tersebut")[71] Kepemimpinan Suharto yang tidak ambisius dan kokoh atas Asean serta dukungannya bagi perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara ini mendatangkan rasa aman dan stabilitas yang tidak biasanya bagi kawasan ini secara keseluruhan. Rumus Suharto bagi regionalisme yang berhasil adalah sederhana saja:

> Apabila tercapai stabilitas nasional di masing-masing negara anggota [ASEAN], maka akan terwujud pula stabilitas kawasan regional. Bertolak dari pikiran ini ... saya memandang masih perlu anggota ABRI menjadi dutabesar di kawasan Asia Tenggara ini di sementara negara tetangga kita lainnyasupaya anggota ASEAN betul-betul bisa meryerasikan diri dalam usaha meningkatkan ketahanan nasionalnya masing-masing.[72]

Ia juga mendorong pengembangan kerja sama antar-ASEAN dalam perdagangan dan investasi sebagai salah satu cara mencapai 'ketahanan nasional' yang menurut dia merupakan dasar bagi kerjasama regional yang berhasil. Namun, saat itu cakrawalanya sedang meluas. Setelah baru saja melakukan dua belas perjalanan ke luar negeri dalam tahun-tahun 1980–87, ia mulai merasa lebih siap untuk melakukan perjalanan yang bukan, seperti yang ia lakukan pada era 1970-an, untuk mencari pinjaman dan kontrak melainkan guna memamerkan kebolehannya sebagai negarawan.

Pada 1989, atas dorongan Menteri Luar Negeri Ali Alatas, ia kembali ke forum Gerakan Non-Blok untuk pertama kalinya dan mendapat sambutan hangat sejak pengalamannya yang tidak menyenangkan di Lusaka dua puluh tahun sebelumnya. Pada Agustus 1990, setelah akhirnya menyadari bahwa ia tak bisa berharap memperoleh pernyataan maaf atas kejadian-kejadian pada 1965, Suharto memimpin pemulihan hubungan yang sudah lama dipikirkan itu dengan Republik Rakyat Cina.

Saat itu Suharto adalah pemimpin yang terkenal, bahkan mungkin bisa dikatakan tokoh dunia. Para pemimpin dunia pun

ingin belajar darinya bagaimana menjalankan pemerintahan, dan ia pun senang melayani mereka. Ia juga memang sangat senang mendapat perlakuan seperti ini.[73] Pengalaman-pengalaman ini membangkitkan minatnya dalam masalah kemiskinan dunia, dan khususnya kesenjangan Utara-Selatan, yang menurut pandangannya setidaknya sebagian disebabkan oleh egoisme Barat.

Hubungannya dengan AS sedikit mendingin sebagai akibat dari tekanan yang semakin kuat yang dilancarkan terhadapnya oleh Presiden George Bush (yang hubungannya tidak begitu memuaskan dengan Suharto), Wakil Presiden Dan Quayle, dan Paul Wolfowitz berkenaan dengan pengelolaan ekonomi serta, khususnya, besarnya utang Indonesia. Dan memang, Suharto berkomentar agak tersinggung dalam otobiografinya bahwa "tidak benar bahwa Indonesia berada di bawah bayang-bayang Amerika."[74] Sebaliknya, kunjungannya ke Uni Soviet pada September 1989 dijamu oleh Mikhail Gorbachev—Suharto memuji peran Soviet dalam kampanye membebaskan Irian Barat pada era 1960-an—dan segera menguatkan hubungan Soviet-Indonesia.

Perhatian baru Suharto pada panggung dunia membawa beberapa dampak penting di dalam negeri. Salah satunya adalah keputusan pada 1988—yang diambil sebagai tanggapan atas permintaan Gubernur Timor Timur Mario Carascalao untuk memperkuat integrasi ekonomi dan sosial provinsi itu—untuk membuka Timor Timur sejak awal 1989. Tanggapan ini dianggap perlu oleh Suharto untuk memperkuat citra internasional Indonesia pada saat ia mengupayakan peran yang lebih besar dalam masalah dunia, dan khususnya dalam Gerakan Non-Blok—yang kepemimpinannya semakin ia dambakan dan perjuangkan pada akhir era 1980-an. Akibat yang nyaris seketika atas tanggapan Suharto ini adalah pindahnya orang-orang dalam jumlah besar dari wilayah-wilayah lain Indonesia ke Timor Timur untuk mencari nafkah dengan berdagang atau bekerja. Pada akhir 1991, jumlah kedatangan itu diperkirakan mencapai 70.000.

Keputusan tentang Timor Timur itu membuat marah Murdani yang berpendapat bahwa provinsi itu masih membutuhkan perhatian keamanan yang ketat; ia sendiri sedang berupaya membebaskan ABRI dari kesalahan atas apa yang mungkin terjadi di sana menyusul keputusan tersebut.[75]

Namun, kepekaan Suharto pada pendapat dunia tidak meringankan penderitaan mereka yang memperjuangkan kemerdekaan Irian Jaya dari tindakan kasar pemerintah. Sementara reaksi tentara yang ganas terhadap sikap memberontak yang baru tumbuh memaksa lebih dari 10.000 warga Irian untuk melarikan diri ke perbatasan Papua Nugini pada 1984; program-program transmigrasi Suharto terus saja mengirimkan pemukim-pemukim baru, mungkin hingga 100.000 orang selama era 1980-an.

Suharto sendiri saat itu sedang mengembangkan pandangan akan suratan takdir politiknya sendiri (dan kepedulian akan kedudukannya dalam sejarah Indonesia), sebuah upaya yang mencapai kesempurnaan dalam penerbitan otobiografinya yang ditulis oleh orang lain dan sangat terpusat pada dirinya itu (*Pikiran*) pada 1989. Dalam karya ini, ia berulang-ulang menekankan perannya dalam tugas besar Indonesia modern: perkembangannya, serta tugas sentral memetakan dan mengarahkan gerak majunya. Ini merupakan takdir yang dibentuk oleh perjuangan panjang dan berlanjut, ketetapan hati, serta upaya: "jalan pembangunan yang kita susuri adalah jalan yang panjang dan bukan tanpa cobaan-cobaan. Jalannya mengharuskan kebulatan tekad yang tinggi, ketahanan yang kuat, ketetapan dalam menjaga arah kita, serta kerja keras yang tak kenal lelah."[76]

Menjelang pertengahan dan akhir era 1980-an, Suharto bisa agak berpuas diri melihat kenyataan bahwa ia hampir rampung dalam mengatasi masalah-masalah yang ia sebut sebagai penyebab utama ketidakpuasan Indonesia sebelumnya: "penyimpangan-penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD '45, baik semangat maupun pelaksanaannya" serta "ditelantarkannya pembangunan ekonomi." Namun, tugasnya benar-benar keterlaluan dan tak kenal

ampun; "kadang-kadang saya merasa capek ... Tetapi saya tidak boleh *mopo*, tidak boleh mengeluh, apalagi menyerah. Pembangunan adalah perjuangan yang sengit." Ia mengenang "keringat keluar dari seluruh badan saya dan rambut hitam menjadi cepat putih disebabkan oleh semua usaha itu menuntut tenaga dan pikiran yang tiada berhingga."[77] Tugas besar itu menuntut tata kehidupan yang berdisiplin:

> Saya selalu berusaha untuk tidak menumpuk atau menyimpan atau menunda pekerjaan. Sejauh mungkin segera saya selesaikan. Tak mau saya menunda-nundanya dengan alasan 'saya capek., nanti saja' dan sebagainya ... Princip kerja saya: harus segera selesai, segera tuntas" ... Pangalaman sampai sekarang, yang saya anggap baik, ialah bangun pukul 05.00, segera saya sujud pada Tuhan, kemudian terus membaca dan menyelesaikan surat-surat. Begitu saya bekerja sampai 07.30–08.00. Berarti tiga jam sudah saya bekerdja pada pagi itu. Dan saya berikan semua berkas itu kepada ajudan untuk segera didistribusikan. Setelah itu, barulah saya minum kopi ... Setelah itu barulah saya mandi, sarapan, dan kemudian berangkat ke kantor untuk menerima laporan-laporan secara fisik yang biasa dimulai pukul 09.00 ... Tempo-tempo, agar tidak capek, saya selesaikan surat-surat itu malam hari. Biasanya, setelah mendengarkan siaran 'Dunia dalam Berita' saya merampungkannya paloing lambat sampai pukul dua belas malam, supaya esok harinya saya lebih tenang. Ya, paling lambat saya tidur pukul dua belas. Dengan demikian, saya hanya tidur lima jam, sebab pukul 05.00. saya sudah harus bangun. Tetapi aqlhamdulillah, saya diberi kebiasaan tidur cukup dengan lima jam saja. Cuma kalau capek sekali, -, kadang-kadang saya harus tidur barang sebentar, dan kemudian bekerja lagi.[78]

Namun, kekuasaan Suharto ditakdirkan tidak akan bertahan, setidaknya tidak dalam bentuk yang dimilikinya pada pertengahan dan akhir era 1980-an. Tepat pada saat ia mencapai puncak kekuasaannya, dinamika-dinamika yang beraksi di dalam dunia

politik dan masyarakat Indonesia—serta logika sistem politik yang ia cipta dan sempurnakan itu sendiri—ternyata mulai menggerogoti landasan kekuasaannya.

PEMILIHAN UMUM 1987

Kampanye pemilihan umum 1987 adalah pemilu yang paling tidak membawa pertentangan dalam sejarah Orde Baru. Penyelenggaraannya yang relatif tenang mencerminkan suasana hati PPP yang lebih lembut, yang sangat diperlemah oleh keputusan Nahdlatul Ulama pada kongres 1984 mereka—dengan kepemimpinan progresif baru yang menempatkan Abdurrahman Wahid, cucu pendiri gerakan yang berasal dari Jawa Timur ini, sebagai ketua dewan tanfidznya—untuk menarik diri dari politik partai dan memusatkan diri mereka sepenuhnya dan semata pada kegiatan-kegiatan sosial dan pendidikan, serta untuk membebaskan diri mereka dari pembatasan-pembatasan yang diberlakukan karena peran politik resmi mereka.

Pemilihan umum 1987 juga mencerminkan tekad Suharto untuk menjinakkan PDI agar sepenuhnya mengikuti kehendaknya, dan mungkin menambah daya tariknya juga. Dalam langkah khas yang bersifat strategis, ia berupaya pada tahun sebelumnya untuk memanfaatkan legitimasi Sukarno—yang reputasinya, diperkuat oleh nostalgia romantis serta berlalunya waktu, begitu lekat dengan rakyat sehingga makamnya di Blitar menarik hingga 1.000 pengunjung setiap harinya—untuk dirinya sendiri. Pada November 1986, Suharto mengakui Sukarno dan Hatta secara resmi sebagai para proklamator kemerdekaan Indonesia, dalam sebuah upacara yang diselenggarakan di Istana Merdeka dan dihadiri oleh anak-anak Sukarno, termasuk Megawati yang, bersama dengan saudara laki-lakinya, adalah calon PDI dalam pemilihan umum mendatang waktu itu. Suharto dihargai atas upaya-upayanya ketika PDI, yang waktu itu dipimpin oleh Suryadi, patuh menerima sistem politik yang ada dalam kampanye pemilihan umum yang jinak itu, di

mana satu-satunya kegaduhan hanyalah sikap PDI yang menghidup-hidupkan kenangan tentang Sukarno.[79] Dan memang, tak banyak yang bisa dibahas sehingga masa kampanye itu pun diperpendek dari yang biasanya 45 hari menjadi hanya 25 hari.

Mungkin yang paling penting, pemilihan umum itu mencerminkan dominasi Orde Baru serta keberhasilan ideologisnya dalam menindas atau menakut-nakuti setiap gejala oposisi sekecil apa pun. Menjelang pertengahan 1986, sudah terdengar suara-suara riuh mendukung Suharto untuk menerima masa jabatan berikutnya sebagai presiden. Ia sendiri malah tergerak untuk menepis desas-desus tentang kepresidenan seumur hidup. "Menurut konstitusi kita, presiden dipilih untuk melaksanakan GBHN, dan GBHN berlaku untuk lima tahun."[80]

Namun tidak mengherankan, malah sudah sejak awal Oktober 1986, Suharto (yang, menurut seorang wartawan, "terus membuat para tamu terkesan dengan inteligensi serta ingatannya yang masih jernih")[81] mengumumkan, pada pertemuan peringatan 22 tahun Golkar, keinginannya—dengan basa-basi yang sangat halus—untuk menyediakan diri bagi masa jabatan kepresidenan yang kelima dan berturut-turut itu. Pernyataannya itu disampaikan dengan kerendahan hati yang, seperti biasanya, disusun secara berhati-hati ("setiap saya mendengar pernyataan-pernyataan itu [yang meminta pencalonannya] ... saya merasa *miris* (ngeri), berdiri bulu roma saya .... timbul pertanyaan apakah masih mampu saya melaksanakan tugas itu. Namun, ada pengecualian baru: "bilamana dalam melaksanakan tugas nanti selama lima tahun di tengah jalan dipandang saya tidak mampu, supaya segera diganti."[82]

Hasil-hasil pemilihan anggota parlemen yang telah ditingkatkan jumlahnya dari 460 menjadi 500 anggota (yang 100, dan bukan 75, dialokasikan untuk ABRI) sudah dapat diperkirakan sebelumnya seperti juga kemenangan telak Golkar atas kelompok partai lainnya. PPP, yang memperlihatkan bekas luka yang perih dengan ketidakhadiran NU, mengalami penurunan jumlah suara

yang diraih dari 27,9 persen menjadi hanya 16,7 persen. Porsi Golkar, boleh dikatakan nyaris terutama memetik hasil dari NU yang tidak ikut pemilihan umum, naik dari 64,3 persen menjadi 73,2 persen, jauh di atas sasaran 70 persen mereka—termasuk kemenangan pertama kali di Aceh. Upaya-upaya ABRI yang tidak berketentuan dalam menggalakkan perjuangan PDI ikut membantu partai tersebut mencatat tambahan perolehan suara yang cukup berarti, namun tidak banyak mengubah keadaan dalam kerangka besarnya.[83]

PEMILIHAN 1988, SUDHARMONO, DAN TENTARA

Setelah pemilihan parlementer rampung, pemilihan Suharto untuk kelima kalinya pada 10 Maret 1988 merupakan puncaknya formalitas. Sebagian besar orang Indonesia waktu itu tidak mengenal pemimpin lainnya. Mungkin sudah menjadi ciri dominasinya atas sistem politik—keyakinan bahwa jabatan kepresidenan, dalam arti khusus, adalah miliknya karena haknya—sehingga, untuk pertama kalinya, keluarganya tampil menyaksikan pengambilan sumpahnya pada penutupan sidang MPR pada 11 Maret (ia memilih harinya dengan hati-hati).

Kehadiran anak-anaknya mengundang komentar bahwa Suharto memperkirakan ini mungkin akan menjadi masa jabatannya yang terakhir, pandangan yang tampaknya dikonfirmasikan dalam otobiografi 1989-nya:

> Bahwasnya di antara anak-anak saya ada yang menyatakan, pelantikan kali ini (1988) merupakan pelantikan terakhir sebagai Presiden buat saya, itu bisa dimaklumi. Dilihat dari segi rasio manusia, memang pada usia saya yang sudah akan mencapai 67 ini, pelantikan ini yang terakhir untuk saya. Kalau sampai selesai saya merampungkan tugas sebagai Presiden masa bakti 1988–1993, berarti nanti pada usia mendekati 72 tahun, saya berhenti sebagai Presiden. Mengingat bahwa rata-rata umur orang Indonesia

> 56—kalau tak salah—maka umur 72 itu terhitung lebih dari rata-rata, terhitung cukup tua. Jadi, rasanya tidak berlebihan kalau dikatakan pelantikan pada tanggal 11 Maret 1988 merupakan pelantikan sebagai Presiden/Mandataris MPR yang terachir buat saya.[84]

Sementara banyak pengamat tak percaya pada pendapat seperti ini—seorang pengamat berkomentar bahwa "adalah naif kalau mengasumsikan bahwa ia berniat agar struktur kekuasaan berubah, atau menjadi tak begitu terfokus lagi pada dirinya"[85]—ada beberapa alasan bahwa Suharto benar-benar mempertimbangkan pada 1988 untuk tidak melanjutkan lagi setelah merampungkan masa jabatannya mendatang meski Nasution berkomentar bahwa "ia akan bertahan di sana selama ia merasa masih bisa."[86] Bahkan ada pertanyaan tentang apakah ia mungkin akan mengundurkan diri di tengah-tengah masa jabatan tersebut. Namun, apa pun yang ia pikirkan tentang masalah tersebut, seperti yang akan kita lihat, percekcokan internal yang dipicunya pasti cukup membuatnya yakin pada akhirnya bahwa Indonesia tidak dapat meneruskan jalan menuju puncak tanpa tangannya yang menstabilkan dan mengarahkan itu berada pada kemudi.

Masalah besar yang dihadapi Suharto pada sidang MPR 1988 berkisar seputar jabatan wakil presiden. Bagi orang yang pilihan-pilihan sebelumnya bagi jabatan tersebut adalah orang yang sudah terbukti memiliki sifat sama sekali tidak menginginkan jabatan kepresidenan, Suharto mengagetkan semua orang dengan pilihannya kali ini: Sudharmono. Jika melihat kedekatan Sudharmono dengan mekanisme internal Orde Baru, jasanya yang setia serta penuh pengabdian sebagai arsitek hukum, patronase dan keterampilan manajemennya, serta partisipasinya yang aktif dan energik dalam politik, ia bukanlah orang yang memiliki ciri-ciri umum para wakil presiden Orde Baru.

Pilihan Suharto atas Sudharmono mencerminkan kemampuannya yang luar biasa dalam membaca keadaan, dan merupakan

puncak dari arah strategisnya yang utama sejak akhir era 1970-an. Ia sudah menyadari bahwa prestasi ekonomi Orde Baunya, paling baru dicontohkan oleh pembaruan-pembaruan ekonomi radikal yang menarik Indonesia dari jurang menganga pada awal era 1980-an, telah mengubah negerinya secara mendasar sekali. Pada saat perekonomian bergerak menuju tahap yang lebih matang yang merupakan hasil dari perpaduan pembangunan jangka panjang bersama-sama dengan pembaruan-pembaruan di era 1980-an, modernitas sosial pun mulai muncul di Indonesia.

Pertumbuhan peluang-peluang investasi serta peran modal swasta yang digalakkan serta didiversifikasikan dalam perekonomian, bersama dengan fokus pada produksi yang berorientasi ekspor, telah melahirkan kelompok pengusaha baru serta meningkatkan jumlah dan potensi politik kelas-menengah-terdidik yang muncul—selain juga kelas pekerja muda perkotaan yang terkadang suka menggerutu itu. Banyak dari kelompok yang bangkit ini mencari keselamatan bagi diri mereka bukan di tangan perusahaan-perusahaan yang disponsori oleh negara melainkan di tangan bisnis swasta. Mereka tidak memerlukan hak istimewa patronase melainkan transparansi, objektivitas, serta tiadanya kesewenang-wenangan dalam aturan-aturan di mana mereka bergerak. Bersamaan dengan perkembangan-perkembangan ini, muncul pendapat-pendapat bahwa politik di Indonesia sangat terbelakang serta mungkin lebih baik meniru nilai-nilai bisnis seperti prakarsa, tanggung jawab bersama, serta konsultasi.

Sehubungan dengan hal ini, ada cukup alasan untuk berpendapat bahwa Suharto telah mencapai tahap akhir dalam mempersiapkan Sudharmono untuk menerima hadiah akhir kepresidenan. Inilah orang yang mendapat banyak kepekaan politik dan birokratis dari majikannya, pengalaman yang luas dalam birokrasi serta penguasaan atas seni patronase. Sudharmono, juga mentornya, memiliki kepekaan terhadap tatanan sosial negara yang berubah, dan cara-cara mengakomodasi perubahan-perubahan itu melalui penguatan tren-tren penyipilan dan partisipasi yang sudah mulai

tampak di dalam tubuh Golkar pasca-1983—namun sudah tentu di dalam kerangka Pancasila.

Suharto sendiri, sejak beberapa lama, sudah mulai bergerak ke arah pendapat yang ia yakini bahwa ia tidak bisa lagi mengharapkan ABRI memperlihatkan keluwesan strategis yang serupa—meski sesekali ada pernyataan hati-hati dari Murdani yang menyetujui sistem politik yang lebih terbuka dan responsif. Sejalan dengan ini, adalah bukan kebetulan bahwa Suharto menetapkan, sebelum sidang MPR, sifat yang diperlukan dari seorang wakil presiden: "diterima atau *acceptable* oleh semua lapisan masyarakat yang dinyatakan dengan dukungan kekuatan sosial politik yang besar dan dominan."[87]

Sejalan dengan ini, Suharto mulai meletakkan kerangka dasar bagi Sudharmono. Pada 10 Februari 1988, sebulan sebelum pemilihan presiden dan dua bulan setelah ia memberi perpanjangan dinas dua belas bulan kepada Murdani, Suharto melancarkan pukulannya yang jitu: melepas Murdani dari jabatannya sebagai panglima ABRI dan menggantinya dengan kepala staf angkatan darat serta mantan ajudan presiden (1974–78) Try Sutrisno—yang merupakan perwira pertama yang tidak pernah berdinas dalam revolusi, yang menjabat posisi tersebut. Menurut seorang pengamat, "Murdani tampak sangat terkejut dengan berita itu" ketika ia keluar dari pertemuannya dengan Suharto.[88]

Dalam kilas-balik, perpecahan antara pemimpin dengan salah seorang dari asistennya yang paling tabah serta paling lama berdinas telah berkembang selama beberapa waktu (meski Suharto mungkin sudah memperhitungkan saat yang tepat sehingga Murdani tidak memimpin pasukan ketika ia mengetahui pilihan Suharto atas Sudharmono sebagai wakil presiden). Ketidakmampuan Murdani dalam menilai arus sosial politik yang mengalir di masyarakat Indonesia baru, obsesinya terhadap pengembangan jaringan intelijen, dan keteguhan pikirannya yang ngotot serta kekurangluwesan politiknya tak dapat dihindarkan lagi membuatnya berhadapan dengan Presiden. Meski ada pandangan umum

bahwa perpecahan itu adalah akibat dari keberanian Murdani mengecam favoritisme Suharto terhadap kepentingan bisnis anak-anaknya serta penolakannya untuk berbaik hati memberi mereka pengadaan-pengadaan militer yang menguntungkan, bisa jadi hanya pemicu saja dan bukan alasan yang melandasi pengasingannya.

Ironisnya, pada saat Suharto berjuang menciptakan gaya politik yang berbasis luas serta inklusif—perwujudan negara Pancasila—ia secara pribadi menjadi semakin menjauhkan diri. Pada 1986, ia mengakhiri kebiasaannya menerima tamu selama Lebaran untuk saling memaafkan. Penarikan dirinya dari publik yang semakin kelihatan itu mestinya tidak mengherankan. Langgengnya fisik dan politiknya memberi arti bahwa ia adalah segelintir tokoh yang tersisa dari generasinya. Sebagian mantan rekannya sudah meninggalkan arena atau sudah tergeser. Dalam banyak hal, ia, seperti yang belum pernah ia alami sebelumnya, sendirian memikul tanggung jawabnya yang berat itu, tak memiliki lagi kerja sama tim yang terasa akrab dengannya serta terdiri atas rekan-rekan masa lalu yang sejak lama disayanginya.

Gaya memerintahnya pun mulai memperlihatkan keangkuhan baru dan jauh. Sementara senyumnya yang sebentar-sebentar berkilau dan memperdaya masih bisa digunakan dengan dampak yang menghancurkan; wajah yang sering ia tampilkan kepada dunia adalah wajah orang yang efisien, walaupun kadang terkesan lelah-berurusan, terlihat patuh pada tugas serta bertanggung jawab. Seolah-olah untuk mengimbangi pengabaian sebelumnya, perhatiannya semakin beralih ke keluarga dekatnya, terutama pada saat jumlah anggota keluarganya semakin bertambah dengan hadirnya cucu-cucu. Ibu Tien juga mendapat berbagai penghargaan dari tangan kepresidenan sendiri.

Pidato Suharto pun kerap kembali ke tema bahwa sekarang adalah saatnya alih-generasi:

> Generasi '45 sedang merampungkan tugas sejarahnya untuk menantarkan bangsa ke tahap peletakan landasan yang kokoh bagi

> tinggal landas menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bersamaan dengan itu, generasi penerus dalam ABRI khususnya dan tubuh bangsa Indonesia umumnya telah memulai memikul tanggung jawab yang makin besar.[89]

Mayoritas besar dari mereka dengan siapa ia bekerja—dewan intinya menjelang akhir 1980-an terdiri atas para wakil yang lebih muda dari generasi yang muncul, orang-orang seperti sekretaris negara yang sipil serta orang-orang Golkar misalnya Murdiono, Sarwono, Cosmas, Ginanjar, dan Akbar, serta tipe-tipe militer profesional yang lebih muda (seperti Try, Edi Sudrajat, Sugiarto, dan Bambang Yudhoyono, produk-produk Magelang serta akademi militer lainnya)—semuanya lebih baik pendidikannya serta lebih canggih penampilannya ketimbang para jenderal tua.

Suharto sendiri tidak punya banyak untuk berbagi dengan mereka dalam hal pengalaman yang sama; sementara mereka memperlakukannya dengan kekaguman dan rasa hormat serta menjaga jarak emosional. Semakin terlihat bahwa ia cenderung memastikan kesetiaan bukan dengan perasaan melainkan dengan menciptakan perpecahan dan persaingan.

Kekuasaannya yang khas tercermin dalam hubungannya dengan para menterinya. Ia memberi kesan bahwa mereka datang kepadanya untuk mencari kearifan dan nasihat, dan bukan untuk mengajukannya. Mereka yang paling berhasil adalah yang cukup berpengalaman dan lihai dalam mengetahui bagaimana cara mengajukan gagasan-gagasan mereka tanpa terkesan mengangkangi dan tanpa sedikit pun ada kesan mengintimidasi.

"Kalau [para menteri] datang kepada saya," komentarnya, "mereka memerlukan petunjuk saya, bagaimana pendapat saya tentang ini dan tentang itu. Mereka sendiri sebenarnya sudah mempunyai pikiran, pendapat tentangnya. Tetapi mereka perlu menge-*check*, supaya jangan sampai salah atau terjadi macam-macam. Supaya jangan sampai bergerak sendirian, saya memberikan petunjuk. Begitulah."[90]

Dalam semua situasi ini, Sudharmono bukan, dan tidak bisa diharapkan bisa menjadi, pilihan yang populer sebagai wakil presiden di mata Angkatan Darat. Selain kurangnya respek Angkatan Darat terhadap dirinya yang pada dasarnya memiliki latar belakang militer "sipil" (Sudharmono tidak pernah memimpin pasukan), para perwira senior tersebut sangat menyadari upaya-upayanya sewaktu menjabat sebagai sekretaris negara dalam menjauhkan mereka dari kontrak-kontrak gemuk yang dengannya mereka sebelumnya menjadi makmur, dan mengalihkannya ke tangan anak-anak Suharto beserta rekan-rekan bisnis mereka. Persaingan dengan Murdani dalam mengambil hati di lingkungan eselon-eselon atas Orde Baru juga sudah menjadi rahasia umum. Dan memang, ganasnya kampanye militer terhadap Sudharmono—"jarang sekali kepemimpinan ABRI menyampaikan pendapatnya secara lebih keras"[91]—memperkuat pendapat bahwa Suharto tidak main-main akan naiknya Sudharmono pada akhirnya ke jabatan kepresidenan.

Dalam pamer di depan umum yang belum pernah terjadi menyangkut persaingan politik, Murdani melancarkan kampanye di kalangan para wakil ABRI di MPR agar tidak memberi Sudharmono pos wakil presiden itu. Hasilnya adalah pencalonan Naro oleh fraksi PPP, yang kemudian ditarik persis pada saat-saat terakhir atas tekanan kuat Suharto sendiri.[92] Dalam unjuk kemarahan lainnya, Brig. Jen. Ibrahim Saleh mengambil inisiatif sendiri untuk melancarkan protes terhadap sidang MPR, dengan sempat naik ke podium sesaat dan mulai melancarkan serangan lisan terhadap Sudharmono sebelum dipotong agar mengakhiri pidatonya oleh sekelompok anggota termasuk Murdani dan Try.

Keributan yang tak pantas itu akhirnya selesai, pemilihan "aklamasi" Sudharmono sebagai wakil presiden pun berjalan terus. Namun, ABRI telah menyampaikan pesan pentingnya: Sudharmono tidak dapat diterima oleh ABRI sebagai presiden mendatang. Untuk menggarisbawahi sikap beroposisi ini, Sarwo Edhie, pendukung Suharto sejak lama serta kepala BP-7 pada 1984–87,

mengundurkandiri dari DPR sebagai protes atas terpilihnya Sudharmono. Penolakan Suharto untuk mundur dari pilihannya menghadapi permohonan sungguh-sungguh pihak militer secara menyakitkan menyadarkan kepemimpinan angkatan darat bahwa kemampuan mereka untuk melancarkan pengaruh berarti pada jalannya berbagai peristiwa sudah menjadi sangat tergerogoti—"Para perwira senior dikabarkan terkejut dengan ketidakberhasilan mereka membujuk presiden agar mendengarkan keberatan mereka atas pilihannya bagi jabatan wakil presiden, Sudharmono"[93]—serta bahwa dwifungsi yang sangat mereka agung-agungkan itu diminimalisasi hingga ke tingkat yang membahayakan.

Menyusul keributan yang memalukan itu, Angkatan Darat, yang takut bila Sudharmono akan terus menjabat sebagai ketua Golkar selain juga menjabat sebagai wakil presiden—khususnya kalau melihat ketidakpastian yang muncul seputar suksesi kepresidenan—melakukan kampanye gencar untuk mengumpulkan suara daerah yang cukup banyak guna menyingkirkannya dari jabatan Golkar pada kongres keempat Golkar pada Oktober 1988. Sementara itu, tuduhan-tuduhan yang merusak citra bahwa Sudharmono dan sebagian dari para pengikutnya entah bagaimana caranya terkait dengan PKI pun disebarkan.[94]

Kecenderungan-kecenderungan seperti ini—penegasan kembali pengaruh ABRI dalam Golkar, pemakaian taktik usang dan membosankan tentang bahaya komunisme—bertentangan dengan pandangan para pemimpin yang lebih muda dari kalangan sipil maupun Golkar, diperkuat oleh contoh-contoh ketidakstabilan politik yang meresahkan di Myanmar, Filipina, dan Korea Selatan, bahwa partai perlu bergerak lebih jauh mengikuti jalan yang menganut keterbukaan politik serta partisipasi rakyat yang lebih besar dalam kerangka Pancasila.

Namun, kongres menghasilkan kemenangan total bagi Angkatan Darat. Dalam keadaan seperti itu, Sudharmono menolak untuk mencalonkan diri lagi, dengan menyebutkan alasan tekanan tugas-tugas kewakilpresidenannya; Angkatan Darat pun menegakkan

kembali kekuasaannya atas organisasi itu, dengan meninggalkan noda pada orang-orang yang diduga menganut haluan kiri dalam Golkar—kemungkinan para pendukung Sudharmono—serta benar-benar merugikan kekuasaan independen Sudharmono.Wahono, yang adalah rekan lama Presiden (ia adalah wakil kepala staf Kostrad pada 1 Oktober 1965 dan kemudian menjadi Panglima Kostrad) namun yang juga tidak cerdik secara politis ataupun ambisius, pun direkrut oleh Suharto untuk memimpin organisasi tersebut.

Namun, Suharto bukanlah orang yang mau mengalah terhadap unjuk kebulatam tekad Angkatan Darat—yang terwujud, antara lain, dalam serangkaian agitasi mahasiswa, di pertengahan 1989 yang tampaknya disponsori, atau setidaknya ditoleransi, oleh ABRI. Kabinet barunya, dikembangkan atas nasihat tim yang beranggotakan sembilan orang yang hanya tiga di antaranya anggota Angkatan Bersenjata, jelas sekali bersifat peralihan, menggabungkan beberapa wajah lama dan terpercaya dalam posisi di mana keteguhan sikap mereka dapat digunakan (Cosmas Batubara dalam perumahan rakyat) bersama dengan serombongan menteri baru dan belum berpengalaman.

Namun demikian, kabinet baru ini memiliki beberapa pesan politik yang sangat jelas. Pertama-tama, peran Angkatan Bersenjata cukup banyak dikurangi, dengan jumlah anggota ABRI dalam kabinet yang beranggotakan empat puluh orang itu turun menjadi hanya sepuluh. Ini juga merupakan pertanda lebih lanjut tentang menurunnya peran ABRI di dalam aparatus politik. Sudomo, asisten Suharto yang sudah lama berdinas dan tetap setia, menjabat sebagai menteri koordinator untuk politik dan keamanan, diduga dengan mandat untuk mengawasi pemikiran-pemikiran yang berbeda di kalangan militer.

Kubu Sudharmono memperoleh dorongan yang cukup berarti dengan diangkatnya Ginanjar, rekan dekat Sudharmono serta penganjur nasionalisme perekonomian, dan sebuah manifestasi kecenderungan penyipilan Golkar serta penciutan secara propor-

sional posisi para teknokrat. Ali Wardhana digantikan oleh Radius Prawiro yang lebih pragmatis, dan Subroto, setelah lama memegang portofolio Pertambangan dan Energi, tidak dipakai lagi. Mantan kepala staf angkatan darat Rudini, yang dijauhkan dari Murdani, diangkat untuk portofolio Dalam Negeri yang krusial secara politis. Rudini tak lama kemudian mulai mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang membantah adanya kewajiban bagi pegawai negeri untuk memilih Golkar, dan menyetujui kebebasan berkumpul mereka.[95]

Dalam sikap akomodatif tak terduga terhadap keprihatinan internasional seputar masalah-masalah lingkungan, serta pertanda semakin berkembangnya persepsi tentang konteks global Indonesia, Suharto membentuk Kementerian Lingkungan yang bersifat khusus serta mengangkat teknokrat Emil Salim sebagai menteri. Dalam langkah lainnya, dan tanpa gejala sebelumnya—Murdani yang ketika itu memegang jabatan sebagai menteri pertahanan dalam kabinet baru, tidak memiliki firasat atau peringatan sebelumnya sehubungan dengan keputusan tersebut—dan dimaksudkan untuk memperlemah kekuasaan Murdani juga kemampuannya untuk merugikan Sudharmono, Suharto membubarkan Kopkamtib yang dikepalai oleh Murdani, pada September 1988. Kapasitas Kopkamtib yang terkenal kejam dan bisa bergerak ke mana-mana untuk melakukan tindakan represif yang independen dan sewenang-wenang itu pun disingkirkan. Badan baru, Bakorstanas (Badan Koordinasi Stabilitas Nasional), di bawah kepemimpinan Try Sutrisno dan mengikutsertakan anggota-anggota dari kalangan sipil, dimaksudkan untuk mengoordinasikan kegiatan-kegiatan seperti itu di masa mendatang, yang hanya bisa dijalankan dengan persetujuan presiden.[96]

Banyak alasan diajukan untuk menjelaskan penghapusan Kopkamtib, namun yang paling jelas adalah keinginan Suharto untuk membatasi serta membongkar jaringan intelijen rumit yang digunakan Murdani dalam mendorong kenaikannya ke panggung politik. Tak usah diragukan lagi, Suharto juga peka—dengan

melihat niatnya untuk memainkan peran internasional yang lebih menonjol—terhadap reputasi menakutkan Kopkamtib yang bisa merugikan gengsi internasionalnya. Mungkin juga ia menyadari (seperti yang konon dialami oleh Sumitro selama memegang jabatan tersebut) [97] bahwa konfigurasi sosial Indonesia yang baru tidak lagi merupakan tempat yang tepat bagi operasi dengan gaya Kopkamtib.

Renungan-renungan Suharto akan masa depannya, bersama dengan konflik terang-terangan yang telah muncul sebagai akibat dari skandal Murdani dan Sudharmono pada 1988, membangkitkan spekulasi tentang suksesi ke intensitas yang lebih tinggi. "Kita sekarang membahas topik secara terbuka yang belum pernah terjadi di masa lalu," komentar Sudomo. Sudomo sendiri setahun sebelumnya melaporkan pernyataan Suharto bahwa pertarungan memperebutkan jabatan kepresidenan dapat diterima asalkan hanya satu nama yang pada akhirnya diajukan untuk diambil *voting* oleh MPR. Suharto, yang tampaknya merasa didahului oleh percepatan pembahasan tentang masa depannya, dengan marah mengatakan kepada para menteri ekonominya, pada pertemuan kabinet Mei 1989, agar berhenti membuat pernyataan-pernyataan yang menjagokan pengganti ini atau itu untuk jabatan kepresidenan.[98]

Namun, upaya-upaya ABRI untuk menegakkan kembali pengaruhnya terus saja berjalan. Hal-hal yang sebelumnya merupakan topik-topik tabu saat itu menjadi semakin dibeberkan untuk dibahas sehingga Try Sutrisno merasa perlu meyakinkan kembali Suharto, pada sebuah pertemuan para panglima pada Agustus 1989, bahwa ABRI harus memusatkan upaya-upayanya pada memastikan kesinambungan kepemimpinan nasional Orde Baru." [99] Pada Desember, kepala staf angkatan darat Edi Sudrajat dengan resmi menyatakan pandangan bahwa kecenderungan otoriter Orde Baru perlu dikendalikan, komentar-komentar yang memperoleh dukungan tambahan serta keprihatinan dengan terbitnya, pada awal 1990, komentar pahlawan revolusioner dan mantan kepala

Angkatan Bersenjata T.B. Simatupang menjelang meninggalnya, mengenai perlunya rezim melakukan pembaruan serta koreksi.[100]

Namun, Suharto jelas bermain lebih bagus ketimbang pihak militer, memanfaatkan ketidakkompakan yang meluas dan kecurigaan mereka yang sejak lama menandai eselon-eselon atasnya, serta memainkan kartunya sendiri—berbentuk kesetiaan pribadi—begitu terampilnya sehingga tanggapan ABRI atas pengurangan perannya selama akhir era 1980-an pun tidak berkembang menjadi upaya sistematis untuk mendepaknya.

Tapi, Suharto perlu menanggapi kerusakan yang telah terjadi, dan tanggapannya secara khas bersifat strategis. Semenjak sekitar pertengahan 1989, ia mulai menganut sikap toleransi dan kewajaran dalam upaya meredakan sengatan serangan-balik ABRI yang, kebetulan, juga disambut oleh para pembaru sipil. Namun, adalah salah kalau mau menafsirkan tindakan-tindakan Suharto murni dengan cara ini, yaitu sebagai orang yang terdorong oleh kebijakan politik pragmatis semata.

Seperti yang sudah saya kemukakan, semenjak akhir era 1970-an Suharto telah menjadi semakin sadar akan kenyataan bahwa Indonesianya sedang berubah dengan cepat, serta bahwa agenda-agenda baru untuk menahan dan mengendalikan perubahan-perubahan ini tengah hadir. Dukungannya terhadap kampanye penyipilan Golkar oleh Sudharmono juga merupakan bukti bahwa ia sedang mencari wahana politik yang direkonstruksi dan lebih besar, yang dapat mengartikulasikan kepentingan-kepentingan sang penguasa dan yang dikuasai.

Malah sudah sejak pidato Hari Kemerdekaannya pada Agustus 1987, Suharto menyatakan bahwa ia menginginkan suasana politik yang lebih terbuka, bahkan seandainya ia menyertai komentar ini dengan pernyataan bahwa stabilitas nasional tidak boleh terganggu.[101] Pada saat yang sama, karena heboh atas pemilihan Sudharmono, tampaknya Suharto mulai berpaling dari kemungkinan meninggalkan jabatan kepresidenan secara suka rela, bahkan meski Sudharmono, yang sibuk melakukan perjalanan ke daerah,

terus saja bekerja keras untuk mengembangkan dan memperluas penampilan politik serta basis-basis dukungan politiknya sendiri. Sementara pada pidato Hari Kemerdekaan 1989-nya Suharto berbicara tentang Pancasila sebagai "ideologi terbuka" yang peka terhadap gagasan-gagasan baru, beberapa minggu setelah itu ia mengulangi peringatan yang sudah disampaikannya tahun itu: ia akan menanggapi dengan kekerasan ("Saya akan gebuk. Siapa saja, saya gebuk"), setiap upaya untuk menggantinya secara inkonstitusional.[102]

Upaya-upaya Suharto dalam mempertahankan posisi unggul mencakup pengakuan bahwa kekuatan-kekuatan baru dalam masyarakat Indonesia perlu diakomodasi sebagai syarat untuk menjinakkan mereka pada akhirnya. Pembahasan masalah-masalah politik yang lebih luas dapat ditoleransi, namun hanya dalam lingkup terbatas ortodoksi Orde Baru. Tanggapannya atas kerusuhan sipil yang muncul, yang terwujud dalam protes-protes terhadap pembebasan secara paksa tanah petani untuk proyek waduk Kedung Ombo di Jawa Tengah, sangat konsisten dengan sikap ini. Mereka yang mendorong para petani untuk meneruskan perjuangan mereka (dari suatu wilayah, ujar Suharto, yang "sebelumnya adalah basis PKI"), sebenarnya merugikan para petani itu sendiri dan "sebenarnya memerosokkan mereka serta menimbulkan kesulitan bagi mereka."[103] Namun, ABRI tidak cepat-cepat berpihak kepadanya dalam masalah ini.

Tema yang semakin muncul dalam wacananya, yang tampaknya dimaksudkan untuk melunakkan ketakutan-ketakutan yang semakin menguat tentang polarisasi perekonomian di dalam masyarakat, adalah satu tekanan yang diperbarui tentang perlunya menerapkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar secara lebih sempurna, yang berkenaan dengan upaya ekonomi koperasi, agar dapat memastikan pembagian yang lebih merata atas hasil-hasil pembangunan. Pada sebuah pertemuan kabinet April 1989, ia dilaporkan telah menyuarakan kekhawatirannya tentang "kecemburuan sosial" yang semakin kuat, dan kira-kira di saat yang sama, ia

mulai menekankan tema bahwa lapisan-lapisan masyarakat yang lebih kaya harus menyumbangkan sebagian kekayaan mereka untuk pendirian koperasi-koperasi.[104]

Sehubungan dengan gagasan bahwa modal swasta perlu memainkan peran yang lebih kuat, adalah upaya-upaya Suharto dalam menyempurnakan, mendefinisi-ulang makna dari dwifungsi Angkatan Bersenjata, dengan cara-cara yang cukup merugikan posisi sentral ABRI dalam politik dan perekonomian:

> [Sementara dwifungsi] akan tetap melekat pada diri ABRI sebagai salah satu unsur pelaksanaan yang dinamis dan Demokrasi Pancasila. .... tugas-tugas kekaryaan ABRI sama sekali tidak berarti penyaluran tenaga ABRI ke dalam kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan. Kekaryaan ABRI merupakan sumbangan yang bisa diberikan oleh ABRI melalui anggota-anggotanya yang terbaik kepada bangsa dan negaranya di luar tugas-tugas pokok ABRI sebagai kekuatan pertahanan-keamanan.[105]

Pernyataan seperti ini mencerminkan pandangan orang-orang seperti Rudini. Pandangan ini juga mencerminkan kenyataan bahwa sumber-sumber ABRI belakangan ini sangat tertekan oleh anjloknya harga minyak dan pembaruan-pembaruan ekonomi pada pertengahan era 1980-an, yang menghalang-halangi BUMN-BUMN serta menggalakkan pertumbuhan investasi swasta.

Benang merah lain yang muncul, tampak jelas pertama kali pada 1989 namun mungkin berawal sebelum itu, adalah sikap Suharto yang sama sekali berubah terhadap Islam. Kemenangannya dalam menanamkan Pancasila sebagai satu-satunya landasan berarti bahwa pidato-pidatonya tidak lagi menyuarakan kekhawatiran-kekhawatiran dan ancaman-ancaman yang dikaitkan dengan bahaya politik fundamentalisme Islam. Pada September 1989, 21 pemimpin dan kiai sepuh Islam, diantar oleh Menteri Alamsyah yang juga mantan asisten Suharto, menyampaikan secara resmi keinginan mereka agar Suharto menjabat satu periode lagi. Kehadirannya pada kongres NU pada November ditandai oleh

hangatnya sambutan terhadap para peserta kongres. Ia menggunakan kesempatan itu untuk mengakui bahwa NU menjadi pelopor dalam menerima Pancasila sebagai satu-satunya landasan.[106]

HABIBIE DAN TEKNOLOGI

Benang merah terakhir dari strategi baru Suharto adalah menguatkan, secara cukup berarti, rencana pengembangan Indonesia menuju kemajuan teknologi. Sehubungan dengan hal ini, Suharto mulai menyusun taktik-taktik kuat untuk meningkatkan kekuasaan dan profil Dr. B.J. Habibie yang energik, ambisius, serta penganjur teknologi tinggi itu. Pandangan-pandangan Habibie tentang pembangunan ekonomi berbeda sangat radikal dari yang begitu lama ditanamkan oleh para teknokrat. Ia menawarkan visi baru yang bukan didasarkan pada pemanfaatan suplai tenaga kerja Indonesia yang berlimpah serta kebijakan upah rendah yang tak pelak lagi akan menjadi korban keberhasilannya sendiri.

Sebaliknya, ia mengupayakan revolusi teknologi yang disponsori negara: percepatan pengembangan industri-industri teknologi maju yang dipilih secara strategis; para pekerja yang sangat terlatih dan terampil untuk mengoperasikannya, yang keahliannya akan membawa dampak ganda yang luar biasa besar di seluruh sektor perekonomian dan mencegah terjadinya kemerosotan yang, dalam jangka panjang, tak pelak lagi akan menghancurkan visi para teknokrat.

Adalah persepsi seperti ini—terlepas dari berulangnya kecaman yang membuyarkan konsep-konsep ekonomi aneh Habibie seperti teori 'balon' pembangunannya[107]—yang mendapat sambutan hangat dari Suharto yang, setelah tampaknya menguasai masalah-masalah rutin teori pembangunan, mulai mencari rute terbaik untuk maju menuju "tinggal landas"-nya Indonesia. "Secara khusus saya menyadari," ujarnya, "betapa penting penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan bangsa kita di masa mendatang. Untuk mampu mencapai tinggal landas, di tahun-tahun

yang akan datang kita perlu mencapai kemajuan yang lebih besar di bidang ilmu dan teknologi itu."[108]

Keterpukauannya pada teknologi serta obsesinya pada gagasan bahwa kemampuan Indonesia menguasai teknologi adalah pertanda kepada dunia akan kemajuan serta kematangan negerinya—"kita pun mampu menguasai teknologi modern"[109]—pertama sekali mendorongnya untuk mendukung rencana-rencana Habibie mengembangkan industri pesawat terbang nasional (IPTN) pada akhir era 1970-an, dan serius melanjutkan dukungan ini walau menghadapi oposisi serta kecemburuan para menteri lainnya —yang tidak menyukai hubungan istimewa Habibie dengan Presiden maupun kemampuannya dalam menggaet porsi-porsi pembiayaan yang cukup besar dari anggaran belanja negara serta sumber-sumber nonbudjeter lainnya seperti Pertamina, dengan mengorbankan proyek-proyek mereka sendiri. Menjelang awal era 1980-an, PT Nurtanio yang dipimpin Habibie sudah merakit helikopter dan pesawat-pesawat penumpang kecil atas lisensi perusahaan-perusahaan asing.

Suharto jelas puas dengan apa yang berhasil dicapai Habibie menjelang pertengahan era 1980-an yang ditampilkan dalam pameran dirgantara pertama Indonesia pada 1986. "Keberhasilan kita dalam bidang pembangunan berteknologi tinggi seperti industri pesawat terbang, telah mempertebal rasa percaya pada diri sendiri bahwa dengan menggunakan setiap peluang yang terbuka, bangsa kita sanggup menguasai dan mengembangkan teknologi yang paling maju," komentarnya.[110]

Menjelang waktu ini, Habibie sudah mengelola imperium teknologi yang besar sekali, membangun pesawat terbang, kapal, dan bahkan senjata. Pada Agustus 1989, Suharto memperbesar jangkauan portofolio industri strategis Habibie hingga mencakup baja dan produksi kontainer, dan Habibie semakin meningkatkan bisnisnya melalui akses istimewa ke pengadaan angkatan darat dan angkatan laut. Ia sekarang memiliki akses dekat ke Suharto yang ia bangun dengan cerdik dan yang tak banyak bisa me-

nyaingi—dengan mengambil sikap sebagai anak yang berprestasi tinggi tapi selalu patuh dan hormat, serta selalu mencari pencerahan dan kearifan yang lebih besar dari ayahnya.

Tertariknya Suharto pada Habibie mengandung unsur pribadi juga, mencerminkan bukan saja peran kecil Suharto sendiri dalam masa mudanya di Makasar, tapi juga sifat-sifat tertentu Habibie yang membuatnya disayangi Suharto. Habibie, seperti juga Suharto sendiri, adalah orang "yang bergairah untuk melayani". Suharto juga mengagumi kerelaan Habibie untuk meninggalkan kariernya sendiri yang menguntungkan di Jerman untuk mengabdi pada negerinya. Mungkin, yang paling penting, Suharto mengalah pada kesediaan Habibie untuk memuja dan mengakomodasinya:

> Setiap memberikan laporan, sampai berjam-jam lamanya ia bersama saya karena ia ingin menangkap apa pendapat saya, apa filsafat saya. Dan setelah sesudah ia menangkap pendirian saya, filsafat saya, ia mengembangkannya sesuai dengan keahliannya sebagai insinyur .... Ia selalu meminta nasihat saya mengenai pegangan hidup .... Dia itu menganggap saya sebagai orang tuanya sendiri.[111]

KESIMPULAN

Menjelang akhir era 1980-an, kekuasaan yang dibangun Suharto menjelang pertengahan dasawarsa itu mulai menunjukkan tanda-tanda kerawanan. Ia memerintah masyarakat yang berubah dengan cepat sebagai akibat dari perubahan-perubahan revolusioner di bidang sosial dan ekonomi yang muncul di masa kepemimpinannya. Masyarakat madani mulai muncul dan menuntut partisipasi politik yang lebih langsung dan transparan, serta dibentuknya jenis-jenis lembaga yang lebih baru guna mengakomodasi aspirasi-aspirasi mereka. Dukungan baginya—yang umumnya tak goyah—sebelum ini dari Angkatan Bersenjata mulai berkurang ketika para

perwira senior dengan amat terkejut mulai menyadari bahwa peran dan sentralitas mereka telah digerogoti, serta bahwa mereka telah semakin dipinggirkan dalam kokpit kekuasaan Suharto. Dalam pandangan seorang pengamat, "demiliterisasi Orde Baru Suharto sudah berjalan sedemikian jauhnya sehingga nyaris tidak kentara bahwa pemerintahannya adalah pemerintahan yang dipimpin oleh militer."[112] Suharto, seperti yang telah sering dilakukannya di masa lalu, menyadari arti penting strategis momennya sebelum orang lain, dan kemudian merebutnya.

Sementara masyarakat madani dan kalangan militer yang masih aktif mengikuti arah yang sangat berbeda, para pemimpin dan jurubicara mereka, termasuk di antaranya banyak jenderal senior dan purnawirawan seperti Sumitro dan Rudini, sependapat bahwa jenis masyarakat yang mereka inginkan tidak lagi perlu menyertakan Suharto pada jabatan puncak. Pendapat seperti ini sebelumnya tidak terpikirkan, bahkan pada separo dasawarsa sebelumnya. Angkatan Darat pun memulai masa perenungan akan peran apa sebenarnya yang mungkin bagi mereka dalam konstelasi kekuatan-kekuatan baru, serta bagaimana kaitannya dengan kekuasaan Suharto. Waktu itu masih belum ada gambaran bahwa Suharto harus pergi, namun ada kesadaran yang lebih mengusik dan tajam bahwa suksesinya haruslah tepat, dan orang-orang pun mulai mencari-cari mekanisme yang mungkin dapat membuat hal itu terwujud.[]

10 Kemerosotan, Kejatuhan, dan Perhitungan

Dalam permainan ini, cepat atau lambat, semua orang harus pergi.

(Adam Malik, *In the service of the Republic*, h. 20)

Pada Awal Era 1990-an, Suharto sudah tua dan lelah. "Saya sudah lelah, saya capek," ujarnya kepada Alamsyah pada pertengahan 1993. Tubuhnya yang dulu langsing, jangkung, dan kuat, telah menyusut, tambah pendek dan bundar.[1] Pada 1991, ia berusia 70 tahun, jauh melampaui rata-rata usia hidup pria Jawa. Meski usianya sudah semakin lanjut, keputusan Suharto untuk tetap memegang kemudi membuat ia harus memaksa tubuhnya yang makin tua, pikirannya yang lelah, serta emosi-emosinya yang makin rapuh untuk tetap bekerja mewujudkan takdir Indonesia, sebuah tugas yang, sekarang telah ia putuskan, sangat memerlukan dirinya. Tapi, ia masih bisa menunjukkan rasa humor dengan menertawai dirinya sendiri yang menjadi prerogatif orang-orang berkuasa. Ketika menerima rombongan Komite Nasional Pemuda Indonesia pada awal 1991, ia menanggapi imbauan-imbauan kepadanya untuk mencalonkan diri lagi bagi jabatan kepresidenan pada 1993:

Memang kenyataannya makin lama saya ini makin *top*. Top bukan berarti paling tinggi, tetapi *top* dengan dua huruf p: TOPP. T dari singkatan Tua, kalau makin lama makin tua, jadi Ompong, lantas Peot. Dan kalau sudah peot dengan sendirinya Pikun. Lha, masa, MPR akan memilih orang yang TOPP.[2]

MAKNA KETERBUKAAN

Sejak pertengahan era 1980-an, Suharto telah berjuang, namun tidak sepenuhnya berhasil, untuk mencapai kesepakatan politik dengan kekuatan-kekuatan sosial baru yang tercipta dari kebijakan-kebijakannya sendiri. Sebagai pertanda dari perubahan-perubahan kuasirevolusioner yang terbentuk adalah kenyataan bahwa pada 1991, untuk pertama kalinya, porsi manufaktur pada PDB melebihi porsi pertanian. Pada tahun yang sama, untuk pertama kalinya dalam sejarah, bank-bank swasta memiliki jumlah deposito yang lebih besar dibandingkan bank-bank pemerintah, dan masih berada di belakang lembaga-lembaga negara dalam hal pinjaman-pinjaman yang belum diselesaikan. Perkembangan-perkembangan seperti ini adalah aspek kecenderungan globalisasi yang diprakarsai Barat, dan membuat beberapa kalangan reformis sipil di Indonesia berharap bahwa nilai-nilai liberal Barat kelak akan ikut menyertainya.[3]

Namun, keterbukaan yang dianut Suharto sama sekali tidak dimaksudkan demikian, walau sempat sebelumnya memicu beredarnya kecaman-kecaman teredam serta seruan bagi pembaruan-pembaruan yang cukup mendasar (termasuk modifikasi secara mendasar dwifungsi ABRI) serta pembatasan-pembatasan atas kekuasaan eksekutif, dan bahkan imbauan-imbauan agar Presiden mengundurkan diri pada akhir masa jabatannya yang sekarang.[4] Seruan-seruan seperti ini berasal dari para intelektual sipil senior seperti mantan menteri dan rekan dekatnya Mashuri serta tokoh Golkar Marzuki Darusman, selain juga para jenderal purnawirawan seperti Sumitro, Sayidiman Suryohadiprojo, dan Nasution, serta

kelompok Petisi 50—di mana Nasution adalah salah seorang anggotanya (yang, tampaknya menjengkelkan Suharto, diundang untuk diskusi-diskusi di parlemen pada 1991).

Tapi, tak satu pun dari semua ini yang menandakan adanya oposisi serius. Suharto, misalnya, mengesampingkan pendapat tentang ABRI yang mengundurkan diri dari peran sosial-politiknya. "Kalau rempalanya diambil, *kan* mati," komentarnya pada Februari 1992, mengacu pada posisi mengakar ABRI dalam negara.[5] Jika ditinjau kembali, mungkin saja kelemahan relatif serta ketidakkompakan yang amat kentara dari ungkapan-ungkapan ketidakpuasan itu—"kelas menengah yang baru memiliki andil kuat dalam evolusi sistem politik yang tertib dan stabil"[6]—membuat Suharto berani untuk melangkah maju menuju masa depan, merasa lega atas lemahnya pendapat yang berbeda serta buruknya mutu dan kepragmatisan alternatif-alternatif yang ditawarkan.

Suharto berupaya melakukan langkah ini bukan saja dengan kebijakan sungguh-sungguh untuk mencoba memperluas dan menyipilkan pemerintahannya, namun juga mencoba memperluas basis dukungan rakyat untuknya. Pidato Hari Kemerdekaan 1990-nya menyambut gagasan kebebasan yang lebih besar dalam mengungkapkan pendapat, gagasan yang diulang lagi tak lama kemudian oleh Sudomo, sementara Suharto sendiri tampaknya juga menyerukan dikuranginya penekanan pada kepemimpinan eksekutif.[7] Menteri Dalam Negeri Rudini membuat dirinya terkenal dengan mendukung retorika pembaruan serta tanggung jawab sipil—yang sangat kontras dengan pendekatan keamanan garis-keras yang diperagakan Murdani dan para pendukungnya, yang secara khusus menjadi semakin jelas menyusul pembantaian warga Timor Timur di kuburan Santa Cruz di Dili pada 12 November 1991. Pada saat Suharto terus melakukan kegiatan mengubah citra dirinya dalam mengupayakan apa yang ia yakini sebagai perwujudan masyarakat Pancasilanya, ia memberi perhatian pada citranya sebagai sosok negarawan yang serius dan rajin, pemimpin yang tak kenal lelah, arif, dan tanggap, yang sangat disibukkan oleh

kerumitan dan kesulitan yang ia hadapi—namun yang juga dengan cekatan ia atasi—berkaitan dengan jabatan yang dipangkunya itu.

Tanda-tanda akan citra baru yang hendak dibangun ini muncul pada Maret 1990 ketika Suharto memanggil para pimpinan konglomerat-konglomerat bisnis terkemuka ke Tapos untuk diskusi. Semuanya, kecuali beberapa orang, adalah pengusaha Indonesia keturunan Cina, yang sebagian besar memiliki ketenaran (sekaligus kebencian) yang tak mereka kehendaki sebagai akibat dari kegiatan mereka yang sangat berhasil dan diposisikan dengan baik dalam perekonomian yang terderegulasi pada pertengahan dan akhir era 1980-an itu.

Suharto bermaksud menggunakan pertemuan tersebut untuk mengurangi sensitivitas akan peran dan pengaruh niaga Cina-Indonesia, dan menggambarkan dirinya—lagi-lagi—sebagai pelopor "rakyat kecil". Ia sebelumnya sudah, baik dalam otobiografi maupun dalam pernyataan-pernyataan yang disampaikannya pada awal 1990, mengemukakan prospek bisnis swasta dalam membantu pengembangan gerakan koperasi yang selalu terseok-seok jalannya, dan bahkan agar koperasi-koperasi itupun kelak "mampu membeli saham-saham perusahaan-perusahaan [swasta] yang ada."[8]

Melalui televisi nasional, Suharto menggunakan pertemuan Tapos untuk mengemukakan kepada para pengusaha yang berhimpun bahwa pengalihan sampai seperempat aset mereka kepada koperasi adalah cara untuk menutup kesenjangan antara kelompok yang kaya dan miskin. Dan sandiwaranya—dan memang murni sandiwara jika melihat bahwa niatnya tidak diwujudkan menjadi kenyataan—berhasil. Gagasan akan pembagian yang lebih adil atas kekayaan nasional muncul sebagai tema penting dalam retorika-retorika Suharto selama era 1990-an.[9]

Upaya yang kedua adalah melalui pembentukan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) yang menyelenggarakan simposium pertamanya—dibuka oleh Suharto dan ditandai oleh absennya para perwira Angkatan Bersenjata—di Malang, Jawa Timur, pada Desember 1990. ICMI lebih dari sekedar pengelompokan intelek-

tual meski tidak pernah dimaksudkan untuk berperan aktif secara politik. Kelompok ini mewakili aspirasi yang makin menguat (tapi tidak pernah bersatu sepenuhnya) dalam panorama politik Orde Baru dengan memiliki surat kabar sendiri, *think-tank* sendiri (CIDES), serta kampanye untuk mengembangkan kepentingan-kepentingan komersial muslim—terutama dalam bentuk bank Islam.

Pembentukan ICMI merupakan upaya Suharto dalam menggalang dukungan dari para pemimpin muslim intelektual, selain untuk mengawasi medan dukungan politik yang lebih luas dan baru di kalangan komunitas muslim yang sebelumnya ia takut-takuti dan kekang itu. Sesudah pertemuan enam jam dengan Habibie, yang di dalamnya ia menunjukkan pemahamannya akan aspek-aspek luhur doktrin Islam, Suharto memutuskan bahwa Habibie-lah yang harus menjabat sebagai Ketua ICMI. Langkah ini dirancang untuk memberi bobot politik dan intelektual pada organisasi tersebut, meningkatkan prospek politik Habibie, dan mungkin juga memastikan agar kelompok ini tidak berkembang menjadi kelompok muslim "oranye" yang berbahaya.

Upaya ICMI Suharto juga membawa hikmah yaitu menjauhkan dirinya sendiri dari para kroni Indonesia keturunan Cina serta mendorong arah baru bisnis pribumi. Menurut seorang pengamat yang dekat dengannya, "dengan strategi aliansi baru ini, Presiden Suharto memosisikan dirinya sebagai orang yang pro pribumi, pro Islam, dan pro teknologi modern."[10] Dukungan resmi yang kuat seperti itu dijamin akan menyuburkan pertumbuhan ICMI. Pada pertengahan 1994, kelompok ini sudah memiliki keanggotaan resmi sejumlah 20.000 orang dan merangkul orang-orang muslim dari berbagai warna agama dan politik, juga sejumlah kalangan lain yang tidak mau terlihat ketinggalan derap zaman.

Meski berhasil menarik banyak tokoh muslim penting ke dalam kelompoknya—seperti tokoh inklusivis Nurcholish Majid serta Amien Rais yang konsepnya lebih sempit namun lebih agresif,

selain tokoh-tokoh politik lama dan dihormati seperti Emil Salim—ICMI juga mengundang reaksi tokoh-tokoh muslim terkemuka yang melihat bahwa pengembangannya berlawanan dengan kepentingan mereka sendiri maupun negeri.

Tokoh utama yang tidak ikut adalah pemimpin NU Abdurrahman Wahid, yang sangat prihatin dengan apa yang ia pandang sebagai munculnya sektarianisme— beberapa intelektual muslim seperti Amien Rais tak lama kemudian membangkitkan gagasan 'masyarakat Islam'[11]—dan sekaligus menyatakan bahwa ia sangat skeptis dengan maksud-maksud Suharto. "Bagi Suharto, ICMI adalah perkawinan praktis jangka pendek. Ia mengira dapat mengendalikan [para modernis ICMI] bila mereka bertindak terlalu jauh. Saya khawatir strateginya akan berbalik."[12] Selain itu, intelektual modernis muslim yang sangat dihormati, Deliar Noer, menolak dikaitkan dengan organisasi tersebut, sebuah perpaduan akan cemoohannya atas mandat Islam Habibie serta ketidakpercayaannya pada motif-motif Suharto.

Taktik-taktik ini memiliki persamaan serta menandai perkembangan lebih lanjut dalam strategi politik Suharto. Pada kedua contohnya, perpecahan-perpecahan etnis dan budaya yang sebelumnya ia tutupi sekarang dibeberkan dan dirangsang dengan cara yang menyakitkan, sehingga ia bisa terkesan mengulurkan tangan ke konstituen-konstituen baru. Dalam hal pertemuan Tapos, "dalam sekali ayunan, Suharto telah membatalkan sejumlah besar upaya Orde Baru untuk menyembunyikan perpecahan-perpecahan etnis di bawah karpet,"[13] dan memang, telah memperkuat persepsi umum bahwa kegiatan-kegiatan para pengusaha Indonesia keturunan Cina itu sedikit-banyak bertentangan dengan kemakmuran nasional secara umum.

Sementara itu, pergerakan ICMI Suharto lebih bersifat arus besar, terutama jika melihat bahwa ketundukan pada peraturan asas tunggal dari era 1980-an telah—ironisnya, jika melihat heboh yang ditimbulkannya waktu itu—berjasa dalam membantu kaum muslim memperoleh kehormatan yang sebelumnya tidak dimiliki

Islam di bawah Orde Baru. Asal-mula gerak langkah Suharto untuk mengangkat identitas Islam terjadi pada akhir era 1980-an. Ini mencakup langkah-langkah seperti pemberdayaan lebih besar lagi pengadilan-pengadilan Islam, penghapusan pembatasan pemakaian jilbab, fokus yang ditingkatkan terhadap Islam dalam pendidikan sekolah, serta kerasnya reaksi pemerintah atas penerbitan angket popularitas oleh majalah *Monitor*, di mana Nabi Muhammad hanya ditempatkan pada urutan ke-11 (Suharto paling atas). Langkah ini mencapai puncaknya pada Juni 1991, ketika Suharto dan keluarganya, bersama-sama dengan rombongan besar yang menyertainya, menunaikan ibadah haji ke Mekkah—dan dipublikasikan secara luas. [14]

Tekanan-tekanan yang menggerakkan Suharto dalam arah-arah baru ini menjadi semakin rumit. Memang akan merupakan hal yang alamiah baginya, yang selama hidupnya memiliki kecenderungan ke arah spiritualitas serta kini berada dalam tahap-tahap akhir kehidupannya yang panjang dan sibuk, untuk condong ke arah hubungan yang lebih pribadi dengan Islam. Kemungkinan besar, ia juga sangat dipengaruhi oleh pengalamannya tidak lama sebelum itu di Uni Soviet yang ia kunjungi pada 1989, dan dari mana ia menarik pelajaran tentang betapa luar biasa sulitnya mempertahankan keutuhan imperium-imperium dalam era nasionalisme baru yang semakin tumbuh serta gelombang-gelombang demokratisasi. Namun, mungkin pengaruh paling penting yang muncul adalah berakhirnya Perang Dingin, yang berarti bahwa ia tidak lagi dapat bergantung pada dukungan Barat, tidak lagi dilindungi dari serangan-serangan para aktivis hak asasi dan, secara lebih umum, dari kecaman-kecaman masyarakat internasional, atas perangnya melawan komunisme. Wawasan-wawasan seperti ini ditambahkan pada persepsinya yang dominan tentang perlunya—pada saat kemakmuran bangsanya yang semakin meningkat menciptakan masyarakat yang lebih cerdik dan canggih—memimpin dan mengelola perubahan sosial dengan ketajaman politik, bukan dengan mengandalkan bentuk-bentuk otoritarianisme kejam.

Karena pertimbangan-pertimbangan ini, untuk sesaat, dari sekitar 1989 hingga setidaknya akhir 1991, ada masa keterbukaan politik yang luar biasa. Debat dengan topik luas diperbolehkan praktis tanpa hambatan, sementara persepsi baru tentang pentingnya hak-hak asasi manusia tampaknya mulai muncul (Indonesia diterima sebagai anggota Komisi Hak-hak Asasi Manusia PBB pada 1991). Suharto sendiri berbicara tentang Pancasila sebagai "ideologi yang terbuka" dan tampak memuji keragaman kehidupan intelektual yang semakin meningkat. (Sebaliknya, penyair dan editor terkemuka Gunawan Mohamad berpendapat bahwa "universitas-universitas mati, gagasan-gagasan mati. Obsesi pemerintah terhadap keamanan adalah seperti *black hole* yang menelan semua pemikiran independen.")[15] Menyusul pembunuhan massal di kuburan Santa Cruz, Dilli, pada 1991, Suharto mengungkapkan penyesalannya, kesedihannya atas kehilangan yang diderita oleh keluarga-keluarga dari mereka yang terbunuh, serta hampir dapat diartikan sebagai permintaan maaf atas insiden tersebut. Ia mengambil langkah membentuk penyelidikan sementara—di bawah pimpinan Jaelani—untuk membuktikan apa yang sebenarnya telah terjadi, memberhentikan para komandan, serta memerintahkan pengadilan militer untuk menyelidiki apakah dakwaan-dakwaan harus diajukan atau tidak. Secara pribadi ia memarahi departemen pertahanan dan departemen luar negerinya, selain juga para pejabat militer dan pemerintahan sipil setempat, dan dilaporkan menuntut para bawahannya untuk "memastikan bahwa apa yang terjadi di Dili tidak akan terulang lagi."[16]

Di dalam masyarakat pada umumnya, tampaknya ada persepsi yang berkembang kuat bahwa deregulasi perekonomian harus disertai oleh pembangunan sistematis saluran-saluran kebijakan perekonomian yang lebih dapat diprediksi dan transparan, serta deregulasi dan desentralisasi pemikiran politik maupun bentuk-bentuk pengungkapan politik, satu hal yang sama sekali berbeda dari gelombang propaganda integralis yang mendominasi paro pertama era 1980-an. Salah satu cara aspirasi ini diungkapkan

adalah melalui kecenderungan yang semakin tumbuh di kalangan mereka yang berada di luar politik—khususnya para petani dan pekerja, juga para aktivis lingkungan dan hak asasi manusia yang berbasis di kota—untuk memprotes pengabaian mereka di dalam kerangka korporatis Orde Baru. Demonstrasi-demonstrasi menentang penggusuran penduduk menyusul pembangunan waduk Kedung Ombo mungkin adalah ungkapan yang paling penting dari gelombang pasang yang tengah naik ini. Namun, ada juga wujūd-wujud lainnya, termasuk kecenderungan badan-badan yang tidak korporatis, seperti SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) yang dipimpin oleh Muchtar Pakpahan (Mei 1992) dan, sesudahnya, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), untuk muncul dalam upaya memperoleh perwakilan. Salah seorang partisipan akrab kehidupan politik ini bahkan tiba pada pandangan bahwa "proses demokratisasi yang konsisten namun sangat bertahap sekarang tengah berlangsung."[17]

Oposisi Wahid terhadap ICMI—serta apa yang ia duga diwakilinya—mengkristal dalam pembentukan Forum Demokrasi pada April 1991, sebuah asosiasi yang terorganisasi secara tidak formal dan terdiri atas sekitar 40-an orang intelektual Indonesia, yang jelas dibentuk sebagai tanggapan atas ICMI serta didesain untuk memberikan kepemimpinan serta bobot intelektual (namun yang bukan berarti aktivisme itu sendiri) dalam perjuangan bagi masyarakat yang lebih terbuka, toleran, serta inklusif. Agenda Wahid dilanjutkan dengan pernyataan lebih jauh dalam bentuk rapat akbar NU yang ia selenggarakan di Jakarta pada Maret 1992 (meski ada upaya-upaya dari pasukan keamanan untuk memperkecil jumlah yang akan hadir) yang bertujuan mendongkrak mandatnya sebagai pemimpin NU dan menunjukkan pemahamannya, dengan tepat diungkapkan lewat istilah Pancasilaisme Orde Baru, akan toleransi sekuler Islam.

Wahid sendiri tidak bersedia menambahkan dukungan bagi pencalonan Suharto untuk keenam kalinya pada 1993. Ini sudah tentu tidak banyak artinya bagi Suharto yang kejengkelannya

terhadap Wahid tampak jelas dalam upaya-upaya pemerintah menentang kegiatan-kegiatan forum tersebut berikut rencana-rencana Wahid untuk menyelenggarakan layanan perbankan pedesaan bekerjasama dengan Bank Summa, serta dengan tidak diikutsertakannya Wahid dalam keanggotaan MPR 1993-1998. Suharto pun terus melenggang dengan anggun, dan dengan gaya orang yang sudah lama terbiasa dengan penghormatan yang datang dari keberhasilan yang sempurna, menuju terpilihnya dirinya pada 1993 sebagai presiden untuk keenam kalinya.[18]

Namun, jika ditinjau kembali, keputusan Suharto menerima satu masa jabatan lagi adalah langkah pasti menuju kehancurannya. Meski ada pandangan-pandangan yang mengemukakan sebaliknya—Wahid, misalnya, sebelumnya telah mengungkapkan pendapat bahwa "suksesi kepresidenan akan terjadi mungkin pada 1995, tapi bila tidak pada 1995, maka pada 1998"[19]—keputusannya menjadi pertanda bagi semua bahwa, meski kesehatannya sudah tidak seimbang, ia tidak akan bersedia mundur, bahwa ia akhirnya tiba pada identifikasi sempurna tentang betapa penting peran politiknya bagi kesehatan dan keselamatan bangsa.

Keputusan Suharto ini, atau lebih tepatnya lagi jalan-jalan politik baru yang telah ia tapaki untuk sampai pada keputusan itu, membuka celah pertama dalam bangunan kekompakan yang ia bangun dengan hati-hati di seputar dirinya, dan memberi keberanian pada beberapa lawan kecil untuk meresmikan oposisi mereka terhadap kekuasaan abadinya. Tugasnya, setelah meninggalkan strategi penindasan manunggal yang disponsori tentara guna menopang dirinya, adalah untuk membentuk konsensus. Kejatuhan Suharto diakibatkan oleh kegagalannya sendiri untuk mengejar jalan itu dengan keyakinan, karena ia sendiri mungkin tidak memiliki peran dominan di dalamnya. Sejalan dengan ini, ia menjauhkan diri dari jurang deregulasi perekonomian yang dikendalikan pasar, yang sudah tentu tidak akan memberikan sarana-sarana untuk mempertahankan dan memperluas peran khasnya sebagai penyalur patronase.

TERJERUMUS

Tanda-tanda amat serius pertama akan kehancuran akhir rezim Suharto mungkin menjadi semakin jelas dengan pemilihan kembali dirinya sebagai presiden—disertai, dan yang cukup menentukan, oleh serangkaian Garis-garis Besar Haluan Negara yang memperkuat kembali pemikiran integralis—serta pembentukan kabinet 1993-nya menyusul kurang berhasilnya pemilihan umum setahun sebelumnya, ketika PDI-nya Suryadi dengan gencar berkampanye di atas landasan program pembaruan politik. Kabinet tersebut, meski tetap mempertahankan orang-orang teknokrat untuk tugas-tugas kunci seperti menteri keuangan dan gubernur Bank Indonesia, memalingkan muka dari para teknokrat yang telah menyelamatkan kehidupan politik Suharto di pertengahan dan akhir era 1980-an. Penganugerahan jabatan diberikan kepada para penganut ekonomi nasionalis, di mana yang paling senior dan berpengaruh adalah Habibie.[20] Ginanjar diangkat sebagai ketua Bappenas yang baru. Tak ada aktivis ICMI—mereka yang memiliki program politik muslim yang kental—diikutsertakan; satu hal yang menunjukkan kecurigaan terus-menerus Suharto terhadap potensi politik Islam.

Namun, kejadian yang paling menonjol pada masa ini adalah cara Angkatan Bersenjata mengakali Suharto mengenai pilihan wakil presidennya. Suharto tampaknya menginginkan Habibie mengambil jabatan ini. Namun, ABRI berhasil membatasi kebebasan Suharto dalam memilih dengan mendukung pencalonan panglima ABRI Try Sutrisno pada Februari 1993 sebelum ia mengumumkan niatnya. Suharto pun dibuat kesal karena tidak berdaya menentang langkah tersebut.

Try, yang berada di bawah pengawasan Murdani (dan juga berpendapat bahwa Suharto sebaiknya lengser baik-baik), menjadi semakin tidak senang dengan perlakuan Suharto terhadap militer. Menurut Murdani, "Kita mengambil keputusan lima tahun lalu. Kita memutuskan bahwa setelah Sudharmono dipilih sebagai wakil

presiden pada 1988, ABRI harus memutuskan siapa wakil presiden berikutnya. Jadi kita memutuskan bahwa itu Try."[21] Pada sidang MPR berikutnya untuk memilih presiden dan wakil presiden, proses yang tampak mulus dari luar itu mengukuhkan Try sebagai penerima jabatan wakil presiden, dengan satu-satunya pertanda keributan adalah upaya PDI, yang dihentikan oleh Ketua MPR Wahono, untuk memperjuangkan pembaruan atas proses-proses pemilihan umum. Sanksi terhadap ABRI adalah penggerogotan yang cukup berarti atas pengaruh mereka dalam kabinet. Try juga harus menjalani masa lima tahun 'menganggur' dengan tidak digubris oleh Suharto.

Baik pada penunjukkan anggota kabinetnya serta kemudian pada kongres Golkar yang dikoordinasi Habibie pada Oktober 1993, Suharto dengan tegas berpaling menjauhi ABRI; satu hal yang sangat membuat para jenderal menyesal, bahkan marah. Suharto bukan asal saja merangkul orang-orang sipil; ia merangkul orang-orang sipil yang dekat dengannya seperti Habibie dan ketua umum Golkar yang baru, Harmoko—orang sipil pertama yang memegang jabatan ini, di mana keberhasilan yang diraihnya adalah berkat negosiasi personal Suharto di hadapan pengaruh dan oposisi marah Angkatan Darat—juga mendorong ambisi-ambisi politik yang baru tumbuh dari anak-anaknya (Bambang menduduki jabatan sebagai bendahara Golkar, sementara Tutut mendapatkan salah satu dari delapan posisi wakil ketua; keduanya sudah menduduki kursi lewat pengangkatan di MPR).[22] Langkah-langkah ini, serta sikap keras kepala yang ditunjukkannya, tampaknya menjadi pertanda adanya semacam pembekuan dalam keluwesan politik Suharto yang tersohor itu. Pada kongres Golkar tersebut, meski ada pengaruh kuat ABRI di kalangan delegasi, ketua Golkar Wahono, rekan lamanya, dilewati pencalonannya untuk masa jabatan baru, tampaknya sebagai sanksi atas kinerja pemilihan umum yang mengecewakan di mana Suharto menganggapnya bertanggung jawab secara pribadi. Menurut sebuah laporan, Suharto mengecam kinerja Wahono karena "Golkar tidak berhasil me-

menuhi tuntutan rakyat bagi demokrasi yang lebih besar, penghormatan yang lebih baik terhadap hak asasi manusia, keadilan sosial, serta perlindungan lingkungan .. [Golkar] tidak memiliki inisiatif untuk menebarkan program-program pemerintah di bidang-bidang pembaruan administratif serta perbaikan layanan masyarakat."[23] Wahono merupakan salah satu dari orang-orang terakhir klik Suharto yang kehilangan kebaikan hati majikannya.

Suharto sudah memutuskan bahwa masa depan politik Indonesia bukan tergantung pada dukungan ABRI. Ia mengesampingkan substansi politik serta sumbangan ABRI terhadap kekuasaannya dan, selain itu, curiga dengan kesetiaan sejati mereka. Menurutnya, masa depan politik bergantung pada wahana politik Golkar—namun, bukan Golkar yang sudah direformasi dan terbuka, melainkan Golkar yang dikendalikan oleh orang-orang yang dekat dengannya serta yang menawarkan kesetiaan tanpa batas kepadanya. Suharto dengan demikian telah memotong peluang yang tampaknya telah ia upayakan selama akhir era 1980-an untuk membangun wahana baru yang lebih populis untuk aspirasi-aspirasi politiknya. Setelah itu, nuansa persepsi inklusivitas sosial tidak ada lagi, demikian pula tunas-tunas harapan yang ada sebelumnya tentang peredupan fokus kekuasaan kepresidenan demi terciptanya sistem yang lebih pluralis.

Upaya-upaya Suharto dalam mempertahankan kendali atas ABRI pada saat itu berbentuk kepentingan pribadi yang semakin meningkat dalam hal-hal kecil yang berkaitan dengan promosi jabatan dan penempatan, pengurangan penempatan-penempatan kekaryaan para perwira dalam jabatan-jabatan gubernur dan duta besar,[24]dan terutama, dalam pengangkatan mereka yang selama ini dekat dengannya ke promosi yang dipercepat serta posisi yang tinggi. Sebagai pemenang terbesar dalam proses ini adalah menantunya, Prabowo Subianto yang sangat ambisius itu, yang naik dari posisi komandan batalion Kostrad Timor Timur pada akhir era 1980-an ke posisi penting yang strategis di Kopassus serta pangkat kolonel penuh pada 1992—yang ia gunakan, antara lain,

untuk meneruskan pendekatan militer garis-keras terhadap gerakan kemerdekaan Timor Timur.

Sebagai tanggapan atas perkembangan-perkembangan ini, dalam bentuk kebangkitan kembali kebijakan keterbukaan yang singkat dan sesaat pada paro kedua 1993, tanda-tanda pembangkangan sipil yang gejalanya tidak terlihat selama lebih dari satu dasawarsa mulai muncul. Sebuah gelombang protes mahasiswa dan kelompok-kelompok muslim menjelang akhir 1993 menghasilkan desakan bagi pemerintah untuk meninggalkan dukungannya terhadap lotere yang dikelola pemerintah. Keberhasilan protes-protes ini menaikkan batas-batas harapan yang mungkin dapat diraih, bahkan ada suara-suara yang menyerukan diselenggarakannya sidang istimewa MPR untuk menuntut pertanggungan jawab kepemimpinan Suharto—sesuatu yang tidak mungkin terjadi kalau melihat bahwa MPR sudah secara aklamasi memilihnya pada Maret. Kira-kira di saat yang sama, upaya-upaya untuk mendudukkan pemimpin baru yang jinak bagi PDI—Suryadi tampaknya keterusan melangkah dan mengundang kemarahan Suharto karena mengecam kinerja pemerintah serta menyerukan pembatasan atas masa jabatan kepresidenan menjelang pemilihan umum 1992—menghadapi masalah pada kongres PDI pada akhir 1993. Peran dukungan militer bagi Megawati, diduga oleh para rekan Murdani yang jengkel atas terpilihnya Harmoko sebagai ketua Golkar (terutama komandan divisi militer Jakarta dan mantan agen intelijen Hendropriyono), memungkinkan Megawati meraih kursi ketua umum.

Sementara itu, rakyat di Kalimantan Tengah menolak menerima gubernur baru titipan pusat, dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia tidak memilih calon favorit Suharto sebagai ketua barunya. Pada awal 1994, *Primadosa*, sebuah buku yang lancang dan sangat kritis terhadap apa yang disebut sebagai 'imperium Suharto', muncul dan, setelah mengundang kecaman balik dari Suharto, dengan cepat dilarang oleh Jaksa Agung Singgih karena potensinya untuk 'membingungkan rakyat'.[25] Dan sejumlah anggota

ABRI di DPR, terutama Mayjen. Sembiring, yang berani menunjukkan ketidakpuasan mereka atas apa yang terkesan sebagai ketidakpedulian Suharto pada pentingnya peran ABRI, kehilangan kursi-kursi parlemen mereka pada awal 1994.

Tanda-tanda ini merupakan wujud-wujud memalukan dari persepsi yang belum lengkap bahwa negeri ini membutuhkan perubahan arah yang mendasar guna mengakomodasi tuntutan-tuntutan masyarakat baru, serta bahwa kepemimpinan Suharto tidak bisa diharapkan akan dapat memberikan program yang realistis bagi perubahan. Menurut seorang pengamat, "kalangan atas masyarakat Indonesia semakin jenuh dengan gaya paternalistik negara," dan lagi, "setelah mencapai tingkat pembangunan dan stabilitas sosial tertentu, banyak warga Indonesia haus akan rangsangan politik."[26] Namun, belum ada kesan bahwa Suharto harus dengan cepat diusir dari arena—yang, bagaimanapun juga, praktis tidak mungkin, dan kemungkinan besar akan memicu ketidakstabilan-ketidakstabilan, serta tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Tapi, ini tetap berarti bahwa *timing* suksesinya, serta siapa orang yang mungkin akan menggantikannya, menjadi masalah perdebatan yang semakin mendesak, bahkan pendelegasian yang makin kerap atas pelaksanaan wewenangnya diperkirakan akan terjadi.

Pada awal 1994, Suharto sendiri memberi komentar positif—yang jarang ia lakukan—kepada seorang presiden universitas Amerika, Donald W. Wilson: "Orang-orang mengatakan saya tak suka membicarakan masalah suksesi. Ini tidak benar. Saya bukan presiden seumur hidup. Rakyat telah memilih saya, dan merekalah yang memutuskan berapa lama saya harus memegang jabatan itu."[27] Pernyataan ini tampaknya menegaskan bahwa Suharto tidak berniat mundur sebelum masa jabatan lima-tahunnya berakhir pada 1998.

Kegugupan pemerintah yang semakin kentara terhadap oposisi yang semakin terasa mulai jelas terfokus pada upaya-upaya, pada 1994, untuk menghalangi Wahid memperoleh perpanjangan masa jabatan atas posisi kepemimpinannya yang berpengaruh dalam

Nahdlatul Ulama, serta upaya-upaya yang lebih nyata dalam melumpuhkan kemampuan Megawati Sukarnoputri yang semakin tumbuh—dan semakin dipandang oleh Suharto sebagai ancaman politik yang nyata bagi Golkar yang semakin loyo—dalam menarik suara dari kalangan pemilih yang lebih muda.

HILANGNYA SENTUHAN AMPUH SUHARTO

Suharto pada saat itu tengah berjuang untuk mencapai kesepakatan dengan kekuatan-kekuatan baru yang bangkit ini. Satu upayanya dalam melakukan hal itu adalah keputusannya pada 1993 untuk mendirikan Komisi Nasional Hak-hak Asasi Manusia. Namun, keputusannya ini hanya bersifat defensif; keputusan yang bukan didorong oleh kesadarannya bahwa perlindungan hak-hak asasi manusia adalah prioritas penting bagi pemerintahannya, melainkan semata-mata—dengan mengalah pada desakan kementerian luar negerinya—demi menggunakan lembaga tersebut untuk menepis kecaman internasional yang semakin gencar atas catatan hak-hak asasi manusia pemerintahannya, terutama setelah pembantaian di kuburan Santa Cruz di Dili.

Masa yang disebut "keterbukaan" ini—sudah pernah terancam pada akhir 1993 karena Suharto membandingkan taktik-taktik para pembaru prodemokrasi ini dengan PKI yang sudah lama dilarang itu selain karena gelombang penahanan para mahasiswa dan aktivis muslim (yang sebagian dikenai dakwaan pidana menghina pribadi presiden)—secara resmi berakhir pada pertengahan 1994. Tiga majalah, yang paling menonjol adalah *Tempo* yang cukup dihormati itu, dilarang terbit karena laporan mereka mengenai pembelian Habibie—terlepas dari dukungan Suharto dan oposisi pihak militer—atas 39 kapal fregat bekas (ditambah biaya terkait yang besar untuk renovasi serta perbaikannya di galangan kapal) milik angkatan laut Jerman Timur yang sudah dibubarkan itu. Yang membuat Presiden marah adalah cara yang bebas dari pers untuk mengomentari (dan diduga menghasut, menurut dia)[28]

ketidaksepakatan elite penguasa atas pembelian kapal-kapal tersebut, terutama antara Habibie dan Menteri Keuangan Mar'ie Muhammad yang dikenal berbudi dan suka berterus-terang itu—yang tidak bersedia menyetujui dana yang diperlukan. Ini praktis merupakan pembeberan kebobrokan di depan umum; satu hal yang tidak dapat ditolerir oleh Suharto.

Kekuasaan Habibie pada saat itu sudah kokoh berurat-akar, menimbulkan rasa permusuhan di pihak militer yang memandang bahwa bukan saja wilayah mereka sudah dilanggar, namun akses mereka ke arus pendapatan menguntungkan yang ada kaitannya dengan pertahanan juga serius terancam—lewat upaya-upaya gencar Habibie menciptakan bisnis dari sekumpulan "industri strategis" yang dipercayakan Suharto kepadanya. Pengaruh politik Habibie yang semakin tumbuh terbukti dengan adanya peristiwa-peristiwa seperti intervensi Suharto untuk melindungi PT PAL—BUMN pembangunan kapal Habibie—dari kewajiban membayar pajak yang terutang pada 1991, serta keputusan Suharto untuk menepis upaya-upaya Mar'ie Muhammad dalam membatasi pembiayaan yang disediakan untuk Habibie pada akhir 1994, dengan jalan mengalihkan US$185 juta dana negara, yang disisihkan untuk reboisasi, ke proyek-proyek pesawat terbang Habibie.[29]

Akhir dari "keterbukaan" ini merupakan titik-balik dalam sejarah Orde Baru akhir. Hal ini bukan, seperti yang dituduhkan, bukti bahwa "janji-janji Suharto sebelumnya tentang wacana publik yang lebih bebas hanyalah retorika kosong belaka."[30] Sebaliknya, ini menandakan bahwa Suharto—terlepas dari kemampuannya dalam memahami betapa Indonesia yang ia bangun telah berubah dan tumbuh, serta dalam upayanya mengakomodasi diri dengan realitas-realitas baru—tak lagi memiliki kesabaran serta visi maupun kekuasaan politik yang utuh untuk mengelola desakan-desakan perubahan tanpa membiarkan desakan-desakan itu menggulungnya. Selanjutnya, pembatasan serta penindasan yang bengis semakin menjadi semboyan hari-hari kehancuran rezimnya.

Suharto pada saat itu semakin sendiri memerintah. Rekan-rekannya yang bergabung dengannya dalam perjalanan menuju kekuasaan lebih dari tiga dasawarsa sebelumnya—dan yang ego-ego kuatnya sudah diberi peluang ekspresi yang cukup besar—sudah semuanya keluar dari arena. Dan orang-orang seperti mereka (serta pengaruh independen mereka) tidak akan terlihat lagi. Mereka yang sekarang dekat dengannya memperoleh posisi mereka karena bisa dipercaya tidak akan mengajukan keberatan—ataupun mendebat dengan sungguh-sungguh—atas kebijakan-kebijakan dan pendekatan-pendekatan baru yang mengundang kontroversi itu.

Suharto, mungkin seperti yang belum pernah ia alami sebelumnya, menjadi pusat pengambilan keputusan; ia memutuskan yang penting-penting, dan tak ada hal yang berbobot yang bergerak tanpa pengetahuan dan izinnya. Ia diperlakukan dengan kehormatan dan kekaguman yang luar biasa, berikut ketakutan, bahkan oleh mereka yang bekerja dekat dengannya. Tak banyak yang berani melaporkan kritik-kritik atau berita yang mungkin dapat mengundang kilat ketidaksabaran dan kemarahan yang terhadap mana ia menjadi semakin peka. Oleh karena itu, mereka yang dekat dengannya mungkin hanya bersemangat memberitahu ia tentang keniscayaan yang berlanjut bagi keselamatan, keamanan, pembangunan, dan reputasi negerinya.

Keadaan seperti ini praktis tak bisa dihindarkan, membuatnya memiliki rasa percaya diri yang kuat sekali, sehingga hanya dia, dan dia saja, yang memiliki jawaban atas permasalahan Indonesia. Setiap oposisi, atas kehendaknya, berdasarkan definisi, berarti menentang kepentingan negara dan bangsa Indonesia. Penyempitan kelembagaan pemerintahannya sebagai akibat dari langkah-langkah menjauhkan ABRI dari gerbang-gerbang kekuasaan belum diimbangi oleh pemberdayaan lembaga-lembaga politik sipil secara proporsional. Kekuasaan Suharto sekarang bersandar pada landasan-landasan lemah yang hanya ditopang oleh wewenang pribadinya. Ia tahu apa yang tengah dilakukannya; ia menyadari, seperti yang diramalkan dengan tepat oleh Schwarz pada 1994,

"bahwa bila kesetiaan kepadanya mulai mengendur, maka kesetiaan itu akan menguap dengan cepat." [31]

Namun, ketajaman Suharto dalam mengelola dan menyeimbangkan pusaran politik persaingan tumbuh tak begitu meyakinkan. Bila di masa lalu ia berhasil mendorong bawahannya untuk menunjukkan kinerja terbaik dengan membuat mereka aktif bersaing satu sama lain, kecenderungannya saat ini adalah menuntut kesetiaan tanpa batas dari bawahan-bawahannya yang posisi tinggi mereka tergantung pada pilihan serta ciptaannya sendiri.

Feisal Tanjung, yang sejak lama dekat dengan Habibie dan diangkat sebagai panglima ABRI pada Mei 1993, adalah contoh orang ciptaan Suharto yang berupaya menyenangkan pemimpinnya—dan memajukan serta memperpanjang kariernya sendiri—bukan menggalakkan kepentingan lembaga yang ia pimpin, yang semakin bertambah melarat karena tidak memperoleh akses ke pendanaan nonbujeter, ditambah lagi dengan minimnya sumbangan pemerintah.

Angkatan Darat semakin lama terpecah menjadi faksi-faksi antara kelompok nasionalis yang lebih tua, yang berhimpun secara longgar seputar Murdani (yang saat itu berkantor di gedung besar CSIS, sebelumnya diisi oleh Ali Murtopo, serta memiliki hubungan dekat dengan Wahid), dan faksi 'hijau' baru yang secara tidak resmi berada di bawah pengaruh Prabowo serta yang dibuat berkuasa oleh Suharto, dan yang diberi julukan 'hijau' karena afiliasi dekatnya dengan para tokoh modernis Islam. Gara-gara rotasi perwira yang cepat melalui komando-komando wilayah dan komando sentral, ABRI juga semakin kehilangan landasan politisnya.

Banyak dari mereka yang ada dalam lingkaran-dalam Suharto—orang-orang seperti Suyono, Wiranto, dan Subagyo Hadi Siswoyo—sangat memahami posisi mereka serta membuktikan kesetiaan mereka lewat tugas-tugas sebelumnya sebagai ajudan atau pengawal pribadi. Kepercayaan profesional yang sebelumnya ia limpahkan pada, serta tanggung jawab yang sebelumnya ia tanamkan pada,

mereka yang dekat dengan dirinya seperti Murtopo dan Murdani juga menyurut dengan cepat; ia mengharuskan, misalnya, promosi-promosi dan pengangkatan-pengangkatan ABRI, bahkan di tingkat junior, memperoleh persetujuan pribadinya.

Mereka yang tidak membaca tanda-tanda zaman, seperti Ridwan Fataruddin, direktur perusahaan penerbangan dalam negeri Merpati (yang tidak menanggapi usul untuk menyewa enam belas pesawat yang diproduksi IPTN dari perusahaan *leasing* yang dimiliki Tommy), akhirnya kehilangan posisi mereka. Sisa-sisa kekuasaan Murdani, terutama Bais atau badan intelijen yang dulunya kuat, yang mengecam Suharto dengan memanipulasi informasi serta pernah berupaya mencemarkan Sudharmono dengan jalan menghidupkan sensitivitas anti-PKI, diturunkan menjadi BIA (Badan Intelijen Angkatan Bersenjata) dengan tugas rutin yang biasa-biasa dan membosankan. Pengaruh-pengaruh politik Angkatan Bersenjata pun semakin tergerogoti saja.

Anak perempuan sulung Suharto, Tutut, memperkuat menipisnya keanggotaan kelompok dalam dengan menjadi semacam pelindung dan juru bicara. Sifat lekas-marah dan tidak-sabar Suharto yang semakin menguat, serta bakatnya sebagai pendengar—selain gayanya yang angkuh—yang semakin menyurut, tidaklah dibuat-buat, demikian juga senyumnya yang tersohor untuk menaklukkan dengan menggunakan daya tarik pribadi. Mantan menteri lingkungan Sarwono Kusumaatmaja mengeluhkan bahwa "Anda malah tidak bisa melakukan percakapan dengan Suharto lagi. Ia hanya memberi kuliah tentang segala yang ada di bumi ini. Ia tahu semuanya."[32] Kepekaannya terhadap kecaman pribadi juga telah mencapai tahap-tahap baru yang lebih tinggi. Ketika menghadapi sebuah demonstrasi di Dresden (pesertanya termasuk anggota DPR yang vokal, Sri Bintang Pamungkas), ia menyebut para pesertanya "tidak waras dan tidak lagi rasional."[33]

Hitungan-hitungan politik yang mandeg dan mengeras di pusat kekuasaan semakin memudahkan Angkatan Bersenjata untuk melanjutkan dan bahkan memperkuat pendekatan keamanan mere-

ka atas masalah-masalah perbedaan pendapat di dalam negeri. Dengan demikian, borok-borok di Timor Timur, di Irian Jaya, provinsi kaya namun penduduknya semakin dimiskinkan itu, dan di Aceh—walau ada laporan-laporan yang muncul tentang pelanggaran-pelanggaran yang sistematis dan besar-besaran dari tentara, termasuk pembunuhan massal—semuanya dihadapi dengan penggencaran tanggapan fisik yang sama bandelnya.

Permasalahan di Timor Timur semakin diperburuk, di mata Suharto, oleh hadiah Nobel Perdamaian yang diberikan pada 1996 kepada Uskup Carlos Filipe Ximenes Belo, pemimpin Gereja Katolik Timor Timur, serta Jose Ramos Horta, lawan—yang fasih, memikat, dan tak kenal lelah itu—pemerintah pendudukan Indonesia, dan setelah itu oleh upaya-upaya Nelson Mandela dalam memperjuangkan pembebasan Xanana Gusmao.

Tanggapan terhadap pengecualian politis di dalam negeri ditandai oleh ciri serupa. Para wartawan dipenjarakan (berdasarkan peraturan "penyebaran kebencian—yang diberlakukan Belanda untuk membatasi gerakan nasionalis dulu) sebagai tanggapan atas upaya-upaya mereka mengonsolidasikan perhimpunan profesional yang independen. Aktivis serikat buruh Muchtar Pakpahan, ketua SBSI yang di luar hukum, menerima hukuman penjara tiga tahun atas tuduhan menghasut kerusuhan pekerja di Medan pada 1994. Setahun sebelumnya di Sidoarjo, Jawa Timur, seorang aktivis buruh perempuan muda bernama Marsinah dibunuh dengan cara-cara yang secara kuat menunjukkan keterlibatan pasukan keamanan. Kegelisahan serta ketidakpastian yang ditampakkan ini membuat munculnya tanda-tanda pertama sekitar 1995 tentang pergerakan modal orang-orang Indonesia keturunan Cina meninggalkan negeri ke lingkungan yang lebih aman di Singapura.

50 TAHUN INDONESIA MERDEKA

Kebekuan politik Indonesia ditunjukkan oleh pidato Suharto pada 1995 yang menandai perayaan 50 tahun Indonesia merdeka. Meski

negerinya mencatat kemajuan-kemajuan ekonomi yang luar biasa, yang ia kemukakan secara panjanglebar, pidatonya masih mengesankan perjuangan-perjuangan berat masa mendatang:

> Marilah kita perkuat segala sesuatu yang telah baik, marilah kita perbaiki yang belum baik, marilah kita koreksi apa yang keliru ... Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, kita akan menjadi bagian dari zaman baru umat manusia itu. Tidak bisa lain, kita harus menyiapkan diri sebaik-baiknya dari sekarang. Jika kita tidak siap, maka kita akan ditinggal dan makin tertinggal jauh oleh kemajuan zaman.

Sejauh yang terkait dengan rangsangan politik, ia hanya bisa menggunakan korporatisme kuat yang dibangunnya di era 1980-an. "Akhirnya," ujarnya, "kita telah sepakat bahwa Pancasila adalah satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara." Menelusuri kembali kecaman-kecaman yang sudah akrab tentang orde sebelum 1966, dia berpendapat bahwa periode demokrasi parlementer secara inheren tidak stabil dan "tidak mendukung iklim pembangunan untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat," sementara "zaman 'jor-joran revolusioner' yang memang didorong-dorong oleh PKI jelas membawa suasana saling curiga dan perpecahan, ketegangan dan ketidakstabilan, kemerosotan ekonomi dan menjauhkan rakyat dari kesejahteraan."[34]

Pendaur-ulangan gagasan-gagasan dan pernyataan-pernyataan basi ini tidak menawarkan visi baru maupun pelipur lara. Mungkin untuk menyuap pendapat umum serta lawan-lawan politiknya, Suharto pada 1995 memberikan tugas kepada LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) yang dibiayai pemerintah itu untuk menyelidiki sistem-sistem alternatif penyelenggaraan pemilihan umum, serta meneliti peran sosial-politik ABRI. Namun kemudian, ia sama sekali tidak menggubris laporan-laporan yang telah dirampungkan itu.

KEPENTINGAN KELUARGA

Menyempitnya basis rezim itu berjalan bersamaan dengan menguatnya peng-anak-emas-an keluarga serta perkoncoan. Merebaknya perburuan pungutan dan komisi skala besar-besaran yang menandai dasawarsa terakhir atau lebih dari Orde Baru adalah fungsi pemikiran serupa yang membuat Suharto dapat menepis kecaman-kecaman dari orang seperti Suryo pada awal era 1970-an. Menurut salah seorang wartawan, "Suharto benar-benar melihat anak-anaknya sebagai alat-alat yang tepat bagi kebijakan pembangunannya."[35] Ini bukanlah korupsi baginya melainkan, dalam arti harfiahnya, bisnis pembangunan. "Tak ada masalah," komentarnya pada awal 1998, "bila perusahaan-perusahaan (anak-anaknya) berguna bagi rakyat Indonesia."[36] Juga ada unsur pribadi yang ikut berperan. Suharto ingin memastikan, seandainya ia mengundurkan diri secara mendadak dari arena politik, anak-anaknya terbekali dengan cukup sehingga mereka kelak tidak dapat dilepaskan dari peran mereka pada puncak-puncak perekonomian Indonesia. Seorang pengamat menyatakan bahwa salah satu penyelenggaraan pungutan yang secara khusus sangat mencolok itu "tak lain dimaksudkan sebagai asuransi pensiun yang sangat menguntungkan bagi Tommy."[37]

Di antara persekongkolan ciptaan anak-anaknya dan yang disetujui oleh ayahanda mereka serta paling santer dipergunjingkan adalah bisnis cengkeh Tommy. Sederhananya, Tommy—yang pada usia yang sama penampilannya mirip sekali dengan ayahnya—diizinkan, dengan bantuan suntikan dana negara, memosisikan dirinya sebagai pialang monopoli antara para petani cengkeh dan industri rokok kretek. Tommy menjanjikan akan memberikan harga yang lebih tinggi kepada para petani cengkeh, namun pada kenyataannya, campur-tangannya malah hanya mengacaukan industri tersebut. Kegiatan-kegiatan ini hanya merupakan bagian dari imperium Humpuss yang lebih besar, yang bergerak di bidang angkutan laut dan udara, petrokimia, minyak, jalan tol, perbankan, properti, komunikasi, serta produksi mobil mewah—Tommy mem-

beli perusahaan mobil Lamborghini Italia pada November 1993—yang keseluruhannya dibiayai oleh transaksi-transaksi khusus, dan sering kali bermitra dengan konco-konco Suharto seperti 'Bob' Hasan yang memberinya hak-hak monopoli atas sumber-sumber daya dan jasa tanpa perlu berbuat apa-apa.

Pada 1994, kelompok Bimantara-nya Bambang menerima, tanpa membayar apa pun, lisensi untuk berbagai penyelenggaraan sambungan langsung internasional bersama-sama dengan BUMN PT Indosat. Setelah itu, Bambang mengundang tender untuk andil dalam anak perusahaan telekomunikasi Bimantara, Satelindo, yang untuk seperempat andilnya, perusahaan Jerman Deutsche Telekom dikabarkan membayar lebih dari US$0,5 miliar. Atas instruksi Suharto, pemerintah juga memberi perlakuan bea masuk istimewa bagi proyek petrokimia yang bermasalah, Chandra Asri, di mana Bambang ikut serta bersama dengan pemilik konsesi perkayuan Prayogo Pangestu dan Henry Pribadi (Lin Yuhao, masih ada hubungan keluarga dengan mitra bisnis lama Liem Siu Liong, Johar Sutanto/Liem Un Kian). Proyek tersebut juga memperoleh akses mudah ke pinjaman-pinjaman besar.

Cucu Suharto, Ari Sigit, berhasil menggunakan pengaruhnya dalam transaksi di mana ia diberi hak monopoli untuk memungut pajak setempat, yang kemudian ia tambah dengan kutipannya yang besar, atas bir-bir yang dijual di Bali (Suharto kemudian menghentikan hak monopoli ini setelah muncul tuntutan-tuntutan yang memprotesnya), selain mencetuskan persekongkolan untuk memaksa anak-anak sekolah membeli sepatu merek tertentu (yang mahal harganya) yang mana salah satu perusahaannya adalah pemasok tunggalnya. [38]

Mungkin contoh yang paling keji dari kebusukan yang merasuk ini adalah hikayat—karena memang demikian halnya—mobil nasional Timor. Keinginan Suharto pada industri mobil nasional sesuai dengan preferensinya yang konsisten pada pembangunan yang dibiayai negara—bahwa Indonesia akan menunjukkan kedewasaan sosial dan industrinya dengan mengembangkan

mobilnya sendiri. Namun, satu masalah kuncinya adalah identitas perusahaan yang akan melaksanakan proyek tersebut. Pertarungan sengit pun berlangsung antara para calon mitra bisnis pemerintah ini yang dipimpin, masing-masing, oleh Tommy dan Bambang. Pada akhirnya Suharto memutuskan, pada awal 1996, bahwa kontrak mobil akan jatuh pada Tommy, anak laki-laki bungsu serta yang paling disayanginya itu. (Malah ada rumor bahwa Ibu Tien mendukung keputusan Suharto, serta bahwa heboh keluarga atas kontrak tersebut telah menimbulkan tekanan yang sedemikian rupa yang berakibat pada serangan jantung fatal atas Ibu Tien).

Proyek mobil nasional ini tak lain dan tak bukan adalah izin untuk mencetak uang. Pada pertengahan tahun, Suharto memutuskan bahwa, berdasarkan ketentuan-ketentuan perjanjian dengan Kia Car Co. dari Korea Selatan, mobil-mobil Timor akan dirakit di Korea dan diimpor tanpa membayar bea masuk atau pajak barang mewah, yang akan memungkinkan mobil nasional itu memasang harga yang jauh lebih rendah dari harga-harga yang ditawarkan para pesaingnya. Tommy diizinkan untuk menunda janji perampungan pabrik perakitannya di Indonesia.

Sementara itu, Suharto tampak dibuat bergeming oleh heboh yang ditimbulkan keputusannya tersebut, meski upayanya untuk memperoleh sebagian besar pembiayaan negara untuk proyek tersebut dikabarkan mengundang kemarahan Mar'ie Muhammad—serta berujung pada pembicaraan panas dalam kabinet di mana Suharto, dengan memukul meja, memerintahkan Mar'ie untuk mencari dana yang diperlukan. Keberatan yang diajukan oleh Menteri Perdagangan S.B. Yudhoyono—bahwa pengaturan-pengaturan khusus itu melanggar kewajiban-kewajiban WTO (World Trade Organisation)—hanya berujung pada pemberhentiannya—contoh pertama dalam sejarah Orde Baru tentang pemberhentian menteri yang tengah menjabat.

Persekongkolan-persekongkolan seperti ini adalah bagian dari gambaran umum kemajuan ekonomi luar biasa anak-anak Suharto selama era 1990-an. Dengan nyaris tidak pernah membebankan

risiko pada penyertaan modal mereka—bank-bank pemerintah dapat diandalkan dalam memberikan pinjaman murah atau gratis kepada mereka yang memperoleh kemurahan hati politik—serta dengan tega dan tanpa ampun memanfaatkan kedekatan tak tersaingi mereka dengan pusat kekuasaan, anak-anak Suharto membawa perilaku berburu-pungutan ini ke tingkat yang lebih tinggi lagi, dengan khusus memanfaatkan kecenderungan Indonesia ke arah "swastanisasi" BUMN, yang menderaskan kekayaan yang tak pernah terbayangkan bagi mereka.

Sementara itu, Suharto tetap saja tak terusik dengan perkembangan-perkembangan ini, dan biasanya marah terhadap serangan-serangan dan gerutuan, baik di kalangan sipil maupun Angkatan Bersenjata, terhadap penganakemasan-nya ini. Bahwa keberhasilan bisnis anak-anak Suharto itu bergantung sepenuhnya pada ayah mereka jelas tampak pada pertengahan 1996 ketika muncul berita yang tidak dikelola dengan baik bahwa Suharto sedang dalam perjalanan menuju Jerman untuk serangkaian tes medis pada sebuah klinik di Hanover (yang menemukan adanya batu ginjal, namun menyatakan bahwa untuk orang seusianya, secara umum kesehatan Suharto dalam kondisi baik). Tak ayal, harga saham kelompok Bimantara milik Bambang yang sudah terdaftar di bursa itu merosot hampir 9 persen dalam tempo dua hari, sementara saham perusahaan jalan tol Tutut, CMNP turun 3,5 persen.

Para konco bisnis yang dekat dengan Suharto juga menikmati sumbangan patrimonialismenya yang kerap membuat jengkel para pengusaha pribumi (termasuk saudara tirinya, Probosutejo) yang banyak tergabung di Kadin, Kamar Dagang dan Industri, dan yang berupaya membatasi pertumbuhan cepat konglomerasi-konglomerasi milik orang-orang Indonesia keturunan Cina beserta pengaruh para teknokrat yang menurut mereka ikut menggalakkannya. Pada 1991, misalnya, keambrukan dan likuidasi Bank Summa milik kelompok Astra, di bawah pimpinan anak laki-laki William Suryajaya, Edward, membuat kelompok Astra—yang sejak lama dipandang sebagai perusahaan yang paling baik pengelo-

laannya di Indonesia itu, yang secara khusus juga tidak begitu dekat dengan istana—direstrukturisasi; porsi-porsi besar sahamnya jatuh ke tangan-tangan Prayogo Pangestu, Liem Siu Liong, dan Eka Cipta Wijaya (Ui Ek Chong). Pabrik Bogasari Liem pun saat itu mendominasi sepenuhnya industri tepung dalam negeri; 'Bob' Hasan dan Prayogo Pangestu menjadi raja kayu dengan membayar sewa yang sangat rendah untuk penguasaan mereka atas sumber daya alam nasional. Namun, sudah tentu ada harga yang mesti dibayar oleh mereka.

Permasalahan Bank Duta, yang tiga perempat sahamnya dimiliki oleh yayasan-yayasan yang diketuai oleh Suharto dan yang menderita kerugian sebesar US$420 juta dalam perdagangan valuta asing yang ceroboh pada akhir 1990, diselesaikan dengan suntikan dana tunai sebesar masing-masing US$200 juta dari Prayogo Pangestu dan Lem Siu Liong. Imbalan bagi mereka adalah andil bagi masing-masing dalam sejumlah proyek-proyek besar yang semula diciptakan oleh Ginanjar untuk membantu pengusaha pribumi, selain bentuk-bentuk bantuan bisnis lainnya.[39]

Puncak dari dagelan yang tidak lucu ini masih belum habis. Pada 1996, muncul berita-berita tentang penemuan emas yang luar biasa besarnya di Busang, Kalimantan. Bulan-bulan berikutnya menjadi saksi terjadinya perlombaan—di kalangan keluarga Suharto, yayasan-yayasan, dan para konconya, terutama "Bob" Hasan—yang tak sedap dipandang mata memperebutkan saham demam emas ini, hingga akhirnya terungkap pada 1997 bahwa "temuan" itu merupakan penipuan berskala raksasa. Sementara itu, upaya-upaya para penasehat ekonomi dan pejabat untuk menggalakkan kebijakan-kebijakan deregulasi semakin sengaja tidak didengarkan oleh Suharto.

Meski kegiatan berburu-pungutan semakin gencar dilakukan oleh keluarga dan konco Suharto, khususnya setelah 1993 ketika para teknokrat mulai mundur sebelum gerak maju para "teknologis", perekenomian tampak masih memiliki tenaga selama pertengahan era 1990-an. Pada 1993, ekspor garmen dan tekstil tercatat lebih

dari 40 kali lipat angka pada 1980. Kebutuhan akan listrik untuk memenuhi keperluan produksi ekspor nonminyak tumbuh 17 persen pertahunnya. Paket deregulasi yang radikal, yang sangat menguntungkan bagi investasi asing, diberlakukan pada pertengahan 1994 dan ikut berperan dalam meningkatkan aliran investasi luar negeri yang cukup besar, dengan keseluruhan investasi yang disetujui pada periode pertengahan Juni hingga akhir Juli tercatat lebih besar dari total sepanjang tahun sebelumnya (1993).

Membaiknya harga minyak serta arus kuat investasi dalam negeri menambah gambaran perekonomian yang diliputi mendung semata karena semakin merisaukannya (setidaknya bagi para teknokrat) regulasi perbankan serta masalah utang luar negeri; industri perbankan, baik swasta maupun pemerintah, mulai terkulai menanggung merebaknya kredit macet yang kadang-kadang terkait dengan para konconya itu pula, dan tentu saja, perkoncoan yang semakin merajalela itu hanya bisa dikendalikan bila para pelakunya—seperti Eddy Tansil (Tan Cu Fuan) yang divonis pada 1994 dengan hukuman 20 tahun penjara setelah mengalihkan dana demi keuntungan pribadinya sebesar US$420 juta yang sedianya untuk pembangunan pabrik petrokimia—bertindak jauh melampaui batas-batas yang dapat ditolerir secara politis.

Setiap pembahasan tentang korupsi anak-anak dan konco-konco Suharto tidak akan lengkap tanpa menyebut topik kekayaan Suharto sendiri. Beberapa pengamat membesar-besarkan estimasi kekayaannya: "Suharto bukan saja kaya; ia bisa ditempatkan di antara orang-orang super kaya dunia."[40] Entah mana yang benar dari pernyataan-pernyataan ini—dan yang biasanya berlebihan dalam mengestimasi nilai sebenarnya kekayaan keluarga Suharto yang sebagian besar didasarkan pada perburuan-pungutan yang terorganisasi secara politis itu—estimasi ini sering mengabaikan kenyataan bahwa Suharto pribadi bukanlah orang yang tamak, dan menggambarkannya dengan cara seperti ini berarti tak memahami makna penting korupsinya yang tidak diragukan lagi berskala sangat besar itu.[41] Suharto tidaklah berminat pada uang demi

uang itu sendiri, juga tidak dalam hal apa yang bisa diperolehnya dalam arti material. Ia tinggal di rumah yang nyaman, namun bukan rumah yang terkesan pamer kemewahan; rumah-rumah yang secara pelan-pelan ia koleksi seputar Jl. Cendana itu semuanya terlihat agak tidak rapi dan ketinggalan zaman. Suharto berminat pada uang karena itu merupakan sumber kekuatannya dalam mempertahankan kekuasaan dan membawa Indonesia ke arah yang ia inginkan.

Kunci dari strategi-strategi penghimpunan dana Suharto adalah alat tradisional yang tak lain adalah yayasan itu sendiri yang, meski sesekali ada upaya untuk memeriksanya, tetap saja berekspansi.[42] Pada 1996, Suharto mengumumkan satu lagi persekongkolan berbasis yayasan, di mana para pembayar pajak yang lebih mampu "didorong" untuk menyumbangkan dua persen pendapatan mereka setelah dipotong pajak kepada Dana Sejahtera Mandiri; hal tersebut dimaksudkan untuk menggalakkan kegiatan wiraswasta di kalangan rakyat miskin.[43] Yayasan itu, yang diketuai oleh Suharto sendiri, dengan Liem Siu Liong dan Sudwikatmono (sering dianggap sebagai wakil Suharto dalam pengaturan-pengaturan seperti ini) sebagai wakil ketua, serta Bambang sebagai bendahara, tak lama setelah itu berhasil memperoleh janji dari menteri keuangan bahwa BUMN-BUMN akan memberikan dua persen dari laba mereka untuk digunakan oleh yayasan itu. Suharto menyatakan dalam otobiografinya bahwa ia "tidak pernah pegang" dana-dana dalam jumlah besar yang ia kuasai melalui yayasan-yayasannya, bahkan juga tidak menerima honorarium.[44]

KEMATIAN IBU TIEN

Buyarnya jaringan politik Suharto yang telah sebegitu jauh tahan-banting itu dipercepat dengan kematian mendadak Ibu Tien pada 28 April 1996. Sementara Ibu Tien telah memainkan peran aktif, bersemangat, dan energik dalam bisnis, dalam kegiatan amal, dan dalam kehidupan sosial, serta sebagai pendamping tak kenal lelah

bagi Presiden dalam banyak lawatan dan perjalanan, ia agak luput kemudian dari pandangan publik, demikian pula reputasi yang sebelumnya lekat pada dirinya sebagai penghimpun komisi yang gesit atas proyek-proyek yang disponsori negara. Tampaknya sebelum itu, ia sangat ingin agar suaminya mundur dari jabatannya pada akhir era 1980-an; ia juga dikabarkan sangat tidak senang akan sikap Suharto yang memilih untuk mencalonkan diri lagi pada 1992—sikap yang tidak didukung oleh anak-anak pasangan itu. Ibu Tien, pada masa itu, menginginkan, lebih dari segalanya, masa pensiun yang damai dengan kegiatan yang terpusat seputar keluarga.

Sementara Ibu Tien belakangan disusahkan oleh diabetes dan berbagai keluhan lainnya, serangan jantungnya yang mendadak—ia meninggal hanya satu jam setelah dibawa ke rumah sakit—membuat Suharto sangat terkejut dan hancur perasaannya. Ibu Tien merupakan mitra ideal dan teman tersayang yang sangat setia, cerdik, sabar, banyak akal, luar biasa kooperatif dalam mengakomodasi ambisi-ambisi militer dan politik Suharto, dan merupakan sumber akal sehat serta nasihat yang sangat sopan mengenai orang alih-alih mengenai kebijakan. Ibu Tien benar-benar pas (mungkin juga sempurna) dalam bayangan Suharto tentang perempuan ideal: seseorang yang "harus menyadari bahwa ia sebagai ibu rumah tangga dan sebagai seseorang yang ingin maju. Ia boleh menjadi wanita karier, tetapi ia tidak boleh mengorbankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga .... Wanita yang benar-benar bisa menempatkan dirinya dalam fungsi ganda itulah wanita yang ideal."[45] Sekarang, secara mendadak, pilarnya itu telah pergi.

Kematian Ibu Tien membawa dampak musnahnya pengawasan yang berarti atas kecenderungan abadi Suharto untuk menjagokan kepentingan-kepentingan bisnis anak-anaknya. Setelah itu, korupsi oleh keluarga makin menjadi-jadi, sehingga pada 1997 Indonesia memperoleh julukan sebagai negara paling korup di Asia. Kematian Ibu Tien juga membuat Tutut, yang sudah men-

jabat sebagai wakil ketua Golkar, berperan lebih jelas lagi sebagai manajer Suharto, serta sebagai pelaku politik yang mandiri yang pada gilirannya memajukan kepentingan politik perwira militer asal Madura yang sedang menanjak, Raden Hartono, yang sangat dekat dengan Tutut. Bergegas kembali dari Eropa untuk menghadiri pemakaman ibunya di Solo, Tutut mendampingi ayahnya dan membacakan doa khusus selamat jalan kepada ibunya.

Kematian istrinya tampaknya, kalaupun ada kaitannya, memperkuat tekad politik Suharto. Sekarang tidak banyak yang ingin ia perjuangkan selain mempertahankan cengkeraman kekuasaannya yang semakin ia yakini penting bagi masa depan negerinya. Menjelang pertengahan era 1990-an, kesehatannya masih baik, meski ada peristiwa batu ginjal pada 1996. Seorang wartawan melaporkan bahwa "sewaktu kunjungan belum lama ini ke Kazakhstan, presiden ... membuat kaget para ajudannya dengan menunggangi kuda lokal yang kekar, dan mengendarainya dengan agak cepat."[46]

Saat itu sudah semakin jelas bahwa ia tidak berniat untuk minggir. Ia dikabarkan meyakinkan seorang ilmuwan A.S. yang berkunjung pada awal 1994 bahwa "Saya akan memberi tahu Anda secepat mungkin bila saya akan mengundurkan diri. Satu hal yang pasti—saya akan turun pada saat yang tepat. Saya orang Jawa, dan saya yakin Anda tahu apa itu artinya."[47] Penampilan dengan rasa percaya diri seperti itu dengan cepat meredakan pembahasan mengenai masa depannya dalam waktu dekat, dan pembicaraan pun beralih ke siapa yang mungkin menjadi wakil presiden berikutnya. Sudomo, yang saat itu menjabat sebagai ketua Dewan Pertimbangan Agung, menyatakan pada Mei 1995 bahwa pilihan Suharto jatuh pada orang sipil, sementara wakil ketua Golkar, Ali Mursalam, mengedepankan Tutut dan Harmoko sebagai bakal calon untuk jabatan tersebut.

Ironisnya, pada saat masalah dalam negeri Suharto semakin menebal, reputasinya sebagai negarawan internasional secara dramatis bertambah besar begitu keyakinannya bertambah kuat bahwa keberhasilan pembangunan memungkinkan serta memberi hak kepada Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar dalam masalah internasional.

Prestasi utamanya adalah dalam meraih jabatan ketua Gerakan Non-Blok yang beranggotakan 108 negara itu pada 1992, di mana ia memberi kesan kuat dengan upaya terus-menerusnya bagi perhatian yang lebih besar pada permasalahan dunia berkembang, terutama upaya-upayanya dalam mewujudkan kerja sama pembangunan Selatan-Selatan yang lebih dalam dan bermanfaat. Para penasihat ekonomi jangka panjangnya, misalnya, diminta untuk "mencari cara-cara untuk membantu negara-negara Afrika."[48]

Di dalam lingkup ASEAN, Suharto bekerja sama lewat pengembangan Forum Regional pada 1993; forum tersebut berupaya mengembangkan pembahasan-pembahasan multilateral tentang masalah keamanan. Indonesia juga memainkan peran kunci dalam mewujudkan kesepakatan pada 1993 antara faksi-faksi di Kamboja yang sangat antagonistis dan pemilihan umum yang disponsori dan diselenggarakan oleh PBB, dalam menganjurkan jeda (seperti terbukti demikian adanya) damai kepada para pemberontak muslim di Filipina selatan, serta dalam upaya-upaya menyelesaikan masalah alot atas Kepulauan Spratly yang menjadi bahan pertengkaran itu. Indonesia sempat duduk dalam satu masa jabatan keanggotaan Dewan Keamanan PBB, mengirimkan pasukan pemelihara perdamaian ke Bosnia—yang dikunjungi Suharto pada 1995 dan ditawari bantuan Indonesia dalam menyelesaikan konflik—dan Kamboja, serta menandatangani perjanjian keamanan dengan Australia pada Desember 1995 dengan tujuan, Suharto konon menyatakan, mengakhiri kecurigaan Australia akan potensi agresi Indonesia.[49]

Main golf (Tempo)

Dengan para konglomerat di Tapos, Maret 1990. (Sekretariat Negara, Ind onesia)

Menunaikan ibadah haji, Juni 1991. (Sekretariat Negara, Indonesia)

Bersama Habibie. (Sekretariat Negara, Indonesia)

Memancing bersama Prayogo Pangestu. (Sekretariat Negara, Indonesia)

Serdadu tua. (Sekretariat Negara, Indonesia)

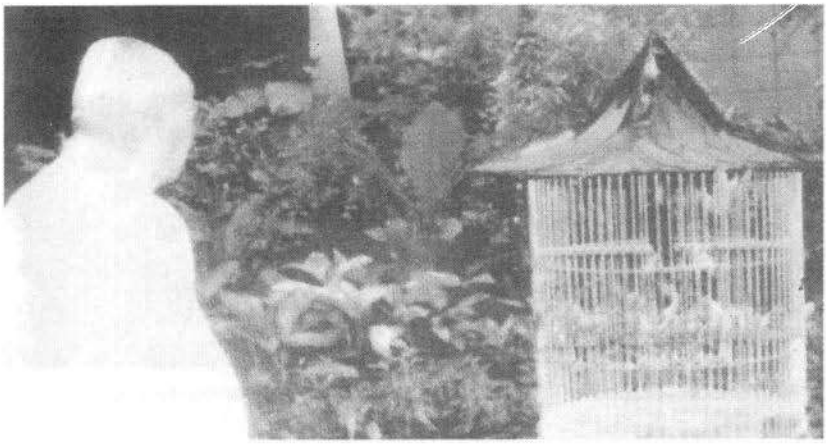

Menatap masa depan. (Sekretariat Negara, Indonesia)

Ibnu Sutowo. (Kompas)

Probosutejo. (Kompas)

Wijoyo. (Sekretariat Negara, Indonesia)

Sumitro Joyohadikusumo. (Sekretariat Negara, Indonesia)

Ali Murtopo. (Tempo)

Yoga Sugama. (Tempo)

Sudwikatmono. (Tempo)

Liem Siu Liong. (Tempo)

Tutut. (Tempo)

Bambang. (Tempo)

Tommy. (Tempo)

Setelah sempat ragu, Suharto juga merangkul konsep APEC (Asia Pacific Economic Cooperation), dan pertemuan di Bogor di mana ia menjadi tuan rumah pada 1994 (kemeja-kemeja batik terkenal yang dikenakan para pemimpin yang berkumpul di sana adalah gagasan Ibu Tien) merupakan titik balik penting dalam perjalanan forum itu menuju eksistensi serta relevansinya. Menurut Emil Salim, "ini adalah keputusannya sendiri, dan didasarkan hanya pada akal sehat,"[50] di dalamnya, posisi strategis Indonesia, dalam kaitannya dengan globalisasi yang semakin memacu, mengharuskan adopsi dan manajemen yang positif terhadap tantangan perekonomian yang terbuka. Rasa ironis Suharto tergelitik ketika ia hadir pada Asia–Europe Meeting (ASEM) di Thailand pada Maret 1996; separo abad sesudah dekolonisasi, para pemimpin Eropa sekarang berbaris ke Bangkok untuk bertukar pikiran dengan duduk sama tinggi dengan para rakyat bekas jajahan mereka.[51]

Misi internasional Suharto juga mencakup pembelaan atas apa yang ia pandang sebagai penghinaan atas negerinya. Pada Maret 1992, misalnya, ia membubarkan IGGI (Inter-Governmental Group on Indonesia) karena ketidaksenangannya atas penghentian bantuan dari Belanda menyusul peristiwa pembantaian di Dili, yang dengan demikian memperoleh kepopuleran yang cukup berarti di dalam negeri. Tak diragukan lagi, ia juga sangat puas melihat bahwa badan penggantinya, CGI (Consultative Group on Indonesia), selanjutnya menaikkan sumbangannya; hal ini tampaknya bertentangan dengan pendapat bahwa badan baru ini sungguh-sungguh menggunakan bantuan sebagai senjata bagi kampanye memperjuangkan perbaikan hak-hak asasi manusia di Indonesia. Pada pertemuan APEC 1994, menyusul pendudukan Kedutaan Besar AS oleh para pemrotes Timor Timur, ia dilaporkan berhati-hati sekali dalam menepis usulan-usulan Presiden Clinton tentang pemberian otonomi khusus kepada Timor Timur.[52] Pada 1997, Suharto membatalkan rencana pembelian sembilan pesawat tempur F-16 dari A.S sebagai akibat kecaman-kecaman Kongres AS atas rekor buruk hak asasi manusia di Indonesia. Kejengkelan

Suharto terhadap kecaman-kecaman Barat tentang Indonesia didorong bukan saja oleh pandangan-pandangan korporatisnya melainkan juga pada apa yang ia pandang sebagai kemunafikan sikap Barat serta penolakan negara-negara Barat untuk mempertimbangkan perbedaan budaya dan tingkat relatif perkembangan ekonomi. Kecaman Belanda khususnya menjadi duri dalam daging bila ia mengenang perilaku Belanda selama masa-masa kolonial dan revolusi Indonesia.[53]

BERKEMBANGNYA KERUSUHAN

Kebencian Suharto yang semakin kuat pada setiap pertanda oposisi kelihatan sangat mencolok dalam upaya-upayanya menghancurkan aspirasi-aspirasi politik Megawati Sukarnoputri. Megawati yang anggun, dan secara pribadi agak berbakat serta mewarisi nostalgia publik yang semakin kuat akan kepribadian ayahnya, sebelumnya hanya memiliki karier yang biasa-biasa saja dalam PDI. Ia akhirnya terlontar, melalui pemilihan spontan oleh anggota-anggotanya, ke pucuk pimpinan menyusul keberhasilan rezim Suharto dalam menggeser Suryadi.

Pemerintah, yang takut jika tokoh yang begitu populer dan berpotensi menimbulkan gangguan politik seperti Megawati menduduki posisi puncak, menolak untuk menerima pemilihannya, selanjutnya mendukung diteruskannya struktur partai anti-Megawati, serta mensponsori kongres PDI tandingan (yang bertemu di Medan pada Juni 1996 dan tertutup bagi Megawati serta para pengikutnya) untuk menjatuhkannya—dan menggantikannya dengan Suryadi. Megawati, yang keras kepala dan tak gentar oleh upaya-upaya untuk menyingkirkannya, bersikeras pada fakta kepemimpinannya, dilambangkan oleh penguasaannya atas kantor resmi PDI di Jl. Diponegoro di pusat kota Jakarta. Pada akhir Juli 1996, sebuah serangan atas kantor tersebut oleh para tukang pukul sewaan serta tentara yang berkedok sebagai warga sipil, dibuat seolah-olah upaya dari sayap partai yang didukung pemerintah

untuk merebut kembali teritori haknya, mengakibatkan lima orang meninggal serta 20 orang tak diketahui nasibnya. Alhasil, kantor itu hancur, tapi reputasi Megawati menjadi bertambah kuat. Namun, kekecewaan para pendukungnya atas tindakan pemerintah menimbulkan serangkaian penjarahan dan pembakaran di jalan-jalan Jakarta; hal yang belum pernah terjadi sejak kerusuhan Malari lebih dari 20 tahun sebelumnya dan diperkirakan oleh gubernur Jakarta menimbulkan kerugian Rp 100 miliar. Atas kekacauan tersebut, pemerintah menimpakan kesalahan pada kelompok kiri ilegal yang baru muncul, Partai Rakyat Demokrasi (PRD), dipimpin oleh aktivis muda Budiman Sujatmiko, yang dianggap telah menyebarkan hasutan; pemerintah juga mulai mematangkan kondisi, termasuk membandingkan kegiatan-kegiatan PRD dengan PKI yang dilarang itu, sebelum melakukan penggerebegan atas para aktivis PRD. Suharto sendiri berkomentar bahwa "kerusuhan itu disebabkan oleh sekelompok orang yang menolak untuk mematuhi konstitusi. Kita sudah menangkap para pemimpinnya dan masalah ini sekarang siap untuk diselesaikan."[54]

Namun, bukti-bukti tentang keterlibatan Suharto sendiri dalam penganiayaan tersebut dengan cepat terkumpul. Hal yang paling mencolok dan aneh adalah tak adanya bukti yang menunjukkan bahwa Suharto pernah memberikan perintah langsung dalam bentuk apa pun. Pasukan keamanan yang merencanakan kekerasan itu tampaknya hanya berasumsi bahwa Suharto akan mengambil tindakan seperti itu karena oposisi yang diancamkan Megawati amat tidak cocok dengan masyarakat yang dibangun Suharto.[55] Pemahaman Suharto yang aneh dan rancu atas peristiwa itu diungkapkan dalam pidato tahunan Hari Kemerdekaan:

> Memaksakan kehendak atau memaksakan perubahan dengan jalan kekerasan, perusakan dan pembakaran gedung-gedung dan fasilitas umum adalah tindakan anarki; tidak demokratis dan tidak bertanggung jawab. Pemerintah manapun memikul tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari tindakan anarkis, dari manapun datangnya dan apapun alasannya. Itulah sebabnya alat-alat keaman-

> an negara bertindak tegas dalam mengatasi kerusuhan 27 Juli di Ibukota baru-baru ini. Kerusuhan itu tidak ada sangkut pautnya dengan demokrasi. Penggerak dan pelaku kerusuhan wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.[56]

Ia menutup pidatonya dengan memberi selamat kepada ABRI atas penanganan kerusuhan tersebut.

Ketegangan politik yang menyelimuti ini terungkap juga dalam bentuk yang lain. Di tubuh Angkatan Bersenjata, Suyono diberhentikan, tampaknya karena dianggap bertanggung jawab atas kerusuhan yang menyusul serangan atas markas PDI itu. Dua tahun sebelumnya, Agum Gumelar dan Hendropriyono dipermalukan oleh pemberhentian mereka, tampaknya karena dilihat terlalu bersahabat dengan Megawati maupun kelompok PDI-nya. Sementara yang dekat dengan Suharto, terutama Prabowo dan Wiranto, mengalami percepatan promosi. Prabowo diposisikan mengepalai Kopassus pada Desember 1995, dengan instruksi untuk mengembangkan kekuatannya menjadi 5.000 orang, serta dipromosikan menjadi mayor jenderal pada Agustus 1996, kurang dari setahun setelah menerima bintang pertamanya. Sementara itu, Wiranto diposisikan memimpin Kostrad, jabatan yang bukan tanpa makna historis dalam masa-masa berbahaya.

Di dalam perpolitikan sipil, ketidakpuasan mulai terungkap dalam bentuk-bentuk yang lebih jelas. Beberapa kecaman kecil—mungkin terdorong oleh kegagalan menjengkelkan Ketua DPR Wahono untuk mengikuti kebijakan Golkar—mulai terdengar di parlemen, dan anggota DPR wakil PPP yang juga salah satu tokoh terkemuka ICMI Sri Bintang Pamungkas pada akhirnya divonis hampir tiga tahun penjara karena menghina Presiden dalam sebuah ceramah di sebuah universitas Berlin pada April 1995, serta dikeluarkan dari DPR dan dari dewan ICMI.

Imbauan-imbauan Sri Bintang setelah itu untuk memboikot pemilihan umum 1997 membuatnya diajukan ke pengadilan lagi atas sebab melakukan "kegiatan-kegiatan inkonstitusional".[57] Res-

ponsnya terhadap perlakuan seperti itu adalah dengan membentuk partai baru PUDI (Partai Uni Demokrasi Indonesia) pada Mei 1996. Kelompok-kelompok buruh dan LSM (lLembaga Swadaya Masyarakat) menjadi semakin berani dalam mengungkapkan pendapat-pendapat mereka yang berbeda. Amien Rais, dosen dan intelektual yang mendapat pendidikan Amerika dan juga anggota terkemuka ICMI serta, sejak 1995, menjadi pemimpin organisasi Islam Muhammadiyah yang modernis itu, terbukti semakin menjengkelkan bagi Suharto karena kerap mengkritik kebijakan pembangunan, terutama dalam kaitannya dengan usaha-usaha pertambangan, serta mendukung pendapat bahwa presiden tidak boleh menjabat lebih dari dua kali masa jabatan, dan mengutuk korupsi oleh keluarga serta kroni. Suharto kemudian mengatur agar ia dikeluarkan dari ICMI pada 1997.

Lebih luas lagi, ada gejala-gejala ketegangan dan gangguan sosial yang mengancam, yang terungkap terutama dalam bentuk ketegangan-ketegangan etnis. Pada Oktober 1996, sebuah sidang kasus penghujatan agama di Situbondo mengakibatkan dibakarnya lebih dari 20 gereja. Pada akhir tahun itu juga, para perusuh di Tasikmalaya membakar 10 gereja lagi selain toko-toko dan rumah-rumah warga keturunan Cina setelah mendengar bahwa polisi memukul beberapa guru muslim. Pada akhir 1996 dan awal 1997, kerusuhan etnis berskala besar terjadi di Kalimantan Barat, ketika suku Dayak setempat melancarkan aksi balas dendam yang mengerikan atas para pemukim Madura yang menyerobot tanah dan lapangan pekerjaan mereka, dan mengakibatkan meninggalnya sekitar 1.000 orang. Kabut asap yang disebabkan oleh banyaknya kebakaran hutan yang tak terkendali—yang sebagian juga sengaja dibakar guna membuka hutan untuk perkebunan kayu dan tanaman keras—yang menyebabkan kecelakaan penerbangan terbesar Indonesia dekat Medan pada September 1997, menambah rasa ngeri serta persepsi mencekam atas suasana saat itu.

Namun, Suharto masih tetap bergeming, tampaknya tidak menyadari gawatnya kerapuhan konsensus sosial yang ia per-

juangkan dan bangun itu. Pada bulan-bulan sesudah kerusuhan Juli 1996, ia menegaskan bahwa tidak akan ada lagi perubahan-perubahan mendasar pada bentuk Orde Baru, melainkan penerapan lebih lanjut masyarakat Pancasila. Setiap upaya yang menyimpang, ujarnya, hanya akan mendorong ekstremisme ketika para pelopor asas-asas sosial baru mulai menggalakkannya; "Ini akan dengan mudah menghasut fanatisme sempit kelompok, yang dapat dimanipulasi oleh kelompok-kelompok ekstrem di dalam atau di luar kelompok bersangkutan. Fanatisme kelompok tidak akan menguntungkan siapa pun, malah bisa menjadi bibit perpecahan dan kerusuhan yang sulit dikendalikan."[58]

Kampanye pemilihan umum 1997—yang dihentikan sejenak pada akhir April untuk merayakan perkawinan Tommy Suharto di Taman Mini dengan seorang keturunan jauh garis keraton Mangkunegoro Solo—diselenggarakan dalam suasana yang absurd, yang semakin terasa demikian dengan adanya rumor bahwa Suharto tak lama lagi akan menikahi adik dari istri 'Bob' Hasan. Mungkin untuk mengimbangi ketegangan politik ini, para pendukung Golkar dan pemboncengnya dianjurkan untuk menunjukkan dukungan mereka bagi Orde Baru dengan benar-benar mengecat kuning, warna Golkar, rumah, pagar, dan toko mereka. Pada November 1996, Wahid dengan keanehan perilakunya yang khas itu praktis sudah meninggalkan Forum Demokrasinya dan berupaya memperbaiki hubungannya dengan Suharto, sampai-sampai menyebut Tutut sebagai "tokoh masa depan".[59] Suharto pun tersenyum dan menerima uluran tangannya, menyadari dominasi politiknya atas pemimpin Islam yang suka berubah-ubah sikap ini.

Di tengah adanya oposisi politik yang mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sejak akhir era 1970-an, dikeluarkannya larangan atas pawai-pawai jalanan, disulutnya rasa takut serta ramalan-ramalan yang mencekam secara besar-besaran, dan kekerasan kampanye yang meluas, Golkar menari kian-kemari menuju rekor kemenangan terbesarnya dengan meraih 74,3 persen dari

total jumlah suara (dan 322 kursi DPR, yang mana empat kursinya disediakan untuk anak-anak Suharto) berbanding 22,6 persen untuk PPP, sementara PDI yang dikebiri (Megawati dan para pendukungnya tidak diberi hak untuk berkampanye dan mencalonkan diri) hanya meraih sekitar 3 persen.

Kesan absurd ini kian terasa setelah pemilihan umum. Harmoko, arsitek kemenangan Golkar itu, dicopot dari jabatannya sebagai menteri penerangan dan diturunkan ke kementerian negara yang tidak berarti, tampaknya karena arogan atas besarnya kemenangannya. Kalangan militer masih memiliki kursi-kursi istimewa mereka di DPR, meski jumlahnya dipangkas dari 100 menjadi 75, tampaknya sebagai pengakuan atas surutnya peran militer dalam jabatan-jabatan kekaryaan serta, mungkin juga, sinyal lain oleh Suharto—yang secara tak langsung mengemukakan perubahan itu ketika berbicara di depan parlemen pada 1992—mengenai pengurangan pengaruh politik mereka.

Beberapa minggu kemudian, Suharto merayakan ulang-tahunnya yang ke-76, peristiwa yang "hampir tidak dirayakan" karena keinginannya untuk menghindarkan perayaan selama 1.000 hari setelah meninggalnya Ibu Tien.[60]

MENUJU KRISIS

Dalam otobiografinya yang terbit pada 1989, Suharto menyatakan bahwa "nilai-nilai kejuangan dan elan itu tetap penting dalam tahun-tahun pembangunan di hadapan bangsa kita. Sebab tahun-tahun itu nanti akan penuh dengan ujian dan tantangan berat, terutama karena berbagai perkembangan dalam ekonomi dunia yang tidak menguntungkan pembangunan kita."[61]

Tahun 1997 menjadi bukti bahwa prediksinya benar-benar menjadi kenyataan. Goncangan-goncangan, serta ramalan suram tentang kesehatan ekonomi beberapa perekonomian "ajaib" Asia—yang diwakili oleh peristiwa-peristiwa seperti bangkrutnya Hanbo Iron and Steel Co. di Korea Selatan pada Januari 1997—dengan

cepat mulai menjadi kenyataan pada Juli. Thailand yang tidak bisa lebih lama lagi menopang nilai tukar baht mereka kemudian memutuskan untuk mengambangkannya. Baht pun merosot dengan cepat, disusul oleh mata uang-mata uang negara-negara tetangganya yang kapitalis. Dalam pandangan banyak pengamat, Indonesia bertahan cukup baik menghadapi serangan tersebut; unsur-unsur fundamental perekonomian cukup kuat, dan kemampuan Suharto sebagai manajer perekonomian tidak bisa diremehkan. Ketika Indonesia membebaskan rupiah dan membiarkannya mengambang pada pertengahan Agustus, nilainya jatuh tapi bertahan persis di bawah Rp 3.000 terhadap dolar AS. Tampaknya puas dengan situasi tersebut (dalam pidato Hari Kemerdekaannya pada 16 Agustus, ia berkomentar bahwa "saat ini kondisi fundamental ekonomi Indonesia sangat mantap"),[62] Suharto menolak upaya para menteri perekonomiannya untuk menangani krisis tersebut secara lebih aktif lewat paket-paket kebijakan reformasi perekonomian yang menyeluruh.

Suharto mengizinkan beberapa penyesuaian, terutama penghentian proyek-proyek infrastruktur publik yang mahal, namun rupiah masih terus merosot. Menjelang awal Oktober, Suharto, yang baru dinaikkan pangkatnya ke Jenderal Besar Kehormatan, sebuah pangkat berbintang lima, berada dalam posisi yang memaksanya—yang mengejutkan banyak kalangan—untuk meminta bantuan sarana penyelamatan dari IMF yang jumlah keseluruhannya mencapai US$43 miliar. Pembaruan-pembaruan awal IMF, terutama penghentian subsidi dan penutupan enam belas bank swasta, tak berhasil banyak dalam menghentikan permasalahannya. Ketidakberhasilan menangani contoh-contoh perkoncoan yang lebih ekstrem, belum lagi kenyataan bahwa Bambang dengan mudah dapat membuka kembali Bank Andromeda-nya (salah satu dari bank-bank yang ditutup) dengan nama lain, merupakan ciri ketidaksungguhan Suharto serta mereka yang terkait dengannya dalam menanggapi krisis tersebut, yang mana semakin menambah hilangnya kepercayaan.

Pada Desember, atas perintah dokter-dokternya, Suharto menjalani istirahat selama sepuluh hari, hal yang tidak pernah dilakukannya selama ini menyusul perjalanannya ke luar negeri yang melelahkan pada paro kedua November. Rumor bahwa ia sudah wafat pun sempat santer beredar.[63] Dibatalkannya perjalanan yang direncanakan ke Kuala Lumpur untuk pertemuan puncak informal ASEAN pada 12 Desember membangkitkan rumor bahwa ia terkena serangan jantung, hal mana membuat rupiah semakin ditinggalkan serta terpukul. Analisis yang paling banyak dianut, sudah tentu, adalah bahwa Suharto merupakan kunci untuk menemukan jawaban atas permasalahan keuangan Indonesia dan, sebagai akibatnya, berita-berita tentang sakitnya membuat rupiah anjlok mendekati Rp 6.000 terhadap dolar AS.[64]

Namun, dalam tempo beberapa minggu, Suharto yang sebelumnya dipandang sebagai syarat yang dibutuhkan bagi stabilisasi Indonesia, juga dipandang sebagai hambatan besar bagi penyelamatan bangsa. Dua peristiwa penting membuat pembalikan ini. Yang pertama adalah pernyataannya yang luar biasa optimis tentang anggaran pada 6 Januari 1998. Begitu tidak realistisnya anggaran ini sehingga para pengamat keuangan untuk pertama kali menyadari dengan amat jernih betapa jauhnya Presiden dari realitas-realitas perekonomian dan politik. Rupiah pun menukik ke hampir Rp 10.000 terhadap dolar AS, dan ibu-ibu rumah tangga menyerbu supermarket-supermarket serta memborong habis bahan-bahan makanan yang ada di rak-rak. Yang kedua adalah petunjuk jelas dari Suharto sejak pertengahan Januari bahwa ia ingin menjamin terpilihnya Habibie—yang kebijakan-kebijakan aneh serta borosnya sejak lama menjadi sasaran kecaman tanpa ampun dari para ekonom konservatif—sebagai wakil presidennya. Pada 22 Januari, rupiah sudah anjlok ke kedalaman hampir 17.000 terhadap dolar. Enam bulan sebelumnya, nilai tukarnya adalah sekitar 2.400 terhadap dolar.

Situasi absurd semakin menandai bulan-bulan berikutnya. Upaya berturut-turut dari IMF untuk memberikan paket-paket

penyelamatan, yang didasarkan pada pengusahaan Indonesia dalam menerapkan serangkaian pembaruan ekonomi dan sosial-politik, terhenti karena ketidakmampuan Suharto melaksanakan apa yang ia janjikan sebelumnya. Semua upaya untuk memotong pola-pola kroni dan kepentingan-kepentingan khusus ciptaan keluarga, seperti proyek mobil Timor-nya Tommy, ternyata tenggelam.

Pada rangkaian penandatanganan persetujuan IMF yang paling terkenal itu pada 15 Januari, yang menghentikan dibebaskannya pajak atas proyek mobil Tommy dan membekukan banyak proyek-proyek Habibie, Direktur Pengelola IMF Michel Camdessus berdiri tinggi dan menjulang di sebelah Suharto, berpangku tangan dalam sikap yang tidak sengaja mengesankan keunggulan bercampur penghinaan serta penolakan, ketika penguasa yang tua dan gemuk itu membungkuk untuk menandatangani dokumennya—langkah yang ditafsirkan banyak orang Indonesia yang menonton drama tersebut di televisi sebagai kekalahan yang sangat rendah dan hina, dan merupakan penyerahan secara paksa kedaulatan yang sangat dibanggakan bangsa tersebut.[65]

Situasi pun dengan cepat dan jelas memperlihatkan bahwa Suharto secara politis dan pribadi tidak mampu melakukan pembaruan-pembaruan yang dipaksakan atas dirinya. Ia sendiri menyadari bahaya akutnya, dan kesadaran inilah yang mengendalikan perilakunya. Presiden AS Clinton pun mengirim mantan wakil presiden Walter Mondale ke Jakarta pada Maret untuk memberikan nasihat kepada Suharto agar "menelan" obat IMF yang pahit itu, dengan iming-iming bahwa keadaan akan membaik dalam enam bulan.

"Saya tidak punya waktu enam bulan," begitu Suharto dikabarkan menjawab; "akan terjadi revolusi."[66] Pada waktu itu ia jelas sudah sampai pada tahap sama sekali kehilangan kepercayaannya terhadap kemampuan para penasihat teknokratnya dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi negerinya. Dengan membuat jengkel para menteri perekonomian dan keuangannya, yang berjalan bolak-balik di luar ruang pertemuan, Suharto bersikeras mau

melakukan perundingan paket-paket pembaruan itu sendiri dengan para wakil IMF.

Suharto tampaknya benar-benar tidak mampu menyadari bahwa IMF adalah jenis makhluk unggul dan sama sekali lain sifatnya dari para lawan politik dalam negerinya serta tidak akan bergeser dengan patuh di bawah kekuatan kepribadiannya. Suharto juga sempat menoleh ke langkah-langkah yang sangat konservatif, seperti kegenitannya yang tak berlangsung lama untuk mencoba menerapkan teori-teori dewan mata uang (*currency board*) dari ekonom Steve Hanke—yang didatangkan langsung oleh keluarganya dari AS.

Pada saat krisis semakin dalam dan mencekam, gangguan sosial tampak semakin mendekat. Selama bulan-bulan pertama 1998, di sejumlah kota, kerusuhan-kerusuhan anti-Cina terjadi, tampaknya muncul dari kecurigaan-kecurigaan mendalam bahwa para pemilik dan pedagang Cina memanipulasi krisis tersebut untuk memetik untung. Sentimen anti-Cina juga muncul di kalangan elite, dicontohkan dalam interogasi—mungkin atas perintah Suharto—atas Sofyan Wanandi (yang tidak lama sebelum itu mengungkapkan harapan agar Try Sutrisno melanjutkan jabatannya sebagai wakil presiden) sehubungan dengan dugaan konspirasi bom PRD untuk mengganggu sidang MPR mendatang. Sementara itu, sejumlah aktivis anti-Suharto hilang dengan cara-cara yang misterius, tampaknya menjadi korban pasukan khusus Prabowo.

Pada Januari, Amien Rais sempat menyatakan kesediaannya untuk menjadi calon bagi jabatan presiden namun tidak berhasil menjalin kerja sama politik dengan Wahid dan Megawati. Tantangan Amien Rais tersebut ada maknanya juga, karena itu adalah gejala pertama seorang tokoh politik senior secara terang-terangan menyebutkan niatnya untuk menantang Suharto, meski pernyataannya itu tak berkelanjutan. Suharto sebelumnya sudah meminta Harmoko untuk menyelidiki apakah ia masih memiliki dukungan rakyat untuk menjabat lagi sebagai presiden; Harmoko, yang tidak melakukan risetnya, dengan patuh melapor kembali bahwa semua

orang memang berada di belakangnya. Pada 20 Januari, Suharto secara resmi menerima pencalonannya oleh Golkar untuk masa jabatan kepresidenan sekali lagi. Oleh karena itu, pada 10 Maret, terlepas dari pernyataannya pada 1996 bahwa "pemimpin baru perlu dipersiapkan,"[67] apa yang tidak dapat dibayangkan oleh para pengamat pada awal dasawarsa itu benar-benar terjadi. Ribuan anggota MPR (termasuk empat dari enam anaknya), dengan dikelilingi oleh pengamanan militer yang hebat, memilih Suharto secara aklamasi sebagai presiden untuk masa jabatan lima tahun yang ketujuh kalinya. Dalam mempertanggungjawabkan masa jabatan sebelumnya, Suharto tak banyak menyebut tentang krisis ekonomi yang tengah melanda, meski, menurut Tutut, kebutuhan bangsa akan dirinya pada saat krisis ini telah mendorongnya untuk menerima jabatan itu walau usianya makin lanjut dan ia makin lelah. Terlebih lagi, ia berhasil memperoleh kekuasaan luas dari MPR untuk mengambil tindakan dalam keadaan darurat. Ia menegaskan bahwa ia akan tetap menjabat, Insya Allah, untuk masa lima tahun penuh.[68]

Kabinet yang diumumkan Suharto pada 14 Maret—yang tampaknya banyak mengikutsertakan Tutut dalam penyusunannya—hanya memperdalam persepsi yang absurd serta mempertebal ketidakpercayaan saja. Di antara kelompok lelah yang telah tersusun itu, termasuk pejuang setia seperti Ali Alatas, ada dua wajah baru yang mengejutkan. Salah satunya adalah 'Bob' Hasan, taipan kayu yang monopoli-monopolinya selama ini menjadi sasaran utama IMF, dan yang telah berhubungan dengan Suharto dalam spekulasi-spekulasi bisnis (yang paling baru adalah yang cukup besar dan melibatkan kemitraan tiga yayasan besar Suharto dengan PT Nusantara Ampera Bakti (Nusamba)-nya Hasan) selama lebih dari 40 tahun. Pengangkatan 'Bob' Hasan untuk jabatan menteri perdagangan merupakan tanggapan yang disengaja atas kecaman dan kebijakan IMF. Wajah baru lainnya adalah Tutut sendiri, yang memasang diri sebagai menteri kesejahteraan sosial. Hal penting lainnya adalah pengangkatan Wiranto, yang belum

lama sebelumnya diangkat sebagai panglima ABRI dan digolongkan ke dalam faksi merah-putih Angkatan Darat, sebagai menteri pertahanan—mengimbangi pengangkatan Prabowo sebelum itu sebagai panglima Kostrad, dan rekan "hijau"-nya Subagyo Hadi Siswoyo sebagai kepala staf Angkatan Darat. Tampaknya Suharto tidak mau mempertaruhkan masa depannya semata-mata pada menantunya yang suka berperilaku aneh itu.

Kabinet yang telah terbentuk tersebut, yang tidak bisa dihasilkan dengan cara lain, merupakan perpaduan antara harapan-harapan yang lelah dan pudar, dan perkoncoan arogan yang telah menyerang rezim Suharto pada tahun-tahun terakhirnya. Dari satu sudut pandang, kabinet tersebut dapat diartikan sebagai penolakan atas semua yang diinginkan IMF. Namun, penafsiran seperti itu menyepakati bahwa Suharto memiliki persepsi lebih dari yang pada kenyataannya ia miliki ketika itu. Namun, itu mungkin lebih merupakan upaya nekad Suharto—yang hampir panik karena ketidakmampuannya memengaruhi kekuatan-kekuatan lebih besar yang mengepungnya dan yang tidak bisa ia pahami maupun kendalikan—untuk memagari dirinya menggunakan segelintir orang yang menurutnya bisa dipercaya.

KERUSUHAN DAN KEJATUHAN

Upaya untuk memahami sikap Suharto dalam beberapa bulan dan minggu terakhir masa kepresidenannya mungkin bisa tercerahkan oleh sikap yang ia perlihatkan sehubungan dengan jabatan itu pada 1966–67. Waktu itu, ia bersikeras akan menerima jabatan itu hanya bila memperoleh dukungan luas dan, yang lebih penting lagi, kepercayaan dari rakyat Indonesia. Merenungkan pengangkatannya ke puncak politik pada 1967, Suharto dalam otobiografinya berkomentar bahwa, "kalau pada suatu waktu, melalui jalan yang benar dan sah mereka [rakyat] mencabut kembali kepercayaan itu dari saya, dengan senang hati akan saya serahkan. Saya tidak akan mempertahankan kedudukan saya, apalagi mempertahan-

kannya dengan mempergunakan kekuatan senjata. Sama sekali saya tidak akan berbuat seperti itu!" Sesudah terpilih pada 1973, ia sempat menyatakan niatnya untuk sekali lagi menjadi warga desa biasa saja.[69]

Dalam beberapa minggu setelah Suharto terpilih lagi, pada saat perekonomian berkutat di jurang yang gelap, kekuatan-kekuatan oposisi yang sejak lama dibatasi mulai muncul. Apa yang memberi fokus bagi meningkatnya kecaman anti-Suharto adalah munculnya gerakan mahasiswa pada awal 1998, yang menjadi semakin berani menyusul terpilihnya kembali dirinya sebagai presiden. Demonstrasi-demonstrasi mahasiswa berskala besar di seluruh Indonesia, yang sebagian besar berada di kampus-kampus di mana staf fakultas dan para pejabat senior juga ikut ambil bagian, mengawali dan membuntuti sidang MPR Maret.

Para mahasiswa, yang saling terhubung melalui telepon seluler dan akses Internet, mulai mendesak dengan turun ke jalan menyampaikan kehendak mereka. Menjelang April, Amien Rais dengan berani menempatkan dirinya sebagai pemimpin informal gerakan yang semakin menguat untuk menurunkan Suharto, dan secara terbuka menyerukan dukungan rakyat bagi perjuangannya. Menjelang Mei, protes-protes tersebut mulai ke luar kampus dan ke jalan-jalan.

Satu-satunya tanggapan Suharto atas ketegangan yang semakin meningkat itu adalah dengan membuat beberapa janji pembaruan yang tidak jelas melalui cara-cara konstitusional, namun tetap bersikeras tidak akan ada pembaruan yang berarti yang bisa diupayakan sebelum 2003. Tapi, ia cukup merasa percaya diri akan posisinya juga dukungan baginya ketika pada 4 Mei memerintahkan pengurangan subsidi bensin seperti yang diminta IMF. Hal ini dengan seketika menaikkan harga di pom-pom bensin selain menciptakan kesempatan bagi pengusaha angkutan untuk menaikkan tarif transportasi. Reaksi yang segera terjadi adalah kerusuhan anti-Cina yang keras di Medan, serta gejala-gejala awal bahwa aksi para mahasiswa tidak akan lagi terbatas pada protes-

protes di kampus saja. Suharto masih belum dapat memahami makna dari gerakan yang semakin menguat dalam menentang dirinya itu. Ia kemudian memilih, boleh jadi didorong oleh perasaan akan tugas yang sudah mendarah-daging, untuk terbang ke Mesir pada 9 Mei guna menghadiri konferensi ekonomi G-15 di Kairo, memaklumkan para lawannya ketika akan berangkat bahwa pasukan keamanan akan menangani dengan tegas setiap gangguan yang muncul.

Selama kepergiannya, empat mahasiswa dari universitas swasta yang biasanya konservatif, Trisakti, yang berada di tepi jalan tol menuju bandar udara di sebelah barat pusat kota, ditembak mati ketika hendak kembali ke kampus pada petang 12 Mei menjelang akhir dari demonstrasi sehari penuh mereka. Kematian para mahasiswa, dan pemakaman mereka hari berikutnya, mencetuskan gelombang kekecewaan yang terpendam, di mana kalangan miskin Jakarta—kabarnya dihasut dan diarahkan oleh orang-orang tak dikenal di berbagai tempat di seluruh kota—terus memorak-porandakan bagian cukup besar kota Jakarta pada 13 dan 14 Mei.[70]

Sasaran-sasaran khusus dari sikap bermusuhan itu adalah toko-toko warga Indonesia keturunan Cina, yang dijarah dan dibakar, begitu pula perempuan-perempuan Indonesia keturunan Cina, yang sejumlah besar diperkosa. Kerusuhan dan perusakan serupa terjadi di kota-kota lainnya, terutama di Solo. Rumah Liem Siu Liong di utara Jakarta dibakar oleh massa.

Suharto, menyaksikan kekerasan tersebut dari Kairo, pasti hancur hatinya. Ia pun menyatakan bahwa ia tidak mau menggunakan kekerasan untuk mengamankan kekuasaannya. Ia juga membuat pernyataan yang tidak jelas bahwa ia akan *lengser keprabon* dan berperan sebagai pembimbing moral yang objektif. Ketika ia tiba kembali di ibukota pada Jumat pagi 15 Mei setelah mempersingkat perjalanannya, bagian-bagian yang cukup luas dari ibukota, khususnya yang dihuni oleh orang-orang Indonesia keturunan Cina, tinggal reruntuhan yang masih mengepul.

Lebih dari 1.000 orang tewas, kebanyakan tewas terbakar di pusat-pusat pertokoan. Orang-orang Indonesia keturunan Cina dan warga asing berupaya dengan segala cara untuk berangkat ke luar negeri, dengan sesekali mengalami kekerasan dari massa di sepanjang jalan bebas hambatan menuju bandar udara Soekarno-Hatta. Beberapa dari mereka terpaksa menjual kendaraan mereka di bandar udara sebelum berangkat.

Banyak pengamat mengaitkan ganasnya perusakan yang menimpa Jakarta dengan Prabowo yang lihai tapi kasar itu, yang sejak awal 1998 dipromosikan meraih bintang ketiganya serta diangkat sebagai panglima Kostrad, dan komandan garnisun Jakarta Syafrie Syamsuddin, mantan pengawal Suharto dalam perjalanan-perjalanan luar negerinya, serta dikenal dekat dengan Prabowo.[71] Yang jelas, garnisun tak banyak berupaya dalam membatasi kerusuhan 13 Mei, meski ada perintah dari Wiranto untuk bertindak demikian. Banyak kalangan curiga bahwa Prabowo waktu itu berupaya merekayasa situasi untuk merusak kredibilitas Wiranto sehingga Suharto akan memberinya kekuasaan-kekuasaan darurat guna mengendalikan situasi.

Sekembalinya dari Kairo, Suharto segera menanggapi dengan membatalkan kenaikan harga minyak dan memerintahkan pemulihan ketertiban dengan kekerasan, selain mengumumkan rencana untuk melakukan *reshuffle* kabinet. Namun, semuanya sudah terlambat. Pada akhirnya, "cengkeramannya atas kekuasaan ... buyar dengan luar biasa cepat."[72] Pada hari-hari setelah itu, seruan-seruan agar ia mundur datang bertubi-tubi, terutama dari mantan orang favoritnya yang sekarang menjabat sebagai Ketua DPR/MPR Harmoko yang—didampingi oleh Syarwan Hamid, ketua fraksi ABRI di parlemen, serta para pemimpin fraksi lainnya—pada sore 18 Mei membuat seruan yang mengherankan agar Suharto mengundurkan diri, dan memberinya waktu hingga hari Jumat berikutnya untuk mundur, di bawah ancaman bahwa prosedur-prosedur panggilan untuk pertanggungjawaban akan mulai diambil terhadap dirinya. Sehari sebelum itu, Menteri Pariwisata

Abdul Latief telah mengajukan pengunduran dirinya karena "alasan-alasan keluarga".[73] Pada pagi hari 18 Mei, para mahasiswa sudah menduduki gedung parlemen yang beratap lengkung itu, di mana mereka diawasi oleh pasukan marinir yang bersimpati, yang tampaknya ditempatkan di sana oleh Wiranto. Simbolisme dari para marinir yang berjongkok di atap itu sudah jelas bagi semua orang.

Sementara itu, Suharto melakukan upaya nekad untuk mempertahankan kekuasaannya, paling tidak sedikit lebih lama lagi, dan ia memperoleh tanda-tanda dukungan dari Wiranto yang, karena pertimbangannya sendiri mengesampingkan seruan Harmoko agar Suharto mundur dengan segera, menyebut seruan itu sebagai "pendapat individual".[74] Petang itu, Suharto bertemu dengan tokoh Islam terkemuka Nurcholish Majid guna membahas pendapat-pendapatnya tentang langkah terbaik selanjutnya. Dalam pertemuan tersebut, Suharto memberi petunjuk bahwa ia bersedia untuk turun. Pagi berikutnya, ia bertemu dengan sembilan pemimpin senior muslim dan mengumumkan rencananya bagi komisi pembaruan serta kabinet baru; ia sendiri menyatakan ingin memimpin proses pembaruan tersebut. "Saya bosan menjadi presiden," komentarnya kepada kelompok itu; "masalahnya adalah seandainya saya mengundurkan diri, apakah itu akan jadi jaminan selesainya masalah ini?"[75] Ia menggunakan kesempatan ini untuk mencemooh pendapat bahwa Habibie akan menggantikannya; "Ada pertanyaan apakah ia mampu."[76]

Setelah itu, dalam sebuah pidato nasional, ia secara resmi mengumumkan kartu as utamanya, seperti yang ia pikirkan: membubarkan kabinet yang baru berusia dua bulan itu, membentuk yang baru, yang akan diberi nama Kabinet Reformasi, membentuk komisi yang bertugas memajukan proses pembaruan dengan menyiapkan undang-undang baru, serta menyelenggarakan pemilihan umum ("secepat mungkin"). Suharto sendiri tidak akan mencalonkan diri lagi sebagai presiden untuk periode berikutnya bila MPR yang baru itu sudah bersidang.[77] Malam itu, berkomen-

tar pada penulis pidatonya, Yusril Ihza Mahendra, tentang tuntutan-tuntutan masyarakat bagi penyelenggaraan sidang istimewa MPR untuk memberhentikannya, Suharto menyatakan bahwa "mereka tidak mengerti. Kalau sidang istimewa bisa berlarut-larut sehingga keadaan tambah kacau. Kalau sudah begitu, ABRI akan mengambil kendali, *to*?"[78]

Di tengah-tengah upaya nekad ini, Amien Rais mengoordinasikan protes-protes mahasiswa dan mengancam akan menghimpun satu juta demonstran di Jakarta pada 20 Mei guna menyerukan pengunduran diri Suharto. Pidato Suharto tidak membawa pengaruh apa pun kepada Amien juga yang lainnya yang mencurigai bahwa Presiden hanya merencanakan taktik baru untuk menunda kepergiannya. Habibie sendiri terpukul dan sangat terluka oleh komentar-komentar yang mengecilkan kemampuannya, dan dengan cepat menyampaikan pendapat kepada Suharto bahwa peluang terbaik Suharto untuk masa mendatang terletak pada kepresidenan Habibie.

Suharto pada akhirnya kehilangan kepercayaan terhadap mereka yang begitu dekat ia asuh. Sementara pawai Rais tidak jadi dilakukan—digagalkan oleh adanya ancaman kekerasan terhadap para demonstran—kekuatan-kekuatan lain juga mulai bergerak. Pada pagi hari 20 Mei, Suharto bertemu dengan tiga mantan wakil presidennya (Umar, Sudharmono, dan Try) diduga untuk membahas situasi serta pilihan-pilihannya. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Saadillah Mursyid mengumumkan bahwa Suharto akan mengangkat para anggota Komisi Reformasinya pada pagi berikutnya. Namun, Suharto tidak dapat menemukan orang-orang yang cocok untuk duduk di komisi yang diusulkannya akan beranggotakan 45 orang itu, maupun untuk kabinet barunya. Menjelang petang, baru ada tiga calon.

Petang itu juga, muncul berita bahwa para menteri keuangannya, dipimpin oleh orang yang ia bawa sendiri ke puncak, Menteri Koordinator Ginanjar Kartasasmita, sudah mengadakan rapat sebelumnya dan menyusun pernyataan bahwa mereka tidak

bersedia menjabat dalam kabinet baru, dan mendesak Suharto agar turun. Pernyataan tersebut, yang disampaikan ke Cendana pada sekitar pukul 8 malam, sangat mengguncang Suharto. Namun, tidak jelas apakah ia sudah menerima surat itu ketika memulai pertemuan dengan Habibie sekitar saat yang sama, tampaknya untuk mempersiapkan pengalihan jabatan kepadanya pada 23 Mei jika Suharto sudah mengangkat kabinet barunya. Menyadari arah mana politik tengah menuju, Habibie dengan cepat menolak. Pada pertemuan di malam yang sama, Wiranto, atas nasihat sekelompok ahli hukum konstitusi serta ahli ilmu politik, menyatakan bahwa demi kepentingan bangsa, solusi terbaik adalah pengalihan kekuasaan secara konstitusional dari presiden kepada wakil presiden. Wiranto menyampaikan pandangan-pandangannya kepada Suharto malam itu.[79]

Suharto sekarang menyadari, seiring datangnya surat Ginanjar serta apa yang pasti merupakan akhir yang mencengangkan dan mengejutkan, bahwa kariernya sebagai pemimpin bangsa sudah berakhir—"terserahlah," Probosutejo mengabarkan Suharto berkata demikian—dan bahwa ia harus menyerahkan kekuasaan sesegera mungkin kepada Habibie.[80] Habibie, sekembalinya ke rumahnya di Kuningan, mengadakan pertemuan dengan keempat menteri koordinatornya. Sekitar pukul 11 malam, karena belum jelas akan apa yang tengah terjadi, ia menelepon kediaman Presiden, hanya untuk diberi tahu oleh Saadillah bahwa Suharto akan secara resmi meletakkan jabatannya pada pagi hari berikutnya dan menyerahkan kekuasaan kepada wakil presiden. Dukungan internasional untuk Suharto agar bertahan juga sudah sirna. Tepat sebelum tengah malam, Menteri Luar Negeri AS Madeleine Albright menyiarkan pernyataan yang menyeru agar Suharto minggir demi kepentingan transisi menuju demokrasi.

Pada pukul 9 pagi hari berikutnya, 21 Mei 1998, Suharto, mengenakan jas safari berlengan-pendek berwarna abu-abu gelap, memasuki ruang utama Istana Merdeka, diikuti oleh wakil presiden B.J. Habibie, para perwira militer senior, dan beberapa anggota

Mahkamah Agung. Wajahnya agak sembab dan pucat, namun sikapnya sangat tenang ketika berdehem dan mulai membacakan pernyataan singkat yang mengumumkan bahwa upaya-upayanya untuk membentuk kabinet baru tidak berhasil, dan bahwa ia akan berhenti menjabat—berlaku mulai saat ia selesai membacakan pernyataannya. Ia mengucapkan terima kasih kepada bangsa, meminta maaf atas "kesalahan-kesalahan serta kekurangan-kekurangan-nya".[81] Setelah selesai membacakan pernyataannya, ia tetap berdiri sementara Habibie yang agak gugup dan dengan mata yang membelalak disumpah sebagai presiden ketiga Indonesia oleh Hakim Agung Mahkamah Agung. Kemudian Suharto menjabat tangan Habibie tanpa mengucapkan kata sepatah pun—setelah itu sejumlah hakim yang hadir—lalu membalikkan badannya dan pergi, berhenti sebentar seraya berpegang pada lengan Tutut untuk memberikan senyum tipis yang pasrah dan melambaikan tangannya kepada para juru foto yang menunggu di luar sebelum berangkat pulang dengan menggunakan kendaraan pribadi ke rumahnya yang dijaga ketat di Jl. Cendana. Di dalam rumah, Wiranto berbicara kepada kerumunan orang, menjanjikan kesetiaan kepada Habibie dan perlindungan bagi pribadi dan keluarga Suharto.

Pengunduran diri Suharto, disiarkan secara nasional dan mendapat perhatian di seluruh Indonesia juga di luar negeri, segera menjadi peristiwa hingar-bingar perayaan di kalangan mahasiswa yang menduduki gedung-gedung DPR/MPR. Apa yang seminggu atau beberapa hari sebelumnya tampak sulit dipercaya, kini menjadi kenyataan: Suharto sudah tiada lagi untuk selamanya.

APA YANG MEMBUAT SUHARTO JATUH?

Seorang pengamat berpendapat bahwa, "menjelang akhir kekuasaan Suharto, para lawannya—yang dulu atau yang masih ada dalam tubuh Orde Baru—yang tercerai-berai telah mulai bersatu untuk satu perjuangan."[82] Namun, pada kenyataannya, sedikit sekali terlihat kesatuan oposisi yang kohesif pada seluruh tahap proses

penurunan Suharto. Demikian pula pandangan menyesatkan bahwa ia ditumbangkan oleh krisis mata uang Asia. Masalahnya, Suharto sudah berhasil mengatasi banyak krisis sebelumnya dan selalu akhirnya muncul lebih kuat. Sebaliknya, krisis tersebut lebih merupakan katalis yang memungkinkan konstelasi luas faktor-faktor, banyak di antaranya merupakan produk-produk pengeraman yang lama, untuk menghimpun diri dan membangun tekanan yang begitu besar sehingga Suharto tak memiliki pilihan lain kecuali turun.

Korupsi sudah tentu ikut memainkan peran. Pada pertengahan era 1970-an, seorang wartawan berpengalaman berkomentar bahwa "korupsi adalah otot Achilles rawan pemerintah Indonesia." Sementara pengamat lain mengajukan alasan bahwa "kemarahan pada kekayaan yang ditimbun oleh [keluarga Suharto] yang akhirnya terbukti menjadi sebab kehancurannya muncul karena banyak orang Indonesia merasa bahwa keluarga Suharto telah bertindak terlalu jauh, alih-alih karena Suharto telah melakukan tindak korupsi itu sendiri." Pengamat yang sama memperkirakan bahwa "pada saat pengunduran diri Suharto, di Indonesia saja setidaknya ada 1.251 perusahaan aktif dan berdiri sendiri di mana anggota-anggota keluarga Suharto memiliki saham yang cukup berarti."[83]

Yang tak kalah pentingnya adalah fakta bahwa gaya pengarahan manajemen Suharto sangat tidak memadai dalam menghadapi bahaya yang semakin cepat membubung terhadap kekuasaannya itu. Seperti komentar penulis biografinya hampir tiga dasawarsa sebelumnya, "sudah menjadi kebiasaan [Suharto] sejak kudeta komunis September 1965 untuk menunggu dan melihat, mengukur kekuatan-kekuatan yang paling penting dalam masyarakat, membiarkan ide-idenya berkembang serta membahas masalahnya, lalu baru bertindak."[84]

Dalam hubungannya dengan kejadian-kejadian pada Mei 1998, praktis tidak ada waktu untuk memungkinkan strategi santai ini dilakukan, bahkan bila Suharto tengah berada dalam posisi

menggalang dukungan yang diperlukan untuk menjalankan kehendak-kehendaknya. Terlebih lagi, gaya itu telah membusuk seiring rasa percaya-dirinya yang arogan yang diakibatkan oleh lamanya periode kekuasaannya itu. Ia mengakui dalam otobiografinya bahwa "saya selalu bertanya, 'Apa pendapatmu?', dan selalu mau mendengar jawaban atas pertanyaan saya itu. Kalau pendapatmu baik, *OK*."[85] Pada Mei 1998, Suharto yang makin bersikap aneh itu sejak lama meninggalkan kebersamaan yang ia bangkitkan dengan menanyakan dan mengambil tindakan atas pandangan-pandangan orang lain.

Yang lebih umum, pada akhirnya, adalah ketidakmampuan Orde Baru Suharto dalam mengakomodasi kehendak sosial yang direkayasa oleh Suharto sendiri, dan yang malah menjatuhkannya. Hampir tiga puluh tahun sebelumnya, pengamat asing kawakan Derek Davies berpendapat bahwa "kemakmuran adalah kekuatan yang sangat besar dalam membebaskan. Indonesia yang terindustrialisasi dan modern tidak akan dapat lama menoleransi oligarki militer." Suharto sejak beberapa waktu lalu menyadari bahaya ini, namun ia terbukti tidak dapat mengembangkan arsitektur politik untuk mengakomodasinya. Dengan hilangnya logika korporatis khasnya serta tercabik-cabiknya legitimasinya sebagai penjamin kesejahteraan, rezimnya yang semakin sempit dibangun itu tidak akan dapat bertahan.[86]

HANYA MENUNGGU

Tak lama setelah pengunduran dirinya, Suharto hidup dalam kondisi hampir tak berhubungan dengan dunia luar. Pada 22 Mei, ia dengan dingin tidak menghiraukan Prabowo yang putus asa—yang praktis dikesampingkan oleh Habibie dan Wiranto—akan harapan-harapannya untuk dapat mengupayakan kembali kebangkitannya. Ia tidak berhubungan dengan Habibie pada hari-hari awal kepresidenannya. Ia tak banyak memberikan kesempatan wawancara dan jarang tampak di depan umum; saudara tirinya

melaporkan bahwa ia sedang "mengumpulkan bahan untuk menjawab kritikan orang-orang terhadap dirinya."[87]

Abdurrahman Wahid berkali-kali, walau tidak berhasil, mencoba melakukan upaya untuk menarik Suharto kembali ke proses politik pada 1998. Karena menurut Wahid, Suharto adalah penyusun skenario dari serangkaian kekerasan yang bertujuan menggoyahkan masyarakat. Meski ada dugaan-dugaan lebih lanjut bahwa kelompok-kelompok yang terkait dengannya akan melakukan upaya-upaya sistematis untuk merongrong para pemimpin penggantí beserta pemerintahan mereka,[88] ia tampaknya benar-benar tidak melibatkan diri dalam dunia politik—selain serangan-serangannya yang langka seperti komentar-komentar sinisnya yang pasrah pada April 1999 tentang pemilihan umum mendatang, permasalahan Timor Timur, serta kebijakan-kebijakan IMF[89]—yang ia kuasai begitu lama.

Sebagian besar waktunya ia habiskan, seperti sejak tahun 1966, di Jalan Cendana, meski kadang-kadang ia dilaporkan tinggal di sebuah rumah yang tidak lama sebelumnya dibangun di Taman Mini, Jakarta Timur. Sesekali ia terlihat menghadiri upacara-upacara keagamaan. Merayakan Idul Fitri pada Januari 2000, misalnya, Suharto dan keluarganya melakukan doa-doa ritual mereka di mesjid At-Tin di dalam kompleks Taman Mini. Bahwa ia masih memiliki dukungan rakyat yang cukup berarti tampak jelas dari kerumunan orang yang ingin menyambutnya; mereka mungkin bagian dari orang-orang yang "masih mengenang bahwa pembangunan ekonomi yang nyata bagi mereka baru dimulai setelah Repelita I diterapkan pada 1969."[90] Menurut Abdurrahman Wahid, Suharto tetap saja yakin bahwa ia tidak berbuat salah, dan tak ada yang ia mesti mintakan maaf atau pengampunan.[91]

Sulit untuk memahami pendapat Suharto tentang perubahan-perubahan besar yang terjadi di Indonesia setelah kejatuhannya: dibebaskannya pers dari belenggu pemerintah, dilepaskannya para tahanan politik, munculnya praktik-praktik demokrasi, lahirnya berbagai partai baru, seruan-seruan untuk memisahkan diri dari

daerah, tindak otonomi daerah yang lebih tinggi, dan dilepaskannya Timor Timur—serta, sudah tentu, krisis perekonomian yang berlanjut. Mungkin, ia merenung, ini hanyalah takdir yang menyertai kemerdekaan Indonesia.

MEMBURU SUHARTO

Sidang khusus MPR yang diselenggarakan pada November 1998 tidak mengancam berlanjutnya jabatan kepresidenan Habibie. Sidang itu juga secara resmi menyerukan penyelidikan atas korupsi serta pengumpulan kekayaan negara untuk pribadi, khususnya yang terkait dengan Suharto. Hari terakhir sidang ditandai dengan tewasnya lima belas mahasiswa, ditembak mati oleh pasukan keamanan ketika mereka menyerbu gedung DPR/MPR serta kawasan Semanggi. Suharto berkomentar bahwa kekerasan yang disebabkan oleh pemerintah yang tidak mendengarkan harapan-harapan dan aspirasi mahasiswa itu terkesan menyedihkan dan ironis."[92]

Habibie sendiri tidak berminat dalam memburu dugaan-dugaan korupsi Suharto, baik karena rasa hormat kepada mantan presiden itu serta karena ia menyadari bahwa penyelidikan seperti itu mungkin akan membuka kotak Pandora balas-dendam atas persekongkolan-persekongkolan Orde Baru, termasuk persekongkolan program-program bisnis pemerintah yang ia pimpin. Agar dapat mengendalikan setiap penyelidikan, ia pun memberhentikan Jaksa Agung Sujono Atmonegoro dan menggantikannya dengan Andi Muhammad Ghalib, perwira militer yang masih berdinas serta yang memiliki kesetiaan tanpa batas kepada Habibie.

Ketika semakin banyak muncul cerita di khalayak umum tentang ketamakan anak-anaknya, Suharto pun berupaya membela diri. Muncul pada stasiun pemancar TV anak perempuannya pada September 1998, ia menyatakan tidak memiliki satu sen pun uang di rekening bank asing mana pun, dan menantang para pengecamnya untuk membuktikan hal sebaliknya. Pada November, ia menyerahkan pengawasan atas tujuh yayasan yang ia ketuai,

dengan aset total lebih dari setengah miliar dolar, kepada pemerintah.

Tanggapan Habibie atas tuntutan-tuntutan yang semakin menguat untuk menyelidiki kekayaan Suharto adalah dengan membentuk komisi khusus. Upaya untuk memasukkan pengacara hak asasi manusia Adnan Buyung Nasution dalam komisi tersebut gagal ketika Habibie menolak untuk memberikan kekuasaan kepada komisi seperti yang diminta Nasution. Pada akhirnya, Ghalib sendiri yang memimpin panel tersebut; ia juga diperintahkan untuk memberikan laporan kepada Habibie jika penyelidikannya sudah rampung.

Suharto diinterogasi selama tiga jam pada 9 Desember 1998. Sebuah rekaman pembicaraan telepon pada hari berikutnya, yang diduga antara Habibie dan Ghalib, tampaknya menunjukkan bahwa pemerintah tidak bersungguh-sungguh akan penyelidikan tersebut, dan bahwa Suharto malah mendorongnya agar mencegah kemungkinan orang lain main hakim sendiri. Dan tak heran pula jika penyelidikan Ghalib tidak menghasilkan bukti bahwa Suharto memperoleh kekayaan lewat cara-cara yang tidak benar.[93]

Dengan terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai presiden pada Oktober 1999, menyusul pemilihan umum bebas Indonesia yang pertama sejak 1955, tekanan masyarakat bagi dibukanya kembali kasus Suharto menjadi terlalu besar untuk bisa diabaikan—meski ada pernyataan Wahid bahwa ia akan memaafkan mantan presiden itu jika dinyatakan bersalah. Jaksa Agung Marzuki Darusman pun memulai proses panjang dan lambat menghimpun bukti yang memberatkan Suharto dan akhirnya berhasil awal Agustus 2000 mengajukan dakwaan-dakwaan yang diduga adalah tindak pidana korupsi sehubungan dengan manajemen yayasannya. Sifat dari dakwaan yang dikenakan, serta lambatnya kasus tersebut ditangani, menurut beberapa kalangan mengesankan bahwa Marzuki dan pemerintah yang ia wakili tidak begitu bersemangat dalam memburu mantan presiden itu secara sungguh-sungguh. Dan para pengacara Suharto pun menggunakan taktik mencegah

klien mereka, yang dikenakan tahanan kota sejak April, diajukan ke pengadilan atas dalih kesehatannya yang menurun.

KESIMPULAN

Suharto memang sedang menurun kesehatannya. *Stroke* yang berturut-turut, yang terbaru adalah pada 19 Juli 1999, telah membuatnya pelo dalam berbicara, berkurang ingatan, dan tidak mampu mengungkapkan atau memahami gagasan yang berat-berat. Ia mengisi waktunya dengan menonton film kartun dan dokumenter di televisi, tidur, dan salat. Sementara itu, anak-anaknya juga sering menengoknya.

Upaya-upaya kejaksaan agung untuk membuat Suharto menjalani pemeriksaan medis guna menilai kesehatannya—penting bagi jalannya penyelidikan—mencapai tingkat yang menggelikan ketika Suharto menerima kunjungan Presiden Wahid di rumahnya pada 8 Maret 2000, sementara presiden sendiri tidak menyadari bahwa Suharto dipanggil ke Rumah Sakit Ciptomangunkusumo untuk pemeriksaan hari itu juga. Serombongan anggota DPR yang mengunjungi rumahnya pada Februari untuk menanyainya seputar dugaan penyaluran-penyaluran pinjaman bank yang menyimpang ditolak oleh Tutut dan pengacara Suharto, Juan Felix Tampubolon, karena Suharto, menurut Tampubolon, tidak "sehat untuk menjalani proses klarifikasi maupun interogasi."[94]

Tak lama setelah itu, ia tidak menanggapi panggilan untuk hadir di kejaksaan agung guna menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dua upaya tim penuntut untuk mewawancarainya pada April diakhiri sebelum selesai ketika tekanan darahnya naik sampai ke tingkat yang membahayakan. Pada tiga kesempatan terpisah, ia tidak menanggapi panggilan untuk tampil di pengadilan. Pada akhirnya, pada 28 September, hakim ketua pada pengadilan negeri Jakarta Selatan, Lalu Mariyun, yang memimpin majelis hakim yang beranggotakan lima orang, menolak kasus Suharto atas dasar bahwa tim dokter independen memutuskan bahwa ia terlalu sakit,

yang sifatnya menetap, untuk bisa diajukan ke pengadilan, serta membebaskannya dari tahanan kota. Kesehatannya tampak semakin menurun pada akhir 2000 dan awal 2001.

Meski ada upaya jaksa agung untuk mengajukan banding ke Mahkamah Agung guna menolak putusan tersebut, tampaknya Suharto tidak akan lagi diminta mempertanggungjawabkan secara resmi dakwaan terhadapnya. Pada awal Februari 2001, pengadilan memutuskan bahwa ia tidak akan diajukan ke pengadilan sebelum cukup sehat, membebaskannya dari tahanan kota yang diberlakukan pada November sebelumnya, serta mengharuskan negara memberinya perawatan medis. Keputusan itu praktis menutup peluang bahwa penghinaan hukum akan ditambahkan terhadap kematian politis Suharto.[]

11 Suharto dan Peninggalannya

PADA 1996, Suharto disebut sebagai orang terkuat Asia oleh majalah *Asiaweek* yang berpengaruh itu.[1] Pada 1999, orang yang sama, sakit, lemah, wajahnya cekung dan pucat, didorong di atas kursi roda masuk ke sebuah rumah sakit di Jakarta, dan tak lagi merupakan orang terkuat di kawasan itu: prestasi politiknya hancur, kejayaan-kejayaan perekonomiannya dikecam, dan menjadi sasaran kebencian dan cemoohan rakyatnya sendiri. Menjelang akhir 1997, ia diperkirakan—dan ia sendiri juga yakin[2]—merupakan kunci bagi pulihnya perekonomian Indonesia, yang dihantam oleh krisis mata uang Asia. Dua bulan setelah itu ia dianggap sebagai sumber permasalahan, dan pengunduran dirinya sangat menentukan pulihnya kesehatan perekonomian Indonesia.

Hampir sepanjang hidupnya, Suharto tampak tidak tertarik serta acuh-tak-acuh dengan politik tingkat tinggi, namun sebaliknya, ia kemudian malah menjadi "empu" politik kawasan ini. Ia berasal dari keluarga petani miskin, namun memimpin transformasi industri negerinya dan diperkirakan banyak orang memiliki kekayaan keluarga yang bernilai miliaran dolar.[3] Kontras tajam seperti ini sangat mewarnai kehidupannya; topeng publik—"senyumnya

menyembunyikan perasaannya, karena Suharto adalah orang yang tidak bisa ingkar akan pendapatnya"[4]—dan sikapnya yang suka berkelit juga memendam rasa membuat setiap upaya untuk memahaminya menjadi luar biasa mustahil.

Suharto sangat kuat dipengaruhi oleh akar budayanya di sebuah desa kecil berpenduduk padat di Kemusuk, Jawa Tengah. Keindahan pedesaan sekelilingnya, dengan sawah-sawahnya yang berair dan memantulkan matahari, dedaunan rimbun yang menyejukkan, serta latar belakang Gunung Merapi, memungkiri realitas kehidupan yang berjejal-jejal, lapuk dimakan cuaca dan melarat, dari para penghuninya. Sejak kecil Suharto sudah mengalami kehidupan yang miskin dan penuh kesukaran. Penderitaan hidup membuatnya tabah dan tahan serta, mungkin juga, berhati-hati untuk bergantung pada orang lain dalam hal apa pun. Ia juga lebih menyukai hubungan dekat dengan beberapa orang saja di mana ia menjadi tokoh dominannya. Karena lingkungannya, ia mandiri sejak kecil.

Suharto adalah orang yang luar biasa kompleksnya sekaligus luar biasa sederhananya. Secara intelektual, wawasannya sempit dan sederhana; hal ini adalah cerminan dari pendidikannya yang terbatas, ketidakberuntungannya masuk seleksi—tak seperti sebagian besar rekan militer seangkatannya, misalnya Yani—untuk memperoleh pelatihan perwira di AS pada tahun 1950-an, serta kenyataan bahwa ia baru melakukan perjalanan luar negerinya yang pertama kali pada usia 40 tahun. Karena keadaan dan, mungkin juga, kecenderungan sifatnya, ia tidak memiliki kebiasaan membaca, atau merenungkan ide-ide abstrak, maupun berteori. Ia tidak meninggalkan kumpulan tulisan seperti halnya Mao maupun Ho Chi Minh atau bahkan Mahathir, tak ada bukti yang menunjukkan pergulatannya dengan masalah-masalah intelektual, tak ada persepsi akan wawasan yang lebih luas selain tentang Indonesia itu sendiri, tidak juga tentang periode yang lebih panjang selain periode jangka pendek hingga menengah.

Bacaannya sebatas koran-koran serta laporan-laporan ringkas yang disiapkan oleh stafnya, meski ia juga suka mendengarkan radio dan menonton televisi. Salah seorang rekannya yang paling senior menyatakan kepada penulis dalam sebuah wawancara tentang upaya-upayanya memperluas wawasan minat intelektual serta persepsi Suharto akan dunia di sekitarnya. Ia menuturkan bagaimana ia meninggalkan setumpuk majalah berbahasa Inggris seperti *Time* untuk Suharto, yang mungkin bisa dibuka-buka dan dilihat-lihatnya dengan harapan dapat membuat sang Presiden tertarik. Ternyata tak ada hasilnya. Setiap minggu, bila ia mengunjungi Suharto untuk pembahasan rutin masalah negara, majalah-majalah tersebut tetap berada di tempat semula ia letakkan, tak disentuh maupun dibaca. Akhirnya, rekannya ini tidak meneruskan upayanya mendidik Suharto.

Upaya-upaya Suharto untuk memperoleh pemikiran yang lebih luas tak beranjak jauh, hanya sebatas kepercayaannya yang kokoh, yang bahkan terkesan agak kekanak-kanakan, pada pepatah-pepatah etis pemikiran mistik Jawa—atau variasinya—serta penghayatannya: kesetiaan kepada teman, kewajiban kepada bangsa, kepercayaan kepada Tuhan. Untuk menandai perayaan ulang tahun ke-40 perkawinannya, anak sulungnya, Tutut, menerbitkan buku berisi kumpulan pepatah rinci dari khasanah etis Jawa, yang tampaknya disusun oleh Suharto sendiri.[5] Misalnya adalah "Kebajikan mensyaratkan pikiran yang kuat," "Kearifan adalah hasil dari pengamatan tajam atas pengalaman" serta "Diam adalah modal. Orang yang berlidah tajam akan menderita. Siapa yang menutup mulut akan mengumpulkan kekayaan. Orang yang diam adalah seperti mercusuar" dan, sekali lagi "Negeri yang jaya memperoleh rahmat Tuhan dalam bentuk sistem negara dan sistem spiritual yang memberikan kesejahteraan kepada bangsa, tentara yang kuat, serta rakyat yang setia," "Kekayaan menunjukkan kemampuan seseorang untuk menempatkan situasi-situasi dunia di bawah kekuasaannya," dan "Engkau tidak boleh takut pada kesulitan, karena kehidupan di dunia ini sulit."

Kumpulan pepatah-pepatah ini diterbitkan demi pembangunan masyarakat pada umumnya dengan judul *Butir-butir budaya Jawa: mencapai kesempurnaan hidup berjiwa besar mengusahakan kebaikan sejati*.[6] Posisi sentral pepatah-pepatah ini dalam alam mental Suharto adalah hal yang sangat menarik. Hal ini mencerminkan pikiran yang tidak kacau oleh masalah atau hal-hal yang belum terselesaikan, pikiran yang didasarkan pada renungan batin tentang pengalaman-pengalaman pribadi kehidupan, bukan pada gagasan-gagasan orang lain, serta yang diperkuat oleh persepsi akan takdir, tugas, dan nasib.

Terbatasnya wawasan intelektual Suharto ini juga tercermin dalam bahasanya. Ia, sudah tentu, dilahirkan dan dibesarkan sebagai orang Jawa dan kemudian belajar Bahasa Indonesia karena terpaksa, cenderung berbicara dengan aksen yang khas, kental, dan telak Jawa dengan menggunakan sisipan kata-kata serta ungkapan-ungkapan Bahasa Jawa. Tidak seperti Sukarno, yang membumbui pernyataan-pernyataan publiknya dengan meminjam falsafah Jerman dan sastra Prancis, serta yang biasa berbicara dalam Bahasa Belanda dengan rekan-rekannya, Suharto sangat enggan menggunakan banyak bahasa. Karena tidak pernah mendapat pendidikan berbahasa Belanda, ia tidak banyak memahami bahasa itu, meski sesekali menggunakan ungkapan Belanda dalam laporan-laporan dan pidato-pidatonya pada awal era 1950-an. Ia memang sempat belajar Bahasa Inggris dari tamu rumahnya yang orang Australia, Clive Williams, namun, walau bisa membaca teks berbahasa Inggris dengan cukup baik, ia tidak lancar menggunakannya dalam percakapan. Ia selalu lebih suka menggunakan Bahasa Jawa dengan rekan-rekan dekatnya bila mereka adalah orang-orang yang bisa berbahasa Jawa. Bahasa Indonesia adalah bahasa keduanya.

Inteligensinya bukanlah inteligensi akademis; inteligensinya terkesan berbeda, lebih bersifat keras bak batu api, lebih instrumentalis dan strategis. Ia adalah pelajar yang pasif, sabar, tapi rakus, orang yang menyadari kekurangan-kekurangan strategis dalam pengetahuannya, dan berupaya mencari ahli yang dapat

mengisi kehampaan dalam pemahaman tersebut. Ia bukanlah orang yang suka mengutak-atik mencari jawab sendiri. Bila perlu mengetahui sesuatu, ia pergi ke orang-orang yang mengetahuinya dan menyimak mereka hingga menyerap apa yang menurutnya merupakan pengetahuan yang cukup untuk menjalankan tugas yang diperlukan.

Setelah mewawancarai sejumlah ekonom/teknokrat yang menyusun program-program ekonomi untuk memulihkan perekonomian Indonesia pada tahun-tahun awal Orde Baru, saya mendapati bahwa semuanya menceritakan hal yang sama yaitu tentang upaya Suharto untuk memahami ilmu ekonomi pada awal kekuasaannya yang panjang itu. Ia benar-benar duduk begitu saja, dengan sabar dan rajin melahap dan mencerna apa yang mereka katakan kepadanya tentang nilai tukar, inflasi, neraca pembayaran, surplus dan defisit, serta produksi pertanian dan industri.

Salah seorang teknokrat ini menyatakan kepada penulis bahwa dalam beberapa tahun pertama ketika mereka bertemu Suharto, ia akan duduk dan mendengarkan. Dengan menggunakan pulpen Parker gemuk, ia mencatat pada buku notes besar selagi mereka terus berbicara. Namun, sang teknokrat ini juga menyatakan kepada penulis, bahwa setelah beberapa tahun, ketika ia cukup menguasai apa yang perlu ia ketahui, malah ia yang berbicara, dan giliran para teknokratlah yang mengeluarkan pena untuk mencatat apa-apa yang ia minta untuk dikerjakan.[7]

Ia bisa memahami pesan yang rinci atau masalah yang rumit,[8] menguasainya, memilah-milahnya, menyusun strategi yang tepat dan, hanya bila saatnya tepat, bertindak secara kejam dan keras kepala untuk mencapai solusi yang memuaskan. Ia sangat kuat dalam melakukan kalkulasi-kalkulasi politik. Semua rekan seangkatannya sering dibuat tercengang oleh kemampuannya menguasai detail yang luar biasa banyaknya, yang kerap kali berkaitan dengan statistik, dan kemudian mengeluarkannya pada saat yang tepat, kadang-kadang beberapa bulan setelah itu, dengan akurasi yang tepat. Para menterinya sering kali dibuat takut oleh kenyataan

bahwa fakta dan angka yang mereka gunakan untuk mendukung argumen mereka kelak bisa digunakan untuk mendebat mereka bila keadaannya ternyata tidak seperti yang mereka prediksikan sebelumnya.

Ia memiliki kemampuan memetakan dan memelihara strategi—sering kali di tengah kecaman-kecaman—yang jarang salah, dan sabar menanti hingga saatnya tepat untuk bertindak. Kejeniusan strategis ini dilandaskan pada sekumpulan gagasan sederhana yang lengkap dan tak dapat dibantah, dan mirip dengan pepatah-pepatah Jawa yang ia sukai itu. Gagasan-gagasan ini mencakup komitmen menyeluruh serta pengabdian pada integritas dan pembangunan berlanjut bangsa Indonesia, pentingnya meneruskan pembinaan dan pemeliharaan peran Angkatan Bersenjata dalam politik dan masyarakat, ketidakpercayaan serta ketakutannya yang mendalam pada dampak-dampak perpecahan potensial dari materialisme, liberalisme dan, sudah tentu, komunisme, persepsi kuat bahwa rakyatnya harus menikmati tingkat kehidupan yang lebih baik (dan berterima kasih kepadanya karena telah memberikan hal itu), dan pandangan yang makin berurat-akar seiring berlalunya waktu bahwa bangsa ini membutuhkan kehadirannya sebagai pembimbing dan pengendali, dan bisa dipastikan tidak akan menemukan jalan yang benar tanpa kehadirannya.

Suharto tidak memiliki kebiasaan minum-minum. Kepribadiannya bersahaja, tidak menarik, berhati-hati, bertanggung jawab, setia—beda sekali dengan pendahulunya, Sukarno. Sesudah menikahi gadis yang agak gemuk dengan penampilan sederhana, bangsawan tapi rendah hati dan memiliki cita-cita tinggi, Siti Hartinah, pada 1947, pernikahan mereka tetap bertahan sampai kematian istrinya pada 1996. Ada cukup banyak alasan yang meyakinkan bahwa dalam kehidupan rumah tangganya, ia juga tetap setia kepada istrinya, meski sesekali ada rumor aneh tentang affairnya dengan bintang-bintang film ("saya menilai sifat 'royal'[bergaul dengan wanita tanpa nikah] itu tidak baik. Saya sendiri bisa mengendalikan diri dalam hal ini").[9] Ia tidak menyukai

kehidupan suka berselingkuh kalangan atas, minum-minum dan berpesta, yang merupakan pola hidup sebagian tetangganya yang tinggal di bilangan Menteng di sebelah tenggara pusat kota.

Satu-satunya ciri yang menunjukkan kecenderungannya pada penampilan luar yang gagah adalah kumis tipis yang sempat ia tampilkan pada akhir era 1940-an dan 1950-an, namun sesudah itu tidak lagi. Ia sama sekali tidak minum, hanya sesekali untuk memenuhi kewajiban sosialnya serta bila menemani tamunya. Ia sesekali merokok, rokok putih pada karier-karier awalnya, tapi setelah itu biasanya cerutu atau menggunakan pipa. Dan sesuai dengan sifatnya, olahraga yang ia sangat nikmati, mancing dan main golf—ia main golf tiga kali seminggu—adalah olahraga yang bersifat individual dan bukan kegiatan tim, yang menonjolkan kemampuannya untuk membentuk dan mendisiplinkan diri menghadapi lingkungan.

Suharto pada dasarnya bukanlah orang yang suka beramah-tamah; dia lebih suka menyendiri atau ditemani istri dan keluarga dekatnya. Dari Ibu Tien, ia memperoleh enam anak yang sangat disayanginya; ia malah cenderung memanjakan dan menuruti kemauan mereka ketika ia semakin tua dan sibuk serta jarang bertemu dengan mereka. Anak-anaknya juga berbakti kepadanya, walau tidak selalu berarti murni untuk membalas rasa sayangnya kepada mereka. Meski ia memiliki lingkaran teman yang sangat luas, ia lebih menyukai kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas rekan-rekan dekat yang sangat rapat hubungannya dengannya, yang membalasnya dengan pengabdian dan kesetiaan yang besar, setidaknya sampai ia tidak lagi membutuhkan mereka atau bila mereka mengkhianati kepercayaannya kepada mereka.

Ini sudah merupakan ciri Suharto sejak awal sekali. Sejumlah orang yang pernah menjadi bawahannya selama era 1940-an di akhir masa revolusi masih tetap menjadi anggota stafnya selama masa jabatannya sebagai panglima Diponegoro di akhir era 1950-an, dan cukup banyak dari mereka tetap bersamanya pada pertengahan era 1960-an. Dua kawannya yang paling dekat dan paling

menjadi buah bibir, Ali Murtopo dan Sujono Humardani, bergabung dengannya pada pertengahan era 1950-an dan melayaninya dengan penuh pengabdian hingga era 1970-an ketika ambisi politik di satu sisi serta penilaian buruk di sisi lain membuat mereka dikesampingkan.

Terhadap orang-orang yang ia temui, ia selalu menunjukkan sikap sopan dan sering kali memikat. Ia jarang memperlihatkan perasaan juga niatnya menggunakan ekspresi wajah atau isyarat-isyarat tubuhnya; ia kerap menampilkan matanya yang menyipit dan nyaris tertutup, serta senyum lebar yang menjadi ciri khasnya, sehingga biografi yang disetujuinya diberi judul *The smiling general*.[10] Ia sangat senang berbicara dengan warga desa tentang hal-hal yang dekat dengan kehidupan mereka: "matanya akan bersinar, ia pun sering kali tertawa lepas, dan suka mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggoda."[11]

Tak banyak orang, kecuali di tahun-tahun terakhir, pernah melihatnya mengungkapkan kemarahannya secara terbuka. Namun, ia juga keras kepala dan keras hati. Sementara memang benar bahwa ia kerap tidak bisa mengambil keputusan dengan cepat—berulang kali menghitung untung-ruginya suatu tindakan dibanding tindakan lain—ia sulit didesak untuk mengubah pendiriannya bila sudah mengambil keputusan. Sewaktu masih berdinas di ketentaraan, ia sangat kentara menunjukkan ketidaksenangannya ketika dikesampingkan, yaitu dengan tidak hadir pada pertemuan-pertemuan (seperti ketika taktik-taktik militernya diganti oleh seorang perwira atasannya di Makasar pada tahun 1950) atau dengan menemukan cara-cara licin untuk mengabaikan atau mengelakkan kehendak atasannya. Sukarno tidak meleset ketika menyebutnya sebagai orang yang "keras kepala". Dan ia juga bisa membalas dengan kejam mereka yang menurutnya mengkhianati dirinya atau tujuannya.

Banyak sudah disebut tentang sifat kejawaan Suharto. Selama puncak-puncak kekuasaannya, lewat terbitan pers kita sering disuguhi, bahkan dalam sumber-sumber yang lebih bersifat ilmiah,

pendapat bahwa Suharto bagaimana pun juga adalah orang Jawa. Tampaknya, ada dua benang merah dominan tentang wacana ini. Yang pertama adalah bahwa ia mewakili sosok lama era para raja kuno Jawa yang diresapi oleh konsep-konsep feodal kuno. Dan memang, ia secara sadar tampaknya berupaya mereorganisasi Indonesia yang modern menjadi seperti sebuah kerajaan Jawa, baik dalam bentuk maupun semangatnya.[12] Yang kedua adalah bahwa ia entah bagaimana jadi terjebak dalam mistisisme Jawa, tampak dari keengganannya mengambil tindakan sebelum tanda-tandanya tepat, memberi makna rahasia pada kejadian-kejadian yang tampak sehari-hari atau alamiah, dan tak hentinya meminta nasihat para peramal dan orang pintar tentang ramalan masa mendatang, atau meluangkan waktu untuk bersemedi dan berpuasa di gua-gua gunung yang berkabut di Jawa Tengah.[13]

Aspek menarik dari cara berpikir—yang dijuluki oleh seorang ilmuwan sebagai "uraian budaya yang disarikan"[14]—tentang Suharto ini adalah bahwa begitu banyak orang Indonesia yang menerimanya begitu saja. "Anda mesti memahami," demikian mereka menyatakan kepada saya, "bahwa Suharto adalah orang Jawa," yang tampaknya mengajak saya untuk menafsirkannya berdasarkan sistem-sistem yang memiliki makna tersendiri yang sama sekali asing bagi saya dan, tampaknya, bagi mereka yang menasehati saya. Penegasan seperti ini kadang-kadang membuat para analis Barat bingung dan nyaris panik; seorang peneliti berkomentar bahwa, "bagi analis yang mencoba memahami Suharto, perlunya berpindah-pindah dari konsep-konsep politik kekuasaan universal ke konsep-konsep yang khas Jawa merupakan keprihatinan yang terus membayangi dan sangat membingungkan."[15]

Saya sendiri berpandangan bahwa pemusatan pada hal yang eksotis pada dasarnya hanya menyesatkan dan mengaburkan, hampir tak ada gunanya, dan lebih banyak menimbulkan masalah alih-alih membantu menjelaskan persoalan. Suharto memang sudah pasti adalah orang Jawa, jika dengan demikian maka berarti gaya pemikiran tertentu yang ditandai oleh perenungan, penghitungan

dan penguasaan batin ("mendekatkan batin kita dengan pencipta kita")[16] yang menampakkan dirinya dalam aturan-aturan moral maupun praktis tertentu. Struktur kepribadian dan emosinya, susunan kerangka berpikirnya, serta persepsinya tentang makna dan arah historis memang sangat dipengaruhi oleh adat dan kepercayaan Jawa.[17]

Ia mengaku ahli dalam agama Jawa; gayanya bisa disebut khas—dan pada dasarnya—Jawa. Kesungguhan dan kuatnya ia terikat pada akar-akarnya dicontohkan pada 1985 ketika istana Solo rusak berat akibat kebakaran. Suharto menyumbangkan separo dari gaji resminya selama lima bulan bagi dana pemulihannya serta kemudian menyuruh Sujono Humardani meresmikan pembangunan barunya. Namun, pada akhirnya, ke-Jawa-annya ini bukan berarti menjadikan pola tindakan maupun sikapnya tidak bisa dijelaskan dengan cara lain, dan saya tidak menemukan bukti kuat bahwa ke-'Jawa-an'-nya memengaruhi keputusannya secara mendasar melalui cara-cara yang membuatnya tidak dapat dijelaskan.

Suharto sendiri skeptis dengan pendapat-pendapat Jawa-sentris seperti ini. Menurut pandangannya, "sifat kodrat manusia yang universal, sebetulnya dimiliki juga oleh semua negara di mana pun, apakah di Eropa, Asia, Amerika, atau di Rusia." Ketika dikemukakan bahwa ia terlalu dipengaruhi oleh gagasan-gagasan Jawa yang berbau mistikal dari penasihat dekatnya, Sujono Humardani, Suharto menjawab:

> Memang benar, Djono [Sujono] suka datang pada saya dengan membawa buku berisi tulisan. Dia mempunyai kepercayaan. Maka ia suka menyampaikan sarannya. Saya terima saja sarannya, untuk menyenangkan hatinya. Tidak saya telan begitu saja sarannya itu. Saya analisa. Saya pertimbangkan, apakah rasional atau tidak sarannya itu. Jika rasional, jika masuk akal, maka saya terima. Jika tidak, maka tentulah tidak saya pakai sarannya itu.[18]

Nasihat yang sering ia minta dari para guru mistikal mungkin juga pernah dipertanyakan. Sekali lagi, ia menjawab bahwa

> kita tetap menggunakan alat kelengkapan hidup kita yang diberikan Tuhan kepada kita. Kemudian kita menyaring semua keterangan dan pendapat-pendapat yang datang dari luar. Lantas kita tentukan beberapa alternatif sebelum mengambil keputusan. Kita pilih yang paling baik di antara alternatif-alternatif yang ada itu. Dengan begitu tidak berarti kita harus bersemedi, atau '*ngobong menyan*' dan sebagainya. Gunakan rasio kita. Pakai otak kita. Gunakan rasa kita Gunakan panca indra kita. Kalau dalam perang kita masih mencari dukun, kita bisa mati ditembak duluan.[19]

Suharto memiliki persepsi seorang sejarawan tentang masa lalu—yang cocok dengan pemahamannya mengenai nasib dan takdir—di mana ia, sudah tentu, merupakan ujung tombaknya. Pandangannya tentang sejarah Indonesia, dan tentang orang-orangnya, adalah pandangan yang relatif sederhana dan tidak ruwet. Indonesia ditakdirkan memperoleh kemerdekaannya karena kesatuan juang dari rakyatnya; "Sejarah Perang Kemerdekaan," komentarnya, "membuktikan dengan jelas bahwa kekuatan yang sebenarnya dari Republik terletak di tangan Rakyat. Rakyat sumber kekuatan kita! Rakyat modal utama perjuangan bangsa kita."[20] Tentara sendiri berasal dari rakyat. Namun, rakyat itu sendiri memiliki sikap aneh. Mereka dapat disesatkan oleh pandangan-pandangan palsu yang merayu tentang dunia serta diseret oleh para pemimpin sipil yang ambisius. Karena kelemahan dan keterpecahan para pemimpin sipil revolusi yang menyerah kepada Belanda pada saat ujian terbesar Republik, Angkatan Daratlah yang pada akhirnya memperoleh kemenangan melawan Belanda. Kemenangan ini telah memberikan status dan tugas khusus kepada Angkatan Darat dalam urusan-urusan Republik yang merdeka. Dengan merebut kemenangan revolusi, tentara juga menjadi pen-

jamin apa yang dijanjikan oleh kemenangan itu: Indonesia yang bersatu dan sejahtera."

Sejarah Indonesia pascarevolusi pada mulanya juga merupakan kisah yang banyak berisi peluang-peluang yang dibiarkan lewat, ketika pihak sipil yang kembali berkuasa menghabiskan energi mereka dalam pertengkaran dan kepentingan-kepentingan sempit yang membawa negeri mendekati kehancuran perekonomian serta perpecahan fisik menjelang akhir era 1950-an, dan ketika rakyat, dilanda kegelisahan dan mudah dipengaruhi, terseret ke berbagai arah dan perpecahan. Baru pada 1965 Angkatan Darat bisa menunjukkan kembali peran tepatnya dalam menyelamatkan rakyat dari para pemimpin mereka sebelum itu dan dari diri mereka sendiri, sebuah proyek yang diwujudkan dalam pembangunan Orde Baru. Peran tersebut bertujuan ganda: untuk memastikan kesatuan dan stabilitas Republik, apa pun yang terjadi, dan untuk bertindak sebagai alat bagi pergerakan bangsa menuju kesejahteraan. Oleh karena itu, meski lahir dari rakyat, Angkatan Darat telah menjadi alat bagi perwujudan aspirasi-aspirasi nyata rakyat. Mereka harus menunjukkan kepada rakyat makna dari persatuan, upaya meraih persatuan itu, dan untuk memainkan peran paternalistik dalam mengangkat nasib rakyat secara material dan spiritual. Suharto sendiri—menurut pandangannya sendiri—adalah perwujudan dari konsep ini; hal ini seperti tersurat dalam biografinya yang sangat egosentris, juga dalam keenam jilid buku hariannya yang menyamakan keberhasilan karier kepresidenannya sendiri dengan keberhasilan negara Indonesia.

Ini sekaligus merupakan pandangan yang sangat konservatif dan congkak tentang sejarah Indonesia. Congkak karena, sementara pandangan ini konon didasarkan pada aspirasi rakyat, pada kenyataannya malah tidak memercayai rakyat itu sendiri. Rakyat itu seperti anak-anak, mereka menjadi kelompok yang diobjektifkan. Dan Suharto harus berupaya memberi mereka apa yang sebenarnya mereka butuhkan demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Mereka yang berniat membentuk masyarakat Indonesia dengan

cara-cara baru yang membahayakan, misalnya bagian dari "rakyat" yang menjadi anggota PKI pada 1965–66, dirampas hak-hak kemanusiaan dasarnya. Mereka tidak bisa diterima lagi dalam dunia politik karena mereka tidak dapat menerima dasar-dasar dari tatanan konservatif yang ingin dijaga dan dibangun oleh Suharto. Mereka hanya layak dibasmi atau disingkirkan dari arena dengan kekejaman yang tak kenal belas-kasihan.

Namun, bagian dari "rakyat" yang boleh dibilang tidak merupakan bagian dari konspirasi PKI, juga menjadi sasaran ketidakpercayaan dan ketakutannya karena cara-cara mereka yang aneh. Beberapa tahun kemudian, Suharto menyebut bahwa penyebab pembunuhan-pembunuhan tersebut adalah "situasi konflik yang sangat tajam—antara pemimpinan Nasional dan Rakyat. Kejadian menjadi sangat tegang dan tidak menentu. Ribuan korban jatuh di daerah-daerah karena rakyat bertindak sendiri-sendiri, juga karena prasangka-prasangka buruk antar golongan yang selama bertahun-tahun ditanamkan oleh praktek-praktek politik yang sangat sempit."[21]

Wujud serupa dari sikap ini muncul ketika Suharto berupaya, tak lama setelah itu, membela keputusannya yang berdasarkan Supersemar untuk melarang PKI, dengan mengatakan bahwa langkahnya itu perlu sebagai sarana untuk menegakkan kembali otoritas pemerintah serta mengendalikan kekerasan yang terjadi. "Pembubaran PKI harus saya lakukan ... Pertentangan pendapat yang makin tajam antara Presiden Soekarno dan rakyat telah memerosotkan kewibawaan pemimpinan tertinggi pemerintahan negara." Oleh karena itu, hanya dengan pembubaran PKI "ketertiban umum dapat dipulihkan, rasa keadilan dapat dipenuhi, dan persatuan rakyat dapat dipulihkan."[22]

Ketidakpercayaan Suharto kepada rakyat sudah tentu berlanjut. Dengan logika serupa, rekayasa kemenangan Golkar pada pemilihan umum 1971 menandai dan meramalkan bentuk masa depan politik dan masyarakat Indonesia. Rakyat pada dasarnya tidak dapat dipercaya dalam menyampaikan mandatnya. Sebalik-

nya, keputusan pemilihan umum, seperti yang tampak, juga merupakan hasil dari kelicikan yang tak kalah melecehkan dan lihainya. Dengan cara yang sama, ia membenarkan penindasannya atas kelompok-kelompok mahasiswa menjelang pemilihan presiden 1978 dengan menyatakan bahwa "ABRI tidak akan membiarkan sekelompok kecil orang yang secara tidak bertanggungjawab menyalakan percikan-percikan api akhirnya dapat membakar hangus seluruh tubuh bangsa."[23] "Rakyat" dengan demikian adalah seperti massa yang diam, mereka hanya bisa mencapai kemanusiaan sejati mereka hanya bila dibuat menjadi pasif; satu keadaan yang mudah dibentuk melalui kepemimpinan yang kuat dan terfokus—yang dicontohkan oleh dirinya sendiri.

Pandangan sejarah Suharto sangat konservatif karena didasarkan pada pendapat yang tidak berubah tentang masyarakat Indonesia. Jauh hari sejak 1945 saja landasannya sudah diletakkan—visi korporatis dan paternalistik Konstitusi 1945 serta ideologi Pancasila negara. Masyarakat Indonesia, dengan demikian, tidak akan berubah dalam arti apa pun: mereka yang ditakdirkan untuk memerintah memikul tugas memperbaiki nasib rakyat di mana pun mereka berada, bukan mengubah bangunan dasar masyarakat—bertindak demikian akan mengundang risiko membangkitkan banyak setan yang dapat mencabik-cabik serta menceraiberaikan masyarakat.

Lalu, bagaimana Suharto bisa berhasil memperjuangkan tujuannya? Dari awal telah dikatakan bahwa kita harus memberi perhatian yang layak pada pelawak yang ada di kalangan para pelaku sejarah: nasib mujur. Pada 1945, Suharto sama sekali belum dikenal, tentara berpangkat rendah pada apa yang disebut sebagai Pembela Tanah Air yang diciptakan Jepang. Namun, 23 tahun kemudian ia menjadi presiden dari bangsa kelima terbesar dunia, dan ia tetap menduduki jabatan itu selama 30 tahun berikutnya.

Ia bernasib mujur, menanjak dewasa pada saat terjadi perubahan sosial serta mobilitas yang luar biasa, akhir Perang Pasifik serta dimulainya apa yang pernah disebut oleh banyak warga

Indonesia sebagai "revolusi fisik" mereka. Terlebih lagi, ia bernasib mujur berada di dan sekitar Yogyakarta, pusat perjuangan revolusioner, serta berada dekat dan akrab dengan para pemimpin politik dan militer bangsa: Sukarno, Syahrir, Hatta, Sudirman, Nasution, dan yang lainnya. Pada era 1950-an, ia bernasib mujur; masa jabatannya sebagai panglima Diponegoro di Jawa Tengah berbarengan dengan pernyataan keadaan negara dalam perang dan bahaya; satu hal yang memungkinkannya untuk mulai menjalankan seni kekuasaan politik-militer.

Ia juga bernasib mujur dengan adanya intervensi AS dalam krisis Irian Barat yang terjadi persis ketika ia hendak mengerahkan tentara dalam skala besar untuk menyerang Belanda—hal yang pasti akan membuahkan bencana militer serta mungkin juga bencana politik. Ia bernasib mujur ketika kebetulan berada di Jakarta sebagai perwira senior yang menguasai langsung pasukan pada pagi 1 Oktober 1965, saat terjadinya aksi kudeta.

Ia bernasib mujur karena kenaikannya ke puncak kekuasaan terjadi persis pada masa-masa Perang Dingin paling beku, ketika di tahun yang sama AS melibatkan pasukan darat ke Vietnam, dan ketika kemunculannya disambut dan didukung oleh AS sebagai kabar terbaiknya di Asia selama bertahun-tahun, dan ketika pembunuhan-pembunuhan kejam rezimnya atas kaum komunis dan yang lainnya bisa begitu saja diabaikan oleh komunitas dunia sebagai tindakan yang patut disayangkan namun perlu diambil.

Ia bernasib mujur ketika masa yang paling goyah dari kekuasaannya, awal era 1970-an, berbarengan dengan membubungnya harga minyak, bukan saja menjadi "durian runtuh" bagi keperluan patronase politik, tapi juga dalam mengonsolidasi dan memacu proses pembangunan perekonomian dalam negeri yang pada akhirnya kelak melahirkan sebutan "legitimasi berkat prestasi" baginya. Ia juga bernasib mujur, ketika harga minyak anjlok lagi pada pertengahan era 1980-an, ia dapat meloncat naik lokomotif mukjizat perekonomiaan Asia.

Nasib mujur sudah tentu penting. Namun, keterampilan juga penting. Peran apa yang dimainkan oleh faktor keterampilan dalam kelanggengan Suharto yang luar biasa itu? Dan keterampilan-keterampilan apa saja—dengan keunggulan yang sedemikian rupa—yang digunakannya sehingga dapat bertahan begitu lama?

Pertama-tama, ia memiliki kapasitas untuk menarik orang-orang yang memiliki bakat besar. Orang-orang ini umumnya terdiri atas dua jenis. Mereka adalah orang-orang yang bisa menembus prosedur politis dan birokratis dalam mencapai tujuan tanpa terlalu dipusingkan oleh masalah etis atau cara yang digunakan. Yang paling utama di antara orang-orang ini, sudah tentu, adalah Ali Murtopo, orang 'operasi khusus'-nya yang cemerlang, kenes, dan usil, yang berperan penting dalam keberhasilan-keberhasilannya mengakhiri Konfrontasi, mengarahkan protes-protes mahasiswa yang sangat menentukan dalam menumbangkan Sukarno, dan membentuk sistem politik dan Golkar—wahana untuk memenangkan pemilihan umum—yang membuat Suharto dapat meraih jabatan presiden tanpa perlawanan berarti pada 1973, 1983, 1988, 1993, dan 1998.

Lalu ada pula para ahli dari kalangan sipil, yang mana yang paling berpengaruh adalah para teknokrat seperti Wijoyo, Subroto, Emil Salim, dan Sumitro, yang menyusun kerangka kebijakan yang pertama-tama memungkinkan perekonomian Indonesia yang hancur itu pulih kembali dan selamat dari potensi bencana pada pertengahan era 1980-an. Ciri khas kedua kelompok pendukung ini adalah pengabdian luar biasa mereka kepada Suharto sebagai individu. Ia adalah pemimpin yang paling karismatis dalam arti populer dan, hingga tahap-tahap akhir kekuasaannya, ia jelas mampu menarik otak-otak serta tekad paling baik dan mengilhami mereka dengan caranya yang nyaris menghipnotis dalam mendominasi serta membuat orang tunduk dan hormat.

Yang kedua, kita harus melihat keterampilan hebat Suharto dalam membangun dan memelihara mesin patronase yang rumit yang memastikan bahwa semua pelaku dalam Orde Baru secara

praktis terkompromikan dan berutang budi kepadanya sehingga mereka tidak memiliki ruang manuver politik. Hal ini dicapai melalui pembagian uang minyak secara profesional yang dikelola oleh raja minyaknya, Ibnu Sutowo, dan melalui alokasi piawai peluang-peluang bisnis. Ketika mereka yang tidak puas akan kebijakan-kebijakan dan kepemimpinannya mulai menjadi masalah, mereka pelan-pelan digeser ke bidang-bidang yang memberikan status serta peluang bisnis yang sulit mereka tolak.

Yang ketiga, dan erat kaitannya dengan strategi patronasenya, adalah kezalimannya yang luar biasa. Para lawan politiknya menyadari bahwa bila mereka tidak bisa disuap, mereka akan menanggung hukuman yang tiada henti. Nasib segelintir jiwa-jiwa tangguh yang memilih jalan ini, seperti perwira Siliwangi, H.R. Dharsono, merupakan isyarat kepada yang lain agar tidak melakukan hal yang sama. "Suharto itu pendendam," ujar Ali Sadikin; "mereka yang mengenalnya menyatakan bahwa ia pendendam."[24]

Kezalimannya terhadap orang-orang yang berani mengganggu ketenangan Indonesia Orde Baru dicontohkan lewat pembunuhan-pembunuhan Petrus pada awal era 1980-an. Kemampuannya untuk menimbulkan rasa takut yang nyata pada orang sekelilingnya adalah ciri dari caranya berkuasa serta menggambarkan kekuatan pribadinya. Seorang tokoh militer senior, misalnya, yang sudah berniat hendak mengemukakan kekhawatirannya akan arah perkembangan Orde Baru, menyatakan bahwa ketika duduk berhadapan dengannya, ia merasa begitu takut sehingga hanya bisa membahas masalah rutin dengan Presiden sebelum memutuskan untuk cepat-cepat meninggalkan rumah di Jl. Cendana itu. Seorang menteri kabinet lainnya, Yuwono Sudarsono, berbicara cukup menggugah tentang "mencekamnya kebungkaman [Suharto]"; "ia akan menatap kita langsung dan menimbulkan rasa kagum ... Itu lekat dengan kehadiran dan tatapannya. Ia melihat langsung menembus diri orang yang dihadapinya. Setiap lima tahun, seribu orang berkumpul di MPR dan tak ada satu pun yang cukup memiliki keberanian untuk berdiri dan mengatakan, 'Cukup'".[25]

Yang keempat, kita perlu menyadari keberhasilan strateginya dalam mengorporatisasi Indonesia. Suharto tidak pernah membaca literatur ilmu politik maupun bisnis tentang korporatisme, namun yang pasti ia adalah 'empu' dalam penerapannya. Kebijakan korporatismenya, yang diperkaya dan diterapkan oleh para ahli ideologinya, pada dasarnya berasal dari dirinya sendiri, didorong oleh konsep-konsep yang dibangun dengan wawasan sempit tentang masyarakat Indonesia seperti yang telah saya sebutkan.

Apa yang diinginkannya adalah sebuah masyarakat bernegara di mana kekuasaan mengalir dari atas—tidak boleh ada ruang bagi tantangan yang berarti di antara para pelaku politik. Dengan demikian, partai-partai politik dari tipe-tipe liberal Barat pun digilas. Sebagai gantinya, Suharto merekayasa organisasi politik yang perannya adalah memajukan kepentingan nasional yang sudah diciptakan, bukan menentangnya.

Akar-akar intelektual gagasan ini belum sepenuhnya jelas; beberapa ilmuwan menganggap hal itu sudah ada pada konsep-konsep fasis yang ditularkan ke wilayah Hindia-Belanda di era 1920-an dan 1930-an, sementara ada lagi yang melihatnya sebagai bagian dari konsep-konsep organik Jawa tentang kepemerintahan. Terserah mana yang benar, pada kenyataannya negara Orde Baru dibangun di atas dasar yang satu ini—didukung oleh Angkatan Darat dan diikat menjadi satu oleh jaringan patronase, serta secara ideologis dilumpuhkan oleh konsepsi-konsepsi yang sangat sempit atas Pancasila sebagai ideologi negara, yang membuat kecaman terhadap negara Orde Baru sama artinya dengan pengkhianatan—yang membuat kehadiran oposisi efektif menjadi praktis tidak mungkin.

Yang kelima, kita perlu mengakui keterampilan-keterampilan strategis dan politis Suharto yang luar biasa. Ia adalah 'empu' dalam kalkulasi-kalkulasi yang detail. Ia tidak akan menumpas lawannya bila sebelumnya melihat ada peluang untuk membujuknya. Dalam memerangi musuh-musuhnya, ia selalu berhati-hati dengan pertama-tama mengucilkannya sehingga mereka tidak

mampu memperoleh dukungan dalam jumlah yang berarti. Ia juga selalu sabar, dengan menguji situasi dulu, mengukur kekuatan dan kelemahan, dan mencari-cari keunggulan. Kalau ia sudah sampai pada arah tindakannya, ia melancarkan pukulan secara tidak terduga dan dengan cara yang mematikan. Tak pernah ada orang yang dapat bangkit kembali atau merehabilitasi diri sendiri bila Suharto sudah mengambil tindakan terhadap dirinya. Ketika ia merasa tidak pasti, ia kerap mengirim pendukung-pendukung yang berbeda ke kalangan-kalangan yang jelas-jelas berlawanan dengannya, dengan menilai dampak dari misi mereka, dan dengan demikian membuat lawan-lawannya muncul ke permukaan, menguji layak-tidaknya sebuah strategi, dan kemudian memetik keunggulan dari situasi yang berkembang demi keuntungannya.

Di tahun-tahun terakhirnya, ia mulai kehilangan satu-persatu—bahkan merugikan dirinya sendiri—kemampuan-kemampuan ini. Cintanya yang tak pernah padam pada orang-orang yang dekat dengannya serta keluarganya membuatnya melindungi dan memperkuat hak-hak istimewa bisnis yang berlebihan yang ia berikan kepada anak-anaknya—hak untuk jalan tol, hak impor khusus untuk barang-barang konsumen, gagalnya mobil Timor yang membawa bencana itu—meski itu membuatnya membayar mahal secara politis.

Wafatnya istrinya, Ibu Tien, yang merupakan penjalin jaringan, penyusun strategis, pengawas, dan pendisiplin anak-anaknya, mungkin memengaruhinya secara lebih dalam dan lebih menentukan ketimbang yang diketahui publik. Kelanggengan politisnya menandakan bahwa ia berhasil melepaskan diri dari kelompok ketat para pendukung yang telah merawatnya selama tahap-tahap awal kekuasaannya; ketidakmampuannya untuk berkomunikasi secara efektif dengan generasi yang tumbuh menandakan bahwa ia menjadi semakin terkucil dari arus-arus politik yang lebih dalam.

Kedudukannya yang terkemuka dan tinggi itu saja, belum lagi isolasi akibat kekuasaannya yang sempurna dalam dunia politik Indonesia, membuatnya semakin terganggu oleh kecaman yang

disengaja atau tidak. Sikap dingin, menguasai diri, dan tenang pun digantikan oleh sikap yang semakin mudah marah dan tidak peka. Jaringan patronase yang menjamin tahun-tahun awalnya pun mulai terurai dan berumbai karena tidak mampu memikul beban ketamakan anak-anaknya yang kian menjadi-jadi itu. Tapi, kalkulasi politiknya masih tetap kuat— terlihat dari penempatan Habibie pada kursi wakil presiden, dengan keyakinan bahwa tidak akan ada yang berani berpikir untuk menggulingkannya bila Habibie merupakan alternatif dirinya—meski mulai bolong-bolong, terutama ketika perekonomian mulai ambruk secara besar-besaran pada 1997.

Ironi dari semua ini adalah bahwa ia terpaksa mengundurkan diri akibat hilangnya dukungan dari dua pilar rezimnya yang langgeng itu: Angkatan Darat yang dengan berat hati mengakui bahwa saatnya sudah tiba, dan para menteri perekonomiannya—para wakil modern dari para teknokrat yang sedemikian lama ia andalkan dalam memperoleh kearifan.

Lalu apa yang dicapainya? Menurut saya, warisan kuat Suharto kelak tidak diragukan lagi adalah pertumbuhan ekonomi luar biasa yang dicapai selama pemerintahannya. Tak lebih dan tak kurang, kebijakan-kebijakannya yang berpandangan jernih serta disiplin yang ia terapkan (terlepas dari kekaburan sesekali dalam penerapan-penerapannya) membawa Indonesia, dari sebuah "negeri miskin dan mandeg"[26] menuju dunia modern.

Prestasinya semakin mencengangkan jika melihat sejarah pertumbuhan perekonomian Indonesia yang banyak bolongnya itu. Masa kepemerintahannya mungkin merupakan masa pertumbuhan dan kemakmuran yang paling lama dalam sejarah Indonesia, dan mendatangkan tingkat kemakmuran serta harapan yang sebelumnya hanya merupakan mimpi bagi jutaan rakyat Indonesia.[27] Terlebih lagi, apa pun kerugian yang disebabkan oleh korupsi, sebagian besar dari pertumbuhan itu disalurkan ke dalam investasi produktif, perluasan infrastruktur fisik dan komunikasi, pendidikan, keluarga berencana, pengembangan pertanian dan industri. Begitu besarnya

prestasinya sehingga kerugian yang disebabkan oleh kebangkrutan keuangan 1997–98—yang menurut Suharto disebabkan oleh kurangnya sistem yang tepat serta "orang-orang berbakat" dalam menangani pertumbuhan cepat di akhir era 1980-an serta awal 1990-an[28]—tak banyak membawa dampak pada prestasinya secara keseluruhan.

Di bidang politik, prestasinya kurang begitu mencolok. Ketika ia naik ke kekuasaan, Indonesia secara politis sedang berantakan, menghadapi masalah pertentangan ideologi yang menggelora serta ketidakharmonisan. Ketika ia meninggalkan arena politik, kekacauan yang melanda negeri membuat keadaan menjadi praktis sulit diperintah. Berkat keterampilan-keterampilan politiknya, di antara kedua periode tersebut, ia berhasil menciptakan periode ketertiban politik yang bertahan lama serta relatif tenang yang belum pernah dialami negeri itu sejak masa-masa jaya kolonialisme Belanda. Namun, tatanan itu diciptakan dengan biaya besar.

Tatanan itu terselenggara lewat pemberlakuan serangkaian gagasan semu dan represif yang meniadakan pluralisme serta melalui rekayasa kerangka politik paternalistik yang tidak dapat mengakomodasi perubahan. Rezim itu mencapai puncak prestasinya dalam penerapan konsep korporatisme Pancasila pada era 1980-an. Mungkin benar bahwa Indonesia membutuhkan beberapa kebijakan otoritarianisme kasar kalau hendak muncul secara utuh dari pergolakan 1965–66.

Namun, roh politik Orde Baru tetap saja menaruh kecurigaan kuat terhadap rakyat yang mereka katakan layani, dengan tanpa ampun memampatkan kehidupan mereka mengikuti pola-pola yang dinilai rezim terbaik untuk memajukan kehidupan mereka yang sebenarnya (yang beda dari yang dibayangkan). Dan oleh karena itu, sudah tentu, dalam mencapai tujuan, negara secara berkala dan sistematis harus bertindak keras terhadap rakyatnya.

Masyarakat bernegara seperti ini memiliki tiga cacat mendasar yang bukan saja menumbangkan penciptanya tapi, lebih penting lagi, juga menghalau Indonesia ke masa reorientasi yang

panjang dan menyengsarakan dengan kepergiannya. Cacat pertama adalah keterpakuannya. Ketika tujuan negara dan masyarakat Pancasila kurang lebih sudah tercapai pada pertengahan era 1980-an, sisa pekerjaan yang harus dilakukan adalah penyesuaian-penyesuaian teknis terhadap tantangan-tantangan baru yang, begitu asumsinya, akan bisa dikelola dalam kerangka tatanan yang ada. Pandangan seperti ini, pada kenyataannya, menutup mata terhadap skala keberhasilan Orde Baru dalam membentuk Indonesia yang sama sekali baru, serta benar-benar tidak mampu menanggapi berbagai tekanan baru yang muncul dari keberhasilan itu: para pekerja yang mencari kebebasan menghimpun diri serta kehidupan yang lebih manusiawi, kelas menengah yang melancarkan tuntutan-tuntutan mereka bagi transparansi serta tanggung jawab yang lebih besar untuk menjamin perolehan-perolehan material baru mereka, para mahasiswa yang mencari konsep-konsep reformasi awal, kaum muslim yang menuntut agar aspirasi-aspirasi keagamaan mereka ditanggapi serius oleh negara, negara-negara lain dan badan-badan internasional yang menginginkan agar Indonesia mengindahkan masalah-masalah hak asasi manusia. Batas-batas beku korporatisme Orde Baru jelas-jelas tidak bisa selamanya mengakomodasi riuhnya tuntutan dari keragaman yang muncul ini. Sehubungan dengan hal ini, Orde Baru Suharto menggambarkan penolakan terhadap perubahan, serta kegagalan sistematis dalam menghadapi tantangan-tantangan politis yang merupakan konsekuensi yang tak terhindarkan dari pembangunan-pembangunan sosial dan ekonomi yang mereka hasilkan.

Yang kedua, dominasi Suharto atas Orde Baru, serta gaya kekuasaannya yang khas, praktis membuat mesin politik dan birokratis Orde Baru tidak akan bisa mencapai kokohnya kelembagaan dan kelanggengan yang independen, juga kemampuan untuk mengawasi pelaksanaan kekuasaan pribadinya. Dengan keruntuhan akhir dari mandatnya, tekstur rapuh mesin negara pun serta-merta mulai terurai. Menurut persepsi umum, Suharto sepanjang periode itu adalah negara; tugas menggentarkan dalam mem-

bangun kelembagaan menunggu para penggantinya—yang tidak memiliki pengalaman dalam kepemimpinan karena dominasinya yang terlalu kuat.

Yang ketiga, artifisialnya pemikiran Orde Baru itu sendiri, serta totalnya kekakuan yang digunakannya dalam menerapkan pemikiran itu, membuat Indonesia menjadi gurun gagasan politik serta benar-benar tertinggal identitasnya. "Menurut saya, itulah kejahatan terburuk Suharto," ujar Buyung Nasution, "bahwa ia telah membuat orang-orang Indonesia menjadi takut untuk berpikir, takut untuk mengungkapkan pendapat mereka."[29] Suharto tidak dapat seluruhnya dipersalahkan atas perkembangan ini. Dan memang, pendahulunyalah yang mulai menggerakkan roda-roda kehampaan ideologis. Namun, dalam menciptakan dan menerapkan, secara gigih dan kaku, visi bekunya akan masyarakat Pancasila—visi yang tidak memiliki kandungan moral dan tidak memberikan arah yang dapat dipercaya dalam melangkah ke depan, serta yang hanya mengupayakan pembatasan politik—Suharto sangat merugikan negerinya.

Masalah-masalah penting yang sangat mendasar perihal identitas dan arah bangsa Indonesia tidak ditangani dengan cara bermanfaat; masalah-masalah ini diabaikan begitu saja karena khawatir akan dampak-dampak yang mungkin timbul atas penanganannya. Hasilnya sekarang, setelah Orde Baru menguap, adalah Indonesia sebagai bangsa yang terkatung-katung, tanpa landasan, tanpa persepsi jelas akan apa yang mempersatukannya atau peran dan tujuannya kelak, tanpa visi yang disepakati akan arah mana hendak berjalan serta bagaimana sebaiknya melakukan perjalanan tersebut. Oleh karena itu, sehubungan dengan hal ini, tidak mengherankan bila persepsi kedaulatan yang defensif, yang dibesar-besarkan serta mudah dibangkitkan amarahnya, begitu dominan dalam Indonesia kini.

Warisan paradoksikal kekuasaan Suharto adalah bahwa transformasi-transformasi yang coba ia batasi adalah akibat langsung—walau awalnya tidak dimaksudkan demikian—dari upaya-upayanya

melakukan modernisasi sosial dan ekonomi. Masalah paling serius bagi Indonesia adalah bahwa tidak ada pemimpin yang tampak dapat menggabungkan keterampilan-keterampilan politik dan strategi Suharto dengan pemahaman yang lebih luas dan manusiawi tentang dunia serta posisi-Indonesia yang tepat di dalamnya.[]

Daftar Singkatan

AACMI	*Algemeen-Archief van de Centrale Militaire Inlichtingendienst* (NEFIS)
ABRI	Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
ADC	*aide-de-camp*
AJI	Aliansi Jurnalis Independen
Akabri	Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Ampera	Amanat Penderitaan Rakyat
Ansor	Organisasi pemuda Nahdlatul Ulama
APEC	*Asia Pacific Economic Cooperation* (Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik)
APRA	Angkatan Perang Ratu Adil
APRIS	Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat
ASEAN	*Association of South East Asian Nations*
ASEM	*Asia–Europe Meeting*
Aspri	Asisten Pribadi (untuk Suharto)
Babinsa	Bintara Bina Desa
Badesa	Pengembangan Desa
Bais	Badan Intelijen Strategis

Bakin	Badan Koordinasi Intelijens Negara
Bakorstanas	Badan Koordinasi Stabilitas Nasional
BKKBN	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
Banpres	Bantuan Presiden
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BFO	*Bijeenkomst voor Federale Overleg* – Majelis Permusyawaratan Federal
BIA	Badan Intelijen ABRI
Bimas	Bimbingan Massal
BKR	Badan Keamanan Rakyat
BP-7	Badan Pembinaan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
BPI	Badan Pusat Intelijen
Bulog	Badan Urusan Logistik
bundan	skuat militer yang terdiri atas sepuluh orang
bundancho	pemimpin bundan
CAD	*Centraal Archievendepot* – Depo Arsip Pusat
Caduad	Cadangan Umum Angkatan Darat
CGI	*Consultative Group on Indonesia*
chudancho	komandan kompi (Jepang)
CIDES	*Center for Information and Development Studies*
CPI	*Communist Party of Indonesia*
CSIS	*Center for Strategic and International Studies*
daidan	batalion
daidancho	komandan batalion
Dakab	Yayasan Dana Abadi Karya Bakti
Dharmais	Yayasan Dharma Bhakti Sosial
DI/TII	Darul Islam/Tentara Islam Indonesia
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPR-GR	Dewan Perwakilan Rakyat – Gotong Royong
Dwikora	Dwi Komando Rakyat
FBSI	Federasi Buruh Seluruh Indonesia
Finek	divisi perencanaan ekonomi dan keuangan

	Divisi Diponegoro
Fretilin	*Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente* – Front Revolusioner Timor-Timur Merdeka
GBHN	Garis-garis Besar Haluan Negara
GBN	Gerakan Banteng
Gerwani	Gerakan Wanita Indonesia
Gestapu	Gerakan September Tiga Puluh
GMNI	Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia
Golkar	Golongan Karya
Golput	Golongan Putih
GUPPI	Gabungan Usaha-usaha Perbaikan Pendidikan Islam
Hankam	Departemen Pertahanan Keamanan
Hizbullah	Tentara Tuhan
HKGS	Archive van den Hoofdkwartier van de Generale Staf van het Leger in Indonesië
HKTI	Himpunan Kerukunan Tani Indonesia
HMI	Himpunan Mahasiswa Indonesia
HMI	Himpunan Mahasiswa Islam
ICMI	Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia
IGGI	*Inter-Governmental Group on Indonesia*
IMF	*International Monetary Fund* – Dana Moneter Internasional
Inkopad	Induk Koperasi Angkatan Darat
Inpres	Instruksi Presiden
IPKI	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia
IPTN	Industri Pesawat Terbang Nusantara
KAMI	Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia
KAP G.30.S	Komando Aksi Pengganyangan G.30.S
KAPI	Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia
KAPPI	Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia
KGSS	Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan
KKO	Korps Komando Operasi

KL	*Koninklijk Landmacht* – Angkatan Darat Belanda
KNI	Komite Nasional Indonesia
KNIL	*Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger* – Angkatan Perang Kerajaan Hindia Belanda
KNIP	Komite Nasional Indonesia Pusat
KNPI	Komite Nasional Pemuda Indonesia
Kodam	Komando Daerah Militer
Kodamar	Komando Daerah Maritim
Kodim	Komando Distrik Militer
Koga	Komando Siaga
Kogam	Komando Ganyang Malaysia
Kohanudad	Komando Pertahanan Udara Angkatan Darat
Kolaga	Komando Mandala Siaga
Kolognas	Komando Logistik Nasional
Kopassandha	Komando Pasukan Sandhi Yudha
Kopassus	Komando Pasukan Khusus
Kopkamtib	Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban
Kopur	Komando Tempur
Koramil	Komando Rayon Militer
Korem	Komando Resort Militer
Korpri	Korps Pegawai Republik Indonesia
Korra I	Korps Tentara I
Korud	Komando Regional Udara
Kosgoro	Koperasi Serba Guna Gotongroyong
Kostrad	Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat
Kostrad Dharma Putra	Yayasan Kesejahteraan Sosial Dharma Putra Kostrad
Koti	Komando Operasi Tertinggi
Kotrar	Komando Tertinggi Retooling Aparatur Revolusi
Kowilhan	Komando Wilayah Pertahanan

KRIS	Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi
KSHKGS	*Krijgsgechiedkundige Sectie van het Hoofdkwartier Generale Staf in Indonesië* – Seksi Sejarah Perang Markas Besar Staf Umum di Indonesia
LIPI	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LKB	Yayasan Lembaga Kesadaran Berkonstitusi
Mahmillub	Mahkamah Militer Luar Biasa
Malari	Malapetaka Limabelas Januari
Masyumi	Majelis Syuro Muslimin Indonesia
MBR	*Mobile Brigade Ratulangi* – brigade mobil Ratulangi
MPP	Markas Pimpinan Pertempuran
MPR	Majelis Permusyawaratan Rakyat
MPRS	Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Munas	Musyawarah Nasional
MvD	*Ministerie van Defensie* – Kementerian Pertahanan
Nahdlatul Ulama	perhimpunan kaum muslim tradisional
Nasakom	Nasionalisme, Agama, Komunisme
NEFIS	*Netherlands Forces Intelligence Service* – Badan Intelijen Angkatan Perang Belanda
NII	Negara Islam Indonesia
NGO	*non-government organisation* – organisasi non-pemerintah
NICA	*Netherlands Indies Civil Administration* – Administrasi Sipil Hindia Belanda
NIT	Negara Indonesia Timur
NKK	Normalisasi Kehidupan Kampus
NU	lihat Nahdlatul Ulama
OPM	Organisasi Papua Merdeka
Opstib	Operasi Tertib
Opsus	Operasi Khusus
Ormas	organisasi massa

P-4	Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
P-7	Panitia Penasehat Presiden mengenai Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
Pakualam	penguasa tradisional di Yogyakarta
pamong praja	pejabat resmi wilayah sipil, terutama di Jawa
Parmusi	Partai Muslimin Indonesia
PDI	Partai Demokrasi Indonesia
Pekuneg	Pengatur Keuangan Negara
Pepelrada	Penguasa Pelaksanaan Dwikora Daerah
Peperda	Penguasa Perang Daerah
Permesta	Piagam Perjuangan Semesta
Pertamina	Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional
Perti	Persatuan Tarbiyah Islamiyah
Pesindo	Pemuda Sosialis Indonesia
Peta	Pembela Tanah Air
Petrus	penembakan misterius
PKI	Partai Komunis Indonesia
PNI	Partai Nasional Indonesia
PPP	Partai Persatuan Pembangunan
PRD	Partai Rakyat Demokrasi
PRRI	Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia
PSI	Partai Sosialis Indonesia
PSII	Partai Sarekat Islam Indonesia
PUDI	Partai Uni Demokrasi Indonesia
Pusintelstrat	Pusat Intelijen Strategis
PWI	Persatuan Wartawan Indonesia
Repelita	Rencana Pembangunan Lima Tahun
RIS	Republik Indonesia Serikat
RMS	Republik Maluku Selatan
RPKAD	Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat
RRI	Radio Republik Indonesia
RTP	Resimen Tempur

Rukun Isteri Ampera Pembangunan	sebuah perhimpunan yang dibentuk oleh Ibu Tien pada 1966 yang terdiri atas istri-istri para anggota kabinet
SBSI	Serikat Buruh Sejahtera Indonesia
Sekber Golkar	Sekretariat Bersama Golongan Karya
Seskoad	Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SSKAD sebelum1961)
shodancho	komandan peleton (Jepang)
SOB	*Staat van Oorlog en van Beleg* – Kondisi Darurat Perang
SOBSI	Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia
SOKSI	Sentral Organisasi Karyawan Socialis Indonesia
Spri	Staf Pribadi
SPSI	Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
SSKAD	Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad setelah 1961)
SUAD	Staf Umum Angkatan Darat
Supersemar	Surat Perintah Sebelas Maret
SWK	*sub-Wehrkreise*
TII	Tentara Islam Indonesia
TKR	Tentara Keamanan Rakyat
TNI	Tentara Nasional Indonesia
TRI	Tentara Republik Indonesia
Trikora	Tri Komando Rakyat
Tritura	Tri Tuntutan Rakyat
TT	Tentara dan Territorium
TVRI	Televisi Republik Indonesia
UDT	*União Democrática Timorense* – Uni Demokrat Timor
Wanjakti	Dewan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan AD Tingkat Tinggi

Wehrkreise	area pertahanan militer, ekonomi, dan politik independen semasa perjuangan gerilya
WTO	*World Trade Organisation* – Organisasi Perdagangan Dunia
YPTE	Yayasan Pembangunan Territorium Empat
YTE	Yayasan Territorium Empat

Catatan-catatan

PENDAHULUAN

1. *Vatikiotis,* Indonesian politics under Suharto, *1993, h. 100.*
2. *Vatikiotis, "Setting the scene for succession",* Far Eastern Economic Review *[selanjutnya* FEER*J, 3 Maret 1998, h. 24.*
3. McIntyre, "Foreign biographical studies of Indonesian subjects", h. 294.
4. Tanter, "Intelligence agencies and Third World militarization", h. 7.
5. *Kingsbury,* The politics of Indonesia, *h. 3. Lihat juga Lyon, "Mystical biography", h. 213.*
6. Rae, "Liberating and conciliating", h. 240.
7. Jackson, "Bureaucratic polity", h. 5.
8. *Mrazek, Rudolf, "Tan Malaka: a political personality's structure of experience",* Indonesia *14 (1972), terutama hh. 47–8.*
9. *Ramage,* Politics in Indonesia, *h. 4.*
10. Laporan ini valid secara empiris, meski seolah menyatakan adanya kadar ketertiban lebih besar dibanding yang sebenarnya di antara kelompok-kelompok yang bertikai di Indonesia. Menurut T.B. Simatupang, pejabat senior Indonesia kala itu, "[Belanda] memiliki informasi yang memadai mengenai kekuatan tentara kita .... Kita

tahu hal ini dari laporan NEFIS (Netherlands Forces Intelligence Service) yang sekali tempo jatuh ke tangan kita. Kadang-kadang, laporan NEFIS itu berisi informasi yang lebih lengkap mengenai pasukan kita di wilayah-wilayah berbeda, ketimbang yang diberikan oleh pimpinan Angkatan Bersenjata kita sendiri" (Report from Banaran: experiences during the people's war [Ithaca: Modern Indonesia Project, Cornell University Press, 1972], h.50). Atas petunjuk serupa, analisis intelijen Belanda kerap kali dipenuhi oleh ketakutan, kedangkalan, dan minat terhadap komplotan rahasia (lihat P.J. Drooglever, "Sultan in oorlogstijd: Hamengkubuwono IX en de bezetting van Yogyakarta in 1948/49", ina

11. *Soeharto,* Pikiran.
12. *Sundhaussen,* The road to power, *h. 95. Sifat-sifat seperti ini tentu saja tidak hanya ditemukan di Indonesia*

1. PERMULAAN DAN MASA MUDA

1. Versi ini, kecuali jika disebut sebaliknya, didasarkan pada *Soeharto, Pikiran*, hh. ix–x, 5–15; Roeder, *The smiling general*, h. 81–88; Anon., "Mengenal kehidupan Presiden Soeharto", h. 47–48; "Kata pendahuluan: uraian Bapak Probosutejo" dan "Penjelasan Presiden Soeharto tentang silsilah keturunan beliau di depan pers bertempat di Binagraha tanggal 28 Oktober 1974 jam 11.20–13.15 WIB", keduanya di Suryohadi (penyunting), *Silsilah Presiden Soeharto anak petani.* (Versi revisi dari *The smiling general* Roeder, yang diterbitkan sebagai *Anak Desa*, memasukkan banyak bahan tentang kehidupan awal Suharto dari *Silsilah* Suryohadi).
2. Soeharto, *Pikiran,* h. x.
3. Soeharto, *Pikiran,* h. ix.
4. McDonald, *Suharto's Indonesia,* h. 9; Soeharto, *Pikiran,* h. 7.
5. *Ngebleng* adalah praktik puasa yang bertujuan menghapuskan identitas sosial dan "penyerahan total kepada Tuhan" (Keeler, *Javanese shadow plays,* h. 45). Lihat juga Keeler, *Symbolic Dimensions of the Javanese house*).
6. "Penjelasan", h. 29.
7. Soeharto, *Pikiran*, h. 231.
8. Vol. 2, no. 17.

9. McDonald (*Suharto's Indonesia*, h. 9) menuturkan gosip bahwa Suharto adalah "seorang anak hilang atau anak haram" Hamengkubuwono VIII, ayah dari Sultan Yogyakarta kala itu. Ia juga mengabarkan kisah bahwa Suharto adalah keturunan seorang perwira militer senior di istana. Vatikiotis (*Indonesian Politics*, 1993, h.10) menuturkan gosip bahwa Sultan Hamengkubuwono IX telah memastikan bahwa Suharto adalah putra seorang pelayan setia istana. Kisah-kisah serupa sering muncul dalam wawancara saya sendiri, termasuk kisah bahwa dia adalah putra seorang pelayan istana yang dipercaya memegang payung kuning untuk memayungi kepala Sultan Hamengkubuwono VIII (wawancara dengan Sumiskum, Jakarta, 12 Juli 1997). Lihat juga Roeder, *Anak Desa*, h. 140m. Untuk kumpulan gosip ringkas mengenai asal-usul Suharto, lihat Wimandjaja K. Liotohe, *Primadosa*, hh. 26–27.
10. "Penjelasan", hh. 14, 34, 37.
11. Roeder, *The smiling general*, hh. 83–90; "Penjelasan", hh. 21–9; Anon., "Mengenal kehidupan Presiden Soeharto", h. 47; Soeharto, *Pikiran*, h. 6; "Kata pendahuluan", h. 6; Anon., *Soeharto, President of the Republic of Indonesia*, h. 2, Suharto, "Watashi no rirekisho" ["Sejarah pribadiku"], *Nihon Keizai Shimbun*, bab 3, 4 Januari 1998, h. 40.
12. Soeharto, *Pikiran*, h. 7.
13. Anon., "Isu Soeharto Cina, siapa bapaknya?", wysiwyg:// 47/http:// www.geocities.com/CapitolHill/ 4120/soeharto.html, diakses tanggal 26 Januari 2000.
14. "Suharto tinggal di kampung sampai usia 19 tahun" (*Kompas*, 23 Maret 1973).
15. Soeharto, *Pikiran*, h. 13.
16. Suharto, "Watashi", bab 3, 4 Januari 1998, h. 40.
17. Roeder, *The smiling general*, h. 93.
18. *Kompas*, 23 Maret 1973.
19. Penders, *Milestones on my journey*, h. 50. Lihat juga O'Malley, "Indonesia in the Great Depression", hh. 185–6.
20. Soeharto, *Pikiran*, h. 16.
21. Soeharto, *Pikiran*, h. 16.
22. Soeharto, *Pikiran*, hh. 230–1.
23. Soeharto, *Pikiran*, hh. 235–6.

24. Disebutkan dalam Toriq Hadad, "Mengayunkan langkah keenam", *Tempo*, 13 Maret 1993, h. 16.
25. Soeharto, *Pikiran*, h. 297.
26. Syahrir, disebut dalam Mrazek, *Sjahrir*, h. 26.
27. Sukarno, *An autobiography as told to Cindy Adams*, h. 39.
28. McIntyre, *Soeharto's composure*, h. 16; Soeharto, *Pikiran*, h. 231.
29. Soeharto, *Pikiran* , h. 17; Suharto, "Watashi", bab 4, 5 Januari 1998, h. 40.
30. Dua per tiga dari personil KNIL adalah orang Indonesia, walau hanya sedikit yang menjabat sebagai perwira. Pada tahun 1937 ada sekitar 13,000 orang Jawa yang bergabung di sana (Zwitser dan Heshusius, *Het Koninklijk*, h. 10).
31. Soeharto, *Pikiran*, h. 20; Suharto, "Watashi", bab 4, 5 Januari 1998, h. 40.
32. Soeminto (ed.), *Presiden dan wakil Presiden*, h. 281; Roeder, *The smiling general*, h. 97; *Kompas*, 15 Oktober 1965.
33. Soeharto, *Pikiran*, h. 22.
34. Soeharto, *Pikiran*, hh. 22, 23. Ia tampaknya tidak banyak memberi perhatian mengenai persyaratan belajar bahasa Jepang (Suharto, "Watashi", bab 5, 6 Januari 1998, h. 40).
35. Oudang, *Perkembangan kepolisian*, h. 36.
36. Soeharto, *Pikiran*, h. 23; Suharto, "Watashi", bab 5, 6 Januari 1998, h. 40.
37. Nugroho, *The PETA-army in Indonesia*, h. 17.
38. Suharto, "Watashi", bab 5, 6 Januari 1998, h. 40.
39. Nugroho, *The PETA-army*, h. 3.
40. Soeharto, *Pikiran*, h. 24. Lihat juga Nugroho, *The PETA army during the Japanese occupation*, h. 116.
41. *Kompas*, 28 Maret 1968.
42. Soeharto, *Pikiran*, h. 25; Suharto, "Watashi", bagian 5, 6 Januari 1998, h. 40.
43. Nugroho, *The PETA-army*, h. 20.
44. George Kahin, *Nationalism and revolution in Indonesia*, h. 109; Benedict Anderson, *Java in a time of revolution*, h. 24.
45. Sebuah bundan (pasukan) biasanya terdiri atas sepuluh orang, dikepalai oleh seorang bundancho; biasanya dalam satu peleton (shodan) ada empat bundan (Nugroho, *The PETA army*, h. 131).

46. Anderson, *Java*, h. 15.
47. Soeharto, *Pikiran*, h. 27.
48. Kahin, *Nationalism and revolution*, h. 130.
49. B. R. O'G. Anderson, "Japan: 'The light of Asia'", h. 21.

2. PRAJURIT SEMASA PERJUANGAN

1. Sesungguhnya dalam analisis klasik George Kahin tentang perjuangan (*Nationalism and revolution in Indonesia)*, nama Suharto tidak pernah sekalipun disebutkan.
2. Feith, *The decline of constitutional democracy in Indonesia*, h. 18.
3. Wawancara dengan Dayno, dalam Widadi, "Kata Bung Karno kamu harus sadarkan Soeharto", *De tak*, 29 September–5 Oktober 1998, h. 11; Anon., "Kolonel (Purn.) Marsudi; 'Saya sudah mengingatkan Pak Harto'", *Forum Keadilan*, 26 Desember 1999, h. 82; Anon., "Kampung politik bernama Pathuk", *Adil*, 30 September–6 Oktober 1998, h. 6; wawancara dengan Sumarsono, Sydney, 30 Juni 1999. Menurut Marsudi, seorang prajurit bawahan Suharto, kelompok ini tidak memiliki kecenderungan atau afiliasi politik tertentu. Yang lain pernah melihat keterlibatan Suharto dalam grup Pathuk dalam kadar yang lebih buruk. Menurut Wertheim ("Whose plot?", h. 203), Syam bekerja sebagai kader Partai Sosialis Indonesia, dan sering menerima Suharto di rumahnya. Sumber lain menyebutkan bahwa kelompok Pathuk adalah kelompok kiri yang anggotanya antara lain adalah Suharto, Syam, dan tokoh kunci lain pada 'kup' tahun 1965, Untung Samsuri, dan anggota komunis kawakan Alimin sebagai pemimpin intelektual/pelaku propaganda (pembina) (Anon., "Agen RI–CIA–KGB bicara keterlibatan Soeharto", *De Tak*, 29 September–5 Oktober 1998). Sejumlah kalangan menyatakan bahwa Suharto saat itu adalah lini dari nasionalis komunis (Murba) (wawancara dengan Anton, dalam Anon., "Saat itulah, Soeharto mulai didekati CIA", *De Tak*, 29 September–5 Oktober 1998). Syam, menurut sumber terbaru, turut ambil bagian dalam pertempuran di Magelang, Semarang, dan Ambarawa tahun 1945 dan awal tahun 1946, serta menjadi pemimpin kelompok pejuang kiri di Yogya (Anon., *Gerakan 30 September antara fakta dan rekayasa*, h. 15). Menurut

sumber lain (*Sinar Harapan*, 13 Maret 1967; Saur Hutabarat, "Eksekusi bulan September", *Tempo*, 11 Oktober 1986, h. 15), Syam adalah anggota Batalion X pimpinan Suharto di Yogyakarta tahun 1945.

4. A. H. Nasution, *Sekitar perang kemerdekaan Indonesia*, vol. 1, h. 357–8.
5. Nama TKR diubah menjadi Tentara Kesejahteraan Rakyat pada tanggal 7 Januari 1946. Kemudian diubah lagi menjadi TRI (Tentara Republik Indonesia) pada tanggal 25 Januari 1946 dan akhirnya pada tanggal 3 Juni 1947 berubah menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia).
6. Kahin, *Nationalism and revolution*, h. 164.
7. Benedict Anderson, *Java in a time of revolution*, h. 106.
8. Soeharto, *Pikiran*, h. 28.
9. Tuti Indra Malaon dan Drigo L. Tobing, "Saya tak mau jadi godfather" (wawancara dengan Y.B. Mangunwijaya), *Matra*, 21 April 1998, h. 22.
10. "Report by Wing Commander T.S. Tull O.B.E. on Operation Salex Mastiff, Mid-Java, 10th September to 15th December 1945", bagian 1, h. 7, Indische Collectie no. 007414-007453, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie.
11. "Report by ... Tull", bagian III, h. 15.
12. Anderson, *Java*, h. 151.
13. Soeharto, *Pikiran*, h. 36.
14. "Penjelasan Presiden Soeharto tentang silsilah keturunan beliau di depan pers bertempat di Binagraha tanggal 28 Oktober 1974 jam 11.20–13.15 WIB", dalam Suryohadi (ed.), *Silsilah Presiden Soeharto anak petani*, h. 30.
15. Soeharto, *Pikiran*, h. 36.
16. Malik, *In the service of the Republic*, h. 30.
17. Salim Said, *Genesis of power*, h. 84.
18. Cerita ini berdasarkan Anon., *Putusan*, hh. 88–9.
19. Soeharto, *Pikiran*, h. 38.
20. Rancangan naskah proklamasi bisa didapat dalam Nasution, *Sekitar*, vol. 3, hh. 346–8.
21. Anon., *Putusan*, h. 89.
22. Nasution, *Sekitar*, vol. 4, h. 479.

23. Netherlands Forces Intelligence Service [selanjutnya NEFIS]. Afdeeling Militaire Intelligence [selanjutnya AMI]. Wekelijks Militaire Overzicht [selanjutnya MO] [21 Februari 1947], Hoofdkwartier van Generale Staf van Leger in Indonesië [selanjutnya HKGS], GG5, no. 101a, Ministerie van Defensie, Centraal Archievendepot, Rijswijk [selanjutnya MvD].
24. "Wekelijks Territoriaal Inlichtingen Rapport" [selanjutnya WTIR], no. 27 [27 September 1949], HKGS, GG61, no. 7646a, MvD.
25. NEFIS, AMI, MO [17 dan 31 Oktober 1947], HKGS, GG5, no. 101e, MvD.
26. Suharto, "Watashi", bab 7, 8 Januari 1998, h. 40.
27. Roeder, *The smiling general,* h. 116.
28. Gafur, *Siti Hartinah,* h. 47, 121.
29. Soeharto, *Pikiran,* h. 5.
30. Suharto, "Watashi", bab 7, 8 Januari 1998, h. 38, 40.
31. NEFIS, AMI, MO no. 48/3 [24 Januari 1948], HKGS, GG31, no. 438, MvD.
32. NEFIS, AMI, MO no. 48/5 [7 Februari 1948], HKGS, GG37, no. 4382, MvD.
33. McVey, "The post-revolutionary transformation", bagian I, h. 137.
34. NEFIS, AMI, MO no. 48/14 [10 April 1948], HKGS, GG31, no. 438, MvD.
35. NEFIS, AMI, MO no. 48/16 [14 Juni 1948], HKGS, GG37, no. 4382, MvD.
36. NEFIS, AMI, MO no. 48/19 [17 Juli 1948], HKGS, GG31, no. 438, MvD.
37. Overzicht en Ontwikkeling van de Toestand [selanjutnya OOT] [9 Agustus 1948], KSHKGS, AA19, no. 1, MvD.
38. OOT [4 Februari 1949], KSHKGS, AA21, no. 1, MvD.
39. NEFIS, AMI, MO [14 Maret 1947], HKGS, GG5, no. 101b, MvD.
40. Kahin, *Nationalism and revolution,* h. 251; David Anderson, "The military aspects", h. 1.
41. "Trayek Salatiga–Bojolali–Klaten–Djokja (gegevens t/m Agustus 1948)", Algemeen-Archief van Centrale Militaire Inlichtingendienst (NEFIS) [selanjutnya AACMI], AA15, MvD.
42. Nasution, *Sekitar,* vol. 8, h. 222.

43. Soeharto, *Pikiran,* h. 50.
44. Soeharto, *Pikiran,* h. 44–5. Cerita Anderson atas persetujuan Suharto ("The military aspects", h. 27n).
45. Salim Said, *Genesis,* h. 77.
46. Menurut Sumarsono (wawancara, Sydney, 30 Juni 1999), Suharto menandatangani sebuah pernyataan (yang disiapkan oleh Sumarsono) terhadap dampak itu, dan diterbitkan di koran lokal dalam satu dua hari. Sumarsono menyangkal bahwa Suharto tinggal di Madiun selama tiga hari.
47. Salim Said, *Genesis,* h. 77.
48. "Centrale Militaire Inlichtingendienst (CMI), Sinyalemen No. 26" [8 Oktober 1948], NEFIS, no. 1017, Ministerie van Buitenlandse Zaken [selanjutnya MBZ].
49. NEFIS, AMI, Order of Battle TRI (Jawa, Bali) [selanjutnya OB] [15 November 1948], KSHKGS, AA10, no. 22, MvD.
50. Suharto sendiri mengakui bahwa diskusi berkepanjangan dan sia-sia antara pemerintah Belanda dan pemerintah Republik Indonesia "melelahkan rasanya buat saya" (Soeharto, *Pikiran,* h. 56).
51. Nasution, *Fundamentals of guerrilla warfare,* h. 116.
52. Sukarno, *An autobiography,* h. 252.
53. "Verslag No. 5 van de R.V.D.-agen H. Leopold, 'Indrukken Djokja'" [24 Desember 1948], Archief van Algemene Secretarie van de Nederlands- Indische Regering en de daarbij gedeponeerde archieven, 1942–50, no. 5538, Nationaal Archief, Den Haag [selanjutnya NA]. Penekanan pada keasliannya.
54. Wawancara dengan Michael Vatikiotis. 26 Juli 1990, tercantum dalam Vatikiotis, *Indonesian politics,* h. 21.
55. Soeharto, *Pikiran,* h. 57.
56. Dikutip dalam *Kompas,* 2 Maret 1973.
57. Nasution, *Sekitar,* vol. 10, h. 34.
58. Simatupang, *Report from Banaran,* h. 664.
59. Nasution, *Fundamentals,* h. 137.
60. "Desaverdediging" [menyertai surat tanggal 29 Desember 1949], buku catatan 2e Lt. K. Meijer (Archief NI 45–50, 0101/1A), Archives Sectie Militaire Geschiedenis, Koninklijk Landmacht, Den Haag.
61. Simatupang, *Report from Banaran,* h. 63.

62. "Penjelasan", h. 30.
63. "Reorganisatie/Dislocatie Divisie III MA 19 Desember 1948" [11 Maret 1949], HKGS, GG51, no. 631, MvD.
64. Kecuali kalau dikemukakan di tempat lain, paragraf ini berdasarkan Soeharto, *Pikiran,* hh. 56–64; *Kompas,* 2 Maret 1973.
65. OOT [13 Januari dan 3 Februari 1949 hingga 10 Februari 1949], HKGS, GG51, no. 629 dan 631, MvD.
66. OOT [13 Januari 1949], HKGS, GG51, no. 631, MvD.
67. *Merdeka,* 25 Februari 1949.
68. OOT [13 Januari 1949], HKGS, GG51, no. 631, MvD.
69. Reid, *Indonesian national revolution,* h. 155.
70. Nasution, *Fundamentals,* h. 199.
71. Kahin, *Nationalism and revolution,* h. 395 dan catatan; lihat juga Kahin, "Some recollections and reflections", h. 13 dan catatan.
72. OOT [13 Januari 1949] KSHKGS, AA21, no. 1, MvD.
73. Soeharto, *Pikiran,* h. 61.
74. "Analyse van de situatie in het stadsgebied Djocja" [8 Februari 1949], HKGS, GG55, no. 4859, MvD.
75. Roeder, *The smiling general,* h. 124; perhatikan kalimat pasifnya.
76. Nasution, *Sekitar,* vol. 10, h. 585 (baca juga wawancara Nasution dengan Vatikiotis, 11 November 1989, dalam Vatikiotis, *Indonesian politics,* h. 13); Simatupang, *Report from Banaran,* h. 65.
77. Salim Said, *Genesis,* h. 126; lihat juga Salim Said, "Seorang raja di garis depan", *Tempo,* 23 Agustus 1986, h. 18. Menurut pandangan Selo Sumarjan (wawancara, Jakarta, 15 Juni 1998), pemikiran strategis di balik gagasan itu berasal dari Sultan, walau Suharto yang memformulasikan rencana operasionalnya.
78. Walau Suharto kelak mengklaim bahwa "mendukung perjuangan diplomatik" adalah salah satu tujuan utama serangan ini dan serangan lainnya (*Kompas,* 2 Maret 1973), dan bahwa ide serangan umum terlintas di benaknya saat mendengarkan laporan siaran radio Belanda yang mengklaim kesuksesan mereka dalam "tindakan politionilnya" (*Pikiran,* h. 60).
79. Anon., "Republik under siege", h. 186. Lihat juga Nanang Junaedi et al., "Serangan Oemoem 1 Maret 1949: Soeharto cuma pelaksana lapangan", *Tajuk,* 4–17 Maret 1999, via apakabar@saltmine.-

radix.net; Budiman S. Hartoyo et al., "Lebih besar dari tahtanya", *Tempo*, 8 Oktober 1988, h. 30.

80. "Hubungan volgno. 718 van T.I.G. Djocja dd. 6 Mei 1949 volgno. 12159, NEFIS, no. 2871, MBZ. Jatikusumo adalah paman Susuhunan Solo.
81. Nasution, *Sekitar*, vol. 10, h. 94.
82. Anon., "Kolonel (Purn.) Marsudi", h. 82.
83. OOT [25 Februari 1949], KSHKGS, MvD, AA21, no. 1, MvĐ.
84. Lapré, *Het Andjing NICA Bataljon*, n.p.
85. *Kompas*, 2 Maret 1973.
86. Sedjarah Militer Kodam VII/Diponegoro, *Sedjarah TNI-AD Kodam VII*, h. 191.
87. Soeharto, *Pikiran*, h. 62.
88. Regerings Voorlichtingsdienst. Indonesische Pers en Radio [5 Maret 1949 dan 7 Maret 1949], Rapportage Indonesië, no. 74, NA.
89. Roeder, *The smiling general*, h. 125.
90. Sedjarah Militer Kodam VII/Diponegoro, h. 192.
91. Anon., Serangan Umum 1 Maret 1949, h. 248.
92. Salim Said, *Genesis*, h.109; Gafur, *Siti Hartinah*, h. 154.
93. Anon., *Soeharto*, hh. 1, 6; Anon., *Peranan TNI Angkatan Darat*, h. 160;
94. Kahin, *Nationalism and revolution*, h. 411; Reid, *Indonesian national revolution*, h. 153.
95. "Overzicht Nr. 30 van de plaats gehad hebbende acties in Indonesië", [2 Maret 1949], HKGS, GG69, no. C, MvD.
96. "Verslag van de bespreking ten huize van Kolonel van Langen te Djokjakarta op Dinsdag 2 Maart 12.00", Collectie Spoor, no. 93, NA.
97. Telegram dari PXTT, 2 Maret 1949, HKGS, ZGZG 5, no. 29, MvD.
98. Laporan dari Military Observers Capitaine de Corvette Brasseur-Kermadec (Angkatan Laut Perancis) dan Lt. A.G. Thalhamer (Angkatan Laut A.S.), yang terlampir dalam surat Acting Chairman Netherlands Delegation to Minister of Foreign Territories, 12 Maret 1949, Archief Indonesische Kwestie: Indonesië in de Veiligheidsraad [selanjutnya IKVN], no. 999, MBZ.
99. Soeharto, *Pikiran*, h. 62.

100. Menurut sultan, siaran Playen dibuat untuk pendengar republik di Bukittinggi, dan kemudian direlai ke India untuk diteruskan (Anon., "Republik under siege", h. 186). Lihat juga *Kompas Online*, 16 Maret 1997, lewat Indonesia-p@indopubs.com.
101. Soeharto, *Pikiran*, h. 62.
102. Soeharto, *Pikiran*, h. 62.
103. Nasution, *Sekitar*, vol. 11, h. 264.
104. WTIR no. 4 [2 April 1949], HKGS, GG62, no. 7788, MvD.
105. "Laporan no. 7 Regu 7 Jogja Jawa", Milobs rapporten September 1948–Agustus 1949, IKVN, no. 999, MBZ.
106. *Merdeka*, 21 Maret 1949.
107. WTIR no. 6 [15 April 1949], HKGS, GG62, no. 7788, MvD.
108. Nasution, *Sekitar*, vol. 10, h. 95.
109. Anon., *Peranan*, h. 161 (baca juga hh. 160–2).
110. Soeharto, *Pikiran*, h. 65.
111. Anon., "Several Indonesian views of the struggle", h. 208.
112. Kahin, *Nationalism and revolution*, h. 411.
113. Laporan Pengamat Militer.
114. A.H. Nasution, *Memenuhi panggilan tugas*, vol. 2, h. 135.
115. Nasution, *Sekitar*, vol. 10, hh. 103, 590.
116. WTIR no. 13 [13 Juni 1949], KSHKGS, AA22, no. 6, MvD.
117. Nasution, *Sekitar*, vol. 10, hh. 557–8.
118. "Vertaling 4A: 'Een beschouwing van de activiteiten der partijen vanaf de aanval der Nederlanders op Jogja tot de sluiting der overeenkomst op 7 Mei'" [23 Juni 1949], AACMI, AA16, MvD.
119. Surat J.B. van Oerth dan V.W. Gontha untuk Direktur CMI Batavia, 17 Mei 1949, NEFIS, no. 2741, MBZ.
120. "Volg. No. 5843–dd. 8 Maret '49-OOT-HKGS 10X", NEFIS, no. 2871, MBZ.
121. WTIR no. 13 [3 Juni 1949], HKGS, GG62, no. 7788, MvD.
122. WTIR no. 10 [13 Mei 1949], HKGS, GG62, no. 7788, MvD.
123. Soeharto, *Pikiran*, h. 65; baca juga *Kompas*, 23 Maret 1973.
124. WTIR no. 13 [13 Juni 1949], HKGS, GG62, no. 7788, MvD.
125. *Merdeka*, 2 Juli 1949; Soeharto, *Pikiran*, h. 67..
126. Hal berikutnya didasarkan sepenuhnya pada laporan intelijen Belanda yang terkadang distortif dan menyesatkan. Masalah menafsirkan laporan-laporan itu semakin sulit dengan fakta bahwa

penentuan waktu dan rangkaian kejadian ini tidak jelas dalam dokumentasi.

127. WTIR no. 17 [1 Juli 1949], HKGS, GG62, no. 7788a, MvD.
128. Soeharto, *Pikiran*, h. 67.
129. WTIR, no. 18 [18 Juli 1949], KSHKGS, AA22, no. 6, MvD.
130. Reid, *Indonesian national revolution*, h. 155.
131. Marsudi mengenang ia sebagai "tegas. Berani. Tapi, is tenang, keras" (Anon., "Kolonel (Purn.) Marsudi", h. 82). Abdul Latief, dengan alasan untuk tak bersikap baik terhadap Suharto, kelak mengomentari bahwa "sebagai militer, ia [Suharto] berwatak *stroef*, kaku, dan agak pendiam. Bawahannya jarang berani datang menemuinya" (Wawancara dalam Mindo, "Mereka melaksanakan perintah Sjam", *De Tak*, 29 September–5 Oktober 1998, h. 21).
132. McVey, "The post-revolutionary transformation", bagian 1, h. 142
133. Tjokropranolo, *Panglima Besar TNI Jenderal Soedirman*, hh. 181–3; Nasution, *Memenuhi panggilan tugas*, vol. 2, h. 174.
134. Soeharto, *Pikiran*, hh. 72–3.
135. Keyakinan ini telah menyebar ke hampir seluruh rakyat Indonesia [Cribb dan Brown, *Modern Indonesia*, h. 32].
136. Mungkin perlu diperhatikan bahwa Sukarno tidak menyebut tentang Serangan Umum 1 Maret dalam otobiografinya.

3. KOMANDO JAWA TENGAH

1. Paragraf ini berdasarkan Van Dijk, *Rebellion under the banner of Islam*, hh. 163–4; Sundhaussen, *The road to power*, hh. 55–6; Feith, *The decline of constitutional democracy*, hh. 67–9.
2. Selanjutnya berdasarkan Bardosono, *Peristiwa Sulawesi Selatan*, hh. 92–4.
3. Roeder, *The smiling general*, hh. 130–1.
4. Roeder, *The smiling general*, h. 131. Baca juga Soeharto, *Pikiran*, hh. 80–1.
5. Soeharto, *Pikiran*, h. 78.
6. Sedjarah Militer Kodam VI Siliwangi, *Siliwangi dari masa ke masa*, h. 414.
7. Van Dijk, *Rebellion*, hh. 165–6.

8. Suharto mengklaim (*Pikiran,* h. 80) bahwa ketentuan itu dibuat atas desakannya.
9. Untuk keterangan tentang prosesnya, baca Harvey, "Tradition, Islam and Rebellion", hh. 214–17.
10. Penders dan Sundhaussen, *Abdul Haris Nasution,* h. 55.
11. Suharto, "Watashi", bab 8, 9 Januari 1998, h. 40.
12. Gafur, *Siti Hartinah,* h. 181.
13. McDonald, *Suharto's Indonesia,* h. 29.
14. Gafur, *Siti Hartinah,* hh.181–2.
15. Soeharto, *Pikiran,* h. 83.
16. Soeharto, *Pikiran,* h. 83. Baca Van Dijk, *Rebellion,* untuk pembahasan lebih komplit tentang pemberontakan Darul Islam. Hizbullah adalah nama umum bagi kelompok pemberontak muslim pada masa perjuangan.
17. Sedjarah Militer Kodam VII/Diponegoro, *Sedjarah Tentara Nasional,* h. 392; Van Dijk, *Rebellion,* h. 150.
18. Feith, *Decline,* hh. 207–8.
19. Sewaka, *Tjoret-tjaret,* h. 309.
20. 'Merdeka' adalah nama yang biasa diberikan kepada operasi militer pemerintah yang dibentuk untuk mengatasi elemen perjuangan yang tidak biasa dan sering melawan.
21. Van Dijk, *Rebellion,* h. 153; Anon., "'Pembersihan' dan pembersihan", *Siasat,* 17 Februari 1952, h. 6.
22. Van Dijk, *Rebellion,* h. 410n.
23. Anon., "Bataljon 426", *Siasat,* 3 Februari 1952, h. 6.
24. A.H. Nasution, *Fundamentals of guerrilla warfare,* hh. 77–8. Baca juga Nasution, *Memenuhi panggilan tugas,* vol. 2, hh. 320, 321, untuk kritik terselubung terhadap Suharto.
25. Soeharto, *Pikiran,* h. 85.
26. Tempat berlangsungnya GBN (Operasi Banteng) ada di sebelah barat laut Jawa Tengah, terutama daerah Pekalongan dan Tegal.
27. "Kata Pendahuluan: uraian Bapak Probosutejo", dalam Suryohadi (ed.), *Silsilah Presiden Soeharto anak petani,* h. 7; Gafur, *Siti Hartinah,* hh. 183–4, Kertosudiro dikuburkan di pemakaman keluarga Kepoh, dekat tempat kelahiran Suharto ("Penjelasan", h. 33).

28. "Penjelasan Presiden Soeharto tentang silsilah keturunan beliau di depan pers bertempat di Binagraha tanggal 28 Oktober 1974 jam 11.20 –13.15 WIB", dalam Suryohadi (ed.), *Silsilah Presiden Soeharto anak petani,* h. 30.
29. Baca Crouch, *The army and politics in Indonesia,* hh. 29–31; Sundhaussen, "The military", h. 46.
30. Soeharto, *Pikiran,* h. 87.
31. McVey, "The post-revolutionary transformation", bagian 1, h. 150n. Lihat juga Nugroho Notosusanto (ed.), *Pejuang dan prajurit,* h. 71; Simatupang, *The fallacy of a myth,* h. 134.
32. Soeharto, *Pikiran,* h. 86. Baca juga Gafur, *Siti Hartinah,* h. 185.
33. Roeder, *The smiling general,* h. 132.
34. Soeharto, *Pikiran,* h. 92; Roeder, *The smiling general,* h. 132.
35. Crouch, *The army and politics,* h. 31.
36. Feith, *Decline,* h. 379.
37. *Kedaulatan Rakyat,* 22 Februari 1955.
38. Soeharto, *Pikiran,* h. 88.
39. Roeder, *The smiling general,* h. 133.
40. Mossman, *Rebels in paradise,* h. 245.
41. McVey, "The post-revolutionary transformation", bagian II, h. 168.
42. Feith, *Decline,* h. 403.
43. Lev, *The transition,* hh. 12, 15, 68.
44. Editorial, *Kedaulatan Rakyat,* 4 September 1956.
45. *Suara Merdeka,* 5 dan 7 September, 5 Oktober, 10 November, 3 Desember 1956.
46. Mody, *Indonesia under Suharto,* h. 51.
47. Wiwoho dan Bandjar, *Memori Jenderal Yoga,* h. 80. Posisi Yoga mengisyaratkan bahwa ia terus mengadakan kontak dengan semua komandan regional dan dalam kapasitas inilah ia mengenal Suharto (h. 77).
48. McDonald, *Suharto's Indonesia,* h. 30.
49. Lev, *The transition,* hh. 16, 63.
50. *Merdeka,* 22 Maret 1957. Lihat juga Sundhaussen, *The road to power,* h. 131.
51. Lev, *The transition,* hh. 16, 61.
52. *Duta Masyarakat,* 25 Maret 1957.
53. Lihat, misalnya, pidatonya pada Hari Kemerdekaan 1957 (*Suara*

Merdeka, 16 agustus 1957), Hari Kebangkitan Nasional 1958 (*Kedaulatan Rakyat,* 21 Mei), Hari Kemerdekaan 1958 (*Kedaulatan Rakyat,* 18 Agustus 1958), dan Hari Pahlawan tahun 1958 (*Kedaulatan Rakyat,* 10 November).

54. *Merdeka,* 27 Maret 1957.
55. *Merdeka,* 5 April 1957; *Duta Masyarakat,* 5 April 1957.
56. Suharto, "Watashi", bab 9, 10 Januari 1998, h. 40.
57. Soeharto, *Pikiran,* h. 90.
58. Wiwoho dan Bandjar, *Memori Jenderal Yoga,* h. 82.
59. Baca laporan mengenai konferensi pers Suharto yang menjelaskan tentang mekanisme pengumpulan dana pembangunan dan tujuan dilaksanakannya hal tersebut (*Kedaulatan Rakyat,* 23 November 1957), Suharto juga membahas masalah pengurangan jumlah penduduk yang telah melebihi batas, "dengan jalan transmigrasi, familie planning, mengurangi jumlah orang-orang asing yang masuk dll)."
60. Paragraf ini dan selanjutnya kebanyakan berdasarkan Malley, "A political biography of Major General Soedjono Hoemardani", h. 35.
61. Soeharto, *Pikiran,* hh. 90, 92; baca juga Gafur, *Siti Hartinah,* h. 180.
62. Dikutip dalam Soetriyono, *Kisah sukses Liem Sioe Liong,* h. 13.
63. Soetriyono, *Kisah,* hh. 13–14.
64. McDonald, *Suharto's Indonesia,* h. 120.
65. Soetriyono, *Kisah,* hh. 16, 44–5.
66. Sujono, wawancara dengan Ann Gregory (1969), dikutip dalam Malley, "Soedjono Hoemardani", h. 39.
67. Lev, *The transition,* h. 71.
68. Sujono, wawancara dengan Gregory (1969), dikutip dalam Malley, "Soerdjono Hoemardani", h. 34. Rami adalah tanaman lain yang jadi sasaran, guna menyediakan kebutuhan pakaian bagi masyarakat (*Kedaulatan Rakyat,* 12 Agustus 1959).
69. *Kedaulatan Rakyat,* 21 Januari 1959.
70. Soeharto, *Pikiran,* h. 92.
71. Roeder, *The smiling general,* h. 133.
72. Soeharto, *Pikiran,* hh. 91, 248. Baca juga Roeder, *The smiling general,* h. 135.

73. Dikutip dalam Gafur, *Pak Harto,* hh. 101–2.
74. Sundhaussen, *The road to power,* h. 103.
75. Soeharto, *Pikiran,* h. 90.
76. Hatta, wawancara dengan George Kahin, 12 Desember 1958, seperti dikutip dalam Audrey Kahin dan George Kahin, *Subversion as foreign policy,* h. 279.
77. Sedjarah Militer Kodam VI Siliwangi , *Siliwangi,* h. 428.
78. Lev, *The transition,* h. 29. Lihat juga Sundhaussen, *The road to power,* h. 106.
79. *Kedaulatan Rakyat,* 31 Desember 1957.
80. Kahin dan Kahin, *Subversion,* h. 280 (lihat juga h. 198).
81. Lev, *The transition,* h. 29. Baca juga Sundhaussen, *The road to power,* h. 148.
82. *Kedaulatan Rakyat,* 10 April 1958.
83. *Antara News Bulletin,* 3 dan 4 September 1959; baca juga Wiwoho dan Bandjar, *Memori Jenderal Yoga,* h. 104.
84. Lev, *The transition,* hh. 134–5.
85. Mossman, *Rebels,* h. 247.
86. Lev, *The transition,* h. 191.
87. Singkatan SSKAD diubah menjadi Seskoad pada awal tahun 1961.
88. *Kedaulatan Rakyat,* 5 Oktober 1959.
89. *Duta Masyarakat,* 17 Juli 1957.
90. Aidit, *Indonesian society and the Indonesian revolution,* h. 43 (lihat juga h. 66).
91. Lev, *The transition,* h. 9.
92. Aidit, *Indonesian society,* h. 52.
93. Lev, *The transition,* h. 10.
94. Lev, *The transition,* h. 92.
95. Sundhaussen, *The road to power,* h. 132.
96. *Antara News Bulletin,* 6 dan 7 Agustus, 5 September 1959; *Duta Masyarakat,* 8 Agustus 1959; *Merdeka,* 8 Agustus 1959.
97. *Antara News Bulletin,* 20 Juli 1959.
98. *Duta Masyarakat,* 16 Oktober 1959. Sisa paragraf ini berdasarkan sumber yang sama.
99. Gafur, *Siti Hartinah,* hh. 180–1.
100. Mossman, *Rebels,* h. 247.
101. Ramadhan, *Soemitro,* h. 265. Berita di *Duta Masyarakat,* 11 Mei

1959, menyebutkan tentang pembangunan barak infantri di Mujen dekat Magelang. Pembuatan sebuah saluran air untuk barak diperkirakan menelan biaya 1 juta rupiah.

102. Anon., "Kolonel (Purn.) Marsudi: 'Saya sudah mengingatkan Pak Harto,'" h. 82.
103. McVey, "A preliminary excursion", h. 80.
104. Wiwoho dan Bandjar, *Memori Jenderal Yoga,* h. 119.
105. Nasution, *Memenuhi,* vol. 5, h. 24.
106. Sundhaussen, *The road to power,* h. 64.
107. Soeharto, *Pikiran,* h. 92.
108. Roeder, *The smiling general,* h. 135.
109. Wiwoho dan Bandjar, *Memori Jenderal Yoga,* h. 119.
110. Ali Moertopo, "Pak Harto", h. 36.
111. Sujono, wawancara dengan Ruth McVey (1981), dikutip dalam Malley, "Soedjono Hoemardani", h. 36.
112. *Duta Masyarakat,* 19 Oktober 1959.
113. Soeharto, *Pikiran,* hh. 93, 94.
114. Roeder, *The smiling general,* h. 134.
115. McVey, "A preliminary excursion", h. 7.

4. POSISI UTAMA

1. Dikutip dalam Roeder, *The smiling general,* h. 135. (Tahun 1961, singkatan SSKAD diubah jadi Seskoad).
2. Suharto, "Watashi", bab 10, 11 Januari 1998, h. 32.
3. Soeharto, *Pikiran,* h. 94.
4. McDonald, *Suharto's Indonesia,* h. 33. Baca juga Reeve, *Golkar of Indonesia,* hh. 185–97.
5. Suwarto, "Suatu 'approach'", h. 33.
6. Suwarto dan Kartomo, "Bantuan Angkatan Perang", hh. 307–08.
7. *Merdeka,* 19 Desember 1960. Lihat juga *Merdeka,* 15 Januari 1962; *Suluh Indonesia,* 20 Juli 1963.
8. Suharto et al., "Perang wilayah sebagai konsepsi pertahanan Indonesia", hh. 9–27.
9. Suharto et al., "Perang", hh. 12, 15, 20, 23.
10. Anon., "Kesimpulan dan hasil pembahasan persoalan kedua", hh. 62–6.

11. Anon., "Pembahasan dan pendapat kelompok[2] seminar terhadap hasil telaah militer kelompok III jang disimpulkan", h. 67.
12. McDonald, *Suharto's Indonesia,* h. 34. Wawancara dengan Subroto, Jakarta, 20 Juni 1998, 4 Februari 1999; Sadli, "Recollecrions of my career," h. 39. Suharto tidak menyebut mereka dalam pembahasan otobiografisnya mengenai masa-masa di SSKAD.
13. Soeharto, *Pikiran,* h. 94.
14. Roeder, *The smiling general,* h. 135.
15. McVey, "A preliminary excursion", h. 6. Benedict Anderson ("Old state, new society", h. 111) menyatakan bahwa Sukarno mungkin setuju dengan pengangkatan Suharto karena Suharto sudah tidak mendapat jatah untuk mengikuti pendidikan perwira di Amerika.
16. Soeharto, *Pikiran,* h. 95.
17. McVey, "The post-revolutionary transformation" bagian II, h. 177.
18. Soeharto, *Pikiran,* h. 102.
19. *Merdeka,* 20 Desember 1961.
20. *Duta Masyarakat,* 10 Januari 1962; *Merdeka,* 10 Januari 1962, Soeharto (*Pikiran,* h. 103) merujuk pada tanggal 23 Januari, yaitu tanggal diberikannya surat pengangkatan dari Sukarno, sebagai komandan Mandala.
21. Suharto, *Pikiran,* h. 103. (Sapta Marga adalah Sumpah Prajurit.)
22. *Merdeka,* 10 dan 15 Januari 1962.
23. *Duta Masyarakat,* 11 Januari 1962.
24. *Duta Masyarakat,* 16 Januari 1962.
25. *Duta Masyarakat,* 24 Januari 1962.
26. *Merdeka,* 26 Januari 1962.
27. McDonald, *Suharto's Indonesia,* h. 35.
28. Disebutkan dalam Cholil, *Sedjarah,* h. 51.
29. *Suluh Indonesia,* 21 April 1962.
30. Pour, *Laksamana Sudomo,* hh. 122–3.
31. Soeharto, *Pikiran,* h.104. Lihat juga Anon., *Tri Komando Rakyat,* h. 93, berdasarkan wawancara dengan Suharto tahun 1987.
32. Mackie, *Konfrontasi,* h. 100.
33. Gafur, *Pak Harto,* h. 9. Lihat juga Panitia Penyusun Sejarah Kostrad, *Kostrad dharma putra,* h. 36; Soeharto, *Pikiran,* h. 107.
34. *Suluh Indonesia,* 24 Juli 1962.
35. Soeharto, *Pikiran,* h. 106.

36. De Geus, *De Nieuw-Guinea kwestie,* h. 186. Tampaknya baik Yamin dan Subandrio berpikir bahwa rencana Suharto untuk serangan pasukan ampibi di Biak terlalu berani (Anon., *Tri Komando Rakyat,* h. 263).
37. Dikutip dalam Roeder, *The smiling general,* h. 132.
38. Soeharto, *Pikiran,* h. 108.
39. Dikutip dalam Roeder, *The smiling general,* h. 137.
40. Soeharto, *Pikiran,* h. 109. Lihat juga Anon., *Tri Komando Rakyat,* h. 269.
41. *Suluh Indonesia,* 26 September 1962.
42. Soeharto, *Pikiran,* h. 109–10.
43. *Suluh Indonesia,* 21 Mei 1963.
44. *Suluh Indonesia,* 24 Mei 1963; *Harian Rakyat,* 23 Mei 1963; *Merdeka,* 23 Mei 1963.
45. McVey, "The post-revolutionary transformation", II, h. 177.
46. Paragraf ini didasarkan pada Panitia Penyusunan Sejarah Kostrad, *Kostrad dharma putra,* hh. 83–6.
47. Soeharto, *Pikiran,* h. 111.
48. Roeder, *The smiling general,* hh. 8–9. Pandangan ini, bagaimanapun, tampak ganjil jika dibandingkan skeptisisme awal Suharto tentang ide Nasakom, sebagaimana dikisahkan di bab 3.
49. Soeharto, *Pikiran,* h. 112. Lihat juga Suharto, "Watashi", bab 10, 11 Januari 1998, h. 32.
50. Mackie, *Konfrontasi,* h. 110.
51. Kisah selengkapnya diceritakan secara lengkap dan baik dalam Mackie, *Konfrontasi.* Untuk analisis mendalam mengenai aliansi politik domestik ini, baca Feith, "Dynamics of Guided Democracy", dan "President Sukarno, the army and the community", hh. 969–80.
52. Mackie, *Konfrontasi,* hh. 84, 134, 178. Lihat juga Sundhaussen, *The road to power,* h. 166.
53. Crouch, *The army and politics,* h. 70 (lihat juga h. 61).
54. Mackie, *Konfrontasi,* h. 214.
55. Crouch, *The army and politics,* h. 204.
56. Roeder, *The smiling general,* h. 139.

57. *Suluh Indonesia,* 11 Juli 1964.
58. Crouch, *The army and politics,* h. 72.
59. Soeharto, *Pikiran,* h. 115.
60. Mackie, *Konfrontasi,* h. 213.
61. Mackie, *Konfrontasi,* h. 216.
62. *Suluh Indonesia,* 18 dan 19 Agustus 1965.
63. Kahin dan Kahin, *Subversion as foreign policy,* h. 223.
64. Pada wawancara tahun 1997, Murdani berkata kepada saya bahwa ada kebingungan besar mengenai aspek militer Konfrontasi. Tak ada yang tahu apa yang harus dilakukan. Respons dari Angkatan Darat adalah dengan terlihat sibuk, namun memastikan tidak ada kerusakan serius jangka panjang.
65. Soeharto, *Pikiran,* h. 115.
66. Panitia Penyusunan Sejarah Kostrad, *Kostrad dharma putra,* h. 51.
67. McDonald, *Suharto's Indonesia,* h. 39.
68. Crouch, *The army and politics,* h. 82.
69. Crouch, *The army and politics,* hh. 87–8.
70. Polomka, *Indonesia since Sukarno,* h. 70. Lihat juga Mackie, *Konfrontasi,* h. 93. J.D. Legge, *Sukarno;* Hauswedell, "Sukarno", hh. 108–43.
71. Crouch, *The army and politics,* h. 82.
72. Roeder, *The smiling general,* h. 139.
73. Crouch, *The army and politics,* hh. 24–5, 81–2; Dewi Fortuna Anwar, *Indonesia strategic culture,* h. 24.
74. Soebandrio, "Kesaksianku", h. 8.
75. Yani, *Ahmad Yani,* h. 280; Brackman, *The communist collapse,* h. 50, berdasarkan wawancara dengan Umar Wirahadikusumah.
76. Roeder, *The smiling general,* hh. 138–9.
77. Reeve, *Golkar,* hh. 243–4.
78. Mody, *Indonesia under Suharto,* h. 4.
79. Crouch, *The army and politics,* hh. 94, 121.
80. Sundhaussen, *The road to power,* h. 200. Sukendro, untungnya, sedang berada di Cina tanggal 1 Oktober 1965.
81. Hughes, *Indonesian upheaval,* h. 103.

5. USAHA KUDETA

1. Gafur, *Siti Hartinah,* hh. 201–2; Wawancara Suharto dengan Brackman ada dalam Brackman, *The communist collapse,* h. 100. Lihat juga Crouch, *The army and politics,* h. 124n.
2. Gafur, *Siti Hartinah,* h. 202; Soeharto, *Pikiran,* h. 118.
3. Soeharto, *Pikiran,* h. 118. Baca juga Brackman, *The communist collapse,* h. 97; Soeharto, "Pidato sambutan Men/Pangad Mayor Jendral TNI Soeharto di depan PB. Front Nasional (15 Oktober 1965)", dalam Alex Dinuth (ed.), *Dokumen terpilih sekitar G. 30 S/PKI* (Jakarta: Intermas, 1997), hh. 105–18.
4. Soeharto, *Pikiran,* h. 118.
5. Wawancara Suharto dengan Brackman, dikutip dalam Brackman, *The communist collapse,* h. 118.
6. Terjemahan bahasa Inggris dari teks pidato di radio bisa didapat dalam Anderson dan McVey, *A preliminary analysis,* hh. 121–2.
7. Soeharto, *Pikiran,* h. 119. Materi selanjutnya didasarkan pada Soeharto, *Pikiran,* hh. 119–20. Acuan kepada Alimin menimbulkan tanda tanya, bisa jadi acuan itu merujuk pada kabar peran propagandanya di kalangan pasukan Suharto di Solo pada era 1950-an. Penyebutannya dalam konteks ini agaknya untuk menunjukkan kemungkinan peran PKI dalam mendalangi 'serangan kup', dan mungkin juga untuk memperlihatkan pemikiran Suharto yang tajam dalam menyadari 'fakta' ini begitu cepat.
8. Dikutip dalam Brackman, *The communist collapse,* h. 98.
9. Crouch, *The army and politics,* h. 97.
10. Soeharto, *Pikiran,* hh. 120–1.
11. Nugroho dan Ismael, *The coup attempt,* h. 67.
12. Soeharto, *Pikiran,* h. 122 (baca juga hh. 123–4); Crouch, *The army and politics,* h. 130.
13. Soeharto, *Pikiran,* h. 122; Nugroho (ed.), *Pejuang dan prajurit,* h. 118; Hughes, *Indonesia upheaval,* hh. 121–2.
14. Gafur, *Siti Hartinah,* h. 205; Sekretariat Agitasi-Propaganda CC-PKI, *Buku putih,* h. 141; Nugroho dan Ismael, *The coup attempt,* h. 35; USCIA, *Indonesia–1965,* h. 17; Hughes, *Indonesian upheaval,* hh. 53–4; Oey, "Sukarno and the pseudo-coup", hh.121–2.
15. Terjemahan bahasa Inggris dari "Dekrit No. 1" dapat ditemukan dalam Anderson dan McVey, *A preliminary analysis,* hh. 123–4.

16. USCIA, *Indonesia – 1965,* h. 47n.
17. Crouch, *The army and politics,* h. 128, menyebutkan bukti pengadilan Omar Dhani.
18. Gafur, *Siti Hartinah,* hh. 209–11.
19. Soeharto, *Pikiran,* h. 125; Dwipayana dan Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto 1 Oktober 1965–27 Maret 1968,* h. 6; Anon., "Kisah-kisah Oktober 1965", *Tempo,* 6 Oktober 1984, h. 14 (wawancara dengan Bambang Wijanarko).
20. Crouch, *The army politics,* h. 131; Oey, "Sukarno and pseudo-coup", h. 126. Lihat juga McVey, "A preliminary excursion", h. 102.
21. Crouch, *The army and politics,* h. 132.
22. Crouch, *The army and politics,* h. 98. Lihat juga Dwipayana dan Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto,* h. 5; Sekretariat Agitasi-Propaganda CCPKI, *Buku putih,* h. 132.
23. Soeharto, *Pikiran,* h. 126.
24. Soeharto, *Pikiran,* h. 124.
25. Teks pidato Suharto ditampilkan dalam Soeharto, *Pikiran,* hh. 127–8.
26. USCIA, *Indonesia – 1965,* h. 55.
27. Soeharto, *Pikiran,* h. 129; Dwipayana dan Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto,* h. 7. Tampaknya Senayan tetap menjadi kantor pusat Kostrad untuk beberapa hari serelah tanggal 1 Oktober (Yani, *Profile,* h. 135), dengan Suharto dan Nasution 'bekerja dan tidur' di sana. (Hughes, *Indonesian upheaval,* h. 121).
28. Crouch, *The army and politics,* h. 101.
29. Nugroho dan Ismael, *The coup attempt,* h. 57.
30. McDonald, *Suharto's Indonesia,* h. 49.
31. Soeharto, *Pikiran,* h. 130; Dwipayana dan Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto,* h. 7.
32. Crouch, *The army politics,* h. 138.
33. Soeharto, *Pikiran,* hh. 134, 136.
34. Hughes, *Indonesian upheaval,* h. 125.
35. Oey, "Sukarno and pseudo coup", h. 129. Namun, Sukarno telah mengambil alih tugas mengumumkan tujuh 'pahlawan revolusi' yang tewas dan memberikan penghargaan anumerta dengan me-

naikkan satu tingkat pangkat masing-masing pahlawan. (*Kompas*, 6 Oktober 1965).

36. Ramadhan, *Soemitro*, hh. 308–9.
37. Di antara yang paling baru mungkin termasuk ide yang baru-baru ini dikemukakan bahwa PKI berniat membunuh Sukarno pada pawai TNI tanggal 5 Oktober, mengikuti gaya pembunuhan Anwar Sadat di Mesir (Rangga dkk., "Konspirasi Soeharto-PKI dalam G30S", *Adil* 52, 1998, h. 4).
38. Pandangan ini dengan kuat dinyatakan dalam Nugroho dan Ismael, *The coup attempt*, dan dalam USCIA, *Indonesia–1965*.
39. Anderson dan McVey, *A preliminary analysis*, h. 63.
40. Karya Crouch paling baik mewakili pandangan ini (*The army and politics*, hh. 105, 109, 115). Baca juga Mody, *Indonesia under Suharto*, h. 21.
41. Wawancara dengan Abdul Latief di Mindo, "Mereka melaksanakan perintah Sjam", *De Tak*, 29 September–5 Oktober 1998, h. 21; Anon., "Wawancara Kolonel A. Latief: ternyata Pak Harto diam saja", *Tajuk* 1, 15 (1998), h. 16.
42. Roeder, *The smiling general*, h. 9. Varian dari pandangan ini, di mana Sukarno diduga keras sudah tahu sebelumnya dan bersikap akomodatif mengenai kudeta ini, adalah USCIA, *Indonesia–1965*.
43. Brackman, *Indonesia: the Gestapu affair*, hh. 19–20.
44. Budiarjo, "Did Suharto mastermind the 1965 'coup attempt'?", h. 12.
45. Untuk analisis yang lebih hebat namun kurang teliti atas isu ini, baca Wimandjaja, *Primadosa*, hh. 32–41. Suharto menegur *Primadosa* bahwa "mereka memutarbalikkan fakta di situ" (Idrus F. Shahab, "Setelah promosi Prima Dosa", *Editor*, 3 Februari 1994, h. 53).
46. Lihat, misalnya, Patrick Walters, "Suharto's secret role in coup": "Jail walls hold coup secrets", *Australian*, 25 Mei 1998; Anon., "Wawancara Kolonel A. Latief", h.15; Bina Baktiati dan Ardi Bramantyo, "Kolonel A. Latief: 'Saya ingin meluruskan sejarah'", *Tempo*, 16 April 2000, hh. 59–61.
47. Baca Tabah, *Dua jenderal besar bicara tentang Gestapu/PKI*, hh. 21, 23.

48. Soeharto, "Sambutan", dalam Tabah, *Dua jenderal,* h. xv.
49. Anderson dan McVey, *A preliminary analysis,* h. 6.
50. Wawancara dengan Abdul Latief di Mindo, "Mereka melaksanakan perintah Sjam", h. 21.
51. Wawancara dengan Anton dalam Anon., "Saat itulah, Soeharto mulai didekati CIA", *De Tak,* 29 September– 5 Oktober 1998, h. 8. Lihat juga Anon., "Agen RI-CIA-KGB bicara keterlibatan Soeharto", *De Tak,* 29 September–5 Oktober 1998, h. 1.
52. Latief, *Pledoi,* hh. 93–7; Latief, "Laporan", dalam Latief, *Pledoi,* hh. 279–80, 282; Latief, "Daftar riwayat hidup singkat Abdul Latief", dalam Latief, *Pledoi,* hh. xii–xiii.
53. Latief, "Laporan", h. 280. Subandrio menyatakan klaim yang sama (Soebandrio, "Kesaksianku", hh. 42–3).
54. Oey, "Sukarno and the pseudo-coup", h. 124.
55. Mackie, *Konfrontasi,* h. 311. Umar "secara umum dikenal 'aman'", seseorang yang selalu berhati-hati, tidak berambisi dan tidak memihak." (McVey, "A preliminary excursion", h. 78).
56. McVey, "A preliminary excursion", h. 31.
57. Wertheim, "Whose plot?", h. 208.
58. Anon., "Wawancara Kolonel A. Latief", h. 15. Tercantum dalam bukti persidangan, Latief menyatakan bahwa ia mendapat dukungan moral ketika fakta membuktikan bahwa Suharto tidak bereaksi terhadap kabar yang dibawanya (Latief, *Pledoi,* h. 129).
59. Anon., "Wawancara Kolonel A. Latief", h. 15; Latief, "Laporan", h. 279.
60. Latief, *Pledoi,* hh. 13, 30, 31, 41, dan lain-lain. Wertheim, dalam nada yang sama, menyatakan bahwa Suharto setidaknya sebagian harus bertanggung jawab atas kegagalannya melaporkan segera rencana kudeta kepada atasannya" ("Whose plot?" h. 208)
61. Lihat, misalnya, Soeharto, *Pikiran,* h. 208.
62. May, *The Indonesian tragedy,* h. 118. Lihat juga Hughes, *Indonesian upheaval,* h. 59; Wertheim, "Whose plot?", h. 208.
63. Soeharto, *Pikiran,* h. 118. Di dalam kisah otobiografi terbarunya, Suharto tidak pernah menyebutkan kunjungan Latief ke rumah sakit ketika Soeharto mengenang peristiwa 30 September– 1 Oktober ("Watashi", bab 11, 12 Januari 1998, h. 40).

6. LANGKAH MENUJU KEKUASAAN

1. Pauker, *Indonesia in 1966,* h. 7.
2. Mackie, *Konfrontasi,* h. 309.
3. Budiman, "Potrait of young Indonesia", h. 78.
4. Penders dan Sundhaussen, *Abdul Haris Nasution,* h. 184.
5. Crouch, *The army and politics,* h. 141.
6. Ruslan Abdulgani, wawancara dengan Brackman, dikutip dalam Brackman, *The communist collapse,* h. 106.
7. Soeharto, *Pikiran,* h. 138. Lihat juga Crouch, *The army and politics,* h. 162.
8. O. G. Roeder, "Aidit in trouble", *FEER,* 28 Oktober 1965, h. 150.
9. Dikutip dalam Crouch, *The army and politics,* h. 62.
10. Dirangkum dalam Dwipayana dan Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto 1 Oktober 1965–27 Maret 1968,* hh. 11, 12.
11. "Pidato Mayor Jenderal TNI Soeharto di hadapan Panca Tunggal di Istana Negara (tanggal 23-10-1965)", dalam Dinuth (ed.), *Dokumen terpilih sekitar G 30 S/PKI,* h. 122.
12. Salinan dokumen ini berjudul 'Revolusi Indonesia' dan terdapat tanda tangan kedua orang ini di dalamnya diterbitkan dalam *Pedoman Rakyat* pada 11 Desember 1965. Saya berterima kasih kepada Harry Can Silalahi dan Henk Schulte-Nordholt yang memberitahu saya adanya dokumen ini dan terbitannya.
13. *Kompas,* 1 November 1965.
14. Soeharto, *Pikiran,* hh. 137, 139.
15. Green, *Indonesia,* h. 77.
16. Soeharto, *Pikiran,* h. 140. Baca juga Dwipayana dan Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto 1 Oktober 1965–27 Maret 1968,* hh. 21–22; Roeder, "Aidit in trouble", h. 150.
17. Hughes, *Indonesian upheaval,* hh. 132–3.
18. Kenyataannya, seperti yang juga ditunjukkan oleh otopsi yang diperintahkan Suharto, tidak ditemukan bukti adanya perlakuan mutilasi, kecuali yang mungkin disebabkan oleh penggunaan senjata tajam atau batu (Ben Anderson, "How did the generals die?").

19. Hughes, *Indonesian upheaval,* h. 154. Baca juga Anon., "Terror in review", *FEER,* 12 Mei 1966, h. 282; Jean Contenay, "Another bloodbath?", *FEER,* 23 November 1967, hh. 357–8, 361–7; Seymour Topping, "Slaughter of Reds gives Indonesia a grim legacy", *New York Times,* 24 Agustus 1966; Hermawan Sulistyo, "The forgotten years", hh. 181–207.
20. Ramadhan, *Soemitro,* h. 114.
21. Soeharto, *Pikiran,* h. 137.
22. Hughes, *Indonesian upheaval,* h. 181.
23. USCIA, *Indonesia–1965,* h. 71n.
24. *Kompas,*1 November 1965.
25. *Kompas,*4 November 1965.
26. Instruksi no 22/Koti/1965; baca Dwipayana dan Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto 1 Oktober 1965–27 Maret 1968,* h. 24.
27. Green, *Indonesia,* hh. 2, 63 (baca juga h. 64). Baca juga Anon., "Kesaksian bekas Dubes", *Tempo,* 20 Februari 1988, h. 85 [wawancara dengan Green]; William P. Bundy, "Foreword", dalam Green, *Indonesia,* h. xii–xiii; Anon. (ed.), *Foreign relations of the United States, 1964–68, vol. XXVI, Indonesia; Malaysia–Singapore; Philippines (*2001). Http://www.gwu.edu/-nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB52/ , h. 301n.
28. Kadane, "The CIA supplied Suharto with death lists in 1965", hh. 12–13; Bunnell, "American 'low posture' policy", hh. 52, 59; Bambang Harymurti, "Kami cuma beri walkie-talkie", *Tempo,* 4 Agustus 1990, h. 26; Anon. (ed.), *Foreign relations of the United States, 1964–68, vol. XXVI,* hh. 308, 323, 337n, 343–53, 357–66, 368–71, 373–5, 379–87, 390–5, 401–9, 422–6.
29. Dikutip dalam Dwipayana dan Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto 1 Oktober 1965–27 Maret 1968,* h. 22.
30. *Kompas,* 30 Desember 1966.
31. Pidato tanggal 8 November 1965 dan 3 Juni 1966 diringkas dalam Dwipayana dan Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto 1 Oktober–27 Maret 1968,* hh. 22, 83.
32. *Kompas,* 26 Mei 1966.
33. Dwipayana dan Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto 1 Oktober 1965–27 Maret 1968,* hh. 112–13.

34. Dikutip dalam Anon., "Sekarang calon itu sudah ada", *Tempo,* 5 Maret 1994, h. 32.
35. Legge, *Sukarno,* h. 400.
36. Soeharto, *Pikiran,* h. 161.
37. Crouch, *The army and politics,* hh. 166–7.
38. Dikutip dalam Gafur, *Pak Harto,* hh. 21, 22.
39. Soeharto, *Pikiran,* h. 162.
40. Dikutip dalam Crouch, *The army and politics,* h. 167.
41. Soeharto, *Pikiran,* h. 163.
42. Dikutip dalam Crouch, *The army and politics,* h. 168.
43. Dikutip dalam Crouch, *The army and politics,* h. 169.
44. Soeharto, *Pikiran,* hh. 166, 167.
45. Crouch, *The army and politics,* hh. 172–5 (lihat juga h. 225). Lihat juga Ramadhan, *Soemitro,* h. 356.
46. Legge, *Sukarno,* h. 401.
47. Harald Munthe-Kaas, "Konfrontasi 2", *FEER,* 3 Maret 1966, h. 393.
48. Soeharto, *Pikiran,* h. 163.
49. Munthe-Kaas, "Konfrontasi 2", h. 394.
50. Crouch, *The army and politics,* h. 177.
51. Ramadhan, *Soemitro,* h. 167. Kemal Idris memiliki pandangan yang sama dengan Sumitro bahwa para jenderal ingin Nasution yang menggantikan Sukarno (wawancara di Jakarta, 18 Juni 1998). Baca juga Penders dan Sundhaussen, *Nasution,* h. 258.
52. Munthe-Kaas, "Konfrontasi 2", h. 393.
53. Soeharto, *Pikiran,* h. 139.
54. Tampaknya hubungan ini memunculkan keterlibatan lebih lanjut dari pemimpin mahasiswa Sofyan Wanandi (Liem Bian Khun) dalam kegiatan bisnis Kostrad.
55. Soeharto, *Pikiran,* hh. 163–4; Rahmayanti dan Aribowo Suprayogi, "Saya sangat kecewa" (wawancara dengan Kemal Idris), *Editor,* 19 September 1992, h. 85. Lihat juga Panitia Penyusunan Sejarah Kostrad, *Kostrad dharma putra,* h. 6; Susanto Pudjomartono, "Setelah tiga jenderal kembali dari Bogor", *Tempo,* 15 Maret 1986, h. 15.
56. *Kompas,* 8 Maret 1966.

57. Ramadhan, *Soemitro,* hh. 90–2. Baca juga Kemal, *Bertarung dalam revolusi,* hh. 186–7; Crouch, *The army and politics,* hh. 189–90n.
58. Panitia Penyusun Sejarah Kostrad, *Kostrad dharma putra,* hh. 74–5; baca juga wawancara dengan Kemal Idris, *Kompas,* 16 Agustus 1968.
59. Ramadhan, *Soemitro,* h. 89.
60. Hughes, *Indonesian upheaval,* h. 233. Lihat juga Anon., "Saksi-saksi sebelas Maret", *Tempo,* 15 Maret 1986, h. 16.
61. Amirmachmud, *H. Amirmachmud menjawab,* h. 54. Lihat juga Tony Hasyim dan Santoso, "Jenderal (Purn.) Amirmachmud: 'Supersemar itu suatu mukjizat'", *Forum Keadilan,* 31 Maret 1994, h. 75; Susanto Pudjomartono, "Setelah tiga jenderal kembali dari Bogor", *Tempo,* 15 Maret 1986, h. 16.
62. Amirmachmud, *H. Amirmachmud menjawab,* h. 55. Lihat juga Panda Nababan, Tony Hasyim, dan Sudarsono, "Jenderal (Purn.) Amirmachmud: 'Surat Perintah 11 Maret yang asli dua lembar'" *Forum Keadilan,* 14 Oktober 1993, h. 72; Soeharto, *Pikiran,* hh. 170–1; *Kompas,* 10 April 1966; Gafur, *Pak Harto,* h. 128; Sekretariat Agitasi-Propaganda CCPKI, *Buku Putih,* h. 138.
63. *Kompas,* 12 Maret 1971.
64. Amirmachmud, *H. Amirmachmud menjawab,* hh. 56–7, 59. Dia memberi cerita yang sama isinya di *Kompas,* 15 Maret 1971. Versi Subandrio (Soebandrio, "Kesaksianku", hh. 98–101) secara signifikan tidak bertentangan dengan versi Amirmachmud.
65. Soebandrio, "Kesaksianku", h. 102.
66. Amirmachmud, *H. Amirmachmud menjawab,* h. 59. Lihat juga wawancara dengan Sri Mulyono Herlambang, bekas komandan angkatan udara, dalam Agustono, "Dendamnya kepada Pranoto bukan main", *De Tak,* 20 September–5 Oktober 1998, h. 12; Soebandrio, "Kesaksianku", h. 102.
67. McDonald, *Suharto's Indonesia,* h. 2.
68. Soeharto, *Pikiran,* h. 173.
69. May, *The Indonesian tragedy,* h. 139.
70. Dwipayana dan Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto 1 Oktober 1965–27 Maret 1968,* h. 57.
71. Gafur, *Siti Hartinah,* h. 220; Ramadhan, *Soemitro,* h. 92.

72. Memorandum DPR-GR (Dewan Permusyawaratan Rakyat-Gotong Royong), 9 Juni 1966, dalam Anon., *Decisions of the fourth plenary session,* h. 43. Lihat juga *Kompas,* 10 Juni 1966. Otobiografi Suharto (Soeharto, *Pikiran,* h. 174) meniru kata-kata ini dengan amat persis. ('GR' dalam DPR-GR, ditambahkan oleh Sukarno tapi kemudian dihilangkan di awal masa Orde Baru.)
73. Soeharto, *Pikiran,* h. 174. Lihat juga Dwipayana dan Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto 1 Oktober 1965–27 Maret 1968,* h. 68 [24 April 1966]; *Kompas,* 12 Maret 1971.
74. Disimpulkan dalam Dwipayana dan Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto 28 Maret 1968–23 Maret 1973,* h. 105 [11 Maret 1969].
75. Soeharto, *Pikiran,* h. 174.
76. *Kompas,* 17 Maret 1966.
77. Hanna, "The magical-mystical syndrome in Indonesian mentality", h. 7.
78. Roeder, *The smiling general,* h. 188.
79. Dikutip dalam O. G. Roeder, "Land of smiles", *FEER,* 7 April 1966, h. 6. Lihat juga Penders dan Sundhaussen, *Nasution,* h. 198.
80. *Kompas,* 5 April, 2 Mei, 5 September 1966.
81. Dikutip dalam Crouch, *The army and politics,* h. 255.
82. McDonald, *Suharto's Indonesia,* h. 59.
83. Ramadhan, *Soemitro,* hh. 176–7.
84. *Kompas,* 5 dan 20 April 1966.
85. Disimpulkan dalam Dwipayana dan Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto 1 Oktober 1965–27 Maret 1968,* h. 124. Baca juga *Kompas,* 14 November 1966.
86. Baca, misalnya, Dwipayana dan Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto 1 Oktober 1965–27 Maret 1968,* hh. 78, 84; McDonald, *Suharto's Indonesia,* h. 113; *Kompas,* 11 April 1966.
87. Anon., "Far Eastern round up", *FEER,* 14 April 1966, h. 44.
88. Soeharto, *Pikiran,* hh. 176, 177. Suharto terang-terangan berpihak pada posisi yang dikemukakan dalam pernyataan ABRI tanggal 5 Mei bahwa Sukarno akan dipertahankan dan kekuasaannya harus tetap dihormati. ("Waperdam a.i. Bidang Hankam Let. Djen. Soeharto dalam tanja-djawab dengan wartawan Ichiro Iwatate...

tgl. 6 Djuni 1966", dalam Achmad (ed.), *Wawantjara,* h. 12; *Kompas,* 18 Juni 1966.

89. O. G. Roeder, "Statesmanship", *FEER,* 16 Maret 1967, h. 482.
90. Dekrit no. IX/MPRS/1966, dalam Anon., *Decisions,* h. 7. Dekrit ini "sah sampai Madjelis Permusjawaratan Rakjat telah terbentuk melalui pemilihan umum" (h.8).
91. Nawaksara berpidato, dalam Anon., *Decisions,* h. 163.
92. Keputusan no. IX/MPRS/1966, dalam Anon., *Decisions,* hh. 131–2.
93. Dekrit no. X/MPRS/1966, dalam Anon., *Decisions,* hh. 10, 11. Lihat juga Dwipayana dan Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto 1 Oktober 1965–27 Maret 1968,* h. 203 [23 Agustus 1967].
94. Anon., *Decisions,* hh. 13–14, 15–18, 19–23, 28–9, 34–6, 37–9, 95–8.
95. Anon., *Decisions,* hh. 135, 136, 143, 145.
96. Pidato Sukarno pada MPRS, 6 Juli 1996, dalam Anon., *Decisions,* hh. 158.
97. *Kompas,* 7 Juli 1966.
98. Tercantum dalam Nasution, *Memenuhi panggilan tugas,* vol. 7, h. 53.
99. Soeharto, *Pikiran,* h. 179.
100. Malik, *In the service of the Republic,* h. 252.
101. *Kompas,* 28 Juli 1966.
102. Soeharto, *Pikiran,* h. 180.
103. Silalahi, "Kata sebuah riwayat", hh. 5–6.
104. Nasution, *Memenuhi panggilan tugas,* vol. 8, h. 154; Penders dan Sundhaussen, *Nasution,* h. 209; Vatikiotis, *Indonesian politics,* 1993, h. 69.
105. Sundhaussen, "The military", h. 64 (di sini Sundhaussen merujuk terutama pada masa sejak 1969).
106. Soeharto, *Pikiran,* h. 180.
107. Mackie, *Konfrontasi,* h. 1.
108. "Tanja djawab wartawan 'Diario Popular' (Lisboa) Dr. Franciscoi Balsemao dengan Waperdam Bid. Hankam", dalam Achmad (ed.), *Wawantjara,* h. 11.
109. Dwipayana dan Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto 1 Oktober 1965–27 Maret 1968,* h. 105.

110. Soeharto, *Pikiran,* h. 181.
111. Ramadhan, *Soemitro,* h. 143. Hasil resmi seminar dimuat dalam Anon., *Sumbangan fikiran TNI-AD kepada Kabinet Ampera.*
112. Ramadhan, *Soemitro,* h. 145. Lihat juga Sarbini Sumawinata, "Recollections of my career", h. 50.
113. "Wawantjara Pak Harto dengan 'The Statesman'" (14 Juni 1966), dalam Achmad (ed.), *Wawantjara,* h. 19.
114. Soeharto, *Pikiran,* h. 232.
115. Dikutip dalam Crouch, *The army and politics,* h. 248.
116. "Tanja djawab wartawan 'Diario Popular'", h. 6.
117. *Kompas,* 19 September, 5 Oktober 1966.
118. *Kompas,* 5 Oktober 1966; Dwipayana dan Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto 1 Oktober 1965–27 Maret 1968,* h. 117; Anon., "The Bung at bay", *FEER,* 23 Februari 1967, h. 263; O. G. Roeder, "Indonesia without Sukarno", *FEER,* 13 April 1967, h. 61.
119. Para tokoh utama adalah Wijoyo (PhD, UC Berkeley, 1961); Ali Wardhana (PhD, UC Berkeley, 1962); Emil Salim (PhD, UC Berkeley, 1964); J. B. Sumarlin (MA, UC Berkeley, 1960); Subroto (MA, McGill; PhD, Universitas Indonesia), dan Mohammad Sadli (MSc, MIT; PhD, Universitas Indonesia).
120. Soeharto, *Pikiran,* h. 232.
121. Dwipayana dan Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto 1 Oktober 1965–27 Maret 1968,* h. 126.
122. "Tanja djawab wartawan 'Diario Popular'", h. 8.
123. Malik, *In the service of the Republic,* h. 256.
124. White, "Problems and prospects of the Indonesian foreign exchange system", h. 152.
125. Anthony Goldstone, "Following the Indonesian lead", *FEER,* 9 Agustus 1974, hh. 51–3.
126. *Kompas,* 21 Juli 1967.
127. O. G. Roeder, "Spring cleaning", *FEER,* 1 Juni 1967, h. 480.
128. "Tanja djawab wartawan 'Diario Popular'", h. 6. Seorang pengamat menyatakan pada tahun 1965 bahwa "penolakan terhadap kapitalisme dan dorongan terhadap sosialisme sebagai pola organisasi ekonomi yang dipilih hampir-hampir merupakan elemen universal dalam ideologi politik Indonesia sejak kemerdekaan" (L.

C., "Socialism dan private business: the latest phase", *Bulletin of Indonesian Economic Studies 2* (1965), h. 13).

129. Soeharto, *Pikiran,* h. 252.
130. Roeder, *The smiling general,* h. 196.
131. Nugroho dan Ismael, *The coup attempt,* hh. 85, 92, 190–2, 193–7, 199–201, 228–46.
132. Soeharto, *Pikiran,* h. 225.
133. Hughes, *Indonesian upheaval,* hh. 274–5.
134. Crouch, *The army and politics,* h. 118; Mody, *Indonesia under Suharto,* h. 22; Dwipayana dan Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto 1 Oktober 1965–27 Maret 1968,* hh. 112, 117, 136, 147–8; O. G. Roeder, "Trial by proxy", *FEER,* 22 Desember 1966, hh. 587–8.
135. Soeharto, *Pikiran,* hh. 182, 184.
136. Van der Kroef, *Indonesia after Sukarno,* h. 44.
137. Ramadhan, *Soemitro,* hh. 75, 76–7.
138. *Kompas,* 8 November, 14 Desember 1966.
139. *Kompas,* 11 November 1966.
140. Soeharto, *Pikiran,* h. 184.
141. *Kompas,* 21, 22, 24 Desember 1966.
142. Lihat laporan pertemuan "*order of battle*" antara Kemal Idris (Kostrad) dengan Sarwo Edhie (RPKAD) dan Dharsono (Siliwangi) pada tanggal 24 Januari, dalam *Kompas,* 25 Januari 1967. Lihat juga Penders dan Sundhaussen, *Nasution,* hh. 203–4; Vatikiotis, *Indonesian politics,*1993, h. 68; USCIA, *Indonesia–1965,* h. 258.
143. *Kompas,* 1 Februari 1967.
144. Dikutip dalam Gafur, *Pak Harto,* h. 25.
145. *Kompas,* 7 Februari 1967. Lihat juga pernyataan Alamsyah atas nama Suharto, yang diberitakan dalam edisi yang sama.
146. Paragraf ini berdasarkan *Kompas,* 24 Februari 1967; Soeharto, *Pikiran,* hh. 187–8; Dwipayana dan Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak harto 1 Oktober 1965–27 Maret 1968,* hh. 155–6, 299; Roeder, "Statesmanships", h. 484; Crouch, *The army and politics,* h. 216.
147. Soeharto, *Pikiran,* h. 190; Dwipayana dan Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto 1 Oktober 196—27 Maret 1968,* hh. 159–60.

Pidato disiarkan di radio tanggal 23 Februari; teksnya dapat ditemukan dalam *Kompas,* 24 Februari 1967.

148. *Kompas,* 25 dan 27 Februari 1967.
149. *Kompas,* 2 Maret 1967.
150. "Pidato penjelasan pelaksanaan pengamanan Ketetapan MPRS no. XXXIII/MPRS/1967 oleh Jenderal Soeharto selaku pengemban Ketetapan MPRS no. IX/MPRS/1967", dalam Dwipayana dan Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto 1 Oktober 1965–27 Maret 1968,* h. 307. Lihat juga *Kompas,* 13 Maret 1967; Suharto "Watashi", bab 15, 16 Januari 1998, h. 36.
151. Ramadhan, *Soemitro,* h. 168. Baca juga Anon., "Sekarang calon itu sudah ada", *Tempo,* 5 Maret 1994, h. 32.
152. Soeharto, *Pikiran,* hh. 189, 190.
153. Soeharto, *Pikiran,* h. 191.
154. Soeharto, *Pikiran,* hh. 191–2.
155. Soeharto, *Pikiran,* hh. 191, 244.
156. *Kompas,* 22 Mei 1967.
157. Ramadhan, *Soemitro,* hh. 265–6. Lihat juga Soeharto, *Pikiran,* hh. 228–9; Suharto, "Watashi", bab 16, 17 Januari 1998, h. 40; O. G. Roeder, "Tense harmony", *FEER,* 24 November 1966, h. 423; Roeder, *Anak desa,* h. 263; Johan Budi S. P. "Jalan Cendana Soeharto punya", *Tempo,* 17 September 1966, h. 26.
158. Dwipayana dan Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto 1 Oktober 1965–27 Maret 1968,* hh. 167–8 [26 Maret 1967]. Lihat juga Anon., "A story road", *FEER,* 13 Februari 1969, h. 282.
159. Tercantum dalam O. G. Roeder, "Sumitro speaks", *FEER,* 10 Agustus 1967, hh. 287–8.
160. Van der Kroef, "Indonesian communism since the 1965 coup", h. 44.
161. Pidato tanggal 3 April dan 2 Juni 1967; baca Dwipayana dan Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto 1 Oktober 1965–27 Maret 1967,* hh. 171, 185.
162. *Kompas,* 22 Maret, 13 April, 3 dan 16 Mei 1967.
163. Dwipayana dan Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto 1 Oktober 1965–27 Maret 1968,* hh. 201–2; Mody, *Indonesia under Suharto,* h. 172.

164. Pidato pada Kongres Ansor, 23 Oktober 1967, disimpulkan dalam Dwipayana dan Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto 1 Oktober 1965–27 Maret 1968*, h. 217.
165. Dwipayana dan Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto 1 Oktober 1965–27 Maret 1968*, h. 246.
166. Soeharto, *Pikiran*, h. 279. Tanggal 7 September 1966, pemerintah menutup sepuluh koran berbahasa Cina; hanya sebuah koran, *Harian Indonesia*, yang diizinkan terus beroperasi (Dwipayana dan Nazaruddin, ed., *Jejak langkah Pak Harto 1 Oktober 1965–27 Maret 1968*, h. 111).
167. Soeharto, *Pikiran*, h. 259. Baca juga *Kompas*, 1 Desember 1967, yang menampilkan versi pidato yang lebih tidak rumit.
168. Mackie, "Towkays and tycoons", h. 94.
169. *Kompas*, 31 Mei 1967.
170. *Kompas*, 20 Mei 1967; Dwipayana dan Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto 1 Oktober 1965–27 Maret 1968*, h. 265 [2 Maret 1968].
171. "Tanja djawab Letdjen Soeharto dengan wartawan Philipina", h. 27.
172. Dwipayana dan Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto 1 Oktober 1965–27 Maret 1968*, h. 177 [5 Mei 1967]; "Waperdam a.i. Bidang Hankam Let. Djen. Soeharto", h. 13–14; "Wawantjara Pak Harto", h. 18; "Tanja djawab Let. Djen. Soeharto", h. 26. Lihat juga pernyataan Adam Malik di *Kompas*, 5 April 1966.
173. *Kompas*, 17 Februari 1968.
174. Crouch, *The army and politics*, h. 234–5.
175. Crouch, "The army, the parties and elections", h. 177; Crouch, *The army and politics*, h. 252. Lihat juga *Kompas*, 26 Januari 1968.
176. *Kompas*, 12 Mei 1967.
177. Dwipayana dan Nazaruddin (ed.) *Jejak langkah Pak Harto 1 Oktober 1965–27 Maret 1968*, hh. 193, 239.
178. Budiman, "Portrait of a young Indonesian", h. 77.
179. Jumlah anggota parlemen meningkat dari 347 menjadi 414. Lihat *Kompas*, 10 Februari, 15 Maret 1968; Mody, *Indonesia under Suharto*, h. 163; Polomka, *Indonesia since Sukarno*, h. 142; Penders dan Sundhaussen, *Nasution*, hh. 214–15; Feith, "Suharto's search

for a political format", h. 98. Bourchier mencatat bahwa "banyak kaum intelektual prodemokrasi yang ditunjuk menjadi anggota MPRS dari jajaran koalisi orde baru tahun 1966 telah kehilangan kursi dalam kegoncangan ini" ("Lineages", h. 177).

180. *Kompas,* 29 November 1967.
181. *Kompas,* 29 Maret 1968. Menariknya, pidato seperti yang diwartakan *Kompas* berbeda sekali isinya dengan yang ada dalam versi Suharto, *Pikiran,* hh. 226–8.
182. Polomka, *Indonesia since Sukarno,* h. 142; McDonald, *Suharto's Indonesia,* hh. 98–9; Feith, "Suharto's search", hh. 101, 102; Roeder, *The smiling general,* h. 154. Baca juga *Kompas,* 18 Juni 1966, 19 dan 28 Maret, 16 April 1968.
183. *Kompas,* 13 April 1968.
184. Salim, "Recollections of my career", h. 62.

7. LEGITIMASI DAN KONSOLIDASI

1. Diparafrasakan dalam Dwipayana dan Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto 28 Maret 1968–23 Maret 1973,* h.9 (1 April 1968).
2. Soeharto, *Pikiran,* h. 238
3. O.G. Roeder, "Little Rice – and no circuses", *FEER,* 20 Juni 1968, h. 606; Budiman, "Portrait of a young Indonesian", h. 78; Kompas, 10 Juni 1968; Polomka, *Indonesia since Sukarno,* h. 107; McDonald, *Suharto's Indonesia,* hh. 77–8.
4. Diparafrasakan dalam Dwipayana dan Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto,* h. 18 (19 Mei 1968).
5. *Kompas,* 21 Maret 1968.
6. Soeharto, *Pikiran,* h. 238.
7. Pangaribuan, *The Indonesian stated secretariat,* h. 24.
8. Malley, "A political biography of Soedjono Hoemardani", h. 49.
9. Soeharto, *Pikiran,* h. 441. Suharto di sini mungkin mengacu pada kenaikan harga bensin pada awal 1970.
10. KAPPI adalah organisasi pemuda dan siswa sekolah menengah yang dibentuk pada Februari 1966.
11. *Kompas,* 7 Mei 1968.

12. Crouch, *The army and politics*, h. 300; Ward, *The 1971 election in Indonesia*, h. 125; White, "Problems and prosects of the Indonesia foreign exchange system", h. 153; Robison, *Indonesia: The rise of capital*, hh. 138–9.
13. Pada 1971, Ali mendirikan lembaga *think-tank* swasta, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), guna mengembangkan kebijakan seputar gagasan-gagasan ini. CSIS dipandang banyak kalangan memiliki pengaruh besar atas kebijakan pemerintah, hal yang dibantah keras oleh Suharto (lihat Soemitro, *Pangkopkamtib Jenderal Soemitro*, h. 41).
14. Diprafrasakan dalam Dwipayana dan Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto*, h. 62.
15. Crouch, *The army and politics*, h. 323.
16. Wawancara dengan Polomka, yang dilaporkan dalam buku Polomka, *Indonesia since Sukarno*, h. 109. Lihat juga Crouch, *The army and politics*, hh. 242, 276, 300, 322.
17. Disebut dalam tulisan Glassburner, "Indonesia's new economic policy and its sociopolitical implications", h. 143. Lihat juga Subroto, "Recollections of my career", hh. 79–80.
18. *Selecta*, 11 Mei 1970, dikutip dalam Britton, "Tentara Indonesia", hh. 150–51n.
19. Diparafrasakan dalam Dwipayana dan Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto*, h. 114 [21 April 1969], h. 476 [14 Oktober 1972]; *Kompas*, 6 Maret 1968.
20. Diparafrasakan dalam Dwipayana dan Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto* , h. 95 [4 Februari 1969].
21. Soeharto, *Pikiran*, h. 241.
22. Soeharto, *Pikiran*, h. 243 (lihat juga h. 240). Lihat juga Dwipayana dan Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto*, h. 49; McDonald, *Suharto's Indonesia*, h. 183; Suharto, "Warashi", bagian 19, 20 Januari 1998, h. 40.
23. Dwipayana dan Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto*, h. 28 (12 Juli 1968).
24. *Kompas*, 2 Januari, 5 Maret 1969.
25. Derek Davies, "The army's double duty". *FEER*, 31 Oktober 1970, h. 23.
26. *Kompas*, 16 April, 18 Desember 1968.

27. Dwipayana dan Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto*, h. 423 [4 Maret 1972]; lihat juga hh. 425–6, serta tulisan Benedict Anderson, "Notes on contemporary political communication", hh. 72–3.
28. *Kompas*, 23 Februari 1971, 17 April 1969. Lihat juga *Kompas*, 7 Oktober 1968, 3 Juni 1969; Anon., "Kompensasi", *FEER*, 24 Oktober 1968, h. 191; Dwipayana dan Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto*, h. 95 [5 Februari 1969]; Anon., *The Armed Forces/Army civic mission is not militarism.*
29. Dikutip dalam buku O.G. Roeder, "Progress before politics", *FEER*, 24 April 1969, h. 249. Lihat juga Roeder, "A thousand Bungs", *FEER* 1971, h. 44.
30. *Kompas*, 6 Oktober 1970.
31. Diparafrasakan dalam Dwipayana dan Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto*, h. 28 [15 Juli 1968].
32. *Kompas*, 19 Agustus 1968.
33. Diparafrasakan dalam Dwipayana dan Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto*, h.301 [27 Januari 1971], h. 354 [16 Agustus 1971].
34. Diparafrasakan dalam Dwipayana dan Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto*, h. 61 [10 November 1968], h. 353 [10 Agustus 1971], h. 354 [16 Agustus 1971].
35. *Kompas*, 2 Oktober 1968, 2 Maret 1973. Monumen yang disebut belakangan menelan biaya Rp 20.870.000. Suharto menyumbang Rp 5.000.000.
36. *Kompas*, 1 Maret 1967.
37. Lihat, misalnya, *Kompas*, 15 Mei 1968.
38. O.G. Roeder, "'New Order' on trial", *FEER*, 13 Maret 1969, h. 439; Van der Kroef, "Indonesian communism since the 1965 coup", hh. 51–2. Lihat juga Martin Ennals, "What happened in Indonesia/An exchange", *New York Review of Books* 25,1 (1978), hh. 44–5,
39. Diparafrasakan dalam Dwipayana dan Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto*, h. 106 (lihat juga hh. 179, 190).
40. *Kompas*, 12 Maret 1971.

41. Diparafrasakan dalam Dwipayana dan Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto*, h. 354 [16 Agustus 1971], h. 419 [22 Februari 1972].
42. May, *The Indonesian tragedy*, h. 223.
43. Crouch, *The army and politics*, h. 223.
44. Ward, *The 1971 election*, h. 5.
45. *Kompas*, 23 Juli 1968.
46. *Kompas*, 20 Agustus 1968; Bob Hawkins, "Stoney faces", *FEER*, 29 Agustus 1968, h. 386; Van der Kroef, *Indonesia after Sukarno*, hh. 135–6.
47. Van der Kroef, *Indonesia after Sukarno*, h. 154. Lihat juga Saltford, "United Nations" involvement".
48. Diparafrasakan dalam Dwipayana dan Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto*, hh. 91–2, 111. Lihat juga *Kompas*, 15 April 1968.
49. *Kompas*, 25 Agustus 1969.
50. Diparafrasakan dalam Dwipayana dan Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto*, h. 111. Penekanan, dan dalam bahasa Inggris, dalam bentuk aslinya.
51. Soeharto, *Pikiran*, h. 245; lihat juga *Kompas*, 23 Juni 1970.
52. Sukarno, *An Autobiography*, h. 312.
53. Diparafrasakan dalam Dwipayana dan Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto*, hh. 476–7 [16 Oktober 1972], h. 516 [12 Maret 1973]. Pengaruh Adam Malik mungkin penting dalam melunakkan sikap Suharto terhadap Cina.
54. Diparafrasakan dalam Dwipayana dan Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto*, h. 142 [27 Juli 1969], h. 148 [7 Agustus 1969], hh. 265–6 [13 Oktober 1970], h. 208 [12 Maret 1970].
55. Suharto, "Watashi", bagian 14, 15 Januari 1998, h. 36.
56. Diparafrasakan dalam Dwipayana dan Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto*, h. 484 [20 November 1972].
57. Tanter, "Intelligence agencies and Third World militarization", h. 472.
58. McVey, "The post-revolutionary transformation of the Indonesian army", II, h. 180.
59. Crouch, *The army and politics*, h. 241.
60. Sundhaussen, "The military", h. 61.

61. Dikutip dalam tulisan O.G. Roeder, "Reprieve for politics", FEER, 20 Maret 1969, h. 521.
62. *Kompas*, 23 Februari 1971.
63. McDonald, *Suharto's Indonesia*, h. 103; Polomka, *Indonesia since Sukarno*, hh. 134–137; Crouch, "The army, the parties and elections", h. 186; Malley, "Soedjono Hoemardani", hh. 54–6. Lihat juga Crouch, *The army and politics*, hh. 257–9; Van der Kroef, *Indonesia after Sukarno*, h. 50; Ward, *The 1971 election*, hh. 16, 144; Ichlasul, *Regional and central government in Indonesian politics*, h. 126.
64. Dikutip dalam buku Crouch, *The army and politics*, h. 260.
65. Dwipayana dan Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto*, h. 272 [14 November 1970]. Lihat juga McDonald, *Suharto's Indonesia*, h. 103; Crouch, "The army, the parties and elections", h. 188; Ward, *The 1971 election*, hh. 17, 115.
66. Ward, "Indonesia's modernisation", h. 70.
67. Ward, *The 1971 election*, h. 129.
68. Soeharto, *Pikiran*, hh. 260–1.
69. Ramadan, *Soemitro*, h. 274.
70. O.G. Roeder, "Pemilu pemalu", *FEER*, 6 November 1969, h. 294. Golkar memperoleh dukungan dari orang-orang seperti Cosmas Batubara, A.B. Nasution, Mochtar Lubis, dan Rosihan Anwar.
71. Crouch, *The army and politics*, h. 267; lihat juga Ward, *The 1971 election*, h. 49.
72. Ward, *The 1971 election*, h. 78.
73. O.G. Roeder, "Between the acts", *FEER*, 3 Juli 1971, h. 6.
74. Crouch, *The army and politics*, h. 268.
75. Ward, *The 1971 elections*, hh. 85–6.
76. Roeder, "Between the acts", h. 6; Ward, *The 1971 election*, h. 50; Budiman, "Portrait of a young Indonesian", h. 81n; *Kompas*, 10 Juni 1971.
77. Diparafrasakan dalam Dwipayana dan Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto*, h. 365 [7 September 1971].
78. Dwipayana dan Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto*, hh. 374–5.
79. Soeharto, *Pikiran*, h. 266.

80. Diparafrasakan dalam Dwipayana dan Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto*, h. 475 [1 Oktober 1972]; lihat juga h. 378 [28 Oktober 1971].
81. O.G. Roeder, "The ladygrows up", FEER, 28 Agustus 1969, h. 526. Lihat juga Soeharto, *Pikiran*, h. 228.
82. Diparafrasakan dalam Dwipayana dan Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto*, h. 273 [20 November 1970].
83. Diparafrasakan dalam Dwipayana dan Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto*, h. 282 [31 Desember 1970]. Lihat juga *Kompas*, 2 Januari 1969.
84. *Kompas*, 18 Agustus 1969, 20 Juni 1968, 3 Januari 1972.
85. Polomka, *Indonesia since Sukarno*, h. 210; Dwipayana dan Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto*, hh. 197–8 [7 Februari 1970], h. 204 [27 Februari 1970]; O.G. Roeder, "Indonesia; the limits of democracy", *FEER*, 19 Maret 1970, h. 17.
86. Ali Moertopo, "Some basic considerations in 25-year development", h.20.
87. Mody, *Indonesia under Suharto*, h. 312; Ward, *The 1971 election*, hh. 188–9; *Kompas*, 30 September 1971. Lihat juga Crouch, *The army and politics*, h. 272.
88. Ali Murtopo, dikutip dalam Hamish McDonald, "We're now much more mature", *FEER*, 14 Mei 1976, h. 27.
89. Diparafrasakan dalam Dwipayana dan Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto*, hh. 365–6 [8 September 1971].
90. Dwipayana dan Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto*, h. 382 [6 November 1971].
91. Crouch, *The army and politics*, hh. 277–8, 280–1, 283, 324–5.
92. Soetriyono, *Kisah Sukses Liem Sioe Liong*, hh. 15–17, 20; Manggi Habir dan Anthony Rowley, "The extended (corporate) family of Liem Sioe Liong", *FEER*, 7 April 1983, hh. 52–3. Crouch, *The army and politics*, hh. 285–7; Robison, *Indonesia: the rise of capital*, hh. 232–3.
93. Schwarz, *A Nation in waiting*, 1994, h. 108; Jonathan Friedland, "An engine of growth", *FEER*, 17 November 1988, h. 100; Robison, *Indonesia: the rise of capital*, hh. 232–3.
94. O.G. Roeder, "Chinese beware", *FEER*, 13 Maret 1971, h. 24.

95. Dwipayana dan Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto*, h. 428 [27 Maret 1972]; S. Iskandar, "Suharto stirs a hornet's nest", FEER, 15 April 1972, h. 50; Anon., "Division of wealth", FEER, 20 Agustus 1973, h. 17.
96. Diparafrasakan dalam Dwipayana dan Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto*, h.445 [14 Juni 1972].
97. Crouch, *The army and politics*, h. 294. Lihat juga Van der Kroef, *Indonesia after Sukarno*, hh. 230–1; Ward, *The 1971 election*, h. 29. Menurut Arief Budiman (wawancara, Melbourne, 5 Juli 2000), Suharto saat itu diperkirakan belum korup, namun dipandang perlu oleh Arief serta yang lain untuk menyadarkannya tentang korupsi yang dilakukan oleh para penasehat dekatnya.
98. Smith, "Corruption, tradition and change", h. 21. Lihat juga *Kompas*, 26 Januari 1970; Budiman, "Portrait of a young Indonesian", h. 79.
99. Dwipayana dan Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto*, h. 193. Lihat juga *Kompas*, 2 Februari 1970.
100. *Kompas*, 2 Februari 1970.
101. Budiman, "Portrait of a young Indonesian", hh. 79–80. Lihat juga *Kompas*, 20 Juni 1970.
102. *Sinar Harapan*, 20 Juli 1970; Dwipayana dan Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto*, hh. 248–9.
103. Budiman, "Portrait of a young Indonesian", h. 79.
104. J.A.C. Mackie, "The Commission of Four report on corruption", hh. 96–101; McDonald, *Suharto's Indonesia*, h. 124; *Sinar Harapan*, 18, 20, 21, 22, 23, 24 Juli 1970. Lihat juga Crouch, *The army and politics*, h. 297.
105. *Kompas*, 18 Agustus 1970; lihat juga Dwipayana dan Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto*, hh. 248–9.
106. Soeharto, *Pikiran*, h. 252.
107. Dwipayana dan Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto*, h. 391 [11 Desember 1971], h. 203 [25 Februari 1970], h. 403 [10 Januari 1972], hh. 404–5 [21 Januari 1972]. Lihat juga *Kompas*, 4 Maret 1970.
108. Winters, *Power in motion*, h. 50n.
109. O.G. Roeder, "A general sort-out", *FEER*, 22 Januari 1970, h. 41.

110. *Kompas*, 21 Desember 1970.
111. Polomka, *Indonesia since Sukarno*, hh. 211–12.
112. O.G. Roeder, "Beautiful authority", *FEER*, 15 Januari 1972, h. 16.
113. Dwipayana dan Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto*, hh. 401–2 [6 Januari 1972].
114. S. Iskandar, "Japan's Indonesian inroads", *FEER*, 27 Mei 1972, h. 33. Suharto sendiri kelak berkomentar bahwa menonjolnya penetrasi ekonomi Jepang telah ikut berperan dalam menumbuhkan perasaan anti-Jepang di kalangan orang-orang Indonesia (Suharto, "Watashi", bagian 18,19 Januari 1998, h. 40).
115. *Kompas*, 11 April 1972.
116. Dikutip dalam buku Polomka, *Indonesia since Sukarno*, h. 156.
117. *Kompas*, 20 November 1972.
118. Soeharto, *Pikiran*, h. 276.
119. Harvey Stockwin, "An ability to lead", *FEER*, 2 April 1973, h. 26.
120. Stockwin, "Winner and losers", *FEER*, 2 April 1973, h. 16.
121. Philip Browning, "Dilemma of Repelita II", *FEER*, 29 Oktober 1973, h. 52.

8. MENEGOSIASIKAN PERMASALAHAN ORDE BARU

1. Diparafrasakan dalam Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto 27 Maret 1973–23 Maret 1978*, hh. 268, 311, 386 [22 Juli, 16 Desember 1975, 16 Agustus 1976].
2. Anon., 'Division of wealth,' *FEER*, 20 Agustus 1973, h. 17.
3. *Kompas*, 8 Agustus 1973. Lihat juga Soeharto, *Pikiran*, h. 278.
4. *Kompas*, 27 Agustus 1973.
5. *Kompas*, 26 Oktober 1973; Rosihan Anwar, 'The students and the technocrats,' *FEER*, 10 Desember 1973, h. 19; O.G. Roeder, 'A campus for harmony,' *FEER*, 10 Desember 1973, hh. 17–18; Crouch, *The army and politics*, h. 311; Soeharto, *Pikiran*, h. 250.
6. Diparafrasakan dalam Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto 27 Maret 1973–23 Maret 1978*, hh. 58–9 [14 Oktober 1973].

7. Ramadhan, *Soemitro*, h. 377 (lihat juga h. 351). Lihat juga *Kompas*, 19 November 1973; Anon., 'The importance of security,' *FEER*, 10 Desember 1973, h. 18; Soemitro, *Pangkopkamtib*, h. 115.
8. Soeharto, *Pikiran*, h. 298.
9. Sundhaussen, 'The military,' hh. 6, 70, 78; Guy Sacerdoti, 'Freedom – to a degree,' *FEER*, 26 Juni 1981, h. 34; Crouch, *The army and politics*, h. 314; *Kompas*, 9, 20 November 1973 dan 2, 3, 7, 8 Januari 1974; Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto* 27 Maret 1973–23 Maret 1978, hh. 72, 74–5, 90, 91; Anon., 'Killing a rumour,' *FEER*, 14 Januari 1974, h. 35.
10. *Kompas*, 22 Januari 1974. Perusahaan-perusahaan yang dimaksud adalah Astra, Bogasari, Batik Keris dan Sahid.
11. Wawancara dengan Jen. (Pur.) L.B. Murdani, Jakarta, 7 Juli 1997. Yoga mengaku bahwa ia mengusulkan tindakan ini kepada Suharto (Wiwoho dan Bandjar, *Memori Jenderal Yoga*, h. 278).
12. *Kompas*, 9 dan 12 Maret 1974.
13. McDonald, *Suharto's Indonesia*, h. 140. Lihat juga Crouch, *The army and politics*, h. 317; Susumu Awanohara, ' A change of tack,' *FEER*, 23 Mei 1975, h. 31; Dan Coggin, 'Uncertainty prevails,' *FEER*, 18 Juli 1975, hh. 34–6; David Jenkins, 'End of the Klondike,' *FEER*, 30 Juli 1976, h. 76.
14. Diparafrasakan dalam Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto 27 Maret 1973–23 Maret 1978*, h. 246 [20 Mei 1975].
15. Suharto, 'Watashi,' bagian 18, 19 Januari 1998, h. 40. Lihat juga Soeharto, *Pikiran*, hh. 440–441.
16. Lihat, misalnya, pidato Suharto pada peringatan Hari Angkatan Bersenjata 1973, dan juga tajuk *Kompas* (*Kompas*, 6 Oktober 1973). Lihat juga Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto 27 Maret 1973–23 Maret 1978*, hh. 66, 71.
17. Diparafrasakan dalam buku Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto 27 Maret 1973–23 Maret 1978*, h. 353 [12 April 1976].
18. Soeharto, *Pikiran*, h. 295.
19. Diparafrasakan dalam buku Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto 27 Maret 1973–23 Maret 1978*, h. 36 dan h. 467 [13 Maret 1977].
20. *Kompas*, 16 Agustus 1981.

21. Soeharto, *Pikiran*, h. 283. Lihat juga Anon., 'Presiden menjelaskan,' *Tempo*, 4 Februari 1978, h. 8.
22. Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto 27 Maret 1973–23 Maret 1978*, hh. 141, 368; Kompas, 20 September 1975; Soeharto, *Pikiran*, hh. 283–6; Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto 29 Maret 1978–11 Maret 1983*, hh. 85, 138–9, 167, 306–7.
23. Robin Osborne, 'The Indonesian offensive,' *FEER*, 17 October 1975, hh. 10–12. Pada 1998, Jen. (Purn.) Benny Murdani menekankan ketakutan yang dirasakan dalam hal keamanan eksternal Indonesia (wawancara, Jakarta, 17 Juni 1998). Murdani bertanggungjawab atas perencanaan dan pelaksanaan invasi tersebut, dengan tanpa banyak berkonsultasi dengan ataupun melibatkan para panglima operasional senior (Tanter, 'Intelligence agencies,' h. 350; Jenkins, *Suharto and his generals*, hh. 24–5n. Lihat juga Crouch, *The army and politics*, h. 341.
24. Dan Coggin, 'Indonesia's "special interest,"' *FEER*, 17 Oktober 1975, hh. 13–14.
25. Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto 27 Maret 1973–23 Maret 1978*, h. 166 [18 Oktober 1974]. Tapi lihat juga 'Record meeting with Tjan" [21 Agustus 1974], dalam buku Way (ed.), *Australia and the Indonesian incorporation of Portuguese Timor* 1974–1976, hh. 85–7.
26. 'Record of conversation between Whitlam and Soeharto' [4 April 1975], dalam buku Way (ed.), *Australia and the Indonesian incorporation*, hh. 246–7 (lihat juga h. 218, 'Cablegram to Canberra' [8 Maret 1975]); Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto 27 Maret 1973–23 Maret 1978*, h. 235 [4 April 1975] (lihat juga h. 222 [8 Maret 1975]).
27. Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto 27 Maret 1973–23 Maret 1978*, hh. 276, 277 [12 dan 16 Agustus 1975].
28. Coggin, 'Timor: the waiting game,' h. 10. Lihat juga 'Cablegram to Canberra' [3 September 1975], dalam buku Way (ed.), *Australia and the Indonesian incorporation*, h. 376.
29. 'Cablegram to Canberra' [27 Septermber 1975], dalam buku Way (ed.), *Australia and the Indonesia incorporation*, h. 436 (lihat juga h. 399).

30. 'Cablegram to Canberra' [27 November 1975] [Versi Woolcott], dalam buku Way (ed.), *Australia and the Indonesian incorporation*, h. 584 (lihat juga h. 592 [1 Desember 1975]).
31. McDonald, *Suharto's Indonesia*, h. 211; Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto 27 Maret 1973–23 Maret 1978*, h. 310.
32. 'Letter from Arriens to Fisher' [18 Desember 1975], memberikan versi pendapat Yusuf Wanandi, dalam buku Way (ed.). *Australia and the Indonesian incorporation*, h. 642.
33. Diparafrasakan dalam Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto 27 Maret 1973–23 Maret 1978*, hh. 312, 367–8. Pada 17 Juli 1976, Suharto menandatangani RUU yang memasukkan Timor Timur menjadi provinsi Indonesia yang ke-27.
34. Dikutip dalam tulisan David Jenkins, 'Suharto: a decade of deeds and dilemmas,' *FEER*, 20 Agustus 1976, h. 21.
35. Anon., 'Developing a feeling of unity,' *FEER*, 4 Agustus 1978, hh. 24–5. Lihat juga *Kompas*, 14 April 1977.
36. Diparafrasakan dalam Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto 27 Maret 1973–23 Maret 1978*, h. 355 [22 April 1976].
37. McDonald, *Suharto's Indonesia*, h. 143. Lihat juga wawancara Winters dengan Ibnu, yang dikutip dalam buku Winters, *Power in motion*, h. 85; Dan Coggin, 'Pertamina piling up the debts,' *FEER*, 11 Juli 1975, h. 34.
38. Emmerson, 'The bureaucracy in political context,' h. 115.
39. Dikutip dalam tulisan Hamish McDonald, 'Now, crisis of loyalty for Suharto,' *FEER*, 19 Maret 1976, h. 46.
40. Harvey Stockwin, 'Letter from Semarang,' *FEER*, 27 Maret 1976, h. 70.
41. McDonald, 'Now, crisis of loyalty for Suharto,' h. 47; Winters, *Power in motion*, h. 91n.; Schwarz, *A nation in waiting*, 1994, h. 324 n35; Bresnan, *Managing Indonesia*, hh. 184–6. Lihat juga Dan Coggin, 'Letter from Jakarta,' *FEER*, 16 Januari 1976, h. 106; Harvey Stockwin, 'Why the general had to go,' *FEER*, 19 Maret 1976, hh. 44–6.
42. *Kompas*, 16 Februari 1977.
43. Soeharto, *Pikiran*, hh. 305–6. Menarik untuk dicatat bahwa dalam 'buku harian' Suharto yang diterbitkan sama sekali tidak disebutkan

pembicaraannya dengan ataupun keputusan-keputusannya menyangkut Ibnu pada masa-masa sulit Pertamina.

44. Stockwin, 'Why the general had to go,' h. 46. Lihat juga Anon., 'Ibnu pergi. Piet akan memberesi,' *Tempo*, 13 Maret 1976, hh. 5–6.
45. Harvey Stockwin, 'Indonesia: a depressing inertia,' *FEER*, 20 Februari 1976, h. 44.
46. MacIntyre, 'Politics and the reorientation of economic policy,' h. 143. Lihat juga Robison, *Indonesia: the rise of capital*, hh. 244–5; David Jenkins, 'Defending Indonesia's oil windfall,' *FEER*, 27 Juli 1979, hh. 94–95.
47. Derek Davies, 'Rapture modified by reality,' *FEER*, 7 November 1975, h. 3, dengan menyebut laporan dari Departemen Perdagangan AS.
48. Diparafrasakan dalam Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto 27 Maret 1973—23 Maret 1978*, h. 239.
49. Diparafrasakan dalam Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto 27 Maret 1973–23 Maret 1978*, h. 491 [26 Mei 1977]. Lihat juga David Jenkins, 'Suharto: borrowing justified,' *FEER*, 27 Agustus 1976, h. 93; McDonald, *Suharto's Indonesia*, h. 73.
50. McDonald, *Suharto's Indonesia*, h. 7; David Jenkins, 'The man who would be king,' *FEER*, 18 November 1977, h. 38. Anon., 'The Orhiba connection,' *Tempo*, 2 Oktober 1976, h. 5.
51. Jenkins, 'The man who would be king, ' h. 40. Lihat juga Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto 27 Maret 1973–23 Maret 1978*, hh. 395–6 [21 September 1976].
52. David Jenkins, 'Suharto battens down,' *FEER*, 5 November 1976, h. 19.
53. Richard M. Smith, 'Indonesia: fading hopes,' *Newsweek*, 8 November 1976, hh. 7–11.
54. Anon., Ramai-ramai sekitar Newsweek,' *Tempo*, 20 November 1976, hh. 5–6; David Jenkins, 'Suharto slates a critic,' *FEER*, 26 November 1976, h. 36; Anon., 'Sudah minta maaf?,' *Tempo*, 12 Februari 1977, h. 16.
55. Soeharto, *Pikiran*, h. 348.
56. Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto 27 Maret 1973–23 Maret 1978*, hh. 412–13.

57. *Kompas*, 3 Januari 1977.
58. David Jenkins, 'Pulling strings for Golkar,' *FEER*, 12 November 1976, h. 34.
59. Ali Murtopo, dikutip dalam tulisan Hamish McDonald, 'We're now much more mature,' *FEER*, 14 Mei 1976, h. 27.
60. Anwar Nasir, 'Popularity by default,' *FEER*, 2 Juli 1987, h. 42 (lihat juga h. 41). Lihat juga Michael Vatikiotis, 'Faith without fanatics,' *FEER*, 14 Juni 1990, h. 25.
61. Hamish McDonald, 'Muslims: an unkonwn quantity,' *FEER*, 27 Agustus 1976, h. 18.
62. Diparafrasakan dalam Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto 27 Maret 1973–23 Maret 1978*, h. 268 [21 Juli 1975].
63. Soeharto, *Pikiran*, h. 259.
64. Diparafrasakan dalam buku Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto 27 Maret 1973–23 Maret 1978*, h. 600 [20 Februari 1978].
65. Dikutip dalam buku Jenkins, *Suharto*, h. 29.
66. Diparafrasakan dalam Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto 27 Maret 1973–23 Maret 1978*, h. 459 [26 Februari 1977].
67. 'Buku Putih,' yang dibuat oleh Kopkamtib dan diberi judul *Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G.30.S/PKI)*, diterbitkan pada 1978; versi yang kedua dan dielaborasi diterbitkan pada 1994 oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia. Lihat, *Sinar Harapan*, 21 Juli 1978, untuk memperoleh komentar editorial yang simpatik tentang projek ini. Lihat juga Anon., 'Buku putih yang pertama,' *Tempo*, 5 Agustus 1978, hh. 5–7.
68. Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto 27 Maret 1973–23 Maret 1978*, hh. 557–8 [10 Oktober 1977]; Anon., 'Memang mereka mengucapkan ahlan wa sahlan,' *Tempo*, 29 Oktober 1977, hh. 6–9; Soeharto, *Pikiran*, h. 281. Dalam kunjungannya, Suharto dan rombongan diizinkan masuk ke Kaaba.
69. McDonald, *Suharto's Indonesia*, h. 243; Jenkins, "A chorus of critics for Suharto,' *FEER*, 9 Desember 1977, hh. 26–7; Soeharto, *Pikiran*, h. 331; *Kompas*, 17 November 1977.
70. *Kompas*, 10 Februari 1978 (tanggal Kompas diizinkan terbit kembali).
71. Soeharto, *Pikiran*, hh. 331–2.

72. David Jenkins, 'A gathering storm on campus,' *FEER*, 7 Maret 1980, hh. 38–9, dan 'What makes Daud Jusuf run?,' *FEER*, 10 Oktober 1980, hh. 36–8; Bourchier, 'Lineages,' h. 220.
73. Lihat *Kompas*, 13 Maret 1978.
74. Soeharto, *Pikiran*, h. 331.
75. McDonald, *Suharto's Indonesia*, hh. 247–9.
76. Sundhaussen, 'The military,' h. 73.
77. Soeharto, *Pikiran*, h. 332; wawancara dengan Selo Sumarjan, Jakarta, 10 Juli 1997. Lihat juga David Jenkins, 'Muslim threat to Suharto,' *FEER*, 10 Maret 1978, h. 27, dan 'The sultan upstages Suharto,' *FEER*, 24 Maret 1978, h. 18; Bresnan, *Managing Indonesia*, h. 201.
78. Soeharto, 'Penjelasan dan pengumuman tentang pembentukan Kabinet Pembangunan III, di Istana Merdeka, pada tanggal 29 Maret 1978,' dalam buku Soeminto (ed.), *Presiden dan wakil Presiden*, h. 291.
79. Soeharto, *Pikiran*, h. 281; Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto 27 Maret 1973–23 Maret 1978*, hh. 386–7 [23 Agustus 1976]; Guy Sacerdoti, 'Acrobatic technocrats star in an Indonesian balancing act,' *FEER*, 16 Mei 1980, h. 45.
80. Soeharto, *Pikiran*, hh. 280–1.
81. McDonald, *Suharto's Indonesia*, h. 166.
82. David Jenkins, 'Setting up the next five years,' *FEER*, 13 Oktober 1978, h. 61; McDonald, *Suharto's Indonesia*, hh. 251–3.
83. Anon., 'Indonesia,' *Far Eastern Economic Review Asia 1980 Yearbook*, h. 188; Soeharto, *Pikiran*, h. 343; Soegih Arto, *Indonesia & I*, hh. 213–4. Langkah pemerintah mungkin terkait pula dengan disetujuinya Amandemen Fraser di AS pada 1975 yang mengaitkan bantuan keamanan Amerika dengan catatan kinerja hak asasi manusia. Lihat juga Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto 27 Maret 1973–23 Maret 1978*, h. 402 [6 Oktober 1976]; Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto 29 Maret 1978–11 Maret 1983*, h. 21 [6 Mei 1978].
84. Diparafrasakan dalam Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto 27 Maret 1973–23 Maret 1978*, h. 57 [5 Oktober 1973]l
85. Soeharto, *Pikiran*, hh. 334–5.

86. Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto 27 Maret 1973–23 Maret 1978*, h. 386; Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto 29 Maret 1978–11 Maret 1983*, hh. 85–6 [15 November 1978].
87. Pidato akhir-tahun Suharto pada 1978, diparafrasakan dalam Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto 29 Maret 1978–11 Maret 1983*, h. 99.
88. Soeharto, *Pikiran*, h. 337. Lihat juga David Jenkins, 'The tale of P4 – and how P7 irked P3,' *FEER*, 24 Juli 1981, hh. 31–2.
89. Diparafrasakan dalam Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto 27 Maret 1973–23 Maret 1978*, hh. 37, 223, 228 [16 Juli 1973, 8 dan 26 Maret 1975]; Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto 29 Maret 1978–11 Maret 1983*, hh. 71, 34 [1 Oktober, 20 Juni 1978] (lihat juga hh. 93, 124–5).
90. *Kompas*, 5 Mei, 5 November 1977.
91. Penders dan Sundhaussen, *Abdul Haris Nasution*, h. 225; Jenkins, *Suharto*, h. 111.
92. Jenkins, *Suharto*, h. ix.
93. Kisah rumit tentang persiapan makalah Widodo diceritakan dalam buku Jenkins, *Suharto*, bab 3–5.
94. Untuk memperoleh pembahasan tentang kebijakan resmi dalam mengonsolidasikan identitas kepentingan antara ABRI dan Golkar, lihat tulisan David Jenkins, 'A question mark over the army,' *FEER*, 11 Januari 1980, hh. 21–2, dan 'The aging of the New Order,' *FEER*, 27 Juni 1980, h. 24. Untuk mendapat analisis rinci tentang debat dan intrik seputar topik penggandengan ABRI dan Golkar, lihat Jenkins, *Suharto*, b. 7.
95. Lihat *Berita Buana*, 28 Maret 1980, untuk mendapat laporan tentang pidato spontannya.
96. Lihat *Berita Buana*, 17 April 1980; David Jenkins, 'Pancasila belongs to everyone,' *FEER*, 30 Mei 1980, h. 23. Lihat juga Soeharto, *Pikiran*, hh. 534–5.
97. David Jenkins, 'A blow to the Achilles heel,' *FEER* 30 Mei 1980, hh. 22–3 , dan 'All my own work, even the typing,' *FEER*, 30 Mei 1980, h. 23. Lihat juga Jenkins, *Suharto*, hh. 164–7; Jasin, *Saya tidak pernah*, hh. 135–55.
98. Soeharto, *Pikiran*, h. 346.

99. Jenkins, *Suharto*, hh. 191–201. Makalah Hankam tersebut kemudian diterbitkan dalam buku Nugroho Notosusanto (ed.), *Pejuang dan prajurit*.
100. Tuduhan-tuduhan ini berkaitan dengan kasus pengadilan atas warisan mantan pejabat Pertamina Achmad Tahir yang diperoleh dengan cara korup. Lihat Anon., 'Kartika, ia berkelit,' *Tempo*, 26 Juli 1980, hh. 12–13.
101. David Jenkins, 'The mirror on the wall,' *FEER*, 27 Februari 1981, hh. 19, 21. Seorang wartawan AS juga diusir menjelang akhir 1980.
102. Susumu Awanohara, 'Islam on the hustings,' *FEER*, 23 April 1982, h. 25.
103. Guy Sacerdoti, 'Consensus conundrums,' *FEER*, 21 Agustus 1981, hh. 34–5, dan 'The catch-all catchword,' *FEER*, 27 Agustus 1982, hh. 20–1.
104. Nasution, dikutip dalam David Jenkins, 'The distinguished dissident,' *FEER*, 22 Agustus 1980, h. 22.
105. *Kompas*, 6 November, 1981.
106. Jenkins, *Suharto*, h. 21; Schwarz, *A nation in waiting*, hh. 117–18; Sudharmono, *Pengalaman*, hh. 295–307. Serangkaian dekrit lainnya di sekitar saat yang sama bertujuan mendahulukan pemberian kontrak pemerintah kepada perusahaan-perusahaan pribumi (Robison, *Indonesia: the rise of capital*, hh. 185, 227). Untuk mendapat pembahasan lengkap tentang Tim 10 dan perannya, lihat Winters, *Power in motion*, hh. 123ff. Untuk memperoleh analisis yang mengagumkan tentang Sekretariat Negara dan pengelolaannya oleh Sudharmono, lihat buku Pangaribuan, *The Indonesian State Secretariat*, terutama bab 2 dan 3.

9. KEJAYAAN

1. Soeharto, *Pikiran*, hh. 1, 2, 5, 392. Lihat juga *Kompas*, 15 November 1985; Bambang Bujono, "Dari sawah naik ke Roma, swasembada jalan terus", *Tempo*, 23 November 1985, hh. 12–13.
2. Soeharto, *Pikiran*, hh. 364, 396, 399, 400.
3. Soeharto, *Pikiran*, h. 372.

4. Susumu Awanohara, "Rough justice in Jakarta", *FEER*, 9 Juni 1983, hh. 17–18; Anon., "Army killer squad spread terror in the cities", *Tapol Bulletin* 58 (1983), hh. 1–5; Anon., "Petrus, di mata Broek", *Tempo*, 14 Januari 1984, h. 13; Van der Kroef, "Petrus", hh. 750–1, 753–4, Guy Sacerdoti, "Enter the communist bogey", *FEER*, 3 Oktober 1980, h. 43.
5. Soeharto, *Pikiran*, hh. 389–90.
6. Tanter, "Intelligence agencies and Third World militarization", h. 375.
7. Tanter, "Intelligence agencies", h. 378.
8. Wawancara dengan L.B. Murdani, Jakarta, 17 Juni 1998. Lihat juga Tanter, "Intelligence agencies", h. 340.
9. *Sinar Harapan*, 19 November 1984; Susumu Awanohara, "Clampdown on the '50", *FEER*, 22 November 1984, hh. 16–17; Cribb, "The trials of H.R. Dharsono", hh. 3–5; Tanter, "Intelligence agencies", h. 383. Lihat juga Dharsono, *Soeharto on trial*; Susanto Pudjomartono, "10 untuk Ton", *Tempo*, 18 Januari 1986, h. 14; Lincoln Kaye, "Jail for the minister", *FEER*, 23 Mei 1985, h. 16, dan "Guilty as charged", *FEER*, 23 Januari 1986, hh. 10–11; Burns, "The post-Priok trials", hh. 65–70.
10. Lihat, misalnya, Syafruddin Prawiranegara, "Pancasila as the sole foundation", hh. 74–83.
11. Susumu Awanohara, "Clampdown on the '50"," h. 17.
12. Soeharto, *Pikiran*, hh. 406–407.
13. Vatikiotis, *Indonesian politics under Suharto*, 1993, hh. 54, 219.
14. Soeharto, *Pikiran*, hh. 408–9. Lihat juga *Kompas*, 3 April 1984.
15. Soeharto, *Pikiran*, hh. 227, 334, 346, 352, 370, 382, 387, 408–9, 438, 464. Lihat juga Ramage, *Politics in Indonesia*, h. 38; Ichlasul Amal, *Regional and central government*, h. 201.
16. Bourchier, "Lineages", hh. x, 2.
17. Soeharto, *Pikiran*, hh. 334, 336, 337, 338, 405, 464.
18. Pidato Hari Kemerdekaan 1983 Suharto yang diparafrasakan dalam buku Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto 16 Maret 1983–11 Maret 1988*, h. 48 (16 Agustus 1983).
19. Soeharto, *Pikiran*, hh. 422, 423. Lihat juga "Asas kebebasan yang bertanggungjawab harus disadari pers sendiri" (sambutan Presiden pada pertemuan pemimpin redaksi dan PWI se-Indonesia di Istana

Negara Jakarta tanggal 11 September 1980, dalam Anon., *Pers pembawa panji-panji demokrasi: Presiden Seoharto tentang pers Indonesia* (Jakarta: Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, 1983), h. 48.

20. Soeharto, *Pikiran*, h. 409. Lihat juga Schwarz, *A nation in waiting*, 1994, h. 239; Susumu Awanohara, "An industry in better shape than ever before", *FEER*, 1 Maret 1984, hh. 28–30.
21. David Jenkins, "After Marcos, now for the Soeharto billions", *Sydney Morning Herald*, 10 April 1986; Hamish McDonald, "Press war continues", *FEER*, 24 April 1986, h. 18, dan "The price of freedom", *FEER*, 8 Mei 1986, hh. 44–5; Michael Byrnes, "Jakarta's army lashes out at the threat from the south", *Australian Financial Review*, 3 Juni 1986; Shim Jae Hoon, "Permission denied", *FEER*, 4 Desember 1986, h. 22.
22. Soeharto, *Pikiran*, h. 375.
23. *Kompas*, 28 April 1984.
24. Federspiel, "Muslim intllectuals", h. 234.
25. Soeharto, *Pikiran*, h. 410.
26. Soeharto, *Pikiran*, hh. 418, 347.
27. Lihat, misalnya, *Kompas*, 18 Agustus 1984, 16 April 1986.
28. Soeharto, *Pikiran*, hh. 410, 566.
29. Lincoln Kaye, "The killing time", *FEER*, 27 Juni 1985, hh. 34-5; Saur Hutabarat, Eksekusi bulan September", *Tempo*, 11 Oktober 1986, hh. 15–16; Harold Crouch, "Postponed executions may have political messages", *FEER*, 20 November 1986, h. 50. Masih belum jelas apakah Syam benar-benar sudah dihukum mati; gosip di Jakarta sejak lama menyebutkan bahwa ia sebenarnya dibebaskan serta diizinkan memakai identitas lain di negara lain (lihat Benedict Anderson, "Petrus dadi ratu", *New Left Review* 3 (serial kedua), 2000, hh. 13–14.
30. Marzuki Darusman menceritakan kepada saya tentang upaya-upayanya untuk meringankan vonis mati para tahanan PKI; tanggapan Suharto adalah tidak memberi keringanan hukuman namun juga tidak memerintahkan pelaksanaan hukuman mati itu atas pertimbangan keluarga terhukum (wawancara, Jakarta, 5 Februari 1999).
31. Soeharto, *Pikiran*, h. 337.

32. Kenyataan bahwa Suharto mengemukakan kematian dari ketiga orang ini menunjukkan bahwa cepatnya kepergiannya mereka cukup memengaruhinya (Soeharto, *Pikiran*, h. 440).
33. *Kompas*, 11 Januari 1984.
34. Dikutip dari pidato APBN 1986–87 Suharto, *Tempo*, 11 Januari 1986, h. 12.
35. Soeharto, *Pikiran*, h. 256.
36. Dikutip dari pidato APBN 1986–87 Suharto, *Tempo* 11 Januari 1986, h. 12.
37. Diparafrasakan dalam *Kompas*, 18 Agustus 1984.
38. Soeharto, *Pikiran*, h. 475. Lihat juga Anon., "Melangkah ke mana lagi, setelah devaluasi?" *Tempo*, 27 September 1986, h. 72. Mengenai keputusan Suharto, termasuk perubahan fikirannya, lihat Salim, "Recollections of my career", h. 72.
39. Sjahrir dan Brown, "Indonesian financial and trade policy deregulation", h. 126; Michael Vatikiotis, "The biggest market", *FEER*, 4 Mei 1989, h. 80. Prakarsa-prakarsa pembaruan itu disimpulkan dalam buku Winters, *Power in motion*, hh. 156–7.
40. Simanjuntak, "The Indonesian economy in 1999", h. 71.
41. MacIntyre, "Politics and the reorientation of economic policy", hh. 146, 150.
42. Vatikiotis, *Indonesian politics*, 1993, hh. 174, 176.
43. Soeharto, *Pikiran*, h. 412.
44. MacIntyre, "Politics and the reorientation of economic policy", h. 152.
45. Soeharto, *Pikiran*, h. 417.
46. John McBeth, "To market, to market", *FEER*, 25 Agustus 1994, h. 47; Adam Schwarz, "Monopoly under fire", *FEER*, 30 April 1992, h. 58, h. 58; Schwarz, *A nation in waiting* 1994, h. 143.
47. Jonathan Friedland, "Jakarta"s Rockefellers", *FEER*, 24 November 1998, hh. 80–1; *Asian Wall Street Journal*, 24, 25, 26 November 1986, 17 September 1990; Jonathan Friedland, "The making of a cash cow", *FEER*, 24 November 1988, h. 82.
48. Paul Handley, "Coming to the defence of the family business", *FEER*, 22 Mei 1986, h. 40; Adam Schwarz, "Corporate catalyst", *FEER*, 30 April 1992, hh. 56–7; Schwarz, *A nation in waiting*,

1994, h. 142; Adam Schwarz, "Father and children", *FEER*, 30 April 1992, h. 55.

49. Crouch, "An ageing president, an ageing regime", h. 43.
50. Ramadhan, *Soemitro*, h. 420..
51. Anon., "Mengenal kehidupan Presiden Soeharto", h. 50.
52. Ramadhan, *Soemitro*, hh. 265–6
53. Wawancara dengan Arief Budiman, Melbourne, 5 Juli 2000.
54. Anon., "A monopoly is forever", *FEER*, 26 Februari 1987, h. 57.
55. Soeharto, *Pikiran*, h. 515.
56. Mackie, "Towkays and tycoons", h. 83.
57. Lihat, khususnya, bab. 96 Soeharto, *Pikiran*.
58. Soeharto, *Pikiran*, hh. 352, 373, 526–7.
59. Soeharto, *Pikiran*, hh. 365, 527, 413.
60. Lihat Shim Jae Hoon, "Minister defends Suharto family imports", *FEER*, 11 Desember 1986, h. 12 (komentar oleh Menteri Koperasi Bustanil Arifin).
61. Soeharto, *Pikiran*, hh. 526, 379.
62. Soeharto, *Pikiran*, h. 538.
63. Soeharto, *Pikiran*, h. 286. Lihat juga Anwar Nasir, "House and household", *FEER*, 2 Juli 1987, h. 38; Priyono B. Sumbogo dan Bambang Sujatmoko, "Ratusan masjid, seribu dai", *Tempo*, 6 Juli 1991, h. 29.
64. Iswandi, *Bisnis militer Orde Baru*, h. 260.
65. Soeharto, *Pikiran*, h. 288.
66. Vatikiotis, Indonesian politics, 1993, h. 52.
67. Soeharto, Pikiran, hh. 288, 293.
68. Mackie and MacIntyre, "Politics", h.4.
69. William Liddle, "Of virtue and vice ... of decisive action", *FEER*, 16 Mei, h. 49.
70. Adam Schwarz, "The indirect route", *FEER*, 30 Maret 1989, h. 50; Anon., "Ia datang membayar pajak", *Tempo*, 4 Februari 1989, hh. 19–20.
71. Richard Nations, "Modesty rewarded", FEER, 22 October 1982, h. 28.
72. Soeharto, Pikiran, hh. 488–9.
73. Vatikiotis, *Indonesian politics*, 1993, hh. 183, 192.

74. Soeharto, *Pikiran*, h. 480 (juga h. 421). Lihat juga Suharto, "Watashi", bagian 26, 27 Januari 1998, h. 40 (Paul Wolfowitz adalah Duta Besar AS untuk Indonesia 1986–89.)
75. Feith, "East Timor", h. 64.
76. *Kompas*, 15 Maret 1984. Lihat juga Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto 27 Maret 1973–23 Maret 1978*, h. 423 [31 Desember 1976].
77. Soeharto, *Pikiran*, hh. 232, 294, 364.
78. Soeharto, *Pikiran*, hh. 426–8. Suharto lupa menyebutkan dalam alinea ini bahwa "setiap pagi saya berlatih dengan sepeda " (h. 450).
79. Rodney Tasker, "Support for Suharto from the "opposition"," *FEER*, 23 April 1987, h. 28; Shim Jae Hoon, "Megawati power", *FEER*, 2 Juli 1987, hh. 20–1. Lihat juga Shim Jae Hoon, "Minority political parties face struggle for votes", *FEER*, 20 November 1986, hh. 48–9.
80. Disebut dalam Anon., "Tak ada presiden seumur hidup", *Tempo*, 4 Oktober 1986, h. 25.
81. Shin Jae Hoon, "Searching for signs of Suharto"s successor", *FEER*, 20 November 1986, h. 49.
82. Dikutip dalam Anon., "Pak Harto tentang calon presiden", *Tempo*, 25 Oktober 1986, h. 12. Lihat juga Soeharto, *Pikiran*, h. 467.
83. A. Luqman, "Sepah tak akan dibuang", *Tempo*, 6 September 1986, h. 17 (wawancara dengan Sudharmono); Shim Jae Hoon dan Rodney Tasker, "Signals for Suharto", *FEER*, 7 Mei 1987, hh. 32–3; Anwar Nasir, "House and household", *FEER*, 2 Juli 1987, h. 38; Michael Vatikiotis, "Reviving the red threat", *FEER*, 9 Juni 1988, h. 27; Vatikiotis, *Indonesian politics*, 1993, hh. 77–8.
84. Soeharto, *Pikiran*, h. 555. Lihat juga Gafur, *Siti Hartinah*, hh. 491–2. (*Mandataris*)
85. Vatikiotis, *Indonesian politics*, 1993, h. 195.
86. Dikutip dalam Rodney Tasker, "Suharto"s staying power", *FEER*, 14 Mei 1987, h. 22.
87. Soeharto, *Pikiran*, h. 547. Lihat juga Michael Vatikiotis, "A closer eye on young civilian leaders", *FEER*, 10 November 1988, h. 83.
88. Vatikiotis, *Indonesian politics*, 1993, h. 83.

89. Soeharto, *Pikiran*, h. 462 (lihat juga bab. 101); Anderson dan Kahin, "Current data on the Indonesian military elite", *Indonesia* 36, 1983, hh. 99–112; *Sinar Harapan*, 5 Oktober 1985; Michael Vatikiotis, "The slow handover", *FEER*, 16 Juni 1988, h. 20.
90. Soeharto, *Pikiran*, h. 430.
91. Michael Vatikiotis, "Siege tactics", *FEER*, 18 Januari 1990, h. 19.
92. Vatikiotis, *Indonesian politics*, 1993, hh. 83–4. Kemarahan Suharto tentang perkembangan ini terlihat jelas dalam pembahasannya yang berkepanjangan tentang topik ini dalam otobiografinya (Soeharto, *Pikiran*, hh. 547–52).
93. Michael Vatikiotis, "Lines of allegiance", *FEER*, 18 Januari 1990, h. 24.
94. Michael Vatikiotis, "Reviving the red threat", *FEER*, 9 Juni 1988, h. 27 dan "A communis comeback?" *FEER*, 16 Juni 1988, hh. 20–1.
95. Michael Vatikiotis, "Outspoken official", *FEER*, 9 Februari 1989, h. 13.
96. Michael Vatikiotis, "Mission completed", *FEER*, 22 September 1988, h. 18, dan "Stirrings on campus", *FEER*, 6 April 1989, h. 34; Herry Mohammad, "Kopkamtib, sejarahnya dulu", *Gatra*, 8 Februari 1997, lewat indonesia-p@igc.apc.org; Amran Nasution d.l., "Melepas tongkat, menjelang lepas landas", *Tempo*, 17 September 1988, hh. 22–5; Rodney Tasker, "Old soldiers never die", *FEER*, 21 April 1988, h. 16; Michael Vatikiotis, "Intelligence influence", *FEER*, 24 November 1988, h. 16 dan "Guided by the past", *FEER*, 29 Desember 1988, h. 17; Tanter, "Intelligence agencies", hh. 283, 348; Lowry, *The Armed Forces of Indonesia*, h. 61.
97. Tanter (Intelligence agencies", h. 232n) menyebutkan wawancara-wawancaranya dengan Sumitro pada 9 Juni 1988 yang intinya seperti ini.
98. Michael Vatikiotis, "Suharto"s staying power", *FEER*, 18 Januari 1990, hh. 22,23. Lihat juga Vatikotis, "Succession talk", *FEER*, 27 April 1989, h. 28, dan "Spiking speculation", *FEER*, 22 Juni 1989, h. 25.
99. Dikutip dalam Michael Vatikiotis, "Brass tacks", *FEER*, 7 September 1989, h. 28.

100. Michael Vatikiotis, "Echoes from the grave", *FEER*, 18 Januari 1990, h. 26.
101. Michael Vatikiotis, "Caution is the catchword for political rejuvenation", *FEER*, 3 Maret 1988, h. 27.
102. Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto* 21 Maret 1988–11 Maret 1993, h. 197 [16 Agustus 1989]; Amran Nasution d.l., "Harus konstitusional, kata presiden", *Tempo*, 23 September 1989, h. 14.
103. Dikutip dalam Michael Vatikiotis, "Stirrings on campus", *FEER*, 6 April 1989, h. 34. Lihat juga Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto* 21 Maret 1988–11 Maret 1993, hh. 422–3 [18 Mei 1991].
104. Michael Vatikiotis, "Directing the debate", *FEER*, 17 Agustus 1989, h. 31.
105. Soeharto, *Pikiran*, hh. 459–60.
106. Ramage, *Politics in Indonesia*, hh. 40, 54, 84, 224n; Bambang Harymurti, "Halal-haramnya kebulatan tekad", *Tempo*, 26 Mei 1990, hh. 22–3; Alamsjah, *Perjalanan hidup*, hh. 313–18; Michael Vatikiotis, "Call to the faithful", *FEER*, 14 Desember 1989, h. 34.
107. Susumu Awanohara, "The balloon goes up on an offshore island", *FEER*, 7 Februari 1985, hh. 61–2.
108. Soeharto, *Pikiran*, h. 404. Lihat juga *Kompas*, 29 November 1984.
109. Diparafrasakan dalam buku Nazaruddin (ed.), *Jejak langkah Pak Harto 16 Maret 1983–11 Maret 1988*, h. 56 [10 September 1983].
110. Soeharto, *Pikiran*, h. 452.
111. Soeharto, *Pikiran* hh. 455–7.
112. Vatikiotis, *Indonesian politics*, 1993, h. 61.

10. KEMEROSOTAN, KEJATUHAN, CATATAN

1. Dikutip dalam tulisan Anon., "Sekarang calon itu sudah ada", *Tempo*, 5 Maret 1994, h. 33. Bahkan pada pertengahan tahun-tahun 1970-an, pada saat ia mendekati usia pertengahan 50-an, perawakan Suharto yang tingginya 167 cm itu beratnya cuma 76 kg. (Roeder, *Anak desa*, h. 265).

2. Dikutip dalam tulisan Ahmad K. Soeriawidjaja d.l.., "Saya orang biasa", *Tempo*, 26 Januari 1991, h. 14.
3. Lihat, misalnya, tulisan Mulya Lubis, "The future of human rights in Indonesia", h. 117.
4. Anon., "Suharto should step down in 1993", Inside Indonesia 24 (1990), hh. 6–7; Michael Vatikiotis "Wisdom of the elders", *FEER* 30 Agustus 1990, hh. 10–11, dan "Glasnost or 100 flowers", *FEER*, 18 Oktober 1990, h. 24; Vatikiotis, *Indonesian politics under Suharto*, 1993, hh. 76, 144.
5. Dikutip dalam tulisan Agus Basri d.l., "Kalau ABRI masuk kandang", Tempo, 29 Februari 1992, h. 34.
6. Harold Crouch dan Hal Hill, "Introduction", dalam buku Coruch dan Hill (eds), *Indonesia Assessment* 1992, h.2.
7. "Demokrasi membutuhkan banyak deliberasi, diskusi, pertukaran pendapat, dan dialog" (dikutip dalam tulisa Diah Purnomowati dan Linda Djalil, "Isyarat 17 Agustus 1990: kreativitas", *Tempo*, 25 Agustus 1990, h. 25); Michael Vatikiotis, "Glasnost or 100 Flowers", *FEER*, 18 Oktober 1990, hh. 23–4.
8. Soeharto, *Pikiran*, h. 529.
9. Lihat tulisan Michael Richardson, "Indonesian firms vow fresh support for plan to bridge wealth gap", *International Herald Tribune*, 27 Januari 1997, via indonesia-p@indpubs.com; Adam Schwarz, "Piece of the action", *FEER*, 2 Mei 1991, h. 40.
10. Arief Budiman, "Suharto's Revised New Order", *FEER*, 22 Desember 1994, h. 21. Lihat juga Mark Clifford, "Questions of loyalty", *FEER*, 29 April 1993, h. 54; John McBeth, "Hidden Currents", *FEER*, 18 Agustus 1004, h.27.
11. Ramage, *Politics in Indonesia*, h. 64.
12. Dikutip dalam buku Schwarz, *A nation in waiting*, 1994, h. 197. Lihat juga Michael Vatikiotis, "The Muslim ticker", *FEER*, 20 Desember 1990, h. 10, *Politics in Indonesia*, hh. 57–8.
13. Schwarz, *A Nation in Waiting*, 1994, h. 101. Lihat juga Vatikiotis, *Indonesian Politics*, 1993, h. 173.
14. Lihat Priyono B. Sumbogo d.l., "Kini tak bisa ditunda lagi", *Tempo*, 11 Mei 1991, "Setelah panggilan Ibrahim dipenuhi", *Tempo*, 29 Juni 1991, hh. 14–15, dan laporan khusus dalam edisi Tempo berikutnya (6 Juli 1991); Vatikiotis, "The Muslim

ticker", h. 10; Michael Vatikiotis, "Practical Piety", *FEER*, 14 Juni 1990, h. 32, dan "Muffling the Monitor", *FEER*, 15 November 1990, hh. 83–4; Adam Scwarz, "A worrying word", *FEER*, 25 April 1991, h. 23; Schwarz, *A nation in waiting*, 1994, hh. 175,191.

15. Bourchier, "Lineages", h. 258. Lihat juga Adam Schwarz, "Opening gambits", *FEER*, 24 Januari 1991, h. 31.
16. Dikutip dalam buku Schwarz, *A nation in waiting*, 1994, h. 214.
17. Marzuki Darusman, "Indonesian political developments", h. 100.
18. Ramage, *Politics in Indonesia*, hh. 57, 67, 157 ff.; Adam Schwarz, " A worrying word", *FEER*, 25 April 1991, h. 23; Abdurrahman Wahid, "The 1992 election", hh. 127–8; Schwarz, *A nation in waiting*, 1994, hh. 188–9, 192.
19. Wahid, "The 1992 election", h. 126.
20. Habibie biasa merujuk pada Suharto dengan sebutan-sebutan yang sangat hormat; "Pak Harto memang sudah seperti bapak saya sendiri. Beliau guru saya" (Dikutip dalam tulisan Agsu Basri d.l., "Mister Crack dari Pare-Pare", *Tempo*, 10 Oktober 1992, via http//:www.pdat.co.id/arsiptmp71/92/nas).
21. Wawancara Vatikiotis dengan Murdani, 3 Mei 1993, dalam buku Vatikiotis, *Indonesian politics*, 1993, h. 208. Murdani menuturkan kisah yang hampir pada 1998 (wawancara, Jakarta, 17 Juni).
22. Vatikiotis, *Indonesian Politics*, 1993, h. 213; John McBeth, "Father knows best", *FEER*, 25 November 1993, h. 25, dan "New kids on the block", *FEER*, 25 November 1993, h. 26.
23. Disebut dalam tulisan John McBeth, "Party patron", *FEER*, 4 November 1993, h. 14.
24. Pengaryaan di sini mengacu pada penempatan perwira-perwira militer dalam posisi-posisi yang biasanya diisi oleh orang-orang sipil, utamnya di dalam birokrasi negara.
25. Suharto berkomentar tentang *Primadosa* bahwa "mereka memutar-balikkan fakta di situ [tentang implikasi-implikasi yang bisa disimpulkan dari hubungannya dengan Untung dan Latief]" (Idrus F. Shahab, "Setelah promosi Prima Dosa." *Editor*, 3 Februari 1994, h. 53); Dadi R. Sumaatmaja, "Dia menggugat Presiden", *Editor*, 3 Februari 1994, h. 56
26. Vatikiotis, *Indonesian politics*, 1993, hh. 96, 215.

27. Seperti ditulis oleh Wilson dalam Anon., "Sekarang calon itu sudah ada", *Tempo*, 5 Maret 1994, h. 32.
28. John McBeth, "Stop press", *FEER* 23 Juni 1994, h. 17. Lihat juga Soeharto, *Pikiran*, h. 453.
29. Ramage, *Politics in Indonesia*, h. 142; Schwarz, *A nation in waiting*, 1994, hh. 72–95; John McBeth, "Techno-battles", *FEER*, 7 April 1994, h. 26; Margot Cohen, "High anxiety", *FEER*, 29 September 1994, h. 32.
30. Schwarz, *A nation in waiting*, 1999, h. 320.
31. Schwarz, *A nation in waiting*, 1994, h. 279.
32. Wawancara dengan Adam Schwarz, 10 Maret 1998, dikutip dalam buku Schwarz, *A nation in waiting*, 1999, h. 325.
33. Dikutip dalam tulisan John McBeth, "Succession talk recedes", *FEER*, 18 Mei 1995, h. 50.
34. Soeharto, Pidato kenegaraan ... 16 Agustus 1995, hh. 6,8, dan Pidato kenegaraan ... 16 Agustus 1996, hh. 7,8.
35. McBeth, "Succession talk recedes", h. 48.
36. Suharto, "Watashi", bagian 28, 29 Januari 1998, h. 40.
37. Kingsbury, *The politics of Indonesia*, h. 213.
38. Henry Sender, "Bambang's challenge", *FEER*, 5 September 1996, h. 56; John McBeth, "Middle ground", *FEER*, 19 Jnuari 1995, h. 48, dan, "All in the family", *FEER*, 14 Maret 1996, hh. 50–1; Schwarz, *A nation in waiting*, 1994, hh. 152–3; Backman, *Asian eclipse*, hh. 278–9.
39. Untuk memperoleh daftar konglomerat terbesar Indonesia pada 1993, lihat Anon., "Peringkat 200 konglomerat 1993", *Warta Ekonomi*, 25 April 1994, hh. 28–35.
40. Kingsbury, *The politics of Indonesia*, h. 202.
41. Untuk memperoleh analisis yang rapi dan tajam tentang skala perilaku korup Suharto, lihat Indonesian Corruption Watch, pernyataan no. 051/SK/ICW/X/98, "Proof of criminal act in the form of abuse of power by former President Soeharto" (mimeo).
42. Lihat tulisan Kelly Bird, "Survey of recent developments", *BIES*, 32, 1 (1996), h. 18, yang merinci upaya-upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam mengaudit kegiatan-kegiatan yayasan yang menghasilkan uang.

43. Kecuali bila disebutkan, paragraf ini didasarkan pada tulisan Margot Cohen, "Twisting arms for alms", *FEER*, 2 Mei 1996, hh. 25–8; Anon., "Tokoh-tokoh kunci yayasan-yayasan raksasa", *Warta Ekonomi*, 13 Juli 1998, hh. 9–13; Naphtarina Mussolini d.l., "Enaknya punya yayasan raksasa", *Warta Ekonomi*, 13 Juli 1998, hh. 14–15.
44. Soeharto, *Pikiran*, h. 292.
45. Soeharto, *Pikiran*, h. 301. Lihat juga tulisan John McBeth, "Ibu Tien"s legacy", *FEER*, 9 Mei 1996, h. 20.
46. McBeth, "Succession talk recedes", h. 48.
47. Dikutip dalam tulisan Anon., "In other words", *FEER*, 10 Maret 1994, h. 13.
48. Salim, "Recollections of my career", h. 69.
49. *Straits Times*, 21 Desember 1995, dalam INTEL no. 313, via apakabar@clarknet.
50. Salim, "Recollections of my career", h. 71.
51. Suharto, "Watashi", bagian 27,28 Januari 1998, h. 40.
52. John McBeth, "Some things linger", *FEER*, 1 Desember 1994, h. 16. Suharto ("Watashi", bagian 21,22 Januari 1998, h. 40) yang kemudian dikomentari bahwa pandangan-pandangan Clinton disampaikan sehubungan dengan pemilihan kembali dirinya.
53. Lihat, misalnya, Suharto, "Watashi", bagian 6,7 Januari 1998, h. 40; bagian 29,30 Januari 1998, h. 40.
54. Wawancara dalam *Nihon Keizai Shimbun*, seperti dilaporkan dalam *Antara*, 15 Agustus 1996, dalam INTEL no. 35, via apakabar-@clark.net.
55. Lihat, misalnya, "It was Soeharto"s order: Sutiyoso", *Jakarta Post*, 12 September 2000; "Syarwan named suspect in attack on PDI office", *Indonesian Observer*, 17 Oktober 2000; "Zacky declared suspect in attack on PDI HQ", *Jakarta Post*, 30 Oktober 2000; "Feisal Tanjung points at Soeharto", Jakarta Post, 10 November 2000; "July 27 attack ordered by Feisal Tanjung", *Indonesian Observer*, 15 November 2000 – semua lewat indonesia-p@indo-pubs.com. Lihat juga John McBeth, "Political encirclement", *FEER*, 21 Oktober 1993, h. 14.
56. Soeharto, *Pidato kenegaraan ... 16 Agustus 1996*, h. 13.
57. John McBeth, "Line in the sand", *FEER*, 27 Maret 1997, h. 14.

58. *Antara*, 19 Agustus 19965, INTEL no. 35, lewat apakabar @100-mail,clark.net.
59. McBeth, "Line in the sand, " h. 15; Patrick Walters, "Suharto critic defends alliance", *Australian*, 15 April 1997. Lihat juga *Kompas*, 4 Februari, 3 April 1997.
60. *Kompas Online*, 9 Juni 1997, lewat indonesia-p@indopubs.com.
61. Soeharto, *Pikiran*, h. 559.
62. *Suara Merdeka*, 18 Agustus 1997, lewat indonesia-p@indopubs.com
63. *Kompas Online*, 6 Desember 1997, lewat indonesia-p@indopubs. Ia tersenyum ketika Menteri Sekretaris Negara Murdiono mengatakan kepadanya tentang rumor kematiannya (*Kompas*, 10 Desember 1997, lewat indonesia-p@indopubs.com).
64. Hadi Soesastro dan M. Chatib Basri, "Survey of recent development, " hh. 9–12,21.
65. Lihat penjelasan Camdessus tentang sikapnya dalam tulisan Paul Kelly, "Body language wrongly read", *Australian*, 9–10 Mei 1998.
66. Wawancara konfidensial, Jakarta, 10 Juni 1998.
67. Wawancara dengan *Nihon Keizai Shimbun*, seperti dilaporkan dalam *Antara*, 15 Agustus 1996, dalam INTEL, no. 35, lewat apakabar@clark,net.
68. *Kompas Online*, 12 Maret 1998, lewat indonesia-p@indopubs.
69. Soeharto, *Pikiran*, h. 191; Kompas, 18 Juni 1973.
70. Lihat, misalnya, Volunteer Team for Humanity, "Early documentation no. 1", 22 Mei 1998, dan "Early documentation no. 2", 9 Juni 1998; Patrick Walters, "Riots engulf Jakarta", *Australian*, 14 Mei 1998; Patrick Walters, Don Greenlees dan Robert Garran, "Rioters control Jakarta streets", *Australian*, 15 Mei 1998; Patrick Walters and Don Greenlees, "Death toll soars in riot's wake", *Australian*, 16–17 Mei 1998.
71. Forrester, "Introduction", hh. 21–2. Lihat juga Tim Tajuk, "Tekateki Jenderal Sjafrie", *Tajuk*, 3 September 1998, hh. 12–15.
72. Schwarz, *A nation in waiting*, 1999, h. 308.
73. *Kompas Online*, 18 Mei 1998, lewat indonesia-p@indpubs.com.
74. Disebut dalam buku Sinansari, *Kronologi situasi penggulingan Soeharto*, h. 88.
75. Wawancara Michael Vatikiotis dengan Nurcholish Majid, 20 Mei 1998,

dikutip dalam buku Vatikiotis, *Indonesian politics*, 1998, h. 230.

76. Dikutip dalam buku Schwarz, *A nation in waiting*, 1999, h. 361.
77. Teks pidato Suharto ada dalam buku Sinansari, *Kronologi*, hh. 102–11. Lihat juga tulisan Patrick Walters, "I will surrender power", *Australian*, 20 Mei 1998.
78. Dikutip dalam buku Sinansari, *Kronologi*, h. 114.
79. Wawancara dengan Ryaas Rasyid, Jakarta, 12 Juni 1998; Schwarz, *A nation in waiting*, 1999, h. 364. Tampaknya jelas bahwa, kendati pandangannya tentang perlunya, demi kebaikan negeri, agar Suharto turun, Wiranto tetap setia kepadanya sampai akhir (wawancara dengan Nazaruddin Syamsuddin, Jakarta, 17 Juni 1998), dan tidak melakukan kesepakatan khusus untuk mempertahankan posisinya dengan Habibie.
80. Sulaeman Sakib dan Hartono, "Wawancara H. Probosutedjo: saya betul-betul jauh dari nepotisme", *Tajuk* 1, 15 (1998), h. 31. Untuk memperoleh rekonstruksi yang menyentuh tentang saat-saat terakhir itu, lihat Schwarz, *A nation in waiting*, 1999, hh. 308–9.
81. Terjemahan Bahasa Inggris dari pidato pengunduran dirinya bisa didapatkan pada buku Forrester dan May (eds.), *The fall of Soeharto*, hh. 246–7.
82. Kingsbury, *The politics of Indonesia*, h. 99.
83. David Jenkins, "The politics of corruption", *FEER*, 20 Agustus 1976, h. 19; Backman, *Asian eclipse*, hh. 12, 261.
84. O.G. Roeder, "Progress before politics", *FEER*, 24 April 1969, h. 249.
85. Soeharto, *Pikiran*, h. 249.
86. Derek Davies, "The army's double duty", *FEER*, 31 Oktober 1970, h. 22. Untuk memperoleh diskusi yang menggelitik yang didasarkan seputar tema-tema "sirkulasi" dan "kemacetan" di dalam rejim tersebut, lihat tulisan Sidel, "Macet total",
87. Sulaeman Sakib dan Hartono, "Wawancara H. Probosutedjo: saya betul-betul jauh dari nepotisme", *Tajuk*, 1, 15 (1998), h. 32.
88. Lihat, misalnya, komentar-komentar dari Menteri Pertahanan Yuwono Sudarsono (*Jakarta Post*, 14 Juni 2000, lewat indonesia-p@indopubs.com).

89. *Dow Jones Newswires*, 14 April 1999, lewat apakabar@saltmine.radix.net.
90. Susumu Awanohara, "Jakarta aims to spread development"s benefits throughout the nation", *FEER*, 7 Februari 1985, h. 43.
91. Detikcom, http://www.detikcom/berita/199812/981219-1/46.html.
92. Disebut dalam buku Schwarz, *A nation in waiting*, 1999, h. 375.
93. Jenny Grant, "Phone tap points to Suharto cover-up", *South China Morning Post*, 19 Februari 1999, lewat Reuters Business Briefing (http://wwwf.briefing. Reuters.com). Ghalib dan Menteri Kehakiman Muladi berangkat ke Swiss pada Mei 1999 guna menyelidiki laporan-laporan majalah *Time* tentang kekayaan-kekayaan luar biasa keluarga Suharto namun tidak menemukan jejak dari dugaan kekayaan ini (Johan Budi S.P. dan Iwan Setiawan, "A Tortuous trail to Suharto"s Trial", *Tempo* (edisi Bahasa Inggris), 10 September 2000, h. 18).
94. *Jakarta Post*, 19 Februari 2000, lewat indonesia-p@indopubs.com

11. ORANGNYA DAN PENINGGALANNYA

1. *Asiaweek*, 5 Juli 1996.
2. 2. Suharto, "Watashi", 31 Januari 1998, h. 40.
3. John Colmey dan David Liebhold, "The family firm", *Time*, 24 Mei 1999, hh. 36–48. Para pengacara Suharto selanjutnya menggugat *Time* sebesar US$27 miliar berdasarkan fitnah tapi tidak berhasil (*Siar*, 6 Juni 2000, lewat apakabar@saltmine.radiz.net).
4. Vatikiotis, *Indonesian politics*, h. 27.
5. Soeharto, *Pikiran*, h. 434.
6. Siti Hardiyanti Rukmana (ed.), *Butir-butir budaya Jawa*.
7. Wawancara dengan Subroto, Jakarta, 20 Juni 1998.
8. Wawancara dengan Frans Seda, Jakarta, 11 Februari 1999.
9. Soeharto, *Pikiran*, h. 300.
10. O.G. Roeder, *The smiling general*.
11. John McBeth, "Succession talk recedes", *FEER*, 18 Mei 1995, h. 48. Lihat juga Schwarz, *A nation in waiting*, 1994, h. 44.
12. Lihat, misalnya, Mody, *Indonesia under Suharto*, h. 132; Schwarz, *A nation in waiting*, 1994, h. 278.
13. Lihat, misalnya, buku Hanna, "The magical-mystical syndrome",

h. 8; May, *The Indonesian tragedy*, h. 38; McDonald, *Soeharto's Indonesia*, h. 1.

14. Pemberton, *On the subject of "Java"*, h. 8.
15. Varikiotis, *Indonesian politics*, 1993, h. 201.
16. Soeharto, *Pikiran*, h. 311.
17. Contoh sangat menarik dari pemikiran Suharto dengan menggunakan istilah-istilah Jawa bisa dilihat dalam "Laporan stenografi amanat Presiden Sohearto pada malam ramah-tamah dengan pengurus KNPI, tanggal 19 Juli 1982 di Jl. Cendana No. 8, Jakarta" (yang diberikan kepada saya atas kebaikan hati Ken Ward).
18. Soeharto, *Pikiran*, hh. 382, 441–2. Lihat juga Ramadhan, *Soemitro*, h. 309; Suharto, "Watashi", bagian 24, 25 Januari 1998, h. 36; Soemitro, *Pangkopkamtib*, h. 42.
19. Soeharto, *Pikiran*, h. 235.
20. Soeharto, "Dalam perjuangan di bidang apa pun, kekuatan andalan dan modal utama kita adalah rakyat", h. 3.
21. *Kompas*, 11 Maret 1971. Dalam kaitan ini sangat menarik untuk mencatat bahwa skeretaris pribadi Suharto, Anton Tabah, menanggapi penegasan penulis tentang tanggungjawab Suharto atas pembunuhan-pembunuhan 1965–66 bahwa "yang menumpas PKI adalah Rakyat" (kom. prib., 1 Januari 2000). Arief Budiman mengatakan kepada penulis tentang cara-cara di mana mereka yang diburu dan dibunuh itu, sering kali dengan cara-cara yang menakutkan, diperlakukan seperti bukan manusia. (wawancara, Melbourne, 5 Juli 2000).
22. Dikutip dalam SH, "Sebuah keputusan 12 Maret", *Tempo*, 22 Maret 1986, h. 13.
23. Soeharto, *Pikiran*, h. 332.
24. Dikutip dalam Anon., "Interview with Ali Sadikin", *Inside Indonesia* 16 (1988), h. 3.
25. Dikutip dalam tulisan Seth Mydans, "The nutty President, a man for his times", *New York Times*, 17 Juni 1999.
26. Mackie dan MacIntyre, "Politics", h. 1.
27. Lihat tulisan van der Eng yang mengandung banyak informasi dan mendalam itu, "Indonesia"s economy and standard of living during the 20th century"; lihat juga Booth, "Poverty and inequality in the Soeharto era."

28. Suharto, "Watashi", bagian 30, 31 Januari 1998, h. 36.
29. Dikutip dalam buku Schwarz, *A nation in waiting*, 1994, h. 237 (lihat hh. 235–6 untuk memperoleh pembahasan yang lebih luas tentang kemiskinan budaya di masa Orde Baru).

Bibliografi

ARSIP-ARSIP

Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag: Archief van de Netherlands Forces Intelligence Service/Centrale Militaire Inlichtingendienst (NEFIS/CMI) 1942–1949; Archief Indonesische kwestie: Indonesië in de Veiligheidsraad

Nationaal Archief , Den Haag: Archief van de Algemene Secretarie van de Nederlands-Indische Regering en de daarbij gedeponeerde archievem, 1942–1950; Collectie Spoor; Rapportage Indonesië 1945–1950; Procureur-General bij het Hooggerechtshof van Nederlands-Indië 1945–1949; Dossiersarchief van het Ministerie van koloniën en opvolgers (1859–) 1945–63 (–1979)

Ministerie van Defensie, Central Archievendepot, Rijswijk: Algemeen-Archief van de Centrale Militaire Inlichtingendienst (NEFIS); Hoofdkwartier van de Generale Staf van het Leger in Indonesië; Krijgsgeschiedkundige Sectie van het Hoofdkwartier Generale Staf in Indonesië; Archief 'T'Brigade

Sectie Militaire Geschiedenis, Koninklijk Landmacht, Den Haag: Catatan Letnan K. Meijer II (Archief NI 45-50, 0101/1A); Arsip Brigade 'T' 216–5

Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Amsterdam: Indische collectie

SURAT KABAR DAN MAJALAH

Adil, Antara, Antara News Bulletin, Asian Wall Street Journal, Asiaweek, Associated Press, Australian, Australian Financial Review, Berita Buana, D & R, Daily Yomiuri Online, De Locomotief, De Tak, Dow Jones Newswires, Duta Masyarakat, Economist, Editor, Far Eastern Economic Review (dan Yearbook), Forum Keadilan, Gatra, Guardian, Harian Rakyat, Independent Monthly, Indonesia Business Weekly, Indonesia Raya, Indonesian Herald, Indonesian Observer, Indonesian Times, Inter Press Service On-Line, International Herald Tribune, Jakarta Post, Jawa Pos, Kedaulatan Rakyat, Keng Po, Kompas, Matra, Media Indonesia, Merdeka, New York Review of Books, New York Times, Newsweek, Nihon Keizai Shimbun, Pedoman Rakyat, Republika, Reuter, Review of Indonesia, Siasat, Sinar Harapan, South China Morning Post, Straits Times, Suara Merdeka, Suara Pembaruan, Suluh Indonesia, Sydney Morning Herald, Tajuk, Tempo, Tempo Interaktif, Time, Tiras, United Press International, Warta Ekonomi

BUKU, DISERTASI, JURNAL, DAN ARTIKEL

Abdurrahman Wahid, "The 1992 election: a devastating political earthquake?", dalam Crouch dan Hill (ed.), *Indonesia Assessment 1992.*

Abrar Yasra dan Ramadhan K.H., *Hoegeng: polisi idaman dan kenyataan* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993).

Achmad D.S. (ed.), *Wawantjara djendral dengan wartawan* (Solo: Rilan,1966).

Adian Husaini, *Soeharto 1998* (Jakarta: Gema Insani, 1996).

Aidit, D.N., *Indonesian society and the Indonesian revolution* (Jakarta: Yayasan 'Pembaruan', 1958).

Alamsjah Ratu Prawiranegara, *Perjalanan hidup seorang anak yatim piatu* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995).

Ali Moertopo, "Pak Harto, Pak Yoga, dan saya, terpisah tapi berjalan berhimpitan", dalam Wiwoho dan Bandjar, *Memori Jenderal Yoga.*

_____"Some basic considerations in 25-year development", *The Indonesian Quarterly 1*, 1 (1972), hh. 3–25.

Amirmachmud, *H. Amirmachmud menjawab* (Jakarta: CV Haji Masagung, 1987).

Amnesty International, *Power and impunity: human rights under the New Order* (London: Amnesty International Publication, 1994).

Anderson, B.R.O'G., "Japan: 'The light of Asia'", dalam Josef Silverstein (ed.), *Southeast Asia in World War II: four essays* (New Haven: Yale University, 1966).

Anderson, Ben, "Current data on the Indonesian military elite", *Indonesia* 40 (1985), hh. 131–64.

_____"Current data on the Indonesian military elite", *Indonesia* 45 (1988), hh.137–60.

_____"Current data on the Indonesian military elite", *Indonesia* 48 (1989), hh. 65–96.

_____"How did the generals die?", *Indonesia* 43 (1987), hh. 109–34.

Anderson, Benedict R. dan Ruth T. McVey (dengan bantuan Frederick P. Bunnell), *A preliminary analysis of the October 1, 1965 coup in Indonesia* (Ithaca: Modern Indonesia Project, Cornell University, 1971).

Anderson Benedict R. O'G., "Cartoons and monuments: the evolution of political comunication under the New Order", dalam Jackson dan Pye (ed.), *Political power and communications in Indonesia.*

_____"Notes on contemporary political communication", *Indonesia* 16 (1973), hh. 38–80.

_____"Old state, new society: Indonesia's New Order in comparative historical perspective", dalam Benedict R. O'G. Anderson,

Language and power: exploring political cultures in Indonesia (Ithaca: Cornell University Press, 1990).

_____*Java in a time of revolution: occupation and resistance, 1944–1946* (Ithaca: Cornell University Press, 1972).

Anderson, Benedict dan Audrey Kahin, "Current data on the Indonesian military elite", *Indonesia* 29 (1980), hh. 155–75

_____"Current data on the Indonesian military elite", *Indonesia* 33 (1982), hh.129–48.

_____"Current data on the Indonesian military elite", *Indonesia* 36 (1983), hh. 99–134.

_____"Current data on the Indonesian military elite (continued)", *Indonesia* 37 (1984), hh.145–69.

_____"The Fourth Development Cabinet announced March 17, 1983", *Indonesia* 35 (1983), hh. 37–52.

Anderson, Benedict dan Judith Ecklund, "Current data on the Indonesian military elite", *Indonesia* 23 (1977), hh. 175–90.

Anderson, Benedict, Judith Ecklund, dan Audrey Kahin, "Current data on the Indonesian military elite", *Indonesia* 26 (1978), hh. 159–77.

Anderson, Benedict dan Elizabeth Graves, "Current data on the Indonesian military elite after the reorganization of 1969–1970", *Indonesia* 10 (1970), hh. 194–208.

Anderson, Benedict, Elizabeth Graves, Filino Harahap, Mildred Wageman, dan Elizabeth Witton, "Current data on the Indonesian military elite", *Indonesia* 7 (1969), hh. 195–201.

Anderson, Benedict dan Susan Hatch, "Current data on the Indonesian military elite", *Indonesia* 15 (1973), hh. 187–97.

_____"Current data on the Indonesian military elite", *Indonesia* 18 (1974), hh. 153–67.

Anderson, Benedict, Takashi Shiraishi, dan James T. Siegel, "Current data on the Indonesian military elite", *Indonesia* 60 (1995), hh. 101–46

_____"Current data on the Indonesian military elite: October 1, 1995–December 31, 1997", *Indonesia* 65 (1998), hh. 179–94.

_____"Current data on the Indonesian military elite: January 1, 1998–31 January, 1999", *Indonesia* 67 (1999), hh. 133–62.

_____"The Indonesian military in the mid–1990s: political maneuvering or structural change?", *Indonesia* 63 (1997), hh. 91–105.

Anderson, David Charles, "The military aspects of the Madiun affair", *Indonesia* 21 (1976), hh. 1–63.

Anhar Gonggong, *Abdul Kahar Mudzakkar: dari patriot hingga pemberontak* (Jakarta: Grasindo, 1992).

Anon., "1.7 million ex-tapols are being re-registered", *Tapol Bulletin* 70 (1985), h.1.

_____"18 tahun Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat 1950–1969", terbitan khusus *Kata* [sic! *Karya*] *Wira Jati*, no. 31, 1969.

_____"Anti-communist witch-hunt, 1985", *Tapol Bulletin* 72 (1985), hh. 15–16.

_____"Army killer squads spread terror in the cities", *Tapol Bulletin* 58 (1983), hh. 1–5.

_____"Berdirinja S.S.K.A.D.", dalam Anon., *Documentaria Cursus 'C'. Sekolah Staf & Komando Angkatan Darat Tentara Nasional Indonesia. Angkatan ke I Oktober '58/Desember '59* (n.p.:n.p., n.d.).

_____"Buyung Nasution interviewed by Tapol", *Tapol Bulletin* 50 (1982), hh. 3–9.

_____"A clean up for Suharto's image", *Tapol Bulletin* 72 (1985), hh. 18–19.

_____"Colonel Latief's defence", *Tapol Bulletin* 35 (1979), hh. 8–10.

_____"Daftar pembagian kelompok dalam pembahasan pada tgl. 12-12-'60 untuk membahas pertanjaan 1, persoalan 1', *Karya Wira Jati* 1 (1961), h. 59.

_____"Daftar pembagian kelompok dalam pembahasan pada tgl. 13-12-'60 untuk membahas pertanjaan 2, persoalan 1', *Karya Wira Jati* 1 (1961), h. 60.

_____"Daftar pembagian kelompok dalam pembahasan persoalan II tentang penggunaan kekuatan militer dalam penjelesaian keamanan dalam negeri pada tgl. 14-12-'60 s/d tgl. 15-12-'60', *Karya Wira Jati* 1 (1961), h.75.

_____"Former police chief speaks out on regime" [interview with Hugeng], *Tapol Bulletin* 13 (1975), hh. 4,7.

_____"Hal[2] mengenai seminar I SESKOAD tentang masalah[2] pertahanan", *Karya Wira Jati* 1 (1961), hh. 5–7.

_____"Interview with Ali Sadikin", *Inside Indonesia* 16 (1988), hh. 2–4.

_____"Isu Soeharto Cina, siapa bapaknya?", wysiwyg://47/http://www.geocities.com/CapitolHill/4120/soeharto.html, diakses pada 26 Januari 2000.

_____"Kesan penindjauan Presiden Soeharto selama delapan hari ke 53 projek di desa-desa Djawa Tengah dan Djawa Timur", *Indonesia Magazine* 5 (1970), hh. 43–50, 109–23.

_____"Kesimpulan dan hasil pembahasan persoalan kedua", *Karya Wira Jati* 1 (1961), hh. 61–6.

_____"Kesimpulan dan hasil pembahasan persoalan pertama", *Karya Wira Jati* 1 (1961), hh. 46–9.

_____"Mengenal kehidupan Presiden Soeharto", *Indonesia Magazine* 19 (1973), hh. 45–54.

_____"Pembahasan dan pendapat kelompok[2] seminar terhadap hasil telaahan militer kelompok III jang disimpulkan", *Karya Wira Jati* 1 (1961), hh. 67–74.

_____"Pembahasan dan pendapat[2] kelompok[2] seminar terhadap hasil telaahan militer kelompok I jang disimpulkan", *Karya Wira Jati* 1 (1961), hh. 50–8.

_____"A profile of Ali Murtopo (1924–)", *Tapol Bulletin* 50 (1982), h.22.

_____"A profile of General Benny Murdani", *Tapol Bulletin* 57 (1983), hh. 16–17

_____"Republic under siege: an interview with Sri Sultan Hamengku Buwono IX", dalam Wild dan Carey (ed.), *Born in fire.*

_____"Soal yang telah dipeladjarkan di C 'C' I SSKAD dari bulan ke bulan", dalam Anon., *Documentaria Cursus 'C'.*

_____"Suharto should step down in 1993", *Inside Indonesia* 24 (1990), hh. 6–7.

_____"White book of the 1978 students' struggle', *Indonesia* 25 (1978), hh. 151–82.

_____*The Armed Forces/Army civic mission is not militarism* (Jakarta: Departemen Penerangan, 1967).

_____*CSIS 20 tahun* (Jakarta: n.p., 1991).

_____*Decisions of the fourth plenary session of the Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara (The Provisional People's Consultative Assembly) 20th of June–5th of July 1966* (terbitan khusus 005/1966, Jakarta: Departemen of Information, 1966).

_____ *Documentaria Cursus 'C'. Sekolah Staf & Komando Angkatan Darat Tentara Nasional Indonesia. Angkatan ke 1 Oktober '58/Desember '59* (n.p.:n.p., n.d.).

_____*Foreign Relations of the United States, 1964–68, vol. XXVI, Indonesia; Malaysia–Singapore; Philippines* (2001), http://www.-gwu.edu/-nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB52/.

_____*G-30-S dihadapan Mahmillub 3 di Djakarta* (Jakarta: P.T. Pembimbing Masa, 1966–67).

_____*Gerakan 30 September antara fakta dan rekayasa: berdasarkan kesaksian para pelaku sejarah* (Yogyakarta: Center for Information Analysis/Penerbit Media Pressindo, 1999).

_____*Jawa Nenkan* [Buku Tahunan Jawa] (Jakarta: Jawa Shinbunsha, 1944).

_____*Peranan TNI Angkatan Darat dalam perang kemerdekaan (revolusi pisik 1945–1950)* (Bandung: Pusat Sedjarah Militer Angkatan Darat, 1965).

_____*Putusan Mahkamah Tentara Agung Republik Indonesia de Djogjakarta tanggal 27 Mei 1948 dalam perkaranya: terdakwa; Djenderal Major Sudarsono, Mr. Muhamad Yamin, Mr. Achmad Subardjo, Mr. Iwa Kusuma Sumantri c.s. Peristiwa 3 Juli 1946* (Jakarta: G.C.T. van Dorp, 1949).

_____*Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta: latar belakang dan pengaruhnya*, 5th printing (Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada, 1992 [aslinya diterbitkan oleh Seskoad, Bandung, 1989]).

_____*Soeharto, President of the Republic of Indonesia* (Jakarta: Departemen Penerangan, 1988?)

_____*Sumbangan fikiran TNI-AD kepada Kabinet Ampera: hasil seminar AD ke-II tanggal 25 s/d 31 Agustus 1966 di Grâha Wiyata Yudha/Seskoad Bandung* (n.p.: Seksi Penerangan Koti, 1966?).

_____*Tri Komando Rakyat: pembebasan Irian Jaya (Trikora)* (Jakarta: Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, 1995).

Anwar, Dewi Fortuna, *Indonesia's strategic culture: ketahanan nasional, wawasan nusantara and Hankamrata* (Brisbane: Australia–Asia Papers No. 75, Centre for the Study of Australia–Asia Relations, Griffith University, 1996).

Anwar, Rosihan, *Soebadio Sastrosatomo: pengemban misi politik* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995).

Ascher, William, "From oil to timber: the political economy of off-budget development financing in Indonesia", *Indonesia* 65 (1998), hh. 37–61.

Aspinall, E., "Students and the military: regime friction and civilian dissent in the late Suharto period", *Indonesia* 59 (1995), hh. 21–44.

Aspinall, Ed, "Opposition and elite conflict in the fall of Soeharto", dalam Forrester dan May (ed.), *The fall of Soeharto*.

Aspinall, Edward, Herb Feith, dan Gerry van Klinken (ed.), *The last days of President Suharto* (Clayton: Monash Asia Institute, 1999).

Backman, Michael, *Asian eclipse: exposing the dark side of business in Asia* (Singapore: John Wiley & Sons, 1999).

Bardosono, *Peristiwa Sulawesi Selatan 1950* (Jakarta: Yayasan Pustaka Militer, 1955).

Barr, Christopher M., "Bob Hasan, the rise of Apkindo, and the shifting dynamics of control in Indonesia's timber sector", *Indonesia* 65 (1998), hh. 1–36.

Bertrand, Jacques, "False starts, succession crises, and regime transition: flirting with openness in Indonesia", *Pacific Affairs* 69, 3 (1996), hh. 319–40.

Booth, Anne, "Poverty and inequality in the Soeharto era: an assessment", *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 36, 1 (2000), hh. 73–104.

Bourchier, David, "Crime, law, and state authority in Indonesia", dalam Budiman (ed.), *State and civil society in Indonesia.*

_____"Habibie's interregnum: reformasi, elections, regionalism and the struggle for power", dalam Manning dan van Dierman (ed.), *Indonesia in transition.*

_____"Lineages of organicist political thought in Indonesia", PhD thesis, Monash University, 1996.

_____ "The 1950s in New Order ideology and politics", dalam Bourchier dan Legge (ed.), *Democracy in Indonesia.*

Bourchier, David dan John Legge (ed.), *Democracy in Indonesia: 1950s to 1990s* (Clayton: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, 1994).

Brackman, Arnold, *The communist collapse in Indonesia* (New York: W.W. Norton, 1969).

Brackman, Arnold C., *Indonesia: the Gestapu affair* (New York: American–Asian Educational Exchange, 1969).

Bresnan, John, *Managing Indonesia: the modern political economy* (New York: Columbia University Press, 1993).

Britton, Peter, "The Indonesian army: 'stabiliser' dan 'dynamiser'", dalam Mortimer (ed.), *Showcase state.*

Brooks, Karen, "The rustle of ghosts: Bung Karno in the New Order", *Indonesia* 60 (1995), hh. 61–99.

Budiardjo, Carmel, "Political imprisonment in Indonesia", dalam Taylor et al., *Repression and exploitation in Indonesia.*

_____"Did Suharto mastermind the 1965 'coup attempt'?", *Tapol Bulletin* 50 (1982), hh. 12–14.

Budiman, Arief, "A conversation with Pak Harto", dalam Roger M. Smith (ed.), *Southeast Asia: documents of political development and change* (Ithaca: Cornell University Press, 1974).

_____"Indonesian politics in the 1990s", dalam Crouch dan Hill (ed.), *Indonesia Assessment 1992.*

_____"Portrait of a young Indonesian looking at his surrounding", *Internationales Asienforum* 4 (1973), hh. 76–88.

Budiman, Arief (ed.), *State and civil society in Indonesia* (Clayton: Monash Papers on Southeast Asia No.22, 1992).

Bunnell, Frederick, "American 'low posture' policy towards Indonesia in the months leading to the 1965 'coup'", *Indonesia* 50 (1990), hh. 29–60

Bunnell, Frederick Philip, "The Kennedy initiatives in Indonesia, 1962–1963", PhD thesis, Cornell University, 1969.

Burns, Peter, "The post-Priok trials: religious principle and legal issues", *Indonesia* 47 (1989), hh. 61–88.

Canmack, Mark, "Indonesia's 1989 Religious Judicature Act: Islamization of Indonesia or Indonesianization of Islam?", *Indonesia* 63 (1997), hh. 145–68.

Capizzi, Elaine, "Trade unions under the New Order", dalam Taylor et al.(ed.), *Repression and exploitation in Indonesia.*

Cholil, M., *Sedjarah operasi pembebasan Irian-Barat* (Jakarta: Departemen Pertahanan Keamanan, Pusat Sedjarah ABRI, 1971).

Coppel, Charles A., "Patterns of Chinese political activity in Indonesia", dalam J.A.C. Mackie (ed.), *The Chinese in Indonesia: five essays* (Honolulu: University Press Hawai'i, 1976).

Cribb, Robert, "Election in Jakarta", *Asian Survey* 24, 6 (1984), hh. 655–64.

_____"Heirs to the late colonial state? The Indonesian Republic, the Netherlands Indies and the revolution, 1945–1949" (naskah tidak terbit, Netherlands Institute of Advanced Studies, n.d.).

_____"Indonesian political development, 1989–1990", dalam Hal Hill dan Terry Hull (ed.), *Indonesia Assessment 1990* (Canberra: Political and Social Change Monograph 11, Australian National University, 1990).

_____"The trials of H.R. Dharsono", *Inside Indonesia* 7 (1986), hh. 3–5.

_____*Historical atlas of Indonesia* (London: Curzon, 2000).

_____*Historical dictionary of Indonesia* (Metuchen, NJ: Scarecrow Press, 1992).

Cribb, Robert dan Colin Brown, *Modern Indonesia: a history since 1945* (London: Longman, 1995).

Crouch, Harold, "An ageing president, an ageing regime", dalam Crouch dan Hill (ed.), *Indonesia Assessment 1992.*

_____"Another look at the Indonesian 'coup'", *Indonesia* 15 (1973), hh. 1–20.

_____"The army, the parties and elections", *Indonesia* 11 (1971), hh. 177–92.

_____"Introduction", dalam Budiman (ed.), *State and civil society in Indonesia.*

_____*The army and politics in Indonesia*, edisi revisi (Ithaca: Cornell University Press, 1988).

Crouch, Harold dan Hal Hill (ed.), *Indonesia Assessment 1992: political perspective on the 1990s* (Canberra: Political and Social Change Monograph 17, Australian National University, 1992).

Dasman Djamaluddin, *Jenderal TNI anumerta Basoeki Rachmat dan Supersemar* (Jakarta: Grasindo, 1998).

De Geus, P.B.R., *De Nieuw-Guinea kwestie: aspecten van buitenlands beleid en militaire macht* (Leiden: Martinus Nijhoff, 1984).

Deliar Noer, *Aku bagian ummat, aku bagian bangsa: otobiografi Deliar Noer* (Bandung: Penerbit Mizan, 1996).

Departemen Dalam Negeri, *Departemen Dalam Negeri dari masa ke masa: tentang biografi menteri-menteri 1945–1995* (Jakarta: Departemen Dalam Negeri, 1996).

Departemen Penerangan, *Susunan Kabinet Republik Indonesia 1945–1970* (Jakarta: Paramita, 1970).

Dharsono, H.R., *Soeharto on trial: Gen. H.R. Dharsono's plea* (Amsterdam: Lembaga Merah Putih, 1986).

Dinas Sejarah Militer TNI-Angkatan Darat, *Cuplikan sejarah perjuangan TNI-Angkatan Darat* (Bandung/Jakarta: Dinas Sejarah Militer TNI-Angkatan Darat/Fa. Mahjuma, 1972).

Dinuth, Alex (ed.), *Dokumen terpilih sekitar G.30.S/PKI* (Jakarta: Intermas,1997).

Djamal Marsudi, *Menjingkap-tabir fakta-fakta pemberontakan P.K.I. dalam peristiwa Madiun* (Jakarta: Merdeka Press, 1966).

Djudjuk Juyoto S.T., Lazuardi Adi Sage dan S. Budhi Raharjo, *Gemuruh Kemusuk: profil desa perjuangan* (Jakarta: Tifa Proyeksi Utama, 1991).

Drooglever, P.J., "Mars in beweging. Denkbeelden over legerhervorming in het tijdvak van de dekolonisatie", dalam G. Teitler dan P.M.H. Groen (ed.), *De politionele acties* (Amsterdam: De Bataafche Leeuw, 1987).

_____ "Sultan in oorlogstijd: Hamengkubuwono IX en de besetting van Yogyakarta in 1948/1949", inaugural professorial lecture, 15 May 1996, Katholieke Universiteit Nijmegen (n.p.: n.p., n.d.).

_____ "Uneasy encounters: Semarang, Ambarawa and Magelang during the first months of the revolution", dalam T. Ibrahim Alfian et al. (ed.), *Dari babad dan hikayat sampai sejarah kritis: kumpulan karangan dipersembahkan kepada Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1987).

Drooglever, P.J. dan M.J.B. Schouten (ed.), *Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesiasche betrekkingen 1945–1950* vol. 16 dan 17 ('s-Gravenhage: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, 1991–92).

Dwipayana, G. dan Nazaruddin Sjamsuddin (ed.), *Di antara para sahabat: Pak Harto 70 tahun* (Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada, 1991).

_____*Jejak langkah pak Harto 1 Oktober 1965–27 Maret 1968* (Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada, 1991).

_____*Jejak langkah Pak Harto 28 Maret 1968–23 Maret 1973* (Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada, 1991).

Emmerson, Donald K., "The bureaucracy in political context: weakness in strength", dalam Jackson dan Pye, *Political power and communications in Indonesia.*

_____"Indonesia in 1990: a foreshadow play", *Asian Survey* 31, 2 (1991), hh. 179–87.

_____ "Understanding the New Order: bureaucratic pluralism in Indonesia", *Asian Survey* 23, 11 (1983), hh. 1220–41.

Evans III, Bryan, "The influence of the United States Army on the development of the Indonesian Army (1954–1964)", *Indonesia* 47 (1989), hh. 25–48.

Fazlur Akhmad, "The Indonesian student movement, 1920-1989: a force for radical social change?", *Prisma* 47 (1989), hh. 83–95.

Federspiel, Howard M., "Muslim intellectuals and Indonesia's national development", *Asian Survey* 31, 3 (1991), hh. 233–46.

Feith, H., "Dynamics of Guided Democracy", dalam Ruth McVey (ed.) *Indonesia* (New Haven: Human Relations Area Files Press, 1963).

_____ "President Sukarno, the army and the communists: the triangle changes shape", *Asian Survey* 4 (1964), hh. 969–80.

Feith, H. dan Lance Castles (ed.), *Indonesian political thinking* (Ithaca: Cornell University Press, 1970).

Feith, Herb, "Constitutional democracy: how well did it function", dalam Bourchier dan Legge (ed.), *Democracy in Indonesia.*

_____ "East Timor: the opening up, the crackdown and the possibility of a durable settlement", dalam Crouch dan Hill (ed.), *Indonesia Assessment 1992.*

_____ "Growth and development in Asia: some criticisms of conventional approaches", Bahan ceramah pada The Asian

Leadership Development Centre of World Student Christian Federation, Tosanzo, Jepang, Oktober 1972.

_____ "Suharto's search for a political format", *Indonesia* 6 (1968), hh. 88–105.

Feith, Herbert, *The decline of constitutional democracy in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 1962).

_____*The Indonesian elections of 1955* (Ithaca: Modern Indonesia Project, Southeast Asia Program, Cornell University, 1957).

Feith, Herbert dan Daniel S. Lev, "The end of the Indonesian rebellion", *Pacific Affairs* 36 (1963), hh. 32–46.

Forrester, Geoffrey, "Introduction", dalam Forrester dan May (ed.), *The fall of Soeharto.*

Forrester, Geoffrey, dan R.J. May (ed.), *The fall of Soeharto* (Bathurst: Crawford House, 1999).

Gafur, Abdul, *Pak Harto: pandangan dan harapannya* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1987).

_____*Siti Hartinah Soeharto: first lady of Indonesia* (Jakarta: P.T. Citra Lamtoro Gung Persada, 1992).

Gatot Mangkupradja, Raden, "The PETA and my relations with the Japanese: a correction of Sukarno's autobiography", *Indonesia* 5 (1968), hh. 105–34.

Gellert, Paul K., "A brief history and analysis of Indonesia's forest fire crisis", *Indonesia* 65 (1998), hh. 63–85.

Glassburner, Bruce, "Indonesia's new economis policy and it socio-political implications", dalam Jackson dan Pye (ed.), *Political power and communications in Indonesia.*

Green, Marshall, *Indonesia: crisis and transformation 1965–1968* (Washington DC: Compass Press, 1990).

Groen, P.M.H., *Marsroute en dwaalsporen: het Nederlands militair-strategisch beleid in Indonesië 1945–1950* (Meppel: Ten Brink, 1991).

Habib, A. Hasnan, "The role of the armed forces in Indonesia's future political development", dalam Crouch dan Hill (ed.), *Indonesia Assessment 1992.*

Hadi Soesastro dan M. Chatib Basri, "Survey of recent development", *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 34, 1 (1998), hh. 3–54.

Hadiningrat, Kusumah, *Sejarah operasi² gabungan dalam rangka DWI-KORA* (Jakarta: Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sedjarah ABRI, 1971).

Hanna, Willard A., "The magical-mystical syndrome in the Indonesian mentality, part V.

_____Pak Harto: the myth, the man and the mystery", *American Field Service Reports Services, Southeast Asia Series* 15, 9 (1967), hh. 1–19.

Hansen, Gary, "Episodes in rural modernization: problems with the Bimas program", *Indonesia* 11 (1971), hh. 63–81.

Hansen, Gary E., "Bureaucratic linkages and policy-making in Indonesia: BIMAS revisited", dalam Jackson dan Pye (ed.), *Political power and communications in Indonesia.*

Harsja W. Bachtiar, *Siapa dia? Perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD)* (Jakarta: Djambatan, 1988).

Harvey, Barbara S., *Permesta: half a rebellion* (Ithaca: Southeast Asia Program, Cornell University, 1977).

Harvey, Barbara Sillars, "Tradition. Islam and rebellion: South Sulawesi 1950–1965", PhD dissertation, Cornell University, 1974.

Haseman, John B., "The dynamics of change: regeneration of the Indonesian army", *Asian Survey* 26, 8 (1986), hh. 883–96.

Hauswedell, Peter Christian, "Sukarno: radical or conservative? Indonesian politics 1964–5", *Indonesia* 15 (1973), hh. 108–44.

Hefner, Robert W., "Islam, state and civil society: ICMI and the struggle for the Indonesian middle class", *Indonesia* 56 (1993), hh. 1–35.

_____"Islamization and democratization in Indonesia", dalam Robert W. Hefner dan Patricia Horvatch (ed.), *Islam in an era of nation-states* (Honolulu: University of Hawai'I Press, 1977).

Hein, Gordon R., "Indonesia in 1988: another five years for Soeharto", *Asian Survey* 29, 2 (1989), hh. 119–28.

_____"Indonesia in 1989: a question of openness", *Asian Survey* 30, 2 (1989), hh. 221–30.

Hermawan Sulistyo, "The forgotten years: the missing history of Indonesia's mass slaughter (Jombang-Kediri 1965–1966)", PhD dissertation, Arizona State University, 1997.

Heru Atmojo, "Mengungkap tragedi kemanusiaan 1965" [makalah tidak terbit yang dikirimkan ke Tapol tahun 2000 dan dengan murah hati disiapkan untuk saya oleh Liem Siu Liong. Diterbitkan sebagian dengan judul "G30S, an army intelligence operation", *Tapol Bulletin* 160 (2000), hh. 9–12].

Hidayat, R.A. et al. (ed.), *Umar Wirahadikusumah dari peristiwa ke peristiwa* (Jakarta: Yayasan Kesejahteraan Jayakarta/Badan Penerbit 'Sandaan' Jakarta, 1983).

Hill, Hal, *The Indonesian economy since 1966: Southeast Asia emerging giant* (Cambridge: Cambridge University Press, 1996).

Hindley, Donald, "Alirans and the fall of the Old Order", *Indonesia* 9 (1970), hh. 23–66.

_____"Indonesia's confrontation of Malaysia: a search for motives", *Asian Survey* 4, 6 (1964), hh. 904–13.

_____"Political power and the October 1965 coup in Indonesia", *Journal of Asian Studies* 26 (1967), hh. 237–49.

_____*The communist party of Indonesia, 1951–1963* (Berkeley: University of California Press, 1964).

Holtzappel, Coen, "The 30 September Movement: a political movement of the armed forces or an intelligence operation?", *Journal of Contemporary Asia* 9, 2 (1979), hh. 219–40.

Hong Lan Oei, "Implications of Indonesia's new foreign investment policy for economic development", *Indonesia* 7 (1969), hh. 33–66.

_____ "Indonesia's economic stabilization and rehabilitation programme: an evaluation", *Indonesia* 5 (1968), hh. 135–74.

Hughes, John, *Indonesian upheaval* (New York: David McKay Co., 1967).

Ichlasul Amal, *Regional and central government in Indonesia politics: West Sumatra and South Sulawesi 1949–1979* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992).

Indonesian Corruption Watch, statement no. 051/SK/ICW/X/98, "Proof of criminal act in the form of abuse of power by former President Soeharto" (mimeo).

Ismail-Mahn, Christina, *President Suharto: a profile* (Jakarta: Yayasan P.K. Lebak Bulus, 1981?).

Iswandi, *Bisnis militer Orde Baru,* edisi revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000).

Jackson, Karl D., "Bureaucratic polity: a theoretical framework for the analysis of power and communications in Indonesia", dalam Jackson dan Pye (ed.), *Political power and communications in Indonesia.*

_____"The political implications of structure and culture in Indonesia", dalam Jackson dan Pye (ed.), *Political power and communications in Indonesia.*

Jasin, M., *Saya tidak pernah minta ampun kepada Soeharto: sebuah memoar* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998).

Jenkins, David, *Suharto and his generals: Indonesian military politics 1975–1983* (Ithaca: Modern Indonesia Project, Cornell University, 1984).

Jones, Howard Palfrey, *Indonesia: the possible dream* (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1971).

Jusmar Basri, *Gerakan Operasi Militer VI (untuk menumpas 'DI/TII' di Djawa Tengah)* (Jakarta: Mega Bookstore, 1965).

Kadane, Kathy, "The CIA supplied Suharto with death lists in 1965", *Inside Indonesia* 23 (1990), hh. 12–13.

Kahin, Audrey R. dan George McT. Kahin, *Subversion as foreign policy: the secret Eisenhower and Dulles debacle in Indonesia* (New York: New Press, 1995).

Kahin, Audrey et al., "Current data on the Indonesian military elite", *Indonesia* 53 (1992), hh. 93–136.

_____"Current data on the Indonesian military elite", *Indonesia* 55 (1993), hh. 176–98.

_____"Current data on the Indonesian military elite", *Indonesia* 56 (1993), hh. 119–52.

_____"Current data on the Indonesian military elite", *Indonesia* 58 (1994), hh. 83–101.

_____"Current data on the Indonesian military elite", *Indonesia* 59 (1995), hh. 45–63.

_____"The Sixth Development Cabinet announced March 17, 1993", *Indonesia* 55 (1993), hh. 166–76.

Kahin, G. McT., "The sultan and the Dutch", dalam Atmakusumah et al. (ed.), *Tahta untuk rakyat* (Jakarta: Gramedia, 1982).

Kahin, George McT., "A personal view of the war", dalam Wild dan Carey (ed.) *Born in fire.*

_____ "Some recollections and reflections on the Indonesian revolution", *Indonesia* 60 (1995), hh. 1–16.

Kahin, George McTurnan, *Nationalism and revolution in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 1970 [1952]).

Kawilarang, A.E., *Untuk Sang Merah Putih* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988).

Keefer, Edward C., (ed.), *Foreign relations of the United States, 1961–1963. Volume XXIII Southeast Asia* (Washington, DC: US Government Printing Office, 1994).

Keeler, Ward, *Javanese shadow plays, Javanese selves* (Princeton: Princeton University Press, 1987).

_____*Symbolic dimensions of the Javanese house* (Clayton: Working Paper No.29, Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, 1983).

Kemal Idris, *Bertarung dalam revolusi* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997).

Kementrian Penerangan, *Republik Indonesia. Daerah Istimewa Jogjakarta* (Jakarta: Kementrian Penerangan, 1953).

_____*Republik Indonesia. Propinsi-Djawa Tengah* (Jakarta: Kementrian Penerangan, 1953).

Kingsbury, Damien, *The Politics of Indonesia* (Melbourne: Oxford University Press, 1998).

Kreutzer, R., "Een stuk geschiedenis: het voorspel van Madioen", *Tijdschrift voor Diplomatie* 10 (June 1980), hh. 685–701.

L.C., "Socialism and private business: the latest phase", *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 2 (1965), hh. 13–45.

Lane, Max, "'Openness', political discontent and succession in Indonesia: political developments in Indonesia, 1989–1991" (Brisbane: Centre for the Study of Australia–Asia Relations, Griffith University, 1991).

Lapré, S.A., *Het Andjing NICA Bataljon (KNIL) in Nederlands-Indië (1945–1950)* (Ermelo: self-published, n.d.).

Latief, A., *Pledoi Kol. A.Latief: Soeharto terlibat G 30 S* (Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 2000).

Legge, J.D., *Central authority and regional autonomy in Indonesia: a study of local administration 1950–1960* (Ithaca: Cornell University Press, 1961).

_____*Sukarno, a political biography* (Harmondsworth: Penguin, 1973).

Lev, Daniel S., "Becoming an orang Indonesia sejati: the political journey of Yap Thiam Hien, *Indonesia* (topik khusus tentang "The role of the Indonesian Chinese in shaping modern Indonesian life"), 1991, hh. 99–112.

_____"On the fall of parliamentary system", dalam Bourchier dan Legge (ed.), *Democracy in Indonesia.*

_____"The political role of the army in Indonesia", *Pacific Affairs* 36 (1963–64), hh. 349–64.

_____*The transition to Guided Democracy: Indonesian politics, 1957–59* (Ithaca: Modern Indonesian Project, Cornell University, 1966).

Liddle R. William, "Indonesia in 1986: contending with scarcity", *Asian Survey* 27, 2 (1987), hh. 207–18.

_____"Indonesia in 1987: the New Order at the height of its power", *Asian Survey* 28, 2 (1987), hh. 180–91.

_____"Indonesia's threefold crisis", dalam Liddle, *Leadership and culture in Indonesian politics.*

_____"Participation and the political parties", dalam Jackson dan Pye (ed.), *Political power and communications in Indonesia.*

_____"The relative autonomy of the Third World politician: Soeharto and Indonesian economic development in comparative perspective", dalam Liddle, *Leadership and culture in Indonesian politics.*

_____"Soeharto's Indonesia: personal rule and political institutions", *Pacific Affairs* 58, 1 (1985), hh. 68–90.

_____"The 1977 election and New Order legitimacy", dalam K.S. Sandhu et al. (ed.), *Southeast Asian Affairs 1978* (Singapore: Heinemann, 1978).

_____*Leadership and culture in Indonesian politics* (Sydney: Allen & Unwin, 1996).

Loveard, Keith, *Suharto: Indonesia's last sultan* (Singapore, Horizon Books, 1999).

Lowry, Robert, *The Armed Forces of Indonesia* (Sydney, Allen & Unwin, 1996).

Lyon, Margot L., "Mystical biography: Soeharto and kejawen in the political domain", dalam McIntyre (ed.), *Indonesian political biography.*

MacDougall, John A., "Patterns of military control in the Indonesian higher central bureaucracy", *Indonesia* 33 (1981), hh. 89–121.

MacIntyre, Andrew J., "Indonesia in 1992: coming to terms with the outside world", *Asian Survey* 33, 2 (1993), hh. 204–10.

_____ "Indonesia in 1993: increasing political movement?", *Asian Survey* 34, 2 (1993), hh. 111–18.

_____ "Politics and the reorientation of economic policy in Indonesia", dalam Andrew J. MacIntyre dan Kanishka Jayasuriya (ed.), *The dynamics of economi policy reform in South-east Asia and the South-west Pacific* (Singapore: Oxford University Press, 1992).

_____ "State–society relations in New Order Indonesia: the case of business", dalam Budiman (ed.), *State and civil society in Indonesia.*

Mackie, J.A.C., "Anti–Chinese outbreaks in Indonesia, 1959–68", dalam J.A.C. Mackie (ed.) *The Chinese in Indonesia: five essays* (Honolulu: University Press of Hawai'I, 1976).

_____"Australia's relation with Indonesia: principles and policies, I", *Australian Outlook* 28, 1 (1974), hh. 3–24.

_____"Changing patterns of Chinese big business in Southeast Asia", dalam McVey (ed.) *Southeast Asian capitalist.*

_____"Civil–military relations and the 1971 elections in Indonesia", *Australian Outlook* 24, 3 (1970), hh. 250–62.

_____"The Comission of Four report on corruption", *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 6, 3 (1970), hh. 87–101.

_____*Konfrontasi: the Indonesia–Malaysia dispute 1963–1966* (London: Oxford University Press, 1974).

_____*Problems of the Indonesian inflation* (Ithaca: Modern Indonesia Project, Cornell University, 1967).

Mackie, Jamie, "Towkays and tycoons: the Chinese in Indonesian economic life in 1920s and 1980s", *Indonesia* (topik khusus tentang "The role of the Indonesian Chinese in shaping modern Indonesian life"), 1991, hh. 83–96.

Mackie, Jamie dan Andrew MacIntyre, "Politics", dalam Hal Hill (ed.), *Indonesia's New Order: the dynamics of socio-economic transformation* (Sydney: Allen & Unwin, 1994).

Maher, Michael, *Indonesia: an eyewitness account* (Melbourne: Viking, 2000).

Malik, Adam, *In the service of the Republic* (Jakarta: Gunung Agung, 1980).

Malley, Michael, "The 7th Development Cabinet: loyal to a fault?', *Indonesia* 65 (1998), hh. 154–78.

Malley, Michael Sean, "A political biography of Major General Soedjono Hoemardani, 1918–1986", MA dissertation, Cornell University, 1990.

Mann, Richard, *Plots and scheme that brought down Soeharto* (Jakarta: Gateway Books, 1998).

Manning, Chris, "Structural change and industrial relations during the Soeharto period: an approaching crisis?", *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 29, 2 (1993), hh. 59–95.

Manning, Chris dan Peter van Dierman, "Recent developments and social aspects of reformasi and crisis: an overview", dalam Manning dan van Dierman (ed.), *Indonesia in transition.*

Manning, Chris dan Peter van Dierman (ed.), *Indonesia in transition: social aspects of reformasi and crisis* (Singapore: Institute of Southeast asian Studies, 1999).

Marjoto, "Mengungkap lahirnja SP-11 Maret 1966", *Vidya Yudha* 6 (1969), hh. 88–104.

Marzuki Darusman, "Indonesian political developments: problems and prospects", dalam Crouch dan Hill (ed.), *Indonesia Assessment 1992.*

May, Brian, *The Indonesian tragedy* (London: Routledge and Kegan Paul, 1978).

McDonald, Hamish, *Suharto's Indonesia* (Blackburn: Fontana/Collins, 1980).

McIntyre, Angus, "Division and power in the Indonesian National Party, 1965–1966", *Indonesia* 13 (1972), hh. 183–210.

_____"Foreign biographical studies of Indonesian subjects: obstacles and shortcomings", dalam McIntyre (ed.), *Indonesian political biography.*

_____"Introduction", dalam McIntyre (ed.), *Indonesian political biography.*

_____*Soeharto's composure: considering the biographical and autobiographical accounts* (Clayton: Working Paper No. 97, Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, 1993).

McIntyre, Angus (ed.), *Indonesian political biography in search of cross-cultural understanding* (Clayton: Working Paper No. 28, Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, 1993).

McLeod, Ross, "Soeharto's Indonesia: a better class of corruption", *Agenda* 7, 2 (2000), hh. 99–112.

McMahon, Robert J. (ed.), *Foreign relations of the United States, 1958–1960. Volume XVII Indonesia* (Washington, DC: US Government Printing Office, 1994).

McVey, Ruth T., "The case of the disappearing decade", dalam Bourchier dan Legge (ed.), *Democracy in Indonesia.*

_____"The materialization of the Southeast Asian entrepreneur", dalam R. McVey (ed.), *Southeast Asian capitalists* (Ithaca: Cornell University Southeast Asia Program, 1992).

_____"Nationalism, Islam and Marxism: the management of ideological conflict in Indonesia", pengantar menuju Sukarno, *Nationalism, Islam and Marxism* (Ithaca: Modern Indonesia Project, Cornell University, 1970).

_____"PKI fortunes at low tide", *Problems of Communism* 20 (1971), hh. 25–36.

_____"The post-revolutionary transformation of the Indonesian army", bagian I, *Indonesia* 11 (1971), hh. 131–76; bagian II, *Indonesia* 13 (1972), hh. 147–81.

_____"A preliminary excursion into the small world of Lt. Col. Untung" (makalah).

_____*Redesigning the cosmos: belief systems and state power in Indonesia*, edisi revisi (Copenhagen: Nordic Institute of Asian Studies, NIAS Reports No. 14, 1995).

"Memori Gubernur Yogyakarta (J.E. Jaspers), 29 September 1929", dalam Sartono Kartodirdjo et al. (ed.), *Memori serah jabatan 1921–1930* (Jawa Timur dan Tanah Kerajaan) (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1978).

Mody, Nawaz B., *Indonesia under Suharto* (New York: Apt Books, 1987).

Mohtar Mas'oed, "The state reorganization of society under the New Order", *Prisma* 47 (1989), hh. 3–24.

Mortimer, Rex, "Class, social cleavage and Indonesian communism", *Indonesia* 8 (1969), hh. 1–20.

_____"Indonesia: growth or development?", dalam Mortimer (ed.), *Showcase state.*

_____*Indonesian communism under Sukarno: ideology and politics, 1959–1965* (Ithaca: Cornell University Press, 1974).

_____*Showcase state: the illusion of Indonesia's accelerated modernization* (Sydney: Angus & Robertson, 1973).

Mossman, James, *Rebels in paradise: Indonesia's civil war* (London: Jonathan Cape, 1961).

Mrazek, Rudolf, "Tan Malaka: a political personality's structure of experience", *Indonesia* 14 (1972), hh. 1–48.

_____*Sjahrir: politics and exile in Indonesia* (Ithaca: Southeast Asia Program, Cornell University, 1994).

Mulya Lubis, T., "The future of human rights in Indonesia", dalam Crouch dan Hill (ed.), *Indonesia Assessment 1992.*

Nasution, Abdul Haris, *Fundamentals of guerilla warfare*, edisi kedua (Jakarta: Seruling Masa, 1970).

_____*Memenuhi panggilan tugas*, vol. 2–9 (Jakarta: Gunung Agung/ Haji Masagung, 1983–93).

_____*Sekitar perang Kemerdekaan Indonesia*, vol. 1–11 (Bandung: Angkasa, 1976–82).

_____*Tentara Nasional Indonesia*, 3 vol. (Jakarta: Seruling Masa, 1956–69).

Nasution, Adnan Buyung, *The aspiration for constitutional government in Indonesia: a socio-legal study of the Indonesian Konstituante 1956–1959* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992).

Nazaruddin Sjamsudin (ed.), *Jejak Langkah Pak Harto 27 Maret 1973–23 Maret 1978* (Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada, 1991).

_____ *Jejak Langkah Pak Harto 29 Maret 1978–11 Maret 1983* (Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada, 1992).

_____ *Jejak Langkah Pak Harto 16 Maret 1983–11 Maret 1988* (Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada, 1992).

_____ *Jejak Langkah Pak Harto 21 Maret 1988–11 Maret 1993* (Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada, 1993).

Nono Anwar makarim, "The Indonesian press: an editor's perspective", dalam Jackson dan Pye (ed.), *Political power and communications in Indonesia.*

Nugroho Notosusanto, *Pemberontakan tentara Peta Blitar melawan Djepang (14 Pebruari 1945)* (Jakarta: Lembaga Sedjarah Hankam, Departemen Pertahanan Keamanan, 1968).

_____*Some effects of the guerillas on armed forces and society in Indonesia, 1948–1949* (Jakarta: Centre for Armed Forces History, Department of Defence and Security, 1974).

_____*The Peta-army during the Japanese occupation of Indonesia* (Tokyo: Waseda University Press, 1979).

_____*The PETA-army in Indonesia 1943–1945* (Jakarta: Centre for Armed Forces History, Department of Defence and Security, 1971).

Nugroho Notosusanto (ed.), *Pejuang dan prajurit: konsepsi dan implementasi dwifungsi ABRI*, cetakan ketiga (Jakarta: Sinar Harapan, 1991 [1984]) [dokumen Hankam].

Nugroho Notosusanto dan Ismael Saleh, *The coup attempt of the 'September 30th Movement' in Indonesia* (Jakarta: Pembimbing Masa, 1968).

O'Malley, William Joseph, "Indonesia in the Great Depression: a study of East Sumatra and Jogjakarta in the 1930s", PhD dissertation, Cornell University, 1977.

Oei Hong Lan, "Indonesia's economic stabilization and rehabilitation program: an evaluation", *Indonesia* 5 (1968), hh. 135–74.

Oey Hong Lee, "Sukarno and the pseudo-coup of 1965: ten years later", *Journal of Southeast Asian Studies* 7, 1 (1976), hh. 119–35.

Oudang, M., *Perkembangan kepolisian di Indonesia* (Jakarta?: Mahabarata, 1952?).

Pandjaitan br. Tambunan, Marieke, *D.I. Pandjaitan: gugur dalam seragam kebesaran* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997).

Pangaribuan, Robinson, *The Indonesian State Secretariat 1945–1993*, terjemahan oleh Vedi Hadiz (Perth: Asia Research Centre on Political and Economic Change, 1995).

Panitia Penyusun Sejarah KOSTRAD, *KOSTRAD dharma putra* (Jakarta: Panitya Penyusun Sejarah KOSTRAD, 1972).

Pauker, G.J., *The rise and fall of the Communist Party of Indonesia* (Santa Monica: RAND Corporation, Memorandum RM-5753-PR, Februari 1969).

Pauker, Guy J., *Indonesia in 1966: the year of transition* (Santa Monica: RAND Corporation, Paper P-3525, Februari 1967).

Pemberton, John, *On the subject of 'Java'* (Ithaca: Cornell University Press, 1994).

Penders, C.L.M. (ed.), *Milestone on my journey. The memoirs of Ali Sastroamijoyo, Indonesian patriot and political leader* (St Lucia: University of Queensland Press, 1979).

Penders, C.L.M. dan Ulf Sundhaussen, *Abdul Haris Nasution: a political biography* (St Lucia: University of Queensland Press, 1985).

Polomka, Peter, *Indonesia since Sukarno* (Harmondsworth: Penguin, 1971).

Pour, Julius, *Benny Moerdani: profile of a soldier statesman*, terjemahan oleh Tim Scott (Jakarta: Yayasan Keuangan Panglima Besar Sudirman, 1993).

_____*Laksamana Sudomo: mengatasi gelombang kehidupan* (Jakarta: Gramedia, 1997).

Rae, Lindsay, "Liberating and conciliating: the work of Y.B. mangunwijaya", dalam McIntyre (ed.), *Indonesian political biography.*

_____"Sutan Sjahrir and the failure of Indonesian socialism", dalam McIntyre (ed.), *Indonesian political biography.*

Ramadhan, K.H., *Soemitro: former commander of Indonesian security apparatus* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996).

Ramage, Douglas, *Politics in Indonesia: democracy, Islam and the ideology of tolerance* (London: Routledge, 1995).

Reeve, David, "The corporatist state: the case of Golkar", dalam Budiman (ed.) *State and civil society in Indonesia.*

_____*Golkar of Indonesia: an alternative to the party system* (Singapore: Oxford University Press, 1985).

Reid, Anthony J.S., *Indonesian national revolution 1945–50* (Hawthorn: Longman, 1974).

Republic of Indonesia, Kementrian Penerangan, *Lukisan revolusi, 1945–1950* (Jakarta: n.p., n.d. [1954?]).

Reviv, Dan dan Yossi Melman, *Every spy a prince: the complete history of Israel's intelligence community* (Boston: Houghton Mifflin, 1990).

Rieffel, Alexis, "The Bimas program for self-sufficiency in rice production", *Indonesia* 8 (1969), hh. 103–33.

Rizal Mallarangeng dan R. William Liddle, "Indonesia in 1995: the struggle for power and policy", *Asian Survey* 36, 2 (1996), hh. 109–16.

Robison, Richard, "Indonesia: tension in state and regime", dalam Kevin Hewison, Richard Robison dan Garry Rodan (ed.), *Southeast Asia in the 1990s: authoritarian, democracy and capitalism* (Sydney: Allen & Unwin, 1993).

_____"Towards a class analysis of the Indonesian military bureaucratic state", *Indonesia* 25 (1978), hh. 17–39.

_____*Indonesia: the rise of capital* (Sydney: Allen & Unwin, 1986).

Rocamora, J. Eliseo, "The Partai Nasional Indonesia 1963–1965", *Indonesia* 10 (1970), hh. 143–81.

Roeder, O.G., *Anak desa: biografi presiden Soeharto* (Jakarta: Gunung Agung, 1976).

_____*The smiling general: President Soeharto of Indonesia*, edisi revisi kedua (Jakarta: Gunung Agung, 1969).

Sadli Mohammad, "Recollections of my career", *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 29, 1 (1993), hh. 35–51.

Saleh A. Djamhari, *Markas Besar Komando Djawa, 1948–49* (Jakarta: Lembaga Sedjarah Hankam, 1967).

Salim Said, *Genesis of power: General Sudirman and the Indonesian military in politics 1945–49* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1993).

Salim, Emil, "Recollections of my career", *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 33, 1 (1997), hh. 45–74.

Saltford, John, "United Nations involvement with the act of self-determination in West Irian (Indonesian West New Guinea 1968 to 1969)", *Indonesia* 69 (2000), hh. 71–92.

Samad, Paridah Abd., *General Wiranto: the man emerging from the midst of Indonesian reformation: a political analysis* (Kuala Lumpur: Affluent Master, 1999).

Samson, Allan, "Conceptions of politics, power and ideology in contemporary Indonesian Islam", dalam Jackson dan Pye (ed.), *Political power and communications in Indonesia.*

Sarbini Sumawinata, "Recollections of my career", *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 28, 2 (1992), hh. 43–53.

Sato, Shigeru, *War, nationalism and peasants: Java under the Japanese occupation 1942–1945* (Sydney: Allen & Unwin, 1994).

Sayidiman Suryohadiprojo, *Mengabdi negara sebagai prajurit TNI: sebuah otobiografi* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997).

Schwarz, Adam, *A nation in waiting: Indonesia in the 1990s* (Sydney: Allen & Unwin, 1994; edisi kedua, 1999).

Scott, Peter Dale, "The United States and the overthrow of Sukarno", *Pacific Affairs* 58, 2 (1985), hh. 239–64.

Sedjarah Militer Kodam VI Siliwangi, *Siliwangi: dari masa ke masa* (Jakarta: Penerbit Fakta Mahjuma, 1968?).

Sedjarah Militer Kodam VII/Diponegoro, *Sedjarah Tentara Nasional Indonesia Komando Daerah Militer VII Diponegoro (Djawa Tengah)* (n.p.: n.p., n.d.).

_____*Sedjarah TNI-AD Kodam VII/Diponegoro* (Semarang: Yayasan Penerbit Diponegoro, 1968).

Sekretariat Agitasi-Propaganda CCPKI, *Buku putih tentang peristiwa Madiun* (n.p.: n.p., n.d.).

Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Gerakan 30 September: pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Latar belakang, aksi, dan penumpasannya* (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1994).

Sen, Krishna, *Indonesian cinema: framing the New Order* (London: Zed Books, 1994).

Sewaka, *Tjorat-tjaret dari djaman ke djaman* (Bandung?: n.p. 1955).

Shin, Yoon Hwan, "The role of elites in creating capitalist hegemony in post oil-bloom Indonesia", *Indonesia* (topik khusus tentang

"The role of the Indonesian Chinese in shaping modern Indonesian life"), 1991, hh. 128–43.

Sidel, John T., "Macet total: logics of circulation and accumulation in the demise of Indonesia's New Order", *Indonesia* 66 (1998), hh. 159–94.

Silalahi, Harry Tjan [Can], "CSIS lahir dari tantangan jaman", dalam Anon., *CSIS 20 Tahun* (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1991).

_____ "Kata sebuah riwayat", dalam Anon. (ed.), *Soedjono Hoemardani: pendiri CSIS 1918–1986* (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1987).

Simanjuntak, Djisman S., "The Indonesian economy in 1999: another year of delayed reform", dalam Manning dan van Dierman (ed.), *Indonesia in transition.*

Simatupang, T.B., *Report from Banaran: experiences during the people's war* (Ithaca: Modern Indonesia Project, Cornell University Press, 1972).

_____*The fallacy of a myth*, terjemahan oleh Peter Sunarso (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996).

Sinansari, S., *Kronologi situasi penggulingan Soeharto* (Jakarta: Mizan Pustaka, 1998).

Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana (ed.), *Butir-butir budaya Jawa: mencapai kesempurnaan hidup berjiwa besar mengusahakan kebaikan sejati* (diterbitkan pada peristiwa khusus ulang tahun ke-40 perkawinan Suharto tahun 1987).

Sjafruddin Prawiranegara, "Pancasila as the sole foundation", *Indonesia* 38 (1984), hh. 74–83.

Sjahrir dan Colin Brown, "Indonesian financial and trade policy deregulation: reform and response", dalam Andrew J. MacIntyre dan Kanishka Jayasuriya (ed.), *The dynamics of economic policy reform in South-east Asia and the South-west Pacific* (Singapore: Oxford University Press, 1992).

Sjamsuar Said, "Beberapa tjatatan mengenai Operasi 17 Agustus", *Vidya Yudha* 6 (1969), hh. 82–7.

Smail, John R.W., "The military politics of North Sumatra: December 1956–October 1957", *Indonesia* 6 (1968), hh. 128–87.

Smith, Theodore M., "Corruption, tradition and change", *Indonesia* 11 (1971), hh. 21–40.

Soebandrio, H., "Kesaksianku tentang G-30-S" [manuskrip yang tidak terbit ini, seharusnya diterbitkan oleh Gramedia pada akhir tahun 2000, tiba-tiba ditarik dari peredaran].

Soedjati Djiwandono, J., "Indonesia in 1994", *Asian Survey* 35,'2 (1995), hh. 227–33.

Soegih Arto, *Indonesia & I* (Singapore: Time Book International, 1994).

Soeharto, "Atas kebebasan yang bertanggung jawab harus disadari pers sendiri" (sambutan Presiden pada pertemuan pemimpin redaksi dan PWI se-Indonesia, di Istana Negara Jakarta tanggal 11 September 1981) dalam Anon., *Pers pembawa panji-panji demokrasi: Presiden Soeharto tentang pers Indonesia* (Jakarta: Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pusat, 1983).

_____"Dalam perjuangan dibidang apapun, kekuatan andalan dan modal utama kita adalah rakyat", sambutan Presiden pada peringatan Empat Windu Permulaan Perang Kemerdekaan II tanggal 19 Desember 1980 di Yogyakarta, dalam *Mimbar Kekaryaan ABRI*, no. 121, Januari 1981, hh. 2–5.

_____"Laporan stenografi amanat Presiden Soeharto pada malam ramah tamah dengan pengurus K.N.P.I. tanggal 19 Juli 1982 di Jalan Cendana no. 8 Jakarta" (mimeo).

_____*Pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharto di depan sidang Dewan Perwakilan Rakyat 16 Agustus 1995* (Jakarta: Republik Indonesia, 1995?).

_____*Pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharto di depan sidang Dewan Perwakilan Rakyat 16 Agustus 1996* (Jakarta: Republik Indonesia, 1996?).

_____*Pidato pertama Djendral Soeharto setelah dilantik sebagai Pedjabat Presiden RI* (n.p.: Doa Restu, 1967).

_____*Pikiran, ucapan dan tindakan saya: otobiografi seperti dipaparkan kepada G. Dwipayana dan Ramadhan K.H.* (Jakarta: Citra

Lamtoro Gung Persada, 1989), dalam terjemahan Bahasa Inggris adalah Soeharto, *My thoughts, words and deeds: an autobiography as told to G. Dwipayana and Ramadhan K.H.* Terjemahan Bahasa Inggris oleh Sumadi; suntingan oleh Muti'ah Lestiono (Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada, 1991).

Soeharto, Tien, *On the development of the project Indonesia in Miniature 'Indonesia Indah'* (Jakarta: Executive Body for the Development & Preparation for the Management of the Project Indonesia in Miniature 'Indonesia Indah', 1971).

Soeminto (ed.), *Presiden dan wakil Presiden Republik Indonesia 1978–1983* (Jakarta: Yayasan Murga Jaya, n.d. (1978?)).

Soemitro, *Pangkopkamtib Jenderal Soemitro dan peristiwa 15 Januari '74 sebagaimana dituturkan kepada Heru Cahyono* (Jakarta: Sinar Harapan, 1998).

Soetojo, "Fungsi Kursus 'C' dalam rangka pembangunan Angkatan Darat Republik Indonesia", *Karya Wira Jati* 2 (1961), hh. 129–37.

Soetriyono, Eddy, *Kisah sukses Liem Sioe Liong* (Jakarta: Indomedia, 1989).

Sofyan Wanandi dan J. Soedjati Djiwandono, "Soedjono Hoemardani dan Jepang", dalam Anon. (ed.), *Soedjono Hoemardani: pendiri CSIS 1918–1986* (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1987).

Sori Esa Siregar dan K.T. Widya, *Liem Sioe Liong: dari Futching ke mancanegara* (Jakarta: Pustaka Merdeka, 1988).

Southwood, Julie, "Indonesia's political trials: 'legal' dimensions of a continuing tragedy", *Tapol Bulletin* 37 (1980), hh. 3–17.

Southwood, Julie dan Patrick Flanagan, *Indonesia: law, propaganda and terror* (London: Zed Press, 1983).

Subroto, "Recollections of my career", *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 34, 2 (1998), hh. 67–92.

Sudarisman Purwokusumo, "Yogyakarta sewaktu sebagai Ibukota RI", *Vidya Yudha* 17 (1973), hh. 66–76.

Sudharmono, *Pengalaman dalam masa pengabdian: sebuah otobiografi* (Jakarta: Grasindo, 1997).

Sudjadi, "Sedjarah KORRA I/TJADUAD", *Vidya Yudha* 5 (1968), hh. 99–112.

Sudjarwo Tjondronegoro (ed.), *Illustration of the revolution, 1945–1950*, edisi kedua (Jakarta: Ministry of Information, 1954).

Suharto, "Watashi no rirekisho" ["Sejarah diriku"], *Nihon Keizai Shimbun*, 1–31 Januari 1998 (artikel harian).

Suharto, Sahirdjan, R.O.S. Sunardi, dan Wahyu Hagono, "Perang wilayah sebagai konsepsi pertahan Indonesia", *Karya Wira Jati* 1 (1961), hh. 9–27.

Sukarno, *An autobiography as told to Cindy Adams* (Hong Kong: Gunung Agung, 1966).

Sundhaussen, Ulf, "The fashioning of unity in the Indonesian army", *Asia Quarterly* 2 (1971), hh. 181–212.

_____"The military: structure, procedures and effects on Indonesian society", dalam Jackson dan Pye (ed.), *Political power and communications in Indonesia.*

_____*The road to power: Indonesian military politics 1945–1967* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1982).

Suratmin et al., *Sejarah perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme di Daerah Istimewa Jogjakarta* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1982–83).

Suripto, *Ibu Tien Soeharto: Ibu Negara yang ramah tamah* (Surabaya: P.T. Pantja Pudjibangun, n.d.).

_____*Soeharto: suatu sketsa karier dan politik* (Surabaya: Grip, 1972).

_____*Surat perintah 11 Maret* (Surabaya: Grip, 1969).

Suryadinata, Leo, *Prominent Indonesian Chinese: biographical sketches* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1995).

Suryohadi (ed.), *Silsilah Presiden Soeharto anak petani: bahan dan foto-foto dari HUMAS SEKNEG Jakarta* (Surabaya: Penerbit 'Grip', 1974).

Sutopo Juwono, "Semester masalah pertahanan, dalam rangka kurikulum SESKOAD", *Karya Wira Jati* 6 (1962), hh. 164–71.

Suwarto, "Perang wilayah", *Karya Wira Jati* 49–50 (1981), hh. 1–22.

_____"Suatu 'approach' mata peladjaran 'masalah² pertahan' di SSKAD", dalam Anon., *Documentaria Cursus 'C'. Sekolah Staf & Komando Angkatan Darat Tentara Nasional Indonesia. Angkatan ke 1 Oktober '58/Desember '59* (n.p.: n.p., n.d.).

Suwarto dan Kartomo, "Bantuan Angkatan Perang dalam pembangunan suatu persiapan pembinaan wilajah", *Karya Wira Jati* 8 (1962), hh. 295–313.

Swift, Ann, *The road to Madiun: the Indonesian communist uprising of 1948* (Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, Cornell University, 1989).

Tabah, Anton, Dua jenderal besar bicara tentang Gestapu/PKI (Klaten: Sahabat, 1999).

Tan Malaka, *From jail to jail*, terjemahan dan pengantar oleh Helen Jarvis (Athens, Ohio: Monograph in International Studies, Ohio University, 1991).

Tan, Mély G., "The social and cultural dimensions of the role of ethnic Chinese in the Indonesian society", *Indonesia* (topik khusus tentang "The role of the Indonesian Chinese in shaping modern Indonesian life"), 1991, hh. 112–25.

Tanter, Richard, "Intelligence agencies and Third World militarization: a case study of Indonesia, 1966–1989", PhD dissertation, Monash University, 1991.

_____ "Oil, IGGI and US hegemony: the global pre-conditions for Indonesian rentier-militarization", dalam Budiman (ed.), *State and civil society in Indonesia.*

Taylor, John et al. (ed.), *Repression and exploitation in Indonesia* (Nottingham: Spokesman Books, 1974).

Tim Lembaga Analisis Informasi, *Kontroversi Serangan Umum 1 Maret 1949* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2000).

Tim Peneliti Sistem Pemilu, "Laporan penelitian sistem pemilihan umum di Indonesia" (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 1995).

Tjahyadi Nugroho, *Soeharto Bapak Pembangunan Indonesia* (Semarang: Yayasan Telapak, 1984).

Tjokropranolo, *Panglima Besar TNI Jenderal Soedirman: pemimpin pendobrak terakhir penjajahan di Indonesia* (Jakarta: CV Haji Masagung, 1993).

Twang Peck Yang, *The Chinese business elite in Indonesia and the transition to independence* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1998).

USCIA (US Central Intelligence Agency, Directorate of Intelligence), *Indonesia–1965: the coup that backfired* (Intelligence report, December 1968).

Van der Eng, Pierre, "Indonesia's economy and standard of living during the 20th century", dalam Grayson Lloyd dan Shannon Smith (ed.), *Indonesia today: challenges of history* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2001), hh. 181–99.

Van der Kroef, Justus M., "Indonesian communism since the 1965 coup", *Pacific Affairs* 43, 1 (1970), hh. 34–60.

_____ "'Petrus': pattern of prophylactic murder in Indonesia", *Asian Survey* 25 (1985), hh 745–59.

_____*Indonesia after Sukarno* (Vancouver: University of British Columbia Press, 1971)

Van Dijk C., *Rebellion under the banner of Islam: the Darul Islam in Indonesia* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1981).

Vatikiotis, Michael R.J., *Indonesian politics under Suharto: order, development and pressure for change* (London: Routledge, edisi revisi, 1993; edisi ketiga, 1998).

Volunteer Team for Humanity, "Early documentation no. 1: the riot pattern in Jakarta and surroundings", 22 May 1998 (mimeo).

_____ "Early documentation no. 2: the plunder status of the riot", 9 Juni 1998 (mimeo).

Waddingham, John, "Why the 1986 executions", *Inside Indonesia* 11 (1987), hh. 11–12.

Wanandi, Jusuf, "Political development and national stability", dalam Crouch dan Hill (ed.) *Indonesia Assessment 1992.*

Ward, Ken, "Indonesia's modernization: ideology and practice", dalam Mortimer (ed.), *Showcase state.*

_____*The 1971 election in Indonesia: an East Java case study* (Clayton: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, 1974).

Way, Wendy (ed.), *Australia and the Indonesian incorporation of Portuguese Timor 1974–1976* (Canberra: Department of Foreign Affairs and Trade, 2000).

Weatherbee, Donald E., "Indonesia in 1985: chills and thaws", *Asian Survey* 26, 2 (1986), hh. 141–9.

_____ "Interpretations of Gestapu, the 1965 Indonesian coup", *World Affairs* 132, 4 (1970), hh. 305–17.

Wertheim, W.F., "Indonesia before and after the Untung coup", *Pacific Affairs* 39 (1966), hh. 115–27.

_____ "Suharto and the Latief trial: a painful revelation", *Tapol Bulletin* 29 (1978) hh. 5–7.

_____ "Whose plot? New light on the 1965 events", *Journal of Contemporary* Asia 9, 2 (1979), hh. 197–215.

White, Lawrence J., "Problems and prospects of the Indonesian foreign exchange system", *Indonesia* 14 (1972), hh. 125–56.

Wibisono, Christianto, *Aksi² Tritura: kisah sebuah partnership 10 Djanuari–11 Maret 1966* (Jakarta: Departemen Pertahanan Keamanan, 1970).

Wild, Colin dan Peter Carey (ed.), *Born in fire: the Indonesian struggle for independence* (Athens, Ohio: Ohio University Press, 1988).

Williams, Michael, "China and Indonesia make up: reflections on a troubled relationship", *Indonesia* (topik khusus tentang "The role of the Indonesian Chinese in shaping modern Indonesian life"), 1991, hh. 145–58.

Wimandjaja K. Liotohe, *Primadosa: Wimandjaja dan rakyat Indonesia menggugat imperium Suharto* (Jakarta: Yayasan Eka Fakta Kata, 1994).

Winters, Jeffrey A., "*Indonesia: the rise of capital*: a review essay", *Indonesia* 45 (1988), hh. 109–28.

_____*Power in motion: capital mobility and the Indonesian state* (Ithaca: Cornell University Press, 1996).

Wiwoho, B. dan Bandjar Chaeruddin, *Memori Jenderal Yoga* (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1991).

Yani, A., *Ahmad Yani, sebuah kenang-kenangan* (Bandung: Karya Kelana, 1982?).

Yani, Amelia, *Profile of a soldier* (Singapore: Heinemann, 1990).

Yap Thiam Hien, "Law, state and civil society", dalam Budiman (ed.), *State and civil society in Indonesia.*

Zifirdaus Adnan, "'Islamic religion: yes, Islamic (political) ideology: no!': Islam and the state in Indonesia", dalam Budiman (ed.), *State and civil society in Indonesia.*

Zwitser, H.L. dan C.A. Heshusius, *Het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger 1830–1950* ('s-Gravenhage: Staatsuitgeverij, 1977).

Indeks

A.E. Kawilarang, 101
A.K. Yusuf, 53
A.M. Fatwa, 457
Abdul Gafur, 33
Abdul Haris Nasution, 63, 618, 630, 654, 697
Abdul Kahar Muzakkar, 78
Abdul Latief, 70, 102, 197, 562, 617, 628, 629
Abdul Rachman Ramly, 186
Abdurrahman Wahid, 21, 491, 516, 569, 571, 664, 673
ABRI, 174, 175, 177, 178, 184, 187, 191, 193, 194, 195, 237, 244, 246, 248, 258, 271, 273, 274, 277, 278, 282, 286, 288, 289, 290, 294, 301, 303, 312, 320, 324, 338, 341, 343, 355, 357, 364, 365, 367, 374, 377, 381, 382, 387, 388, 391, 394, 398, 405, 452, 454, 455, 456, 459, 473, 479, 480, 481, 482, 494, 499, 500, 504, 507, 508, 509, 511, 512, 513, 514, 516, 518, 519, 524, 533, 538, 539, 540, 545, 546, 549, 550, 551, 553, 567, 580, 584, 585, 612, 632, 633, 664, 676, 685, 701, 703, 707
Achmad Sukendro, 192
Achmad Tahir, 158, 165, 655
Achmad Tirtosudiro, 321, 369, 370
Achmad Wiranatakusumah, 159, 175, 179, 201
Achmad Yani, 6, 106, 111, 180
Adam Malik, 18, 53, 188, 267, 268, 280, 286, 295, 308, 342, 403, 406, 407, 408, 434, 470, 511, 639, 643
Ade Irma Suryani, 202
Adnan Buyung Nasution, 571
Agum Gumelar, 550
AJI, 519, 598
Akbar, 498
Alamsyah Prawiranegara, 248, 277
Albright, Madeleine, 565

Ali Alatas, 2, 487, 558
Ali Mursalam, 541
Ali Murtopo, 111, 126, 128, 136, 141, 150, 151, 153, 158, 160, 167, 186, 187, 188, 199, 208, 216, 238, 249, 255, 256, 277, 280, 284, 313, 320, 321, 324, 336, 338, 339, 342, 349, 351, 353, 354, 356, 357, 361, 380, 388, 390, 392, 393, 395, 399, 402, 404, 409, 412, 413, 418, 423, 424, 430, 435, 437, 450, 453, 456, 468, 529, 546, 581, 589, 645, 652, 677
Ali Sadikin, 412, 413, 427, 442, 444, 445, 457, 590, 670, 677
Ali Sastroamijoyo, 67, 120, 121, 349, 697
Ali Wardhana, 318, 323, 383, 453, 502, 636
Alimin, 115, 199, 201, 610, 626
Aloysius Sugianto, 399, 404
Amat Idris, 27
Amien Rais, 515, 516, 551, 557, 560, 564
Amir Fatah, 108
Amir Murtono, 80, 388
Amir Syarifuddin, 53, 69, 73
Amirmachmud, 158, 159, 165, 171, 204, 245, 255, 256, 258, 259, 260, 264, 293, 312, 313, 400, 453, 633, 674
Anderson, Benedict, 609, 611, 623, 642, 657
Andi Muhammad Ghalib, 570
Angkatan '66, 378
Ansor, 598, 639
Anton Tabah, 2, 670
APEC, 20, 542, 547, 598
Ari Sigit, 534
Arief Budiman, 2, 358, 369, 370, 371, 378, 646, 659, 663, 670
Arief Rate, 102, 105
Arif Rachman Hakim, 256
Aristides Katoppo, 2, 378
ASEAN, 16, 308, 343, 407, 410, 431, 493, 552, 561, 608
ASEM, 547, 598
Astra Motor, 393
Atmosudiro, 27, 52

B.M. Diah, 355
Bacharuddin Yusuf Habibie, 103
Bachrun, 110, 111, 113, 115, 126, 127, 128, 185
Bais, 469, 530, 598
Bakin, 277, 336, 392, 395, 404, 463, 599
Bakorstanas, 19, 502, 599
Bambang Sugeng, 73, 77, 79, 174
Bambang Supeno, 64, 126
Bambang Trihatmojo, 13, 115, 477
Bambang Utoyo, 117
Bambang Wijanarko, 207, 209, 627
Bank Andromeda, 554
Bank Dunia, 322
Bank Duta, 537
Bank Indonesia, 324, 408, 412, 521
Bank Summa, 520, 536
Bank Windu Kencana, 134, 307, 366
Banpres, 484, 599
Bappenas, 290, 323, 384, 392, 437, 521, 599
Basuki Rachmat, 192, 205, 206, 208, 245, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 278, 308
Basyuni, 51, 59
Batik Keris, 648
Belanda, 2, 8, 12, 14, 33, 34, 36, 37, 38, 41, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,

91, 92, 93, 95, 99, 100, 105, 106, 122, 127, 147, 162, 163, 164, 166, 168, 169, 170, 171, 222, 291, 294, 338, 344, 371, 376, 378, 391, 399, 425, 486, 531, 547, 548, 577, 584, 588, 591, 594, 601, 602, 606, 607, 613, 614, 616
Benny Murdani, 167, 172, 187, 395, 407, 454, 468, 649, 677
Bimantara, 477, 478, 534, 536
birokrasi, 130, 136, 269, 324, 328, 329, 449, 475, 495, 664
BKR, 12, 46, 599
Bogasari, 365, 367, 537, 648
BPI, 264, 277, 599
Brackman, 229, 635, 636, 638, 640, 690
Brawijaya, 100, 158, 160, 168, 199, 208, 245, 269, 270, 296, 441, 445
Budiman Sujatmiko, 549
Buku Putih, 428, 626, 627, 633, 652, 699
Bulog, 321, 364, 370, 599
Bung Tomo, 429, 437
Bush, George, 488
Byrnes, Michael, 463, 657

Cakrabirawa, 199, 201, 205, 223, 227, 256, 269
Camdessus, Michel, 556
Cendana, 302, 381, 539, 564, 566, 569, 590, 638, 670, 701
CGI, 547, 599
Chaerul Saleh, 211, 259
Chalid Mawardi, 433
Chandra Asri, 534
Charis Suhud, 388
CIDES, 515, 599
Citra Lamtoro Gung, 478, 679, 683, 684, 685, 695, 701, 702
Clinton, 547, 556, 666
Cosmas Batubara, 501, 644
Crouch, Harold, 2, 657, 663
CSIS, 529, 599, 641, 700, 702
CV Waringin, 365

D.I. Panjaitan, 201
D.N. Aidit, 144, 195
Daan Mogot, 280
Darul Islam, 108, 109, 110, 111, 140, 424, 599, 618, 705
Daud Yusuf, 431
Davies, Derek, 568, 641, 651, 668
Deliar Noer, 2, 284, 516, 682
Demokrasi, 19, 98, 99, 112, 120, 142, 154, 159, 162, 192, 221, 305, 361, 439, 459, 460, 506, 519, 549, 550, 565, 569, 603, 663, 701
Demokrasi Pancasila, 305, 310, 459, 460, 506
Des Alwi, 186, 280
Dewan Jenderal, 193, 194, 195, 199, 200, 201, 217
DI/TII, 599
Dirgo, 59
Divisi Diponegoro, 13, 70, 81, 82, 101, 106, 113, 121, 126, 128, 130, 134, 136, 137, 140, 147, 149, 151, 174, 210, 216, 217, 270, 325, 327, 362, 600
DPR, 14, 16, 21, 143, 266, 272, 273, 274, 295, 297, 305, 309, 311, 312, 340, 348, 352, 358, 398, 434, 442, 444, 445, 461, 500, 525, 530, 550, 552, 553, 562, 566, 570, 572, 599, 634
DPR-GR, 16, 266, 273, 274, 295, 297, 305, 309, 599, 634
dwifungsi ABRI, 331, 347, 349, 369, 378, 512, 696

Eddy Tansil, 538
Edi Sudrajat, 498, 503
Eka Cipta Wijaya, 537
Emil Salim, 2, 282, 323, 381, 383, 502, 516, 547, 589, 636

Feisal Tanjung, 529, 666
Filipina, 407, 500, 542
Forum Demokrasi, 19, 519
Fosko, 441, 442
Frans Seda, 2, 318, 323, 669
Fretilin, 17, 402, 404, 405, 406, 600
Front Pancasila, 378
Fuad Hasan, 284

Gatot Subroto, 95, 96, 106, 120, 133, 150, 151, 164, 167, 180, 197, 204, 225, 341
George McT. Kahin, 688
Gerwani, 239, 243, 600
Gestapu, 239, 386, 600, 628, 680, 704, 706
Ginanjar Kartasasmita, 564
Golkar, 16, 17, 18, 19, 20, 193, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 361, 387, 388, 398, 423, 424, 425, 439, 443, 444, 445, 447, 453, 461, 471, 473, 492, 493, 496, 498, 500, 501, 502, 504, 512, 522, 523, 524, 526, 541, 550, 552, 553, 557, 586, 589, 600, 604, 622, 625, 644, 652, 654, 697
Golongan Putih (Golput), 358
Gorbachev, Mikhail, 488
Gunawan Mohamad, 518
Guntur Sukarnoputra, 357
GUPPI, 357, 600

H.R. Dharsono, 245, 590, 656, 682
Hadisubeno Sosrowerdoyo, 133, 145
hak asasi manusia, 518, 519, 523, 378, 518, 526, 547, 571, 595, 653
Hamengkubuwono II, 29
Hamengkubuwono IX, 101, 130, 433, 607, 608, 683
Hamengkubuwono VIII, 608
Hamid Syamsuddin, 197
Hanke, Steve, 557
Hardi, 2, 269, 296, 349
Hariman Siregar, 395
Harimau Indonesia, 102
Harjasudurja, 307
Harjowiyadi, 72
Harjowiyono, 34
Harmoko, 453, 522, 524, 541, 553, 557, 562, 563
Harry Can Silalahi, 238, 355, 404, 630
Haryati, 204
Haryono, 201, 214, 410
Hasan Din, 60
Hasnan Habib, 2, 409
Hasyim Ning, 429
Hendropriyono, 524, 550
Henry Pribadi, 534
Herbert, 685
Hernomo, 151, 153, 160, 187
Hidayat, 174, 687
HKTI, 464, 600
Hugeng Imam Santoso, 345, 376
Hughes, 195, 238, 625, 626, 627, 629, 630, 631, 633, 637, 687
Humpuss, 477, 533
Hutomo Mandala Putra (Tommy), 15

Ibnu Sutowo, 17, 131, 146, 149, 287, 308, 321, 324, 347, 363, 364, 367, 369, 375, 408, 430, 436, 545, 590
Ibrahim Ajie, 193

Ibrahim Risyad, 365
Ibrahim Saleh, 499
Ibu Tien, 20, 116, 147, 148, 167, 188, 197, 265, 367, 368, 376, 377, 378, 395, 400, 419, 428, 429, 444, 485, 497, 535, 539, 540, 547, 553, 580, 592, 604, 666, 703
ICMI, 19, 514, 515, 516, 519, 521, 550, 551, 600, 686
IDEOLOGI, 330
ideologi, 48, 154, 156, 157, 176, 246, 248, 302, 305, 308, 317, 330, 332, 350, 351, 354, 355, 360, 362, 380, 448, 459, 460, 461, 462, 464, 465, 466, 468, 471, 505, 518, 587, 591, 594, 636
Idham Chalid, 267, 328, 434

Jose Ramos Horta, 20, 403, 531
Juan Felix Tampubolon, 572

Kabinet Ampera, 16, 275, 278, 307, 636, 679
Kabinet Dwikora, 253, 267, 274
Kabinet Pembangunan, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 317, 383, 435, 453, 653
KAMI, 15, 247, 249, 250, 254, 600
KAPPI, 322, 340, 600, 640
Kartosuwiryo, 108
Katamso, 210
kebijakan ekonomi, 284, 286, 288, 303, 322, 323, 324, 329, 384
Keluarga Berencana, 328, 452, 593
Kemal Idris, 2, 185, 240, 249, 255, 256, 291, 309, 347, 632, 633, 637, 689
Kennedy, Robert, 166
Kertosudiro, 11, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 112, 618
Ki Hadjar Dewantoro, 152
Kiai Daryatmo, 34
KNIL, 11, 38, 39, 82, 100, 101, 102, 104, 105, 107, 601, 609, 690
KNIP, 52, 601
Kodam, 147, 160, 165, 201, 246, 290, 346, 470, 601, 615, 617, 618, 621, 699
Koga, 178, 179, 185, 601
Kogam, 253, 276, 281, 601
Kohanudad, 161, 616
Kolaga, 15, 179, 185, 187, 193, 223, 601
Komando Jihad, 424, 447, 467
Komunisme, 137, 144, 306, 318, 333, 334, 382, 449, 500, 517, 579, 602
konsensus, 299, 326, 335, 375, 458, 520, 551
Kopassus, 523, 550, 601
Kopkamtib, 15, 19, 238, 278, 279, 336, 341, 356, 388, 391, 394, 395, 424, 427, 457, 464, 469, 502, 503, 601, 652, 661
Koramil, 245, 601
Korpri, 362, 601
KORUPSI, 368, 480
Korupsi, 16, 21, 42, 121, 129, 130, 131, 145, 146, 148, 149, 150, 189, 247, 267, 287, 288, 289, 291, 304, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 379, 391, 393, 410, 422, 426, 427, 429, 434, 438, 446, 483, 533, 538, 540, 551, 567, 570, 571, 593, 646
KOSTRAD, 15, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 185, 186, 187, 188, 191, 193, 196, 197, 198, 199,

200, 202, 203, 207, 208, 210, 220, 221, 223, 224, 245, 255, 256, 257, 258, 263, 277, 286, 291, 296, 304, 321, 325, 366, 412, 501, 523, 550, 559, 562, 601, 623, 624, 625, 627, 632, 633, 637
KOTI, 253, 235, 238, 253, 267, 276, 289, 601, 631, 679
Kotrar, 276, 601
Kromodiryo, 27
Kusno, 80

Lalu Mariyun, 572
Latief Hendraningrat, 70
liberalisme, 247, 268, 274, 324, 361, 462, 579
Liem Siu Liong, 60, 134, 307, 365, 366, 478, 480, 484, 534, 537, 539, 546, 561, 687
Lin Yuhao, 534
Lubang Buaya, 175, 181, 184, 213, 214, 240, 333
Lukman, 234

Mackie, J.A.C., 2, 646, 681, 691
Mahbub Junaidi, 437
MALARI, 17, 387, 393, 397, 399, 402, 405, 426, 549, 602
Malaysia, 15, 16, 178, 179, 185, 186, 187, 188, 253, 254, 274, 279, 280, 343, 407, 601, 631, 678, 687, 692
Mamiek, 15, 197, 476, 479
Mandela, Nelson, 531
Maradean Panggabean, 246
Marcos, 463, 467, 657
Mar'ie Muhammad, 370, 527, 535
Marsinah, 531
Marsudi, 80, 148, 610, 615, 617, 622, 683
Marzuki Darusman, 2, 512, 571, 657, 664, 693
Mashuri, 31, 193, 198, 294, 512
Masyumi, 47, 109, 141, 350, 351, 395, 602
materialisme, 268, 579
May, Brian, 335
McDonald, Hamish, 645, 650, 652, 657
McIntyre, Angus, 693
Megawati Sukarnoputri, 526, 548
Mercu Buana, 365
Merpati, 530
Mintareja, 351
Mochtar Kusumaatmaja, 407
Mochtar Lubis, 644
Mohammad Hatta, 43, 61, 369, 416, 442
Mohammad Natsir, 444
Mohammad Sadli, 282, 362, 636
Mokoginta, 270, 444
Mossman, James, 119
MPR, 17, 18, 21, 273, 298, 309, 311, 331, 348, 359, 378, 382, 383, 432, 433, 434, 435, 448, 453, 461, 493, 494, 496, 499, 503, 512, 520, 522, 524, 557, 558, 560, 562, 563, 564, 566, 570, 590, 602
MPRS, 14, 15, 16, 143, 176, 271, 272, 273, 274, 275, 292, 294, 295, 297, 298, 299, 308, 309, 311, 312, 313, 314, 318, 348, 602, 635, 638, 640
Muchtar Pakpahan, 2, 519, 531
Muhammad Yamin, 436
Muhammadiyah, 34, 551
Mukti Ali, 382
Muladi, 669
Munadi, 126, 133, 153, 159, 165, 246
Munas, 138, 602

Munawar, 108
Murba, 361, 610
Murdiono, 264, 498, 667
Mursyid, 203, 205, 211, 270, 276, 375, 564

Naro, 499
NASAKOM, 137, 177, 252, 602, 624
NICA, 49, 602, 615, 690
NII, 602
NU, 351, 358, 361, 382, 434, 444, 492, 493, 506, 507, 516, 519, 602
Nugroho Notosusanto, 446, 619, 655, 696
Nurcholish Majid, 361, 515, 563, 667

Omar Dhani, 179, 202, 208, 211, 236, 253, 291, 292, 294, 627
OPM, 407, 602
Orde Baru, 4, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 45, 53, 153, 172, 216, 217, 247, 266, 278, 279, 281, 282, 284, 286, 287, 289, 291, 292, 296, 301, 304, 305, 309, 311, 313, 318, 321, 323, 325, 330, 331, 334, 340, 342, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 361, 362, 363, 364, 365, 369, 376, 379, 380, 384, 386, 387, 392, 397, 398, 400, 408, 409, 412, 416, 421, 425, 426, 427, 428, 431, 432, 433, 434, 441, 448, 454, 456, 460, 464, 465, 466, 468, 472, 473, 474, 480, 485, 486, 491, 492, 494, 499, 503, 505, 510, 515, 516, 517, 519, 527, 533, 535, 552, 566, 568, 570, 578, 585, 589, 590, 591, 594, 595, 596, 634, 659, 671, 688
otoritarianisme, 4, 517, 594

Padmodipuro, 29
Pakualam, 92, 603
Pancasila, 4, 18, 118, 137, 156, 157, 201, 214, 247, 260, 261, 281, 282, 283, 288, 302, 304, 305, 308, 310, 311, 330, 331, 332, 333, 348, 351, 352, 356, 359, 360, 361, 378, 387, 426, 433, 435, 439, 440, 441, 444, 445, 448, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 468, 471, 483, 489, 496, 497, 498, 500, 505, 506, 507, 518, 532, 552, 587, 591, 594, 595, 596, 599, 603, 654, 656, 700
Parmusi, 311, 350, 351, 358, 361, 603
PDI, 17, 18, 19, 20, 361, 423, 425, 437, 491, 492, 493, 521, 522, 524, 548, 550, 553, 603, 666
Pelita, 344
Perang Dingin, 517, 588
Perhutani, 370
Perjanjian Linggarjati, 12, 60
Permesta, 13, 14, 137, 603, 686
Permina, 287
Pertamina, 17, 287, 325, 363, 364, 370, 372, 378, 398, 403, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 415, 437, 444, 477, 478, 482, 508, 603, 650, 651, 655
Perti, 361, 603
Pesindo, 47, 66, 67, 69, 107, 222, 603
Peta, 11, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 50, 113, 603, 609, 685, 696
peta, 232

Pierre Tendean, 202, 214
Piet Haryono, 410
PKI, 15, 66, 69, 90, 91, 115, 128, 136, 137, 141, 144, 145, 149, 150, 176, 177, 178, 184, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 199, 201, 206, 213, 214, 216, 217, 219, 220, 221, 223, 224, 228, 231, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 252, 253, 257, 263, 264, 266, 269, 272, 274, 279, 282, 290, 294, 303, 304, 309, 333, 334, 335, 341, 343, 357, 378, 466, 500, 505, 526, 530, 532, 549, 586, 603, 626, 628, 630, 652, 657, 670, 683, 694, 704
PNI, 133, 145, 190, 269, 275, 296, 309, 310, 349, 350, 353, 356, 357, 358, 361, 437, 603
PPP, 17, 18, 19, 20, 361, 423, 424, 425, 433, 444, 461, 491, 492, 499, 550, 553, 603
Prabowo Subianto, 476, 523
Pramudya Ananta Tur, 335
Pranomo, 26
Pranoto Reksosamudro, 63, 147, 203, 206
Prawirowiharjo, 414
Prayogo Pangestu, 481, 534, 537, 544
PRD, 549, 557, 603
Probosutejo, 26, 30, 62, 63, 73, 188, 206, 365, 421, 484, 536, 545, 565, 607, 618
PRRI, 14, 137, 140, 160, 186, 284, 350, 603
PSI, 141, 154, 281, 283, 284, 285, 309, 345, 349, 355, 383, 388, 395, 603
PSII, 361, 603
PT Berdikari, 321, 364
PT Bogasari, 365, 367
PT Dwi Bakti, 133
PT Dwi Dasa Karya, 133
PT Indosat, 534
PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio, 437
PT Mega, 365
PT Nurtanio, 508
PT Nusantara Ampera Bakti, 558
PT PAL, 527
PT Pangeran Lines, 133, 150
PT Rejo Sari Bumi, 399
PT Tarumatex, 365
PT Wasesa Lines, 150
PUDI, 550, 603

Raden Hartono, 541
Radius Prawiro, 323, 324, 381, 383, 502
Ratna Sari Dewi, 204
Reformasi Ekonomi, 283
reformasi ekonomi, 284, 304
regionalisme, 487
Reksosiswo, 64
Ridwan Fataruddin, 530
Rodgers, Peter, 446
Rosihan Anwar, 355, 644, 647
RPKAD, 160, 162, 172, 175, 186, 202, 203, 209, 224, 241, 257, 259, 304, 331, 603, 637
RRI, 81, 198, 203, 204, 208, 209, 264, 603
Rudini, 502, 506, 510, 513
Rukman, 158, 159, 167, 269
Ruslan Abdulgani, 267, 630

Saadillah Mursyid, 564
Sabur, 205, 259, 260, 261, 262
Sadat, Anwar, 628

Salim Said, 2, 68, 69, 79, 82, 611, 613, 614, 615, 698
Santos, Almeida, 403
Sanusi Harjadinata, 457
Sarbini Martodiharjo, 192
Sarbini Sumawinata, 283, 395, 636, 699
Sarjono, 51, 54, 59, 60, 64, 80, 81, 88, 93, 94, 108
Sarwono Kusumaatmaja, 471, 530
Satrilo, 174
Sayidiman Suryohadiprojo, 380, 512, 699
SBSI, 519, 531, 604
Schwarz, Adam, 658, 659, 663, 664, 665
Selo Sumarjan, 10, 282, 614, 653
Sembiring, 525
Seskoad, 82, 151, 154, 156, 159, 269, 270, 284, 443, 604, 621, 622, 679
Sewaka, 109, 618, 699
Sigit Haryoyudanto, 13, 107
Siliwangi, 63, 66, 67, 68, 69, 108, 117, 120, 140, 154, 158, 159, 160, 185, 193, 203, 209, 245, 292, 293, 295, 389, 431, 441, 447, 590, 617, 621, 637, 699
Singgih, 524
Siswondo Parman, 46
Siti Hardiyanti Hastuti, 73, 700
Siti Hediyati Haryadi, 14, 152, 476
Siti Hutami Endang Adiningsih, 15, 168, 476
Slamet Bratanata, 287, 307, 364
Slamet Riyadi, 109, 180
SOB, 14, 129, 130, 131, 604
SOBSI, 69, 604
Sofyan, 108, 109, 110, 481, 557, 632, 702
Sofyan Wanandi, 481, 557, 632, 702
Sofyar, 366
Solihin G.P, 399
Somare, Michael, 407
Soumokil, 100
SPSI, 464, 604
Sri Bintang Pamungkas, 530, 550
Sruhardoyo, 64, 70, 88, 94, 95, 159, 201
SSKAD, 14, 143, 147, 150, 151, 154, 156, 157, 158, 165, 167, 221, 270, 604, 621, 622, 623, 678, 704
Subadio Sastrosatomo, 395
Subagyo Hadi Siswoyo, 529, 559
Subandrio, 192, 236, 253, 256, 259, 261, 264, 277, 291, 624, 629, 633
Subchan Z.E., 238
Subono, 165, 172
Subroto, 2, 95, 96, 106, 120, 133, 150, 151, 164, 167, 180, 197, 204, 225, 282, 323, 341, 383, 387, 502, 589, 623, 636, 641, 669, 702
Sucipto, 238, 278, 345
Sucipto Yudodiharjo, 345
Sudarisman, 91, 702
Sudarmo, 64, 69, 70, 88, 94
Sudarsono, 48, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 590, 633, 668, 678
Sudharmono, 264, 319, 367, 421, 436, 445, 448, 450, 453, 471, 472, 473, 478, 494, 495, 496, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 521, 530, 564, 655, 660, 702
Sudharto, 46
Sudirman, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 87, 89, 90, 95, 96, 98, 116, 124, 174, 192, 588, 697, 698
Sudisman, 334
Sudomo, 165, 167, 172, 345, 346, 388, 395, 427, 442, 444, 445, 464, 501, 503, 513, 541, 623,

697
Sudwikatmono, 28, 365, 371, 481, 539, 546
Sugiarto, 498
Sugiyono, 210
Suhardiman, 321, 369
Suherman, 210
Suhud, 81, 90, 388, 394
Sujiman, 198
Sujono, 51, 59, 64, 80, 88, 91, 94, 128, 132, 133, 134, 135, 151, 153, 216, 222, 277, 281, 307, 320, 321, 323, 324, 354, 365, 369, 388, 392, 393, 394, 395, 404, 414, 468, 470, 570, 581, 583, 620, 622
Sujono Atmonegoro, 570
Sujono Humardani, 128, 133, 153, 277, 307, 320, 321, 323, 324, 354, 365, 392, 404, 414, 468, 470, 581, 583
Sukaca, 133
Sukamdani, 368, 377
Sukandar, 55, 58
Sukarni, 89
Sukasno, 81
Sukiman, 109
Sukirah, 11, 25, 26, 27, 29, 30
Sukitman, 213
Sulardi, 33
Sumantri, 147, 678
Sumarsono, 2, 67, 68, 610, 613
Sumitro Joyohadikusumo, 187, 280, 284, 303, 318, 322, 323, 365, 383, 392, 427, 476, 545
Sumiyarsono, 59
Sunarso, 132, 700
Sunarto Kusumodirjo, 52
Sungkono, 147, 174
Sunjoyo, 53
Supardi, 67
Supersemar, 15, 263, 264, 265, 266, 267, 271, 273, 274, 295, 313, 334, 378, 383, 401, 421, 586, 604, 633, 682
Suprapto, 153, 201, 214
Suprayogi, 174, 632
Suradi, 115
Surono, 270, 394, 435
Suryadi, 20, 491, 521, 524, 548
Suryajaya, William, 365, 481, 536
Suryo Wiryohadiputro, 307
Suryohadi, 30, 607, 611, 618, 619, 703
Suryosumpeno, 127, 141, 210, 211, 241, 269, 270
Susalit, 57
Sutan Syahrir, 52, 186
Sutanto, 151, 153, 365, 534
Sutomo, 133
Sutopo Yuwono, 336, 380, 394, 395, 464
Sutoyo Siswomiharjo, 201
Suwarto, 154, 155, 157, 281, 283, 284, 622, 703, 704
Suwito Haryoko, 140
Suyono, 529, 550
Syafruddin Prawiranegara, 444, 656
Syahrir, 52, 53, 56, 186, 369, 396, 588, 609
Syam Kamaruzzaman, 46, 195
Syarif Thayeb, 243, 247, 431
Syarwan Hamid, 562

Tan Malaka, 53, 56, 606, 695, 704
Timor Timur, 17, 19, 402, 403, 404, 405, 406, 446, 488, 489, 513, 523, 524, 531, 547, 569, 650
TKR, 46, 50, 604, 611
TNI, 12, 67, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 82, 86, 89, 92, 93, 95, 100, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 110, 113, 114, 129, 143, 146, 150, 151, 258, 271, 283, 604, 611, 615, 617, 626, 628, 630,

699, 705
transmigrasi, 327, 435, 489, 620
Trikora, 162, 164, 173, 604, 679
Tritura, 250, 604, 706
Tun Abdul Razak, 187, 280

UDT, 17, 402, 405, 604
Umar Joi, 54, 55, 57
Umar Slamet, 46
Umar Wirahadikusumah, 18, 198, 447, 625, 687
Untung, 115, 167, 172, 198, 199, 201, 203, 204, 205, 206, 210, 219, 220, 223, 225, 226, 227, 228, 243, 290, 610, 664, 694, 706
Utip Sumoharjo, 47, 60
Usman Sastrodibroto, 210

W.S. Rendra, 392
Wahono, 201, 501, 522, 523, 550
Wahyudi, 206
Wanjakti, 174, 194, 245, 604
Wattimena, Leo, 165, 202, 211
Whitlam, Gough, 403
Wijoyo Nitisastro, 281
Williams, Clive, 577
Wiranto, 529, 550, 558, 562, 563, 565, 566, 568, 668, 699
WTO, 535, 605
Wuryantoro, 27, 28, 30, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 327

Xanana Gusmao, 20, 531

Y.B. Mangunwijaya, 48, 611
Y.B. mangunwijaya, 697
Yap Thiam Hien, 421, 690, 707
Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, 483
Yayasan Beasiswa Supersemar, 401
Yayasan Dana Abadi Karya Bakti, 484, 599
Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, 485
Yayasan Dharmais, 401, 483, 484
Yayasan Harapan Kita, 377, 484
Yayasan Mangadek, 367
Yoga Sugama, 126, 135, 138, 141, 153, 174, 187, 199, 201, 255, 277, 395, 396, 407, 546
Yos Sudarso, 166, 169
YPTE, 131, 132, 133, 134, 147, 151, 605
Yusril Ihza Mahendra, 563
Yusuf Muda Dalam, 289, 290, 292
Yuwono Sudarsono, 590, 668

Zanten, van, 81
Zulkifli Lubis, 120, 126

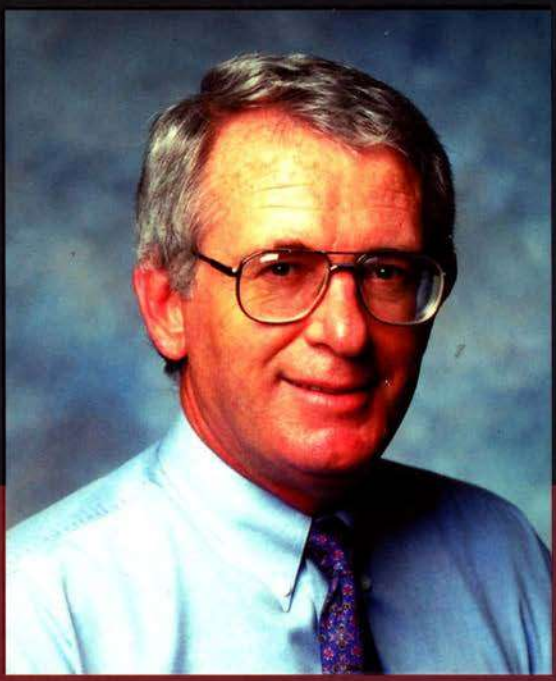

R.E. Elson adalah Profesor Sejarah Asia Tenggara pada School of History, Philosophy, Religion, and Classics di University of Queensland, Brisbane. Ia salah seorang sejarawan terkemuka kajian Indonesia dan Asia Tenggara, dan telah menulis tentang dampak sosial industri gula di Jawa dan tentang sejarah umum pertanian di Asia Tenggara.

Muncul sebagai pemimpin di tengah kekacauan sosial yang ekstrem dan kekerasan massal yang melanda Indonesia pada 1966, Suharto telah menjadi ikon penting Indonesia modern. Ia membangun sebuah rezim kuat yang terkenal sebagai Orde Baru, dan terus memimpin negara terpadat keempat dunia ini hingga jatuh secara tragis pada 1998.

Buku ini memberikan wawasan memukau tentang seorang pria yang naik dari masa muda yang biasa-biasa saja untuk kemudian mendesakkan kekuatan luar biasa dalam memimpin sebuah bangsa yang kompleks dan bergejolak, namun figurnya tetap misterius dan membingungkan. Ia (bercita-cita) menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang kuat, bersatu, dan makmur. Ia (ingin) membangun sistem kekuasaan dan politik yang menjamin stabilitas keamanan dalam negeri dan kehormatan bangsa ini di dunia internasional. Namun, setelah hampir setengah abad menjadi tokoh yang paling berpengaruh, ia terhempas dari istana dengan cara yang memilukan, lalu disikapi dengan cara yang berlawanan: dipuji sebagai—antara lain—pemersatu bangsa, dikutuk sebagai—antara lain—simbol pelanggaran HAM dan korupsi gila-gilaan.

Didasarkan pada sejumlah wawancara, arsip, dan surat kabar, buku ini memberikan informasi yang sangat rinci tentang tokoh misterius dan kontroversial ini, secara sistematis dan objektif, untuk pertama kalinya!

***

"... buku ini 'lebih manusiawi' dan 'sungguh-sungguh objektif'."
Nicholas Tarling, *New Zealand Journal of Asian Studies*

ISBN 979-99013-0-8

MINDA